BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5679);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DAN

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan sasaran pembangunan Daerah jangka menengah selama 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat dan RPJPD.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prioritas strategi, arah kebijakan pembangunan, indikator kinerja utama dan indikator penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RPJMD sebagai pedoman, antara lain:

a. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;

b. penyusunan RKPD; dan

c. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

(2) Tujuan penetapan RPJMD, antara lain untuk:

a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;

b. menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran; dan

c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah, serta dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

(1) RPJMD tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan;

b. bab II gambaran umum daerah;

c. bab III visi dan misi program prioritas pembangunan daerah;

d. bab IV program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan

e. bab V penutup.

(2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

(1) Pemerintahan Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.

(2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan jangka menengah Daerah;

b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD dan RTRW Daerah; dan

c. kesesuaian antara capaian hasil Pembangunan Daerah dengan indikator utama Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.

(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan jangka menengah daerah.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. terjadi perubahan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Program Perangkat Daerah memuat program selama 5 (lima) tahun pada periode RPJMD tahun 2025–2029, ditambah dengan program tahun 2030.

(2) Penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi tahun 2029–2030 dan sebagai dasar penyusunan RKPD tahun 2030.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2030.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT (4/141/2025)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

A. Dasar Pemikiran

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi berkelanjutan. di samping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan melaksanakan pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat, rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat serta RPJPD Kabupaten Bandung Barat.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan

C. Prinsip-prinsip

Prinsip RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

D. Pendekatan

RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan:

a. teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
b. partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesetaraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan;
c. politis, yaitu mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan;
d. atas-bawah dan bawah-atas, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
e. holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
f. integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
g. spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

E. Tahapan

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 terdiri dari:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Konsultasi rancangan awal;

f. Perumusan rancangan akhir;

g. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir;

h. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD;

i. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

j. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; dan

k. Penetapan Peraturan Daerah.

F. Muatan

Muatan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 terdiri dari:

a. Pendahuluan;

b. Gambaran Umum Daerah;

c. Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;

d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah;

e. Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

"pendahuluan" memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Huruf b

"gambaran umum daerah" memuat gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, standar pelayanan minimal, kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi, BUMD yang mendukung pelayanan pemda. Selain itu, juga memuat gambaran keuangan daerah penjelasan tentang realisasi APBD Tahun anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029 dan

Huruf c

"visi dan misi program prioritas pembangunan daerah" memuat penjelasan Visi Daerah Tahun 2025-2029 yaitu kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2029. Selain itu, juga memuat Misi Daerah Tahun 2025-2029 yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2029.

Huruf d

"program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah" memuat program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029 serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memuat program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yaitu target tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) dan target penyelenggaran pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD).

Huruf e

"penutup" memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025-2029

RANCANGAN AKHIR
RPJMD
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025 - 2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih, sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2029 yang dalam pencapaian target pembangunannya melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandung Barat, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1-1**
1.1 Latar Belakang 1-1
1.2 Dasar Hukum 1-6
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 1-10
1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan RPJMN 1-11
1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat 1-12
1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan RPJPD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD 1-12
1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan RTRW Kabupaten Bandung Barat 1-13
1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Barat 1-14
1.4 Maksud dan Tujuan 1-16
1.5 Sistematika Penulisan 1-17

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH **2-1**
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2-1
2.1.1 Aspek Geografi 2-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 2-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 2-6
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2-19
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 2-23
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 2-27
2.1.1.6 Resiliensi Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana 2-35
2.1.2 Aspek Demografi 2-40
2.1.2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan, Komposisi dan Kepadatan Penduduk 2-40
2.1.2.2 Masyarakat Adat 2-42
2.1.2.3 Trend Demografi Kabupaten Bandung Barat 2-44
2.1.3 Kondisi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 2-52
2.1.3.1 Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal 2-52
2.1.3.2 Kebutuhan Air Bersih 2-53
2.1.3.3 Kebutuhan Energi/Listrik 2-55
2.1.3.4 Kebutuhan Infrastruktur Pengelolaan Sampah 2-56
2.1.3.5 Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan 2-58
2.1.3.6 Kebutuhan Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik 2-60

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-63
2.1.4.1 Kesejahteraan Ekonomi 2-63
2.1.4.2 Kesehatan Untuk Semua 2-78
2.1.4.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata 2-82
2.1.4.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 2-87
2.1.4.5 Beragama, Bermaslahat dan Berkebudayaan Maju 2-88
2.1.4.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif 2-95
2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah 2-100
2.1.5.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 2-100
2.1.5.2 Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi 2-104
2.1.5.3 Penerapan PDRB Hijau/Ekonomi Hijau 2-110
2.1.5.4 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi 2-113
2.1.5.5 Daya Saing Iklim Investasi 2-116
2.1.6 Aspek Pelayanan Umum 2-119
2.1.6.1 Layanan Urusan Wajib Dasar 2-120
2.1.6.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar 2-138
2.1.6.3 Layanan Urusan Pilihan 2-158
2.1.6.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah 2-164
2.1.6.5 Unsur Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah 2-165
2.1.6.6 Unsur Pemerintahan Umum 2-167
2.1.7 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2-168
2.1.8 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2-175
2.1.8.1 SPM Bidang Pendidikan 2-176
2.1.8.2 SPM Bidang Kesehatan 2-178
2.1.8.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum 2-180
2.1.8.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat 2-181
2.1.8.5 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat 2-182
2.1.8.6 SPM Bidang Sosial 2-183
2.1.9 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Bandung Barat 2-184
2.1.9.1 Proyek/Program Strategis Nasional di Kabupaten Bandung Barat 2-184
2.1.9.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat 2-185
2.1.9.3 Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Barat 2-186
2.1.10 BUMD yang Mendukung Pelayanan Pemerintah Daerah 2-187
2.2 Gambaran Keuangan Daerah 2-189
2.2.1 Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024 2-190
2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD (2020 - 2024) 2-191
2.2.1.2 Pendapatan Daerah 2-191
2.2.1.3 Belanja Daerah 2-193
2.2.1.4 Pembiayaan Daerah 2-194
2.2.1.5 Neraca Daerah 2-195
2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020-2024 2-200
2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 2-200
2.2.2.2 Analisis Pembiayaan 2-201
2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030 2-201

2.2.3.1 Kebijakan dan Proyeksi Kerangka Pendanaan 2-201
2.2.3.2 Alternatif Pendanaan Pembangunan 2-208
2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis 2-210
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 2-210
2.3.1.1 Aspek Geografi 2-210
2.3.1.2 Aspek Demografi 2-213
2.3.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-216
2.3.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2-221
2.3.1.5 Aspek Pelayanan Umum 2-227
2.3.2 Isu Strategis Daerah 2-229
2.3.2.1 Isu Global 2-229
2.3.2.2 Isu Strategis Nasional 2-235
2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat 2-237
2.3.2.4 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan 2-242
2.3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat 2-244

BAB 3 VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran 3-1
3.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 3-1
3.1.2 Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 3-5
3.1.3 Tujuan dan Sasaran 3-11
3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 3-18
3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025-2029 3-18
3.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan 3-28
3.2.3 Pentahapan Pembangunan 3-38
3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah 3-42
3.2.4.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 3-42
3.2.4.2 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional 3-61
3.2.4.2.1 Program Makan Bergizi Gratis 3-61
3.2.4.2.2 Sekolah Rakyat 3-62
3.2.4.2.3 Koperasi Merah Putih 3-63
3.2.4.2.4 Program 3 Juta Rumah 3-64
3.2.4.3 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Barat 3-65

BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH 4-1
4.1 Program Perangkat Daerah 4-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4-53

BAB 5 PENUTUP 5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa di Kab Bandung Barat	2-1
Tabel 2.2	Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024	2-9
Tabel 2.3.	Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Hortikultura di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024	2-10
Tabel 2.4.	Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024	2-11
Tabel 2.5.	Data Potensi Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024	2-13
Tabel 2.6.	Rekapitulasi Populasi Ternak Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	2-13
Tabel 2.7.	Potensi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan di Kab Bandung Barat Tahun2020 – 2024	2-14
Tabel 2.8.	Data Produksi Ikan Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024	2-15
Tabel 2.9.	Produksi Komoditas Perikanan Unggulan Kab Bandung Barat 2020-2024	2-15
Tabel 2.10.	Potensi Wisata Alam di Kab Bandung Barat	2-16
Tabel 2.11.	Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Bandung Barat	2-20
Tabel 2.12.	Status Daya Dukung Air di Kabupaten Bandung Barat	2-20
Tabel 2.13.	Luas Daya Dukung Pangan (Beras) di Kabupaten Bandung Barat	2-21
Tabel 2.14.	Skenario Proyeksi Daya Dukung Penyedia Pangan di Kab Bandung Barat	2-22
Tabel 2.15.	Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat	2-25
Tabel 2.16.	Kebutuhan Air Bersih di Kab. Bandung Barat Yang Bersumber Dari Air Permukaan Yang Telah Termanfaatkan	2-25
Tabel 2.17.	Potensi Pemenuhan Air di Kab. Bandung Barat Yang Bersumber Dari Bendung	2-25
Tabel 2.18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	2-27
Tabel 2.19.	Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat s.d Maret 2025	2-29
Tabel 2.20.	Pengelolaan Sampah Insinerasi di Kabupaten Bandung Barat	2-29

Tabel 2.21. Pengelolaan Sampah TPS3R di Kabupaten Bandung Barat 2-30
Tabel 2.22. Pengelolaan Sampah Bank Sampah di Kabupaten Bandung Barat..... 2-30
Tabel 2.23. Pengelolan Sampah oleh Pegiat Maggot di Kabupaten Bandung Barat..... 2-32
Tabel 2.24. Pengelolan Sampah oleh Pegiat Organik di Kabupaten Bandung Barat..... 2-34
Tabel 2.25. Pengelolan Sampah oleh Pelaku Usaha di Kabupaten Bandung Barat 2-34
Tabel 2.26. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir 2-36
Tabel 2.27. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana..... 2-37
Tabel 2.28. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024..... 2-38
Tabel 2.29. Hasil Perhitungan Emisi GRK Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2024 .. 2-40
Tabel 2.30. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 2-41
Tabel 2.31. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030..... 2-44
Tabel 2.32. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 2-44
Tabel 2.33. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 2-47
Tabel 2.34. Proyeksi Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030..... 2-48
Tabel 2.35. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030..... 2-53
Tabel 2.36. Standar Kebutuhan Air Bersih..... 2-54
Tabel 2.37. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 s/d 2030..... 2-54
Tabel 2.38. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 s/d 2030..... 2-55
Tabel 2.39. Standar Acuan Timbulan Sampah..... 2-56
Tabel 2.40. Proyeksi Volume Timbulan Sampah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030..... 2-56
Tabel 2.41. Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan..... 2-57
Tabel 2.42. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030 2-58
Tabel 2.43. Proyeksi Jumlah Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030..... 2-60
Tabel 2.44. Proyeksi Jumlah Kebutuhan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030 2-61

Tabel 2.45. Proyeksi Jumlah Kebutuhan Gedung Sekolah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030 2-62
Tabel 2.46. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 Kab Bandung Barat 2-63
Tabel 2.47. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kab Bandung Barat, Tahun 2020-2024 2-64
Tabel 2.48. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 Kab Bandung Barat 2-65
Tabel 2.49. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-66
Tabel 2.50. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kab Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen) 2-67
Tabel 2.51. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-68
Tabel 2.52. Inflasi Y to Y Kota di Jawa Barat Tahun 2024 2-69
Tabel 2.53. Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-70
Tabel 2.54. Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2024 (Persen) 2-71
Tabel 2.55. Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-72
Tabel 2.56. Data Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Data P3KE di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023 2-72
Tabel 2.57. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2020-2024 2-74
Tabel 2.58. Indeks Pembangunan Manusia Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-76
Tabel 2.59. Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Barat Barat Tahun 2024 ... 2-78
Tabel 2.60. Umur Harapan Hidup Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Tahun) 2-80
Tabel 2.61. Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-81
Tabel 2.62. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kab Bandung Barat Tahun 2024 2-81
Tabel 2.63. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kab Bandung Barat 2020- 2024 2-82
Tabel 2.64. Harapan Lama Sekolah Kab/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun) 2-83
Tabel 2.65. Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 2-84
Tabel 2.66. Data Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kab Bandung Barat tahun 2024 2-88

Tabel 2.67. Target dan Realisasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-88
Tabel 2.68. Potensi Keragaman Budaya Kabupaten Bandung Barat 2020 – 2024 2-89
Tabel 2.69. Data Potensi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kab. Bandung Barat 2-89
Tabel 2.70. Data Potensi Adat Budaya Kabupaten Bandung Barat 2-94
Tabel 2.71. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kab Bandung Barat 2021 – 2024 2-98
Tabel 2.72. Indikator Kinerja Pemuda dan Olahraga Di Kab Bandung Barat 2020 – 2024 2-98
Tabel 2.73. Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-100
Tabel 2.74. Kondisi ASN Kab Bandung Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024 2-102
Tabel 2.75. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan 2022-2024 (persen) 2-104
Tabel 2.76. Distribusi Presentase PDRB Kab Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen) 2-105
Tabel 2.77. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-107
Tabel 2.78. Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Rp.000/kapita/tahun) 2-109
Tabel 2.79. PDRB Hijau Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2022 2-111
Tabel 2.80. PDRB Hijau Atas Dasar Harga Konstan Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2022 2-112
Tabel 2.81. Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 2-113
Tabel 2.82. Capaian IKG Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-114
Tabel 2.83. Data Kondisi Jalan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-114
Tabel 2.84. Data Jumlah Angkutan Barang di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-115
Tabel 2.85. Aksebilitas Kendaraan Umum di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-115
Tabel 2.86. Data Infrastruktur Fasilitas Kegiatan Ekonomi di Kab. Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-116
Tabel 2.87. Indeks Rasa Aman Kab Bandung Barat Tahun 2023 2-117
Tabel 2.88. Jumlah Izin yang Terbit Sesuai SOP di Kab. Bandung Barat Tahun 2024 2-118
Tabel 2.89. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-119
Tabel 2.90. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kab Bandung Barat Tahun 2020 –2024 2-120

Tabel 2.91. Kondisi Ruang Kelas SD di Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-121
Tabel 2.92. Kondisi Ruang Kelas SMP Di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-121
Tabel 2.93. Data Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-122
Tabel 2.94. Kondisi Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator BB/U Tahun 2020 – 2024 . 2-123
Tabel 2.95. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-123
Tabel 2.96. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-124
Tabel 2.97. Panjang dan Ruas Jalan di Kab Bandung Barat 2-125
Tabel 2.98. Capaian Indikator Kinerja Urusan PUTR Di Kab Bandung Barat tahun 2020 – 2024 2-128
Tabel 2.99. Data Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020 – 2024 2-129
Tabel 2.100. Data Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2020 – 2024 2-130
Tabel 2.101. Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh di Kab. Bandung Barat 2020-2024 . 2-131
Tabel 2.102. Realisasi Rehab/Perbaikan Rutilahu Tahun 2020 – 2024 2-132
Tabel 2.103. Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum 2-132
Tabel 2.104. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kab Bandung Barat tahun 2020 – 2024 2-133
Tabel 2.105. Daerah Rawan Trantibum di Kabupaten Bandung Barat 2-134
Tabel 2.106. Kejadian Bencana di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 2-135
Tabel 2.107. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Linmas Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-136
Tabel 2.108. Data Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kab Bandung Barat tahun 2024 2-137
Tabel 2.109. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Di Kab Bandung Barat tahun 2020 – 2024 2-137
Tabel 2.110. Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-138
Tabel 2.111. Capaian IDG dan IPG Di Kab. Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-139
Tabel 2.112. Data Kejadian Kekerasan terhadap Anak, Perempuan dan KDRT Di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-140
Tabel 2.113. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kab Bandung Barat tahun 2020 – 2024 2-140
Tabel 2.114. Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024 2-141

Tabel 2.115. Desa Dan Penduduk Sangat Rawan Pangan, Rawan Pangan Dan Tahan Pangan di Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-142

Tabel 2.116. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Di Kab Bandung Barat tahun 2020 – 2024 2-142

Tabel 2.117. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Di Kab Bandung Barat tahun 2020 – 2024 2-143

Tabel 2.118. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-144

Tabel 2.119. Pengelolaan Sampah di Kab Bandung Barat tahun 2024 2-145

Tabel 2.120. Capaian Indikator Kinerja Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kab Bandung Barat tahun 2020 – 2024 2-146

Tabel 2.121. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-146

Tabel 2.122. Fertilitas dan Mortalitas Kab Bandung Barat Hasil Long Form SP Tahun 2020 2-148

Tabel 2.123. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kab Bandung Barat tahun 2020 – 2024 2-148

Tabel 2.124. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-149

Tabel 2.125. Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-150

Tabel 2.126. Jumlah dan Kondisi Koperasi Tahun 2020 – 2024 2-150

Tabel 2.127. Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-151

Tabel 2.128. Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2020 – 2024 2-151

Tabel 2.129. Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kab. Bandung Barat Tahun 2024 2-152

Tabel 2.130. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-153

Tabel 2.131. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-154

Tabel 2.132. Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-155

Tabel 2.133. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Di Kab Bandung Barat tahun 2020–2024 2-156

Tabel 2.134. Indikator Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-157

Tabel 2.135. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-157
Tabel 2.136. Data Produksi Ikan Kab. Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-158
Tabel 2.137. Produksi Komoditas Perikanan Unggulan di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-158
Tabel 2.138. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-158
Tabel 2.139. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-159
Tabel 2.140. Realisasi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-160
Tabel 2.141. Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Pertanian Di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-161
Tabel 2.142. Realisasi Komoditas Peternakan di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-161
Tabel 2.143. Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Peternakan Di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-162
Tabel 2.144. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-163
Tabel 2.145. Capaian Indikator Kinerja Urusan Industri Di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-164
Tabel 2.146. Capaian Indikator Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Di Kab Bandung Barat 2020-2024 2-165
Tabel 2.147. Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-166
Tabel 2.148. Capaian Indikator Kinerja Unsur Pemerintahan Umum di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024 2-167
Tabel 2.149. Daftar Indikator Terpilih (Data, target, dan scorecard indikator) untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat 2-170
Tabel 2.150. Hasil Proyeksi Pencapaian SDGs Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2030 Berdasarkan Scorecard 2-174
Tabel 2.151. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Pendidikan 2-177
Tabel 2.152. Permasalahan SPM Bidang Pendidikan Pendidikan 2-177
Tabel 2.153. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Kesehatan 2-178
Tabel 2.154. Permasalahan SPM Bidang Kesehatan 2-178
Tabel 2.155. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum 2-180
Tabel 2.156. Permasalahan SPM Bidang Pekerjaan Umum 2-180

Tabel 2.157. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat 2-181
Tabel 2.158. Permasalahan SPM Bidang Perumahan Rakyat 2-181
Tabel 2.159. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat 2-182
Tabel 2.160. Permasalahan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat 2-183
Tabel 2.161. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Sosial 2-183
Tabel 2.162. Permasalahan SPM Bidang Sosial 2-184
Tabel 2.163. Key Performance Indicator Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 2-189
Tabel 2.164. Realisasi Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-192
Tabel 2.165. Realisasi Belanja Daerah Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-193
Tabel 2.166. Realisasi Pembiayaan Daerah Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-195
Tabel 2.167. Neraca Daerah Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 (dalam rupiah) 2-197
Tabel 2.168. Realisasi Proporsi Belanja Pegawai Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 ... 2-200
Tabel 2.169. Realisasi Proporsi Belanja Pegawai Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 ... 2-200
Tabel 2.170. Defisit/Surplus Anggaran Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-201
Tabel 2.171. Proyeksi Jumlah ASN Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030 2-204
Tabel 2.172. Proyeksi Keuangan Daerah Kab Bandung Barat Tahun 2025-2029 2-205
Tabel 2.173. Permasalahan Pembangunan Aspek Geografi 2-212
Tabel 2.174. Permasalahan Pembangunan Aspek Demografi 2-215
Tabel 2.175. Permasalahan Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-220
Tabel 2.176. Permasalahan Pembangunan Aspek Daya Saing Daerah 2-225
Tabel 2.177. Permasalahan Pembangunan Aspek Pelayanan Umum 2-228
Tabel 2.178 Kesimpulan Isu Strategis Daerah 2-245
Tabel 3.1. Penjelasan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 3-2
Tabel 3.2. Rumusan Kerangka Penjabaran Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 3-5
Tabel 3.3. Persandingan Prioritas Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 3-10
Tabel 3.4. Indikator Visi Daerah pada RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 3-12
Tabel 3.5. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka 3-15

Menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 .....

Tabel 3.6. Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 3-19

Tabel 3.7. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kab. Bandung Barat 3-28

Tabel 3.8. Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat 3-35

Tabel 3.9. Tema dan Tahapan Pembangunan Tahunan Kab. Bandung Barat Tahun 2025-2029 3-39

Tabel 3.10. Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 3-48

Tabel 3.11. Langkah Strategis dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 3-58

Tabel 3.12. Sandingan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 3-68

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Menurut Bidang Urusan 4-2

Tabel 4.2. Program Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil Cascading Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 4-28

Tabel 4.3. Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030 4-54

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030 4-55

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030 4-56

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah Tingkat Dampak (*Impact*) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030 4-59

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Daerah Tingkat Hasil (*outcome*) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030 4-63

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030 4-80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Proses Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029	1-4
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029	1-5
Gambar 1.3	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	1-11
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kab Bandung Barat	2-2
Gambar 2.2.	Peta Batas Wilayah Kab Bandung Barat dengan Kab/Kota Sekitarnya	2-3
Gambar 2.3.	Peta Kabupaten Bandung Barat sebagai Pintu Masuk dan Bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung	2-4
Gambar 2.4.	Peta Sumber Daya Air Kabupaten Bandung Barat	2-24
Gambar 2.5.	Peta Kawasan Rawan Bencana Kab Bandung Barat	2-38
Gambar 2.6.	Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	2-41
Gambar 2.7.	Piramida Penduduk Kab. Bandung Barat Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020	2-42
Gambar 2.8.	Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030	2-50
Gambar 2.9.	Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	2-73
Gambar 2.10.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Prov Jawa Barat dan Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	2-75
Gambar 2.11.	Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	2-77
Gambar 2.12.	Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020–2024	2-79
Gambar 2.13.	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kab. Bandung Barat, Tahun 2020-2024	2-82
Gambar 2.14.	APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	2-85
Gambar 2.15.	APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024	2-86
Gambar 2.16.	APS Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 –	2-87

2024 .....

Gambar 2.17. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kab Bandung Barat Tahun 2021 – 2023 2-95

Gambar 2.18. Capaian Indeks Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kab Bandung Barat tahun 2020 – 2024 2-96

Gambar 2.19. Kondisi Capaian Kualitas Keluarga di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2024 2-97

Gambar 2.20. Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024 2-100

Gambar 2.21 Piramida Penduduk Kab Bandung Barat Tahun 2024 2-101

Gambar 2.22. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab Bandung Barat 2020 – 2024 2-103

Gambar 2.23. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-108

Gambar 2.24. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 – 2024 2-110

Gambar 2.25. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024 2-192

Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bandung Barat 3-31

Gambar 3.2 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat 3-34

PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses dinamis dan progresif untuk mencapai tujuan berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing. Dalam rangka menjalankan pembangunan yang efektif dan mencapai tujuan pembangunan, maka diperlukan perencanaan pembangunan didaerah yang sistematis. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan secara berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai dengan periodisasi dan subtansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahunan selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah (RKPD dan Renja PD).

Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD yang sebagian muatan substansinya menjadi pedoman bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas daerah. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November Tahun 2024. Berdasarkan hasil Pilkada tersebut, KPU Kabupaten Bandung Barat menetapkan pasangan **Jeje Ritchie Ismail – Asep Ismail** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat periode 2025- 2030 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat terpilih, berdasarkan pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyusunan RPJMD wajib diselesaikan dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Dokumen RPJMD sebagaimana disebutkan pada pada pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Kabupaten Bandung Barat dengan motto “WIBAWA MUKTI KERTA RAHARJA” mengandung arti bahwa suatu tatanan kehidupan yang mencerminkan tekad keinginan kuat dalam menata kehidupan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan, yaitu sejahtera lahir maupun bathin dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan cita-cita luhur Kabupaen Bandung Barat tersebut, Jeje Ritchie Ismail – Asep Ismail sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat periode 2025- 2030 memiliki Visi **Bandung Barat “AMANAH” (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis)** yang diterjemahkan melalui 6 (enam) Misi, yaitu: (1) Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah; (3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel; (4) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah; (5) Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan; dan (6) Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

Dalam pelaksanaanya, proses/tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 selain mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, dimana dijelaskan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Dengan dimikian, diharapkan muatan substansi dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dapat dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan berorientasi pada proses menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
b. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
c. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.

Serta dengan mengedepankan aspek tematik, holistik, integratif dan sinergis yang berorientasi pada substansi, yaitu:

a. Pendekatan holistik-tematik, dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bag/keg pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b. Pendekatan integrative, dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
c. Pendekatan spasial, dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Perpaduan pendekatan dan aspek metode perencanaan ini diharapkan dapat membuat RPJMD Kabupaten Bandung Barat menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas sesuai dengan standar akademik dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mendukung terwujudnya **Bandung Barat "AMANAH" (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis)** sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian **Jabar Istimewa (Lembur diurus Kota ditata)** serta lebih jauh juga untuk mendukung upaya cita-cita **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.** Selanjutnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025, alur proses penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Alur Proses Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029

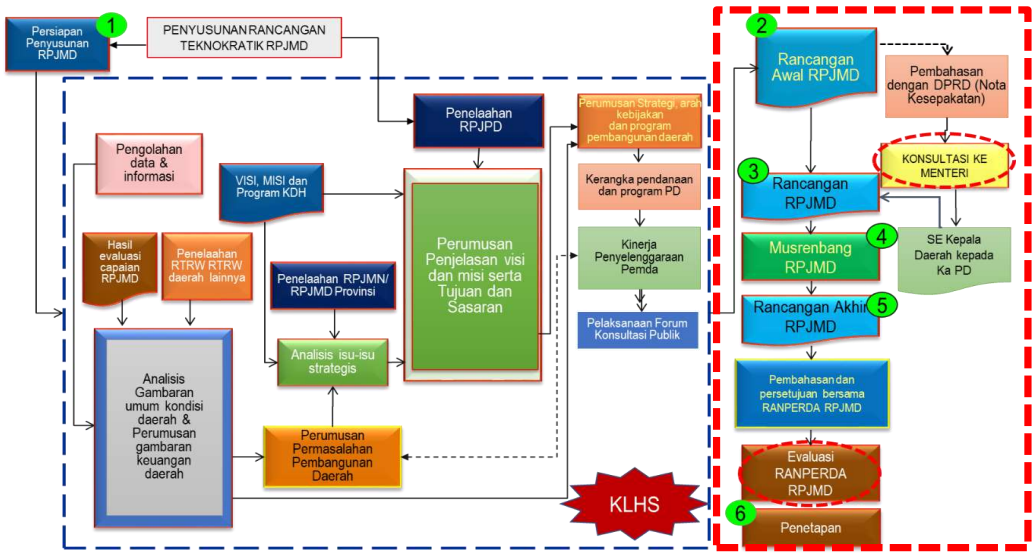

Keterangan: Proses Penyusunan Dokumen Rantek RPJMD (selesai)
Proses penyusunan Dokumen RPJMD

Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Alur proses/tahapan pada gambar diatas dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang RPJMD, dengan penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun RPJMD, analisis hasil pembangunan lima tahun terakhir, inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan sampai tersusunnya Rancangan Teknokratik RPJMD, selanjutnya dengan telah ditetapkannya Kepala Daerah Terpilih dilakukan pembahasan Visi dan Misi dengan pendekatan teknokratik dan menjadi salah satu input substansi bagi Tim Penyusun dalam melaksanakan orientasi penyusunan RPJMD,
2. Tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, dilaksanakan mulai dari pelaksanaan konsultasi publik untuk memperoleh saran dan masukan dalam penyempurnaan Ranwal RPJMD berdasarkan berita acara hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD, serta pelaksanaan konsultasi Ranwal RPJMD Kab/Kota oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk memastikan keselarasan Ranwal RPJMD dengan RPJMN;
3. Tahap penyusunan Rancangan RPJMD, merupakan proses penyempurnaan Ranwal RPJMD menjadi rancangan RPJMD berdasarkan hasil konsultasi oleh Gubernur atas Ranwal RPJMD Kab/Kota serta berdarkan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk selanjutnya melaksanakan Musrenbang RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifiaksi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah dirumuskan;

4. Tahap penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, dilaksanakan dengan penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJMD untuk selanjutnya disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk direviu. Hasil reviu APIP menjadi bahan penyempurnaan Ranhir RPJMD sebelum disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Ranperda RPJMD. Ranperda RPJMD yang telah disepakati tersebut kemudian dievaluasi oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi;
5. Tahap penetapan, dilaksanakan dengan penyempurnaan Ranperda RPJMD berdasarkan hasil evaluasi Ranperda RPJMD oleh Gubernur untuk kemudian ditetapkan sebagai Perda tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Untuk lebih jelasnya tahapan pewaktuan/*timeline* penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

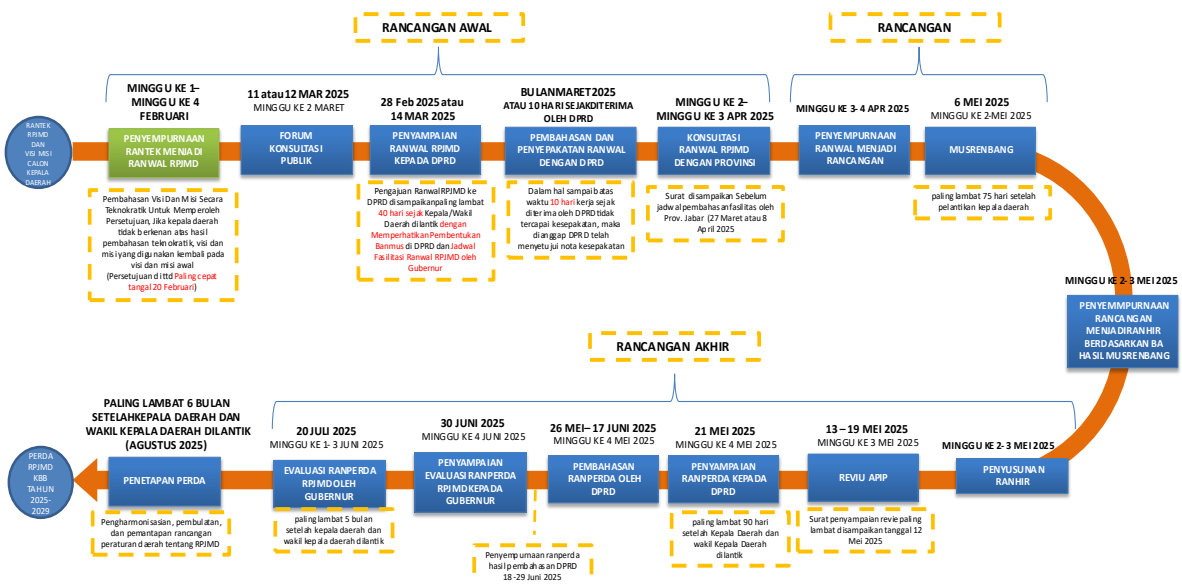

Sumber: Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, Tahun 2025, diolah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 membutuhkan peran serta dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung Barat melalui strategi pentahelix dalam governance (tata kelola) yaitu pendekatan kolaboratif yang melibatkan lima unsur utama: pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media.

Implementasi perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2025 perlu didukung dengan berbagai alternatif sumber pendanaan untuk mendukung dan mempercepat proses pembangunan serta yang utama penerapan strategi tata kelola pemerintahan dinamis (*Dynamic governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada kemampuan pemerintah untuk beradaptasi, berinovasi, dan merespons perubahan lingkungan yang dinamis dan tidak pasti dengan cepat dan efektif melalui perubahan mental dan budaya kerja di kalangan birokrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal ini didasari pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Dengan disusun dan ditetapkannya RPJMD merupakan upaya untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta lingkup operasional di setiap Perangkat daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah dari Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 5 (lima) tahun kedepan, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 91);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daera Nomor 262).
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 5 seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 3 seri E);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 Nomor 9 Seri D); sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 Nomor 4);

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara pusat dan daerah. Untuk keselarasan pembangunan antar pusat dan daerah, bahwa RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 dan disesuaikan dengan RPJMN 2025 – 2029 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029, akan dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang kemudian RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta dijadikan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Keterkaitan hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, digambarkan secara sistematis pada gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

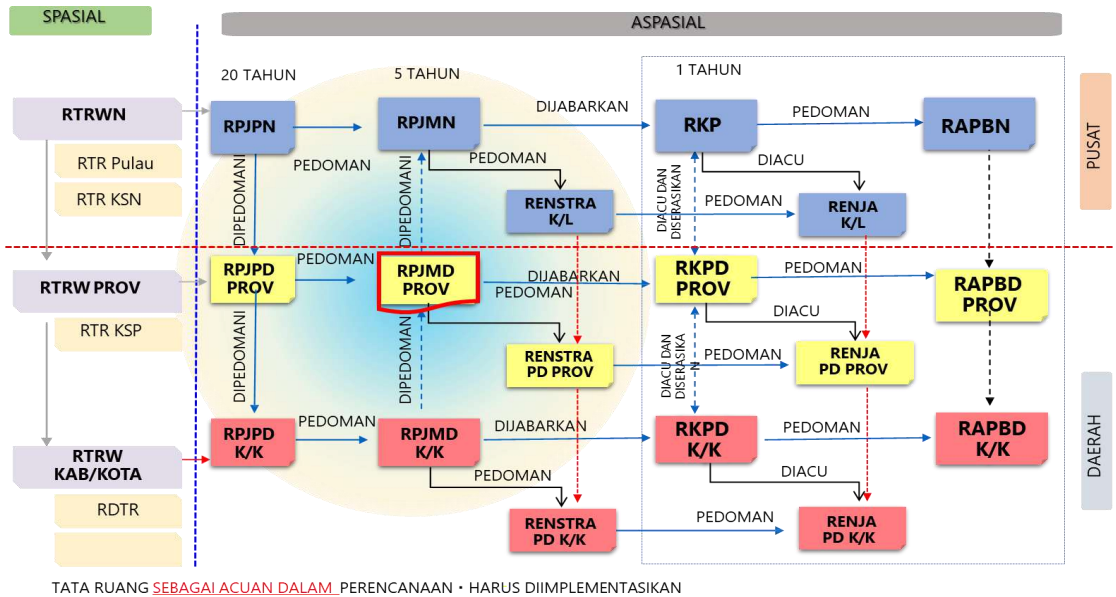

Sumber: UU Nomor 25/2004 dan Permendagri Nomor 86/2017, diolah, 2025

Gambar diatas terkait hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan RPJMN

Bahwa Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Kab/Kota Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan dilakukan terhadap substanti kinerja dan periodisasinya dengan maksud bahwa RPJMD tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih sekaligus juga merupakan bagian dari upaya untuk mendukung seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian **8 (Delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat** yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2025-2029. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah dalam upaya penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Selain berpedoman terhadap RPJMN Tahun 2025-2029, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Bandung Barat juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dalam rangka menjaga keselarasan perencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung Barat dengan Provinsi Jawa Barat, melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Selain itu penyelarasan dilakukan terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, kawasan strategis, isu-isu strategis yang berkembang dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran **Jabar Istimewa (Lembur diurus Kota ditata)** yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Kabupaten Bandung Barat di dalam arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Barat masuk dalam Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung, yang diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri nonpolutif, dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, tanaman pangan dan hortikultura, industri kreatif dan teknologi tinggi.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan RPJPD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045, kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahunan selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan dalam rangka mewujudkan **"Bandung Barat Sejahtera Maju dan Berkelanjutan**" merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang merupakan periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah Tahap I dalam RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.

RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis PD (Renstra PD) Tahun 20205-2029. Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan PD untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten. Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Renstra PD.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan RTRW Kabupaten Bandung Barat

Bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dalam penyusunannya selain berorientasi pada proses juga mengedepankan aspek yang berorientasi pada subtansi melalui pendekatan spasial, yaitu dengan mempertimbangkan dimensi keruangan. Hal ini mengandung arti bahwa dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 hendaknya memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044.

Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. Kesesuaian RPJMD dengan RTRW menjadi bagian yang cukup vital mengingat Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pengembangan wilayah yang cukup dinamis. Berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 tujuan penataan ruang Kabupaten Bandung Barat adalah ***"Mewujudkan Kabupaten Bandung Barat sebagai Kabupaten Agroindustri dan Wisata Ramah Lingkungan untuk Mendukung Perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya".***

Wujud ruang wilayah yang memiliki potensi besar dalam hal agroindustri dan wisata ramah lingkungan diharapkan dapat meningkatkan minat investasi di Kabupaten Bandung Barat serta mendukung perkembangan PKN kawasan perkotaan Bandung Raya. Hal tersebut diharapkan mampu memicu perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat.

Hal ini perlu ditopang dengan pengaturan ruang serta aspek pendukung lainnya, terutama aspek sarana prasarana serta manajerialnya. Guna menjamin terwujudnya tujuan tersebut, maka berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Barat

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, di dalam KLHS ini memuat 6 aspek meliputi:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

KLHS ini disusun sebagai satu kesatuan dari penyusunan RPJMD agar perencanaan pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana, dan program yang akan atau sudah ditetapkan.

Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pememerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1); “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program”, dan Ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM Daerah; dan
b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 terdapat 9 (sembilan) isu prioritas Sustainable Development Goals (SDG's) Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

1. Belum optimalnya menghilangkan kemiskinan atas kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya angka pengangguran serta rendahnya perlindungan sosial berkaitan dengan TPB 1.
2. Isu Ketahanan pangan yang dipengaruhi oleh rendahnya tata kelola lahan pertanian, dan sumber daya manusia pertanian, serta konversi lahan dengan TPB 2
3. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air serta kurangnya akses pelayanan air minum secara merata berkaitan dengan TPB 6
4. Belum optimalnya penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim secara komperehensif dengan berkaitan dengan TPB 11
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh belum optimalnya akses pendidikan yang berkualitas, pemberdayaan sosial, dan kurangnya kualitas kesehatan masyarakat berkaitan dengan TPB 3
6. Belum optimalnya pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan berkaitan dengan TPB 6
7. Belum optimalnya pengelolaan persampahan yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, serta kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan berkaitan dengan TPB 11
8. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi yang Disebabkan Belum Optimalnya Permodalan dan Kualitas Pengelolaan pada Sektor Basis, Kualitas SDM Kelembagaan Koperasi, dan UMKM yang Belum Optimal berkaitan dengan TPB 8
9. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan karena rendahnya akses pelayanan public berkaitan dengan TPB 16

Dalam rangka keselarasan dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 juga agar memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan berdasarkan 9 (sembilan) isu prioritas Sustainable Development Goals (SDG's) Jawa Barat yang memerlukan dukungan Kabupaten/Kota dalam implementasinya, 9 (sembilan) isu prioritas SDGs Jawa barat tersebut, yaitu:

1. Belum meratanya distribusi dan kualitas dari akses dan sarana prasarana serta SDM pendidikan di segala jenjang termasuk pengembangan sistem teknologi informasi digital (berkaitan dengan TPB 4 dan TPB 5);
2. Belum optimalnya perlindungan sosial yang tepat sasaran guna mewujudkan inklusivitas dan masyarakat yang adaptif (berkaitan dengan TPB 1, TPB 5, dan TPB 16);
3. Belum merata dan masih rendahnya kualitas infrastruktur pelayanan dalam penanganan dampak lingkungan dari persampahan, sanitasi, konektivitas publik, dan energi yang tidak ramah lingkungan (berkaitan dengan TPB 11, TPB 9, TPB 6, dan TPB 7);
4. Belum meratanya pelayanan, pengendalian pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan serta kurangnya SDM bidang kesehatan, baik secara kuantitas dan kualitas (berkaitan dengan TPB 3, TPB 2, TPB 1, dan TPB 5);
5. Belum optimalnya ekonomi daerah, akses permodalan, pembinaan UMKM, pariwisata, serta pengembangan ekonomi biru dan hijau berbasis keunggulan wilayah (berkaitan dengan TPB 8, TPB 14, dan TPB 10);
6. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim , serta upaya penurunan gas rumah kaca (berkaitan dengan TPB 1, TPB 9, TPB 11, dan TPB 13);
7. Belum optimalnya pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tata ruang, tata kelola pemerintahan, serta kerja sama antar pihak termasuk masyarakat adat (berkaitan dengan TPB 1, TPB 5, TPB 9, TPB 16, dan TPB 17)
8. Penurunan kualitas dan daya dukung lahan akibat alih fungsi lahan, khususnya untuk ketersediaan pangan dan air (berkaitan dengan TPB 2, TPB 6, dan TPB 15);
9. Belum optimalnya pengelolaan DAS dan rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati darat dan laut (berkaitan dengan TPB 6 dan TPB 15)

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat Barat 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan di Jawa Barat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi, misi, dan program kerja kepala daerah ke dalam kebijakan pembangunan yang terukur dan realistis.

2. Menyelaraskan arahan kebijakan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan perkembangan keadaan
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan serta efektif dan akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab 2 Gambaran Umum Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam beberapa aspek penyelenggaraan pembangunan, disertai informasi gambaran keuangan daerah, serta uraian permasalahan dan isu strategis daerah yang mendasari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029

Bab 3 Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menyajikan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2029 sehingga dapat menggambarkan keadaan atau cita-cita yang ingin dicapai dari hasil pembangunan daerah selama 5 (Lima) tahun yang akan datang. Pada bagian ini juga menjelaskan terkait strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk pentahapan pembangunan serta program prioritas pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab 4 **Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Bab ini memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah yang disertai dengan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditambah dengan periode tahun 2030 sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah pada saat masa transisi di tahun 2029-2030 sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030. Pada bagian ini juga memuat subbab kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab 5 **Penutup**

Berisi kesimpulan penting secara subtansial dari RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 disertai kaidah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran pembangunan di daerah.

GAMBARAN UMUM DAERAH 2

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Berdasarkan Karakteristik Lokasi dan Wilayah, secara Astronomis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06º 3,73' - 07º 1,031' Lintang Selatan dan 107º 1,10' - 107º 4,40' Bujur Timur dengan Luas wilayah sebesar 1.283,43 Km2 atau 128.343 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 165 Desa, dengan rincian luas wilayah menurut administratif kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa di Kab Bandung Barat

Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Desa
1. Rongga	112,25	8
2. Gununghalu	154,95	9
3. Sindangkerta	105,97	11
4. Cililin	77,60	11
5. Cihampelas	46,90	10
6. Cipongkor	79,90	14
7. Batujajar	31,02	7
8. Saguling	51,42	6
9. Cipatat	125,59	12
10. Padalarang	51,48	10
11. Ngamprah	35,55	11
12. Parongpong	44,90	7
13. Lembang	97,97	16
14. Cisarua	55,47	8
15. Cikalongwetan	110,61	13
16. Cipeundeuy	101,86	12
Kab. Bandung Barat	1.283,43	165

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044, yang dikelola dalam SIPD

Dari tabel diatas, Kecamatan Gununghalu merupakan wilayah terluas di Kabupaten Bandung Barat yaitu 155,08 Km2 dan berturut-turut kecamatan dengan luas wilayah di atas 100 Km2, yaitu Cipatat, Rongga, Cikalongwetan, Sindangkerta dan Cipendeuy. Sisanya memiliki luas wilayah di bawah 100 Km2 dan Kecamatan Batujajar merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terendah yaitu 31,06 Km2. Sedangkan jumlah desa terbanyak ada di kecamatan Lembang sebanyak 16 Desa dan Kecamatan Saguling merupakan Kecamatan dengan jumlah Desa paling sedikit yaitu 6 Desa, berikut peta wilayah administratif Kabupaten Bandung Barat:

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat

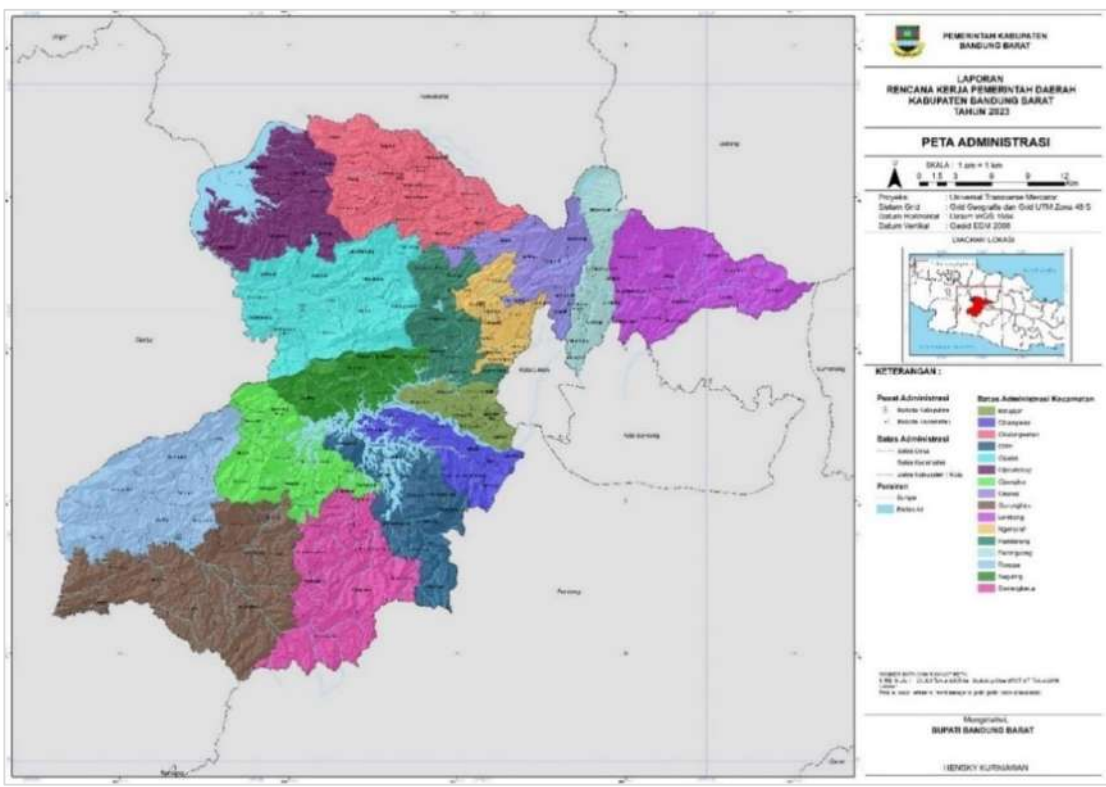

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Adapun Batas wilayah Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Permendagri No. 97 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 18 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung Barat, Permendagri No. 75 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bandung dengan Kab. Bandung Barat dan Permendagri No. 76 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kab Bandung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta.

Berikut peta batas wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kab/Kota Sekitarnya.

Gambar 2.2. Peta Batas Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Kab/Kota Sekitarnya

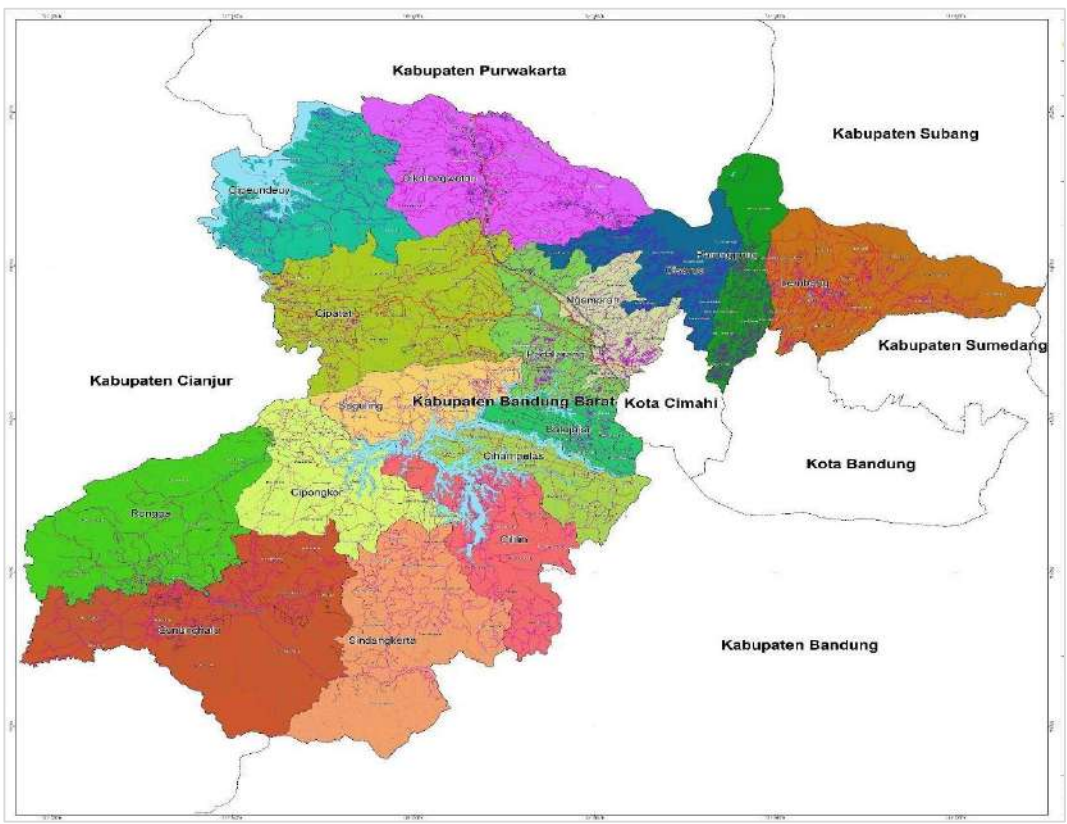

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Peta posisi strategis Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung di Wilayah Jawa Barat, berdasarkan Perpres No 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dijelaskan dengan gambar berikut:

Gambar 2.3. Peta Kabupaten Bandung Barat sebagai Pintu Masuk dan Bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

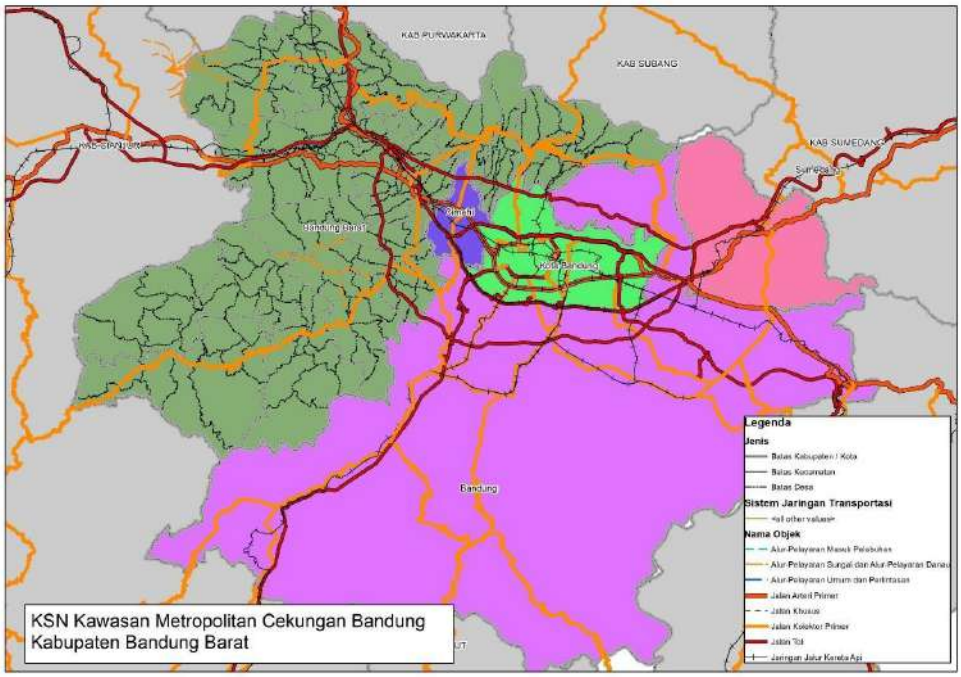

Sumber: Perpres No 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Secara geografis, Kabupaten Bandung Barat memiliki lokasi yang strategis dalam konstelasi nasional dan regional Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan pintu masuk ke wilayah Bandung Raya, menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah Jawa Barat serta dilalui jalur transportasi Barat-Timur berupa jalan tol Cipularang dan lintasan kereta Api Pulau Jawa serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal ini pula yang menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah yang masuk dalam Kawasan Perhatian Investasi (KPI). Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, Posisi Strategis Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bagian dari rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Selain sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kabupaten Bandung Barat juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bahwa Kabupaten Bandung Barat di tetapkan sebagai KSN Perkotaan Cekungan Bandung.

Dalam konteks nasional, sebagai Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat kegiatan skala global yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri dan pariwisata perkotaan. Kabupaten Bandung Barat memiliki peranan penting karena beberapa proyek strategis nasional terdapat di wilayah ini. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, dimana Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat diantaranya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimana salah satu stasiun utamanya dalam bentuk Kawasan TOD (Transit Oriented Development) akan dibangun di wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat dan Proyek Pembangunan PLTA Cisokan telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.52.PemUm/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.1386/Pemum/2011 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Upper Cisokan Pumped Storage di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam konstelasi Regional Jawa Barat, Kedudukan Kab. Bandung Barat sebagai sistem perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, yaitu mencakup wilayah Kecamatan Padalarang sebagai Kota Hierarki II serta Kecamatan Cililin, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Lembang. Sebagai Kota Hierarki adalah sebagai wilayah yang mendukung pengembangan Kota Inti (Bandung-Cimahi), atau sebagai hinterland dari kota inti tersebut. Implikasinya, pembangunan di Kabupaten Bandung Barat sangat dipengaruhi oleh perkembangan wilayah sekitarnya. Hal ini didasari oleh perkembangan kegiatan perkotaan yang sangat pesat, terutama pada sektor industri, perdagangan dan jasa, serta pendidikan tinggi. Salah satu indikasi pesatnya perkembangan tersebut adalah tingginya alih fungsi lahan menuju kawasan perkotaan dan tingginya tingkat urbanisasi. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi dalam rangka percepatan perwujudan PKN Metropolitan Bandung Raya.

Di sisi lain, Kab. Bandung Barat juga termasuk ke dalam wilayah pengembangan Cekungan Bandung, yang diarahkan sebagai kawasan dengan perkembangan pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya pada kawasan yang berfungsi sebagai resapan air yaitu di Kawasan Bandung Utara (KBU). Sementara itu di KBU, sudah berkembang kegiatan pariwisata yang memiliki tingkat pelayanan bukan hanya regional dan nasional saja, bahkan sampai tingkat internasional. Dalam kaitannya sebagai hinterland dari kota inti (Bandung-Cimahi), keberadaan lahan pertanian juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bandung Barat cukup banyak dan beragam, mulai dari lahan pertanian, perbukitan/pegunungan dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini apabila diolah dan dimanfaatkan akan menjadi sumber ekonomi yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

A. Potensi Flora

Di wilayah Kabupaten Bandung Barat masih terdapat berbagai jenis flora alami maupun flora budidaya yang terdiri dari tumbuhan berbatang keras atau pohon, semak, herba, sampai ke jenis Ground Cover (tumbuhan penutup tanah). Sedikitnya ditemukan sebanyak 339 jenis tumbuhan, dari data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jumlah jenis flora terbanyak ditemukan di Kecamatan Cipeundeuy dengan 178 jenis, sedangkan Kecamatan dengan jumlah jenis paling sedikit adalah Kecamatan Ngamprah dengan 17 jenis flora. Flora alami di Kabupaten Bandung Barat terdapat pada ekosistem hutan sekunder, hutan sekunder tua, dan ekosistem karst yang terdapat di Kecamatan Cipatat.

Jenis flora pada ekosistem binaan (sawah, pekarangan, kebun, kebun talun, talun campuran) meliputi berbagai tipe habitus yaitu pohon, semak/herba, bambu, palm dan ground cover. Jenis flora dengan tipe habitus semak/herba merupakan yang terbanyak dengan 120 jenis, sedangkan flora yang termasuk kedalam tipe habitus ground cover merupakan yang paling sedikit dengan jumlah 4 jenis. Jenis yang paling dominan diukur dengan frekuensi kemunculannya di setiap kecamatan adalah spesies Nangka (Artocarpus heterophyllus Lam) dengan angka frekuensi relatif (dalam %) dan mutlak berturut-turut adalah 1,4 dan 15, tumbuhan Jenjen/Albasiah (Albizia Crantz) dan Pisang (Musa Paradisiaca) merupakan spesies paling dominan dengan angka kemunculan relatif 1,34 atau angka kemunculan di setiap kecamatan sebanyak 14 kali.

Dari jenis bambu, bambu gombong (Gigantochloa Verticillata) merupakan yang terdominan dengan frekuensi relatif 1,05 atau 11 kali kemunculan. Flora di Kab. Bandung Barat memiliki fungsi dan kegunaan yang dapat bermanfaat bagi manusia. Dari 339 jenis tumbuhan yang tersebar di 16 Kecamatan dapat dikelompokkan menjadi 161 spesies yang dikategorikan memiliki fungsi sebagai tanaman konsumsi, 94 tanaman hias, 38 jenis tumbuhan industri, 18 jenis tumbuhan pelindung, 8 jenis tumbuhan obat, dan 20 jenis lainnya.

Beberapa jenis flora yang memiliki fungsi sebagai tanaman konsumsi yang juga memiliki nilai ekonomis tinggi adalah beberapa jenis buah-buahan seperti nangka dan mangga. Sedangkan yang dikonsumsi sebagai makanan pokok adalah padi. Varietas padi yang dominan adalah varietas Ciherang, Pandan Wangi dan Rojolele.

Selain jenis yang disebut diatas, pisang juga termasuk jenis yang dominan dan memiliki nilai ekonomis tinggi karena dapat dimanfaatkan buah dan daunnya. Beberapa varietas pisang yang mudah ditemui di Kabupaten Bandung Barat adalah pisang ambon, pisang manggala dan pisang raja. Flora yang berfungsi sebagai tanaman hias biasanya mudah ditemui pada ekosistem pekarangan. Beberapa diantaranya yang dominan adalah Puring, Anak nakal Teh-tehan, Hanjuang, dan Mahkota duri dari kategori semak. Dari kategori kecubung, Kembang merak, dan Pohon waru menjadi spesies yang mudah ditemukan. Beberapa di antara flora yang berfungsi sebagai tanaman hias, ada juga yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti anturium dan anggrek. Beberapa jenis flora yang memiliki fungsi sebagai tanaman industri diantaranya Albasiah/Jengjen, Sobsis, Rasamala, Puspa, Pasang, Jati dan Kayu Putih yang biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Tanaman yang khas dari kategori ini adalah aren yang digunakan sebagai bahan baku pembuat gula aren. Gula aren dari wilayah Kecamatan Sindangkerta bahkan digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan wajit khas Cililin.

Beberapa jenis flora yang memiliki fungsi sebagai tanaman pelindung diantaranya Kisabun, Kihujan, Beringin, Angsana, Mahoni, dan Lamtoro. Jenis ini biasanya mudah ditemui di pinggiran jalan utama. Beberapa jenis flora yang memiliki fungsi sebagai tanaman obat diantaranya adalah Mengkudu, Kumis kucing, Salam, Sirih dan Katuk. Flora yang berpotensi menjadi identitas Kabupaten Bandung Barat adalah Albasiah (Albiziafalcatoria), Aren (Arengapinnata), dan Mahoni (Sweteniamahagoni).

B. Potensi Fauna

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi keanekaragaman fauna yang tinggi. Secara umum, jumlah jenis fauna yang ditemukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 144 jenis yang terdiri dari 78 jenis dari kelas aves, 31 dari kelas insecta, 16 dari kelas mammalia, 13 jenis dari kelas reptilia, 4 jenis dari kelas amphibia dan 2 jenis dari kelas gastropoda dan crustaceae. Setidaknya terdapat 78 jenis burung yang berasal dari 41 famili. 19 jenis diantaranya merupakan jenis yang dilindungi baik oleh perundang-undangan Republik Indonesia maupun perundang-undangan Internasional seperti IUCN (Internastional Union Conservation Nature) an CITES (Convention of International Trade ini Endangered Species of Wild Flora and Fauna)/kesepakatan Internasional yang mengatur perdagangan antar negara spesies fauna liar dan hidup tanaman liar yang terancam punah. Terdapat 3 jenis burung pemangsa yaitu burung Sikep Madu Asia, Elang alap nipon dan Elang alap Cina, dimana burung tersebut termasuk ke dalam burung pendatang (migran). Burung pendatang tersebut setiap tahunnya menggunakan gugusan vegetasi pegunungan (green belt) di Kabupaten Bandung Barat khususnya Gugusan Gunung Sunda.

Burangrang dan Tangkuban Parahu sebagai panduan (navigasi) dalam melakukan proses migrasi baik saat kedatangannya maupun saat kembali ke habitat asalnya (migrasi balik). Keberadaan burung migran yang menggunakan gugusan jalur hijau (green belt) di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa habitat yang ada memiliki daya dukung yang baik sebagai habitat beristirahat dalam proses migrasi sekaligus menjadi panduan (navigasi) yang digunakan dalam peristiwa migrasi. Pada kawasan karst (kapur) di perbukitan Pawon dan Masigit dijumpai jenis burung pemangsa alap-alap sapi. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kawasan tersebut memiliki daya dukung yang sehat karena mampu menyediakan kebutuhan hidup bagi burung yang menduduki puncak mata ranai dalam ekosistem (top predator).

Setidaknya ditemukan 3 jenis capung yaitu Orthetrum sabina, Orthetrum testaceum dan Orthetum pruinosum. Jenis-jenis capung ini banyak dijumpai pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan derah berair. Keberadaan capung ini menjadi penting karena capung dapat dijadikan sebagai indikator perairan bersih dikarenakan sebagian besar siklus hidup capung dihabiskan di air. Dengan demikian keberadaan capung dapat memberikan informasi mengenai kualitas air yang berada di suatu wilayah. Ditemukan setidaknya 27 jenis kupu-kupu dari 5 famili berbeda (Palilionidae, Nymphalidae, Satyridae, Lycaenidae dan Pieridae). Kupu-kupu terutama ditemukan di hutan alami dan pada pekarangan/kebun di daerah penghasil tanaman hias seperti Kecamatan Lembang. Kupu-kupu dapat menjadi indikator topografi, tingkat kelembapan daerah ataupun keanekaragaman bunga yang terdapat di suatu daerah.

Reptilia yang dijumpai merupakan jenis reptilia yang umum seperti kadal, biawak, cecak, tokek, ular sanca, ular pucuk, ular sawah, ular kadut dan ular air pelangi. Namun demikian diduga masih banyak jenis yang belum dapat diidentifikasi. Sementara jenis mamalia terdapat 16 jenis, lima jenis diantaranya merupakan fauna dilindungi mengingat populasinya yang semakin sedikit di habitat aslinya. Kelima jenis mamalia dilindungi tersebut adalah trenggiling, lutung, surili, landak dan pelanduk. Sedangkan Jenis fauna dari kelas lainnya seperti Gastropoda (siput), Crustacea (kepiting) dan Amphibia adalah jenis-jenis yang umum dijumpai di setiap Kecamatan. Hal ini disebabkan karena kondisi ekosistem di setiap kecamatan yang tidak jauh berbeda.

Diantara jenis fauna yang diamati, fauna budidaya merupakan fauna yang bernilai ekonomis serta dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Mulai dari daging, susu, tenaga, telur hingga kulitnya. Adapun jenis-jenis fauna yang dibudidayakan di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah Sapi, kerbau, kuda, ayam, mentok, angsa, kambing dan domba. Sedangkan jenis fauna yang berpotensi menjadi identitas Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Alap-alap sapi (Falco moluccensis);
2. Cekakak Jawa (Halcyon cyanoventris);
3. Serindit Jawa (Loriculus pusillus);
4. Takur tulung tumpuk (Megalaimajavensisi).

C. Potensi Pertanian

Pertanian di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Hampir sebagian besar lahan di Kabupaten Bandung Barat digunakan untuk pertanian Jika dilihat dari fungsi guna lahan yang ada Kabupaten Bandung Barat, didominasi oleh fungsi budidaya pertanian sebesar 78.446.15 ha atau 59,96% dari luasan total wilayah Kab. Bandung Barat. Sektor Pertanian sebagai salah satu potensi unggulan, memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antara 12,59 - 13,46 persen. Sektor pertanian tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Potensi beberapa komoditas unggulan di bidang pertanian yaitu komoditas pertanian tanaman pangan berupa: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai, dengan Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi tanaman pangan di Kab. Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

No	Tanaman Pangan	Luas Tanam (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi Sawah	46.291	42.217	44.735	39.229	46.515
2	Padi Ladang	858	1.035	415	56	829
3	Jagung	7.201	4.924	3.170	3.116	5.528
4	Ubi Kayu	1.663	1.673	1.601	1.941	1.360
5	Ubi Jalar	349	322	391	269	229
6	Kacang Kedelai	945	812	515	958	83
7	Kacang Tanah	310	172	167	155	153
No	**Tanaman Pangan**	**Luas Panen (Ha)**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Padi Sawah	46.247	43.199	45.807	39.754	43.766
2	Padi Ladang	1.186	1.055	416	551	428
3	Jagung	6.035	3.999	5.286	1.888	5.052
4	Ubi Kayu	1.850	1.484	1.954	1.659	1.450
5	Ubi Jalar	366	342	321	342	254
6	Kacang Kedelai	991	715	695	627	177
7	Kacang Tanah	378	190	185	134	131
No	**Tanaman Pangan**	**Produksi (Ton)**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Padi Sawah	299.139	279.990	297.093	258.451	289.395

No	Tanaman Pangan	Luas Tanam (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Padi Ladang	4.654	3.355	1.635	2.162	2.141
3	Jagung	43.395	28.753	38.076	13.571	36.238
4	Ubi Kayu	33.593	28.416	34.443	29.190	26.976
5	Ubi Jalar	5.049	4.719	4.267	3.617	3.657
6	Kacang Kedelai	1.445	1.042	1.009	873	244
7	Kacang Tanah	485	243	237	193	161

Sumber: Dinas Ketahana Pangan dan Pertanian, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Selain komoditas unggulan tanaman pangan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pertanian unggulan pada sektor komoditas pertanian tanaman hortikultura, berupa: tanaman sayuran, tanaman buah-buahan dan tanaman hias dengan Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi tanaman hortikultura di Kab. Bandung Barat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3. Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

No	Tanaman Holtikultura	Luas Tanam (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cabe Besar	10.172	1.797	700	1.486	3.401
2	Cabe Rawit	9.974	1.355	1.020	1.798	1.455
3	Kentang	362	114	140	258	256
4	Tomat	11.671	1.501	940	1.668	782
5	Bawang Daun	874	750	330	860	587
6	Buncis	7.807	1.087	630	1.064	550
7	Ketimun	7.813	664	440	916	618
No	**Tanaman Holtikultura**	**Luas Panen (Ha)**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Cabe Besar	9.807	1.161	460	1.136	844
2	Cabe Rawit	9.716	885	560	1.390	360
3	Kentang	985	133	60	136	66
4	Tomat	10.596	754	580	1.946	280
5	Bawang Daun	3.092	416	300	300	157
6	Buncis	7.140	566	430	862	173
7	Ketimun	7.779	397	380	699	174
No	**Tanaman Holtikultura**		**Produksi (Ton)**			
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Cabe Besar	5.508	13.471	39.350	38.092	151.251
2	Cabe Rawit	6.060	8.504	41.170	43.488	59.676
3	Kentang	1.083	3.634	19.450	28.730	4.360
4	Tomat	6.573	10.223	90.820	118.080	58.644
5	Bawang Daun	2.018	2.296	21.500	25.568	8.115
6	Buncis	4.092	6.000	56.200	45.980	21.251
7	Ketimun	5.316	3.652	36.110	31.545	20.215

Sumber: Dinas Ketahana Pangan dan Pertanian, 2025, yang dikelola dalam SIPD

D. Potensi Perkebunan

Komoditas perkebunan yang memberi paling banyak kontribusi produksi di 16 Kecamatan yaitu: teh, kelapa, karet dan kopi. Area perkebunan terluas berada di 3 Kecamatan yaitu: Cipatat, Cipeundeuy, dan Cikalongwetan. Komoditas perkebunan yang memberi paling banyak kontribusi produksi di 16 Kecamatan Kabupaten Bandung Barat antara lain:

- Perkebunan Teh yang berlokasi di Cikalong Wetan, Cisarua dan Sindangkerta
- Perkebunan Kelapa yang berlokasi di Kecamatan Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, Cipongkor dan Cikalongwetan
- Perkebunan Karet yang berlokasi di Kecamatan Cipeundeuy dan Cipatat
- Perkebunan Kopi yang berlokasi di Kecamatan Gununghalu, Sindangkerta, Cililin, Cipongkor dan Cikalongwetan
- Perkebunan Aren di Kecamatan Sindangkerta, Gununghalu, Rongga, Cipongkor dan Cikalongwetan
- Perkebunan Cengkeh di Kecamatan Cikalongwetan, Cisarua dan Ngamprah

Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Perkebunan Unggulan di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Potensi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020-2024

No	Tanaman Perkebunan	Luas Tanam (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aren	504	504	503	362	358,9
2	Cengkeh	1.082	1.082	1.081	935	935,7
3	Kapok	33	33	32	19	19,1
4	Karet	253	253	253	225	225,3
5	Kelapa	1.328	1.328	1.318	1.146	1.148,63
6	Kemiri	41	41	41	26	24,86
7	Kopi Arabika	2.807	2.825	2.813	2.681	2.681,56
8	Kopi Robusta	574	574	573	559	559,2
9	Lada	31	32	32	21	21,57
10	Sereh Wangi	1.498	2.078	2.093	2.117	21,11
11	Teh	1.935	1.921	1.905	1.810	9,56
12	Tembakau	151	153	154	167	168,26
No	**Tanaman Perkebunan**	**Luas Panen (Ha)**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Aren	335	337	337	201,92	198,78
2	Cengkeh	581	588	589	491,43	493,39
3	Kapok	23	23	22	11	8,51
4	Karet	157	157	163	126	126,58
5	Kelapa	1.045	1.042	1.041	890	890,9
6	Kemiri	32	32	32	10	9,36

7	Kopi Arabika	1.488	1.557	1.549	1550	1550,66
8	Kopi Robusta	354	355	352	349	349,01
9	Lada	17	17	18	14	14,24
10	Sereh Wangi	1.496	1.565	1.580	1.515	1515,8
11	Teh	1.460	1.460	1.453	1.204	1204,45
12	Tembakau	151	153	158	157	158
No	**Tanaman Perkebunan**	**Produksi (Ton)**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Aren	2.906	2.991	2.993	7.616	7563,44
2	Cengkeh	303	310	313	274	275,4
3	Kapok	7	7	7	3	1,6
4	Karet	257	258	267	185	185,6
5	Kelapa	761	755	736	637	527,98
6	Kemiri	9	9	8	2	2,42
7	Kopi Arabika	986	1.156	1.148	712	1112,26
8	Kopi Robusta	192	194	194	202	201,16
9	Lada	19	19	19	13	12,45
10	Sereh Wangi	658	661	663	636	636,33
11	Teh	2.805	2.791	2.782	2.125	2125,7
12	Tembakau	140	143	147	1907,48	1937,73

Sumber: Dinas Ketahana Pangan dan Pertanian, 2025, yang dikelola dalam SIPD

E. Potensi Peternakan

Sapi perah merupakan salah satu ternak unggulan Kabupaten Bandung Barat. Populasi ternak terbanyak terdapat di Kecamatan Lembang, Cisarua dan Parongpong. Selain faktor ketersediaan pakan, wilayah tersebut juga merupakan wilayah dataran tinggi dengan suhu yang sejuk dan cocok bagi perkembangan optimal sapi perah. Sapi potong di Kabupaten Bandung Barat terdapat di 3 kecamatan, dimana lingkungan dan kondisi alamnya mendukung bagi pertumbuhan sapi potong. Populasi kerbau tersebar di 13 Kecamatan, sedangkan populasi tertinggi terdapat di Kecamatan Rongga. Populasi kuda tersebar secara merata di 11 Kecamatan, kecuali di Kecamatan Ngamprah, Cisarua, dan Parongpong. Ternak domba tersebar di 16 Kecamatan. Hal ini dikarenakan ternak domba merupakan komoditi yang mudah beradaptasi dan hidup dimanapun, baik di dataran rendah dan tinggi. Kecamatan yang merupakan sentra domba diantarannya kecamatan: Rongga, Gununghalu dan Padalarang. Selanjutnya populasi kambing di Kab. Bandung Barat tersebar di 15 Kecamatan, kecuali di Kecamatan Cipatat, Cisarua, Ngamprah, Lembang dan Parongpong yang saat ini kontribusi ternaknya masih sangat kecil. Tetapi pemanfaatan daging kambing relatif kurang diminati untuk konsumsi, selama ini produksi ternak kambing dijual keluar Kab. Bandung Barat seperti ke Jakarta, Karawang, Bekasi dan daerah lainnya. Sentra populasi kambing terdapat di Kecamatan Clililin dan Cipongkor. Berikut data potensi populasi ternak besar di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.5. Data Potensi Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Populasi Ternak					
		Sapi Potong	Sapi Perah	Domba	Kambing	Kuda	Kerbau
1	Rongga	260	-	18.747	2.100	-	67
2	Gununghalu	160	109	26.009	1.823	-	152
3	Sindangkerta	72	-	9.331	1.782	-	44
4	Cililin	202	-	11.067	992	-	9
5	Cihampelas	267	-	3.985	288	1	-
6	Cipongkor	41	-	13.686	691	-	66
7	Batujajar	66	-	2.915	117	-	-
8	Saguling	15	-	8.120	1.055	-	1
9	Cipatat	154	-	9.729	2.931	-	39
10	Padalarang	27	12	7.545	177	-	3
11	Ngamprah	244	930	5.144	114	4	34
12	Parongpong	289	3.647	2.119	177	-	-
13	Lembang	1.404	15.582	4.116	289	73	-
14	Cisarua	1.961	6.455	10.042	202	4	4
15	Cikalongwetan	403	-	34.286	842	7	28
16	Cipeundeuy	171	-	9.712	620	-	32
Jumlah 2024		**5.736**	**26.735**	**176.553**	**14.200**	**89**	**479**
Jumlah 2023		**6.696**	**26.916**	**230.935**	**17.624**	**3.153**	**1.470**
Jumlah 2022		**3.625**	**23.293**	**459.303**	**49.880**	**3.101**	**1.465**
Jumlah 2021		**6.643**	**38996**	**461750**	**35221**	**3126**	**1462**
Jumlah 2020		**6.582**	**39267**	**460323**	**35616**	**3151**	**1491**

Sumber: Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.6. Rekapitulasi Populasi Ternak Kab Bandung Barat Tahun 2020-2024

No	Ternak Besar	Populasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	6.582	6.643	3.625	6.594	5.736
2	Sapi Perah	39.267	38.996	23.293	26.916	26.735
3	Domba	460.323	461.750	459.303	219.773	176.553
4	Kambing	35.616	35.221	49.880	17.180	14.200
5	Kuda	3.151	3.126	3.101	3.151	89
6	Kerbau	1.491	1.462	1.465	1.463	479

Sumber: Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Selain potensi ternak besar di Kabupaten Bandung Barat, memiliki potensi pada bidang peternakan unggas diantarnya: ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik, dengan jumlah populasi terbanyak adalah ayam pedaging dan ayam buras. Jumlah populasi terbanyak ayam buras terdapat di Kecamatan Rongga, Gununghalu dan Sindangkerta. Untuk populasi terbanyak ayam pedaging terdapat di Kecamatan Cihampelas, Cikalongwetan dan Cipongkor.

Sedangkan populasi terbanyak ayam petelur terdapat di Kecamatan Cipatat serta populasi terbanyak ternak itik terdapat di Kecamatan Saguling dan Cipongkor. Berikut data potensi populasi ternak unggas di Kabupaten Bandung Barat.

F. Potensi Perikanan

Kabupaten Bandung Barat yang memiliki 2 (dua) waduk besar yang memiliki potensi besar dalam usaha perikanan. Selama ini waduk tersebut dimanfaatkan sebagai tempat usaha budidaya ikan di Kolam Jaring Apung (KJA). Wilayah yang potensial penyumbang terbesar pada usaha KJA ini adalah Kecamatan Cipeundeuy dengan adanya Waduk Cirata yaitu sekitar 59% produksi total produksi KJA. Selain KJA, usaha perikanan lainnya yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat diantaranya usaha pembenihan ikan, usaha budidaya ikan pada Kolam Air Tenang (KAT), minapadi, dan penangkapan ikan di perairan umum dengan rincian potensi budidaya perikanan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7. Potensi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Pembenihan (Ha)	KAT (Ha)	Mina Padi (Ha)	KJA (Ptk)
1	Rongga	0,10	9,65	-	-
2	Gununghalu	1,10	13,28	-	-
3	Sindangkerta	0,98	17,92	-	-
4	Cililin	1,50	19,75	-	17.260
5	Cihampelas	1,00	19,45	-	7.873
6	Cipongkor	0,67	16,82	-	1.650
7	Batujajar	0,85	14,31	-	3.575
8	Cipatat	2,55	41,45	-	-
9	Padalarang	-	9,23	-	-
10	Ngamprah	0,25	8,69	-	-
11	Parongpong	-	4,50	-	-
12	Lembang	-	5,82	-	-
13	Cisarua	-	4,90	-	-
14	Cikalongwetan	0,10	19,52	-	-
15	Cipeundeuy	2,45	30,80	-	28.097
16	Saguling	-	10,41	-	4.160
Jumlah 2024		**11,55**	**11,55**	**246,50**	**-**
Jumlah 2023		**11,55**	**11,55**	**276,26**	**-**
Jumlah 2022		**11,52**	**11,55**	**276,26**	**-**
Jumlah 2021		**10,49**	**11,52**	**275,82**	**-**
Jumlah 2020		**10,49**	**10,49**	**275,39**	**-**

Sumber: Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Produksi komoditas perikanan unggulan di Kabupaten Bandung Barat berkisar antara 42 ribu – 51 ribu ton/tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8. Data Produksi Ikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Produksi Ikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Ikan (Ton)	42.513,00	44.352,00	46.760,33	49.122,75	51.585,71

Sumber: Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Adapun jenis produk komoditas unggulan Kabupaten Bandung Barat diantaranya: Ikan Mas, Nila, Patin, Lele dan Gurame dengan komoditas terbesar adalah jenis komoditas ikan patin dan ikan mas, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9. Produksi Komoditas Perikanan Unggulan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

No	Komoditas Ikan	Produksi Tahun 2020	Produksi Tahun 2021	Produksi Tahun 2022	Produksi Tahun 2023	Produksi Tahun 2024
1	Ikan Mas	15.763,99	14.097,74	1.888,02	15.531,21	20.042,41
2	Ikan Nila	18.450,00	21.627,23	22.950,44	23.715,90	23.180,71
3	Ikan Patin	5.849,56	6.077,52	6.204,65	6.444,31	4.059,93
4	Ikan Lele	1.917,19	1.981,37	2.327,05	2.772,30	3.771,22
5	Gurame	345,98	377,57	390,16	659,03	531,43
Jumlah		**44.905,15**	**42.326,72**	**44.161,43**	**46.760,32**	**49.122,75**

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

G. Potensi Pariwisata Alam

Berdasarkan kondisi geografisnya, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak terutama wisata yang bertema alam. Dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Bandung Barat disebutkan bahwa rencana pembangunan kawasan wisata daerah diarahkan pada: ekowisata, wisata agro, desa wisata, wisata danau, wisata budaya. Lokasi ekowisata di Kabupaten Bandung Barat dibagi kedalam 3 (tiga jalur) utama, yaitu:

1) Jalur utara yang meliputi lokasi Gunung Tangkubanparahu, Bumi Perkemahan Cikole, Penangkaran Buaya, Jayagiri (Lintas Hutan), Maribaya, Curug Omas, dan Taman Yunghun di Kecamatan Lembang, Situ Lembang, Taman Bunga Cihideung, dan Taman Wisata Berkuda di Kecamatan Parongpong, Curug Cimahi serta Curug Panganten di Kecamatan Cisarua.
2) Di jalur selatan terdapat lokasi ekowisata Curug Malela di Kecamatan Rongga, Bumi Perkemahan Curug Sawer, Situs Batu Payung, dan Situs Mundinglaya di Kecamatan Cililin.

3) Sedangkan di jalur barat terdapat lokasi ekowisata Situ Ciburuy di Kecamatan Padalarang, Goa Pawon, Goa Terusan Air Sanghiang Tikoro, Pemandian Air Panas, dan Curug Jawa di Kecamatan Cipatat, Waduk Saguling, dan Air Panas Cibaligo di Kecamatan Ngamprah, Bumi Perkemahan Sela Gombong, dan Perkebunan Teh Panglejar di Kecamatan Cikalongwetan, serta Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy.

Sedangkan untuk Wisata Agro, dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu: wisata agro perkebunan dan budidaya tanaman perkebunan serta penataan kebun, wisata agro tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan sejenisnya, wisata agro tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan wisata agro industri. Adapun potensinya berada di wilayah Kecamatan Cisarua, Cikalongwetan, Lembang, Gununghalu, Rongga dan Cililin. Potensi wisata alam di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 91 lokasi, yang tersebar di beberapa kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.10. Potensi Wisata Alam di Kabupaten Bandung Barat

No	Nama Objek Wisata	Lokasi		Tipe Objek Wisata	Pengelola
		Kecamatan	Desa		
1	Situ Ciburuy, Kec. Padalarang	Padalarang	Ciburuy	Alam	Pemda
2	Wisata Hammock Gunung Hawu,	Padalarang	Padalarang	Alam	Pokdarwis
3	Bale Seni Barli & Puspa IPTEK Sundial	Padalarang	Padalarang	Buatan	Swasta
4	Gua Pawon, Kec.Cipatat	Cipatat	Gunung	Alam	Pemda
5	Pemancingan Ratu Mas Ayu, Cipatat	Cipatat	Nyalindung	Buatan	Swasta
6	Sanghyang Poek, Cipatat	Cipatat	Rajamandala	Alam	Pokdarwis
7	Sanghyang tikoro, Cipatat	Cipatat	Rajamandala	Alam	Pokdarwis
8	Arung Jeram Cisameng, Cipatat	Cipatat	Rajamandala	Alam	Pokdarwis
9	Stone Garden, Cipatat	Cipatat	Gunung	Alam	Pokdarwis
10	Kolam air panas Rajamandala, Cipatat	Cipatat	Rajamandala	Alam	Pokdarwis
11	Indiana Camp	Cipatat	Gunung	Alam	Swasta/
12	Kolam Renang Tirta Mulya, Ngamprah	Ngamprah	Tani Mulya	Buatan	Swasta
13	Wisata Kuda & Nasi liwet Pakuhaji	Ngamprah	Paku haji	Buatan	Swasta
14	Curug Cimahi/Curug Pelangi)/Rainbow	Cisarua	Kertawangi	Alam	KPH Bandung
15	Curug Putri Layung Kec. Cisarua	Cisarua	Kertawangi	Alam	KPH Bandung
16	Curug Tilu Leuwi Opat, cisarua	Cisarua	Cihanjuang	Alam	KPH Bandung
17	Ciwangun Indah Camp, Cisarua	Cisarua	Cihanjuang	Alam	Swasta
18	Natural Hill, Cisarua	Cisarua	Kertawangi	Alam	Swasta
19	Lazuardy Bikes Park (Agrowisata	Cisarua	Jambudipa	Buatan	Swasta
20	Dusun Bambu Leisure Park, Cisarua	Cisarua	Kertawangi	Buatan	Swasta
21	Little Farm, Cisarua	Cisarua	Kertawangi	Buatan	Swasta
22	Grace Rose Farm Cisarua	Cisarua	Kertawangi	Buatan	Swasta
23	Situ Lembang	Lembang	Cipada	Alam	Perhutani
24	Curug Buntu	cisarua	Kertawangi	Alam	Perhutani
25	Curug Bugbrug	cisarua	Kertawangi	Alam	Perhutani
26	Curug Panganten	cisarua	Padaasih	Alam	Perhutani
27	Curug Lalay	cisarua	Padaasih	Alam	Perhutani
28	Vin's Berry	cisarua	Jambudipa	Buatan	Swasta
29	Bumi perkemahan RSJ	cisarua	Jambudipa	Alam	Swasta
30	Curug cipalasari	cisarua	Tugu mukti	Alam	Perhutani
31	Kolam renang pondok indah	cisarua	Pasirlangu	Buatan	Swasta
32	Gua pertahanan belanda	cisarua		Budaya	Pokdarwis
33	Makam Keramat	cisarua		Budaya	Pokdarwis
34	Batu korsi	cisarua		Alam	Pokdarwis
35	Agrowisata Bunga Cihideung	Parongpong	Cihideung	Alam	Masyarakat

No	Nama Objek Wisata	Lokasi		Tipe	Pengelola
36	Salian Art space, Parongpong	Parongpong	Cihideung	Buatan	Swasta
37	NuArt sculpture park, Parongpong	Parongpong	Ciwaruga	Buatan	Swasta
38	Jendela Alam, Parongpong	Parongpong	Cihideung	Alam	Swasta
39	Pemandian air Panas Nagrak	Parongpong	Sukajaya	Alam	Masyarakat
40	Desa wisata Cihanjuang rahayu	Parongpong	Cihanjuang	Alam	Masyarakat
41	Objek Wisata Maribaya The Hotspring	Lembang	Langeun Sari	Alam	Kerjasama KBB dng
42	Lintas Hutan Indah Jaya Giri, Lembang	lembang	Jaya Giri	Alam	Perum (BUMN)
43	War Games, Lembang	Lembang	Jaya Giri	Buatan	KPH Bandung
44	Bumi Perkemahan Cikole Lembang	Lembang	Cikole	Alam	KPH Bandung
45	Lembah Bougenville Resort, Lembang	Lembang	Cibodas	Alam	Swasta
46	Grafika Cikole, Lembang	Lembang	Cikole	Buatan	Swasta
47	Bandung Treetop Adventure	Lembang	Cikole	Buatan	KPH Bandung
48	The Lodge Maribaya, Lembang	Lembang	Cibodas	Buatan	Swasta
49	Fairy Garden by the lodge, Lembang	Lembang	Cibodas	Buatan	Swasta
50	De Ranch, Lembang	Lembang	Kayu Ambon	Buatan	Swasta
51	Farm House, Lembang	Lembang	Gudang	Buatan	Swasta
52	Floating Market, Lembang	Lembang	Lembang	Buatan	Swasta
53	Orchid Forest , Lembang	Lembang	Cikole	Buatan	Swasta & Perhutani
54	Tangkuban Perahu, Lembang	Lembang	Cikole	Alam	Swasta
55	Dago Dream Park, Lembang	Lembang	Mekarwangi	Buatan	Swasta
56	Trizara Resort, Lembang	Lembang	Gudangkahurip	Buatan	Swasta
57	Bird and Bromelia Pavilion, Lembang	Lembang	Mekarwangi	Buatan	Swasta
58	Imah Noong, Lembang	Lembang	Wangunsari	Buatan	swasta
59	Rumah Halloween, Lembang	Lembang	Gudangkahurip	Buatan	swasta
60	Kebun Begonia Glory'	Lembang	Langeun Sari	Alam	Swasta
61	Rumah Bunga Rizal, Lembang	Lembang	Langeun Sari	Buatan	Swasta
62	Kota Mini Floating Market, Lembang	Lembang	Lembang	Buatan	Swasta
63	Wana wisata Pasir ipis, Lembang	Lembang	Jaya Giri	Alam	Pokdarwis
64	Desa wisata Suntenjaya, lembang	Lembang	Sunten Jaya	Alam	Masyarakat
65	Observatorium Bosscha, Lembang	Lembang	Gudang	Buatan	Dept. Astronomi
66	Pine Foret Camp, Lembang	Lembang	Suntenjaya	Alam	Swasta
67	Gunung putri Lembang	Lembang	Jayagiri	Alam	Masyarakat
68	Gunung Batu Lembang	Lembang	Langensari	Alam	Masyarakat
69	Taman Miniatur Kereta Api Floating	Lembang	Lembang	Buatan	Swasta
70	Curug Omas, desa langensari Lembang	Lembang	Langeun Sari	Alam	Perum Perhutani
71	Taman Makam junghun, jayagiri	Lembang	Jaya Giri	Budaya	Masyarakat
72	Monumen Pasir Pahlawan Otto	Lembang	Gudang	Budaya	Masyarakat
73	Cibodas Agrowisata	Lembang	Cibodas	Alam	Masyarakat
74	Cibodas Alam Madani Park- D'Camp	Lembang	Cibodas	Alam	Swasta
75	Ganesha H Equestrian (Taman lembah	Lembang	Cibogo	Alam	swasta
76	Curug Keraton, Lembang	Lembang	Cibodas	Alam	Masyarakat
77	Batu Ngampar	Lembang	Suntenjaya	Alam	Masyarakat
78	Mulberry Hill	Lembang	Cibodas	Buatan	Swasta
79	Eurad High Land (puncak eurad)	Lembang	Wangun Harja	Alam	Swasta
80	Wisata Punclut	Lembang	Pagerwangi	Buatan	Swasta
81	Geger Bintang Matahari	Lembang	Cibogo	Alam	Swasta
82	The Great Asia Africa	Lembang	Gudang	Buatan	Swasta
83	Green Grass Cikole	Lembang	Cikole	Buatan	Swasta
84	D'Dieu Land	Lembang	Pagerwangi	Buatan	Swasta
85	Dago Bakery Punclut Lembang	Lembang	Pagerwangi	Buatan	Swasta
86	Lembang wonderland	Lembang	Jayagiri	Buatan	Swasta
87	Lembang Park and Zoo	Lembang	Cihideung	Buatan	Swasta
88	Curug Malela,Desa Cicadas	Rongga	Cicadas	Alam	Pemda
89	Curug Mahayu desa bojongsalam	Rongga	Bojongsalam	Alam	Desa
90	Curug Tangkorak desa bojongsalam	Rongga	Bojongsalam	Alam	Desa
91	Curug Huis desa bojongsalam	Rongga	Bojongsalam	Alam	Desa
92	Curug Buana desa bojongsalam	Rongga	Bojongsalam	Alam	Desa

No	Nama Objek Wisata	Lokasi		Tipe	Pengelola
93	Pancak silat sangga buana desa	Rongga	Bojongsalam	Budaya	Desa
94	Upper cisokan desa sukaresmi	Rongga	Sukaresmi	Alam	BUMD
95	Curug Bambayang desa sukaresmi	Rongga	Sukaresmi	Alam	Desa
96	Curug Pancur desa sukaresmi	Rongga	Sukaresmi	Alam	Desa
97	Bumi perkemahan Hanca 20 desa	Rongga	Bojong	Alam	Desa
98	Wisata alam (Gunung) Desa Cinengah	Rongga	Cinengah	Alam	Desa
99	Wisata arung jeram Bolenglang desa	Rongga	Cicadas	Alam	Desa
100	Curug Sawer desa cicadas	Rongga	Cicadas	Alam	Desa
101	Curug Lanti Citiis desa cicadas	Rongga	Cicadas	Alam	Desa
102	Haol Cibitung Desa cibitung	Rongga	Cibitung	Alam	Pribadi
103	Petilasan Rangamadu Desa Cibitung	Rongga	Cibitung	Budaya	Pribadi
104	Wisata air leuwi Gede desa cibedug	Rongga	Cibedug	Alam	Kepala desa
105	Gunung Panenjoan desa sukamanah	Rongga	Sukamanah	Alam	Desa
106	Puspa Nangelang desa sukamanah	Rongga	Sukamanah	Alam	Desa
107	Perang Lodong	Rongga		Budaya	Desa
108	Panyawangan Puncak karamat	Sindangkerta	Cintakarya	Alam	POKDARWIS
109	Panyawangan curug panyandaan	Sindangkerta	Weninggalih	Alam	Karang taruna
110	Wisata Kampung Kopi	Sindangkerta	Mekarwangi	Buatan	Masyarakat
111	Wisata Lebah Madu	Sindangkerta	Mekarwangi	Buatan	Karang taruna
112	Gunung Padang	Sindangkerta	Wangunsari	Alam	Kuncen
113	Curug Gawang	Sindangkerta	Wangunsari	Alam	Desa wangunsari
114	Buper Tangsijaya	Sindangkerta	Tangsijaya	Alam	POKDARWIS
115	Curug Ngebul	Sindangkerta	Weninggalih	Alam	Karang taruna
116	Desa Wisata Sirnajaya,Gununghalu	Gununghalu	Sirnajaya	Alam	Masyarakat
117	Datar Nangka	Gununghalu	Bunijaya	Alam	Masyarakat
118	Arung jeram	Gununghalu	Sirnajaya	Alam	Karang taruna
119	Ruwatan	Gununghalu		Budaya	Kuncen
120	Batu Oncom	Gununghalu		Budaya	Desa wangunsari
121	Kampung Mekah	Gununghalu		Budaya	Desa wangunsari
122	Gua Jepang	Gununghalu		Budaya	Masyarakat
123	Penenjoan	Gununghalu		Alam	PTPN VIII
124	Kolam Kubangpari	Gununghalu	Sukasari	Buatan	Desa
125	Curug sodong	Gununghalu		Alam	PERHUTANI
126	Pasir Panineungan	Gununghalu		Alam	Desa
127	Situs gununghalu	Gununghalu	Gununghalu	Budaya	Masyarakat
128	Batu Lawang	Gununghalu		Budaya	Masyarakat
129	Curug Cilingga Payung	Gununghalu	Gununghalu	Alam	PERHUTANI
130	Wana Wisata Curug Sawer Kec.cililin	Cililin	Karangtanjun	Alam	Perum (BUMN)
131	Desa Wisata Mukapayung, Cililin	Cililin	Mukapayung	Alam	Masyarakat
132	Sumur Kahuripan Pinus Pananjung	Cililin	Kidangpananj	Budaya	Masyarakat
133	Situs Purbakala Muka Payung Desa	Cililin	Mukapayung	Budaya	Perhutani
134	Situs Patilasan Dipati Ukur Tegalleja	Cililin	Mukapayung	Budaya	Perhutani
135	Situs Munding Jaya Kp. Sawah Kaweni	Cililin	Mukapayung	Budaya	Perhutani
136	Panjat Tebing Batu Saheng Kp. Gunung	Cililin	Mukapayung	Alam	Perhutani
137	Gedong Dalapan Bangker Belanda Kp.	Cililin	Karanganyar	Budaya	Kodam III
138	Punis Manglid Mukti glid Desa Karya	Cililin		Alam	Perhutani
139	Pemancingan Alam Endah,	Cikalongweta	Tagog Apu	Buatan	Swasta
140	Desa Wisata Rende, Cikalongwetan	Cikalongweta	Rende	Alam	Masyarakat
141	Bukit Senyum Cikalongwetan	Cikalongweta	Cipada	Alam	Pokdarwis
142	Sindang Geulis Kahuripan,	Cikalongweta	Ganjarsari	Alam	Pokdarwis
143	Wisata Alam Lembangdano	Cikalongweta	Cipada	Alam	Pokdarwis
144	Wisata Junghill	Cikalongweta	Bojongmekar	Alam	Desa
145	Sungai Cikahuripan Cipongkor	Cipongkor	Barangsiang	Alam	Pokdarwis
146	Agrowisata dan Sirkuit Motor Cross Kp.	Cipongkor	Citalem	Alam	Pokdarwis
147	Agrowisata Pertanian RT. 04/05 Desa	Cipongkor	Sarinagen	Alam	Pokdarwis
148	Wisata Religi Makom Karomah Kp.	Cipongkor	Cijenuk	Budaya	Pokdarwis
149	Waduk Cirata, Cipeundeuy	Cipeundeuy	Nanggeleng	Buatan	Perum (BUMN)

No	Nama Objek Wisata	Lokasi		Tipe	Pengelola
150	Wisata Buangan Cirata	Cipeundeuy	Ciroyom	Buatan	Desa
151	Bajabang Eduar	Cipeundeuy	Nanggeleng	Buatan	Swasta
152	Desa Wisata Junghil	Cipeundeuy	Bojongmekar	Alam	Desa
153	Sanghyang Heuleut, Saguling	Saguling	Rajamandala	Alam	Pokdarwis
154	Sanghyang Kenit	Saguling	Rajamandala	Alam	Pokdarwis
155	Waduk Saguling, Saguling	Saguling	Saguling	Alam	PT.INDONESIA
156	Wahoo waterworld	Padalarang	Jayamekar	Buatan	swasta
158	Hutan Mycelia Wahana Edukasi	Lembang	Cikole	Buatan	swasta
157	The Nice Park Bandung	Cisarua	Jambudipa	Buatan	swasta

Sumber: Dinas Pariwisata & Kebudayaan, Kabupaten Bandung Barat, 2025

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan Bandung Raya dan kesepakatan bersama di antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama para pejabat berwenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah terkait, ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bandung Barat. Satu-satunya sumber air baku potensial dan berkapasitas besar di Kabupaten Bandung Barat adalah aliran Sungai Citarum yang dikenal sebagai Waduk Saguling. Belum atau tidak banyak dimanfaatkan karena sudah banyak tercemar limbah industri juga terpolusi limbah domestik baik di badan air itu sendiri maupun yang bersumber dari buangan 12 sungai-sungai yang berfungsi sebagai drainase induk kota telah pula bermuara Sungai Citarum. Selain menjadikan biaya produksinya tinggi, juga mentransmisikan hasil produksinya ke pusat-pusat kegiatan ekonomi perlu ditunjang sistem perpipaan yang berbiaya tinggi.

1) Daya Dukung Air

Daya Dukung air di Kabupaten Bandung Barat diketahui berdasarkan pendekatan neraca air yaitu rasio antara pemanfaatan air untuk kebutuhan penduduk dibandingkan dengan potensi air permukaan yang dihasilkan dari PDAM. Potensi sumber mata air yang dimanfaatkan terdiri dari yang ada di beberapa lokasi, serta pemanfaatan air baku dari Waduk Saguling yang memiliki potensi yang baik. Daya dukung air sangat tergantung dari infrastruktur yang dibangun oleh PDAM sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan oleh penduduk.

Adapun sumber air tanah tidak dijadikan sebagai dasar perhitungan dengan asumsi kebutuhan saat ini merupakan upaya berdasarkan distribusi air permukaan. Kebutuhan air tergolong besar ditemukan di Kecamatan Cikalongwetan, dan Gununghalu dengan nilai masing-masing mencapai 323 juta m3/tahun dan 295 juta m3/thn. Ketersediaan air di Kabupaten Bandung Barat dianalisis melalui pendekatan metode rasional dengan basis wilayah DAS sebagai tangakapan air dan jasa eksosistem penyedia air dalam sisem grid. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Batujajar sebesar 915 juta m3/tahun. Selanjutnya perbandingan antara kebutuhan air total dan ketersediaan air bersih untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.11. Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Kebutuhan air m3/thn	Ketersediaan Air m3/thn	Selisih Ketersediaan-Kebutuhan	Status Daya Dukung Daya Tampung Air
1	Batujajar	114.920.000	915.021.765,83	800.101.765,83	Belum Terlampaui
2	Cihampelas	176.305.600	263.001.742,59	86.696.142,59	Belum Terlampaui
3	Cikalongwetan	323.084.800	499.767,924,86	176.683.124,86	Belum Terlampaui
4	Cililin	177.128.000	400.574.387,55	223.446.387,55	Belum Terlampaui
5	Cipatat	289.004.800	580.039.233,16	291.034.433,16	Belum Terlampaui
6	Cipeundeuy	185.041.600	602.046.421,27	417.004.821,27	Belum Terlampaui
7	Cipongkor	167.812.800	450.737.247,99	282.924.447,99	Belum Terlampaui
8	Cisarua	138.528.000	266.890.202,94	128.362.202,94	Belum Terlampaui
9	Gununghalu	295.366.400	633.991.371,92	338.624.971,92	Belum Terlampaui
10	Lembang	254.403.200	411.088.125,57	156.684.925,57	Belum Terlampaui
11	Ngamprah	111.564.800	325.607.800,64	214.043.000,64	Belum Terlampaui
12	Padalarang	178.100.800	507.977.608,95	329.876.808,95	Belum Terlampaui
13	Parongpong	107.875.200	179.548.756,80	71.673.556,80	Belum Terlampaui
14	Rongga	146.011.200	466.009.056,05	319.997.856,05	Belum Terlampaui
15	Saguling	178.254.400	799.321.938,59	621.067.538,59	Belum Terlampaui
16	Sindangkerta	149.654.400	406.795.914,93	257.141.514,93	Belum Terlampaui
	Jumlah	**2.993.056.000**	**7.708.419.499,63**	**4.715.363.499,63**	**Belum Terlampaui**

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJMD, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh kecamatan secara total berada pada daya dukung air yang belum terlampaui. Kebutuhan total air bersih di Kab. Bandung Barat mencapai 2,993 juta m3/tahun, sehingga selisih ketersediaan air dengan kebutuhan air sebesar 4,715 juta m3/tahun, secara keseluruhan belum terlampaui namun jika dilihat lebih detail terdapat beberapa kawasan yang berada pada daya dukung yang sudah terlampaui.

Tabel 2.12. Status Daya Dukung Air di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Terlampaui	Belum Terlampaui	Total (ha)
1	Kec. Batujajar	1.240,62	1.861,48	3.102,10
2	Kec. Cihampelas	2.260,56	2.429,62	4.690,18

3	Kec. Cikalongwetan	4.710,11	6.350,40	11.060,51
4	Kec. Cililin	2.431,01	5.328,86	7.759,87
5	Kec. Cipatat	2.829,61	9.728,98	12.558,59
6	Kec. Cipeundeuy	2.822,86	7.362,87	10.185,73
7	Kec. Cipongkor	1.803,58	6.187,80	7.991,38
8	Kec. Cisarua	1.639,52	3.907,63	5.547,14
9	Kec. Gununghalu	3.451,71	12.042,51	15.494,22
10	Kec. Lembang	2.367,79	7.429,03	9.796,83
11	Kec. Ngamprah	1.266,87	2.288,14	3.555,02
12	Kec. Padalarang	1.252,25	3.895,74	5.148,00
13	Kec. Parongpong	1.276,00	3.213,77	4.489,77
14	Kec. Rongga	2.003,84	9.220,93	11.224,77
15	Kec. Saguling	1.721,71	3.420,60	5.142,31
16	Kec. Sindangkerta	2.517,47	8.079,76	10.597,24
Total		**35.595,53**	**92.748,12**	**128.343,65**

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJMD, 2025

2) Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan adalah kemampuan lahan dalam produksi pangan di Kabupaten Bandung Barat yang meliputi 12 komoditi, yaitu Beras, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Jagung, Pisang, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Durian, Pepaya, Mangga, Jambu, dan Nangka. Sebagian Besar sumber pangan di Kabupaten Bandung Barat adalah beras dengan produksi sebesar 333.475.699 Kg, berikutnya adalah ubi kayu 34.443.000 Kg, Jagung 38.075.000 kg, Pisang 28.264.700. Produksi pangan terkecil pepaya sebesar 142.600 kg.

Daya dukung pangan di Kabupaten Bandung ialah tingkat produksi beras dibagi kebutuhan Konsumsi beras penduduk, menghasilkan indeks daya dukung pangan, dengan kriteria Daya Dukung Pangan Tinggi = DD Pangan ≥ 1 dan Daya Dukung Pangan Rendah = DD Pangan ≤ 1. Secara umum Kabupaten Bandung Barat memiliki daya dukung pangan dengan indeks rasio 1,34 yaitu nilai produksi lebih besar dari konsumsi penduduk. Terdapat 5 kecamatan dengan status daya dukung pangan terlampaui dengan indeks ratio <1, yaitu: Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Cisarua, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13. Luas Daya Dukung Pangan (Beras) di Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2022	AKG per kapita/hari (kkal)	Konsumsi KBI (kkal)	Jumlah Produksi (Kkal)	Selisih Daya Dukung	Ratio	Status Daya Dukung
Rongga	62.579	2.150	49.108.870.250	173.104.233.880	123.995.363.630	3,52	Belum terlampaui
Gununghalu	81.392	2.150	63.872.372.000	72.895.806.120	9.023.434.120	1,14	Belum terlampaui
Sindangkerta	76.033	2.150	59.666.899.750	120.279.596.680	60.612.696.930	2,02	Belum terlampaui
Cililin	98.680	2.150	77.439.130.000	90.112.179.380	12.673.049.380	2,16	Belum terlampaui
Cihampelas	139.364	2.150	109.365.899.000	88.179.043.440	(21.186.855.560)	0,81	Belum terlampaui
Cipongkor	103.891	2.150	81.528.462.250	163.082.169.440	81.553.707.190	2,00	Belum terlampaui

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2022	AKG per kapita/hari (kkal)	Konsumsi KBI (kkal)	Jumlah Produksi (Kkal)	Selisih Daya Dukung	Ratio	Status Daya Dukung
Batujajar	112.352	2.150	88.168.232.000	76.077.078.720	(12.091.153.280)	0,86	Belum terlampaui
Saguling	35.237	2.150	27.652.235.750	60.064.667.840	32.412.432.090	2,17	Belum terlampaui
Cipatat	144.673	2.150	113.532.136.750	146.790.190.400	33.258.053.650	1,29	Belum terlampaui
Padalarang	186.724	2.150	146.531.659.000	67.269.387.180	(79.262.271.820)	0,46	Telah Melampaui
Ngamprah	182.536	2.150	143.245.126.000	48.958.697.040	(94.286.428.960)	0,34	Telah Melampaui
Parongpong	116.161	2.150	91.157.344.750	504.182.600	(90.653.162.150)	0,01	Telah Melampaui
Lembang	202.603	2.150	158.992.704.250	2.500.038.300	(156.492.665.950)	0,02	Telah Melampaui
Cisarua	81.744	2.150	64.148.604.000	8.956.965.680	(55.191.638.320)	0,14	Telah Melampaui
Cikalongwetan	132.220	2.150	103.759.645.000	168.998.911.400	65.239.266.400	1,63	Belum terlampaui
Cipeundeuy	90.780	2.150	71.239.605.000	146.211.400.260	74.971.795.260	2,05	Belum terlampaui
Jumlah	**1.430.260**		**1.449.408.925.750**	**1.433.984.548.360**	**(15.424.377.390)**	**0,99**	Terlampaui

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJMD, 2025

Secara umum Kabupaten Bandung Barat memiliki daya dukung pangan dengan indeks ratio 1,23 yaitu nilai produksi lebih besar dari konsumsi penduduk. Terdapat 5 kecamatan dengan status daya dukung pangan terlampaui dengan indeks ratio <1, yaitu: Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Cisarua, Cihampelas, dan Batujajar. Daya dukung pangan akan terus menurun seiring dengan pertambahan penduduk dan perubahan lahan pertanian menjadi lahan terbangun, maka berdampak terhadap kurangnya produksi pangan di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat, berikut ditampilkan kondisi ketersedian pangan dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan pangan sampai dengan tahun 2029.

Tabel 2.14. Skenario Proyeksi Daya Dukung Penyedia Pangan di Kab Bandung Barat

Tahun	Produksi Pangan (Kkal)	Konsumsi Pangan (Kkal)	Selisih Daya Dukung (Kkal)	Rasio Daya Dukung Pangan (Kkal)	Status Daya Dukung
2020	1,404,421,582,120	964,536,225,000	439,885,357,120	1.46	Belum Terlampaui
2021	1,404,421,582,120	971,316,465,000	433,105,117,120	1.45	Belum Terlampaui
2022	1,404,421,582,120	978,096,705,000	426,324,877,120	1.44	Belum Terlampaui
2023	1,404,421,582,120	984,876,945,000	419,544,637,120	1.43	Belum Terlampaui
2024	1,404,421,582,120	991,657,185,000	412,764,397,120	1.42	Belum Terlampaui
2025	1,404,421,582,120	998,437,425,000	405,984,157,120	1.41	Belum Terlampaui
2026	1,404,421,582,120	1,005,217,665,000	399,203,917,120	1.40	Belum Terlampaui
2027	1,404,421,582,120	1,011,997,905,000	392,423,677,120	1.39	Belum Terlampaui
2028	1,404,421,582,120	1,018,778,145,000	385,643,437,120	1.38	Belum Terlampaui
2029	1,404,421,582,120	1,025,558,385,000	378,863,197,120	1.37	Belum Terlampaui

Sumber: Hasil Analisis KLHS RPJPD, 2025

Daya Dukung pangan di Kabupaten Bandung Barat dengan indikator beras menunjukkan bahwa daya dukung pangan pada 2029 memiliki ratio sebesar 1,42, yakni ketersediaan beras masih lebih besar dari konsumsi beras. Diproyeksikan pada tahun 2029 daya dukung pangan menjadi 1,37 atau status terlampaui. Dengan demikian untuk kebutuhan pangan diperlukan suplay stok pangan dari dari kabupaten lain yang memiliki daya dukung pangan yang tinggi. (asumsi : Jumlah penduduk meningkat, Tutupan lahan tetap hingga tahun 2029).

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Potensi Sumber daya air permukaan di Kab. Bandung Barat berupa Waduk/Danau Buatan yaitu Waduk Saguling dan Cirata selain berfungsi sebagai sumber daya air juga dimanfaatkan sebagai potensi energi tenaga listrik dan tenaga surya. Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk Saguling dengan kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m3 digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Waduk Cirata terletak kearah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m3, dengan ketinggian mukaair + 220 m/dpl. Waduk Cirata digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Selain itu, akan dibangun pula pembangkit listrik lainnya dengan sistem Pump Storage yaitu PLTA Cisokan yang menggunakan aliran sungai Cisokan di Kecamatan Rongga dengan kapasitas 1.040 MW. Potensi energi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat, selain PLTA dan PLTS tersebut juga terdapat potensi energi berupa cadangan geothermal sebesar 190 MW yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu di Kecamatan Lembang serta Pengembangan Bioethanol dari Singkong di beberapa kawasan di Kab. Bandung Barat akan segera diintensifkan, yang merupakan sumber energi baru terbarukan.

Secara hidrologi, sumber daya air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, kondisi ketersediaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari sumber daya air permukaan dan air tanah, berupa sumber mata air, sungai, danau, rawa, embung. Kabupaten Bandung Barat memiliki kurang lebih 90 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Citarum Hulu, dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar. Sungai-sungai ini termasuk ke dalam Sub DAS Cikapundung (Lembang, Cisarua, Parongpong) dan Sub DAS Citarum (Cililin, Ngamprah, Batujajar, Padalarang) dengan total panjang adalah 3.941,68 Km.

Gambar 2.4. Peta Sumber Daya Air Kabupaten Bandung Barat

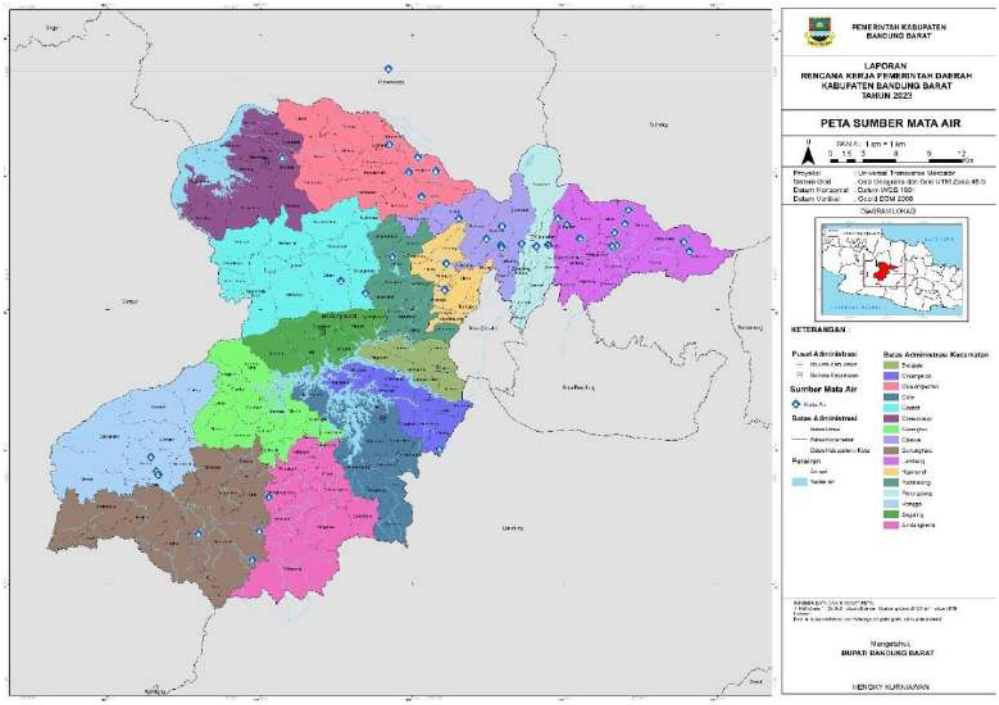

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Sumber daya air permukaan lainnya di Kabupaten Bandung Barat berupa 2 (dua) Danau/Situ Alam dan 2 Waduk/Danau Buatan. Danau/Situ Alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ Ciburuy serta Waduk Saguling dan Cirata, dengan kondisi sebagai berikut:

1) Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang digunakan untuk irigasi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta m3. Situ Lembang digunakan untuk irigasi dan terletak di bagian hulu DAS Cimahi, kapasitanya sebesar 3,7 m3 dengan daerah tangkapan situ tersebut diperkirakan 6,3 km3.
2) Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk tersebut digunakan untuk PLTA, irigasi dan penyediaan air minum. Kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m3.
3) Waduk Cirata terletak kearah hilir dari Waduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m3, dengan ketinggian mukaair + 220 m/dpl.

Potensi Mata air di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebanyak 223 lokasi, yang tersebar di 12 Kecamatan, dengan debit air sebesar 1-130 liter/detik seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 2.15. Potensi Sumber Mata Air di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Kisaran Debit (lit/det) saat musim hujan
1.	Lembang	119	1 - 40
2.	Parongpong	26	1,5 - 100
3.	Cisarua	62	1- 60
4.	Ngamprah	46	1 - 130
5.	Cikalongwetan	73	1 - 50
6.	Padalarang	13	1 - 15
7.	Cipatat	28	1,5 -11
8.	Cililin	39	1 - 13
9.	Batujajar	29	0,5 - 3
10	Gununghalu	15	1 - 75
11.	Sindangkerta	32	1 - 8
12.	Cipongkor	24	0,8 - 12
13.	Cipendeuy	44	1 -10
14.	Rongga	116	0,5 - 50
15.	Cihampelas	50	2 - 13

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Kebutuhan air bersih di Kab. Bandung Barat yang bersumber dari air permukaan yang telah termanfaatkan sebesar 19.829 m3/hari, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Kebutuhan Air Bersih di Kab. Bandung Barat Yang Bersumber Dari Air Permukaan Yang Telah Termanfaatkan

No	Sumber air Permukaan yang telah dimanfaatkan	Debit Air (m3/hari)
1	Intake SPAM Cijanggel	4.320
2	Intake SPAM Cibanteng dan GPI	6.480
3	Intake SPAM Cabang IV Intake Sungai Cijanggel	2.419
4	Intake SPAM Cabang IV Cisarua-Lembang	2.419
5	Intake SPAM Cabang IV Batujajar	2.074
6	Intake SPAM Cabang IV Cililin-Cihampelas Cipatat	1.728
7	Intake SPAM Cabang IV Cibulakan	389
Total		**19.829**

Sumber: Dokumen RISPAM 2024-2044, Dinas PUTR

Sedangkan potensi pemenuhan air yang bersumber dari air permukaan yang dapat dimanfaatkan sebesar 501.984 m3/hr, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17. Potensi Pemenuhan Air di Kab. Bandung Barat Yang Bersumber Dari Bendung

No	Nama Bendung	Debit Air (m3/hari)
1	Bendung Sukawana di DAS Cimahi	37.152
2	Bendung Cimeta di DAS Cimeta	50.976
3	Bendung Cicukang di DAS Cikapundung	16.416
4	Bendung Ciawiruka di DAS Cikapundung	5.184
5	Bendung Cikawari di DAS Cikapundung	43.200
6	Bendung Sekejolang di DAS Cikapundung	29.376
7	Situ lembang	319.680
Total		**501.984**

Sumber: Dokumen RISPAM 2024-2044, Dinas PUTR

Penyediaan pangan pada dasarnya dapat dipenuhi oleh sumber-sumber pangan yang berasal dari pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan hingga sumber daya peternakan. Prioritas pemenuhan dan penyediaan pangan merupakan salah satu aspek penting yang sudah sepatutnya diperhatikan lebih mendalam. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) Kabupaten.

Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Desa diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi. Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah:

- Kecamatan Rongga (Desa Cicadas, Desa Bojong)
- Kecamatan Gununghalu (Desa Sindangjaya, Desa Celak, Desa Sukasari),
- Kecamatan Sindangkerta (Desa Buninegara, Desa Pasirpogor dan Desa Sindangkerta),
- Kecamatan Cililin (Karyamukti, Rancapanggung, Bongas, Batulayang, Kidangpananjung),
- Kecamatan Cihampelas (Desa Singajaya, Desa Tanjungwangi, Desa Situwangi, Desa Pataruman dan Desa Mekarmukti, Desa Cihampelas),
- Kecamatan Cipongkor (Ds. Neglasari, Ds. Cicangkanghilir, Ds. Sukamulya dan Mekarsari),
- Kecamatan Cipatat (Desa Cirawamekar),
- Kecamatan Padalarang (Desa Cipeundeuy dan Desa Tagog Apu),

- Kecamatan Ngamprah (Gadobangkong, Pakuhaji, Cilame, Marhajaya dan Mekarsari)
- Kecamatan Lembang (Desa Cikidang)
- Kecamatan Cikalongwetan (Desa Cikalong, Desa Tenjolaut, Desa Cisomangbarat),
- Kecamatan Cipeundeuy (Nanggeleng, Bojongmekar, Cipeundeuy, dan Sirnagalih).

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indikator untuk mengukur kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan capaian selama 5 (lima) tahun terakhir dari capaian tahun 2020 sebesar 47,14 point menjadi 58,43 poin di tahun 2024 dengan selisih capaian dibanding tahun 2020 adalah sebesar 11,29 point. Walaupun secara tren mengalami kenaikan tetapi secara capaian di tahun 2024 dengan target sebesar 66,55 poin, IKLH Kab. Bandung Barat belum mencapai target. Hal ini disebabkan adanya perubahan metoda baru perhitungan IKLH berdasarkan Permen LHK No. 27 Tahun 2021 dimana terdapat perbedaan mendasar antara rumus lama dan rumus baru. Rumus lama, yang digunakan pada tahun 2020, membagi IKLH menjadi tiga komponen utama: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Sedangkan, rumus baru yang mulai berlaku pada tahun 2021, khususnya untuk perhitungan IKLH di tingkat kabupaten/kota, tidak memasukkan kontribusi Indeks Kualitas Air Laut dan perhitungan IKA menggunakan metode Indeks Pencemaran Air (PIj) serta adanya perubahan bobot masing-masing indeks dalam rumus IKLH di tingkat kabupaten/kota menjadi IKA: 37,6%; IKU: 40,5% dan IKL: 21,9%. Untuk lebih rinci capaian IKLH beserta indikator kompositnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Udara	61,25	45,27	76,98	67,36	73,60
2	Indeks Kualitas Air	40,00	49,17	49,33	47,33	46,90
3	Indeks Kualitas Lahan	41,75	61,44	60,75	48,92	50,16
IKLH		**47,14**	**50,27**	**63,03**	**55,79**	**58,43**

Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Untuk selanjutnya, pada penyusunan dokumen perencanaan tahun 2025-2029, IKLH ditetapkan menjadi indikator makro pembangunan dengan penetapan target tahun 2025-2029 mengacu berdasarkan Berita Acara No: BA-13/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B04/2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target IKLH Prov. Jawa Barat Tahun 2025-2045 (termasuk target IKLH Kab/Kota di Jawa Barat). Berdasarkan tabel capaian IKLH tersebut diatas, capaian Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan indeks komposit yang paling rendah masih dibawah capaian 50 poin, hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan terutama bidang urusan lingkungan hidup.

Hal tersebut diperkuat, berdasarkan data pemantauan kualitas air sungai oleh DLH Kabupaten Bandung Barat ada 17 titik pantau (31,48%) yang memiliki status mutu air dengan cemar ringan, sebanyak 26 titik pantau (48,15%) berstatus cemar sedang dan 11 titik pantau (20,37%) berstatus cemar berat.

Berdasarkan hasil pengukuran sampling kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat di delapan (8) sungai yaitu Sungai Ciburandul, Cigantungan, Cimerang, Citunjung, Citarum, Cihaur, Cipeusing dan Cibingin di bagian hulu, tengah, dan hilir dengan hasil pengukuran kualitas air sungai berdasarkan analisis laboratorium di lima sungai tercatat bahwa sekitar 5-12 parameter tidak memenuhi baku mutu. Sungai Cihaur bagian hilir dan Sungai Cibingin bagian tengah merupakan sungai yang paling banyak parameter yang tidak memenuhi baku mutu dibanding enam sungai lainnya. Sungai Cihaur hilir terdapat 12 parameter dan Sungai Cibingin bagian tengah terdapat 11 parameter yang tidak memenuhi baku mutu.

Salah satu isu lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat adalah permasalahan sampah. Faktor pendorong dari permasalahan sampah adalah perkembangan penduduk di Kabupaten Barat yang seiring dengan adanya peningkatan potensi timbulan sampah. Upaya pengelolaan sampah selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui berbagai cara, seperti peningkatan armada transportasi dan sumber daya manusia dalam pengangkutan sampah. Beberpa permasalahan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

- Sampah yang terkelola sampai saat ini baru melayani 11 kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
- Sementara dari total timbulan sampah yang ada di Kabupaten Bandung Barat hanya 13,34% yang saat ini terangkut ke TPA Regional Sarimukti.
- Kurangnya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia pengelolaan sampahan
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dan kebersihan secara mandiri
- Regulasi masih membebani UPT dan belum mengatur tentang sangsi pelanggaran pengelolaan persampahan.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi mengakibatkan pula terjadinya timbulan sampah yang bila tidak dapat diantisipasi pengelolaannya akan berdampak terhadap lingkungan. Timbulan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran buruk terhadap wajah suatu kawasan, selain itu juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit. Permasalahan sampah seharusnya dapat dikelola dengan baik dengan melibatkan lintas sektor, karena permasalahan sampah melibatkankan dari hulu sampai hilir, dari masyarakat hingga ke pemerintah yang bertanggung jawab. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19. Pengelolaan Sampah di Kab. Bandung Barat s.d Maret 2025

PENGELOLAAN SAMPAH DI KAB. BANDUNG BARAT	(Ton/Hari)	Presentase
Timbunan sampah yang dihasilkan	**763,1**	
Pengangkutan Sampah ke TPA	101,8	13,34
Tungku Pembakaran	20,1	2,63
Pengurangan Sampah yang di olah (Bank Sampah, TPST3R, Pegiat Maggot dan Organik, Pelaku Usaha)	34,6	4,53
Total Sampah yang Terkelola	**156,5**	**20,51**
Total Sampah yang Tidak Terkelola	**606,6**	**79,49**

Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat yaitu kemampuan daerah dalam mengatasi timbulan sampah dengan pengangkutan sampah ke TPA baru sebesar 13,34 persen, dengan tungku pembakaran sebesar 2,63 persen dan melalui pengurangan sampah sebesar 4,53 persen sehingga masih terdapat sebesar 79,49 persen atau 606,6 ton sampah yang belum terkelola. Pengelolaan sampah selain melalui pengangkutan sampah ke TPA dilakukan juga dengan pengelolaan sampah melalui:

1) Insinerasi

yaitu pengelolaan sampah melalui tungku pembakaran dengan cara membakar di dalam tungku bersuhu tinggi (*Insinerator*), di Kabupaten Bandung Barat terdapat 17 lokasi pengelolaan sampah insinerasi dengan potensi volume sampah terolah sebanyak 20,1 ton/hari.

Tabel 2.20. Pengelolaan Sampah Insinerasi di Kabupaten Bandung Barat

No	Tungku Pembakaran	Lokasi	Sampah Terolah (Kg/Hari)
1	Incinerator MOTAH	Desa Mandalawangi	1100
2	Incinerator MOTAH	Desa Cihampelas RW 02	5000
3	Incinerator MOTAH	TPS3R Batujajar Barat	10000
4	TPS Sementara Citalem	Cipongkor	143
5	Pembakaran Sampah RW 4 Citalem	Cipongkor	71
6	Pembakaran Sampah Rw 5 Citalem	Cipongkor	14
7	Incinerator Pasirhalang RW 10	Cisarua	45
8	Incinerator Tugumukti RW 7	Cisarua	62
9	Tungku Pembakaran Kec. Cililin	Cililin	10
10	Tungku Pembakaran RW 1	Cililin	200
11	Tungku Pembakaran RW 3	Cililin	200
12	Tungku Pembakaran RW 17	Cililin	1.000
13	Tungku Pembakaran Nanggerang	Cililin	10
14	Mesin Semi Incinerator Lembang	Lembang	400
15	Pembakaran Sampah Kayu Ambon	Lembang	10
16	BUMDES Cibodas	Lembang	1.000
17	Pangauban Pembakaran RW	Batujajar	857
Jumlah			**20.123**

Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

2) Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)

yaitu fasilitas pengelolaan sampah menggunakan prinsip mengurangi, menggunakan ulang dan mendaur ulang sampah, di Kabupaten Bandung Barat terdapat 16 lokasi TPS3R dengan potensi volume sampah terolah sebanyak 5,971 ton/hari.

Tabel 2.21. Pengelolaan Sampah TPS3R di Kabupaten Bandung Barat

No	Nama TPS3R	Luas Lahan TPS3R	Status Lahan TPS3R	Unit Pengelola TPS3R	Volume terolah (kg/hari)
1	TPS 3R BANGKIT BERSAMA	200 m2	Carik Desa	Bank Sampah Induk Bening Saguling	2000
2	TPS 3R CITAPEN RESIK	200 m2	Carik Desa	KPP/KSM	500
3	TPS 3R SUKAMEKAR	200 m2	Carik Desa	Desa/Bumdes	150
4	TPS 3R ANUGERAH PAGERWANGI	200 m2	Carik Desa	Desa/Bumdes	50
5	TPS 3R BERSEKA KARYAWANGI	200 m2	Carik Desa	Desa/Bumdes	500
6	TPS 3R MANDALASARI	200 m2	Carik Desa	Desa/Bumdes	25
7	TPS 3R LESTARI KERTAWANGI	200 m2	Carik Desa	Desa/Bumdes	200
8	TPS 3R KAPAS NIRMALA PASIRLANGU	200 m2	Carik Desa	Bank Sampah Kabut	
9	TPS 3R BERSAMA	200 m2	Carik Desa	Desa/Bumdes	170
10	TPS 3R SABILULUNGAN	200 m2	Carik Desa	Desa/Bumdes	
11	TPS 3R KERTARAHARJA BUDIHARJA	200 m2	Carik Desa	Desa/Bumdes	286
12	TPS 3R PERMATA JAYA TAGOG APU	200 m2	Carik Desa	KPP/KSM	80
13	TPS 3R RANCA BERSEKA BATUJAJAR BARAT	200 m2	Carik Desa	Desa/Bumdes	210
14	TPS 3R MALAPAH	200 m2	Carik Desa		
15	TPS 3R SAUNG BERSIH PEMDA BANDUNG BARAT	200 m2	Tanah Pemda	Tim Pengelola	500
16	TPS3R CIKOLE	400 m2	SHM	Satgas Lembang Bersih	1300
Jumlah					**5971**

Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

3) Bank Sampah

yaitu sistem pengelolaan sampah yang dijalankan layaknya perbankan, dimana masyarakat bisa menabung sampah kering dan mendapatkan imbalan berupa uang atau sembako, atau bentuk lain, di Kabupaten Bandung Barat terdapat 16 lokasi TPS3R dengan potensi volume sampah terolah sebanyak 10,101 ton/hari.

Tabel 2.22. Pengelolaan Sampah Bank Sampah di Kabupaten Bandung Barat

No	Nama Bank Sampah	Sampah Terkelola (Kg/Bulan)
1	Bank Sampah Induk Bening Saguling Foundation	76000
2	Bank Sampah Kabut	1.200
3	BS Bina Masyarakat Mandiri	1.500
4	Bank Sampah Bintang RT 9 RW 16	1.200
5	BSU Cipta Pemuda Batujajar	3.000
6	BSU Tunas Inspiratif	150
7	Bank Sampah Sauyunan	3.000
8	Bank Sampah Jembar Anugrah	2.400
9	Bank Sampah Pencut Lestari	150
10	Bank Sampah Sahdu	1.200

No	Nama Bank Sampah	Sampah Terkelola (Kg/Bulan)
11	Bank Sampah Motekar Cihampelas	800
12	Bank Sampah Cidadap Berseri	300
13	Bank Sampah Berkah Lestari	150
14	Bank Sampah Sukamaju Sejahtera	3.000
15	Bank Sampah Si Cikal	150
16	Bank Sampah Berkah Mandiri	38
17	Bank Sampah Unit Bukit Berlian	10.000
18	Masyarakat Cinta Lingkungan	900
19	BS Sinar Harapan (Resik Kenari)	1.600
20	Bank Sampah Permata Resik	900
21	Bank Sampah Rereongan	4.500
22	Bank Sampah Sukamulus	450
23	Bank Sampah Wangun Harja	18.000
24	Bank Sampah Phiesaw	750
25	Bank Sampah Melati 08	2.400
26	Bank Sampah Muamalat	1.140
27	Bank Sampah RW 11	600
28	Pengepul Sampah RW 6	3.000
29	Banmk Sampah Buni Asih	7.500
30	Bank Sampah Taruna	1.200
31	Bank Sampah Sehati Berdikari	6.120
32	Bank Sampah Jalur 07	600
33	Bank Sampah Alamku	360
34	Bank Sampah Mesjid Al Ikhlas	3.000
35	Bank Sampah Muhammadiyah	600
36	Bermeet	1.500
37	Jamilah (Jambudipa memilah sampah)	1.200
38	Kampung kurang sampah	3.000
39	Bank Sampah Laksana Bersatu	750
40	Bank Sampah Stone Garden	1.500
41	Pasirhalang serasi 3	5.130
42	Pasirhalang serasi 4	8.550
43	Pasirhalang serasi 10	3.300
44	Pasirhalang serasi 12	4.260
45	Tugumukti Mandiri 5	2.100
46	Tugumukti Mandiri 6	4.200
47	Tugumukti Mandiri 7	3.300
48	Bank Sampah Kebon Hui	900
49	Bank Sampah Cempaka XII	2.500
50	Teratai 11	2.500

No	Nama Bank Sampah	Sampah Terkelola (Kg/Bulan)
51	Bank Sampah 16	600
52	Bank Sampah Cihampelas Asri	12.330
53	Bank Sampah H and H Fire	24.000
54	Bank Sampah Wawan	3.000
55	Bank Sampah RW 3 Langensari	10.728
56	Lebak Cihideung	675
57	Karya Ibu	2.850
58	Posdaya PAUD	5.250
59	Relawan lembang	4.500
60	Karang Taruna Cikidang RW 10	3.000
61	Bank Sampah RW 15	9.150
62	Celak Kaler	9.000
63	Arunika	60
64	Bank Sampah RW Cangkorah	428,7
65	Bank Sampah RW 1 Bartim	6.000
66	Bank Sampah RW 8 Bartim	3.600
67	Bank Sampah RW 12 Bartim	4.800
68	Bank Sampah 13 Galanggang	750
69	Gema Remaja	180
Jumlah per Bulan		**303.021**
Jumlah per Hari		**10.101**

Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

4) Pengelolaan sampah oleh Pegiat Maggot

Pengelolaan sampah oleh Pegiat Maggot (maggot adalah larva lalat Black Soldier Fly) adalah memanfaatkan maggot untuk mengurai sampah organik, khususnya sampah makanan, sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Maggot akan memakan sampah organik dan mengubahnya menjadi protein yang berguna sebagai pakan ternak atau bahkan pupuk organi, di Kabupaten Bandung Barat terdapat 43 Pegiat Maggot dengan potensi volume sampah terolah sebanyak 4,005 ton/hari.

Tabel 2.23. Pengelolan Sampah oleh Pegiat Maggot di Kabupaten Bandung Barat

No	Pegiat Maggot	Sampah Terkelola (kg/hari)	Alamat
1	Pegiat Maggot Hegar 7	150	RW 7, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah
2	Maggot Cipeundeuy	100	Kp. Hegarmanah RT 02/RW 13, Desa Cipeundeuy, Kec. Cipeundeuy
3	Sekretariat Saung Maggot KBB	100	Kp. Bojongkoneng Landeuh Kec. Ngamprah RT 02 RW 11
4	Pegiat Maggot Pasirhalang RW 3	50	RW 3, Desa Pasirhalang, Kec. Cisarua
5	Pegiat Maggot Pasirhalang RW 4	65	RW 4, Desa Pasirhalang, Kec. Cisarua
6	Pegiat Maggot Tugumukti RW 5	20	RW 5, Desa Tugumukti, Kec. Cisarua
7	Pegiat Maggot Tugumukti RW 6	50	RW 6, Desa Tugumukti, Kec. Cisarua
8	Pegiat Maggot Desa Pasirlangu RW 6	50	RW 6, Desa Pasirhalang, Kec. Cisarua

No	Pegiat Maggot	Sampah Terkelola (kg/hari)	Alamat
9	Pegiat Maggot Desa Cipada	20	Desa Cipada, Kec. Cisarua
10	Pegiat Maggot RW 2	100	RW 2, Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah
11	Maggot Cimanggu	15	RW 11, Desa Cimanggu, Kec. Ngamprah
12	Pegiat Maggot Sukatani	100	RW 3, Desa Sukatani, Kec. Ngamprah
13	Asep Nugraha	100	RW 1, Desa Cililin, Kec. Cililin
14	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Lebakgede, Desa Bojongkoneng, Kec. Ngamprah
15	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Pasireurih, Desa Wangunsari, Kec. Sindangkerta
16	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Palayangan, Desa Pataruman, Kec. Cihampelas
17	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Cipulus, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah
18	Plasma Saung Maggot KBB	100	Puri Cipageran Indah 2 C-3 RT 05 RW 20, Tanimulya, Ngamprah
19	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Ciburial rt 003 rw 008, margajaya, ngamprah
20	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Selaawi, Desa Wangunsari, Kec. Sindangkerta
21	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Cikarang, Desa Cicadas, Kec. Rongga
22	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Kepuh, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang.
23	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Gunung bentang Desa Jayamekar
24	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Cikawati RT 02 RW 06 Desa Pakuhaji Kec. Ngamprah
25	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Pasirkuntul, Desa Bojongkoneng, Ngamprah
26	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Cihaliwung Wetan, Desa Sukatani, Ngamprah
27	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Cidadap, Desa Cilangari, Gununghalu
28	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Cibadak, Desa Cipada, Kec. Cisarua
29	Plasma Saung Maggot KBB	100	Jl. Kolonel Masturi 24, RT 001, RW 011 Jambudipa Cisarua
30	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Cintalaksana Desa Gunungmasigit, Kec. Cipatat
31	Plasma Saung Maggot KBB	100	Kp. Pangleseran Rt 001 Rw 009 Desa Mandalasari Kec. Cikalongwetan
32	Plasma Saung Maggot KBB	100	Rt 02 RW 14 Kp. Station Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat
33	Paguyuban Pegiat Maggot (PPM)	100	Kp Langensari 03/04 Desa.Langensari Kec.Lembang
34	PPM KBB Desa Nanggeleng	100	Kp. Cikirayhilir 01/014 Des. Nanggeleng Kec. Cipeundeuy
35	PPM KBB Korcam Cihampelas	100	Kp. Cicalengka RT/RW 04/03 Des. Mekarmukti Kec.Cihanpelas
36	PPM KBB Korcam Cililin	100	Kp. Cijambu RT/RW 01/05 Desa Karanganyar Kec.Cililin
37	PPM KBB Korcam Gununghalu	100	Kp. Ciawitali 02/02 Des. Bunijaya, Gununghalu
38	PPM KBB Korcam Cipongkor	100	Kp. Pasir buntu RT/RW 02/08 Des. Cicangkang Hilir, Cipongkor
39	PPM KBB Kordes Batulayang	100	Kp. Cisitu RT/RW 01/09 Des. Batulayang Kec.Cililin
40	PPM KBB Kordes Cijenuk	100	Kp. Cinangsi RT/RW 02/08 Desa Cijenuk Kec.Cipongkor
41	PPM KBB Kordes Karanganyar	100	Kp. Cikenung RT/RW 03/05 Des. karanganyar Kec.Cililin
42	Pegiat Maggot Cangkorah	150	RW 1, Desa Cangkorah, Batujajar
43	Maggot Bukit Berlian	135	Perum Bukit Berlian, Kertamulya, Padalarang
Jumlah		**4005**	

Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

5) Pengelolaan Sampah oleh Pegiat Organik

Pengelolaan sampah oleh Pegiat Organik yaitu proses pengolahan sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti kompos, biogas, atau pakan ternak yang dilakukan oleh Pegiat Organik, di Kabupaten Bandung Barat terdapat 19 Pegiat Organik dengan potensi volume sampah terolah sebanyak 2,483 ton/hari.

Tabel 2.24. Pengelolan Sampah oleh Pegiat Organik di Kabupaten Bandung Barat

No	Nama	Sampah terkelola (kg/hari)
1	Pegiat Sampah Organik Rw 3 Desa Gunungmasigit, Cipatat	50
2	Pegiat Sampah Organik Rw 9 Desa Gunungmasigit, Cipatat	70
3	Pegiat Sampah Organik RW 17 Nyalindung, Cipatat	10
4	Pegiat Sampah Organik RW 13 Nyalindung, Cipatat (1)	15
5	Pegiat Sampah Organik RW 13 Nyalindung, Cipatat (2)	5
6	Bank Sampah Motekar, Cihampelas	20
7	Komposting Lomajaya, Jayamekar, Padalarang	100
8	Bank Sampah Sukamaju Sejahtera	100
9	Ecovillage laskar Pelangi	8
10	Karang Taruna RW 2, Desa Ngamprah, Kec. Ngamprah	100
11	Brajamusti, RW 3 Desa Cikahuripan, Lembang	89
12	Karang taruna RW 4 Desa Wangunharja, Lembang	500
13	Karang taruna RW 5 Desa Wangunharja, Lembang	300
14	TPS Cikidang, RW 10, Desa Cikidang, Lembang	250
15	Nurul Insan Komposting, RW 15 Desa Galanggang, Batujajar	85,8
16	Pupuk Kompos untuk petani, Desa Selacau, Batujajar	100
17	Desa Ngamprah dan pengurus RW 6, Ngamprah	500
18	Biogas, Desa Kidangpananjung, Cililin	10
19	Budidaya Sidat Sukamaju Bersama, Desa Cilame, Ngamprah	171
Jumlah		**2483,8**

Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

6) Pengelolaan Sampah oleh Pelaku Usaha

Selain oleh Pemerintah daerah dan masyarakat, pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat juga dilakukan oleh pelaku usaha, berdasarkan data s.d tahun 2024 bahwa terdapat 15 Pelaku Usaha yang mengelola sampah mandiri dengan kapasitas sampah terkelola sebanyak 12 ton/hari.

Tabel 2.25. Pengelolan Sampah oleh Pelaku Usaha di Kabupaten Bandung Barat

No	Pengurangan Sampah Oleh Pelaku Usaha	Kapasitas (Kg/hari)
1	Orchid Forest	185
2	Laxmi Resto	7
3	Terminal Wisata Grafika Cikole	2.758
4	SanGria Resort & SPA	16
5	Lembang Park & Zoo	33
6	Sandalwood Boutique Hotel Lembang	16
7	Hotel Pesona Bambu	11
8	Dusun Bambu	288
9	Burgundy Dine & Wine	14
10	Puteri Gunung Hotel	85
11	Grand Panorama	16
12	Cikole Jayagiri Resort	66
13	Asep Stroberi	120
14	Rekosistem	100
15	KBP	8289
Jumlah		**12.005**

Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.1.6 Resiliensi Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Berdasarkan data sistem informasi data indeks kerentanan (SIDIK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa secara umum tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Bandung Barat seluruh desa berada pada tingkat "Kerentanan 3 atau agak rentan" dengan warna Kuning, serta tidak ada desa yang memiliki status sangat rentan. Rendahnya curah hujan menimbulkan kekeringan serta mempengaruhi produksi tanaman padi sawah dan hortikultura maupun perkebunan. Curah hujan yang lebih lebat yang menimbulkan genangan dan kekeringan menyebabkan risiko terjadinya penurunan produksi tanaman pertanian dan perkebunan. Curah hujan yang lebat dapat menyebabkan berlebihnya kadar air atau tergenangnya sawah atau pertanian secara berlebihan serta masa curah hujan dengan kurangnya fotosintesis yang mengakibatkan pembusukan tanaman pertanian.

Bencana kekeringan akibat cuaca ekstrem berdampak terhadap kurangnya debit air pada sungai dan saluran irigasi sehingga tidak mampu mengairi pertanian secara optimal terutama pada lahan beririgasi. Sedangkan pada lahan pertanian tadah hujan dengan tingginya suhu udara dari temperatur normal mengakibatkan terjadinya kekeringan pada lahan pertanian maupun perkebunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah kekeringan adalah dengan peningkatan sistem irigasi, serta peningkatan kualitas lahan pada daerah aliran sungai. Untuk jasa ekosistem pengatur iklim kelas rendah dan sangat rendah masing-masing memiliki luasan sebesar 12.590,39 hektar dan 5.937,24 hektar. Perubahan iklim dapat mempengaruhi aspek kebencanaan, diantaranya terkait dengan bencana kekeringan yang dapat melanda di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi bentang alam Kabupaten Bandung Barat yang merupakan dataran tinggi dan berbentuk cekungan menjadi muara bagi anak-anak sungai. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Bandung Barat rentan terhadap bencana alam baik berupa banjir, longsor, erosi, dan bencana lainnya.

Cara untuk mengidentifikasi kapasitas wilayah dalam menghadapi kerawanan bencana, salah satunya dapat diketahui melalui tingkat indeks jasa lingkungan/ekosistem dalam pencegahan dan perlindungan terhadap bencana. Jenis jasa ekosistem ini merupakan infrastruktur dari alam yang bertujuan untuk melindungi dan mencegah kejadian bencana, diantaranya: jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami.

Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam 68.126,04 hektar area (53%) di Kabupaten Bandung Barat diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Alam sangat tinggi, 24.937,99 hektar (19,14%) diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Alam kelas sedang 8.005,35 hektar area (6,23%) diklasifikasikan sebagai area dengan jasa lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Alam sedang. Untuk jasa ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Alam kelas rendah dan sangat rendah masing-masing memiliki luasan sebesar 16.906,52 hektar dan 10.491,53 hektar. Dari perhitungan 5 (lima) kelas diketahui bahwa luasan terbesar jasa ekosistem Pengatur Mitigasi Bencana Alam adalah Kelas Sangat Tinggi (53,03%). Jasa lingkungan/ekosistem pengaturan tata air dan banjir di Kabupaten Bandung Barat didominasi Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. Kedua kelas ini meliputi 50% luas wilayah Kab. Bandung, dengan rincian berikut:

- Kategori Sangat Tinggi dengan luas 35.107 Ha atau 27% sebagian besar di Kec. Cipatat, selanjutnya Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.
- Kategori Tinggi sebagian besar 29.904 Ha atau 23% Sebagian besar berada di di Kecamatan Gununghalu, selanjutnya Kecamatan Cisarua, Cipongkor, dan Kecamatan Cipeundeuy.
- Kategori Sedang merupakan Sebagian besar seluas 40.292 Ha atau 31% yang berada di Kec. Rongga, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Saguling, Kecamatan Cihampelas.
- Kategori Rendah dengan luas 2.342 Ha atau 2 % menyebar sebagian kecil di beberapa kecamatan.
- Kategori Sangat Rendah dengan luas 23.551 Ha atau dengan persentase 18% tersebar di sebagian besar Kecamatan Cipatat, Gununghalu dan Kecamatan Lembang. Pada kategori sangat rendah memiliki dampak terhadap gangguan tata aliran dan banjir

Tabel 2.26. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran dan Banjir

No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1	Sangat Rendah	23.551	18	Sebagian besar Cipatat, Gununghalu, Lembang
2	Rendah	2.342	2	Menyebar sebagian kecil dibeberapa Kecamatan
3	Sedang	40.292	31	Bagian besar Rongga, Gununghalu, Saguling, Cihampelas
4	Tinggi	29.904	23	Sebagian besar Gunung Halu,berikut Cisarua, Cipongkor, Cipeundeuy
5	Sangat Tinggi	35.107	27	Sebagian besar Cipatat, Selanjutnya Cihampelas Cikalongwetan, Cipeundeuy
Total		**131.195**	**100**	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ – KLHK

Indikator jasa lingkungan/ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana dapat memberikan kita perlindungan dan pencegahan dari kejadian bencana baik bencana erosi, longsor, pergerakan tanah dan kebakaran lahan.

Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi (ST) seluas 21% atau 27.000 Ha berada disebagian besar Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Cihampelas
- Kategori Tinggi (T) seluas 15% atau 2.3478 Ha berada di sebagian besar di Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipeundeuy, dan Kecamatan Lembang
- Kategori Sedang seluas 45.710 Ha atau 35% berada di sebagian besar Kecamatan Gununghalu, Rongga, selanjutnya Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Saguling
- Kategori Lahan kelas Rendah seluas 14.171 Ha atau 11% yang sebagian kecil menyebar di beberapa kecamatan
- Kategori kelas Sangat Rendah seluas 20.835 Ha sebesar 16% sebagian besar di Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipokongkor, Kecamatan Cipeundey.

Gabungan Kelas Sangat Tinggi dan Kelas Tinggi mencapai 39% jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari kejadian bencana alam. Dengan kondisi demikian menunjukkan bahwa kemampuan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kabupaten Bandung Barat relatif rendah.

Tabel 2.27. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

No	Indikator	Luas Ha	%	Kecamatan
1	Sangat Rendah	20.835	16	Sebagian besar Cipatat, Cipokongkor, Cipeundey
2	Rendah	14.171	11	Menyebar sebagian kecil
3	Sedang	45.710	35	Bagian besar Gununghalu, Rongga, selanjutnya Cipongkor, Saguling
4	Tinggi	23.478	18	Sebagian besar Cikalongwetan, Cisarua, Cipatat, Cipeundeuy, Lembang
5	Sangat Tinggi	27.000	21	Sebagian besar Cipatat dan Cihampelas
Total		**131.195**	**100**	

Sumber: Pengolahan Peta Tahun 2020, D3TLH Berbasis Jasa Ekosistem, 3EJ - KLHK

Kondisi bentang alam Kabupaten Bandung Barat yang didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal berupa pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan. Kondisi topografi dan struktur geologi yang kompleks tersebut menjadikan wilayah Bandung Barat rawan terhadap bencana alam terutama bencana tanah longsor, pergerakan tanah dan angin puting beliung.

Secara geografis Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana gempa bumi yang cukup tinggi karena terletak di jalur gempa aktif sesar Lembang. Capain Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami tren yang terus menurun, artinya terjadi penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga risiko bencana yang ditimbulkan mengalami penurunan. Secara kategori pada tahun 2024 IRBI Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai 108,28 yang berada pada kategori Sedang, sehingga masih perlu untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana agar memperoleh nilai yang lebih baik lagi.

Tabel 2.28. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Resiko Bencana	110,22	108,18	108,89	108,64	108,28

Sumber: BNPB, 2025

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, pergerakan tanah, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan serta aingin puting beliung. Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kejadian gempa bumi, tanah longsor dan pergerakan tanah.

Gambar 2.5. Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Bandung Barat

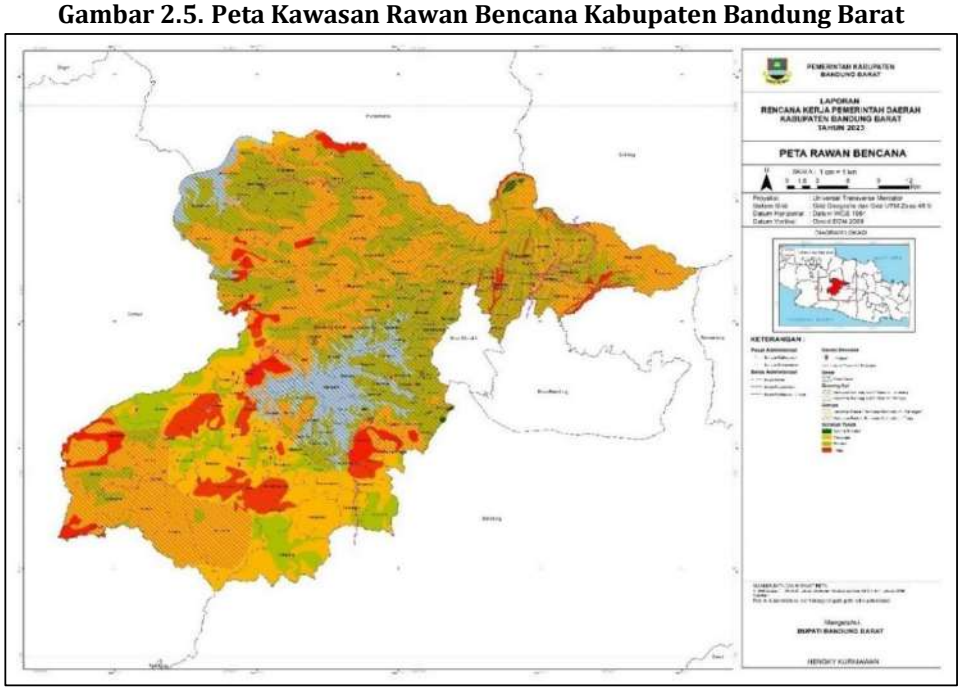

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Kawasan rawan bencana longsor dan pergerakan tanah secara umum menyebar di bagian utara dan selatan Kabupaten Bandung Barat, yaitu terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cikalongwetan, Cipatat, Batujajar, Cililin, Rongga, Gununghalu dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi terdapat di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua, dengan sebaran kawasan rawan bencana.

Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi besar untuk terkena dampak negatif perubahan iklim, dan sekaligus juga memiliki potensi untuk turut andil dalam melakukan mitigasi maupun adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk berperan aktif dalam pengendalian perubahan iklim, lebih jauh sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi relisiensi terhadap perubahan iklim, digunakan platform baru pembangunan rendah karbon yang berarti bahwa kegiatan pembangunan harus menggunakan sumber daya yang efisien, untuk menghasilkan penurunan emisi gas rumah kaca. Aksi mitigasi perubahan iklim adalah upaya-upaya yang terkait penyediaan dan pemanfaatan energi, penurunan dan pengelolaan limbah, serta pengelolaan lahan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat menghasilkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Aksi mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat, dilaksanakan pada tingkat lokal dengan sumber emisi GRK yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), Elpiji (LPG1), pengelolaan limbah domestik, serta BBM seperti minyak solar, yang umumnya digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan uap/panas pada industri/usaha skala kecil/mikro dan juga digunakan di sektor transportasi. Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan bagian penting dalam mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional dan juga telah menjadi komitmen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan wilayah yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi fokus dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan infrastruktur Bandung Barat.

Pembangunan Rendah Karbon yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat diukur melalui indikator tingkat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersifat capaian daerah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK. Upaya ini meliputi aksi-aksi penurunan emisi GRK yang dilakukan pada sektor kehutanan dan lahan, sektor energi, sektor persampahan dan limbah domestik, sektor pertanian dan peternakan serta sector transportasi.

Pada tahun 2023-2024 di Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan inventarisasi gas rumah kaca yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan hasil inventarisasi tersebut terdapat 5 (lima) sektor utama di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi penghasil gas rumah kaca yaitu berasal dari aktivitas transportasi, permukiman, perdagangan dan industri, pertanian dan peternakan, limbah padat, serta pengolahan dan pembuangan air limbah. Dengan Nilai emisi GRK Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 (data tahun 2022) dan 2024 (data tahun 2023) yang sudah terhitung dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.29. Hasil Perhitungan Emisi GRK Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023-2024

Sektor	2023 (ton CO2e)	2024 (ton CO2e)
Perhitungan GRK Sektor Sampah dan Limbah	330.240	221.454,85
Perhitungan GRK Sektor IPPU	-	13.140
Perhitungan GRK Sektor Energi & Transportasi	124.780	2.550.507,88
Perhitungan GRK Sektor Pertanian	122.850	26.930,86
Total EMISI	577.867	2.812.033,59
Potensi serapan GRK dari penutupan lahan	-	7.266.334,12
Total SERAPAN		7.266.334,12

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024.

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan, Komposisi dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil (SP2020), jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 sebanyak 1.788.336 jiwa dan tahun 2024 meningkat menjadi sebanyak 1.911.661 jiwa atau bertambah sebanyak 52.025 jiwa selama lima tahun dengan laju Pertumbuhan penduduk tahun 2024 sebesar 1,32 persen. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.911.661 jiwa dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk laki-laki sebesar 974.016 jiwa (50,59 persen) dan penduduk perempuan sebesar 937.645 jiwa (49,05 persen) dengan sex ratio sebesar 104 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.040 laki-laki. Jumlah penduduk, komposisi penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 secara rinci menurut kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.6. Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

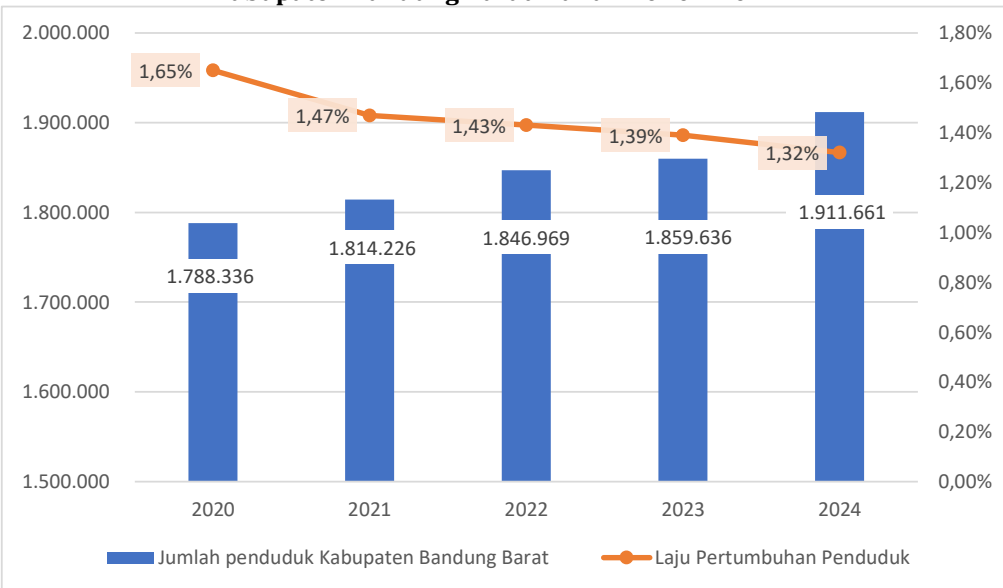

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah.

Tabel 2.30. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
		Laki-laki	Perempuan			
1	Rongga	33.138	31.453	64.591	112,25	575
2	Gununghalu	43.015	40.685	83.700	154,95	540
3	Sindangkerta	40.644	39.274	79.918	105,97	754
4	Cililin	53.083	50.620	103.703	77,60	1.336
5	Cihampelas	75.239	71.862	147.101	46,90	3.136
6	Cipongkor	55.642	53.013	108.655	79,90	1.360
7	Batujajar	59.278	57.600	116.878	31,02	3.768
8	Saguling	19.153	18.510	37.663	51,42	732
9	Cipatat	77.610	74.390	152.000	125,59	1.210
10	Padalarang	98.060	95.054	193.114	51,48	3.751
11	Ngamprah	93.200	90.518	183.718	35,55	5.168
12	Parongpong	59.746	57.921	117.667	44,90	2.621
13	Lembang	106.178	102.906	209.084	97,97	2.134
14	Cisarua	43.128	41.523	84.651	55,47	1.526
15	Cikalongwetan	69.342	66.602	135.944	110,61	1.229
16	Cipeundeuy	47.560	45.714	93.274	101,86	916
Kab. Bandung Barat		**974.016**	**937.645**	**1.911.661**	**1.283,44**	**1.489**

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, BPS, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2024 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.489 jiwa per Km2 dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Ngamprah dengan kepadatan 5.168 jiwa per Km2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan 540 jiwa per Km2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 adalah sebesar 1,32% dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Saguling sebesar 5,81% sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ngamprah sebesar 0,23%. Komposisi penduduk yang digambarkan oleh Piramida Kabupaten Bandung Barat pada Gambar 2.6 memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di periode 10 tahun terakhir. Ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat mengenai keluarga kecil sejahtera disamping berjalannya program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk dari sisi kelahiran.

Gambar 2.7. Piramida Penduduk Kab. Bandung Barat Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

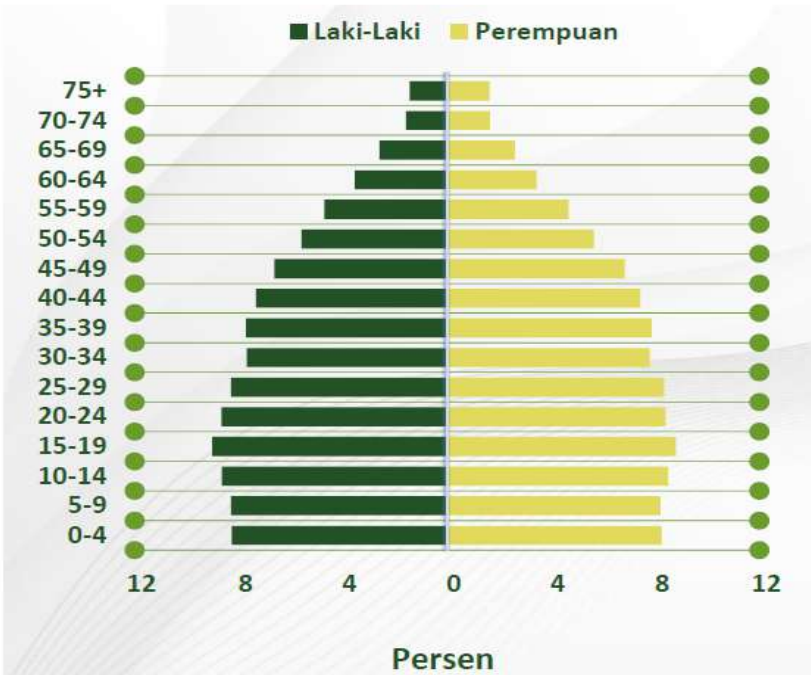

Sumber : BPS, Tahun 2025 (diolah)

2.1.2.2 Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal- usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat, di Kabupaten bandung Barat terdapat masyarakat adat yang masih menjungjung adat istiadat dan budaya yang perlu dilestarikan seiring dengan pelakasanaan pembangunan, diantaranya:

1. Warga Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat memiliki warisan budaya 'Hajat Arwah'. Hajat Arwah ini merupakan warisan budaya yang turun-temurun dengan pola memanjatkan doa secara bersama-sama untuk para leluhur mereka di makam-makam para tokoh yang memiliki peran penting bagi masyarakat Desa Nyalindung. Hajat Arwah ini, biasa digelar pada tanggal 17 Ruwah. Mengawali acara, warga berkumpul di sebuah rumah tokoh adat, mereka berpawai dengan diiringi sholawat bersama-sama menuju sebuah makam leluhur mereka. Pawai itu juga berbekal sebuah kendi yang di dalamnya terdapat tanaman hanjuang. Sesampainya di depan makam, rombongan duduk dan mulai memanjatkan doa yang dipimpin oleh Pemangku Adat. Warisan budaya ini direkomendasikan untuk menjadi warisan budaya tak benda, yang nantinya menjadi ciri khas bagi warga Desa Nyalindung tersendiri atas bentuk konsistensinya dalam mempertahankan situs ini.
2. Warga Kampung Cikurutug, Desa Tagogapu, Kecamatan Padalarang terhadap sumber daya alam yang telah tersedia di sana dituangkan dalam ritual Mikul Lodong. Upacara Mikul Lodong ini dilakukan secara beramai-ramai menyisir bukit kemudian berjalan di pematang sawah sembari memikul air dengan gelongan bambu atau yang mereka sebut lodong. Sesampainya di lokasi, rombongan kemudian memanjatkan doa dan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Doa-doa yang dipanjatkan berisi ucapan syukur atas air dan sumber daya alam lain yang diberikan untuk menghidupi warga Kampung Cikurutug.
3. Warga Dusun Kancah, Kampung Panyairan, Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, memiliki adat istiadat tersendiri untuk menjaga lingkungan. Lewat upacara adat irung-irung masyarakat desa, menjaga kelestarian mata air dan saluran air. Masyarakat berkumpul di Padepokan Kamuning kemudian berjalan ke arah irung-irung atau yang dikenal dengan sebuah kolam mata air sembari diiringi kesenian sasapian warga mengarak kambing melewati pematang sawah yang sudah ditanami sayur-sayuran. Lalu menyusuri selokan yang mengarah ke kolam mata air yang sudah dibersihkan oleh warga dari jauh-jauh hari. setelah sampai ditempat ritus, warga menyembelih kambing yang menjadi arak-arakan tadi. kemudian, upacara adat dilakukan dengan menyeburkan diri ke kolam dan melakukan perang air diiringi kesenian sasapian.Ritus ini dilakukan setahun sekali untuk memelihara sumber air masyarakat setempat, agar dapat menghidupi tanaman, kesuburan, serta meminta keselamatan.

2.1.2.3 Trend Demografi Kabupaten Bandung Barat

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi kependudukan merupakan bagian dasar dari sebuah perencanaan wilayah. Angka proyeksi ini dibutuhkan untuk menentukan berbagai komponen kewilayahan yang dibutuhkan di masa yang akan datang, sesuai dengan arahan perkembangan penduduk secara spasial. Penduduk Kabupaten Bandung Barat dalam rentang waktu empat tahun terakhir sejak tahun 2000 hingga 2024, jumlahnya semakin meningkat dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif dan relatif meningkat. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan pesat selama periode 2020 hingga 2022 dengan laju pertumbuhan mencapai 1,77 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,32 persen.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat menurut kecamatan selama periode 2025 sampai 2029 diproyeksikan akan meningkat dengan jumlah penduduk tahun 2029 sebanyak 1.998.600 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Lembang sebanyak 218.593 jiwa dan jumlah penduduk terkecil ada di Kecamatan Saguling sebanyak 39.376 jiwa.

Tabel 2.31. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030

No	Kecataman	Proyeksi Penduduk					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rongga	64.984	65.247	66.021	66.781	67.528	68.261
2	Gununghalu	84.209	84.550	85.552	86.538	87.507	88.456
3	Sindangkerta	80.404	80.729	81.687	82.628	83.553	84.459
4	Cililin	104.334	104.756	105.998	107.219	108.419	109.596
5	Cihampelas	147.996	148.595	150.357	152.089	153.791	155.460
6	Cipongkor	109.316	109.758	111.060	112.339	113.596	114.829
7	Batujajar	117.589	118.065	119.465	120.841	122.193	123.520
8	Saguling	37.892	38.045	38.497	38.940	39.376	39.803
9	Cipatat	152.924	153.543	155.364	157.154	158.913	160.638
10	Padalarang	194.289	195.075	197.388	199.662	201.896	204.088
11	Ngamprah	184.835	185.583	187.784	189.947	192.073	194.158
12	Parongpong	118.383	118.862	120.271	121.657	123.018	124.354
13	Lembang	210.356	211.207	213.711	216.173	218.593	220.965
14	Cisarua	85.166	85.510	86.525	87.521	88.501	89.461
15	Cikalongwetan	136.771	137.324	138.953	140.553	142.126	143.669
16	Cipeundeuy	93.841	94.221	95.338	96.437	97.516	98.574
KAB. BANDUNG BARAT		**1.923.288**	**1.931.070**	**1.953.970**	**1.976.480**	**1.998.600**	**2.020.293**

Sumber: Data olah, 2025

Dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk selama periode 2025 sampai 2030 diproyeksikan akan meningkat di sebagian besar kelompok umur, baik umur muda, usia produktif maupun usia lanjut. Namun dilihat dari proporsi kelompok umur muda yakni 0-4 tahun mengalami penurunan dari 8,15 persen atau 156.495 jiwa (2025) menjadi 7,50 persen atau 151.592 jiwa (2030) begitupun untuk kelompok umur 5-34 tahun, sebaliknya Kelompok umur produktif 35-39 tahun mengalami peningkatan dari 7.30 persen atau 1140.289 jiwa (2025) menjadi 7,52 persen atau 151.951 jiwa (2030) begitupun untuk kelompok umur 50-64 tahun mengalami kenaikan. Proporsi kelompok umur lansia yaitu 60 tahun ke atas, diproyeksikan akan semakin meningkat. Pada kelompok umur lansia, peningkatan proporsi penduduk umur 75 tahun ke atas mengalami kenaikan melambat yaitu dari 1,95 persen atau 38.203 jiwa (2025) menjadi 2,62 persen atau 52.900 jiwa (2030). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
0-4	79.939	76.556	**156.495**	78.895	75.730	**154.625**	78.465	75.320	**153.785**	78.070	74.930	**153.000**	77.702	74.555	**152.257**	77.362	74.230	**151.592**
5-9	76.305	72.566	**148.871**	76.875	73.345	**150.220**	77.895	74.340	**152.235**	78.770	75.160	**153.930**	79.450	75.830	**155.280**	79.972	76.470	**156.442**
10-14	76.765	72.391	**149.156**	75.965	71.825	**147.790**	75.863	71.863	**147.726**	75.915	72.085	**148.000**	76.120	72.410	**148.530**	76.404	72.650	**149.054**
15-19	79.684	74.938	**154.622**	78.400	74.032	**152.432**	77.810	73.520	**151.330**	77.297	73.050	**150.347**	76.890	72.640	**149.530**	76.575	72.325	**148.900**
20-24	82.894	77.049	**159.943**	82.132	76.584	**158.716**	81.623	76.213	**157.836**	80.880	75.650	**156.530**	80.070	75.040	**155.110**	79.310	74.482	**153.792**
25-29	80.214	74.188	**154.402**	80.430	74.342	**154.772**	81.310	75.140	**156.450**	82.143	76.013	**158.156**	82.740	76.710	**159.450**	82.990	77.060	**160.050**
30-34	77.384	74.297	**151.681**	77.892	74.424	**152.316**	78.740	74.560	**153.300**	79.430	74.510	**153.940**	80.082	74.515	**154.597**	80.810	74.770	**155.580**
35-39	71.327	68.962	**140.289**	71.690	69.452	**141.142**	73.020	70.695	**143.715**	74.585	72.115	**146.700**	76.162	73.417	**149.579**	77.550	74.401	**151.951**
40-44	71.055	68.912	**139.967**	70.582	68.554	**139.136**	70.485	68.360	**138.845**	70.365	68.135	**138.500**	70.465	68.145	**138.610**	70.960	68.565	**139.525**
45-49	66.814	64.947	**131.761**	67.195	65.492	**132.687**	68.095	66.439	**134.534**	68.885	67.305	**136.190**	69.481	67.960	**137.441**	69.861	68.310	**138.171**
50-54	59.755	59.372	**119.127**	60.542	60.324	**120.866**	61.795	61.390	**123.185**	62.920	62.285	**125.205**	63.990	63.130	**127.120**	64.995	64.005	**129.000**
55-59	49.875	48.822	**98.697**	50.870	50.362	**101.232**	52.559	52.430	**104.989**	54.290	54.515	**108.805**	55.945	56.445	**112.390**	57.450	58.104	**115.554**
60-64	40.904	39.847	**80.751**	41.652	41.074	**82.726**	42.840	42.550	**85.390**	43.970	43.967	**87.937**	45.170	45.490	**90.660**	46.525	47.185	**93.710**
65-69	29.630	28.812	**58.442**	30.440	30.090	**60.530**	31.945	31.950	**63.895**	33.520	33.890	**67.410**	35.020	35.790	**70.810**	36.412	37.540	**73.952**
70-74	20.358	20.523	**40.881**	20.740	21.190	**41.930**	21.625	22.170	**43.795**	22.490	23.170	**45.660**	23.440	24.290	**47.730**	24.495	25.625	**50.120**
75+	17.930	20.273	**38.203**	18.520	21.430	**39.950**	19.820	23.140	**42.960**	21.200	24.970	**46.170**	22.623	26.883	**49.506**	24.055	28.845	**52.900**
JUMLAH	**980.833**	**942.455**	**1.923.288**	**982.820**	**948.250**	**1.931.070**	**993.890**	**960.080**	**1.953.970**	**1.004.730**	**971.750**	**1.976.480**	**1.015.350**	**983.250**	**1.998.600**	**1.025.726**	**994.567**	**2.020.293**

Sumber: Data olah, 2025

Tabel 2.33. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
0-4	8,15	8,12	8,15	8,03	7,99	8,01	7,89	7,85	7,87	7,77	7,71	7,74	7,65	7,58	7,62	7,54	7,46	7,50
5-9	7,78	7,70	7,75	7,82	7,73	7,78	7,84	7,74	7,79	7,84	7,73	7,79	7,82	7,71	7,77	7,80	7,69	7,74
10-14	7,83	7,68	7,77	7,73	7,57	7,65	7,63	7,49	7,56	7,56	7,42	7,49	7,50	7,36	7,43	7,45	7,30	7,38
15-19	8,12	7,95	8,05	7,98	7,81	7,89	7,83	7,66	7,74	7,69	7,52	7,61	7,57	7,39	7,48	7,47	7,27	7,37
20-24	8,45	8,18	8,33	8,36	8,08	8,22	8,21	7,94	8,08	8,05	7,78	7,92	7,89	7,63	7,76	7,73	7,49	7,61
25-29	8,18	7,87	8,04	8,18	7,84	8,01	8,18	7,83	8,01	8,18	7,82	8,00	8,15	7,80	7,98	8,09	7,75	7,92
30-34	7,89	7,88	7,90	7,93	7,85	7,89	7,92	7,77	7,85	7,91	7,67	7,79	7,89	7,58	7,74	7,88	7,52	7,70
35-39	7,27	7,32	7,30	7,29	7,32	7,31	7,35	7,36	7,36	7,42	7,42	7,42	7,50	7,47	7,48	7,56	7,48	7,52
40-44	7,24	7,31	7,29	7,18	7,23	7,21	7,09	7,12	7,11	7,00	7,01	7,01	6,94	6,93	6,94	6,92	6,89	6,91
45-49	6,81	6,89	6,86	6,84	6,91	6,87	6,85	6,92	6,89	6,86	6,93	6,89	6,84	6,91	6,88	6,81	6,87	6,84
50-54	6,09	6,30	6,19	6,16	6,36	6,26	6,22	6,39	6,30	6,26	6,41	6,33	6,30	6,42	6,36	6,34	6,44	6,39
55-59	5,08	5,18	5,12	5,18	5,31	5,24	5,29	5,46	5,37	5,40	5,61	5,50	5,51	5,74	5,62	5,60	5,84	5,72
60-64	4,17	4,23	4,18	4,24	4,33	4,28	4,31	4,43	4,37	4,38	4,52	4,45	4,45	4,63	4,54	4,54	4,74	4,64
65-69	3,02	3,06	3,01	3,10	3,17	3,13	3,21	3,33	3,27	3,34	3,49	3,41	3,45	3,64	3,54	3,55	3,77	3,66
70-74	2,08	2,18	2,09	2,11	2,23	2,17	2,18	2,31	2,24	2,24	2,38	2,31	2,31	2,47	2,39	2,39	2,58	2,48
75+	1,83	2,15	1,95	1,88	2,26	2,07	1,99	2,41	2,20	2,11	2,57	2,34	2,23	2,73	2,48	2,35	2,90	2,62
JUMLAH	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Data olah, 2025

B. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah atau kepadatan penduduk kasar atau crude population density (CPD) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi. Pada tahun 2024 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 1.489 jiwa per km2 dengan wilayah terpadat berada di Kecamatan Ngamprah dengan kepadatan 5.168 jiwa per km2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan 540 jiwa per km2. Kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan terus mengalami peningkatan sebesar hingga pada tahun 2030 sebanyak 1.574 jiwa per km2. Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan besaran jumlah penduduk terhadap luasan wilayah yang menghasilkan kepadatan kumulatif terhadap luasan wilayah Kab. Bandung Barat.

Proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan hasil proyeksi yang akan selalu meningkat dari satu periode ke periode berikutnya. Peningkatan kepadatan penduduk ini terjadi sebesar 287 orang per km2 atau peningkatan sebesar 19,37 persen dari angka pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk secara umum di Kabupaten Bandung Barat. Peningkatan kepadatan penduduk ini perlu direspons oleh pemerintah kedepannya melalui kebijakan yang menyasar kepada penyediaan ruang hunian bagi masyarakat dan sarana prasarana pendukungnya, terkhusus di wilayah-wilayah yang cenderung memiliki kepadatan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui sebaran kepadatan wilayah-wilayah di Kabupaten Bandung Barat, berikut proyeksi kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bandung Barat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34. Proyeksi Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030

No	Kecataman	Luas Wilayah (Km2)	Proyeksi Kepadatan Penduduk					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rongga	112,25	579	581	588	595	602	608
2	Gununghalu	154,95	543	546	552	558	565	571
3	Sindangkerta	105,97	759	762	771	780	788	797
4	Cililin	77,60	1.345	1.350	1.366	1.382	1.397	1.412
5	Cihampelas	46,90	3.156	3.168	3.206	3.243	3.279	3.315
6	Cipongkor	79,90	1.368	1.374	1.390	1.406	1.422	1.437
7	Batujajar	31,02	3.791	3.806	3.851	3.896	3.939	3.982
8	Saguling	51,42	737	740	749	757	766	774
9	Cipatat	125,59	1.218	1.223	1.237	1.251	1.265	1.279
10	Padalarang	51,48	3.774	3.789	3.834	3.878	3.922	3.964
11	Ngamprah	35,55	5.199	5.220	5.282	5.343	5.403	5.462
12	Parongpong	44,90	2.637	2.647	2.679	2.710	2.740	2.770
13	Lembang	97,97	2.147	2.156	2.181	2.207	2.231	2.255
14	Cisarua	55,47	1.535	1.542	1.560	1.578	1.595	1.613
15	Cikalongwetan	110,61	1.237	1.242	1.256	1.271	1.285	1.299
16	Cipeundeuy	101,86	921	925	936	947	957	968
KAB. BANDUNG BARAT		**1.283,4**	**1.499**	**1.505**	**1.522**	**1.540**	**1.557**	**1.574**

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, BPS, diolah.

Proyeksi kepadatan penduduk per wilayah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan secara umum seluruh wilayah akan mengalami peningkatan kepadatan penduduk pada tahun 2030. Pada tahun 20230, Kecamatan Ngamprah akan menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dengan tingkat kepadatan sebesar 5.462 km2 dan Kecamatan Gununghalu akan menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah dengan angka sebesar 571 km2. Proyeksi peningkatan kepadatan penduduk ini perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang menyasar persiapan daerah dengan kepadatan penduduk yang tergolong tinggi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan intensitas pelayanan yang lebih efisien dalam menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat.

C. Angka Ketergantungan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), rasio ketergantungan diartikan sebagai perbandingan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan >65 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Dalam bahasa Inggris, rasio ketergantungan dikenal dengan istilah dependency ratio. Rasio ketergantungan umumnya diartikan sebagai ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja di suatu wilayah atau negara. Dampak yang terjadi jika suatu wilayah memiliki rasio ketergantungan yang besar antara lain dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas wilayah, karena banyaknya penduduk yang berada di luar usia angkatan kerja.

Selain itu, wilayah yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi untuk berkembang, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka Panjang cenderung lebih rendah. Di sisi lain, apabila suatu wilayah memiliki rasio ketergantungan yang rendah, maka beban ketergantungannya akan semakin rendah pula, dimana peluang untuk mengembangkan perekonomian wilayah semakin luas karena aktivitas produksi yang didukung angkatan kerja yang jumlahnya lebih optimal dan menunjukkan bahwa secara proporsional terdapat lebih banyak orang dewasa usia kerja yang dapat menyokong penduduk muda dan lanjut usia (ibid). Rasio ketergantungan ini dihitung dengan menambahkan jumlah penduduk berumur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas dan dibagi dengan jumlah penduduk berumur 15–64 tahun, dikalikan 100. Sehingga, angka dari angka ketergantungan dapat dibaca sebagai jumlah penduduk usia non-produktif yang perlu ditanggung per 100 penduduk usia produktif.

Gambar 2.8. Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030

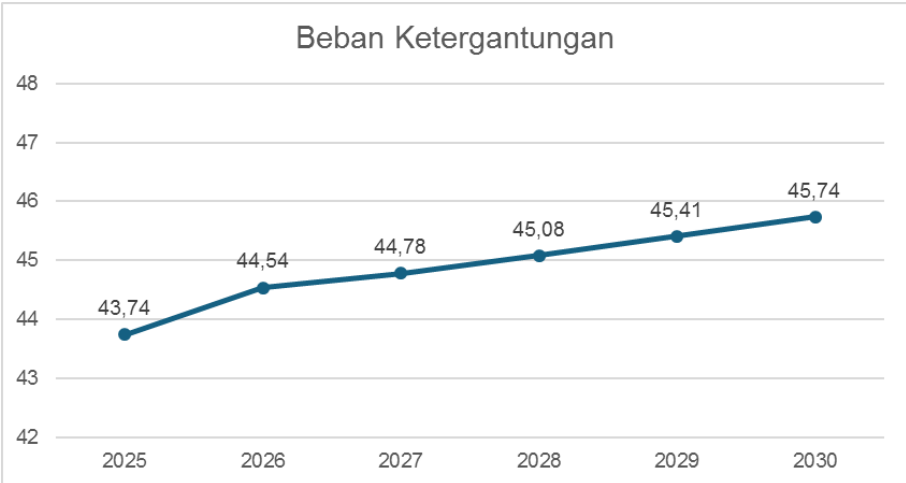

Sumber : Data olah, 2025

Dilihat dari data di atas dapat diketahui bahwa proyeksi rasio ketergantungan penduduk Bandung Barat hingga tahun 2030 akan mencapai angka 45,74. Angka ini dapat diartikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung kurang lebih 46 orang penduduk usia produktif. Kondisi ini mengisyaratkan tren demografi Kabupaten Bandung Barat yang semakin menua, dimana penduduk usia tua semakin banyak dengan tidak disertainya Tingkat kelahiran yang optimal. Peningkatan tren rasio ketergantungan ini perlu diantasipasi oleh pemerintah, khususnya perihal tanggungan penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif yang semakin tinggi.

D. Bonus Demografi

Bonus Demografi diartikan sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pergeseran struktur usia penduduk, terutama ketika jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk non-usia kerja (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas) dan lebih tua (UNFPA/ United Nations Population Fund). Menurut Djoko, M. A. S. Sri dkk (2017), bonus demografi adalah peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Di Indonesia, fenomena bonus demografi terjadi karena proses transisi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu yang dipercepat oleh keberhasilan kebijakan kependudukan yang menurunkan tingkat fertilitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan suksesnya program-program pembangunan.

Kondisi tersebut merupakan masa emas bagi suatu negara dimana provinsi yang berada didalamnya akan terdampak baik positif maupun negatif. Secara positif, bonus demografi akan sangat mendukung upaya untuk mencapai target generasi emas di tahun 2045 dengan Pilar Pembangunan Indonesia 2045. Di sisi lain, bonus ini dapat berubah menjadi bencana besar apabila tidak dipersiapkan dalam menghadapi tantangan dan isu permasalahan 20 (dua puluh) tahun kedepan, diantaranya Megatrend Dunia 2045 sebagai isu global, megathrust dan kemajuan teknologi serta geopolitik dan geoekonomi. Bonus demografi ini ditentukan oleh sejumlah indikator demografis yang mencerminkan distribusi usia penduduk suatu negara atau wilayah, berikut ini beberapa indikator kunci yang digunakan untuk mengukur bonus demografi meliputi:

- Persentase Penduduk Usia Produktif;
- Rasio Ketergantungan atau Dependency Ratio;
- Laju Pertumbuhan Penduduk;
- Usia Harapan Hidup (UHH);
- Fertilitas (Tingkat Kelahiran); dan
- Migrasi.

Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat akan mencapai puncaknya pada Tahun 2020-2035. Sedangkan jumlah penduduk Bandung Barat berdasarkan data proyeksi SP 2020 saat ini pada usia produktif antara 15-64 tahun lebih banyak dari usia tidak produktif, Kondisi Dimana penduduk usia produktif akan lebih banyak pada suatu waktu mengindikasikan bahwa di waktu tertentu akan terdapat lebih besar kesempatan untuk meningkatkan perekonomian negara karena jumlah angkatan kerja lebih banyak. Kondisi bonus demografi ini didominasi oleh generasi milenial yang mana akan menjadi incaran tenaga produktif negara-negara maju yang kekurangan anak muda (usia kerja produktif) sehingga bisa menjadi peluang yang besar jika kita mampu merespon permintaan pasar tenaga kerja global. Berhasil tidaknya bonus demografi ini ditentukan oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan penduduk. Penghitungan bonus demografi berkaitan erat dengan penghitungan rasio ketergantungan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil (SP2020), jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 sebesar 1,32% dengan kepadatan penduduk sebesar 1.489 jiwa per Km2. Komposisi penduduk Kab. Bandung Barat memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di periode 10 tahun terakhir, hal ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat mengenai keluarga kecil sejahtera disamping berjalannya program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk dari sisi kelahiran.

Data hasil long form sensus penduduk Kab. Bandung Barat yang dilaksanakan oleh BPS, Fertilitas Kabupaten Bandung Barat menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus Penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,31 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR sebesar 2,24 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi.

Pada tahun 2022, tepat satu dekade bonus demografi Indonesia, tercatat TFR sebesar 2,24. Berdasarkan hasil Long Form SP2020 tercatat Angka Kematian Kasar yang terhitung adalah sebesar 4,82. Artinya, terdapat 4 sampai dengan 5 kematian untuk tiap 1.000 penduduk di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan selama periode satu dekade bonus demografi yang dialami Indonesia, Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung menurun dari 27 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 14 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup wanita Bandung Barat membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup.

2.1.3 Kondisi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar

Sarana Prasarana adalah infrastruktur atau fasilitas yang digunakan dalam pembangunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan sarana dalam pembangunan dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis proyek pembangunan, tujuan, dan konteks geografis. Kondisi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar memuat antara lain Kebutuhan Hunian, Air Bersih, Energi/Kelistrikan, Pengelolaan Persampahan, Infrastruktur Pendidikan, dan Infrastruktur Kesehatan. Hal ini juga memerlukan pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan seiring berjalannya waktu untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung Barat secara efektif. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana dalam perencanaan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat tentunya dengan melalui proses yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi yang erat antar berbagai pemangku kepentingan. Sarana dan prasarana yang baik dapat berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2.1.3.1 Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat tentu berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan perluasan lahan.

Proyeksi kebutuhan tempat tinggal menggunakan asumsi rata-rata setiap rumah ditempati 5 (lima) jiwa yakni ayah, ibu, dan 3 anak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SNI 03-1733-2004 tentang cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

Tabel 2.35. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030

Uraian	Proyeksi Tahun	
	2025	2030
Proyeksi Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	1,923.288	2,020.29
Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tingal (unit)	381,565	404,059

Sumber : Analisis Data, 2025

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat tentu berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal dan perluasan lahan. Proyeksi kebutuhan tempat tinggal menggunakan asumsi rata-rata setiap rumah ditempati 5 (lima) jiwa yakni ayah, ibu, dan 3 anak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SNI 03-1733-2004 tentang cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Kebutuhan akan tempat tinggal terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka diperkirakan pada tahun 2030, ketika jumlah penduduk mencapai 2020.290 jiwa, kebutuhan rumah tinggal mencapai 404.059 unit. Perlu adanya respon akan peningkatan kebutuhan tempat tinggal masyarakat dengan pelaksanaan program yang memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan perumahan. Pemenuhan kebutuhan rumah juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kekurangan perumahan (backlog) dan pertumbuhan kawasan kumuh. Kebutuhan tempat tinggal juga harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dasar yang sehat dan produktif dari aspek kebutuhan air bersih, sanitasi, sistem drainase, jalan lingkungan, persampahan, dan ruang komunal yang nyaman.

2.1.3.2 Kebutuhan Air Bersih

Proyeksi kebutuhan air bersih/minum ini diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air per kapita, pertumbuhan dan pengembangan penduduk, serta pengklasifikasian jenis kebutuhan. Air bersih secara luas dibutuhkan untuk kebutuhan sanitasi, pertanian, dan kegiatan industri. Proyeksi kebutuhan air bersih membantu memproyeksikan tren kebutuhan air yang meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan daerah. Proyeksi kebutuhan air bersih memperhatikan standar yang ditetapkan dalam SNI 6728.1-2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam.

Tabel 2.36. Standar Kebutuhan Air Bersih

Air Bersih	Jumlah Jiwa Penduduk	Kebutuhan air Bersih (L/O/H)
Semi Urban	3.000 - 20.000	60 - 90
Kota Kecil	20.000-100.000	90 - 110
Kota Sedang	100.000 - 500.000	110 - 125
Kota Besar	500.000-1.000.000	125 - 150
Motropolitan	>1.000.000	150 - 200

Sumber: SNI: 6728.1-2015 tentang Penyusunan Neraca Spasial Sumber Daya Alam

Kebutuhan air bersih yang terus meningkat perlu direspon dengan peningkatan pelayanan air bersih, menjaga kualitas air, dan melindungi daya dukung sumber daya air. Ketersediaan sumber air baku tergantung oleh kapasitas daya dukung sumberdaya air. Perlindungan kawasan sstem hidrologis menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan daya dukung sumberdaya air di Kabupaten Bandung Barat. Pemanfaatan air juga perlu dikontrol dengan konsep keberlanjutan supaya tidak terjadi eksploitasi air secara berlebihan dan berujung pada kerusakan sistemhidrologis.

Tabel 2.37. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kab Bandung Barat Tahun 2025 - 2030

No	KECAMATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2030	
		Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	Jumlah Pemenuhan air Bersih (M3/hari)
1	Batujajar	117.589	12,707	122.07	13,428
2	Cihampelas	147.996	16,076	157.81	17,359
3	Cikalong Wetan	136.771	14,857	142.33	15,656
4	Cililin	104.334	11,424	110.74	12,181
5	Cipatat	152.924	16,621	158.88	17,476
6	Cipendeuy	93.841	8,403	99.30	8,937
7	Cipongkor	109.316	11,850	113.66	12,503
8	Cisarua	85.166	7,578	89.32	8,038
9	Gununghalu	84.209	7,565	89.20	8,028
10	Lembang	210.356	22,876	220.61	24,268
11	Ngamprah	184.835	20,273	191.11	21,022
12	Padalarang	194.289	21,328	201.67	22,184
13	Parongpong	118.383	12,893	124.48	13,693
14	Rongga	64.984	5,910	71.73	6,455
15	Saguling	37.892	3,445	42.67	3,841
16	Sindangkerta	80.404	7,152	84.73	7,625
KAB. BANDUNG BARAT		1,923.288	200,959	2,020.29	212,693

Sumber: Analisis Data, 2025

2.1.3.3 Kebutuhan Energi/Listrik

Energi listrik mendukung berlangsungnya berbagai kegiatan baik untuk keperluan domestik, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, maupun industri. Proyeksi kebutuhan energi listrik membantu dalam memperkirakan pasokan energi listrik yang diperlukan hasil dari dampak pertumbuhan penduduk. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu dilakukan perhitungan dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi/kelistrikan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang memadai bagi masyarakat. Perhitungan proyeksi kebutuhan energi/kelistrikan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat konsumsi energi listrik per kapita. Peningkatan kebutuhan listrik menandakan semakin besarnya sumber daya yang dibutuhkan sebagai pembangkit energi listrik di Kabupaten Bandung Barat. Diharapkan di masa depan, kebutuhan Listrik dipasok oleh sumber energi bersih dan ramah lingkungan. Konsumsi energi Listrik daerah juga perlu dikontrol dengan inovasi pembangunan yang mengedepankan efisiensi penggunaan energi untuk menghemat cadangan pasokan energi daerah.

Tabel 2.38. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 - 2030

No	KECAMATAN	TAHUN 2025		TAHUN 2030	
		Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh	Jml Penduduk (Ribu jiwa)	MWh
1	Batujajar	117.589	161,725.2	122.07	170,898.0
2	Cihampelas	147.996	204,607.2	157.81	220,928.4
3	Cikalong Wetan	136.771	189,084.0	142.33	199,257.8
4	Cililin	104.334	145,397.0	110.74	155,031.8
5	Cipatat	152.924	211,544.2	158.88	222,427.8
6	Cipendeuy	93.841	130,719.4	99.30	139,014.4
7	Cipongkor	109.316	150,813.6	113.66	159,128.2
8	Cisarua	85.166	117,887.0	89.32	125,042.4
9	Gununghalu	84.209	117,678.4	89.20	124,877.2
10	Lembang	210.356	291,152.4	220.61	308,859.6
11	Ngamprah	184.835	258,025.6	191.11	267,554.0
12	Padalarang	194.289	271,441.8	201.67	282,336.6
13	Parongpong	118.383	164,088.4	124.48	174,276.2
14	Rongga	64.984	91,931.0	71.73	100,417.8
15	Saguling	37.892	53,596.2	42.67	59,742.2
16	Sindangkerta	80.404	111,259.4	84.73	118,616.4
KABUPATEN BANDUNG BARAT		1,923.288	2,670,950.8	2,020.29	2,828,408.8

Sumber: Analisis Data, 2025

2.1.3.4 Kebutuhan Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Dalam menghadapi proyeksi pertumbuhan penduduk, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Timbulan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran buruk terhadap wajah suatu kawasan, selain itu juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit. Permasalahan sampah seharusnya dapat dikelola dengan baik dengan melibatkan lintas sektor, karena permasalahan sampah melibatkankan dari hulu sampai hilir, dari masyarakat hingga ke pemerintah yang bertanggung jawab. Proyeksi terkait timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat perlu dilakukan sebagai basis data perencanaan jangka panjang tentang pengelolaan persampahan yang tepat.

Tabel 2.39. Standar Acuan Timbulan Sampah

Klasifikasi Kota	Jumlah Penduduk	Volume (L/Org/hari)	Berat (KG/Org/hari)
Kota Kecil	<100.000	2,75 - 3,00	0,60 – 0,75
Kota Sedang	100.000-500.000		
Kota Besar	500.000-1.000.000	3,00 - 3,60	0,65 – 0,80
Kota Metropolitan	>1.000.000		

Sumber: SNI 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

Proyeksi timbulan sampah di Kabupaten Bandung Barat menggunakan standar acuan SNI 8632-2018 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Proyeksi timbulan sampah menggunakan dasar hasil proyeksi jumlah penduduk dengan asumsi bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan Kota Metropolitan karena pada data dasar tahun 2020 jumlah penduduk mencapai >1.000.000 atau 1.782.191 jiwa sehingga setiap penduduk menghasilkan sampah kurang lebih 3-3,6 L/hari.

Tabel 2.40. Proyeksi Volume Timbulan Sampah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030

No	KECAMATAN	Tahun 2025		Tahun 2030	
		Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)
1	Batujajar	346.554	86,64	366.210	91,55
2	Cihampelas	438.444	109,61	473.418	118,35
3	Cikalong Wetan	405.180	101,30	426.981	106,75
4	Cililin	311.565	77,89	332.211	83,05
5	Cipatat	453.309	113,33	476.631	119,16
6	Cipendeuy	256.770	56,02	273.064	59,58
7	Cipongkor	323.172	80,79	340.989	85,25
8	Cisarua	231.564	50,52	245.619	53,59

No	KECAMATAN	Tahun 2025		Tahun 2030	
		Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)	Volume (Liter/hari)	Berat (Ton/hari)
9	Gununghalu	231.154	50,43	245.295	53,52
10	Lembang	623.898	155,97	661.842	165,46
11	Ngamprah	552.912	138,23	573.330	143,33
12	Padalarang	581.661	145,42	605.007	151,25
13	Parongpong	351.618	87,90	373.449	93,36
14	Rongga	180.579	39,40	197.249	43,04
15	Saguling	105.278	22,97	117.351	25,60
16	Sindangkerta	218.545	47,68	232.997	50,84
Kabupaten Bandung Barat		**5.612.203**	**1.364,11**	**5.941.642**	**1.443,68**

Sumber: Analisis Data, 2025

Hasil proyeksi penduduk beserta timbulan sampah yang mungkin dihasilkan pada tahun 2025 hingga 2045, diketahui bahwa Kecamatan Lembang merupakan kecamatan dengan produksi sampah yang paling banyak. Terlepas dari jumlah penduduk yang paling banyak di Kab. Bandung Barat, Kecamatan lembang juga merupakan kawasan kunjungan pariwisata. Proyeksi timbulan sampah pada tabel di atas merupakan hasil sampah domestik, sehingga jika ditambahkan timbulan sampah hasil dari pariwisata akan lebih banyak lagi timbulan sampah yang dihasilkan. Potensi timbulan sampah domestik Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 mencapai 1,364,11 Ton/hari sedangkan pada tahun 2045 mencapai 1.672,63 Ton/hari. Jika melihat kapasitas TPAS Regional Sarimukti saat ini, hanya dapat menampung 500-628 Ton/hari sampah terolah dari seluruh wilayah Bandung Raya, tidak hanya melayani Kab. Bandung Barat saja. Sehingga, kapasitas TPA kedepannya sudah tidak dapat lagi menampung timbulan sampah yang dihasilkan.

Tabel 2.41. Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan	
	Sarana Pelengkap	Status	Dimensi		
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi			
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m^3	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		6 m^3		
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m^3		
	Bak sampah besar		12 m^3		
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/ TPA Lokal	-		
	Bak sampah besar		25 m^3		
Kota (>480.000 jiwa)	Bak sampah besar	TPA			
	Tempat daur ulang sampah				

Sumber: SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaan

Standar kebutuhan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) per-jumlah penduduk sesuai dengan SNI 19-2454-2002 adalah 1 (satu) unit TPA untuk lebih dari 480.000 penduduk. Namun, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika akan membuka TPA baru, dari daya tampung yang memerlukan lahan cukup luas, sampai dengan jarak lokasi TPA dengan permukiman yang tidak boleh terlalu dekat. Sehingga, skenario yang lebih memungkinkan untuk dilakukan yakni memaksimalkan adanya TPS di setiap kecamatan yang melakukan pemilahan, sehingga meminimalisir penimbunan sampah ke TPA. Jika dilihat dari proyeksi penduduk per kecamatan, rata-rata penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat sebesar 128.309 jiwa, sehingga cukup menyediakan satu TPS setiap kecamatan, namun harus dilengkapi dengan pemilahan di setiap TPS yang tersedia.

2.1.3.5 Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan hidup masyarakat dengan menjamin hak yang sama untuk semua penduduk dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Untuk memenuhi akses pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat yang diproyeksi bertambah setiap tahunnya, diperlukan rencana proyeksi kebutuhan infrastruktur kesehatan.

Tabel 2.42. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025	2030
1	Tempat Tidur RS (unit)	1.908	2.020
2	Puskesmas/Pustu (unit)	64	67
3	Posyandu (unit)	1.526	1.616
4	BKIA/Klinik Bersalin (unit)	64	67
5	Apotik/Rumah Obat (unit)	64	67
6	Tempat Praktek Dokter	382	404
7	Dokter (orang)	1.908	2.020
8	Perawat (orang)	4.579	4.849

Sumber: Analisis Data, 2025

a. Rumah Sakit

Rasio antara jumlah daya tampung rumah sakit dengan jumlah penduduk sebesar 1:1000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Kondisi saat ini Kabupaten Bandung Barat memiliki Rumah Sakit Kelas D Pratama sabnayak 5 unit rumah sakit yaitu RSUD Lembang, RSUD Cililin, RSUD Cikalongwetan, RS. Cahaya Kawaluyaan dan RS. Penambahan fasilitas kesehatan sangat diperlukan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2025 jumlah tempat tidur rumah sakit yang dibutuhkan mencapai 1.908 unit.

Kebutuhan tempat tidur rumah sakit diproyeksikan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Hingga pada tahun 2.030 dibutuhkan sekitar 2.0220 unit. Penambahan fasilitas ini sangat penting untuk memastikan kualitas layanan rumah sakit terutama untuk layanan rawat inap.

b. Puskesmas

Kondisi saat ini 32 puskesmas masih sangat ideal untuk melayani penduduk Kab. Bandung Barat. Namun perhitungan kebutuhan Puskesmas perlu memperhatikan pertumbuhan dan sebaran penduduk berdasarkan kecamatan. Jika merujuk pada proyeksi pertumbuhan penduduk, dibutuhkan sekitar 64 puskesmas/pustu pada tahun 2025. Jumlah puskesmas/pustu diproyeksikan terus mengalami peningkatan dan dibutuhkan sekitar 67 puskesmas/pustu pada akhir periode. Hasil proyeksi ini mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat dan standar rasio puskesmas/pustu yakni 1:30.000 jumlah penduduk serta setiap kecamatan minimal harus memiliki satu puskesmas.

c. Posyandu

Proyeksi mengenai kebutuhan posyandu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 Rasio Posyandu 1:1.250 penduduk. Jumlah kebutuhan posyandu diproyeksikan terus meningkat selama kurun waktu 2025-2030. Pada tahun 2025 jumlah posyandu yang dibutuhkan mencapai 1.526 unit. Hingga pada tahun 2030, kebutuhan posyandu diprediksi mencapai 1.616 unit

d. BKIA/Klinik Bersalin

Proyeksi BKIA (Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak)/ klinik bersalin didasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 Rasio BKIA/Klinik Bersalin 1:30.000 penduduk. Dalam kurun waktu 2025-2045 kebutuhan klinik bersalin terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 jumlah kebutuhan klinik bersalin mencapai 64 unit dan terus meningkat hingga pada tahun 2030 mencapai 67 unit.

e. Apotik/Rumah Obat

Proyeksi jumlah apotik/rumah obat dilakukan dengan merujuk data hasil proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 Rasio Apotik/Rumah Obat 1:30.000 penduduk. Pada tahun 2025, jumlah apotik/rumah obat yang dibutuhkan mencapai 64 unit. Kebutuhan apotik/rumah obat diproyeksi terus meningkat mencapai 67 unit pada tahun 2030.

f. Tempat Praktek Dokter

Tempat praktek dokter diproyeksi dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk dan SNI 03-1733-2004 Rasio Tempat Praktek Dokter 1:5.000 penduduk. Pada tahun 2025, kebutuhan jumlah tempat praktek dokter mencapai 382 unit dan diproyeksi terus meningkat mencapai 404 unit pada tahun 2030.

g. Dokter

Kebutuhan jumlah dokter diproyeksi dengan mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk dan standar rasio 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah dokter yang dibutuhkan pada tahun 2025 mencapai 1.908 orang dan diproyeksi terus meningkat hingga tahun 2030 mencapai 2020 orang.

h. Perawat

Proyeksi mengenai kebutuhan jumlah perawat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil proyeksi jumlah penduduk dan standar rasio jumlah perawat yakni 2,4 perawat untuk 1.000 penduduk. Kebutuhan jumlah perawat diproyeksi mencapai 4.579 orang pada tahun 2025 dan terus meningkat hingga tahun 2030 mencapai 4.849 orang.

2.1.3.6 Kebutuhan Fasilitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Proyeksi jumlah murid menurut jenjang pendidikan didasarkan pada hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2045 dengan asumsi Angka Partisipasi Kasar mencapai 100 persen. Jumlah murid pada jenjang TK didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk usia 4 hingga 6 tahun pada tahun berkenaan; jumlah murid pada jenjang SD didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk pada usia 7 hingga 12 tahun; dan jumlah murid pada jenjang SMP didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk usia 13 hingga 15 tahun.

Tabel 2.43. Proyeksi Jumlah Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Proyeksi 2025			Proyeksi 2030		
		TK (4-6 Thn)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (4-6 Thn)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Batujajar	5.560	10.987	5.503	5.677	11.558	5.333
2	Cihampelas	7.778	14.642	6.916	8.096	15.740	6.736
3	Cikalong Wetan	6.636	12.938	6.351	6.811	13.719	6.046
4	Cililin	5.126	9.802	5.191	5.175	10.226	5.415
5	Cipatat	7.493	14.217	7.230	7.571	14.693	6.919
6	Cipendeuy	4.362	8.576	4.306	4.379	9.084	4.196
7	Cipongkor	6.193	10.972	5.340	6.439	11.392	5.457
8	Cisarua	3.832	7.576	3.774	3.751	7.918	3.815
9	Gununghalu	4.051	7.375	3.665	4.355	7.905	3.568
10	Lembang	9.596	18.895	9.458	9.874	19.956	9.162
11	Ngamprah	7.785	15.739	8.544	7.471	15.729	8.002
12	Padalarang	8.407	16.940	9.784	7.821	16.667	9.980
13	Parongpong	5.409	10.529	5.299	5.460	10.982	5.269
14	Rongga	3.474	5.851	3.019	3.836	6.210	3.205
15	Saguling	1.853	3.541	1.817	1.909	3.867	1.976
16	Sindangkerta	4.126	7.592	3.822	4.412	8.202	3.977
Kabupaten Bandung Barat		**91.681**	**176.172**	**90.019**	**93.037**	**183.848**	**89.056**

Sumber: Analisis Data, 2025

Proyeksi jumlah murid pada level SD dan SMP mengalami peningkatan selama kurun waktu 2025 hingga 2030. Adapun jumlah murid TK diproyeksi cenderung mengalami penurunan. Proyeksi pada tahun 2025 menunjukkan lonjakan jumlah murid TK yang cukup besar dari kondisi eksisting 20.843 orang pada tahun 2020 menjadi 91.681 orang. Hal ini disebabkan oleh asumsi Angka Partisipasi Kasar yang digunakan adalah 100 persen. Lonjakan jumlah murid TK pada tahun 2025 ini dapat mengindikasikan belum optimalnya partisipasi sekolah pada jenjang TK. Berdasarkan tren proyeksi, terdapat peningkatan pada tahun 2030 sebesar 1,48 persen dibandingkan dengan hasil proyeksi pada tahun 2025.

Tabel 2.44. Proyeksi Jumlah Kebutuhan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Proyeksi 2025			Proyeksi 2030		
		TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	TK (Usia 4-6 tahun)	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat
1	Batujajar	371	392	172	378	413	167
2	Cihampelas	519	523	216	540	562	211
3	Cikalong Wetan	442	462	198	454	490	189
4	Cililin	342	350	162	345	365	169
5	Cipatat	500	508	226	505	525	216
6	Cipendeuy	291	306	135	292	324	131
7	Cipongkor	413	392	167	429	407	171
8	Cisarua	255	271	118	250	283	119
9	Gununghalu	270	263	115	290	282	112
10	Lembang	640	675	296	658	713	286
11	Ngamprah	519	562	267	498	562	250
12	Padalarang	560	605	306	521	595	312
13	Parongpong	361	376	166	364	392	165
14	Rongga	232	209	94	256	222	100
15	Saguling	124	126	57	127	138	62
16	Sindangkerta	275	271	119	294	293	124
Kabupaten Bandung Barat		**6.112**	**6.292**	**2.813**	**6.202**	**6.566**	**2.783**

Sumber: Analisis Data, 2025

Hasil proyeksi jumlah murid selanjutnya digunakan sebagai basis data untuk memproyeksi jumlah kebutuhan guru berdasarkan jenjang pendidikan. Lebih dari itu, proyeksi kebutuhan guru juga didasarkan pada rasio guru murid dalam Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, 1:15 peserta didik untuk jenjang PAUD/TK; 1:28 peserta didik untuk jenjang SD/Madrasah Ibtidaiyah; dan 1:32 peserta didik SMP/ Madrasah Tsanawiyah.

Kebutuhan guru paling banyak terdapat pada jenjang TK/PAUD dan SD. Kecamatan Lembang dan Padalarang memiliki kebutuhan guru paling banyak jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Meskipun demikian, sebaran kebutuhan guru masih perlu untuk ditampalkan dengan sebaran eksisting satuan pendidikan.

Tabel 2.45. Proyeksi Jumlah Kebutuhan Gedung Sekolah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030

Jenjang Penddidikan	Proyeksi 2025	Proyeksi 2030
TK (Usia 4-6 tahun)	1.020	1.035
SD/ Sederajat	1.049	1.096
SMP/ Sederajat	312	312

Sumber: Analisis Data, 2025

Proyeksi kebutuhan jumlah gedung sekolah dilakukan dengan merujuk pada proyeksi jumlah murid serta ketentuan yang dimuat dalam Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Beberapa ketentuan dan asumsi yang digunakan dalam proyeksi ini antara lain:

1. Setiap satu sekolah TK/PAUD dapat terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 16 rombongan belajar.A sumsi yang digunakan adalah setiap satu sekolah TK diasumsikan terdiri dari 6 rombongan belajar.
2. Setiap satu sekolah SD/Madrasah Ibtidaiyah dapat terdiri dari 1 (satu) sampai dengan 24 rombongan belajar. Asumsi yang digunakan adalah setiap satu sekolah SD diasumsikan terdiri dari 6 rombongan belajar.
3. Setiap satu sekolah SMP/Madrasah Tsanawiyah dapat terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 33 rombongan belajar. Asumsi yang digunakan adalah setiap satu sekolah SMP diasumsikan terdiri dari 9 rombongan belajar.

Proyeksi kebutuhan jumlah gedung sekolah selaras dengan tren jumlah murid yakni terjadi tren peningkatan pada jenjang SD dan SMP serta tren menurun pada jenjang TK/PAUD. Namun demikian proyeksi jumlah kebutuhan gedung sekolah perlu dianalisis lebih lanjut dengan memperhatikan jarak serta kondisi gedung sekolah eksisting. Peningkatan kebutuhan jumlah gedung sekolah berdasarkan hasil proyeksi ini tidak selalu harus direspon dengan pembangunan gedung sekolah baru namun juga dapat direspon dengan menambah jumlah ruang kelas atau penyesuaian rombongan belajar.

2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat, yang akan dibahas mencakup: Kesejahteraan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Perlindunan social, Kebudayaan, Kualitas keluarga dan kualitas anak serta kesetaraan gender dan pemuda dan olahraga.

2.1.4.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan diwilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu menggunakan pendekatan produksi/sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya/pengeluaran.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada periode perhitungan/tahun berjalan. Pada periode tahun 2020-2023 PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 46.478,90 miliar Rupiah (2020); 48.764,31 miliar Rupiah (2021); 52.921,29 miliar Rupiah (2022); 56.945,18 miliar Rupiah (2023) dan 61.236,34 miliar rupiah (2024). Peningkatan pada periode 2020-2024 ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume.

Tabel 2.46. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 Kabupaten Bandung Barat

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.173,59	6.140,22	6.812,50	7.247,21	7.732,00
2	Pertambangan dan Penggalian	476,31	506,84	517,68	535,90	574,97
3	Industri Pengolahan	18.744,16	20.188,77	22.012,92	23.440,63	25.014,94
4	Listrik dan Gas	375,83	418,08	441,35	463,10	511,74
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	19,68	21,60	23,85	24,50	28,83
6	Konstruksi	3.421,28	3.683,20	3.878,19	4.184,36	4.238,63
7	Perdagangan besar dan eceran	5.991,72	6.188,06	6.535,27	7.060,70	7.583,22
8	Transportasi dan pergudangan	2.436,30	2.511,57	2.905,25	3.409,12	3.794,05
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.401,86	2.417,65	2.783,85	3.063,80	3.203,71

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Informasi dan komunikasi	999,36	1.069,96	1.120,75	1.191,52	1.261,78
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	418,93	455,56	490,38	516,24	612,70
12	Real Estate	855,11	939,98	1.016,14	1.096,94	1.214,39
13	Jasa Perusahaan	192,79	218,83	253,49	283,21	325,89
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.269,76	1.242,43	1.201,45	1.247,80	1.310,23
15	Jasa Pendidikan	1.942,60	1.983,84	2.078,60	2.248,48	2.727,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	258,02	274,36	290,83	316,87	388,32
17	Jasa lainnya	501,60	503,35	558,78	614,81	713,04
PDRB ADHB		**46.478,90**	**48.764,31**	**52.921,29**	**56.945,18**	**61.236,34**

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025, BPS, yang dikelola dalam SIPD

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (expenditure) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (production). PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi).

Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Bila dilihat dari sisi pengeluaran, Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan dan penurunan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bandung Barat pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 2.47. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020 - 2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	31.260,37	32.262,77	35.585,57	38.762,46	41.370,11
Konsumsi LNPRT	443,14	455,28	486,47	556,40	612,28
Konsumsi Pemerintah	2.948,57	3.078,08	3.080,70	3.204,43	3.514,89
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.354,54	10.540,03	11.216,89	12.110,42	12.639,69
Perubahan Inventori	661,74	-387,66	58,65	50,86	63,27
Net Ekspor/(Ekspor-Impor)	1.810,54	2.815,82	2.493,01	2.260,61	3.036,10
PDRB / GRDP	**46.478,90**	**48.764,31**	**52.921,29**	**56.945,18**	**61.236,34**

Sumber : PDRB KBB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2025, BPS, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel diatas, berputarnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor disertai dengan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksi barang dan jasa yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. PDRB Atas Dasar Harga Konstan terus meningkat dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2020 nilai PDRB ADHK sebesar 30.640,41milyar setelah pandemi covid-19 di awal tahun 2020, angka PDRB ADHK naik menjadi 31.701,79 miliar rupiah pada tahun 2021. Tetapi pada tahun 2022, 2023, 2024 secara nominal PDRB ADHK Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan menjadi 33.393,29 milyar pada tahun 2022, 35.062,19 milyar pada tahun 2023 dan 36.793,68 milyar pada tahun 2024, perkembangannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel gambar dan tabel berikut:

Tabel 2.48. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Bandung Barat

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.711,11	3.672,82	3.823,82	3.884,46	4.100,25
2	Pertambangan dan Penggalian	322,49	342,68	342,29	344,65	355,05
3	Industri Pengolahan	12.516,78	13.126,08	13.970,00	14.710,29	15.171,50
4	Listrik dan Gas	229,82	254,96	266,93	273,12	282,88
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	12,68	13,89	14,95	15,28	15,82
6	Konstruksi	2.214,82	2.378,25	2.419,98	2.528,35	266,56
7	Perdagangan besar dan eceran	4.024,97	4.142,79	4.305,72	4.479,13	4.684,35
8	Transportasi dan pergudangan	1.544,01	1.561,04	1.716,34	1.894,38	2.080,10
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.568,89	1.553,41	1.709,15	1.866,42	1.987,30
10	Informasi dan komunikasi	1.015,82	1.094,91	1.155,96	1.228,47	1.335,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,15	277,91	274,48	284,16	303,95
12	Real Estate	616,38	677,19	731,75	777,36	840,82
13	Jasa Perusahaan	135,50	146,31	161,89	173,66	184,85
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	706,20	688,15	666,91	683,00	728,77
15	Jasa Pendidikan	1.241,42	1.241,87	1.272,15	1.322,48	1.414,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	172,47	182,98	192,58	203,64	214,94
17	Jasa lainnya	343,91	346,54	368,39	393,35	431,41
PDRB ADHK		**30.640,41**	**31.701,79**	**33.393,29**	**35.062,19**	**36.793,68**

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025, BPS, yang dikelola dalam SIPD

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat pada periode 2020-2024 dapat dilihat dari berikut ini:

Tabel 2.49. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020-2024

Komponen Pengeluaran/Expenditure item	2020	2021	2022	2023	2024
1. Konsumsi Rumah Tangga	19.770,88	20.033,77	20.909,97	21.921,28	22.974,98
2. Konsumsi LNPRT	300,82	305,53	314,86	347,42	374,95
3. Konsumsi Pemerintah/	1.770,07	1.806,28	1.765,63	1.817,98	1.960,37
4. Pembentukan Modal Tetap	6.529,16	7.009,20	7.050,77	7.371,64	7.726,05
5. Perubahan Inventori	374,39	-208,71	31,57	26,59	32,25
6. Net Ekspor (Ekspor-Impor)	1.895,08	2.755,72	3.320,49	3.577,28	3.725,08
PDRB / GRDP	**30.640,41**	**31.701,79**	**33.393,29**	**35.062,19**	**36.793,68**

Sumber : PDRB KBB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2023, BPS, yang dikelola dalam SIPD

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus atau sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,46 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada saat terjadi pandemi covid-19 yang mengalami kontraksi/pertumbuhan negatif sebesar 2,41 persen. Pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan terakhir tahun 2024 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 4,94 persen. Laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen)

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,62	-1,03	4,11	1,59	5,56
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,18	6,26	-0,11	0,69	3,02
C	Industri Pengolahan	-2,42	4,87	6,43	5,30	3,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-3,08	10,94	4,70	2,32	3,57
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	10,21	9,58	7,61	2,23	3,51
F	Konstruksi/Construction	-5,71	7,38	1,75	4,48	5,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-8,15	2,93	3,93	4,03	4,58
H	Transportasi dan Pergudangan	-3,82	1,10	9,95	10,37	9,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,67	-0,99	10,03	9,20	6,48
J	Informasi dan Komunikasi/	27,03	7,79	5,58	6,27	8,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41	5,61	-1,24	3,53	6,97
L	Real Estat	0,21	9,86	8,06	6,23	8,16
M,N	Jasa Perusahaan	-12,11	7,98	10,65	7,27	6,45
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-7,68	-2,56	-3,09	2,41	6,70
P	Jasa Pendidikan	6,53	0,04	2,44	3,96	6,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,28	6,09	5,25	5,74	5,55
R,S,T, U	Jasa Lainnya	-0,38	0,76	6,30	6,78	9,68
Produk Domestik Regional Bruto		-2,41	3,46	5,34	5,00	4,94

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025, BPS, yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2024, Kabupaten Bandung Barat mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen, ini menurun dibandingkan pada tahun 2023 yang pertumbuhan ekonominya 5%. Hal ini terlihat dari peningkatan aktivitas produksi di semua lapangan usaha dengan percepatan pertumbuhan ekonomi terbesar terdapat pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,37 persen dan perceptan pertumbuhan ekonomi paling kecil ada pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,69 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB ADHK adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, sebagaimana terlihat dari Tabel berikut:

Tabel 2.51. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2020-2024

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1. Konsumsi Rumah Tangga	-0,88	1,33	4,37	4,84	4,81
2. Konsumsi LNPRT	-4,58	1,57	3,05	10,34	7,92
3. Konsumsi Pemerintah	0,02	2,05	-2,25	2,96	7,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,24	7,35	0,59	4,55	4,81
5. Perubahan Inventori					
6. Net Ekspor/ (Ekspor- Impor)					
PDRB / GRDP	-2,41	3,46	5,34	5,00	4,94

Sumber : PDRB KBB Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024, BPS, yang dikelola dalam SIPD

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori

B. Tingkat Inflasi

Secara teoritis, laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan sisi penawarannya, maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, demikian sebaliknya.

Kabupaten Bandung Barat bukan termasuk Kabupaten/Kota yang dihitung nilai inflasinya. Bagi kabupaten yang tidak dihitung maka ada kota rujukan inflasi, dimana kota inflasi tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang tidak jauh berbeda dan atau memiliki kedekatan secara geografis. Berikut ditampilkan inflasi Kota Bandung dan inflasi Kabupaten Bandung, dengan pertimbangan secara geografis dan sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat berbelanja dan memiliki pola konsumsi yang mengarah ke Kota Bandung yang merupakan Kota yang menjadi acuan perhitungan inflasi Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2023 sedangakan mulai tahun 2024 inflasi mengacu kepada inflasi Kabupaten Bandung. Perkembangan inflasi tahunan 7 Kota di Jawa Barat, termasuk inflasi Kota Bandung dan Kabupaten Bnadung selama 5 tahun terakhir sebagai rujukan inflasi di Kabupaten Bandung Barat:

Tabel 2.52. Inflasi Y to Y Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024

Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Bandung	-	-	-	-	1,46
Kab. Majalengka	-	-	-	-	1,60
Kab. Subang	-	-	-	-	0,93
Kota Bogor	2,18	1,93	5,82	3,36	1,75
Kota Sukabumi	1,84	1,71	5,45	2,72	2,59
Kota Bandung	1,75	1,65	7,45	0,63	1,61
Kota Cirebon	1,16	1,81	4,86	3,22	1,10
Kota Bekasi	2,81	1,61	5,37	3,14	1,60
Kota Depok	1,78	1,81	6,06	2,49	1,95
Kota Tasikmalaya	1,61	1,17	6,65	2,84	1,94
Jawa Barat	**2,18**	**1,69**	**6,04**	**2,48**	**1,64**

Sumber: Indikator Statistik Terkini Prov. Jabar, BPS Prov. Jabar, Des 2025

C. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, yang antara lain mencakup Kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.

Bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga diperlukan langkah penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung Barat yang didukung oleh data yang akurat, strategi dan arah kebijakan yang tepat sasaran.

Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Perkembangan tingkat kemiskinan, penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020-2024 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.53. Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
2020	10,49	362.212	179,46
2021	11,30	374.470	190,77
2022	10,82	393.956	183,70
2023	10,52	426.355	179,43
2024	10,49	455.325	179,70

Sumber : KBBDA, 2020-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah, yang dikelola dalam SIPD

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2020 –2024, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.93.113,- dari Rp.362.212,- per kapita per bulan pada Tahun 2020 menjadi Rp.455.425,- per kapita per bulan pada Tahun 2024. Bila dilihat dari skala nasional, kemiskinan Kab. Bandung Barat masih di atas nasional dan dalam skala regional tingkat kemiskinan Kab. Bandung Barat masih tinggi yaitu berada pada peringkat 22 dari 27 Kab/Kota di Jabar.

Tabel 2.54. Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Persen)

Peringkat	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Depok	2.45	2.58	2.53	2.38	2,34
2	Kota Bandung	3.99	4.37	4.25	3.96	3,87
3	Kota Bekasi	4.38	4.74	4.43	4.10	4,01
4	Kota Cimahi	5.11	5.35	5.11	4.66	4,39
5	Bekasi	4.82	5.21	5.01	4.93	4,80
6	Kota Banjar	6.09	7.11	6.73	6.14	5,85
7	Bandung	6.91	7.15	6.80	6.40	6,19
8	Kota Bogor	6.68	7.24	7.10	6.67	6,53
9	Sukabumi	7.09	7.70	7.34	7.01	6,87
10	Ciamis	7.62	7.97	7.72	7.42	7,05
11	Bogor	7.69	8.13	7.73	7.27	7,20
12	Kota Sukabumi	7.70	8.25	8.02	7.50	7,39
13	Karawang	8.26	8.95	8.44	7.87	7,86
14	Purwakarta	8.27	8.83	8.70	8.46	8,41
15	Pangandaran	8.99	9.65	9.32	8.98	8,75
16	Kota Cirebon	9.52	10.03	9.82	9.16	9,02
18	Sumedang	10.26	10.71	10.14	9.36	9,10
17	Subang	9.31	10.03	9.75	9.52	9,49
19	Garut	9.98	10.65	10.42	9.77	9,68
20	Cianjur	10.36	11.18	10.55	10.22	10,14
21	Tasikmalaya	10.34	11.15	10.73	10.28	10,23
22	**Bandung Barat**	10.49	11.30	10.82	10.52	10,49

Peringkat	Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
23	Cirebon	11.24	12.30	12.01	11.20	10,82
24	Majalengka	11.43	12.33	11.94	11.21	11,00
25	Kota Tasikmalaya	12.97	13.13	12.72	11.53	11,10
26	Kuningan	12.82	13.10	12.76	12.12	11,88
27	Indramayu	12.70	13.04	12.77	12.13	11,93
Provinsi Jawa Barat		**7.88**	**8.40**	**8.06**	**7.62**	**7,46**
Nasional		**10.19**	**9.71**	**9.57**	**9.36**	**9,03**

Sumber : Data Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2020-2025, diolah.

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan data disebabkan beberapa faktor diantaranya masih tingginya pengangguran karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan masih rendahnya kualitas komptensi tenaga kerja yang masih didominasi dengan kriteria tenaga kerja lulusan SD yang menyebabkan seseorang tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila dilihat dari kondisi social dimasyarakat bahwa jumlah penduduk yang padat terutama diperkotaan yang menimbulkan adanya kawasan kumuh akibat keterbatasan sumber daya serta keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Kondisi inflasi juga mempengaruhi faktor penghambat dalam penanggulangan kemiskan disatu sisi harga-harga barang kebutuhan pokok terus meningkat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kenaikan cukai rokok, penyesuaian harga BBM, dan lonjakan permintaan pada waktu tertentu tetapi daya beli masyarakat terus menurun. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan yaitu terkait keterbatasan data dan informasi mengenai kemiskinan di suatu daerah, seperti jumlah penduduk miskin, penyebab kemiskinan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dapat menghambat identifikasi masalah dan penyusunan program yang tepat.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata- rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.55. Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	1,40	0,25
2021	1,62	0,32
2022	1,56	0,31
2023	1,54	0,34
2024	1,17	0,23

Sumber : KBBDA, 2020-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah, yang dikelola dalam SIPD

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) yang oleh Bank Dunia dihitung dengan membandingkan berbagai komoditas antar negara. Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, maka perlu disajikan data kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Kepmen Menko Bidang PMK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 bahwa Kab. Bandung Barat merupakan salah satu prioritas lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dari 212 Kab/Kota. Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Bandung Barat terus mengalami penurunan dari 2,91 persen tahun 2020 menjadi 0,88 persen pada tahun 2023 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56. Data Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Data P3KE di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem				Persen Penduduk Miskin Ekstrem			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Bogor	63,497	107,250	146,120	47,220	1.17	1.77	2.38	0.76
2	Sukabumi	30,525	24,610	19,900	24,050	1.12	0.98	0.78	0.94
3	Cianjur	94,891	57,040	36,160	11,890	3.83	2.45	1.55	0.51
4	Bandung	89,145	66,960	56,430	46,810	2.46	1.78	1.48	1.22
5	Garut	50,937	30,320	82,170	9,550	1.97	1.15	3.10	0.36
6	Tasikmalaya	23,315	28,240	15,740	27,120	1.25	1.57	0.87	1.49
7	Ciamis	20,280	5,510	17,900	1,320	1.65	0.45	1.47	0.11
8	Kuningan	73,564	24,030	31,890	15,700	6.30	2.20	2.90	1.42
9	Cirebon	74,930	64,440	81,890	36,640	3.30	2.92	3.70	1.65
10	Majalengka	39,164	43,840	24,130	10,640	3.00	3.58	1.96	0.86
11	Sumedang	57,510	31,710	36,820	6,370	4.99	2.69	3.11	0.53
12	Indramayu	110,433	75,820	53,050	38,550	6.02	4.32	3.01	2.18
13	Subang	59,825	57,510	35,440	34,610	3.75	3.63	2.23	2.16
14	Purwakarta	29,437	18,580	16,930	10,190	2.95	1.95	1.76	1.06
15	Karawang	110,003	28,220	64,020	17,890	4.51	1.20	2.70	0.75
16	Bekasi	71,288	56,000	25,820	19,820	2.29	1.44	0.64	0.48
17	Bandung Barat	52,041	28,250	33,590	15,040	2.91	1.67	1.98	0.88
18	Pangandaran	17,413	5,610	5,930	2,650	4.11	1.38	1.46	0.65

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem				Persen Penduduk Miskin Ekstrem			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
19	Kota Bogor	28,789	13,590	14,450	4,930	2.76	1.23	1.30	0.44
20	Kota Sukabumi	10,875	9,980	4,490	2,540	3.14	3.03	1.35	0.76
21	Kota Bandung	41,795	24,790	25,370	9,140	1.71	0.96	0.98	0.35
22	Kota Cirebon	17,732	13,060	5,320	1,090	5.32	4.10	1.66	0.34
23	Kota Bekasi	31,796	33,250	61,750	-	1.25	1.09	1.99	-
24	Kota Depok	50,380	9,440	17,570	-	2.45	0.38	0.69	-
25	Kota Cimahi	11,027	8,340	2,630	2,980	1.94	1.37	0.43	0.49
26	Kota Tasikmalaya	30,365	27,170	23,880	6,590	4.24	3.99	3.49	0.96
27	Kota Banjar	2,894	2,080	2,490	80	1.44	1.10	1.32	0.04
Provinsi Jawa Barat		1,293,850	895,640	941,860	403,380	2.68	1.79	1.86	0.79
Nasional						4.00	2.14	1.74	1.12

Sumber : Data P3KE, Kemenko PMK, 2024.

Indikator pertama yang digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendapatan suatu wilayah yaitu gini rasio. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024 berfluaktif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah (<0,4). Nilai indeks pada grafik berikut, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 termasuk kategori dengan ketimpangan sedang karena nilainya mencapai 0,4.

Gambar 2.9. Grafik Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

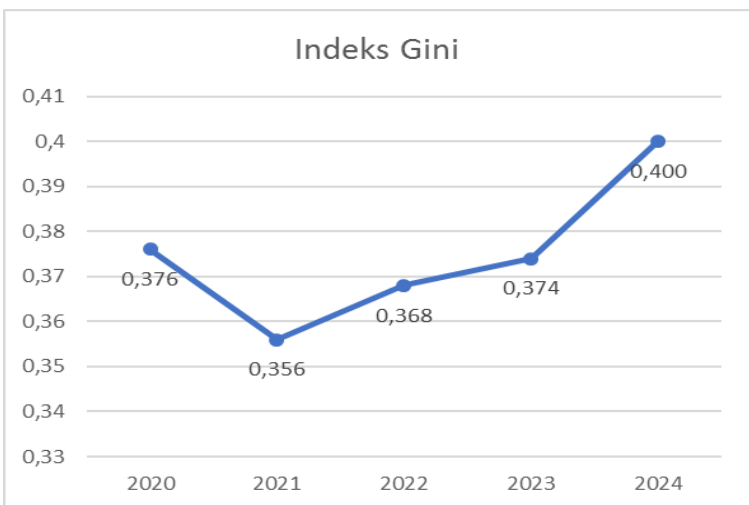

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

D. Kondisi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi, tumbuhnya ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Struktur ketenagakerjaan di Kab. Bandung Barat dilihat berdasarkan jumlah Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada taberl berikut:

Tabel 2.57. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	747.644	765.935	819.559	947.124	978.735
2	Penduduk Bekerja	656.087	676.733	740.639	870.269	913.126
3	Pengangguran	91.557	89.202	78.920	76.855	65.609
4	TPAK	59,91	60,75	64,37	67,01	67,82
5	TPT	12,25	11,65	9,63	8,11	6,70

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2020-2024, diolah.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas, pada tahun 2024 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1.443.076 orang, sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 978.735 orang sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 464.341 orang (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya).

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 sebanyak 978.735 orang mengalami peningkatan sabanyak 31.611 orang atau 3,34 persen apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 sebanyak 947.124 orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja tahun 2024 disebabkan oleh meningkatnya penduduk yang bekerja sebanyak 42.857 orang dari tahun 2023 sebanyak 870.269 orang menjadi 913.126 orang di tahun 2024 dan menurunnya pengangguran sebanyak 11.246 orang dari tahun 2023 sebanyak 76.855 orang menjadi 65.609 orang di tahun 2024.

Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat dari 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan yang cukup melonjak hal ini disebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terhentinya kegiatan usaha akibat pandemi cukup tinggi, namun sebagian dari mereka mencoba memasuki dunia kerja dengan mencari kerja melalui melamar pekerjaan atau coba memulai mempersiapkan usaha.

Pada Tahun 2020 s.d 2024 di Kabupaten Bandung Barat tingkat pengangguran terbuka (TPT) kembali menurun seiring berangsur-angsurnya pergerakan manusia karena pandemi mulai mereda, TPT pada tahun 2020 sebesar 12,25 persen terus turun s.d tahun 2024 menjadi 6,70 persen.

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun 2020 dan 2021 dampak pandemi COVID-19 masih memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat, hal ini terlihat dari capaian target tingkat pengangguran terbuka selalu lebih rendah dibanding target yang telah di tetapkan pada RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2023. Begitu pun pula kondisi tingkat pengangguran di Kab. Bandung Barat masih tinggi bila dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Barat dan nasional. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja, untuk lebih jelasnya digambarkan berikut:

Gambar 2.10. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

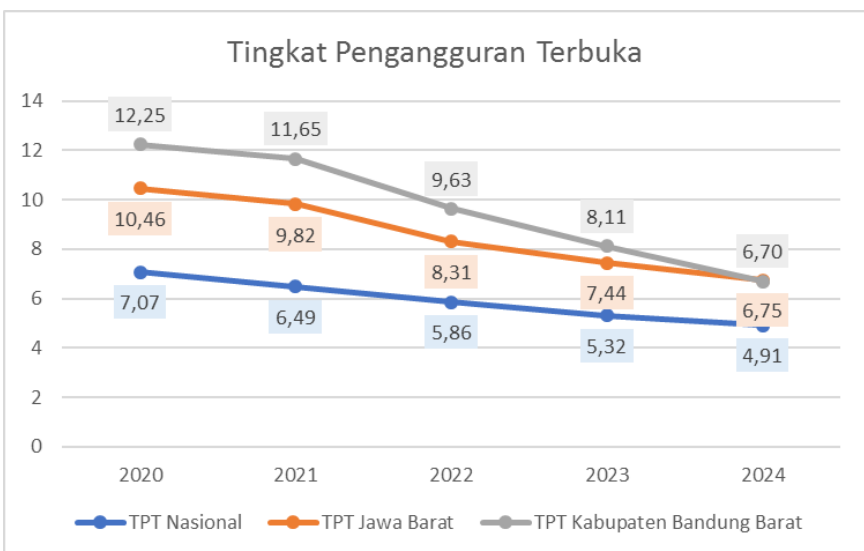

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah, yang dikelola dalam SIPD

Pada skala regional Jawa Barat, pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 menyebabkan angka pengangguran di Jawa Barat semakin tinggi. Hal ini tidak terlepas dari keadaan ketenagakerjaan di 27 Kab/Kota, pada tahun 2020 di Jawa Barat terdapat 14 (empat belas) Kab/Kota yang memiliki angka pengangguran lebih dari 2 (dua) digit (>10 persen) termasuk Kabupaten Bandung Barat. Mulai tahun 2022 s.d 2024 tingkat pengangguran di Kabupaten Bandung Barat turun menjadi 1 (satu) digit dengan capain 6,70 persen di tahun 2024.

E. Pembangunan Manusia

Tujuan utama pembangunan manusia adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki. Hal ini tentunya dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Capaian pembangunan manusia di Kab. Bandung Barat tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58. Indeks Pembangunan Manusia Kab Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

No	Komponen	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,05	74,23	74,59	74,78	75,06
2.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,87	11,88	11,89	11,91	12
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,19	8,20	8,22	8,23	8,24
4.	Pengeluaran Perkapita (ribu Rupiah)	8.455	8.546	9.044	9.392	9.583
IPM		**68,81**	**69,03**	**69,82**	**70,33**	**70,77**

Sumber : KBBDA, 2020-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel di atas, IPM Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 sebesar 70,77. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, setiap dimensi diwakili oleh indikator.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan data pada tahun 2024, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 75,06 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 75,06 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,24 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 12 tahun atau setara dengan Kelas XI atau sampai SMA kelas 2. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita sudah mencapai 9,583 juta rupiah per kapita per tahun.

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk meilihat kemajuan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia bedasarkan IPM menjadi 4 kelompok dengan kriteria sebagai berikut.

- Sangat Tinggi : IPM ≥ 80
- Tinggi : 70 ≤ IPM < 80
- Sedang : 60 ≤ IPM < 70
- Rendah : IPM < 60

Bila mengacu pada klasifikasi pembagian status IPM di atas, maka IPM Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir termasuk dalam kategori "Kelompok sedang", yakni kelompok daerah dengan nilai IPM berkisar antara 60 hingga 70 dan telah mencapai "kelompok Tinggi" di tahun 2023. Status indeks kesehatan termasuk dalam kategori "Kelompok Tinggi" (dengan capaian antara 70-80), status indeks pendidikan dan indeks daya beli masih dalam kategori "Kelompok Sedang" (dengan capaian antara 60-70). Ketiga komponen IPM secara simultan meningkatkan pencapaian IPM setiap tahun. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas pembangunan manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan hidup layak penduduk beberapa tahun terakhir. Hal yang paling harus diperhatikan adalah tingkat pendidikan yang masih tergolong sedang.

Posisi IPM Kabupaten Bandung Barat masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat dan Nasional, namun secara tren sama sama menunjukan peningkatan yang kosisten dalam lima tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2023 sudah masuk dalam kategori IPM tinggi.

Gambar 2.11. Perbandingan IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

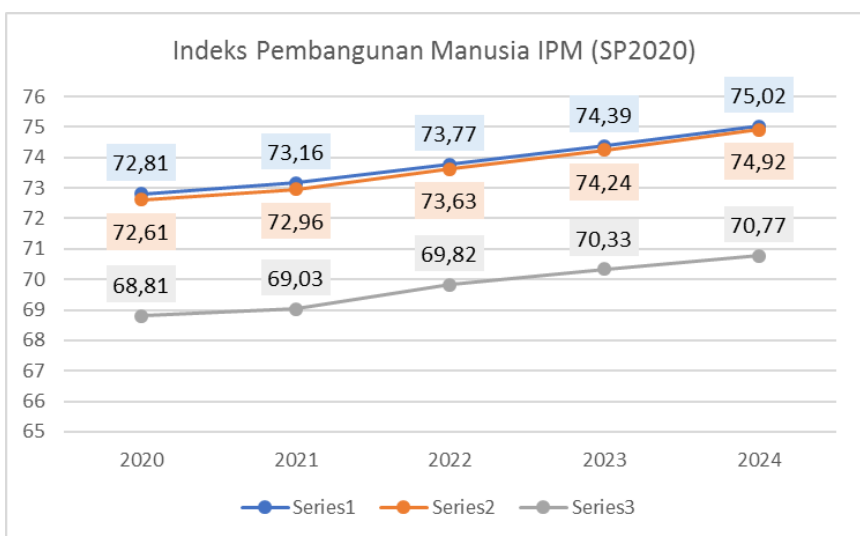

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat diolah Bappelitbangda, 2024, yang dikelola dalam SIPD

Dalam konstelasi regional Jawa Barat capaian IPM Kab/Kota menunjukkan adanya disparitas pembangunan sumber daya manusia, seperti terlihat pada tabel berikut. Perbedaan level pertumbuhan menunjukkan kinerja pembangunan manusia dalam kurun Tahun 2021- 2023, semakin cepat laju pertumbuhannya semakin cepat pula peningkatan IPM-nya.

Tabel 2.59. Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Jawa Barat Barat Tahun 2024

Kab/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran per Kapita	IPM
Bogor	74,90	12,75	8,39	11.563,00	73,63
Sukabumi	74,85	12,39	7,34	9.815,00	70,18
Cianjur	74,80	12,04	7,33	9.026,00	68,89
Bandung	75,23	12,74	9,15	11.392,00	74,59
Garut	74,87	12,17	7,85	9.168,00	69,91
Tasikmalaya	74,06	12,64	7,97	8.965,00	69,98
Ciamis	75,26	14,3	8,1	10.085,00	73,64
Kuningan	75,22	12,27	7,9	10.418,00	71,56
Cirebon	74,98	12,42	7,65	11.529,00	72,3
Majalengka	74,98	12,27	7,53	10.842,00	71,37
Sumedang	75,29	13,02	8,74	11.589,00	74,57
Indramayu	74,82	12,32	6,95	11.010,00	70,72
Subang	75,08	12,11	7,46	11.894,00	72,05
Purwakarta	74,92	12,25	8,14	13.099,00	73,99
Karawang	75,16	12,21	8,05	12.942,00	73,82
Bekasi	75,33	13,18	9,76	12.500,00	76,8
Bandung Barat	75,06	12	8,24	9.583,00	70,77
Pangandaran	75,11	12,31	8,1	9.654,00	71,03
Kota Bogor	75,80	13,51	10,71	13.154,00	79,03
Kota Sukabumi	75,11	13,62	10,38	12.252,00	77,69
Kota Bandung	75,83	14,25	11,07	18.795,00	83,75
Kota Cirebon	75,48	13,17	10,53	12.869,00	78,09
Kota Bekasi	76,14	14,14	11,79	16.775,00	83,55
Kota Depok	75,82	14,11	11,59	16.640,00	83,05
Kota Cimahi	75,55	13,85	11,52	13.278,00	80,3
Kota Tasikmalaya	75,31	13,5	9,63	11.431,00	76,03
Kota Banjar	74,99	13,28	8,83	11.811,00	75,01
Provinsi Jawa Barat	**75,16**	**12,8**	**8,87**	**12.157,00**	**74,92**
Nasional	**74,15**	**13,21**	**8,85**	**12.341,00**	**75,02**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

2.1.4.2 Kesehatan Untuk Semua

Kondisi kesehatan masyarakat yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Umur harapan hidup saat lahir yang diwakili dimensi umur panjang dan hidup sehat secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir mempunyai harapan untuk dapat menjalani hidup lebih panjang.

Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 2.12. Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah, yang dikelola dalam SIPD

Indikator umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan. Umur harapan hidup saat lahir Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, usia harapan hidup meningkat dari 74,05 pada tahun 2020 menjadi 75,06 pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung, hal ini merupakan cerminan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat. Dalam skala regional Jawa Barat, perkembangan UHH di kabupaten/kota selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Selain semua kabupaten/kota mengalami peningkatan, disparitas antara daerah dengan capaian UHH tertinggi dengan yang terendah semakin mengecil, dalam hal ini capaian UHH Kabupaten Bandung Barat bila dibandingkan dengan Kab/Kota lain di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60. Umur Harapan Hidup Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	73,90	74,09	74,42	74,67	74,90
2	Sukabumi	73,90	74,15	74,40	74,65	74,85
3	Cianjur	73,90	74,10	74,37	74,61	74,80
4	Bandung	74,19	74,38	74,67	74,92	75,23
5	Garut	73,97	74,16	74,43	74,66	74,87
6	Tasikmalaya	73,06	73,22	73,64	73,87	74,06
7	Ciamis	74,23	74,42	74,69	74,96	75,26
8	Kuningan	74,25	74,43	74,67	74,91	75,22
9	Cirebon	73,97	74,16	74,43	74,71	74,98
10	Majalengka	73,95	74,14	74,44	74,73	74,98
11	Sumedang	74,30	74,49	74,77	75,04	75,29
12	Indramayu	73,88	74,09	74,39	74,61	74,82
13	Subang	73,99	74,22	74,46	74,87	75,08
14	Purwakarta	73,92	74,11	74,40	74,67	74,92
15	Karawang	74,17	74,35	74,63	74,9	75,16
16	Bekasi	74,54	74,65	74,86	75,09	75,33
17	Bandung Barat	74,05	74,23	74,59	74,78	75,06
18	Pangandaran	74,12	74,32	74,60	74,88	75,11
19	Kota Bogor	74,72	74,92	75,21	75,52	75,80
20	Kota Sukabumi	74,23	74,38	74,64	74,89	75,11
21	Kota Bandung	74,82	74,99	75,26	75,53	75,83
22	Kota Cirebon	74,43	74,59	74,87	75,17	75,48
23	Kota Bekasi	75,01	75,27	75,60	75,86	76,14
24	Kota Depok	74,80	74,97	75,24	75,53	75,82
25	Kota Cimahi	74,56	74,73	74,99	75,27	75,55
26	Kota Tasikmalaya	74,34	74,52	74,80	75,08	75,31
27	Kota Banjar	73,99	74,19	74,48	74,77	74,99
	Provinsi Jawa Barat	**74,19**	**74,37**	**74,65**	**74,91**	**75,16**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting, sebagaimana diamantkan pada Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kondisi capaian percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung Barat walaupun terus mengalami penurunan tetapi masih relative tinggi s.d dengan tahun 2024 Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah sebesar 30,80% dengan rincian capaian prevelansi stunting dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61. Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Jenis Imunisasi	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)	30,20	29,60	27,30	25,10	30,80

Sumber : Dinas Kesehatan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Salah satu faktor rendahnya pencapaian angka harapan hidup adalah tingkat kematian bayi, dan salah satu tingginya angka kematian bayi adalah penolong saat persalinan. Pada golongan pengeluaran atas, semua ibu telah melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga keshatan. Golongan pengeluaran menengah, ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 97,20%. Hal yang masih mengkhawatirkan adalah golongan pengeluaran bawah ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan adalah sebanyak 80,59% dan yang ditolong tenaga kesehatan sebanyak 86,82%.

Tabel 2.62. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan	Penolong Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	83,54	91,82
40 Persen Tengah	85,30	93,81
20 Persen Teratas	96,20	96,20
Pendidikan Tertinggi		
SD ke bawah	78,56	87,57
SMP ke atas	89,58	95,74
Kabupaten Bandung Barat	**85,84**	**92,97**

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, diolah

Sejak diluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional mulai Januari 2014, keikutsertaan masyarakat cukup banyak dan tentu memiliki kegunaan yang sangat berarti, terutama untuk golongan menengah bawah. Pada kelompok pengeluaran terbawah 21,71% telah menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, sementara untuk golongan menengah sebanyak 27,95%. Pada golongan pengeluaran atas penggunaannya 30,80% dan selebihnya menggunakan dana mandiri. Dalam memenuhi jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan bantuan keuangan berupa pemberian bantuan iuran kepada peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum tercakup oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional serta menganggarkan jaminan Kesehatan masyarakat melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda dan JKN serta Jampersal melalui APBD Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 2.63. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat 2020 - 2024

Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda	48.847	54.018	56.502	52.438	871.761
Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN	675.249	558.139	713.690	735.278	
Jumlah	**725.845**	**613.017**	**770.192**	**787.716**	**871.761**

Sumber: Dinas Kesehatan KBB, 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.4.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Selama Periode 2020 hingga 2024, pengetahuan masyarakat Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren meningkat. Hal ini sejalan dengan indikator HLS dan RLS yang menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah cenderung tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan harapan lama sekolah. Hal ini wajar karena rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator keluaran pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program- program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Gambar 2.13. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kab. Bandung Barat, Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024, diolah, *yang dikelola dalam SIPD*

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun selama tahun 2020-2024. Sementara itu, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,01 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama. Walau HLS dan RLS menunjukkan peningkatan tetapi peningkatannya lambat, sehingga sektor pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas- luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Angka ini menunjukkan bahwa, tidak ada perlakuan yang berbeda dalam menyekolahkan anak baik itu anak laki- laki maupun anak perempuan. Harapan Lama Sekolah merupakan indikator proses pembangunan yang menggambarkan ukuran keberhasilan program pendidikan dalam jangka pendek. Dalam konstelasi regional Jawa Barat, HLS Kabupaten Bandung Barat termasuk rendah dibanding Kab/Kota lainnya di Jawa Barat. Hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani individu berusia 7 (tujuh) tahun untuk menempuh pendidikan Kab/Kota lain lebih lama dibandingkan di Kab. Bandung Barat.

Tabel 2.64. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (Tahun)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	12,48	12,49	12,50	12,64	12,75
2	Sukabumi	12,23	12,24	12,25	12,38	12,39
3	Cianjur	11,99	12,00	12,01	12,03	12,04
4	Bandung	12,69	12,70	12,71	12,73	12,74
5	Garut	11,91	12,03	12,15	12,16	12,17
6	Tasikmalaya	12,53	12,54	12,59	12,63	12,64
7	Ciamis	14,06	14,20	14,28	14,29	14,30
8	Kuningan	12,22	12,23	12,24	12,26	12,27
9	Cirebon	12,25	12,27	12,28	12,41	12,42
10	Majalengka	12,22	12,23	12,24	12,26	12,27
11	Sumedang	12,97	12,98	12,99	13,01	13,02
12	Indramayu	12,25	12,26	12,27	12,29	12,32
13	Subang	11,70	11,71	11,78	11,91	12,11
14	Purwakarta	12,11	12,12	12,13	12,18	12,25
15	Karawang	12,09	12,10	12,19	12,20	12,21
16	Bekasi	13,09	13,10	13,11	13,17	13,18
17	Bandung Barat	11,87	11,88	11,89	11,91	12,00
18	Pangandaran	12,07	12,08	12,11	12,30	12,31
19	Kota Bogor	13,41	13,42	13,43	13,45	13,51
20	Kota Sukabumi	13,47	13,58	13,59	13,60	13,62
21	Kota Bandung	14,20	14,21	14,23	14,24	14,25
22	Kota Cirebon	13,12	13,13	13,14	13,16	13,17
23	Kota Bekasi	14,00	14,10	14,11	14,12	14,14
24	Kota Depok	13,92	13,93	13,94	13,96	14,11
25	Kota Cimahi	13,80	13,81	13,82	13,84	13,85

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
26	Kota Tasikmalaya	13,45	13,46	13,47	13,49	13,50
27	Kota Banjar	13,23	13,24	13,25	13,27	13,28
	Provinsi Jawa Barat	**12,50**	**12,61**	**12,62**	**12,68**	**12,80**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Sedangkan RLS menggambarkan indikator output pembangunan dalam jangka panjang, capaian RLS Kab. Bandung Barat 2020-2024 pada kisaran 8,19 - 8,24 tahun, bila dilihat pada skala regional Jawa Barat termasuk pada capain RLS yang tinggi dibanding Kab/Kota lain di Jawa Barat.

Tabel 2.65. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	8,30	8,31	8,34	8,37	8,39
2	Sukabumi	7,07	7,10	7,11	7,33	7,34
3	Cianjur	7,18	7,19	7,20	7,22	7,33
4	Bandung	8,96	9,07	9,08	9,10	9,15
5	Garut	7,52	7,53	7,83	7,84	7,85
6	Tasikmalaya	7,35	7,48	7,73	7,96	7,97
7	Ciamis	7,70	7,90	8,00	8,09	8,10
8	Kuningan	7,57	7,80	7,88	7,89	7,90
9	Cirebon	6,92	7,10	7,40	7,64	7,65
10	Majalengka	7,27	7,31	7,49	7,52	7,53
11	Sumedang	8,51	8,52	8,72	8,73	8,74
12	Indramayu	6,30	6,52	6,83	6,94	6,95
13	Subang	7,10	7,11	7,20	7,45	7,46
14	Purwakarta	8,09	8,10	8,11	8,13	8,14
15	Karawang	7,77	7,78	7,96	8,04	8,05
16	Bekasi	9,12	9,30	9,53	9,57	9,76
17	Bandung Barat	8,19	8,20	8,22	8,23	8,24
18	Pangandaran	7,74	7,85	8,03	8,04	8,10
19	Kota Bogor	10,33	10,53	10,63	10,64	10,71
20	Kota Sukabumi	9,59	9,81	10,14	10,37	10,38
21	Kota Bandung	10,75	10,99	11,00	11,06	11,07
22	Kota Cirebon	9,91	10,12	10,33	10,37	10,53
23	Kota Bekasi	11,16	11,31	11,44	11,66	11,79
24	Kota Depok	11,28	11,46	11,47	11,58	11,59
25	Kota Cimahi	10,96	11,08	11,21	11,39	11,52
26	Kota Tasikmalaya	9,33	9,52	9,53	9,54	9,63
27	Kota Banjar	8,63	8,77	8,78	8,79	8,83
	Provinsi Jawa Barat	**8,55**	**8,61**	**8,78**	**8,83**	**8,87**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah, biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Gambar 2.14. APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024, diolah, yang dikelola dalam SIPD

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia di atas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Pada Gambar 2.15 terlihat bahwa APK SD di Kabupaten Bandung Barat lebih dari 100 persen. Artinya terdapat siswa, baik lebih muda maupun lebih tua, yang berusia di luar batasan usia sekolah dasar (kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Hal ini dimungkinkan banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Dasar pada usia 5-6 tahun, disisi lain di daerah pedesaan masih banyak anak yang usianya di atas 12 tahun, tetapi masih duduk dibangku SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 91,35 persen, artinya 91,35 persen penduduk usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

Gambar 2.15. APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024, diolah

Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. APM SD penduduk laki-laki tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan APM SD penduduk perempuan. Angka Partisipasi Sekolah atau APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Gambar 2.16. APS Menurut Jenjang Pendidikan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

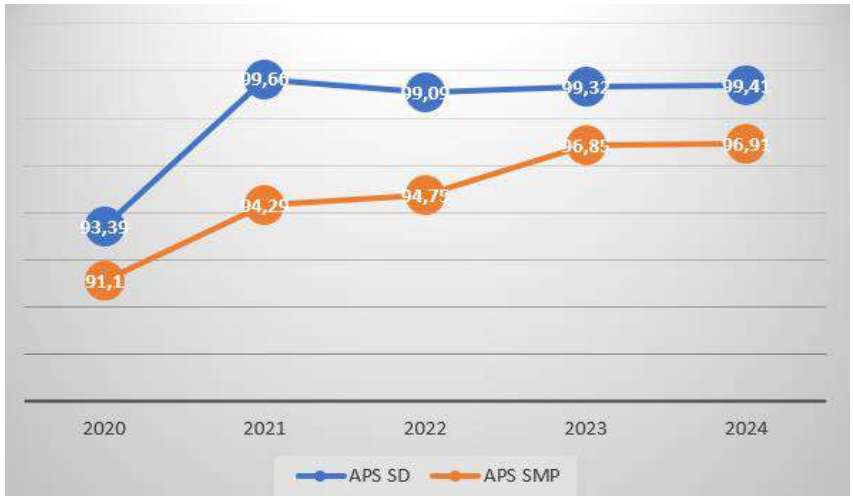

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020 - 2024, diolah, yang dikelola dalam SIPD

Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTS dan Paket C setara SMA/MA. Gambar 2.17 memperlihatkan APS penduduk Kabupaten Bandung Barat, dimana pada semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan perbedaan yang besar antara angka partisipasi sekolah antara penduduk laki-laki dan perempuan.

2.1.4.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang ada perlu mengantisipasi peningkatan jumlah penduduk lansia yang memerlukan perlindungan sosial yang menyeluruh. Hal ini mencakup tantangan dalam penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Data mengenai perlindungan sosial juga perlu pemutakhiran dan masih terfragmentasi, sehingga diperlukan tata kelola yang mampu menciptakan perlindungan sosial yang lebih efektif dan akuntabel.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilaksanakan melalui bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Untuk melihat jumlah dan peran aktif pemerintah dalam upaya penanganan PPKS disajikan pada di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66. Data Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecataman	JUMLAH PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)							
		Anak Terlantar	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Lansia Terlantar	Penyandang Disabilitas	Pengemis	Gelandangan /pemulung	Korban Penyalahgunaan Napza	Korban Bencana Alam dan
1	Rongga	8	24	83	151				1
2	Gunung Halu	21	185	93	138		3		2
3	Sindangkerta	28	70	98	121			1	31
4	Cililin	12	23	194	62		2		7
5	Cihampelas	17	12	125	103		2	3	2
6	Cipongkor	54	4	120	80			1	
7	Batujajar	6	87	143	73		9	5	4
8	Saguling	4	1	25	85			4	4
9	Cipatat	35	43	181	116			1	2
10	Padalarang	50	46	154	67	1			
11	Ngamprah	23	61	148	78	1		12	1
12	Parongpong	1	20	58	133			1	
13	Lembang	31	20	78	135		2	46	
14	Cisarua	7	54	96	108				6
15	CikalongWetan	39	42	104	88		2	9	
16	Cipeundeuy	11	-	77	75				
JUMLAH		**347**	**692**	**1.777**	**1.613**	**2**	**20**	**83**	**60**

Sumber: Satu Data Dinas Sosial, diolah Bappelitbangda, 2024, yang dikelola dalam SIPD

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah sistem perlindungan bagi pekerja dari berbagai risiko yang berhubungan dengan pekerjaan, di Kabupaten Bandung Barat, program ini diimplementasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan kondisi s.d tahun 2024 dibawah ini:

Tabel 2.67. Target dan Realisasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Jml Potensi Semesta			Jml TK aktif			% Realisasi UCJ		
	PU	BPU	Total	PU	BPU	Total	PU	BPU	% UCJ
2022	227.919	206.627	434.546	120.900	38.200	159.100	53,05%	18,49%	36,61%
2023	232.572	337.069	569.641	135.120	40.323	175.443	58,10%	11,96%	30,80%
2024	241.884	343.000	584.884	163.566	41.972	205.538	67,62%	12,24%	35,14%
2025	291.336	403.765	695.101	148.476	34.009	182.485	50,96%	8,42%	26,25%

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Bandung Barat, 2024.

2.1.4.5 Beragama, Bermaslahat dan Berkebudayaan Maju

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan dalam rangka pemajuan dan pelestarian nilai dan objek budaya lokal. Pemetaan potensi budaya di Kabupaten Bandung Barat tertuang pada Data Potensi Adat Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat No. 188.45/Kep.196-Disparbud/2019 Perihal Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Sampai dengan Tahun 2024 tercatat dari 40 jenis adat budaya baik berupa budaya tradisi/ritual, cerita rakyat, upacara tradisional, permainan rakyat dan jenis lainnya sebanyak 30 objek benda, situs dan kawasan cagar budaya telah dilestarikan.

Upaya dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan terhadap objek pemajuan kebudayaan, yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus. Data potensi keragaman seni dan budaya di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68. Potensi Keragaman Budaya Kabupaten Bandung Barat 2020 - 2024

No	Seni Budaya	Jumlah Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Seni Karawitan	50	50	48	200	475	Degung, Karawitan, Aneka Seni Sunda, Domyak, Karinding
2	Seni Teater	3	3	3	10	15	Lawak, Drama
3	Seni Pedalangan	6	6	8	15	20	Wayang Golek, Wayang Piling
4	Seni Lukis	0	0	1	15	22	-
5	Seni Pertunjukan	56	56	121	500	700	Calung, Qosidah, Singa Depok, Tagonian, Terbangan, Calung, Kacapi, Kuda Lumping, Orkes Melayu, Reog, Kaulinan Barudak
6	Seni Tari	88	88	120	230	340	Jaipong, Pencak Silat
7	Kontemporer	8	8	1	1	1	Elektone, Organ Tunggal,Campur Sari
8	Seni Rupa	0	0	1	1	1	Wayang
9	Seni Sastra	1	1	0	0	0	-
10	Adat Budaya	40	55	55	40	45	Ritual, Upacara tradisional/adat, Cerita Rakyat, Permainan Rakyat
Jumlah		**252**	**267**	**358**	**1012**	**1619**	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat tiap tahunnya melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan pada tahun 2020 terdapat 252 keragaman budaya yang dilestarikan meningkat s.d tahun 2024 menjadi 1.619 keragaman budaya, dengan potensi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69. Data Potensi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kab. Bandung Barat

No	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Lokasi		
		JLN/KP, RT/RW	Desa	Kecamatan
1	Observatorium Bosscha (Gedung Kubah)	Jl Peneropongan Bintang	Lembang	Lembang
2	Batu Lonceng	Kp. Batulonceng RT.01 RW.09	Suntenjaya	Lembang
3	Patilasan Dalem Margataka	Kp. Batulonceng	Suntenjaya	Lembang
4	Benteng Belanda Cikahuripan	Kp. Cisaroni	Cikahuripan	Lembang
5	Benteng Belanda Pasir Ipis			Lembang
6	Gua Jepang		Cibogo	Lembang
7	Makam Ernestine Florentine Jansz	Gang Lurah Bintang	Jayagiri	Lembang
8	Makam Johan Eliza de Vrij	Kp. Genteng/Junghuhn	Jayagiri	Lembang
9	Monumen/Makam Franz Wilhelm Junghuhn	Kp. Genteng/Junghuhn	Jayagiri	Lembang
10	Monumen Pahlawan Nasional Oto Iskandardinata	Kp. Babakan Laksana RT.03 RW.07	Gudangkahuripan	Lembang
11	Makam Keramat Eyang Rangga Wulung	Kp. Sirah Cibodas	Suntenjaya	Lembang
12	Batu Keramat Gunung Panyandung		Suntenjaya	Lembang
13	Keramat Puncak Suntenjaya		Suntenjaya	Lembang
14	Keramat Pasir Kurug		Suntenjaya	Lembang
15	Keramat Buniwangi	RT.05 RW. 04	Mekarwangi	Lembang

No	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Lokasi		
		JLN/KP, RT/RW	Desa	Kecamatan
16	Situs Cai Karamat Cikahuripan	Kp. Pojok Tengah	Cikahuripan	Lembang
17	eks Grand Hotel Lembang	Jl Raya Lembang No.272	Lembang	Lembang
18	Rumah Belanda Jalan Tangkubanparahu	Kp. Cibogo RT.001/002	Cibogo	Lembang
19	Balai Penelitian Sayuran / Balitsa		Cikole	Lembang
20	Rumah Ursone 1	Jln Baru Ajak	Lembang	Lembang
21	Rumah Ursone 2	Jln Baru Ajak	Lembang	Lembang
22	Rumah Ursone 3	Jln Baru Ajak	Lembang	Lembang
23	Benteng Gunung Putri		Jayagiri	Lembang
24	Batu Belang Bale Panyawangan	Dusun Cikarembi	Cikidang	Lembang
25	Patilasan Mbah Mangkunagara (Aki Gul Wenang) & Mbah Jambrong (Eyang Jagalawang Eyang Cagaralam)	Kp Gunungbatu	Langensari	Lembang
26	Benteng Pasirmalang	Kp Pasirmalang	Mekarwangi	Lembang
27	Bak Pengurangan Tenaga	Jayagriri	Jayagiri	Lembang
28	Eks. Kawedanaan Lembang (Gedung Diklat Lembang)	Jl Raya Lembang	Lembang	Lembang
29	SMP Negeri I Lembang	Jl Raya Lembang	Lembang	Lembang
30	Puskesmas Jayagiri Lembang	Jl Jayagiri No.35	Jayagiri	Lembang
31	Gedung Water Leiding Macshapijj (PDAM Lembang)	Jl Jayagiri	Jayagiri	Lembang
32	Tapak Yaksa	Kp.Cipanjah RT.01 / RW.11	Cigugurgirang	Parongpong
33	Tengah Pakuwon	Jln Cihanjuang Komplek Cibaligo Permai	Cihanjuang Rahayu	Parongpong
34	Villa Merah Sukawana	Kp. Sukawana RT.011/011	Karyawangi	Parongpong
35	Villa Kaktus Sukawana	Kp. Sukawana RT.011/012	Karyawangi	Parongpong
36	Villa Belanda Sukawana	Kp. Sukawana RT.011/013	Karyawangi	Parongpong
37	Penampungan Air Sukawana	Kp. Sukawana RT.011/014	Karyawangi	Parongpong
38	Makam Legok Pulus		Sadang Mekar	Cisarua
39	Makam Pasarean	Kp Tugu 6 RT.02 RW.04	Tugu Mukti	Cisarua
40	Makam Legok Aip		Tugu Mukti	Cisarua
41	Makam Gunung Leutik		Tugu Mukti	Cisarua
42	Makam Manglid		Tugu Mukti	Cisarua
43	Makam Batukarut		Padaasih	Cisarua
44	Makam Pancer Tengah	Jln Cipanas no 87 Dusun Bongkok	Padaasih	Cisarua
45	Makam Embah Kepala		Padaasih	Cisarua
46	Makam Eyang Mas Krama		Padaasih	Cisarua
47	Makam Eyang Panggung Keraton & Eyang Panjang	Kp. Baru Ahad	Kertawangi	Cisarua
48	Makam Prabu Tajimalela		Padaasih	Cisarua
49	Makam Dalem Tumpang			Cisarua
50	Benteng Belanda Sadangmekar	Kp Benteng	Sadang Mekar	Cisarua
51	Polsek Cisarua	Jl. Kolonel Masturi No.302	Kertawangi	Cisarua
52	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	Jl. Kolonel Masturi Km 7	Jambudipa	Cisarua
53	Makam Keramat Ayu Gantang	Komplek Pemakaman Desa Cilame	Cilame	Ngamprah
54	Makam Eyang Surya Atmaja/Pangeran Akmadiraja	Jl. Landeuh	Sukatani	Ngamprah
55	Makam Mbah Nampon	Kp Ciburial, RT.01 RW.14	Margajaya	Ngamprah
56	Makam Syech Hasan Bin Hasan	Kp. Rancabogo RT.06 RW.06	Gadobangkong	Ngamprah
57	Makam Haji Gopur	Kp Tamiang resik RT.01 RW.02	Gadobangkong	Ngamprah
58	Koin Kuno Hindia Belanda		Cimanggu	Ngamprah
59	Stasiun Kereta Api Padalarang	Kp. Curug Agung	Kertajaya	Padalarang
60	Rumah Sinyal A	Jl. Cihaliwung	Kertajaya	Padalarang
61	Rumah Sinyal B	Kp. Curug Agung	Kertajaya	Padalarang
62	Water Toren	Kp. Kebon Kalapa	Kertajaya	Padalarang
63	Rumah model China (Depan Stasiun KA Padalarang)	Kp. Curug Agung	Kertajaya	Padalarang
64	Pabrik Kertas Padalarang (Gedung Utama)	Jl. Cihaliwung No. 181	Kertamulya	Padalarang
65	Perusahaan Air Minum Kemasan		Kertamulya	Padalarang

No	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Lokasi		
		JLN/KP, RT/RW	Desa	Kecamatan
66	Rumah Tinggal Pabrik Kertas	Jl. Cihaliwung	Kertamulya	Padalarang
67	Mess/Rumah Tinggal Karyawan Pabrik Kertas	Jl. Gedong Lima	Kertamulya	Padalarang
68	Kantor Eks Kawedenaan/Kecamatan Padalarang	Jl Raya Tagog Padalarang No 545	Kertamulya	Padalarang
69	Stasiun Kereta Api Cilame	Jl. Perkebunan Pangheotan	Tagogapu	Padalarang
70	Makam Prabu Yudha Kerti Dikusumah & Dewi Mistu Kacanik Tam	Kp. Babakan Priangan RT 02 RW 05	Tagogapu	Padalarang
71	Makam Prabu Saca Komala Demi	Kp. Babakan Priangan RT 02 RW 06	Tagogapu	Padalarang
72	Rumah Model Belanda Milik Haji Lomri	Jl Raya Padalarang	Padalarang	Padalarang
73	Makam Eyang Raksapati		Padalarang	Padalarang
74	Stasion Kereta Api Tagogapu	Kp. Tagogapu	Tagogapu	Padalarang
75	Jembatan KA Cibisoro		Tagogapu	Padalarang
76	Makam Pahlawan Tak Dikenal Pasircikur	Kp. Cadasgorowong	Campakamekar	Padalarang
77	Rumah Belanda Cilio Tagogapu	Kp. Cilio	Tagogapu	Padalarang
78	Makam Gunung Salem Syekh Wonogiri / Syekh Abdullah Mubarok	Kp. Cisomang Hilir RT. 01 / RW. 02	Tenjolaut	Cikalongwetan
79	Makam Karomah Mama Rende (K.H. Akhmad Zakaria)	Kp Rende RT 01 RW 02	Rende	Cikalongwetan
80	Makam Dayeuh luhur (Eyang Jaya Kusuma)	Dusun Tiga	Puteran	Cikalongwetan
81	Makam Eyang Ngabehi/ Eyang Sancang	Kp Sancang	Cisomang Barat	Cikalongwetan
82	Stasiun Kereta Api Maswati	Kp Maswati	Mandalasari	Cikalongwetan
83	Stasiun Kereta Api Rende	Jl Raya Rende	Rende	Cikalongwetan
84	Stasiun Kereta Api Cikadondong	Kp. Sukamanah	Puteran	Cikalongwetan
85	Keramat Mas Entang/Situs Cikahuripan		Banjarsari	Cikalongwetan
86	Makam Keramat Eyang/Embah Ewu	Kp. Ciganda	Rende	Cikalongwetan
87	Benteng Pertahanan Baleendah		Rende	Cikalongwetan
88	Makam Keramat Eyang Haji-Keraton Ciawitali	Kp. Cikemis	Mandalasari	Cikalongwetan
89	Makam / Karomah Mbah Panjak	Dsn Tangkil RT.02 RW.06	Mekarjaya	Cikalongwetan
90	Benteng/Pos Belanda Tangkil	Kp. Cikawung RT.01 RW.11	Mekarjaya	Cikalongwetan
91	Situs Lembang Dano		Cipada	Cikalongwetan
92	Situs Batu Kursi		Cipada	Cikalongwetan
93	Situs Pasarean Cipada	Kp Cileuleuy RW.07	Cipada	Cikalongwetan
94	Pabrik Teh Industri Hilir Panglejar	Kp. Panglejar RT.02/ RW. 11	Cisomang	Cikalongwetan
95	Jembatan Kereta Api Cisomang	Kp. Cisomang	Cikalongwetan	Cikalongwetan
96	Pabrik, Rumah Dinas dan Mess Karyawan PTPN Maswati	Jl Raya Bandung-Purwakarta	Maswati	Cikalongwetan
97	Panglejar	Jl Raya Bandung-Purwakarta	Tenjo Laut	Cikalongwetan
98	Pangheotan	Jl Raya Bandung-Purwakarta	Ganjarsari	Cikalongwetan
99	Makam Keramat Sinalaya		Cikalong	Cikalongwetan
100	Makam Syekh Muhammad Jauhari / Mbah Jaura	Kp. Kancah Nangkub RT.003/011	Ganjarsari	Cikalongwetan
101	Eks. Kawedanaan/ Kantor Kecamatan Cikalongwetan	Jl. Cikalong No.506	Ciptagumati	Cikalongwetan
102	Kuda	Jl.Gunung Kuda RT.002 RW.015	Margalaksana	Cipeundeuy
103	Makam Keramat Pasir Cabe		Bojongmekar	Cipeundeuy
104	Makam Nahdatulkahfi (Eyang Syekh Abdul Kahfi)	Kp.Cipeundeuy 001/006	Sukahaji	Cipeundeuy
105	Makam Kiai Haji Nursaleh		Ciroyom	Cipeundeuy
106	Makam Eyang Jaya Sakti	Kp.Pasir Buntu 004/004	Sukahaji	Cipeundeuy
107	Makam Eyang Camat	Kp.Cisauheun 002/004	Sukahaji	Cipeundeuy
108	Makam Eyang/Embah Bodon	Jl.Lingkung Ciburial 004/004	Jatimekar	Cipeundeuy
109	Makam Eyang Syekh Anjani	Kp.Cisauheun 002/004	Sukahaji	Cipeundeuy
110	Makam Eyang Raden Wijaya Kusuma		Bojong	Cipeundeuy

No	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Lokasi		
		JLN/KP, RT/RW	Desa	Kecamatan
111	Makam Eyang/Embah Bungsu		Bojong	Cipeundeuy
112	Makam Eyang Syekh Bukhori		Nangeleng	Cipeundeuy
113	Makam Eyang Kudratullah	Pasir Gurahit 002/013	Sirnaraja	Cipeundeuy
114	Makan Eyang Bungsu 8		Bojong	Cipeundeuy
115	Makam Eyang Ranggasela	Pasir Sela 004/011	Sirnaraja	Cipeundeuy
116	Makam Eyang Kudapawana/Gunung Kuda		Sirnagalih	Cipeundeuy
117	Makam Eyang Sapinah	Pasir Cipanengah 004/011	Sirnaraja	Cipeundeuy
118	Makam Eyang Sapinah	Kp. Nangeleng RW.010	Nangeleng	Cipeundeuy
119	Makam Eyang Gedig Manggala		Nangeleng	Cipeundeuy
120	Makam Eyang Jagadipati	Jl.Cijati 003/011	Jatimekar	Cipeundeuy
121	Makam Eyang Jagadipati	Kp. Cibanen RW.11	Nangeleng	Cipeundeuy
122	Makam Eyang Wiraguna		Nangeleng	Cipeundeuy
123	Makam Eyang Haji Mesir	Pasiripis 002/013	Sirnaraja	Cipeundeuy
124	Makam Eyang Dira	Kp.Nanggeleng 002/012	Sirnaraja	Cipeundeuy
125	Makam Eyang Akung		Sirnaraja	Cipeundeuy
126	Makam Eyang Suma Jirja	Kp.Nanggeleng 002/012	Sirnaraja	Cipeundeuy
127	Makam Eyang Sadiran	Kp. Ciraja 003/008	Sirnaraja	Cipeundeuy
128	Makam Eyang KH Abi Iping	Kp. PasirNangeleng 002/012	Sirnaraja	Cipeundeuy
129	Makam Eyang Pantun	Kp. Pasir Janggot 001/015	Sirnaraja	Cipeundeuy
130	Makam Eyang Haji Sarif	Kp. Sindangpalay 003/013	Sirnaraja	Cipeundeuy
131	Makam Eyang Gagak Rancang		Jatimekar	Cipeundeuy
132	Makam Eyang/Embah Angot		Nangeleng	Cipeundeuy
133	Makam Eyang Kutawaja		Jatimekar	Cipeundeuy
134	Makam Eyang/Embah Demang		Margalaksana	Cipeundeuy
135	Makam Eyang Gedig Nanggala	Jl. Cipeundeuy-Rajamandala RW.04	Nangeleng	Cipeundeuy
136	Makam Lurah Bintang	Kp. Cibuntu RW.05	Nangeleng	Cipeundeuy
137	Makam Uyut Ento	Kp, Selaeurih RW.05	Nangeleng	Cipeundeuy
138	Makam Uyut Muhyi	Kp. Nangeleng RW.010	Nangeleng	Cipeundeuy
139	Makam Eyang Syeh Quro	Kp. Babakan Cikiray RW.013	Nangeleng	Cipeundeuy
140	Makam Eyang Haji	Kp. Pasircabe	Nangeleng	Cipeundeuy
141	Makam Eyang Yuda Perana	Kp. Pasircabe	Nangeleng	Cipeundeuy
142	Makam Bodas Uyut	Kp. Babakan Cikiray RW.013	Nangeleng	Cipeundeuy
143	Makam Eyang Jatinegara	Jl Makam Eyang Jatinegara 002/008	Jatimekar	Cipeundeuy
144	Makam Nyimas Kubang Karancang	Kp. Nyenang 004/003	Nyenang	Cipeundeuy
145	Pamandian Nyimas Kubang Karancang	Kp. Nyenang	Nyenang	Cipeundeuy
146	Kepuh	Kp. Tugu RT. 001/RW. 014	Ciharashas	Cipeundeuy
147	Blok Karamat	Kp. Gunung Leutik RT.03/RW.09	Ciharashas	Cipeundeuy
148	Batu Lawang/Batu Tumpang	Kp Nyenang 002/002	Nyenang	Cipeundeuy
149	Salam Nunggal	Kp Nyenang 002/003	Nyenang	Cipeundeuy
150	Pangjaratan Gunung Tilu	Jl. Cibuang-Banjarsari RT.002/010	Nyenang	Cipeundeuy
151	Gua Pawon	Kp. Cibukur RT.04 RW.15	Gunungmasigit	Cipatat
152	Patilasan Rangga Doro Manik (Puncak Stone Garden)		Gunungmasigit	Cipatat
153	Jagat Sakti)	Kp. Cibarengkok	Nyalindung	Cipatat
154	Keramat Cikarahayuan dan Cikahuripan	Kp. Parakansalam	Nyalindung	Cipatat
155	Situs Batu Papangkuan	Kp. Parakansalam	Nyalindung	Cipatat

No	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Lokasi		
		JLN/KP, RT/RW	Desa	Kecamatan
156	Patilasan Dipatiukur	Kp. Singapura RW.12	Sumurbandung	Cipatat
157	Sumurbandung	Kp. Singapura RW.13	Sumurbandung	Cipatat
158	Patilasan/Makam Mama Asik	Kp. Cidepong RW 07	Sumurbandung	Cipatat
159	Terowongan Kereta Api Sasaksaat	Kp. Sasaksaat	Sumurbandung	Cipatat
160	Makam Eyang Ranggawulung	Kp. Pancuran Keramat	Sumurbandung	Cipatat
161	Makam Eyang Purba Kawasa	Kp. Pasir Peti	Citatah	Cipatat
162	Makam Eyang Naga Lungsar	Kp. Pasir Peti	Sumurbandung	Cipatat
163	Makam Eyang Susuk Muntu		Citatah	Cipatat
164	Makam Eyang Sanghiang Tunggal		Rajamandala	Cipatat
165	Benteng Belanda Gandasoli / Batununggal / Gedong 8	Kp. Blok Koneng RW.02	Cirawamekar	Cipatat
166	Benteng Belanda Blok Tonjong/BlokLegokjawa/Gedong 10	Kp. Blok Legokjawa RW.12	Cirawamekar	Cipatat
167	Benteng Belanda Sarban / Gedong 12	RW.02	Cirawamekar	Cipatat
168	Pabrik Karet Nyalindung		Cirawamekar	Cipatat
169	Pancuran Keramat Cimaniagung	Kp. Babakan	Nyalindung	Cipatat
170	Gedong Kidul		Cirawamekar	Cipatat
171	Stasiun Kereta Api Sasak Saat	Kp. Sasaksaat	Sumurbandung	Cipatat
172	Rumah Dinas Stasiun Kereta Api Sasaksaat	Kp. Sasaksaat	Sumurbandung	Cipatat
173	Bunker Kebon Kopi	Kp. Cidepong RW.07	Sumurbandung	Cipatat
174	Bunker Bukir 500	Kp. Margaluyu	Sumurbandung	Cipatat
175	Benteng Pasir Kopi	Kp. Batu Karut	Sumurbandung	Cipatat
176	Jembatan Kereta Api Cikubang	Kp. Cikubang	Nyalindung	Cipatat
177	PTPN Rajamandala		Rajamandala Kulon	Cipatat
178	Rumah Dinas Perkebunan Nyalindung Tuan Slive		Nyalindung	Cipatat
179	Rumah Dinas Perkebunan Nyalindung Tuan Hens		Nyalindung	Cipatat
180	Curug Walanda	Kp Cimerang	Citatah	Cipatat
181	Stasiun Kereta Api Rajamandala	Kp. Rajamandala	Mandalasari	Cipatat
182	Stasiun Kereta Api Cipatat	Kp. Cipatat	Cipatat	Cipatat
183	Situs Patilasan Gunung Tikukur	Kp. Cikentit	Saguling	Saguling
184	Makam Pahlawan Tak Dikenal	Kp. Warung Pulus RT. 04 / RW. 14	Batujajar Barat	Batujajar
185	Water Toren Kopasus 1 (dekat masjid)	Jl Raya Batujajar	Batujajar Timur	Batujajar
186	Water Toren Kopasus 2 (dekat dapur umum)	Jl Raya Batujajar	Batujajar Timur	Batujajar
187	Water Toren Kopasus 3 (dekat lapang tembak)	Jl Raya Batujajar	Batujajar Timur	Batujajar
188	Gardu Listrik Kopassus	Jl Raya Batujajar	Batujajar Timur	Batujajar
189	Mess Kopasus	Jl Raya Batujajar	Batujajar Timur	Batujajar
190	Tangsi/Kesatriaan Kopassus	Jl Raya Batujajar	Batujajar Timur	Batujajar
191	Monumen/Makam Belanda	Jl Raya Batujajar	Batujajar Timur	Batujajar
192	SDN 1 Batujajar	Jl Batujajar No 225	Batujajar Timur	Batujajar
193	Makam Keramat KH Sulaeman	Blok Sinarjaya RT.01/15	Batujajar Barat	Batujajar
194	Makam Keramat Mama H.Syirod	Kp. Cipanggulan RT.002/008	Giriasih	Batujajar
195	Makam Sembah Dalem Eyang Ibrahim	Kp. Tambakan RT.04 RW.04	Cipatik	Cihampelas
196	Makam Keramat Eyang Gedeng Rungkang	Kp. Picong Gede RT.004 RW.005	Cipatik	Cihampelas
197	Manan	Kp. Picong Gede RT.004 RW.005	Cipatik	Cihampelas
198	Makam Keramat Eyang Anggayuda/Yudanegara	Kp. Cipapar RT.001/008	Situwangi	Cihampelas
199	Pemancar Radio (Telefonken/NIROM)	Jl Radio	Cililin	Cililin

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Sedangkan data potensi Adat Budaya di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70. Data Potensi Adat Budaya Kabupaten Bandung Barat

No	Adat Budaya	Lokasi	Keterangan
1	Angklung Buncis	Kampung Jajaway Kecamatan Cililin	
2	Durhong	Kampung Ciparanji Kecamatan Cikalongwetan	
3	Hajat Arwah	Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat	Sertifikat WBTB Nasional dari Mendikbudristek Nomor:0005/F4/KB.04.04/2021 tanggal 7 Desember 2021
4	Hajat Bumi	Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy	
5	Hajat Cai Ngaruat Lembur	Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat	
6	Hajat Lembur	Semua Kecamatan	
7	Melak Nandur Ngacak Ngebur	Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat	
8	Mikul Lodong	Desa Tagog Apu Kecamatan Padalarang	Sertifikat WBTB Nasional dari Mendikbud Nomor:129242/MPK.E/KB/2020 tanggal Desember 2020
9	Miteumbeuyan Pare Bangkong Reang	Desa Bojong Kecamatan Rongga	Sertifikat WBTB Nasional dari Mendikbudristek Nomor:0005/F4/KB.04.04/2021 tanggal 7 Desember 2021
10	Miteumbeuyan Pare Kurahengan	Desa CItatah Kecamatan Cipatat	
11	Ngabungbang Dihuluwotan Seke Cai Abo	Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalongwetan	
12	Ngabungbang Dipancuran Cikarahayuan	Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat	
13	Ngajayak Kembang	Kampung Cikareumbi Kecamatan Lembang	
14	Ngeuyeuk Seureuh	Semua Kecamatan	
15	Pabaru Sunda	Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang	
16	Papajar	Semua Kecamatan	
17	Paraji Pupuhunan	Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan	
18	Palakiah Palean Raga	Citapen	Sertifikat WBTB Nasional dari Mendikbudristek Nomor:0005/F4/KB.04.04/2021 tanggal 7 Desember 2021
19	Rubuh Jarami Ampih pare	Desa Gunung Masisgit Kecamatan Cipatat	
20	Sasapian Buhun	Cihideung	
21	Marhaban Marasan Murangkalih	Semua Kecamatan	
22	Tujuh Bulanan	Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat	
23	Opat Sasihan	Kecamatan Gunung Halu	
24	Muludan		
25	Rajaban		
26	Barjanzi		
27	Tahlilan	Semua Kecamatan	
28	Melihat Kila KIla (Alam)		
29	Jajabur	Semua Kecamatan	
30	Puput Puseur	Semua Kecamatan	
31	Nadar Gunung Batu	Desa Lengen Sari Kecamatan Lembang	
32	Ngeling Ngeling Mei Kartawinata	Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong	
33	Sila Demprak Murak Liwet	Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy	
34	Huap Lingkung	Semua Kecamatan	
35	Narik Bakakak	Semua Kecamatan	
36	Nincak Endog	Semua Kecamatan	
37	Meuleum Harupat	Semua Kecamatan	
38	Meupeuskeun Kendi	Semua Kecamatan	
39	Siraman	Semua Kecamatan	
40	Numbas	Kecamatan Sindang kerta	
41	Lungser		Sertifikat WBTB Nasional dari Mendikbudristek Nomor:3038/F4/KB.09.06/2022 tanggal 21 Oktober 2022
42	Kolecer Jawa Barat		Sertifikat WBTB Nasional dari Mendikbud Nomor:60068/MPK.E/KB/2017 tanggal 4 Oktober 2017
43	Rahengan		Sertifikat WBTB Nasional dari Mendikbud Nomor:63378/MPK.E/KB/2016 tanggal 7 Oktober 2016
44	Upacara Ngamandian Ucing	Kecamatan Cipatat	Sertifikat WBTB Nasional dari Mendikbud Nomor:129242/MPK.F/KB/2020 tanggal Desember 2020
45	Wajit Cililin	Kecamatan Cililin	Sertifikat WBTB Nasional dari Mendikbudristek Nomor:2309/F4/Dit.PK/Sertifikat/2023 tanggal 25 Oktober

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di suatu wilayah, untuk memperoleh indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), ini mengukur tiga indikator utama, yaitu: 1) Toleransi, 2) Kesetaraan, dan 3) Kerjasama. Jadi kerukunan umat beragama terwujud melalui tingginya tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama, dalam rangka menciptakan kondusifitas daerah dalam menunjang iklim investasi didaerah. Adapun capaian Indek kerukunan Umat beragama di Kab. Bandung Barat adalah:

Gambar 2.17. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kab Bandung Barat Tahun 2021 - 2023

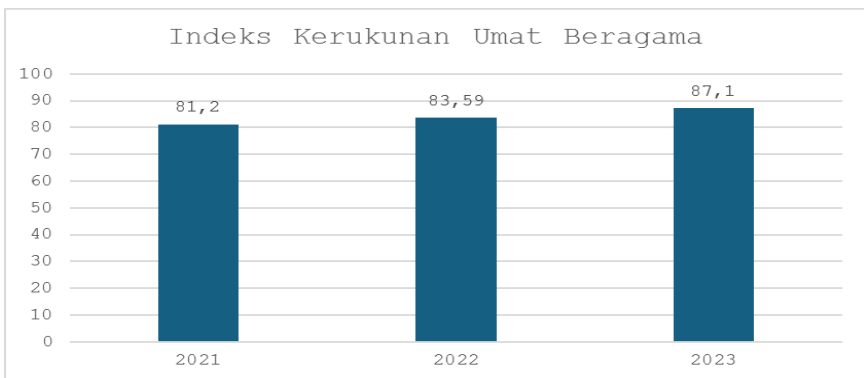

Sumber: Litbang, Bappelitbangda, 2023, diolah.

2.1.4.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

A. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Pada tahun 2024 nilai IDG Kabupaten Bandung Barat sebesar 68,06 poin angka ini meningkat dari kondisi tahun 2020 yang masih berada pada angka 65,40 poin artinya terjadi peningkatan aktivitas perempuan dalam ekonomi dan politik dalam lima tahun terakhir sebesar 2,66 poin. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.

Gambar 2.18. Capaian Indeks Pemberdayaan dan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

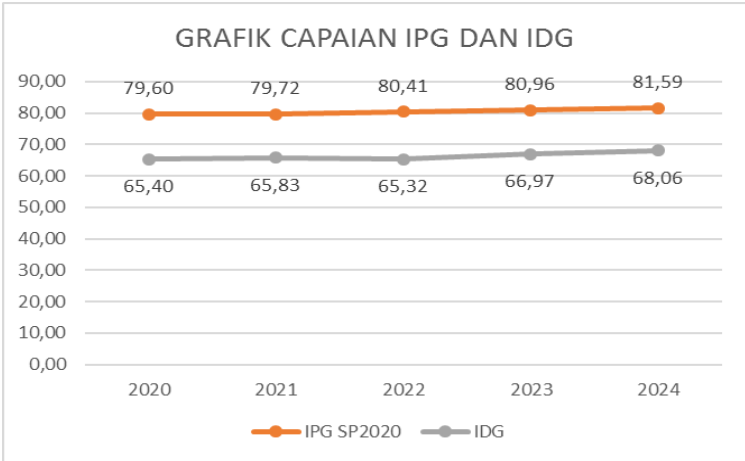

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024, diolah, yang dikelola dalam SIPD

Selama periode lima tahun terakhir, capaian IPG Kabupaten Bandung Barat mengalami tren yang positif. Pada tahun 2024 nilai IPG Kabupaten Bandung Barat sebesar 81,59 poin, angka ini meningkat sebesar 1,99 poin dari tahun 2020 dengan capaian 79,60 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek pembangunan gender di Kab. Bandung Barat.

B. Kualitas Keluarga

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara konseptual, definisi keluarga berkualitas di atas berkaitan erat dengan definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, memiliki kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri, serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Capaian Kualitas Keluarga Kab. Bandung Barat tahun yang diukur melalui indikator iBangga, yaitu merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Pengukuran ini menggunakan 17 variabel yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga, dengan capaian s.d tahun 2024 adalah sebvagai berikut:

Gambar 2.19. Kondisi Capaian Kualitas Keluarga di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2024

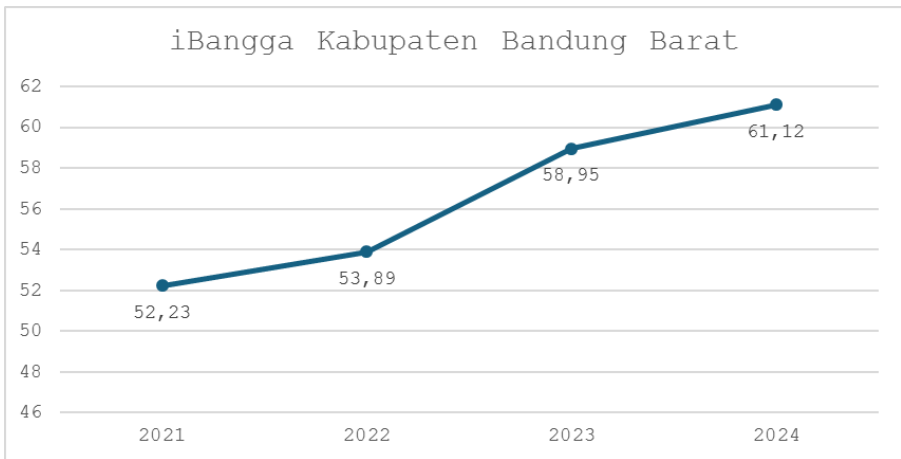

Sumber: DP2KBP3A, 2025.

C. Kualitas Anak

ANAK adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan suatu bangsa, sehingga harus dijaga dan dilindungi dengan baik demi kemajuan suatu Negara/Daerah. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini agar menjadi generasi unggul. Kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa yang akan datang. Pembangunan manusia massa depan di mulai dengan pembinaan anak masa sekarang. Untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas di masa yang akan datang maka anak perlu dipersiapkan agar anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai kemampuannya (Tanuwidjaya, 2012). Kabupaten Bandung Barat yang memiliki jumlah penduduk usia anak sebesar 25,86 persen tentunya juga tidak dapat lepas dari upaya untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Upaya ini direfleksikan dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA), yang terdiri dari 5 (lima) klaster pengukur, meliputi:

1) hak sipil dan kebebasan; 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan 5) perlindungan khusus. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menunjukkan bahwa capaian Indeks Perlindungan anak Kabupaten Bandung Barat belum cukup baik yaitu sebesar 60,23 point dan tahun 2022 sebesar 60,48 persen. Sedangkan capaian Indeks Pemenuhan Anak (IPHA) Kab. Bandung Barat Tahun 2021 sebesar 55,20 point dan capaian 2022 sebesar 55,39 point.

D. Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Parameter keberhasilan pembangunan olahraga bukan hanya dilihat dari segi prestasi yang diraih oleh suatu daerah, akan tetapi parameter keberhasilan pembangunan olahraga dapat dilihat dari segi pencapaian 4 aspek pembangunan keolahragaan atau Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). IPO merupakan indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga didasari oleh empat dimensi dasar yaitu ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam keolahragaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan berolahraga secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh derajat kebugaran jasmani pada masyarakat.

Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, pada tahun 2021 sebesar 0,41 dan tahun 2022 sebesar 0,42 meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 0,45 tetapi capaian masih pada kategori rendah.

Tabel 2.71. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kab Bandung Barat 2021 - 2024

Jenis Indeks	2021	2022	2023	2024
Indeks ruang terbuka	0,59	0,58	0,66	0,67
Indeks SDM keolahragaan	0,33	0,33	0,29	0,31
Indeks partisipasi masyarakat	0,3	0,34	0,37	0,38
IPO	**0,41**	**0,42**	**0,44**	**0,45**

Sumber: Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

Prestasi olahraga di Kabupaten Bandung Barat didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana olahraga, pelaku olahraga yang terlibat dan klub/perkumpulan olahraga sebagai wadah untuk berlatihnya atlet dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga.

Sedangkan peran serta pemuda dalam pembangunan diukur melalui capaian kapasitas layanan kepemudaan dengan capaian di tahun 2024 sebesar 10,34 persen dan presentase pemuda yang aktif di organisasi kepramukaan capaian 2027 sebesar 5,77 persen, dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 2.72. Indikator Kinerja Pemuda dan Olahraga Di Kab Bandung Barat 2020 - 2024

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Klub/ Perkumpulan olahraga	411	428	431	442	435	Olahraga Prestasi, Olahraga Pelajar, Olahraga Rekreasi, Olahraga Disabilitas
Jumlah Atlet	1.984	2.475	2.542	2.744	2.015	
Jumlah Pelatih	545	572	616	703	640	
Jumlah Atlet Berprestasi	0	38	471	791	123	PORDA 2018, PON 2021, SEAGAMES 2019, POPWILDA 2019, KEJURNAS 2019, Porprov 2022, Peparda 2022, PON 2024
Jumlah Sarana dan	2.562	2.667	2.712	2.924	2.957	Tersebar di 16 Kecamatan dengan status

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Prasaran olahraga						Milik Pribadi, Milik Desa, Milik Swasta, Milik Pemda, Milik Yayasan, Milik Sekolah Swasta, Milik Sekolah Negeri & Milik BUMN
Jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP)	79	88	92	92	93	91 Organisasi Pemuda bernaung di KNPI, 1 FOBB (Forum Osis Bandung Barat), 1 KEMBARA (Keluarga Mahasiswa KBB)
Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	5,84	9,2	7,83	10,24	10,34	Layanan Kepemudaan mencakup Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan
Presentase pemuda yg aktif pada organisasi kepramukaan	1,1	1,5	1,5	3,21	5,77	Pramuka Peserta Didik sebanyak 24.449 anggota dan Pramuka Dewasa Sebanyak 2.233 anggota

Sumber Data : Dispora Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

Potensi pelaku olahraga Atlet dan Pelatih dari olahraga di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan dari sisi kuantitas selama kurun waktu 5 tahun dengan jumlah atlet di tahun 2020 sebanyak 1.984 orang atlet meningkat sebesar 38,85 persen menjadi 2.744 atlet di tahun 2023 dengan melibatkan 703 pelatih sampai dengan tahun 2023. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat baik berupa gedung dan lapang olahraga sebagai pusat aktivitas atlet dan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas olahraga pada tahun 2023 terdapat 2.956 lokasi sarana dan prasarana olahraga, artinya proporsi ketersediaan sarana olahraga di Kabupaten Bandung Barat per 1.000 penduduk dari total penduduk tahun 2023 sebanyak 1.911.6616 jiwa adalah sebesar 0,16 persen atau setiap 1 lokasi prasarana olahraga digunakan oleh 629 orang.

Bila dilihat dari prestasi olahraga, keikutsertaan atlet-atlet Kab. Bandung Barat pada event POPDA XIII Bogor tahun 2018 dengan raihan 40 emas, 52 perak dan 111 perunggu berada pada peringkat 6 se Jawa Barat dan event PEPARDA V Bogor tahun 2018 dengan raihan prestasi 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Pada tahun 2019, 7 atlet Kab. Bandung Barat memperoleh raihan medali 11 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Pada tahun 2021 melalui event PON XX Papua Kab. Bandung Barat mengirimkan 48 atlet untuk mewakili Kontingen Jawa Barat dengan raihan prestasi medali 18 emas, 12 perak dan 7 perunggu, berkontribusi untuk mengantarkan kontingen Jawa Barat menjadi juara umum PON XX Papua.

Terakhir pada tahun 2022, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tuan rumah Porprov XIV Jabar tahun 2022 dengan raihan prestasi memperoleh 49 emas, 72 perak dan 104 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat dan event PEPARDA VI Bekasi tahun 2022 dengan raihan prestasi 18 emas, 25 perak dan 32 perunggu berada pada peringkat 8 se-Jawa Barat.

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Kemenristek BRIN tahun 2020, bahwa Kabupaten Bandung Barat masuk pada kategori Daya Saing "Tinggi" dengan nilai indeks sebesar 2,097 dan sampai dengan tahun 2024 dengan capaian IDSD sebesar 3,72.

Gambar 2.20. Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

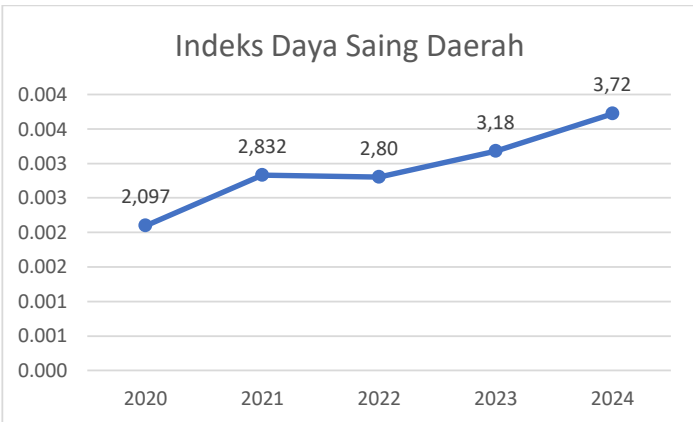

Sumber Data : Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

2.1.5.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Ketergantungan Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat menurut kelompok umur salah satunya digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan, yang dilihat berdasarkan tabel serta digambarkan oleh Piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.73. Rasio Ketergantungan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Penduduk Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia < 15 Tahun	452.602	461.949	450.086	449.623	477.342
Penduduk Usia > 64 Tahun	103.373	104.824	118.923	120.583	151.786
Penduduk (< 15 Tahun dan > 64 Tahun)	555.975	566.733	569.009	570.206	629.128
Penduduk Usia Produktif (15-64)	1.232.361	1.250.977	1.277.960	1.289.430	1.282.533
Jumlah	1.788.336	1.817.770	1.846.969	1.859.636	1.911.661
Rasio Ketergantungan	45,11	45,31	44,59	44,22	49,05

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.21. Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

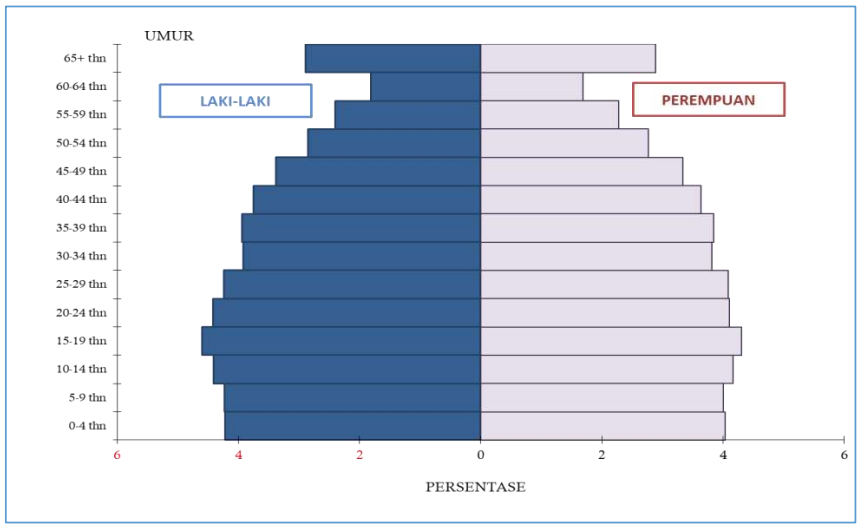

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Tahun 2024, diolah

Terlihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat, persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat pada kelompok umur di bawah 15 tahun terhitung di bawah 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa penduduk Kabupaten Bandung Barat tergolong struktur penduduk tua, yang artinya perbandingan penduduk usia produktif lebih besar dari yang tidak produktif. Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk, yang merupakan perbandingan antara penduduk yang belum/tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Dependency Ratio Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 49.05. artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di harus menanggung 45 orang penduduk usia tidak produktif.

B. Kondisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bila dilihat dari daya saing SDM berdasarkan kondisi ASN di Kabupaten Bandung Barat menurut pendidikan yang ditamatkan mayoritas berpendidikan terakhir S-1. Hal ini bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara umum telah memiliki: kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam domain kognitif, kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media, kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah. Namun demikian dalam perspektif ke depan perlu terus ditingkatkan kualitas pendidikan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada jenjang S-2 dan S-3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan bersifat multidimensi. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74. Kondisi ASN Kabupaten Bandung Barat Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024

Tingkat Pendidikan	2020			2021			2022			2023			2024		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Sampai dengan SD	39	2	41	38	0	38	21	0	21	21	0	21			
SMP/ Sederajat	56	3	59	50	2	52	37	3	40	20	3	23	51	0	51
SMA/ Sederajat	472	159	631	402	114	516	286	55	341	249	51	300	247	67	314
Diploma I, II/ Akta I, II	32	14	46	119	124	243	119	124	243				34	36	70
Diploma III/ Akta III/ Sarjana Muda	84	456	540	128	505	633	100	486	586	94	486	580	1551	2548	4,099
Tingkat Sarjana/ Doktor/Ph.D	2967	3119	6086	2451	3304	5755	2412	3139	5551	2252	2803	5055	443	401	844
Jumlah/ Total	3618	3739	7357	3188	4049	7237	2856	3683	6539	2636	3343	5979	2,326	3,052	5,378

Sumber : BKPSDM, 2025, yang dikelola dalam SIPD

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Karakteristik Penduduk Bekerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. TPAK dihitung berdasarkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,26 persen dari tahun 2023 sebesar 67,01 persen menjadi 67,27 persen di tahun 2024.

Peningkatan TPAK mengindikasikan terjadi peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja. TPAK Kabupaten Barat Tahun 2024 sebesar 67,27 persen, artinya dari 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat, 67 - 68 orang diantaranya aktif secara ekonomi. TPAK Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 87,83 persen lebih tinggi dari pada TPAK perempuan sebesar 46,00 persen. Hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Bandung Barat jauh lebih aktif secara ekonomi dibandingkan yang perempuan. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2023, TPAK laki- laki tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen sedangkan TPAK perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen. Pada periode 2024 ini partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat lebih cepat dibandingkan yang laki-laki.

Gambar 2.22. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Bandung Barat 2020 – 2024

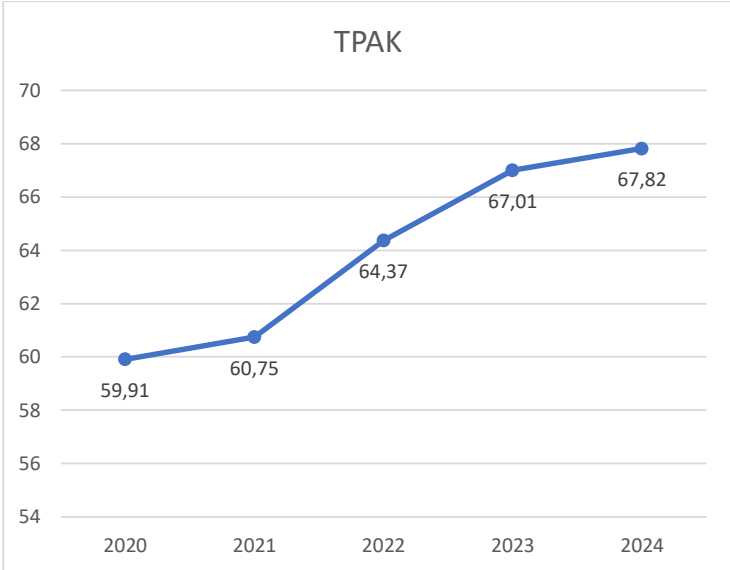

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2020-2024, yang dikelola dalam SIPD

Karakteristik penduduk bekerja di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan kriterianya, adalah sebagai berikut:

- Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024 adalah sektor jasa sebesar 47,91 persen; sektor manufaktur sebesar 32,56 persen; dan Pertanian sebesar 19,53 persen. Dibandingkan tahun 2023 (Agustus), lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah lapangan pekerjaan sektor manufaktur (23.064 orang), sektor pertanian (12.778 orang) dan sektor jasa (7.015 orang).

- Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 40,35 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap yaitu sebesar 2,08 persen. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami kenaikan persentase terbesar adalah status pekerja buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 2,2 persen poin. Pada Tahun 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 525.720 orang (57,57 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 387.406 orang (42,43 persen). Dibandingkan Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 10.024 orang.

➢ Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 46,11 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 4,56 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Tahun 2023. Dibandingkan dengan Tahun 2023, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah mengalami peningkatan persentase sebesar 0,60 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan universitas mengalami penurunan persentase, sebesar 0,44 persen poin.

Tabel 2.75. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan 2022-2024 (persen)

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2022		Agustus 2023		Agustus 2024		Perubahan Agt 2022 – Agt 2023		Perubahan Agt 2023 – Agt 2024	
	orang	persen	orang	persen (%) poin[1)]	orang (%)	perse	orang n (%)	persen	orang poin[1)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lapangan Pekerjaan Utama										
A. Pertanian	152.453	20,58	165.532	19,02	178.310	19,53	13.079	-1,56	12.778	0,51
B. Manufaktur	249.979	33,75	274.234	31,51	297.298	32,56	24.255	-2,24	23.064	1,05
C. Jasa	338.207	45,66	450.503	49,47	437.518	47,91	92.296	3,81	7.015	-1,56
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	
Berusaha sendiri	197.371	26,65	210.495	24,19	186.796	20,46	13.124	-2,46	-23.699	-3,73
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	70.986	9,58	84.073	9,66	97.687	10,70	13.087	0,08	13.614	1,04
Berusaha dibantu buruh tetap	17.903	2,42	22.572	2,60	18.968	2,08	4.669	0,18	-3.604	-0,52
Buruh/karyawan/pegawai	291.364	39,34	332.001	38,15	368.438	40,35	40.637	-1,19	36.437	2,2
Pekerja bebas di pertanian dan non pertanian	119.814	16,18	144.043	16,55	153.216	16,78	24.229	0,37	9.173	0,23
Pekerja keluarga/tak dibayar	43.201	5,83	77.085	8,86	88.021	9,64	33.884	3,03	10.936	0,78
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	
Status Pekerjaan Formal/Informal										
Formal	309.267	41,76	354.573	40,74	387.406	57,57	45.306	-1,02	32.833	16,83
Informal	431.372	58,24	515.696	59,26	525.720	42,43	84.324	1,02	10.024	-16,83
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan										
SD ke Bawah	352.722	47,62	396.043	45,51	421.026	46,11	43.321	-2,11	24.983	0,60
Sekolah Menengah Pertama	150.531	20,32	187.853	21,59	177.566	19,45	37.322	1,27	-10.287	-2,14
Sekolah Menengah Atas	109.707	14,81	121.680	13,98	152.214	16,67	11.973	-0,83	30.534	2,69
Sekolah Menengah Kejuruan	81.077	10,95	111.356	12,80	106.589	11,67	30.279	1,85	-4.767	-1,13
Diploma I/II/III	9.871	1,33	9.829	1,13	14.122	1,55	-42	-0,2	4.293	0,42
Universitas (Diploma IV, S1, S2, S3)	36.731	4,96	43.508	5,00	41.609	4,56	6.777	0,04	-1.899	-0,44
Jumlah	740.639	100,00	870.269	100,00	913.126	100,00	129.630		42.857	

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Tahun 2020-2024, yang dikelola dalam SIPD

2.1.5.2 Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi

Produktifitas ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi.

Kondisi daya saing daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan kemampuan ekonomi daerah diantaranya berdasarkan sektor lapangan usaha unggulan dan potensial, PDRB per Kapita dan pengeluaran per Kapita.

A. Lapangan Usahan Unggulan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha bertujuan untuk melihat struktur ekonomi, besarnya peranan berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara peranan lapangan usaha- lapangan usaha lainnya masing- masing masih berada di bawah 5 (lima) persen, distribusi peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kab. Bandung Barat, pada tabel berikut:

Tabel 2.76. Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (persen)

No	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,28	12,59	12,87	12,73	12,63
2	Pertambangan dan Penggalian	1,02	1,04	0,98	0,94	0,94
3	Industri Pengolahan	40,33	41,40	41,60	41,66	40,85
4	Listrik dan Gas	0,81	0,86	0,83	0,81	0,84
5	Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah daur ulang	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05
6	Konstruksi	7,36	7,55	7,33	7,35	6,92
7	Perdagangan besar dan eceran	12,89	12,69	12,35	12,40	12,38
8	Transportasi dan pergudangan	5,24	5,15	5,49	5,99	6,20
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	5,17	4,96	5,26	5,38	5,23
10	Informasi dan komunikasi	2,15	2,19	2,12	2,09	2,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,9	0,93	0,93	0,91	1,00
12	Real Estate	1,84	1,93	1,92	1,93	1,98
13	Jasa Perusahaan	0,41	0,45	0,48	0,5	0,53
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 89ocial wajib	2,73	2,55	2,27	2,19	2,14
15	Jasa Pendidikan	4,18	4,07	3,93	3,95	4,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,56	0,56	0,55	0,56	0,63
17	Jasa lainnya	1,08	1,03	1,06	1,08	1,16
PDRB ADHB		**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber: PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha 2020 – 2025, BPS 2025, yang dikelola dalam SIPD

1. Industri Pengolahan

   Industri pengolahan merupakan sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat dibanding sektor lainnya, dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 39,96 - 41,66 persen dari total PDRB.

2. Perdagangan Besar dan Eceran

   Sektor Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar ke dua setelah Industri Pengolahan dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 12,35 - 12,89 persen dari total PDRB. Pada saat pandemi covid-19 sektor ini sangat terpengaruh dengan adanya pembatasan aktifitas manusia atau barang sehingga kontribusinya melambat dibanding saat kondisi normal sebelum adanya covid- 19 tetapi berangsur-angsur pulih kembali di tahun 2022 dan 2023.

3. Pertanian

   Lingkup lapangan usaha ini meliputi Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian; Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Perikanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 12,59 - 13,28 persen dari total PDRB. Khusus di tahun 2020 pada saat awal terjadi pandemi covid-19, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ada pergeseran dimana lapangan usaha pertanian menjadi urutan kedua melampaui pencapaian lapangan usaha perdagangan. Ini terjadi karena dampak Pandemi Covid-19, lapangan usaha pertanian walaupun sama mengalami hantaman karena covid namun tidak sebesar lapangan usaha perdagangan.

4. Konstruksi

   Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha konstruksi memberikan andil terhadap PDRB dengan capaian selama 5 tahun terakhir berkontribusi antar 6,92 - 7,55 persen dari total PDRB. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup konstruksi pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prefabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Proyek pembangunan infrastruktur strategis di Bandung Barat jangka menengah seperti Kereta Api Cepat Jakarta- Bandung serta Proyek perbaikan dan pembukaan ruas jalan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat memberikan kontribusi pada perekonomian di sektor ini.

5. Transportasi dan Pergudangan

   Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan pada tahun 2018 - 2022 memberikan andil 5,15 - 6,20 persen terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan didorong oleh perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, dan konstruksi serta juga dipengaruhi oleh peningkatan volume ekspor dan impor.

6. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman

   Kegiatan ekonomi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman pada tahun 2020 - 2024 memberikan andil 4,96 - 5,38 persen terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ekonomi utama pada lapangan usaha ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi.

B. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.77. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
- ADHB	26,09	26,97	28,85	30,62	32,50
- ADHK	17,2	17,53	18,21	18,85	19,52
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	-8,38	1,93	3,85	3,56	3,57

Sumber : KBBDA, 2020-2025, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah, yang dikelola dalam SIPD

C. Pengeluaran Per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020, perkembangannya seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.23. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

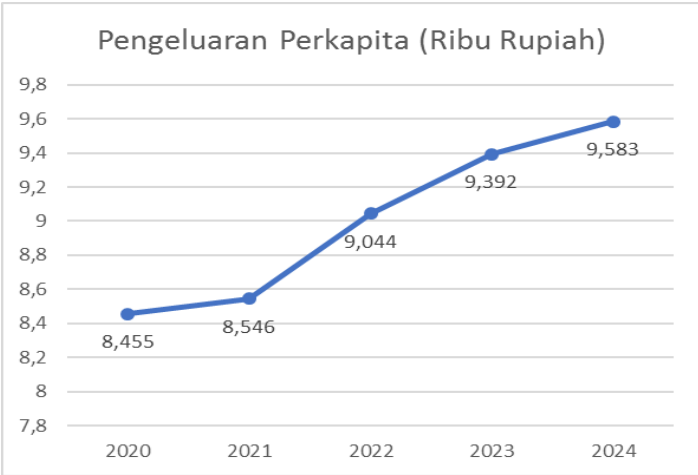

Sumber : KBBDA, 2020-2024, BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita Kabupaten Bandung Barat menurun menjadi sebesar Rp.8.455.000,- atau mengalami kontraksi sebesar 0,28% dibandingkan tahun 2019. Hal ini merupakan dampak terjadinya pandemi Covid- 19 pada awal tahun 2020. Namun dengan mulai menurunnya kasus Covid-19 pada tahun 2021 sehingga keadaan perekonomian mulai membaik, pengeluaran per kapita Kabupaten Bandung Barat terus meningkat menjadi sebesar Rp.9.583.000,- atau naik sebesar 8,15% pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2020.

Pada skala regional Jawa Barat (terlihat pada tabel 2.64), pengeluaran per kapita merupakan komponen IPM yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19. Semua kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan nilai pengeluaran per kapita pada tahun 2020.

Tetapi di tahun 2021 - 2024 seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai menunjukkan pemulihan, seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan nilai pengeluaran per kapita dibandingkan tahun sebelumnya termasuk di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian di tahun 2021 sebesar Rp.8.546.000,- dan terus meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar Rp.9.583.000,-

Tabel 2.78. Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Rp.000/kapita/tahun)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bogor	10.317	10.410	10.860	11.153	11.563
2	Sukabumi	8.823	8.850	9.210	9.482	9.815
3	Cianjur	7.980	8.052	8.244	8.626	9.026
4	Bandung	10.201	10.307	10.588	11.018	11.392
5	Garut	7.876	7.961	8.227	8.685	9.168
6	Tasikmalaya	7.852	7.829	8.177	8.562	8.965
7	Ciamis	9.288	9.259	9.428	9.750	10.085
8	Kuningan	9.459	9.409	9.620	10.011	10.418
9	Cirebon	10.342	10.368	10.791	11.128	11.529
10	Majalengka	9.521	9.591	9.950	10.340	10.842
11	Sumedang	10.217	10.262	10.776	11.136	11.589
12	Indramayu	8.959	9.810	10.166	10.580	11.010
13	Subang	10.790	10.854	11.294	11.537	11.894
14	Purwakarta	11.614	11.669	12.193	12.619	13.099
15	Karawang	11.315	11.522	11.927	12.392	12.942
16	Bekasi	11.241	11.341	11.757	12.123	12.500
17	**Bandung Barat**	8.455	8.546	9.044	9.392	9.583
18	Pangandaran	9.084	9.065	9.389	9.406	9.654
19	Kota Bogor	11.564	11.716	12.058	12.656	13.154
20	Kota Sukabumi	10.999	10.942	11.229	11.799	12.252
21	Kota Bandung	16.887	16.996	17.639	18.236	18.795
22	Kota Cirebon	11.800	11.810	12.087	12.506	12.869
23	Kota Bekasi	15.776	15.903	16.239	16.479	16.775
24	Kota Depok	15.281	15.420	15.926	16.279	16.640
25	Kota Cimahi	12.025	12.019	12.500	12.883	13.278
26	Kota Tasikmalaya	10.263	10.213	10.578	11.063	11.431
27	Kota Banjar	10.535	10.476	10.967	11.356	11.811
	Provinsi Jawa Barat	**10.845**	**10.934**	**11.277**	**11.695**	**12.157**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

D. Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut dengan Inovasi Daerah, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melaksanakan penilaian inovasi daerah dengan menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) serta memberikan penghargaan Innovative Government Award (IGA) kepada pemerintah daerah yang terinovatif. Adapun capaian indek inovasi daerah Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2024 sebesar 42,02 dengan katagori inovatif.

Gambar 2.24 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 – 2024

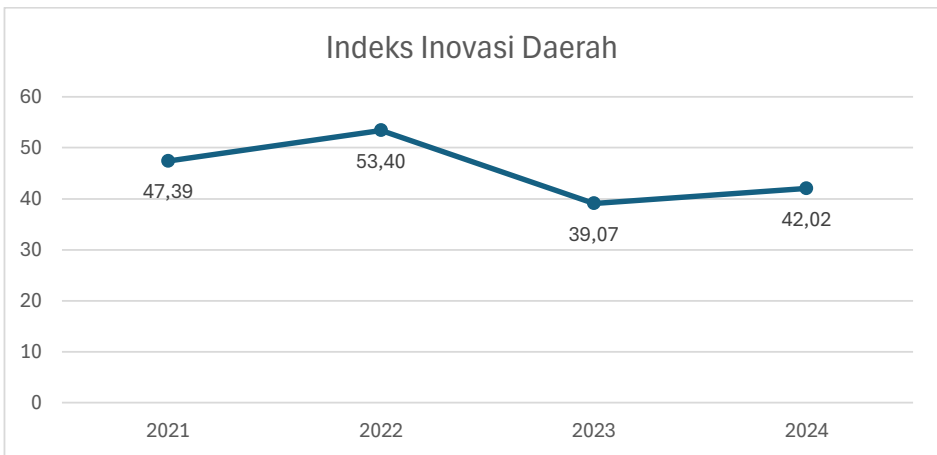

Sumber: Litbang Bappelitbangda, 2024, diolah

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.900-Bappelitbangda/2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Barat terdapat 185 inovasi. Sampai dengan Januari 2025, terdapat 102 inovasi unggulan yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 11 Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, 67 Inovasi Pelayanan Publik, dan 24 Inovasi Daerah Lainnya.

2.1.5.3 Penerapan PDRB Hijau/Ekonomi Hijau

Dalam kontek pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis lingkungan hidup atau yang dikenal dengan konsep green economi, merupakan suatu konjsep yang mencerminkan kepedulian dan komitmen daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan yang indikator kinerjanya tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto Lingkungan Hidup (PDRB Hijau). PDRB Hijau memperhitungkan nilai deplesi dan degradasi, yang merupakan penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Deplesi sumber daya alam adalah berkurangnya sumber daya alam yang tersedia, sedangkan degradasi adalah menurunnya kemampuan lingkungan untuk menyediakan barang dan jasa.

Tujuan PDRB Hijau adalah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang menjamin generasi saat ini dan generasi masa depan. Pihak yang memanfaatkan sumber daya alam harus membayar penyusutan tersebut kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Tabel berikut memperlihatkan estimasi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Hijau dimana Produk Domestik Regional Bruto sebelumnya telah dikurangi dengan besaran nilai Deplesi dan Degradasi Sumberdaya Alam dari beberapa sektor lapangan usaha. Berikut ini adalah tabel mengenai besaran estimasi Produk Domestik Regional Bruto Hijau atas dasar harga berlaku menurut Lapangan usaha di Kab. Bandung Barat.

Tabel 2.79. PDRB Hijau Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2022

LAPANGAN USAHA		TAHUN 2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.173,59	6.032,92	6.032,92
B	Pertambangan dan Penggalian	476,31	387,75	368,51
C	Industri Pengolahan	18.738,19	19.941,30	18.564,22
D	Pengadaan Listrik dan Gas	375,83	286,56	286,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,68	17,04	17,04
F	Konstruksi	3.421,28	3.487,43	3.488,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.997,68	6.097,42	6.097,42
H	Transportasi dan Pergudangan	2.436,30	2.426,60	2.427,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.401,86	2.367,89	2.367,89
J	Informasi dan Komunikasi	999,36	382,76	382,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	418,93	415,37	415,37
L	Real Estat	855,11	852,46	852,46
M,N	Jasa Perusahaan	192,79	202,44	202,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.269,76	1.265,09	1.265,09
P	Jasa Pendidikan	1.942,60	1.809,01	1.810,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	258,02	249,46	249,46
R,S,T,U	Jasa Lainnya	501,60	500,24	490,40
PDRB		**46.478,90**	**46.721,72**	**45.318,56**

Sumber : Kajian PDRB Hijau Kab. Bandung Barat, Litbang Bappelitbangda

Tabel berikut memperlihatkan estimasi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Hijau dimana Produk Domestik Regional Bruto sebelumnya telah dikurangi dengan besaran nilai Deplesi dan Degradasi Sumberdaya Alam dari beberapa sektor lapangan usaha. Berikut ini adalah tabel mengenai besaran estimasi Produk Domestik Regional Bruto Hijau atas dasar harga konstan menurut Lapangan usaha di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2022.

Tabel 2.80. PDRB Hijau Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2022

LAPANGAN USAHA		TAHUN 2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.711,11	3.658,35	3.658,35
B	Pertambangan dan Penggalian	322,49	223,59	216,97
C	Industri Pengolahan	12.517,13	12.977,40	12.427,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	229,82	141,85	141,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,68	10,46	10,46
F	Konstruksi	2.214,82	2.275,63	2.276,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.024,97	4.167,02	4.167,02
H	Transportasi dan Pergudangan	1.544,01	1.552,15	1.553,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.568,89	1.558,21	1.558,21
J	Informasi dan Komunikasi	1.015,82	390,44	390,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,15	263,08	263,08
L	Real Estat	616,03	617,52	617,52
M,N	Jasa Perusahaan	135,50	142,07	142,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	706,20	720,45	720,45
P	Jasa Pendidikan	1.241,42	1.186,30	1.187,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	172,47	165,72	165,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya	343,91	343,43	334,12
PDRB		**30.640,41**	**30.393,65**	**29.830,63**

Sumber : Kajian PDRB Hijau Kab. Bandung Barat, Litbang Bappelitbangda

Akibat COVID-19, pada tahun 2020 PDRB HB mengalami Pertumbuhan negatif (negative growth) yang cukup tinggi yaitu sebesar (1,49%) atau mengalami perlambatan sebesar (9,19%) dibandingkan dengan tahun 2019. Namun demikian, secara rata-rata per tahun menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 5,72%. Laju pertumbuhan ekonomi riil (PDRB HK) rata-rata per tahun sebesar 3,36 %, dengan 5 sektor pengerak utama, yakni:

1. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan Laju sebesar 13,85%;
2. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 12,30%;
3. Sektor Konstruksi 7,35%;
4. Sektor Transportasi dan Pergudangan 5,09%;
5. Sektor Penyedia Akomodasi dan Makanan Minuman sebesar 5,08%.

Mengingat Lebih dari 80% pembentukan PDRB disumbang dari 3 sektor/Lapangan usaha, yaitu, Industri PengoLahan dengan share sebesar 48,63%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,44%; dan Pedagang Besar dan Eceran sebesar 16,60%, maka penurunan sedikit saja kinerja ketiga sektor ini akan mempengaruhi kinerja PDRB secara keseluruhan. Oleh sebab itu sebaiknya segera dicari solusi agar peran 14 sektor Lainnya terhadap pembentukan PDRB KBB menjadi Lebih baik secara proporsional.

2.1.5.4 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2019-2024 pengukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur diukur mengunakan indikator Indeks kesulitan Geografis, yaitu tingkat kesulitan geografis suatu wilayah/desa, berdasarkan variabel-variabel ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar, kondisi infrastruktur ekonomi dan infrasruktur transportasi dan komunikasi. Mulai tahun 2025-2029 keberhasilan pembangunan infrastruktur diukur dengan indikator indeks kualitas infrastruktur yaitu metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan kinerja infrastruktur, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan lainnya. Adapun capaian Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.81. Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Kecamatan	Ketersedian Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/ Transportasi	IKG	Ranking IKG
Parongpong	18,45	36,52	14,21	19,36	1
Lembang	21,75	34,90	16,11	20,18	2
Padalarang	19,52	36,51	13,69	21,34	3
Cihampelas	26,51	45,57	17,87	23,07	4
Sindangkerta	15,21	53,74	21,42	24,00	5
Cipatat	25,44	43,84	13,82	24,36	6
Batujajar	27,52	43,38	16,27	25,84	7
Ngamprah	23,98	45,46	12,02	25,91	8
Cililin	24,48	50,41	19,69	26,47	9
Cisarua	24,87	45,07	15,88	26,51	10
Rongga	22,59	50,93	19,58	28,02	11
Gununghalu	24,22	55,36	19,05	28,21	12
Cikalongwetan	30,37	49,33	18,17	28,30	13
Cipongkor	28,38	55,01	18,38	30,39	14
Cipeundeuy	28,95	52,25	20,70	30,62	15
Saguling	30,15	50,85	14,22	32,30	16
KAB BANDUNG BARAT	**24,52**	**46,82**	**16,94**	**25,93**	

Sumber: *Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD*

Sedangkan capaian Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.82. Capaian IKG Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesulitan Geografis	27,59	26,78	26,39	25,93	25,55

Sumber: Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Untuk meningkatkan daya saing daerah pada bidang infrastruktur, dibutuhkan kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien melalui pemaduan jaringan pelayanan dan juga prasarana, diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi. Sarana infrastruktur aksesibilitas/transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi berperan penting sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Data kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan SK Bupati Bandung Barat Bandung Barat No: 188.45/Kep.302- DPUPR/2023 dengan total panjang jalan Kabupaten sepanjang 648,06 Km sebanyak 152 ruas jalan. Adapun kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan proporsi panjang jalan kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 65,19 persen menjadi 70,91 persen di tahun 2022 dan kondisi jalan baik dengan mengacu pada SK jalan yang baru dengan penambahan sebanyak 44 ruas jalan, kondisi jalan baik baru mencapai 46,23 persen.

Tabel 2.83. Data Kondisi Jalan di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Kondisi Jalan	PANJANG JALAN (Km)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	318,62	332,38	372,68	299,59	374,33
Sedang	88,70	57,34	61,74	73,08	117,54
Rusak Ringan	21,75	49,65	53,45	91,89	47,52
Rusak Berat	116,08	86,21	37,70	183,49	108,67
Total Panjang Jalan	525,57	525,57	525,57	648,06	648,06

Sumber : Dinas PUPR, Kab. Bandung Barat, 2025

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberikan akses tiap kendaraan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan data, panjang jalan di Kabupaten Bandung Barat sepanjang 525,57 km dengan jumlah rata-rata harian angkutan darat yang melintas berdasarkan data dari Dinas Perhubungan yaitu sebanyak 62.683 kendaraan/hari sehingga rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 119,27 artinya per 1 km jalan melayani/dilalui oleh 119 kendaraan.

Jumlah sarana angkutan umum dan angkutan barang serta layanan kendaraan umum berpenumpang di Kab. Bandung Barat sebagai sarana aksebilitas penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84. Data Jumlah Angkutan Barang di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	Jumlah Unit Angkutan Barang				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cililin	416	0	0	0	0
2	Cihampelas	444	444	4	4	6
3	Sindangkerta	46	0	0	0	0
4	Gununghalu	120	120	0	0	0
5	Rongga	70	70	32	32	32
6	Cipongkor	209	209	0	0	0
7	Batujajar	849	447	446	446	445
8	Lembang	3.184	3.184	3	3	4
9	Parongpong	1.213	1.213	112	112	116
10	Cisarua	757	757	973	975	960
11	Ngamprah	1.425	1.425	435	437	430
12	Padalarang	3.557	3.557	48	47	51
13	Cipatat	771	771	48	48	45
14	Cipeundeuy	579	577	42	41	40
15	Saguling	94	94	16	15	18
16	Cikalongwetan	605	605	92	90	95
JUMLAH		**14.337**	**13.473**	**2.251**	**2.250**	**2.242**

Sumber : Dishub, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.85. Aksebilitas Kendaraan Umum di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Angkutan Umum	614	965	600	459	480
Jumlah Penumpang yang melalui Terminal	746.618	777.966	577.299	463.774	404.830

Sumber : Dishub, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Aksebilitas pergerakan manusia dan barang sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh ketersediaan angkutan umum dan angkatan barang, dengan kondisi layanan angkutan barang tahun 2020 sebanyak 14.337 unit terus mengalami penurunan s.d tahun 2024 menjadi 2.242 unit. Begitu pun dengan pergerakan manusia yang dilayani oleh angkutan umum pada tahun 2020 sebanyak 746.618 penumpang semakin turun di tahun 2024 menjadi 404.830 penumpang. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan jumlah armada layanan angkutan umum berkurang menjadi 480 unit di tahun 2024 dan juga hal ini pun terdampak adanya angkutan umum berbasis online.

Indikator lain dari aspek daya saing daerah adalah ketersediaan energi terutama penggunaan listrik sebagai sumber penerangan. Sebanyak 43 desa (26,06%) sebagian besar jalannya telah diterangi listrik. Ada 95 desa (57,58%) yang sebagian kecil jalannya telah diberi penerangan dan sebanyak 27 desa (16,36%) belum memiliki penerangan jalan. Diantara 138 desa yang memiliki penerangan jalan sebanyak 96 Desa (69,57%) menggunakan listrik yang diusahakan pemerintah dan sisanya sebanyak 42 desa (30,43%) listriknya non pemerintah. Aspek daya saing daerah fokus terhadap kondisi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi diantaranya ketersediaan pasar, restoran, rumah/warung makan, hotel/penginapan, Bank/BPR di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Basis Data Pembangunan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86. Data Infrastruktur Fasilitas Kegiatan Ekonomi di Kab. Bandung Barat Tahun 2020-2024

Jenis Infrastruktur	2020	2021	2022	2023	2024
Pasar Tradisional/Modern	388	306	309	309	303
Restoran/Warung Makan, Cafe	1.738	1.436	1.606	1.748	1.881
Hotel/Penginapan	159	117	162	167	297
Bank/BPR	98	90	95	95	95
Penerangan Jalan	4.627	4.972	5.044	5.164	5.580

Sumber : Basis Data Pembangunan, BPS/Diskominfotik, 2024, yang dikelola dalam SIPD

2.1.5.5 Daya Saing Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti indeks rasa aman, angka kriminalitas, jumlah demonstrasi dan pelayanan perijinan. Stabilitas keamanan menjadi salah satu aspek penting dalam berinvestasi. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing iklim investasi yang lebih tinggi.

Hal ini karena faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang aspek daya saing dengan mengabaikan aspek keamanan. Investor tidak akan mungkin menanamkan investasinya apabila diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman dari lingkungan maupun ancaman terjadinya bencana. Indeks Rasa Aman di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87. Indeks Rasa Aman Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Ketersediaan Makanan	Rasa Aman dari bencana	Keamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman	Rangking
1	Rongga	94,17	46,67	71,67	70,83	13
2	Gununghalu	87,29	68,33	90,14	81,92	4
3	Sindangkerta	94,38	52,50	50,49	65,79	16
4	Cililin	87,50	73,33	69,86	76,90	6
5	Cihampelas	94,38	62,50	52,50	69,79	15
6	Cipongkor	88,98	70,34	58,83	72,72	10
7	Batujajar	98,13	65,00	49,51	70,88	12
8	Saguling	98,44	61,25	68,44	76,04	7
9	Cipatat	99,29	79,29	33,93	70,83	14
10	Padalarang	83,75	62,14	74,82	73,57	9
11	Ngamprah	98,16	80,90	84,68	87,91	2
12	Parongpong	97,92	91,67	78,68	89,42	1
13	Lembang	99,82	70,71	67,20	79,25	5
14	Cisarua	93,13	80,00	84,51	85,88	3
15	Cikalongwetan	86,04	72,53	59,51	72,70	11
16	Cipeundeuy	97,71	72,50	51,04	73,75	8
Bandung Barat		**93,74**	**70,36**	**65,88**	**76,66**	

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2024, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Basis Data Pembangunan 2 (dua) tahun terakhir (2022-2023), jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan angka yang cenderung turun. Pada tahun 2022 jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 446 kasus, sementara itu pada tahun 2023 berkurang menjadi 320 kasus dengan jenis kejahatan yang paling banyak adalah pencurian, perampokan dan penganiayaan. Sedangkan jumlah kejadian demonstrasi/unjuk rasa di Kabupaten Bandung Barat, disebabkan karena adanya beberapa isu-isu seperti isu-isu pengupahan, pelaksanaan outsourcing, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan BBM, dan sebagainya dengan angka kejadian pada tahun 2022 sebanyak 6 kejadian dan menurun di tahun 2023 menjadi 5 kejadian demonstrasi/unjuk rasa.

Perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian sistem dan prosedur perijinan yang meliputi persyaratan, waktu dan biaya serta transparansi dan akuntabilitas proses perijinan merupakan komponen penting dalam pelayanan perijinan. Pelayanan perijinan yang berbasis digital terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon dan meningkatkan efisiensi.

Tabel 2.88. Jumlah Izin yang Terbit Sesuai SOP di Kab. Bandung Barat Tahun 2024

No	Izin	SOP (Hari)	Izin Tidak Sesuai SOP	Izin Terbit Sesuai SOP	Jumlah Izin	% SOP
1	Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg)	28	0	382	382	100
2	Sertifikat Laik Fungsi (Slf)	28	0	24	24	100
3	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non-Berusaha	30	91	56	147	38,1
4	Izin Pendirian Pendidikan Dasar (Sd & Smp)	12	9	4	13	30,77
5	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal	44	1	15	16	93,75
6	Izin Pendirian Pendidikan Jalur Non Formal	24	4	46	50	92
7	Izin Praktik Dokter (Mandiri & Faskes)	11	46	415	461	90,02
8	Izin Praktik Perawat	11	65	467	532	87,78
9	Izin Praktik Bidan (Mandiri & Faskes)	11	73	345	418	82,54
10	Izin Praktik Apoteker	11	13	215	228	94,3
11	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	11	17	166	183	90,71
12	Izin Praktik Fisioterapis	11	2	8	10	80
13	Izin Praktik Terapis Wicara	11	0	5	5	100
14	Izin Kerja Radiografer	11	7	7	14	50
15	Izin Kerja Refraksionis Optisien	11	3	7	10	70
16	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	11	0	2	2	100
17	Izin Praktik Rekam Medis	11	14	62	76	81,58
18	Izin Praktik Analis/ Ahli Teknologi Laboratorium Medik	11	12	83	95	87,37
19	Izin Praktik Gizi	11	7	22	29	75,86
20	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (Mandiri & Faskes)	11	3	17	20	85
21	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	11	3	12	15	80
22	Izin Praktik Penata Anestesi	11	0	3	3	100
23	Izin Praktik Terapi Okupasi	11	0	1	1	100
24	Izin Praktik Elektromedis	11	0	4	4	100
25	Surat Keterangan Tidak Berpraktik Di Kbb	11	0	147	147	100
26	Izin Penyelenggaraan Reklame (Permanen & Insidentil)	14	184	25	209	11,96
27	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	7	12	1	13	7,69
28	Izin Pengumpulan Sumbangan Dan Penyaluran Bantuan Sosial	7	3	0	3	0
29	Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	8	155	33	188	17,55
30	Izin Praktik Dokter Hewan	10	2	4	6	66,67
31	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan	11	0	0	0	0
32	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pelayanan Inseminator Kesehatan Hewan	11	0	0	0	0
33	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	11	0	0	0	0
34	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi	11	0	0	0	0
35	Pencabutan Surat Izin Apotek	11	0	0	0	0
TOTAL			**726**	**2578**	**3304**	**78,03**

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Indikator Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah.

Pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, dengan adanya aplikasi perijinan online, lamanya pengurusan perizinan bisa diperpendek, dengan ketentuan semua persyaratan perizinan terpenuhi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor.

Capaian investasi di Kab. Bandung Barat terus mengalami kenaikan dari jumlah investasi PMDN pada tahun 2020 sebesar Rp.335 Milyar di tahun 2022 menjadi Rp.704 Milyar dan tahun 2024 naik signifikan menjadi Rp.3.898 Milyar, sedangkan persentase waktu proses pelayanan perijinan sesuai SOP semakin membaik awalnya 2020 sebesar 68% menjadi 72,5% di tahun 2021 dan naik kembali di tahun 2022 menjadi 82,79% serta tahun 2024 turun kembali menjadi 78,03%. Hal ini dengan adanya dukungan aplikasi perijinan online. Berikut capaian indikator urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2024:

Tabel 2.89. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Nilai investasi PMDN	Milyar	335	192,6	704	2.730	3.898
Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	-	268	622	1.392	3.394
Jumlah penerbitan perijinan	jumlah	1.878	2.344	3.248	4.027	3.306
Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	68	72,5	82,79	90,49	78,03
Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal	%	-	-	0	0	100%
Persentase Promosi Penanaman Modal	%	-	-	100	100	100%
Presentase data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan	%	-	-	100	100	100%

Sumber: DPMPTSP, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.6 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat, baik pada urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar), urusan pilihan dan urusan fungsi penunjang.

2.1.6.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Aspek pelayanan umum focus urusan wajib pelayanan dasar yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, trantibunlinmas dan sosial:

1. Pendidikan

Aspek penyelenggaraan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota, diantaranya: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Analisis kinerja atas layanan urusan pendidikan dilakukan terhadap indikator: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah. Perkembangan capaian indikator aspek pelayanan umum bidang pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.90. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR PENDIDIKAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Jumlah SD/MI Thd penduduk usia SD/MI	1 : 204,94	1 : 204,14	1 : 217,52	1 : 286,98	1 : 296,48
Rasio Jml SMP/MTs Thd Penduduk Usia SMP/MTs	1 : 274,75	1 : 269	1 : 291,43	1 : 441,71	1 : 456,28
Rasio Guru SD/MI Thd Murid	1 : 19,61	1 : 18,86	1 : 22,13	1:25,68	1:22,1
Rasio Guru SMP/MTs Thd Penduduk Usia SMP/MTs		1 : 13,60	1 : 17,24	1:21,17	1 : 19,16
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8.19	8.20	8.22	8.23	8,24
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	102,77	102,99	104,84	101.78	103,79
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	100,07	91,38	93,97	96.32	97,79
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92,93	97,69	97.91	97.87	91,35
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	80,44	76.56	75.87	88.60	81,2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	93,39	99,66	99,09	99.32	99,41
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS	91,1	94,29	94,75	96.85	96,91
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,14	0,0004	0,0012	0,1200	0,1140
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTS	0,16	0,0035	0,057	0,085	0,069
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,64	99,00	99,50	99,51	99,68
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS	99,50	98,95	99,43	99,26	99,54
Angka Melanjutkan (AM) ke SMP/Mts	96,16	95,20	89,26	91,74	92,94
Angka Melanjutkan (AM) ke SMA/MA	78,71	83,77	116,966	89,84	91,34

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat 2025, yang dikelola dalam SIPD

Perbandingan jumlah murid dan guru sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bandung Barat berada pada kisaran 21-25 murid/guru. Ruang Kelas sekolah sebagai infrastruktur penunjang pelayanan pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat memperlihatkan peningkatan baik dilihat dari jumlah ruang kelas maupun kondisi ruang kelas dengan kondisi baik. Ruang Kelas SD dengan kondisi baik di tahun 2022 sebanyak 3.341 ruang kelas dari total 4.891 ruang kelas, dan ruang kelas SMP dengan kondisi baik di tahun 2022 sebanyak 1.278 ruang kelas dari toal 1.342 ruang kelas SMP, untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91. Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Tahun	Kondisi Ruang Kelas				Jumlah Ruang Kelas SDN
	Baik	Ringan	Sedang	Berat	
2020	1.634	2.715	-	555	4.904
2021	1.470	3.733	0	0	5.203
2022	1.694	1.889	1.217	369	5.169
2023	1.629	1.847	1.290	522	5.288
2024	1.656	1.793	1.397	541	5.387

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Bandung Barat, 2024, yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.92. Kondisi Ruang Kelas SMP Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Kondisi Ruang Kelas				Jumlah Ruang Kelas SMPN
	Baik	Ringan	Sedang	Berat	
2020	874	680	-	72	1.626
2021	800	1.320	-	0	2.120
2022	652	713	541	89	1.995
2023	723	647	708	92	2.170
2024	803	584	92	54	2.187

Sumber: Profil Pendidikan Kab. Bandung Barat 2024, yang dikelola dalam SIPD

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan yang dimiliki seseorang menggambarkan kualitas manusianya. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indicator Umur Harapan Hidup, Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan serta rasio ketersedian sarana dan prasaran kesehatan. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan.

Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat tergantung terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status orang tua si bayi.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB, hal ini relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.

Tabel 2.93. Data Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab. Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Angka Kematian Bayi	129/3084= 14,18/1000 KH	106/26454 = 4,0/1000 KH	51/31160= 1,6/1000 KH	6/29620= 0,2/1000 KH	182 / 29351 = 62 / 1000 KH
2	Angka Kematian Ibu	38/32383 = 117/1000 KH	47/29895= 157/1000 KH	21/32718= 64/10000 KH	18/29620= 60/10000 KH	33 / 29336 = 11 / 1000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Bandung Barat semakin menurun dari tahun 2020 sebesar 14,18 / 1.000 KH, menjadi 62/1.000 KH di tahun 2024, hal ini menunjukan semakin baiknya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui pelaksanaan fasilitasi layanan dan advokasi kesehatan ibu hamil, pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatanan dan layanan dan penanganan komplikasi neonatal dini dan layananan neonatal Esensial.

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan underweight adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U), dengan kondisi status gizi balita di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.94. Kondisi Status Gizi Balita Berdasarkan Indikator BB/U Tahun 2020 – 2024

No	Status Gizi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Gizi Sangat Kurang	1,34%	0,99%	0,89%	0,73%	0,80%
2.	Gizi Kurang	6,27%	5,54%	6,29%	5,74%	6,06%
3.	Gizi Baik	87,10%	88,44	88,52%	89,82%	89,70%
4.	Gizi Lebih	5,28%	5,03%	4,30%	3,70%	3,44%

Sumber Data : Hasil BPB Dinas Kesehatan, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Kondisi status gizi balita sangat kurang (Gizi Buruk) di Kabupaten Bandung Barat cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 1,35 persen dan pada tahun 2024 menjadi 0,80 persen atau <1%. Kondisi gizi balita erat kaitannya dengan stunting yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan hal yang sangat penting, terutama ketersediaan sarana kesehatan di setiap desa seperti adanya Puskesmas, Posyandu dan Klinik dan fasilitas layanan kesehatan lainnya, yang dapat membantu akses pelayanan masyarakat dengan jarak tempuh yang relatif lebih dekat. Gambaran kondisi layanan bidang kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari jumlah fasillitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersedia. Fasilitas kesehatan tersebut mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik dan Posyandu. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar pada tahun 2020 sebesar 75 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 79 persen, pada tahun 2022 menjadi 78,89 persen dn tahun 2024 sebesar 88,86 persen. Jumlah fasillitas Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Fasilitas Kesehatan dan Tenaga	Jumlah / tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	8	9	9	9	9
Puskesmas	32	32	32	32	32
Pustu	38	38	45	45	49
Poliklinik	67	75	71	71	95
Posyandu	1.780	1.780	2.330	2.340	2.343
Dokter	146	286	266	192	193
Tenaga Medis	1.325	2.194	2.228	1.457	1.710

Sumber: Dinas Kesehatan KBB, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Secara keseluruhan capaian indikator urusan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 - 2024, dengan tingkat capaian berfluktuasi adanya peningkatan dan penurunan baik berdasarkan cakupan layanan kesehatan maupun berdasarkan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.96. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi	4,18/ 1.000 KH	4,0/ 1.000 KH	1,6/ 1.000 KH	0,2/ 1.000 KH	62/ 1000KH
Angka Kematian Ibu	117/ 1.000 KH	157/ 1.000 KH	64/ 1.000 KH	60/ 1.000 KH	11/ 1000 KH
Status Gizi Sangat Kurang	1,34	0,99	0,89	0,73	0,80
Cakupan imunisasi	86,40	82,80	84	83,32	82,4
Cakupan pelayanan kesehatan Ibu	95	99	99	99	99
Cakupan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan	56	65	67	66,6	74
Cakupan melahirkan di fasilitas kesehatan	87,6%	88,48	89,59	89,61	90,01
Cakupan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan	91,33	90,08	99,55	99,55	99,60
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	725.845	613.017	770.192	787.716	879.914
Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar	97	99,56	88,86	90	90
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Rasio posyandu per satuan balita	12,07	11,7	11,77	11,77	11,77
Cakupan Puskesmas	2	2	2	2	2
Cakupan Puskesmas Pembantu	23,03	23,03	23,21	23,21	23,21
Rasio dokter per satuan penduduk	0,08	0,16	0,14	0,14	0,14
Rasio tenaga medis	0,74	1,21	1,2	1,22	1,24
Presentase Desa Siaga Aktif	44	51	56	55	57,50

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan KBB, 2025 diolah, yang dikelola dalam SIPD

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan SK Bupati Bandung Barat No: 188.45/Kep.302-DPUPR/2023 dengan total panjang jalan Kabupaten sepanjang 648,06 Km sebanyak 152 ruas jalan, terdapat peningkatan panjang jalan Kabupaten sepanjang 122,49 Km dan peningkatan 44 ruas jalan. Adapun kondisi jalan baik di Kabupaten Bandung Barat selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dengan proporsi panjang jalan kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 65,19 persen menjadi 70,91 persen di tahun 2022 dan kondisi jalan baik dengan mengacu pada SK jalan yang baru dengan penambahan sebanak 44 ruas jalan, kondisi jalan baik baru mencapai 46,23 persen.

Tabel 2.97. Panjang dan Ruas Jalan di Kabupaten Bandung Barat

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Jalan (Km)
1	Jl. Selacau – Cililin	Cililin	8.100
2	Jl. Cililin – Sindangkerta	Cililin, Sd.Kerta	10.500
3	Jl. Sindangkerta – Celak	Sindangkerta	9.800
4	Jl. Celak - Gununghalu	Gununghalu	8.700
5	Jl. Gununghalu - Bunijaya	Gununghalu	5.200
6	Jl. Bunijaya-Cilangari	Gununghalu	9.800
7	Jl. Cilangari-Cisokan	Gununghalu	5.100
8	Jl. Rancapanggung-Cijenuk	Cililin	9.400
9	Jl. Cijenuk-Sarinagen	Cipongkor	3.800
10	Jl. Sarinagen-Baranangsiang	Cipongkor	6.300
11	Jl. Baranangsiang-Saguling	Cipongkor	1.000
12	Jl. Cangkorah-Bts.Leuwigajah	Batujajar	1.050
13	Jl. Sesko AU - Lembang	Lembang	0.850
14	Jl. Kayu Ambon - Jl. Kiwi Lembang	Lembang	1.750
15	Jl. Rahayu - Lembang	Lembang	0.300
16	Jl. Pegadaian - Lembang	Lembang	0.250
17	Jl. Sukajadi - Lembang	Lembang	0.250
18	Jl. Murhadi - Lembang	Lembang	0.350
19	Jl. Citalaksana - Lembang	Lembang	0.150
20	Jl. Sendik BRI - Lembang	Lembang	0.250
21	Jl. Panorama Puskesmas - Lembang	Lembang	0.250
22	Jl. Sukajaya - Lembang	Lembang	0.170
23	Jl. Gunungsari - Lembang	Lembang	0.350
24	Jl. Bhayangkara - Lembang	Lembang	0.550
25	Jl. Mutiara Utama (Lembang)	Lembang	0.300
26	Jl. Bunijaya-Rongga (Ds. Bojong)	Rongga	1.100
27	Jl. Rongga - Cipari	Rongga	17.500
28	Jl. Purabaya - Rancabali	Padalarang	1.260
29	Jl. Purabaya - Jati (Batujajar)	Padalarang	13.100
30	Jl. Batujajar (Jati) - Saguling	Saguling	3.670
31	Jl. Purabaya - Gantungan	Padalarang	2.250
32	Jl. Cipeundeuy-Cipicung	Cipeundeuy	4.950
33	Jl. Ciawitali-Salakuning	Cikalongwetan	7.500
34	Jl. Sp.Tagog Apu-Salakuning	Padalarang	7.100
35	Jl. Salakuning-Ps.Calung (Ds.Cipada)	Cikalongwetan	7.400
36	Jl. Cisomang-Cipada	Cikalongwetan	6.500
37	Cisarua - Ps. Calung (Ds. Cipada)	Cisarua	7.500
38	Jl. Kb.Kalapa-Ps.Calung	Ngamprah	9.100
39	Jl. H.Gofur-Pakuhaji	Ngamprah	6.600
40	Jl. Cihanjuang-Parongpong	Parongpong	7.300
41	Jl. Cihanjuang-Batas Gegerkalong	Parongpong	2.750
42	Jl. Bts. Cimahi Pasantren-Sariwangi	Parongpong	1.400
43	Jl. Cikole-Cikarumbi	Lembang	2.700
44	Jl. Sersan Bajuri	Parongpong	5.700
45	Jl. Maribaya-Patrol	Lembang	7.600

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Jalan (Km)
46	Jl. Gununghalu-Datarpuspa	Gununghalu	13.400
47	Jl. Rancapanggung -Puncakmulya/Bts.Kutawaringin	Cililin	4.500
48	Jl. Cipatik-Nyalindung	Cihampelas	8.900
49	Jl. Tj. Wangi - Kidangpananjung - Muka Payung	Cihampelas	9.700
50	Jl. Cihampelas-Tanjung Jaya	Cihampelas	9.200
51	Jl. Cipatik - Leuwi Sapi	Cihampelas	2.500
52	Jl. Batujajar-Pangauban-Girimukti	Batujajar	7.300
53	Jl. Batujajar-SMP Batujajar	Batujajar	1.300
54	Jl. Cangkorah-Giri Asih	Batujajar	3.000
55	Jl. Pasirucing - Margaluyu	Cipeundeuy	7.900
56	Jl. Kertamukti - Sarimukti	Cipatat	6.700
57	Jl. Citatah-Nyalindung	Cipatat	9.100
58	Jl. Nanggeleng - Sirnaraja	Cipeundeuy	13.500
59	Jl. Cipeundeuy-Ciroyom	Cipeundeuy	5.800
60	Jl. Sukahaji - Margalaksana	Cipeundeuy	6.000
61	Jl. Mekarsari-Cilame	Ngamprah	2.050
62	Jl. Cimanggu (Cimeta) - Pasirlangu	Ngamprah	5.150
63	Jl. Bunisari-Cikandang	Ngamprah	2.230
64	Jl. Jambudipa - Citeureup	Cisarua	5.350
65	Jl. Cihideung-Ciwaruga	Parongpong	7.900
66	Jl. Lembang-Genteng	Lembang	1.500
67	Jl. Maribaya-Puncak Eurad	Lembang	6.100
68	Jl. Pasirbuluh-TPA	Lembang	0.300
69	Jl. Cikaramat-Lembang	Lembang	3.400
70	Jl. Kehutanan - Lembang	Lembang	0.300
71	Jl. SMP - Lembang	Lembang	0.300
72	Jl. Barlak - Lembang	Lembang	0.750
73	Jl. Puncrut (Bts.Kota Bandung)-Pagerwangi-Cijeruk	Lembang	4.530
74	Jl. Langensari-Medu-Dago	Lembang	5.200
75	Jl. Langensari-Simpangwaas-KPR ITB	Lembang	5.400
76	Jl. Cilumber - Cikole	Lembang	2.800
77	Jl. Ciririp-Bangsaya-Buninagara (Bts. Ciwidey)	Cililin	9.700
78	Jl. Cikadu - Rancasenggang	Sindangkerta	3.850
79	Jl. Rancasenggang - Wangunsari	Sindangkerta	7.100
80	Jl. Sindangkerta - Weninggalih	Sindangkerta	14.000
81	Jl. Cijenuk-Pasirpogor/Puncaksari	Cipongkor	5.400
82	Jl. Celak - Sodong	Gununghalu	6.100
83	Jl. Cisarongge - Sodong	Cipongkor	4.900
84	Jl. Gununghalu - Tamanjaya	Gununghalu	7.900
85	Jl. Rongga-Cicadas	Rongga	7.400
86	Jl. Rongga-Bojongsalam (Bts. Cianjur)	Rongga	9.000
87	Jl. Psr.Badak-Cimarel (Bts. Cianjur)	Rongga	3.500
88	Jl. Selacau - Lagadar	Batujajar	2.400
89	Jl. Cililin - Sukatani	Cililin	1.600
90	Jl. Sumur Bandung (Cililin)	Cililin	0.400
91	Jl. Terminal Cililin	Cililin	0.220
92	Jl. Citunjung-Haurngambang	Batujajar	1.850

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Jalan (Km)
93	Jl. Sindangkerta (Sindangkerta)	Sindangkerta	0.900
94	Jl. Citapen-Ciraden	Cihampelas	3.000
95	Jl. Cihampelas-Sayuran	Cihampelas	2.100
96	Jl. Cipatik-Citapen	Cihampelas	1.850
97	Jl. Rancasenggang - Babakan (Rawabogo)	Sindangkerta	5.000
98	Jl. Rajamandala-Cipanas	Cipatat	5.400
99	Jl. Cipeundeuy - Cimerang-Cikandang	Padalarang	4.850
100	Jl. Kadudamping-Padayungan-Cikadongdong-Ciharas	Cikalongwetan	9.750
101	Jl. Cipeundeuy-Cisauheun-Sirnagalih	Cipeundeuy	4.550
102	Jl. Kanangasari-Mandalamukti	Cikalongwetan	4.100
103	Jl. Ciharashas-Cisauheun	Cipeundeuy	1.250
104	Jl. Boscha Wangunsari	Lembang	5.800
105	Jl. Mamaadiwarta - Lembang	Lembang	0.400
106	Jl. Sukamantri - Lembang	Lembang	0.270
107	Jl. Warungawi-Pasir haur (Bojongkoneng)	Ngamprah	6.300
108	Jl. Samsat - Sumur Bor - Cijamil	Ngamprah	4.940
109	Jl. Cisauheun-Cisalak		1.950
110	Jl. Sirnagalih (Kp. Baru) - Ciroyom		2.250
111	Jl. H. Gofur - Bts Cimahi (Somawinata)		2.200
112	Jl. H. Gofur - Bts Cimahi (Dirawinata)		1.300
113	Jl. Sadangmekar - Cipada		3.300
114	Jl. Margaluyu - Sarimukti		4.044
115	Jl. Rancapanggung - Cikadu		2.700
116	Jl. Rancapanggung - Ugrem		2.020
117	Jl. Taman Jaya - Cibenda		7.500
118	Jl. H. Gofur - Cibatu		1.100
119	Jl. Sukamaju - Cibatu		0.400
120	Jl. Datar Puspa Mekarwangi – Bts Kab. Bandung		5.400
121	Jl. Nanggerang - Karyamukti		7.840
122	Jl. Cikamirung-Parigi-Maroko		3.500
123	Jl. Padaasih – Bts Cimahi		1.300
124	Jl. Buniwangi – SMP2 - Langensari		0.500
125	Jl. Cikidang-Langensari		3.000
126	Jl. Cicadas – Curug Malela		2.200
127	Jl. Cikakak - Leuwinutug		1.400
128	Jl. Batujajar – taman Makam Pahlawan		0.700
129	Jl. Ciburuy – Cikamuning (Cikamuning-Langkob)		2.700
130	Jl. SPN - Kertawangi		1.400
131	Jl. Cimanggu - Pasirlangu		10.200
132	Jl. Ngamprah - Cijamil		3.000
133	Jl. Cidadap Manah – Kepuh – Sudimampir (Kepuh)		2.200
134	Jl. Baruajak - Boscha		0.750
135	Jl. Tipar		1.900
136	Jl. Gedong Lima		0.800
137	Jl. Taman Jaya – Karangsari - Sarinagen		5.900
138	Jl. Sodong – Girimukti - Cijenuk		6.950
139	Jl. Wangunjaya – Parakankadu (Bts Purwakarta)		0.800

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Jalan (Km)
140	Jl. Cijamil - Cibuntu		3.517
141	Jl. Jampudipa – Mekarwangi (Bts Cimahi)		2.000
142	Jl. Cililin - Budiharja		3.500
143	Jl. Sindangkerta - Pasirlame		1.737
144	Jl. Kubang Pintu		1.493
145	Jl. Cibedug - Sukamanah - Bojong		3.452
146	Jl. Malaka - Cijenuk		1.547
147	Jl. Cikalong- Rende - Ciharashas		7.500
148	Jl. Jatimekar - Sirnaraja		5.139
149	Jl. Tugu Nanas - Cipada		3.800
150	Jl. Cipeuleum - Ciminyak		0.331
151	Jl. Pasircalung - Gemblok		2.500
152	Jl. Kotabaru Parahyangan Segmen 1		5.000
	TOTAL PANJANG JALAN		**648.060**

Sumber: Dinas PUPR, 2024, yang dikelola dalam SIPD

Capaian Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020-2024 diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.98. Capaian Indikator Kinerja Urusan PUTR Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Panjang jalan kabupaten	525,57	525,57	525,57	648,06	648,06
Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	318,617	332,375	372,682	299,594	347,33
Presentase jalan kabupaten dlm kondisi baik	60,62	63,24	70,91	71,69	75,90
Rasio panjang jalan dengan jml penduduk	0,00029	0,00029	0,00028	0,00035	0,000339
Jumlah jaringan Irigasi	435	435	435	449	453
Potensi area sawah yang terairi	36.232	36.232	36.312	33.456	33.456
Presentase irigasi Kab. kondisi baik	69,82	69,26	69,48	65	69,26
Rasio jaringan irigasi	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Persentase tersedianya akses air minum yang memadai	65,5	66,9	65,5	68,5	83,42
Persentase cakupan pelayanan air limbah domestik	30	61,5	61,18	61,48	66,32
Presentase bangunan publik yang memadai	50	99,48	50	-	100
Persentase panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik	60,62%	63,24%	70,91%	80%	75,90%
Persentase sambungan rumah tangga yang terlayani akses air minum	N/A	N/A	82,92%	83,16%	83,42%
persentase KK yang terlayani sistem air limbah domestik	N/A	N/A	65,20%	65,91%	66.32%
Persentase capaian pengelolaan sumber daya air secara optimal	N/A	N/A	60%	60%	61,67%

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kenaikan panjang drainase yang terbangun	N/A	N/A	64,80%	65,23%	66,89%
Persentase perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	N/A	N/A	100%	100%	100%
Persentase pengembangan jasa konstruksi sesuai standar	N/A	N/A	98,06%	0	100%
Persentase penataan bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	N/A	N/A	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PUTR, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat tidak serta merta menambah kondisi panjang jalan, sehingga rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk semakin menurun. Sedangkan kondisi kemantapan jalan dengan kondisi baik terus diupayakan oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 sebesar 60,62 persen jalan dengan konsisi baik, sampai dengan tahun 2024 kondisi jalan baik meningkat kembali menjadi 75,90 persen.

Pada tahun 2023 seiring dengan bertambahnya ruas jalan yang menjadi kewenangan Kab. Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat No: 188.45/Kep.302-DPUPR/2023 dengan presentase kondisi dalam kondisi baik adalah sebesar 75,90 persen. Berdasarkan kondisinya, jaringan jalan terbagi menjadi 4 (empat) yakni kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Berikut data kondisi jalan di Kab. Bandung Barat s.d tahun 2024.

Tabel 2.99. Data Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020 – 2024

Tahun	Kondisi Jalan (Km)				Panjang Jalan (Km)
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2020	318,617	88,695	2,175	116,083	525,570
2021	332,375	57,340	49,645	86,210	525,570
2022	301,865	70,810	75,515	77,380	525,570
2023	299,59	73,082	91,893	183,491	648,060
2024	374,330	117,539	47,520	108,671	648,060

Sumber: Dinas PUPR, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2024 sebanyak 453 Daerah Irigasi, dengan kondisi infrastruktur jaringan irigasi dengan kondisi baik semakin meningkat s.d tahun 2024 sebesar 69,26 persen dengan cakupan potensi area sawah yang terairi adalah 33.456 ha.

Tabel 2.100. Data Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Jumlah Daerah Irigasi			Potensi Area Sawah Yang Terairi (Ha)
		Teknis	Semi Teknis	Sederhana	
1	Rongga	-	4	45	2555
2	Cipatat	2	-	33	2654
3	Batujajar	-	-	6	1081
4	Cikalongwetan	3	2	59	4106
5	Sindangkerta	-	-	59	5634
6	Cipongkor	2	-	37	3080
7	Gununghalu	2	-	50	4424
8	Cipeundeuy	7	2	39	3967
9	Cisarua	1	2	7	1021
10	Parongpong	1	-	4	374
11	Lembang	1	-	11	843
12	Cihampelas	-	-	11	325
13	Ngamprah	2	-	26	1676
14	Cililin	-	-	7	765
15	Padalarang	-	-	24	951
16	Saguling	-	-	-	-
Jumlah		**21**	**10**	**418**	**33.456**

Sumber: Dinas PUPR, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Bandung Barat dapat diukur berdasarkan indikator: penataan wilayah kawasan kumuh, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi wilayah perkotaan, tidak terkecuali di Kabupaten Bandung Barat.

Luas kawasan kumuh di Kabupaten Bandung Barat tersebar di 6 (lokasi) seluas 228,82 ha dengan realisasi penanganan kawasan kumuh s.d tahun 2024 seluas 104,93 ha atau sebesar 45,86% yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2024 dengan sisa kawasan kumuh yang belum tertangani seluas 123,89 ha, dengan lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 2.101. Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh di Kab. Bandung Barat 2020-2024

Lokasi	Luas (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani	Jumlah Kawasan Kumuh yang tertangani
Kampung Bosscha Desa Lembang, Kampung Citespong, Babakan, Pamecelen, Sukadami, Cipariuk dan Barunagara Desa Sukajaya, Kampung Bewak-Sukapinggir, Genteng I dan II Desa Jayagiri.	48,05			1,97		10,36
Kampung Cibaligo I dan II Desa Cihanjuang, Kampung Nyingkir dan Kancah Desa Cihideung, Kampung babakan, Sukamulus dan Cipanjak Desa Cigugurgirang, Kampung Panyairan-karyawangi Desa Karyawangi	48,92					20,79
Bunisari, Babakan Cianjur, Lebakgede - Cihampelas, Curug agung cihaliwung, Cikawati, Kebon kalapa-Cijerah	54,10			6,11		14,41
Kutaluhur-pamucatan, Kepuh, Cidadap, Andir, Cipanawar, Cileunca, Cileunca Hilir, Cipeundeuy, Pasir Gembong (Ciluncat)	39,82			25,86		
Kaum, Sukamaju-Cikadu-Warung Awi, Warung awi, Cikadu I, Cikadu II, Babakan Cianjur	15,73			8,37		4,98
Babakan Cianjur	22,20					12,08
Jumlah	**228,82**			**42,31**		**62,62**

Sumber: Satu Data Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Kebutuhan akan tempat tinggal terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, dengan kondisi eksisting tahun 2024 sebanyak 381,565 unit rumah diperkirakan pada tahun 2025 ketika jumlah penduduk mencapai 2.020.293 jiwa, kebutuhan rumah tinggal mencapai 404.509 unit atau terdapat kekurangan sebanyak 22.944 unit tempat tinggal.

Perlu adanya respon akan peningkatan kebutuhan tempat tinggal dengan pelaksanaan program yang memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan perumahan. Pemenuhan kebutuhan rumah juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kekurangan perumahan (backlog) dan pertumbuhan kawasan kumuh serta harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas dasar yang sehat dan produktif dari aspek kebutuhan air bersih, sanitasi, sistem drainase dan pengelolaan persampahan.

Pemenuhan kebutuhan rumah/tempat tinggal bagi keluarga tidak mampu, Pemkab Bandung Barat melalui program rehab rumah dan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) s.d dengan tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 6.848 dan sisa s.d tahun 2024 masih terdapat 14.518 nit Rumah Tidak Layah Huni yang belum tertangani.

Tabel 2.102. Realisasi Rehab/Perbaikan Rutilahu Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	Kondisi Awal Tahun 2019	Realisasi Pemberian Bantuan / Rehab Rutilahu					Jumlah s.d Tahun 2024	Sisa s.d Tahun 2024
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Rongga	912	110	209	44	37	32	432	480
2	Gununghalu	899	30	158	18	151	353	710	189
3	Sindangkerta	1.087	100	153	253	305	573	1.084	3
4	Cililin	1.036	70	237	102	136	89	634	402
5	Cihampelas	1.714	30	30	60	95	35	250	1.464
6	Cipongkor	539	30	61	124	252	109	530	9
7	Batujajar	2.385	30	103	73	68	13	287	2.098
8	Saguling	1.734	10	90	32	5	46	183	1.551
9	Cipatat	662	20	91	103	102	66	382	280
10	Padalarang	699	40	98	176	119	125	558	141
11	Ngamprah	1.512	37	173	50	47	84	391	1.121
12	Parongpong	1.663	30	81	9	56	72	248	1.415
13	Lembang	937	34	132	84	81	45	376	561
14	Cisarua	3.011	110	110	51	10	1	282	2.729
15	Cikalongwetan	1.224	30	0	63	81	56	230	994
16	Cipeundeuy	1.352	30	20	143	46	32	271	1.081
JUMLAH		**21.366**	**741**	**1.746**	**1.385**	**1.591**	**1.731**	**6.848**	**14.518**

Sumber: Satu Data Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, ketersediaan sumber air bersih di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren positif dengan cakupan 89 presen rumah tangga di kabupaten Bandung Barat telah menggunakan sumber air bersih untuk mencukupi kebutuhannya. Pengguna Air Bersih dan Air minum Layak di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 tersebar di seluruh kecamatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.103. Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Sumber Air Minum

No	Kecamatan	Air dalam kemasan & Ledeng	Pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Tidak bersih	Jumlah
1	Rongga	342	1.254	4.218	3.876	8.550	18.240
2	Gununghalu	1.040	780	8.320	2.470	10.790	23.400
3	Sindangkerta	535	1.712	3.852	1.819	11.235	19.153
4	CIlilin	4.796	5.559	7.412	3.270	2.943	23.980
5	Cihampelas	8.700	8.265	13.920	435	580	31.900
6	Cipongkor	1.036	5.476	16.724	1.480	4.884	29.600
7	Batujajar	16.080	4.920	3.600	135	465	25.200
8	Saguling	6.656	960	1.728	192	64	9.600
9	Cipatat	19.872	2.940	9.555	5.733	120	38.220
10	Padalarang	25.604	8.477	10.726	6.055	1.038	51.900
11	Ngamprah	27.664	9.646	4.186	8.008	3.276	52.780
12	Parongpong	6.840	8.664	3.496	12.160	2.128	33.288
13	Lembang	19.729	724	12.308	26.245	543	59.549

No	Kecamatan	Air dalam kemasan & Ledeng	Pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Tidak bersih	Jumlah
14	Cisarua	2.415	231	115	18.170	919	21.850
15	Cikalongwetan	4.455	945	12.015	15.120	2.565	35.100
16	CIpeundeuy	125	2.000	16.875	3.000	3000	25.000
Kab. Bandung Barat		**145.889**	**62.553**	**129.050**	**108.168**	**53.100**	**498.760**

Sumber Data : Dokumen Analisis Data Makro Sosial, Bappelitbangda 2024, diolah, yang dikelola dalam SIPD

Berikut realisasi capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman sampai dengan tahun 2024:

Tabel 2.104. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah areal penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha	ha	8	0	42,31	0	62,62
Persentase perumahan formal yang melakukan proses serah terima PSU kepada Pemerintah daerah	%	0	1	12	38,89	38.89
Persentase Penyediaan hunian layak bagi masyarakat	%	39,55	71,62	0	0	100
Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	3,47	11,64	18,12	25,57	33,67

Sumber: Dinas Kimrum, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Selama kurun waktu tahun 2020 -2024 di Kabupaten Bandung Barat telah terjadi beberapa jenis gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan Perda K3 dalam rangka perlindungan masyarakat berupa: penegakan tipiring terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan, penertiban PKL, penertiban warung remang- remang/PSK, penertiban IMB, penertiban gepeng/anak jalanan dan penertiban reklame tidak berijin. Pemetaan daerah rawan Trantibum di Kab. Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.105. Daerah Rawan Trantibum di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Bentuk Potensi Ancaman Trantibum
1	Rongga	Spanduk/Reklame
2	Gununghalu	Spanduk/Reklame
3	Sindangkerta	Spanduk/Reklame
		Penertiban PKL
4	Cililin	Spanduk/Reklame
5	Cihampelas	Penertiban PKL
		Spanduk/Reklame
6	Cipongkor	Spanduk/Reklame
7	Batujajar	Spanduk/Reklame
		Penunggakan Pajak
8	Saguling	Spanduk/Reklame
		Penertiban PKL
		Bangunan tanpa IMB
		Peredaran Minol
9	Cipatat	Spanduk/Reklame
10	Padalarang	Spanduk/Reklame
		Penertiban PKL
		Bangunan tanpa IMB
		Penunggakan Pajak
11	Ngamprah	Pelanggaran Pengelolaan Sampah
		Penunggakan Pajak
		Spanduk/Reklame
12	Parongpong	Penunggakan Pajak
		Spanduk/Reklame
13	Lembang	Bangunan tanpa IMB
		Penertiban PKL
		Penunggakan Pajak
		Pelanggaran Pengelolaan Sampah
		Spanduk/Reklame
14	Cisarua	Spanduk/Reklame
		Penunggakan Pajak
15	Cikalongwetan	Penunggakan Pajak
		Spanduk/Reklame
16	Cipeundeuy	Pelanggaran Pengelolaan Sampah
		Spanduk/Reklame

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Dalam melaksanakan perlindungan kepada masyarakat terkait penanganan bencana, di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2024 tercatat sebanyak 425 kasus kejadian bencana, kejadian tanah longsor dan pergerakan tanah dengan intensitas terbanyak yaitu 203 kasus dan kejadian bencana tahun 2024 tersebut mengakibatkan 14 orang korban jiwa, 1 orang korban luka dan mengakibatkan sekitar 1.187 kerusakan bangunan.

Tabel 2.106. Kejadian Bencana di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Bencana						Akibat Bencana		
		Longsor	Kebakaran	Angin Puting Beliung	Banjir Bandang	Pergerakan Tanah	Gempa Bumi	Korban jiwa	Korban Luka	Kerusakan Bangunan
1	Rongga	11	4	2	1	2		1		150
2	Gunung Halu	33	1	7	3	4	2			77
3	Sindangkerta	21	3	9	1	5	1			241
4	Cipongkor	14	4	3			1	10		168
5	Cililin	9		4			2			9
6	Cihampelas	1	2	7						14
7	Saguling	3	1	8		2				59
8	Batujajar	3		6		1				10
9	Ngamprah	9	2	10						19
10	Padalarang	9	4	16		1	1	1		86
11	Cipatat	19	3	18	5	1				80
12	Cipendeuy	2	5	19						86
13	Cikalong Wetan	25	2	31	1	4	2			138
14	Cisarua	8	4	13			3	1	1	24
15	Parongpong	7	2	2	1					12
16	Lembang	9	1	3	2			1		14
Jumlah		**183**	**38**	**158**	**14**	**20**	**12**	**14**	**1**	**1187**

Sumber: BPBD KBB, 2024. yang dikelola dalam SIPD

Dalam hal perlindungan terhadap bencana kebakaran, berdasarkan Permen PU RI Nomor 20/ PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK. Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di WMK. dari target < 30 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydran, dan peran serta masyarakat/satwankar.

Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Bandung Barat semakin meningkat dari tahun 2020 sebesar 475 persen menjadi 79,55 persen di tahun 2024 waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran semakin baik untuk meminimalisir korban jiwa maupun korban materi. Berikut capaian indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tabel 2.107. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Linmas Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	58,47	97,91	100	100	100
Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan	%	73	77	77	79,69	79,55
Meningkatnya Nilai Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori Indeks	N/A	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
Presentase peningkatan kapasitas SDM satpol PP dan Satlinmas	%	31,2	38,67	53,22	78,95	38,67

Sumber: Dinas BPBD dan Satpol PP, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

6. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Kabupaten Bandung Barat yaitu penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis. Pada tahun 2020 persentase angka PPKS yang tertangani sebesar 51,93 persen, s.d tahun 2024 telah mencapai sebesesar 100 persen. Untuk mengatasi masalah PPKS tersebut, di Kabupaten Bandung Barat dengan memberdayakan organisasi/lembaga sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 495 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 92 Lembaga, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Penyuluh Sosial, juga terdapat 54 sarana rehabilitasi sosial yaitu Panti Sosial Asuhan Anak sebesar 42 unit, Panti Jompo sebanyak 9 unit dan Panti Sosial Penyandang cacat sebanyak 3 unit.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilaksanakan melalui bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Untuk melihat jumlah dan peran aktif pemerintah dalam upaya penanganan PPKS disajikan pada di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.108. Data Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecataman	JUMLAH PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)							
		Anak Terlantar	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Lansia Terlantar	Penyandang Disabilitas	Pengemis	Gelandangan /pemulung	Korban Penyalahgunaan Napza	Korban Bencana Alam dan
1	Rongga	8	24	83	151				1
2	Gunung Halu	21	185	93	138		3		2
3	Sindangkerta	28	70	98	121			1	31
4	Cililin	12	23	194	62		2		7
5	Cihampelas	17	12	125	103		2	3	2
6	Cipongkor	54	4	120	80			1	
7	Batujajar	6	87	143	73		9	5	4
8	Saguling	4	1	25	85			4	4
9	Cipatat	35	43	181	116			1	2
10	Padalarang	50	46	154	67	1			
11	Ngamprah	23	61	148	78	1		12	1
12	Parongpong	1	20	58	133			1	
13	Lembang	31	20	78	135		2	46	
14	Cisarua	7	54	96	108				6
15	CikalongWetan	39	42	104	88		2	9	
16	Cipeundeuy	11	-	77	75				
JUMLAH		**347**	**692**	**1.777**	**1.613**	**2**	**20**	**83**	**60**

Sumber: Satu Data Dinas Sosial, diolah Bappelitbangda, 2024, yang dikelola dalam SIPD

Adapun rekapitulasi capaian indikator penyelenggaraan urusan sosial Kabupaten Bandung Barat, tersaji pada tabel berikut dimana capaian 2020 dan 2021 yang tidak ada realisasinya (N/A) mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD dan presentase tertanganinya warga negara migran sudah tidak lagi menjadi kewenangan Dinsos.

Tabel 2.109. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	51,93	71	72	72	100
Persentase PPKS yang mendapatkan program rehabilitasi di Luar Panti Sosial	%	N/A	38	16,2	5	10
Tingkat fasilitasi pendataan fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	N/A	36	37	100	100
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100	0	100	100	100
Persentase Taman Makan Pahlawan Nasional Yang Mendapatkan Pemeliharaan	%	N/A	100	100	100	100
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	N/A	N/A	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.6.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Aspek pelayanan umum focus urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan, yaitu:

1. Tenaga Kerja

Hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan seperti Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Angka Pengangguran merupakan data dan informasi mengenai ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pembangunan dan pemecahan masalah urusan tenaga kerja. Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat semakin menurun dari 2020 sebesar 12,25% menjadi 6,7% pada tahun 2024. Untuk melihat kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan, di antaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 – 2024, terjadi peningkatan TPAK sebesar 8,03 persen di tahun 2024 menjadi 67,82 dibanding tahun 2020 dengan capaian 59,91.

Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan menunjukan adanya kenaikan yang didukung oleh adanya pelaksanaan Job Fair, pada tahun 2021 indikator besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 60% menjadi 100% di tahun 2024. Berikut capaian indikator penyelenggaraan urusan tenaga kerja di Kab Bandung Barat tahun 2020-2024.

Tabel 2.110. Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Jumlah Angkatan Kerja	orang	748 ribu	766 ribu	819 ribu	947 ribu	978 ribu
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	%	59,91	60,75	64,37	67,01	67,82
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	12,25	11,65	9,63	8,11	6,7
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	20	42,86	60	31,48	28,78
Presentase pencari kerja yang ditempatkan	%	N/A	60	68	84,18	100
Persentase terselesaikannya kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan ke Disnaker	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program- program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat menjadi indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan serta bisa juga diukur melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Secara empiris, terjadi disparitas antara angkata kerja laki-laki dengan perempuan.

TPAK laki-laki selalu selalu lebih besar dari TPAK perempuan. Kondisi ini dinilai wajar karena norma-norma yang berlaku di masyarakat mengarahkan laki- laki untuk berperan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Pada tahun 2024, TPAK laki-laki sebesar 87,83 persen lebih tinggi dari pada TPAK perempuan sebesar 46,00 persen. Hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Bandung Barat jauh lebih aktif secara ekonomi dibandingkan yang perempuan.

Pada tahun 2024 nilai IDG Kabupaten Bandung Barat sebesar 68,06 poin angka ini meningkat dari kondisi tahun 2020 yang masih berada pada angka 64,31 poin artinya terjadi peningkatan aktivitas perempuan dalam ekonomi dan politik dalam lima tahun terakhir sebesar 3,75 poin. Selama periode lima tahun terakhir, capaian IPG Kabupaten Bandung Barat mengalami tren yang positif. Pada tahun 2024 nilai IPG Kabupaten Bandung Barat sebesar 81,02 poin, angka ini meningkat sebesar 1,30 poin dari tahun 2020 dengan capaian 79,39 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pada aspek pembangunan gender di Kabupaten Bandung Barat. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Berikut capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.111. Capaian IDG dan IPG Di Kab. Bandung Barat Tahun 2020-2024

Uraia	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	79,39	79,44	79,82	80,37	81,02
Indeks Pemberdayaan Gender	64,31	65,11	65,83	66,97	68,06

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui indikator penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dengan capaian realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.112. Data Kejadian Kekerasan terhadap Anak, Perempuan dan KDRT Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Penyelesaian
Kekerasan Terhadap Anak	21	16	30	36	41	100%
Kekerasan terhadap Perempuan	1	5	10	17	9	100%
Kekerasan dalam rumah tangga	0	3	3	13	22	100%

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Dalam rangka kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan serta kekerasan dalam rumah tangga, dari tahun ke tahun kasusnya cenderung meningkat dari tahun 2020 s.d tahun 2024, walaupun kasus kejadian dapat diselesaikan semua atau 100%. Kedepannya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten perlu lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diharapkan dapat dengan cepat ditangani dan pelaku tindak kekerasan dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera.

Untuk lebih jelasnya capaian indikator penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disajikan pada tabel berikut, dengan catatan capaian 2020 dan 2024 yang tidak tersisi merupakan indikator lama sebelum dilakukan Perubahan pada RPJMD.

Tabel 2.113. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Kabupaten/Kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Non Kategori	Non Kategori	Non Kategori
Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan	%	82	82,5	84	85	87,50
Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender	%	N/A	39	39	42	40,51
Persentase Data dan profil gender dan anak Hasil analisis	%	N/A	85	87	87	0
Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100	100	100
Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak ank	%	N/A	67	100	100	100
Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak	%	100	100	100	100	100

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

3. Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung Barat. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Secara umum, ada 9 (sembilan) kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi- umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Skor PPH Kab. Bandung Barat Barat pada tahun 2022 adalah 76,8 poin dan menurun di tahun 2024 menjadi 87,68 Kelompok padi-padian terutama beras (25,0) dan sayuran serta buah (28,4) masih mendominasi konsumsi masyarakat Kab. Bandung Barat. Capain pola pangan harapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.114. Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Tahun 2020	Skor PPH Tahun 2021	Skor PPH Tahun 2022	Skor PPH Tahun 2023	Skor PPH Tahun 2024
1	Padi-padian	25	25	25	25	25
2	Umbi-umbian	1,4	1,8	1,7	1,9	1,23
3	Pangan Hewani	19,7	21,8	20,3	24	20,67
4	Minyak dan Lemak	5	5	5	5	5
5	Buah/biji berminyak	0,1	0,1	0,1	0,1	0,07
6	Kacang-kacangan	6,8	5,3	4,8	7,2	7,06
7	Gula	1,1	1,2	1,1	1,3	0,87
8	Sayuran dan buah	20,2	18,7	18,8	28,4	27,79
9	Lain-lain	-	-	-	-	-
Jumlah		**79,3**	**79,1**	**76,8**	**92,9**	**87,68**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Dengan telah ditetapkkanya Perda pada tahun 2023 tentang cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, realisasi capaian indikator cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 sebesar 10 ton dan Cadangan Pangan Masyarakat Kab. Bandung Barat sebesar 22 Ton. Dalam rangka penanganan daerah rawan pangan, berdasarkan Analisis FSVA di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 dan tahun 2022 masih terdapat 1 desa yang teridentifikasi daerah sangat rawan pangan sampai dengan tahun 2024 sudah tidak terdapat desa yang mengalami daerah sangat rawan pangan, tetapi masih terdapat 20 desa yang rentan rawan pangan.

Tabel 2.115. Desa Dan Penduduk Sangat Rawan Pangan, Rawan Pangan Dan Tahan Pangan di kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Desa dan Penduduk Sangat Rawan Pangan						
1	Jumlah Desa	0	1 Desa	1 Desa	0	0
2	Persentase Penduduk Sangat Rawan Pangan	0	0,60	0,60	0	0
Desa & Penduduk Rentan Rawan Pangan						
1	Jumlah Desa	37	84	45	43	20
2	Persentase Penduduk Rawan Pangan	22,4	50,3	27,28	24,60	12,12
Desa dan Penduduk Tahan Pangan						
1	Jumlah Desa	128	81	120	122	145
2	Persentase Penduduk Tahan Pangan	77,60	49,09 %	72,72 %	76,25 %	87,88 %

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Capaian indikator penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.116. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	sertifikat	48	5	4	13	5
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	0	0	10	10	33,12
Ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan	Laporan	N/A	12	12	12	12
Skore Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Point	83,03	66,78	83,14	77,3	80,29
Penurunan Jumlah desa rawan pangan	Desa	2	0	0	0	0
Score Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	poin	-	-	76,8	92,9	87,677
Persentase Desa Tahan Pangan	%	77,60	49,09	72,72	73,9	87,88

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

4. Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, dalam perubahan RPJMD mengalami penyesuaian indikator dan target, dengan capaian indikator s.d tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.117. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kosong	dokumen	N/A	100	0	100	100
Terkoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan penatagunaan tanah dan konsolidasi tanah	Kegiatan	N/A	100	0	100	100
Jumlah rekomendasi pengelolaan izin lokasi	rekomen	N/A	0	0	100	100
Tersedia data subjek, objek redistribusi tanah untuk aset reforma agraria	dokumen	N/A	0	0	100	100
Penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	20	66,6	33,33	100	100
Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	0	0	33,33	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Persentase penyelesaian sengketa/konflik tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2024 sebanyak 6 lokasi di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah dan Kp. Cikamuning Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang dengan capaian penyelesaian sengketa sebesar 100%.

5. Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan dokumen RPPLH bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Berikut capaian indikator urusan lingkungan hidup tahun 2020 – 2024:

Tabel 2.118. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks Kualitas lingkungan Hidup	Indeks	47,07	50,27	63,03	55,79	58,43
Tonase sampah terangkut ke TPA	Ton/ Tahun	58.891	62.386	55.667	50.514	50.678
Persentase cakupan pengelolaan sampah domestik	%	-	34,57	28,98	26,51	25,45
Persentase titik sampling air yang status mutunya baik	%	40	0	6	0	0
Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen pendukung perencanaan LH	%	-	60	80	100	42,86
Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3 sesuai peraturan	Industri	-	30	31,78	34,44	40
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH pada tahun ke- n	Entitas	-	20	15	30	35
RTH taman yang terawat	Lokasi	23	0	26	31	
Presentase RTH Taman yang terawat	%	-	-	72,20	86,10	100
Presentase Desa yang telah menerapkan aksi peduli lingkungan	%	100	100	100	100	100
Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Indikator urusan lingkungan hidup terkait kualitas lingkungan hidup sampai dengan tahun 2024 capaian IKLH sebesar 58,43 poin berada pada katagori sedang dengan target tahun 2024 sebesar 66,55 point hal ini ini menunjukan walaupun mangalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 55,79 poin tetapi bila dilihat dari target yang ditentukan belum mencapai target.

Dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat kapasitas sampah yang terangkut ke TPA selam 5 tahun terakhir capaiannya menurun pada tahun 2020 sebanyak 58.891 ton/tahun turun menjadi 50.678 ton/tahun di tahun 2024, hal tersebut untuk menjadi perhatian Pemkab Bandung Barat (DLH) dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah di tahun 2025, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula timbulan sampah yang dihasilkan dimana s.d tahun 2024 dari timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 5.461,45 m3/hari baru dapat terkelola dengan kapasitas daya angkut sampah ke TPA sebanyak 467,01 m3/hari sehingga masih terdapat timbulan sampah yang belum terkelola. Berikut realisasi capaian pengelolaan sampah di Kab. Bandung Barat:

Tabel 2.119. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024

No	Area Pelayanan	Jumlah Lokasi	Volume Sampah yang dihasilkan		Kapasitas Total Daya Angkut Pelayanan Persampahan	
			Kapasitas Harian M3/Hari	Kapasitas Ton/Tahun	Kapasitas Harian M3/Hari	Kapasitas Ton/Tahun
1	Permukiman	250	5.461,42	275.091,74	467,01	50.677,82
2	Pasar	11				
3	Jalan					
4	Daerah Komersil (Hotel, Restoran dll)	19				
5	Institusi (Kantor Pemerintah/ Puskesmas/Rumah Sakit)	10				
6	Industri	18				
7	Lainnya	9				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula timbulan sampah yang dihasilkan. Timbulan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran buruk terhadap wajah suatu kawasan, selain itu juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit. Permasalahan sampah seharusnya dapat dikelola dengan baik dengan melibatkan lintas sektor, karena permasalahan sampah melibatkankan dari hulu sampai hilir, dari masyarakat hingga ke pemerintah yang bertanggung jawab.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib yang sangat terkait langsung dengan pelayanan publik yang menjadi tugas utama pemerintahan. Kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil sangat penting terutama pada kalangan tertentu yang mewajibkan dokumen- dokumen tersebut sebagai syarat program. Capaian realisasi administrasi kependudukan cenderun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 persentase penduduk memiliki KTP elektronik sebesar 99 persen meningkat menjadi 99,7 persen di tahun 2024. Begitu juga dengan indikator lain presentase penduduk ber-akta kelahiran, persentase anak yang memiliki KIA. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, anak yang telah mempunyai KIA.

Peningkatan indikator kependudukian yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte kematian menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan.

Tabel 2.120. Capaian Indikator Kinerja Urusan Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020– 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga	%	57	40	84	99,7	99,8
Persentase Penduduk Memiliki KTP-El	%	99	98	98	98,7	99,7
Persentase Anak Ber KIA	%	18,1	30	24	25,8	27
persentase penduduk ber Akta kelahiran	%	32,5	32	39	39,9	89
persentase penerbitan Akta kematian	%	46	30	100	100	50
Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	%	N/A	96	89	90,29	91,12
Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	26,66	36	57	57	38
Profil Kependudukan yang terselesaikan	Dok.	N/A	0	1	1	1
Persentase Indentitas Kependudukan Digital	%	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	10,31

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pedesaan, di Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 165 desa, 2.416 RW dan 9.009 RT yang tersebar di 16 kecamatan, berikut capaian indikator urusan pemebrdayaan masyarakat desa thun 2020-2024:

Tabel 2.121. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020– 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase Desa Mandiri	%	-	24	37,58	47,88	60,6
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	60,4	82,34	91,82	100	100
Persentase Desa Maju	%	-	74	62,42	52,12	39,4
Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	Desa	-	0	21	20	100
Presentase Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	%	N/A	N/A	0	100	100
Persentase Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	%	N/A	N/A	105	100	100

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Percentase Desa yang melaksanakan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Tertib	%	N/A	N/A	100	100	100
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	60,4	82,34	91,82	100	79,17

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Peningkatan desa dengan status desa mandiri di Kab. Bandung Barat pada tahun 2021 terdapat 24 Desa Mandiri atau 15 persen dan meningkat di tahun 2024 menjadi 60,6 persen atau sebanyak 79 Desa, kriteris desa lainnya sampai dengan tahun 2024 terdapat 3 desa dengan status desa berkembang dan 65 desa dengan status desa maju. Hal yang tak boleh dilupakan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah pergerakan ekonomi desa, melalui lembaga ekonomi pedesaan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pasar desa dan usaha ekonomi desa yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, dengan rincian sebanyak 165 unit BUMDes, 66 pasar desa dan 468 unit usaha ekonomi desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil (SP2020), jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2024 sebesar 1,32% dengan kepadatan penduduk sebesar 1.445 jiwa per Km2. Komposisi penduduk Kab. Bandung Barat memperlihatkan tingkat fertilitas yang menurun di periode 10 tahun terakhir, hal ini dapat terjadi karena kesadaran dari masyarakat mengenai keluarga kecil sejahtera disamping berjalannya program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk dari sisi kelahiran.

Data hasil long form sensus penduduk Kab. Bandung Barat yang dilaksanakan oleh BPS, Fertilitas Kabupaten Bandung Barat menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus Penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,31 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR sebesar 2,24 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun. Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi.

Pada tahun 2022, tepat satu dekade bonus demografi Indonesia, tercatat TFR sebesar 2,24. Berdasarkan hasil Long Form SP2020 tercatat Angka Kematian Kasar yang terhitung adalah sebesar 4,82. Artinya, terdapat 4 sampai dengan 5 kematian untuk tiap 1.000 penduduk di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan selama periode satu dekade bonus demografi yang dialami Indonesia, Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung menurun dari 27 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 14 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup wanita Bandung Barat membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup.

Tabel 2.122. Fertilitas dan Mortalitas Kabupaten Bandung Barat Hasil Long Form SP Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	Nilai 2020
Aspek Kelahiran (Fertalitas)			
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,24
Aspek Kematian (Mortalitas)			
1	Infant Mortality Rate (IMR)	Angka	14,13

Sumber : Hasil Long Form SP 2020, BPS

Secara umum, berikut capaian indikator penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2020 – 2024:

Tabel 2.123. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	%	0	5,11	6,78	8,46	7,57
Persentase Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/ Kelurahan	%	70	70	75	80	100
Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi	%	100	100	100	100	100
Persentase KB Aktif	%	79,86	73,85	72,71	76,29	80,1
Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	0	22,08	21,48	20,28	24,48
TFR (Total Fertility Rate)	Angka	2,24	-	-	2,12	2,15

Sumber: DP2KBP3A, diolah Bappelitbangda, 2025, yang dikelola dalam SIPD

9. Perhubungan

Kabupaten Bandung Barat berada pada posisi yang sangat stretegis, sehingga memerlukan pengeloaan pada urusan perhubungan yang baik. Untuk mendukung aksebilitas barang dan orang di dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana trasnsportasi yang menjadi urusan perhubungan diantaranya sarana angkutan darat, ASDP, terminal, dermaga. Secara umum indikator urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.124. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi darat	Penumpang	598.435	746.618	577.299	463.774	404.830
Jumlah Pelayanan angkutan darat yang beroperasi wilayah KBB	trayek	9	12	19	19	17
Jumlah angkutan sungai danau dan penyeberangan yang terkelola	unit	196	165	154	165	187
Jumlah penumpang yang menggunakan prasarana transportasi ASDP	Penumpang	6.858	90.819	13.460	82.723	76.248
Indeks Aksebilitas / Transportasi	Poin	13,31	13,27	13,05	16,94	13,52
Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi Baik	%	-	41,9	48,84	67,44	71,43
Persentase armada angkutan ASDP yang terkelola	%	-	70,9	81,48	86,00	68,49

Sumber: Dinas Perhubungan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

Indikator jumlah penumpang yang menggunakan tansportasi darat dan transportasi ASDP terjadi penurunan yang signifikan semenjak adanya pembatasan pergerakan orang pada pada tahun 2020 dan akibat adanya aplikasi kendaraan umum onlide. Terkait indikator sarana transportasi darat berupa jumlah trayek dan kendaraan angkutan umum serta jumlah ASDP menunjukan indikator yang semakin menurun. Layanan angkutan darat yang beroperasi pada tahun 2020 sebanyak 9 trayek s.d tahun 2024 bertambah lagi menjadi 17 trayek. Begitupun dengan jumlah ASDP yang terkelola tahun 2020 sebanyak 196 unit dan terus turun menjadi hanya 187 unit di tahun 2024.

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari presentase aplikasi TIK pemerintahan yang termanfaatkan dan persentase pengelolaan informasi dan komunikasi public sertaq penerapan SPBE.

Tabel 2.125. Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks SPBE	point	2,71	2,85	2,65	3,32	3,78
Persentase Aplikasi Teknologi Informasi Pemerintahan Yang Termanfaatkan	%	40	99,22	94,56	64,51	100
Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	39,27	100	97,62	73,18	100

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien menunjukkan peningkatan dimana tahun 2020 dengan capaian indeks SPBE sebesar 2,71 poin terus meningkat s.d tahun 2024 menjadi 3,78 poin Media informasi dan komuniaksi public berupa: website milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat maupun melalui pemanfaatkan media sosial diantaranya facebook, twitter, instagram dan youtube berperan dalam meningkatkan layanan informasi dan komunikasi public di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian terus meningkat dari tahun 2020 sebesar 39,27% menjadi 100% di tahun 2024 yang didukung oleh digitalisasi diberbagai sector serta dukungan aplikasi teknologi informasi pemerintahan dengan capaian sebesar 100%.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi menjadi ujung tombak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, pada tahun 2020 jumlah koperasi di Kabupaten Bandung sebanyak 692 unit dimana 60,1 persennya merupakan koperasi aktif dan meningkat di tahun 2024 menjadi 779 unit dengan jumlah koperasi aktif sebesar 66,90 persen. Berdasarkan kondisi tingkat kesehatan koperasi terjadi peningkatan koperasi sehat sebesar 4,55 persen di tahun 2024 bila dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 20 persen.

Tabel 2.126. Jumlah dan Kondisi Koperasi Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi	692	722	758	779	799
Koperasi Aktif	426	464	500	521	521
Koperasi Sehat	140	210	232	8	73

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut kinerja pembangunan daerah di Bidang Koperasi dan UKM selama periode Tahun 2020-2024:

Tabel 2.127. Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	21	21	21	4	8
Jumlah kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Keg	3	5	5	4	20,73
Presentase Usaha Mikro yang dikembangkan	%	-	213	716	838	27,40
Pertumbuhan pengembangan pelaku usaha mikro	Pelaku usaha	50	171	221	215	650
Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	-	-	21,82	28,18	46,45
Persentase Koperasi aktif	%	-	-	22	44	65,21
Persentase Koperasi Sehat	%	22	22	21	31	46,45
Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	%	0	10	7	23	0,06

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah. UMKM berperan sebagai penggerak utama, penyedia lapangan kerja, dan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Mereka juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, UMKM juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi daerah, dan menciptakan inovasi. Bila dilihat dari pertumbuhan usaha kecil dan menengah sebagai penopang perekonomian masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, dari tahun 2020 s.d 2024 terdapat peningkatan jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 43.949 UMKM dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Lembang, sebagaimana data pada tabel berikut

Tabel 2.128. Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	UMKM
1	2020	14,917
2	2021	54,586
3	2022	55,617
4	2023	58,216
5	2024	58.866

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.129. Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kab. Bandung Barat Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	BATUJAJAR	4.213
2	CIHAMPELAS	2.217
3	CIKALONGWETAN	3.100
4	CILILIN	3.156
5	CIPATAT	5.800
6	CIPEUNDEUY	2.850
7	CIPONGKOR	2.711
8	CISARUA	4.750
9	GUNUNGHALU	1.418
10	LEMBANG	8.390
11	NGAMPRAH	6.809
12	PADALARANG	5.910
13	PARONGPONG	2.372
14	RONGGA	1.550
15	SINDANGKERTA	2.170
16	SAGULING	1.450
Jumlah		**58.866**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2025 yang dikelola dalam SIPD

12. Penanaman Modal

Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Capaian indikator penanaman modal mengalami kenaikan yang signifikan, diantaranya jumlah investasi PMDN pada tahun 2020 sebesar Rp.174 Milyar meningkat menjadi Rp.1.642 Milyar pada tahun 2024 dan Jumlah penerbitan perijinan dari tahun 2020 sebanyak 1.878 menjadi 4.027 penerbitan perijinan.

Hal ini didukung dengan semakin membaiknya waktu proses pelayanan perijinan sesuai SOP yang awalnya tahun 2020 sebesar 68 persen menjadi 78,03 persen di tahun 2024 serta presentase peningkatan promosi kerjasama investasi dengan realisasi 100%. Berikut indikator urusan Penanaman Modal:

Tabel 2.130. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Nilai Investasi PMDN	Milyar	174	192,6	704	2.730	1,642
Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi	%	14,19	33	16,67	50	100
Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	unit	-	268	622	1.520	3394
Jumlah penerbitan perijinan	%	1.878	2.344	3.248	4.027	
Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	68	72,5	82,79	90,49	78,03
Realisasi Nilai Investasi	Trilyun	3,117	2,818	6,297	7,877	3,898
Presentase data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100
Jumlah penerbitan perijinan	%	2.308	1.878	2.344	3.248	4.027
Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	%	88	68	72.5	82.79	90.49

Sumber: DPMPTSP diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Ruang lingkup olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Artinya, bahwa parameter keberhasilan pembangunan olahraga bukan hanya dilihat dari segi prestasi yang diraih oleh suatu negara atau daerah, akan tetapi parameter keberhasilan pembangunan olahraga dapat dilihat dari segi pencapaian 4 aspek pembangunan keolahragaan atau Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), yaitu:

ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam keolahragaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan berolahraga secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh derajat kebugaran jasmani pada masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Bandung Barat terus meningkat, pada tahun 2021 sebesar 0,41 dan tahun 2022 sebesar 0,42 meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 0,45 tetapi capaian masih pada kategori rendah.

Sedangkan peran serta pemuda dalam pembangunan diukur melalui capaian kapasitas layanan kepemudaan dengan capaian di tahun 2024 sebesar 10,34 persen dan presentase pemuda yang aktif di organisasi kepramukaan capaian 2024 sebesar 5,77 persen. Berikut indikator urusan Kepemudaan dan Olahraga, tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.131. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	-	0,41	0,42	0,44	0,45
Jumlah ketersedian ruang terbuka dan sarana olahraga	unit	1.527	2.562	2.712	2.667	2.957
Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	org	-	33	569	160	201
Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	point	14,56	19,98	33	35	35
Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	%	-	9,2	7,83	10,24	10,34
Presentase peningkatan pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan	%	-	1,5	2,86	3,21	5,77
Indeks ketersedian ruang terbuka dan sarana olahraga	poin	-	-	0,58	0,66	0,67
Indeks SDM Keolahragaan	poin	-	-	0,33	0,29	0,31
Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	poin	-	-	0,34	0,37	0,38

Sumber: Dispora diolah Bappelitbangda,2025.

Walaupun IPO mengalami peningkatan tetapi dari indikator angka partisipasi dan tingkat kebugaran masih pada katagori rendah, dan peran serta pemuda dalam pembangunan pelayanan kepemudaan pada sector kewirausahaan pemuda masih mendominasi tetapi pelayanan kepemimpinan pemuda dan pemuda kader masih kurang.

14. Statistik

Dalam rangka pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Bandung Barat dengan indikator, presentase penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Banung Barat yang telah dikelola dan dipublikasikan capaian tahun 2020 sebesar 74,5 persen meningkat di tahun 2023 menjadi 98,84 persen. Peningkatan capaian penyelenggaraan statistik sektoral tidak terlepas dari efektifitasnya Forum satu data Bandung Barat melalui peran Pembina data, wali data dan produsen data dalam mengumpulkan, menyediakan dan mempublikasikan data statistik sektoral dalam rangka berbagi pakai data untuk kebutuhan perencanaan dan evalausi pembangunan serta dengan ditetapkannya Perbup Nomor 19 tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Bandung Barat. Publikasi data melalui Portal data Kabupaten Bandung Barat yang dikelola oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, dengan tautan:

https://opendata.bandungbaratkab.go.id sampai dengan tahun 2023, statistik data pada portal data telah tersedia sebanyak 2.275 Dataset dan 35 Organisasi.

Tabel 2.132. Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kabupaten	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Presentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	74,5	99,22	99,05	98,84	100
Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Poin	N/A	N/A	1	2	3

Sumber: Dinas Kominfo dan Statistik, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

15.Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Bandung Barat dititikberatkan pada pengamanan informasi Pemerintah Daerah dengan indikator persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 97,22 dan menurun pada tahun 2024 menjadi 82,00 persen.

Dilihat dari pencapaiannnya dan begitu pentingnya pengamanan aplikasi terutama kemanan data probadi dan pengamanan informasi dari berita hoax, perlu didukung dengan adanya kerjasama antara Pemkab Bandung Barat dan BSSN tentang penyelenggaraan kemanan informasi, serta Pelatihan/Pendidikan bagi aparatur dalam pengelolaan sertifikat elektronik dan keamanan informasi terutama terkait literasi digital.

16.Kebudayaan

Pemetaan potensi budaya di Kabupaten Bandung Barat tertuang pada Data Potensi Adat Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat No. 188.45/Kep.196-Disparbud/2019 Perihal Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pada dokumen tersebut tercatat ada 40 jenis adat budaya baik berupa budaya tradisi/ritual, cerita rakyat, upacara tradisional, permainan rakyat dan jenis lainnya. Capaian pelestarian nilai budaya local Kabupaten Bandung Barat dari 40 jenis adat budaya sampai dengan tahun 2024 baru terealisasi 55 jenis. Dalam rangka pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya dari total potensi di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 173 objek, capaiannya semakin meningkat tahun 2020 sebanyak 4 objek telah dilestarikan dan tahun 2024 meningkat menjadi 30 objek benda, situs dan kawasan cagar budaya telah dilestarikan.

Tabel 2.133. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	4	8	20	30	30
Jumlah Nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang di lestarikan	Budaya	1	2	1	1	1
Persentase Budaya Lokal yang Dilestarikan Dalam Mendukung Pariwisata	%	-	-	6	29,26	38,51
Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	-	-	32	33,52	25
Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kompetensinya	%	-	-	0	0	8,58
Persentase pembinaan sumber daya manusia/lembaga dan informasi sejarah	%	-	-	25	0	51
Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan	%	-	-	60	15	55

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

17. Perpustakaan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, dilaksanakan melalui pelayanan perpustakaan, penyediaan buku perpustakaan daerah, perpustakaan desa, perpustakaan keliling maupun dalam bentuk taman bacaan masyarakat.

Capaian indikator kinerja urusan perpustakaan selama periode Tahun 2020-2024 rata-rata realisasi menunjukkan capaian yang positif, Koleksi buku perpustakaan daerah semakin banyak pada tahun 2020 tersedia 62.206 buku dengan 14.826 judul menurun di tahun 2024 menjadi 48.343 buku dengan 11.976 judul buku. Sedangkan nilai kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan dengan capaian berpredikat "B". Indikator capaian penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.134. Indikator Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah	62.206 Explr	65.826 Explr	70.980 Explr	72.793 Explr	48.343 Eksemplar
	14.826 Judul	15.188 Judul	17.877 Judul	18.510 Judul	11.976 Judul
Jumlah koleksi E-Book	-	1.869 Explr	5.139 Explr	5.145 Explr	5.145 Eksemplar
	-	1.014 Judul	2.107 Judul	2.080 Judul	2.080 Judul
Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Daerah, Sekolah, Desa, PT dan Perpus Khusus	7.809 orang	5.331 orang	10.936 org	68.528 org	319.356 Orang
Jumlah Perpustakaan Desa	70	71	71	66	61
Jumlah Taman Bacaan Masyarakat	12	12	12	50	56
Jumlah Kendaraan Perpustakaan Keliling	5	5	5	5	6
Layanan Kunjungan Perpustakaan Keliling	15 titik	-	18 titik	34 titik	43
Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	N/A	Predikat B	Predikat B	Predikat B	Predikat B
Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	-	47,18	47,80	64,74

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

18. Kearsipan

Capaian kinerja pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 30 persen menjadi 66 persen di tahun 2023, tetapi masih perlu dilakukan pembinaan terhadap pengelola arsip di Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelamatan arsip, capaian mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 20 persen menjadi sebesar 66 persen ditahun 2024.

Tabel 2.135. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun tahun 2020 – 2024

Indikator	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah arsip yang sudah dilakukan penyelamatan	20	30	31	46	66
Persentase Arsip PD yang sudah di Kelola secara baku	19	20	25	34	39
Indeks Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	71,17
Nilai pengawasan kearsipan eksternal	N/A	N/A	N/A	N/A	74,65
Nilai pengawasan kearsipan internal	N/A	N/A	N/A	N/A	65,96

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

2.1.6.3 Layanan Urusan Pilihan

Aspek pelayanan umum fokus urusan pilihan pada than 2020-2024 terdiri dari 6 (enam) urusan, yaitu:

1. Kelautan dan Perikanan

Produksi komoditas perikanan unggulan di Kabupaten Bandung Barat mengalami progres peningkatan berkisar antara 42 ribu – 47 ribu ton/tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.136. Data Produksi Ikan Kab. Bandung Barat Tahun 2020-2024

Produksi Ikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Ikan (Ton)	42.327	44.161	46.760	49.123	51.586

Sumber: Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Adapun jenis produk komoditas unggulan Kabupaten Bandung Barat diantaranya: Ikan Mas, Nila, Patin, Lele dan Gurame dengan komoditas terbesar adalah jenis komoditas ikan patin dan ikan mas, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.137. Produksi Komoditas Perikanan Unggulan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

No	Komoditas Ikan	Produksi Ikan Tahun 2020	Produksi Ikan Tahun 2021	Produksi Ikan Tahun 2022	Produksi Ikan Tahun 2023	Produksi Ikan Tahun 2024
1	Ikan Mas	15.763,99	14.097,74	14,063.87	15.531,21	20.042,41
2	Ikan Nila	18.450,00	21.627,23	21,054.44	23.715,90	23.180,72
3	Ikan Patin	5.849,56	6.077,52	6,204.65	6.444,31	4.059,93
4	Ikan Lele	1.917,19	1.981,37	-	2.772,30	3.771,22
5	Gurame	345,98	377,57	41:36:00	659,03	531,43
Jumlah		**42.326,72**	**44.161,43**	**41.364,32**	**49.122,75**	**51.585,70**

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

Adapun capaian indikator urusan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.138. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase Penyebaran Benih	Persen	-	11	15,1	12,9	13,1
Jumlah RTP	RTP	2.689	4.872	5.030	3.019	3.459
Jumlah Kelompok Pelaku Usaha pengolahan hasil perikanan	Kelompok	80	80	83	86	86

Peningkatan Jumlah Unit usaha budidaya dan pembenihan perikanan yang menerapkan CBIB/CPIB	Unit	15	20	20	20	32
Persentase pengolahan ikan yang menerapkan SSOP	%	-	-	35	38,46	42,31

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

2. Pariwisata

Berdasarkan data potensi pariwisata, sampai dengan tahun 2024 terdapat 158 objek wisata di Kab. Bandung Barat dimana 2 diantaranya dikelola oleh Pemda yaitu: Situ Ciburuy, Gua Pawon dan Curug Malela dan sisinya 160 objek wisata dikelola oleh swasta. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kab. Bandung Barat pada tahun 2024 dengan realisasi sebanyak 3.434.829 orang mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan dibanding tahun 2022 sebanyak 5.045.679 orang. Sektor pariwisata sebagai penyumbang PAD, dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor pariwisata perlu peningkatan upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat melalui promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif pendukung pariwisata serta peningkatan fasilitas pendukung pariwisata, dengan capaian indikator kepariwisataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	4.088.811	4.497.692	5.045.679	4.829.886	3.434.829
Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemda	Objek	3	3	2	2	2
Jumlah Obyek Wisata yang dikelola pihak swasta	Objek	143	155	155	156	157
Hotel/Penginapan/Vila	Unit	89	90	95	95	96
Jumlah Tamu yang Menginap	Orang	134.350	147.785	607.390	401.353	579.179
Restoran, Rumah Makan, Café	Unit	135	141	142	143	146
Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (Ekraf)	Jumlah	350	1.494	615	1,427	1,735
Jumlah pelaku usaha industri kreatif, penggerak pariwisata dan budaya yg meningkat kompetensi	Pelaku Usaha	70	75	105	225	170
Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar	%	23	35,29	55,56	53,33	60,44
Presentase kegiatan promosi pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang efektif	%	100	100	77	42,85	100

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase Desitinasi Wisata yang dikembangkan	%	-	-	42	16,67	25
Persentase Jumlah kunjungan Wisatawan	%	-	-	12	-4	-29
Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan yang Akan Didaftarkan HAKI	%	-	-	91	86	19
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi sertifikasi profesi dan kompetensinya	%	-	-	3,25	3,09	7,32

Sumber: Dinas Perikanan dan Perikanan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

3. Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha salah satunya adalah sektor pertanian yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 12,63 persen pada tahun 2024 turun dari kontribusi tahun 2023 sebesar 12,73 persen atau mengalami pelambatan sebesar -0,10 persen. Pada sub sector pertanian tanaman pangan, Tanaman padi sebagai komoditas pangan utama bila dilihat dari produksinya mengalami kenaikan untuk padi sawah di tahun 2024 menjadi 289.395 ton dibanding tahun 2023 dengan capaian 258.451 ton, dengan lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 2.140. Realisasi Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

No	Tanaman Pangan	Luas Tanam (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi Sawah	46.291	42.217	44.735	39.229	46.515
2	Padi Ladang	858	1.035	415	56	829
No	**Tanaman Pangan**	**Luas Panen (Ha)**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Padi Sawah	46.247	43.199	45.807	39.754	43.765
2	Padi Ladang	1.186	1.055	416	551	428
No	**Tanaman Pangan**	**Produksi (Ton)**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Padi Sawah	299.139	279.990	297.093	258.451	289.395
2	Padi Ladang	4.654	3.355	1.635	2.162	2.141

Sumber Dinas Ketahana Pangan dan Pertanian, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Nilai tukar petani yang merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (lb) menunjukan tren meningkat dimana NTP tahun 2022 sebesar 109 meningkat menjadi 112,17 di tahun 2024. Capaian indikator urusan sub sektor pertanian tahun 2030-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.141. Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Pertanian Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Pertumbuhan sektor pertanian	%	-0,62	-1,03	4,11	1,59	5,56
Jumlah Produksi Komodistas Pertanian (Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan)	Ton	387.939	444.368	457.816	425.446	358.812
Nilai Tukar Petani	point	101,42	108,34	109	113,86	112,17
Jumlah Ahli Pertanian Berkualitas	orang	83	83	89	100	100
Jumlah penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis	orang	45	25	17	45	45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

Sedangkan realisasi capaian sub sector peternakan, untuk produktifitas hasil peternakan seperti daging, susu dan telur, dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan di dalam daerah juga sebagian dijual ke daerah lain, dengan jumlah potensi komoditas hasil peternakan dan dengan capaian sub sector peternakan dapat dilihat pada tabel berikut:adalah sebagai berikut:

Tabel 2.142. Realisasi Komoditas Peternakan di Kab Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

Komoditas	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Daging Sapi	5.667.360 kg/Tahun	5.488.866 kg/Tahun	5.512.777 Kg/Tahun	6.868.437 Kg/ Tahun	5.783.647 Kg/ Tahun
Daging Ayam	16.926.150 kg/Tahun	16.888.469 kg/Tahun	16.893.290 Kg/Tahun	17.570.618 Kg/Tahun	12.199.726 Kg/Tahun
Susu	95.099.514 Liter/Tahun	94.443.188 Liter/Tahun	57.992.138 Liter/Tahun	67.012.252 Liter/Tahun	56.341.479 Liter/Tahun
Telur Ayam	5.749.109 kg/Tahun	5.733.099 kg/Tahun	5.734.991 Kg/Tahun	5.738.910 Kg/Tahun	1.980.258 Kg/Tahun
Telur Bebek	2.217.302 kg/Tahun	2.216.806 kg/Tahun	2.217.070 Kg/Tahun	2.220.679 Kg/Tahun	898.529 Kg/Tahun

Sumber Data : Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.143. Capaian Indikator Kinerja Sub Urusan Peternakan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Persentase Kenaikan Produksi Peternakan	%	N/A	4,1	-32	15	9.7
Produksi Daging	Kg	24.769	24.548	27.418	24.434	26.621
Produksi Telur	Kg	1.405	1.966	659	2.220	2.019
Produksi Susu	liter	84.210	97.088	57.992	67.012	66.561
Persentase kelahiran Ternak	Persen	74	75	94	82,68	80
Cakupan pelayanan kesehatan hewan	Persen	-	63	77,3	80	100
Prevalensi Brucellosis (%)	Persen	-	2	2,2	3	3
Persentase Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi	Persen	-	78	100	100	100
Tefasilitasinya Penerbitan izin usaha peternakan	Persen	-	100	100	100	100
Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik	%	-	-	100	100	100
Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak	%	-	-	100	100	100
Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi	%	-	-	78	80	85
Persentase kelompok peternak yang naik kelas	%	-	-	10	15	16
Persentase Cakupan pelayanan kesehatan hewan	%	-	-	71,50	77,50	80

Sumber: Dinas Perikanan & Peternakan, Kab. Bandung Barat, 2025, yang dikelola dalam SIPD

4. Perdagangan

Peranan distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat pada tahun 2020-2024 salah satunya adalah sektor perdagangan, dengan kontribusi sebesar 12,38 pada tahun 2024 menurun dibanding kontribusi tahun 2023 sebesar 12,40 atau bila dilihat dari pertumbuhannya sector perdagangan di tahun 2024 mengalami pelambatan sebesar 0,20 persen dari total PDRB. Pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesaar 1,53% untuk pengembangan usaha produk ekspor unggulan dan penurunan pada indikator standarisasi perlindungan konsumen dari capaian tahun 2023 sebesar 40 persen menjadi 26,31 di tahun 2024. Tetapi sector perdagangan tetap optimis dalam meningkatkan perekonomian hal ini terlihat dari pertumbuhan pelaku usaha sector perdagangan menjadi 4.431 di tahun 2024 atau meningkat bila dibandingkan dengan capaian 2023 sebesar 4.370. Berikut capaian indikator kinerja urusan perdagangan, tahun 2020 - 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.144. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Pertumbuhan sektor perdagangan	%	12,89	12,69	12,35	12,4	12,38
Persentase peningkatan standarisasi dan perlindungan konsumen	%	19	29	40	26,31	27,10
Persentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	%	0	0	50	48,47	50
Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	%	1.960	3,880	4,268	4,370	4.431
Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	20	30	33	31,79	50,1
Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten Kota	Keg	0	2	7	3	3
Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Keg	70	120	150	90	100
Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	%	-	-	40	26	50
Nilai ekspor barang dan jasa	Milyar	-	-	2.493,01	2.118,28	3.036,10
Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	%	-	-	10	2,4	10
Persentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	%	-	-	33	31,79	33

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

5. Perindustrian

Perindustrian merupakan sektor yang berperan penting bagi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, terlebih pada jenis agroindustri. Diketahui bahwa pertumbuhan industri (baik industri kecil, sedang dan besar), terus mengalami peningkatan. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Peranan distribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami tren meningkat tiap tahunnya pada tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 40,33 persen terus meningkat sampai dengan tahun 2024 berkontribusi sebesar 40,85 persen atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,52 persen.

Terdapat kondisi terjadi penurunan dalam pengembangan IKM dari realisasi tahun 2022 sebesar 405 turun menjadi 26,75% ditahun 2023, tetapi perijinan IKM dan industry yang terintegrasi ke dalam SINAS mengalami tren meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Berikut indikator urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.145. Capaian Indikator Kinerja Urusan Industri Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	-2,42	4,87	6,43	5,3	3,14
Prersentase Pengembangan IKM	%	20,67	28	40	26,75	45
Pertumbuhan industri yang berizin	%	37,87	39,73	41,41	52,20	63,36
Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SINAS	%	28,65	29,21	30,38	33,71	35,17
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	40,33	41,40	41,6	41,16	40,85

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD

6. Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi melalui program transmigrasi regional. Program tersebut ditunjang oleh kegiatan monitoring dan penempatan transmigrasi. Monitoring tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk melihat kondisi daerah yang akan dijadikan sebagai daerah penempatan transmigrasi. Hal tersebut dikarenakan sudah semakin berkurangya tanah yang akan dibuka untuk penempatan transmigrasi. Tetapi pada tahun 2021 indikator urusan transmigrasi berubah menjadi presentase transmigran mandiri dengan capaian sebesar nol persen hal ini karena baru pada tahap sosialisasi kepada 54 orang calon transmigran dan s.d tahun 2024 telah terdaftar 25 orang calon transmigrasi.

2.1.6.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

Unsur pendukung urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung capaian reformasi birokrasi dan Sekretariat DPRD, dalam rangka fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Bandung Barat dengan capaian indikator selalu patuh tepat waktu dengan capaian tiap tahun sebesar 100 persen. Salah satu indikator peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah bidang perekonomian pembangunan adalah melalui pengukuran level kematangan/maturitas PBJ.

Indikator ini menggambarkan tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Capaian indikator tingkat kematangan UKPBJ Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2024 berada pada Level 2 (Repeatable) UKPBJ, dengan capaian indikator terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.146. Capaian Indikator Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	point	80,29	80,75	82,39	82,65	84,26
Persentase data & informasi bid. Perekonomian yang di gunakan sebagai policy brief	%	70	85	80	85	90
Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	30	90	75	100	85
Center of excelent pengadaan barang jasa	%	100	100	100	100	100%
Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	90	100	100
Persentase Perda yang ditetapkan	%	60	90	85	100	85.71
Persentase Data dan Informasi Bidang Sosial yang digunakan sebagai Policy Brief	%	80	80	85	100	100
Persentase Laporan penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Persentase Layanan Keuangan, Kesejahteraan dan Administrasi DPRD	%	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	point	-	82,35	83,25	81,98	82,91%

Sumber: Setda dan Sekretariat DPRD, diolah Bappelitbangda ,2025, yang dikelola dalam SIPD

Sedangkan bila dilihat dari capain kinerja Sekretariat DPRD bahwa Persentase Perda yang ditetapkan s.d tahun 2024 menjelang tahun terakhir masa bakti DPRD dengan capaian penetapan Perda adalah sebesar 100 persen. Indikator dalam rangka fasilitasi dukungan terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang diukur dengan Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan capaian 83,25 persen menjadi 82,91 di tahun 2024.

2.1.6.5 Unsur Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

Unsur penunjang urusan Pemerintah Daerah mencakup urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan serta unsur pengawasan yang dilaksanakan oleh Bappelitnbangda, BKPSDM, BKAD, Bapenda, Inspektorat Daerah dan seluruh sekretariat di Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.147. Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Indeks Reformasi Birokrasi	poin	57,60	57,81	60,97	72,27	80,77
Nilai SAKIP	poin	67,04 B	67,55 B	68,03 B	68,59 B	68,85 B
Nilai Komponen Sakip Perencanaan Kinerja	poin	24,45	24,58	24,75	24,80	27,70
Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja	poin	15,6	15,86	15,94	16,09	16,21
Indeks Merit	skore	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3
Opini BPK	opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	7,36	13,41	32,12	10,8	15,98
Persentase peningkatan pengelolaan aset daerah	%	80,78	77	111,16	64	87
Presentase Aparatur yang mendapatkan Pembinaan Kepegawaian	%	65	79,34	61,7	78,61	80
Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	%	42,77	70	75	75	80
Persentase diseminasi hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100
Persentase Rekomendasi Temuan BPK RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti oleh PD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda, BKAD, Bappenda, BKPSDM, 2025, yang dikelola dalam SIPD

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Nilai IRB Kab. Bandung Barat pada tahun 2020 masuk pada kategori CC (CUKUP) dengan nilai 57,60. Nilai IRB Kab. Bandung Barat meningkat pada tahun 2024 menjadi katagori A dengan nilai sebesar 80,77. Capaian indikator SAKIP Kabupaten Bandung Barat pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun masih pada katagori "B" tetapi secara nilai mutu pada Tahun 2020 sebesar 67,04 terus mengalami kenaikan s.d tahun 2024 menjadi sebesar 68,85. Dari sisi perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang menjadi kewenangan bappelitbangda capaian komponen SAKIP masih pada katagori sedang, pada tahun 2024 dan 2025 merupakan tahun perencanaan dimana Bappelitbangda harus menyusun dokumen perencanaan secara simultan yaitu RPJPD 2025-2045, RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD tahun 2025 dan 2026.

Capaian indikator urusan keuangan terkait pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah lebih baik dengan capaian opini BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah s.d tahun 2024 dengan opini WTP. Sedangkan bila dilihat dari indikator persentase peningkatan pendapatan daerah Kab. Bandung Barat meningkat menjadi 15,98 persen di tahun 2024 dibanding tahun 2023 sebesar 10,8 persen. Indeks Sistem Merit ASN merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Capaian indeks sistem merit ASN di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2020 – 2024 telah baik dengan capaian katagori 3 dengan nilai sebesar 0,81 poin.

2.1.6.6 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum di Kabupaten bandung Barat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan capaian secara umum kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan umum menunjukkan kinerja yang baik, yeitu terdapat beberapa indikator yang mengalami kenaikan capaian di tahun 2024, diantaranya Persentase penyelesaian jumlah potensi konflik social, Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, indeks kerukunan umat beragama, dengan rincian capaian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.148. Capaian Indikator Kinerja Unsur Pemerintahan Umum di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 – 2024

Bidang Urusan / Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Presentase Konflik Sosial yang Ditangani	%	80,49	80,46	84,86	81,17	100
Persentase fasilitasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	*	*	83,18	106,25	100
Persentase fasilitasi Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	*	*	98,12	41,67	100
Presentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik Di Masyarakat	%	*	*	75	75	75
Persentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	*	*	50,00	75	88,89
Persentase Fasilitasi Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	*	*	47,62	88,14	100

Sumber: BadanKesbangpol, diolah Bappelitbangda,2025, yang dikelola dalam SIPD (*) indikator baru pada RPD

2.1.7 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah agenda kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas hak asasi manusia dan kesetaraan, bersifat universal, holistik, terintegrasi, inklusif dan membutuhkan kemitraan dan partisipasi antar pihak. TPB/SDGs memiliki 17 tujuan yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030, adapun 17 tujuan tersebut diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) pilar, yaitu:

1) Pilar Sosial, bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan manusia berkualitas, terdiri dari 5 (lima) tujuan:
   - Tujuan 1 Tanpa kemiskinan
   - Tujuan 2 Tanpa kelaparan
   - Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
   - Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
   - Tujuan 5 Kesetaraan Gender
2) Pilar Ekonomi meliputi penyediaan energi untuk semua, faktor penting dalam mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan dan penurunan kemiskinan, terdiri dari 5 (lima) tujuan:
   - Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
   - Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
   - Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
   - Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
   - Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
3) Pilar Lingkungan merupakan landasan semangat transformatif pembangunan berkelanjutan, terdiri dari 6 (enam) tujuan:
   - Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi yang Layak
   - Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
   - Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
   - Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
   - Tujuan 14 Ekosistem Laut
   - Tujuan 15 Ekosistem Daratan
4) Pilar Hukum dan Tata Kelola terdiri dari 1 (satu) tujuan yaitu tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Untuk mengetahui kesiapan pencapaian SDGs Kabupaten Bandung Barat, Bappelitbangda bekerjasama dengan SDGs Center Unpad mengevaluasi capaian SDGs Kabupaten Bandung Barat dengan menganalisis baseline atas 63 indikator (apabila memperhitungkan sub-indikator menjadi 92 indikator) dari 13 tujuan SDGs, 4 tujuan yaitu tujuan 12-Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, tujuan 13-Penanganan Perubahan Iklim, tujuan 14-Ekosistem Lautan, dan tujuan 15-Ekosistem Daratan tidak dianalisis karena keterbatasan data.

Sumber data yang digunakan diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Pusat Data dan Informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Pusdatin Kemnaker) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes). Hasil evaluasi diperoleh dengan melakukan proyeksi pencapaian indikator TPB/SDGs di tahun 2030 dengan asumsi skema Business As Usual (BAU) kemudian membandingkannya dengan target SDGs yang telah ditentukan. Apabila hasil proyeksi mencapai atau hampir mencapai (97.5%) target TPB/SDGs maka akan diberikan nilai A (skor 4). Suatu indikator akan diberikan nilai B (skor 3) jika hasil proyeksi pada tahun 2030 mendekati target TPB/SDGs setidaknya 90%. Bernilai C (skor 2) apabila hasil proyeksi lebih dari 75% menuju target TPB/SDGs.

Nilai D (skor 1) diberikan jika hasil proyeksi pencapaian indikator di tahun 2030 setidaknya mencapai 50% dari target TPB/SDGs. Dan bernilai E (skor 0) jika indikator masih cukup jauh untuk mencapai target TPB/SDGs (dibawah 50%). Daftar Indikator Terpilih (Data, Target, Dan Scorecard Indikator) untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut

Tabel 2.149. Daftar Indikator Terpilih (Data, target, dan scorecard indikator) untuk Tiap Tujuan SDGs di Kabupaten Bandung Barat

TUJUAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025[a]	2030[a]	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	12.67	9.38	10.49	7.82	6.33	6.335	A	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : Data tahun tersebut belum tersedia.
1	1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (B40)(%)	69,91	76.05	b	100	100	100	A	BPS Susenas	2015-2019	
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (B40)	47,62	61.80	61.13	66.12	74.02	100	D	BPS Susenas	2002-2019	
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (B40)	36,13	34.80	48.05	52.30	54.77	100	D	BPS Susenas	2002-2019	
1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (B40)	17.9	13.68	11.87	7.27	4.99	0	B	BPS Susenas	2006-2019	
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat (B40) (%)	96.82	97.33	97.45	99.80	100	100	A	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat (B40) (%)	73.51	77.46	72.42	81.13	85.04	100	C	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat (B40) (%)	40.03	39.87	51.74	66.56	83.01	100	C	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (B40)	64.25	71.19	77.03	94.14	100	100	A	BPS Susenas	2004-2020	
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (B40)	100	100	b	100	100	100	A	BPS Susenas	2001-2019	
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Kontrak/Sewa)	2.60	7.51	3.71	4.99	5.39	38.34	E	Susenas KOR	2010-2020	
1	1.4.2*	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (Milik Sendiri)	91.44	83.25	83.89	84.19	83.60	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	5,34[f]	4,2	5,06	3,35	1,93	3,6	A	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2017-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : Data tahun tersebut belum tersedia. c : data 2007. d : data 2013. e : data tahun 2016. f : data tahun 2017. g : data tahun 2018.
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	22,4[d]	b	13,48[g]	17,94	17,94	0	C	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Prov Jabar	2007-2018	
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	16,9	9,4[e]	16,7[f]	13,43	12,93	0	C	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2017	
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.(0-59 Bulan)	52,5[d]	b	36,69[g]	44,59	44,59	31,5	C	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Prov. Jabar	2007-2018	
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	29,6	32,6[e]	34,3[f]	32,16	32,16	17,76	C	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2017	
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita. (0-59 Bulan)	13,2[d]	b	9,67[g]	11,43	11,43	5	B	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)Prov. Jabar	2007-2018	
2	2.2.2*	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak di bawah lima tahun/balita.	7,3	5,6[e]	8,19[f]	7,03	7,03	5	A	Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES	2015-2017	

TUJUAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025[a]	2030[a]	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	83,06	100	97,01	100	100	100	A	BPS Susenas	2001-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : data tahun 2018.
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan	78,40	100	95,96	100	100	100	A	Susenas KOR	2015-2020	
3	3.7.1*	Proporsi perempuan berumur 15-49 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi modern	56,29	48,74	45,84	44,26	40,10	64,55	D	Susenas KOR	2010-2020	
3	3.8.1.(a)	Proporsi penduduk yang sakit tetapi tidak berobat jalan	2,61	15,23	7,91	7,73	8,43	0	B	Susenas KOR	2010-2020	
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 10% Total Pengeluaran Rumah Tangga)	1,80[b]	3,41	1,15	2,11	2,11	0	A	Susenas KOR	2018-2020	
3	3.8.2*	Persentase Penduduk dengan Pengeluaran Rumah Tangga yang Besar untuk Kesehatan Sebagai Bagian dari Total Pengeluaran Rumah Tangga (Lebih dari 25% Total Pengeluaran Rumah Tangga)	0,23[b]	0,97	0,11	0,44	0,44	0	A	Susenas KOR	2018-2020	
3	3.a.1*	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang pernah merokok tembakau	12.67	36,18	35,05	34,79	34,52	0	D	Susenas KOR	2015-2020	
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	108.58	104.22	104.54	105.74	106.27	100	A	BPS Susenas	2001-2020	a : Hasil Analisis Proyeksi.
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	93.18	90.65	90.99	97.21	100.80	100	A	BPS Susenas	2001-2020	b : Data tidak tersedia pada
4	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	58.30	65.88	66.99	103.96	142.61	100	A	BPS Susenas	2001-2020	tahun tersebut
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 tahun.	7.81	8.71	.b	9.23	9.87	12	C	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SD/Sederajat	88.91	98.33	96.10	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMA/Sederajat	33.33	61.29	61.83	68.52	81.36	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.1.2*	Tingkat Penyelesaian Pendidikan jenjang SMP/Sederajat	66.94	81.18	84.26	94.28	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	89.48	91.56	98.55	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	32.38	30.64	.b	57.03	86.58	100	C	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	9.72	13.95	16.17	19.24	22.79	42.08	D	BPS Susenas	2001-2020	
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-24 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	35.03	84.43	91.73	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.4.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15-59 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	16.93	61.54	69.75	82.48	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	84.80	157.16	141.70	94.29	94.29	100	B	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	.b	11.83	75.00	16.18	16.18	100	E	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	98.65	103.67	98.05	100.23	100.23	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	108.62	108.55	101.84	104.90	104.90	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/Sederajat untuk perempuan/laki-laki	121.84	106.01	119.19	114.05	114.05	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	66.53	58.82	105.72	55.56	55.56	100	D	Susenas KOR	2010-2020	

TUJUAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025[a]	2030[a]	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, untuk perempuan/ laki-laki	94.11	101.94	112.62	105.15	105.15	100	B	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil Analisis Proyeksi. b : Data tidak tersedia pada tahun tersebut
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	75.25	90.21	78.06	77.77	77.77	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk perempuan/ laki-laki	134.02	224.09	208.34	107.27	107.27	100	B	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat Perguruan Tinggi untuk kuintil terbawah/teratas	.b	.b	43.48	15.40	15.40	100	E	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	107.04	102.45	98.08	101.16	101.16	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	100.70	99.12	98.44	100.27	100.27	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	94.41	105.15	119.23	113.44	113.44	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMA/SMK/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	65.07	67.45	72.24	52.88	52.88	100	D	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk perempuan/ laki-laki	97.50	101.44	104.67	106.40	106.40	100	B	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SMP/sederajat untuk kuintil terbawah/teratas	77.95	96.61	74.19	80.12	80.12	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.6.1.(a)	Proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin/arab/lainnya	98.90	99.51	99.66	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun (%)	99.91	99.95	99.91	100	100	100	A		2001-2020	
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun (%)	100	100	100	100	100	100	A		2001-2020	
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 15 tahun	2.18	0.80	2.35	b	2.94	0.00	B	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : tidak ada data pada tahun tersebut. c : data tahun 2017
5	5.3.1*	Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin sebelum berumur 18 tahun	22.37	18.35	19.12	20.49	19.57	0.00	C	Susenas KOR	2010-2020	
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	12.67	23.18	21.84	18.52	18.52	50	E		2010-2020	
5	5.b.1*	Proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir	55.10	61.76	56.63	76.33	86.05	100	C	Susenas KOR	2015-2020	
6	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	32.28	35.41	37.57	30.69	28.21	88.20	E	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi. b : data tahun 2017
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	12.67	72.43	68.39	82.84	99.30	100	A	BPS	2002-2020	
6	6.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	48.55[b]	56.63	73.99	100	100	100	A	Susenas KOR	2017-2020	
6	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	43.04	59.47	71.47	74.95	82.49	100	C	Susenas KOR	2010-2020	

TUJUAN	KODE INDIKATOR	INDIKATOR	2015	2019	2020	2025[a]	2030[a]	TARGET	NILAI	SUMBER DATA	TAHUN	KETERANGAN
7	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	78.92	85.98	90.64	100	100	100	A	Susenas KOR	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.75	4.05	-3.27	4.26	4.26	7	D	BPS	2011-2020	a : Hasil analisis proyeksi.
8	8.1.1.(a)	PDB per kapita (ribu rupiah)	20861.14	27754.69	27101.68	39599.07	57859.38	119635.88	E	BPS	2010-2020	b : tidak ada data pada
8	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	9.18	2.32	4.40	3.73	3.73	3.78	A	BPS	2011-2020	tahun tersebut. c : data tahun 2017
8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal	75.88	55.22	59.48	55.90	55.62	25	D	BPS Sakernas	2010-2020	
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	24.12	44.78	40.52	44.10	44.38	75	D	BPS Sakernas	2007-2020	
8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	81.36	88.67	.b	81.00	80.47	-	B	BPS Sakernas	2007-2019	
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam kerja	7348.22	14872.91	.b	18343.98	22157.91	-		BPS Sakernas	2007-2019	
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	10.01	8.24	12.25	10.86	10.86	3.80	B	BPS Sakernas	2007-2020	
8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	12.01	5.95	12.48	9.26	9.26	-		BPS Sakernas	2010-2020	
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	35.80	28.15	37.09	27.10	25.19	3.80	C	BPS Sakernas	2017-2020	
8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (dalam juta)	24.02	36.34[c]	.b	26.93	28.94	36.03	C	BPS Susenas	2002-2017	
9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	0.17	0.21	0.18	0.18	0.18	0.33	D	BPS Sakernas	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi
10	10.1.1*	Koefisien Gini	0.34	0.36	0.38	0.41	0.44	0.31	D	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	2001-2020	a : Hasil analisis proyeksi
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan	4.29	8.86	5.18	7.98	8.44	0	B	Susenas KOR	2001-2020	
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	13.25	24.41	31.46	58.48	100	100	A	BPS Susenas	2012-2020	a : Hasil analisis proyeksi
16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	0.16	0.82	1.28	0	0	0	A	BPS Susenas	2001-2020	a : Hasil analisis proyeksi
16	16.3.1.(a)	Proporsi penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dan melapor ke polisi	24.81	18.92	34.98	33.53	43.16	100	E	Susenas KOR	2010-2020	
16	16.9.1*	Proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran	74.04	61.59	68.65	81.32	87.33	100	C	Susenas KOR	2010-2020	
17	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet	13.94	48.11	55.12	100.00	100.00	100.00	A	BPS Susenas	2010-2020	a : Hasil analisis proyeksi

Sumber : Kajian Studi Baseline Indikator TPB/ SDGs KBB, Litbnag Bappelitbangda.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai 2,61 atau C. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai TPB/SDGs masih cukup berat. Hasil proyeksi pencapaian SDGs hingga tahun 2030 berdasarkan scorecard dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.150. Hasil Proyeksi Pencapaian SDGs Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2030 Berdasarkan Scorecard

No.	*Scorecard*	Jumlah Indikator
1	A	37
2	B	11
3	C	21
4	D	12
5	E	7
6	Belum dapat ditentukan nilainya	4
Total		92

Sumber : Kajian Studi Baseline Indikator TPB/ SDGs KBB, Litbnag Bappelitbangda

Kabupaten Bandung Barat diproyeksikan masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat dalam capaian indikator-indikator SDGs-nya. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari banyaknya indikator yang masih memiliki nilai scorecard C, D dan bahkan E (tabel 2.145). Indikator dengan nilai C, D, E diklasifikasikan berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang pendidikan ditunjukkan dengan APM SD, SMP dan SMA yang masih jauh dari target terutama disagregasi berdasarkan kuintil untuk SD dan SMA; APK SMP, SMA, PT, PAUD berdasarkan kuintil untuk SMA dan PT; rata-rata lama sekolah dan tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/sederajat.
2) Bidang kesehatan ditunjukkan dengan angka stunting dan underweight yang masih tinggi; penduduk di bawah 15 tahun yang merokok; rendahnya penggunaan alat kontrasepsi, dan rendahnya sumber air dan sanitasi layak di Kabupaten Bandung Barat.
3) Bidang ekonomi ditunjukkan dengan tingginya angka usia muda yang tidak bersekolah dan tidak bekerja; rendahnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara; rendahnya laju PDB per kapita; tingginya lapangan kerja informal; rendahnya tenaga kerja formal (termasuk tenaga kerja industri manufaktur); serta semakin meningkatnya koefisien gini.
4) Bidang sosial ditunjukkan dengan rendahnya proporsi penduduk berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran; rendahnya proporsi penduduk yang menguasai/memiliki telepon seluler dalam 3 bulan terakhir; tingginya proporsi perempuan 20-24 yang kawin sebelum 18 tahun; rendahnya proporsi rumah yang memiliki hak atas tanah milik sendiri terutama kontrak/sewa dan rendahnya proporsi perempuan yang menempati managerial;

Berdasarkan hasil dari analisis SDGs interlinkages yang disusun oleh SDGs Center Unpad untuk Kab. Cirebon (Komarulzaman dkk, 2020), dengan menggabungkan hasil analisis baseline Kabupaten Bandung Barat dan juga analisis interlinkages tersebut (Komarulzaman dkk, 2020), Kabupaten Bandung Barat disarankan untuk memprioritaskan indikator-indikator sebagai berikut:

1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak
2) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat (*B40) (%)
3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat (*B40) (%)

   * Keterangan : B40 adalah penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah* (kuintil 1 dan kuintil 2).
4) Persentase tenaga kerja formal
5) Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.

2.1.8 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bagi warga negara. Sebagaimana dimanatkan dalam aturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik pada level Provinsi maupun level Kabupaten/Kota dimana menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu di muat dalam dokumen RPJMD dan RKPD, ayat (2) disebutkan bahwa Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencanan pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Daetah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun pembiayaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa penerapan SPM itu memiliki 4 tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data
2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Sementara itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan dan melekat dalam pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana terdapat 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yang diantaranya ialah urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Adapun jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

2.1.8.1 SPM Bidang Pendidikan

Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dengan melaksanakan 3 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 2 Program dan 5 Kegiatan dengan tingkat capaian kinerja SPM sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.151. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Pendidikan

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pendidikan Dasar	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2	Pendidikan Anak Usia Dini		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3	Pendidikan Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

Dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Strandar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.152. Permasalahan SPM Bidang Pendidikan

No	Kategori	Permasalahan
1	Pengumpulan Data	• Pengumpulan data yang tidak terintegrasi antar Bidang; • Keterbatasan sistem informasi yang menyebabkan data sulit diakses dan dianalisis.
2	Penghitungan Kebutuhan	• Ketidakakuratan dalam perhitungan kebutuhan sumber daya seperti tenaga pengajar, sarana prasarana, dan anggaran; • Data yang tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya di lapangan.
3	Perencanaan dan Penganggaran	• Penganggaran yang tidak mencakup semua aspek yang diperlukan dalam peningkatan mutu pendidikan; • Perencanaan yang tidak berbasis pada kebutuhan nyata dan data yang valid
4	Pelaksanaan	• Pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan rencana karena kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan; • Kurangnya evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan instrumen lainnya.
5	Permasalahan Lain	• Tidak adanya mekanisme evaluasi yang sistematis dan terus menerus terhadap implementasi SPM; • Kurangnya feedback dari pihak terkait dalam peningkatan

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

2.1.8.2 SPM Bidang Kesehatan

Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dengan melaksanakan 11 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan dengan tingkat capaian kinerja SPM sebesar 89,37%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.153. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Kesehatan

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
3	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
5	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
6	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
7	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
8	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
9	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
10	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
11	Pelayanan Kesehatan Balita		

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

Dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Strandar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.154. Permasalahan SPM Bidang Kesehatan

No	Kategori	Permasalahan
1	Pengumpulan Data	• Perlu adanya penyesuaian untuk pemeriksaan K1 USD dan K6 USG karena USG baru terdistribusi pada akhir thaun 2023; • Data yang sudah didapat tidak terkumpulkan di puskesmas; • Target terlalu tinggi sehingga petugas dan kader di lapangan kesulitan mencari sasaran; • Target terlalu tinggi sehingga petugas dan kader di lapangan kesulitan mencari sasaran;

		• Sarana prasarana laptop, jaringan internet, SDM terlatih input data dalam system informasi HIV masih kurang; • Laporan puskesmas pengiriman tidak tepat dan sering salah hitung..
2	Penghitungan Kebutuhan	• Sudah terpenuhi untuk pengadaan USG tetapi masih ada puskesmas yang tidak ada dokter umum terlatih USG karena adanya mutase; • Belum terpenuhinya BMHP untuk skrining lansia sesuai sasaran; • Adanya ketidaksesuaian antara estimasi sasaran dan data riil, data estimasi lebih besar dibandingkan dengan sasaran rillnya, sehingga capaian tidak sesuai dengan target; • Jumlah logistic (catridge, pot dahak, tuberculin) tidak mencukupi; • Penggunaan logistic reagen HIV masih rendah, cakupan orang beresiko HIV dan masih rendah • Estimasi di puskesmas ada yang lebih besar ataupun lebih kecil dari data real.
3	Perencanaan dan Penganggaran	• Perencaaan dan penganggaran bersumber dari APBD dan DAK • Anggaran selalu direfocusing; • Dalam pemenuhan kebutuhan prasarana masih kurang di prioritaskan; • Tidak terakomodirnya pengajuan kebutuhan logistic dan kegiatan yang sudah direncanakan; • Dukungan anggaran program HIV rendah; • Tidak semua SPM ada anggaran terutama untuk KIE.
4	Pelaksanaan	• Masih banyak ibu balita yang tidak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu) untuk memeriksakan pertumbuhan dan perkembangannya; • Skrining yang sudah dilaksanakan untuk menjaring suspek TBC terkadang terhambat karena faskes TCM overload dan sampel tertunda pemeriksaannya; • Belum semua Faskes mampu tes HIV dan Pengobatan (Test and Treatment); • Mengikuti Permenkes tentang SPM terbaru ada kesenjangan antara ekspektasi dan reality terutama skrining keswa masih rendah; • Dari 32 Puskesmas, sudah terbentuk 24 Posyandu remaja namun sasaran diluar sekolah tidak terdata karena memang sasarannya tidak berkunjung ke Posyandu remaja.
5	Permasalahan Lain	• Tidak adanya Tenaga LSM Penjangkau lapangan untuk sasaran populasi kunci Wanita Penjaja Seks (WPS) dan Pengguna Jarum Suntik. Stigma tentang HIV masih tinggi di masyarakat menghambat pelayanan kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV maupun bagi ODHIV

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

2.1.8.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat dengan melaksanakan 2 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 2 Program dan 3 Kegiatan dengan tingkat capaian kinerja SPM sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.155. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

Dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Strandar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.156. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Kategori	Permasalahan
1	Pengumpulan Data	• Pendataan dalam pengalokasian CPLC untuk penerima manfaat berdasarkan data pemohon, pengguna belum berdasarkan BNBA.
2	Penghitungan Kebutuhan	
3	Perencanaan dan Penganggaran	• Perencanaan kesiapan lahan terkadang tidak sepenuhnya terverifikasi
4	Pelaksanaan	
5	Permasalahan Lain	

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

2.1.8.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat

Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat dengan melaksanakan 2 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 1 Program dan 5 Kegiatan dengan tingkat capaian anggaran sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.157. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

Dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Strandar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.158. Permasalahan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Kategori	Permasalahan
1	Pengumpulan Data	• Terkati CPCL, terdapat kekurangan persyaratan administratif.
2	Penghitungan Kebutuhan	
3	Perencanaan dan Penganggaran	• Masih membutuhkan anggaran yang memadai untuk Penerapan SPM tersebut.
4	Pelaksanaan	
5	Permasalahan Lain	

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

2.1.8.5 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2024 dengan tingkat capaian Kinerja SPM sebesar 97,19% dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan 1 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan; oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan 2 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan dan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dna Penyelamatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dengan melaksanakan 1 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.159. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

Dalam penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Strandar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.160. Permasalahan SPM Bidang SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

No	Kategori	Permasalahan
1	Pengumpulan Data	• Data pelaporan SPM di setiap bidang rentan tercecer dan hilang; • BAP kejadian belum lengkap; • Data masih menggunakan warga Kabupaten Bandung Barat; • Kajian Resiko Bencana (KRB) masih menggunakan periode 2017-2021 dan akan.
2	Penghitungan Kebutuhan	• Perhitungan kebutuhan SPM di setiap bidang terdakang muncul kebutuhan yang mendadak diluar perhitungan sebelumnya.
3	Perencanaan dan Penganggaran	• Perencanaan dan penganggaran terkadang berubah diakibatkan oleh rasionalisasi anggaran akibat terbatasnya anggaran yang ada; • Anggaran menggunakan gaji pegawai (DAMKAR); • Anggaran sebesar Rp.676.322.700,- bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) yang mendukung kegiatan peningkatan kapasitas anggota satpol pp.
4	Pelaksanaan	• Dengan luasnya wilayah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari 16 kecamtan dan 165 desa, dalam pelaksanaan kegiatan di bidang SPM urusan penegakan perda (GAKDA) dan Trantibumlinmas hanya dilakukan disebagian wilayah. Hal ini disebabkan kurangnya SDM dan Saran Prasarana serta terbatasnya anggaran yang ada; • Peningkatan SDM BPBD serta system pendataan yang belum tersedia dan anggaran yang terbatas; • Perlu dibentuknya tim reaksi cepat multisector dan pembentukan cluster logistik peningkatan sarana prasarana (Gudang).
5	Permasalahan Lain	

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

2.1.8.6 SPM Bidang Sosial

Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bandung Barat s.d Tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial dengan melaksanakan 2 jenis pelayanan dasar yang didukung oleh 2 Program dan 2 Kegiatan dengan tingkat capaian Kinerja SPM sebesar 95,82%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.161. Jenis Layanan, Program dan Kegiatan SPM Bidang Sosial

NO	NAMA LAYANAN SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

Dalam penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pencapaian target Strandar Pelayanan Minimal. Adapun beberapa permasalahan sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Tabel 2.162. Permasalahan SPM Bidang Sosial

No	Kategori	Permasalahan
1	Pengumpulan Data	• Data DTKS tidak memunculkan per-jenis PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial); • Belum adanya secretariat puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial).
2	Penghitungan Kebutuhan	• Standar satuan harga tidak lengkap; • Data PPKS belum padan.
3	Perencanaan dan Penganggaran	• Adanya rasionalisasi anggaran pada tahun berjalan; • Sarana dan prasarana penunjang layanan dasar belum lengkap.
4	Pelaksanaan	• Adanya rasionalisasi anggaran pada tahun berjalan; • Sarana dan prasarana penunjang layanan dasar belum lengkap.
5	Permasalahan Lain	• Bantuan dari kementiran social berupa barang bukan anggaran

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, diolah

2.1.9 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Bandung Barat

Lokasi program-program prioritas/unggulan didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044, diantaranya:

2.1.9.1 Proyek/Program Strategis Nasional di Kabupaten Bandung Barat

1. Lanjutan pembangunan jalan tol Trans Jawa pada ruas Ciranjang-Padalarang
2. Penguatan Infrastruktur perkotaan Metropolitan Bandung
3. Pembangunan Pump Storage (Upper Cisokan)
4. Penguatan tata kelola & kelembagaan perkotaan Metropolitan Bandung

5. Pengembangan kawasan perdesaan berbasis wisata Geowisata dan Artefak Gua Pawon serta revitalisasi kawasan purbakala Situs Goa Pawon di 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan Cipata (Desa Cipatat, Desa Citatah, Desa Gunungmasigit, Desa Cirawamekar, Desa Nyalindung, Desa Sumurbandung, Desa Mandalasari, Desa Rajamandala Kulon dan Desa Ciptharja)

2.1.9.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat

1. Jalan arteri, mencakup
   - Citarum - Rajamandala - Bts. Kota Padalarang;
   - Jalan Raya Padalarang;
   - Eks Toll Rajamandala dan Jalan Raya Rajamandala;
   - Bts. Kota Padalarang - Bts. Kota Bandung;
2. Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
   - Sp. Orion-Cihaliwung (Kabupaten Bandung Barat);
   - Padalarang (Sp.3 Stasion)-Sp. Cisarua (Kabupaten Bandung Barat);
3. Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
   - Cihampelas-Gununghalu (Kabupaten Bandung Barat)
4. Jalan Tol
   - Cikampek-Purwakarta-Padalarang (JW26);
   - Padaleunyi/Padalarang-Cileunyi (JW27);
   - Ciranjang-Padalarang (JW25) (rencana);
   - Cipularang-Lembang (JW65) (rencana);
   - Bandung Utara Toll Road (JW66.1) (rencana);
5. Jalur KA, mencakup:
   - Cikampek-Padalarang
   - Jakarta–Bandung (Kereta api cepat);
   - Cipatat-Sasaksaat-Cilame (rencana);
   - Kereta api perkotaan Leuwi Panjang–Cimahi–Padalarang–Walini (rencana);
   - Kereta api perkotaan Babakan Siliwangi-Lembang-Maribaya (rencana)
6. Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, mencakup
   - Waduk Saguling,
   - Waduk Cirata,
7. Transportasi Udara
   - Lapangan Udara Suparlan

8. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
   - Jaringan gas perkotaan
   - Depo Bahan Bakar Minyak Darat Padalarang
9. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
   - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Waduk Cirata, Waduk Saguling
   - Pembangkit Listrik Tenaga Air Cisokan,
   - Pembangkit Listrik Tenaga Air Saguling,
   - Pembangkit Listrik Tenaga Air Cirata, dan
   - Pembangkit Listrik Tenaga Air Rajamandala
   - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Tangkuban Perahu
10. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota
    - WS Citarum
11. Jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lintas Daerah Kabupaten/Kota
    - DI Cijanggel di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi
    - DI Bongkok di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi
    - DI Bongkok di Daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi
12. Sumber air berupa air permukaan pada situ
    - Situ Ciburuy di Kecamatan Padalarang dan
    - Situ Lembang di Kecamatan Parongpong
13. Jaringan pengendalian banjir
    - Sungai Cipunagara (Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi)
14. Sistem jaringan persampahan
    - TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat

2.1.9.3 Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Barat

1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat perdagangan dan jasa skala regional pada lokasi kawasan perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Cikalongwetan dan Kawasan Perkotaan Cipatat.
2. Pengembangan, peningkatan ,dan pemantapan pusat kegiatan industri pada lokasi kawasan perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Batujajar dan Kawasan Perkotaan Cihampelas.

3. Pengembangan, peningkatan,dan pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional pada lokasi Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Cikalongwetan, Kawasan Perkotaan Cipeundeuy dan Kawasan Perkotaan Cililin.
4. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pemerintahan pada lokasi Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah.
5. Pengembangan, peningkatan,dan pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara pada lokasi Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Batujajar dan Kawasan Perkotaan Lembang.
6. Pengembangan, peningkatan dan pemantapan pusat kegiatan pertanian pada lokasi kawasan perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cililin dan Kawasan Perkotaan Cikalongwetan
7. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pariwisata pada lokasi Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Cililin, Kawasan Perkotaan Cikalongwetan dan Kawasan Perkotaan Cipeundeuy.
8. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi berbasis riset dan pendidikan tinggi pada lokasi Kawasan Perkotaan Cikalongwetan.
9. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan pertemuan, pameran, sosial, kebudayaan, dan kesenian pada lokasi kawasan perkotaan Padalarang-Ngamprah dan Kawasan Perkotaan Cikalongwetan.
10. Pembangunan Mall Pelayanan Publik pada lokasi kawasan perkotaan Padalarang-Ngamprah dan Kawasan Perkotaan Cikalongwetan/ Cipeundeuy.

2.1.10 BUMD yang Mendukung Pelayanan Pemerintah Daerah

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemisahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD pasal 4 menyebutkan bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti, hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dimana pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat yang asalnya merupakan salah satu jenis usaha dari PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat yang berbentuk Perseoraan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah.

1. PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat

   Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009, dengan akta pendirian Perusahaan Nomor 56 pada tanggal 8 November Tahun 2010, serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-58074.AH.01.01. BUMD PT. PMgS merupakan Holding Company yang bergerak dibidang argobisnis, kepariwisataan, pengelolaan air baku, jasa sarana dan prasarana serta jenis usaha lainnya sesuai dengan kajian potensi daerah. Penyertaan modal kepada Kepada BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat berjumlah sebesar Rp.35.000.000.000,-

2. Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti

   Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti (TWM) merupakan spin-off (peralihan) dari PT PMgS yang sudah berdiri sejak 2010 (PERDA Nomor 21 Tahun 2009). Hal ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, pelayanan air minum wajib dikelola oleh Perumda Air minum tersendiri. Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti dibentuk melalui Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti dan mendapatkan pelimpahan pengelolaan 2 Sistem penyediaan air minum (SPAM) dari PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat, dengan rincian potensi sebagai berikut::

   - Sumber Air : Cijanggel dan Cibanteng
   - Debit Air : 95 lpd
   - Jumlah Pelanggan : 6.200 Sambungan Langganan
   - Wilayah Layanan : Kecamatan Cisarua, Ngamprah, Padalarang, dan Cikalongwetan
   - Pelayanan administrasi : 1,51%
   - Pelayanan Teknis : 5%
   - Tingkat NRW : 30,09%

Adapun KPI (*Key Performance Indicator*) Tahun 2024, Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.163.*Key Performance Indicator* Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

URAIAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
Debit Terjual	Lpd	67,13
Penambahan SL Baru	SL	216
Jumlah Pelanggan	SL	6295
Rata – Rata Pemakaian	m^3/bulan	14,13
Rata – Rata Tarif	Rp.	7.142
Pendapatan Air	Rp.	14.873.621.727
Pendapatan Non Air	Rp.	545.788.882
Biaya Operasional	Rp.	14.801.708.721
Collection	%	94%
Laba Bersih	Rp.	617.701.888
Total Asset	Rp.	47.194.707.867

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti, diolah, 2025

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap jenis objek dan aspek kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang dengan memperhitungkan perkembangan ekonomi makro yang nantinya akan mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor- sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan sebagai dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

2.2.1 Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber- sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function). Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperincisebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD (2020 - 2024)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah di yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah; dan (3) Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (1), Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja Daerah berdasarkan peraturan yang sama Pasal 28 ayat (2) meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Pembiayaan Daerah berdasarkan peraturan yang sama Pasal 28 ayat (3) meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.2.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta Lain-lain pendapatan yang sah yang meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen APBD yang memiliki peranan penting karena sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak Pendapatan Daerah. Berikut ini adalah persentase pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020-2024.

Gambar 2.24. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Sumber:Bappenda, BKAD, Bappelitbangda, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

Tahun 2020 hingga 2024, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat mengalami perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 18,37 Persen sementara pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 19.28 Persen. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar 23,99 Persen, namun pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan sebesar 23,16 Persen. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami kembali menurun sebesar 22,79 Persen. Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.164. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	**2.530.168.878.202**	**2.804.253.404.655**	**2.781.252.577.719**	**3.019.744.124.703**	**3.452.767.649.123,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**464.817.974.827**	**540.783.936.035**	**667.243.725.925**	**699.268.336.253**	**786.934.566.871,00**
Pajak Daerah	330.898.929.358	375.265.784.971	495.814.400.587	508.940.718.263	571.000.000.000,00
Retribusi Daerah	27.510.250.500	17.073.496.576	15.099.253.355	17.765.340.773	17.789.533.900,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494.842.021	653.894.651	1.253.070.525	1.321.849.697	1.253.070.525,00
Lain-lain PAD yang Sah	105.913.952.948	147.790.759.837	155.077.001.458	171.240.427.520	196.520.434.150
PENDAPATAN TRANSFER	**1.870.003.233.375**	**2.074.746.679.620**	**1.929.331.252.543**	**2.320.475.788.450**	**2.665.833.082.252,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.509.121.761.433	1.804.538.931.486	1.637.296.424.922	1.941.911.537.266	2.261.702.720.000,00
Dana Perimbangan	1.500.049.569.433	1.500.578.837.486	1.384.517.089.922	1.699.213.922.266	2.009.270.769.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	-	46.578.825.000	-	-	
Dana Desa	-	257.381.269.000	252.779.335.000	242.697.615.000	246.984.622.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	9.072.192.000	-	-	-	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	360.881.471.942	270.207.748.134	292.034.827.621	378.564.251.184	404.130.362.252,00
Pendapatan Bagi Hasil	213.388.584.827	199.081.945.565	264.875.269.635	279.855.590.641	306.360.313.781,00
Bantuan Keuangan	147.492.887.115	71.125.802.569	27.159.557.986	98.708.660.543	97.770.048.471,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**195.347.670.000**	**188.722.789.000**	**184.677.599.251**	**0**	

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Hibah	195.347.670.000	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	188.722.789.000	184.677.599.251	-	

Sumber : Bappelitbangda, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.2.1.3 Belanja Daerah

Penyajian belanja daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2020 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020- 2024 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.165. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Realiasi	Realiasi	Realiasi	Realiasi	Realiasi
BELANJA	**2.639.640.727.271**	**2.917.749.150.862**	**2.893.541.475.823**	**2.971.442.170.134**	**3.258.962.496.634,00**
BELANJA OPERASI	1.934.668.372.009	2.128.381.840.567	2.086.070.172.818	2.117.826.809.592	2.405.903.763.515,70
Belanja Pegawai	1.153.720.854.748	1.140.660.223.059	1.126.247.524.223	1.149.419.648.131	1.243.654.808.162,00
Belanja Barang dan Jasa	665.332.491.207	918.292.891.347	880.687.593.731	911.998.310.205	1.032.553.814.067,70
Belanja Bunga	2.855.004.000	723.711.188	10.303.550.991	10.621.367.420	3.212.359.686,00
Belanja Subsidi				1.232.000.000	
Belanja Hibah	110.656.193.554	65.485.210.973	62.369.036.473	40.255.483.836	123.527.781.600,00
Belanja Bantuan Sosial	2.103.828.500	3.219.804.000	6.462.467.400	4.300.000.000	2.955.000.000,00
BELANJA MODAL	**465.456.844.575**	**346.128.576.027**	**341.545.861.605**	**409.681.309.808**	**401.734.675.346,30**
Belanja Modal Tanah	7.133.690.500	11.193.228.000			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.396.585.609	144.959.328.329	97.105.705.629	127.065.632.005	206.530.329.113,30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	113.378.948.383	71.983.011.084	52.174.354.880	93.940.761.279	57.500.309.714,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.998.056.756	101.033.415.866	177.473.377.906	172.787.963.813	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.000.836.058,00	16.782.032.748	14.098.540.479	12.210.284.550	14.182.995.030,00
Belanja Modal Aset Tetap	5.548.727.269,00	177.560.000,00	693.882.711	3.676.668.161	
BELANJA TIDAK TERDUGA	**74.183.964.539**	**8.328.012.910**	**2.511.104.082**	**6.060.269.687**	**3.749.217.954,00**
Belanja Tidak Terduga	74.183.964.539	8.328.012.910	2.511.104.082	6.060.269.687	3.749.217.954,00
BELANJA TRANSFER	**165.331.546.148**	**434.910.721.359**	**463.414.337.318**	**437.873.781.047**	**447.574.839.818,00**
Belanja Bagi Hasil	38.518.706.534	40.579.431.776	45.321.914.164	57.037.502.238	55.239.082.625,00
Belanja Bantuan Keuangan	126.812.839.614	394.331.289.583	418.092.423.154	380.836.278.809	392.335.757.193,00

Sumber : Bappelitbangda, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

Realisasi Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 5 tahun terakhir (2020-2024). Pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.639.640.727.271,- meningkat menjadi Rp. 3.258.962.496.634,00,- ditahun 2024 Bila dilihat berdasarkan komponennya.

2.2.1.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 ayat (1), Pembiayaan Daerah terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan. Pasal 70 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan bahwa terdapat enam sumber Penerimaan Pembiayaan, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah tersebut dapat digunakan untuk lima hal, yaitu: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto, dimana Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran. Sama halnya dengan analisis Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun hasil analisis pembiayaan daerah Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.166. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN	**233.911.743.507**	**198.288.982.078**	**177.494.441.286**	**(22.230.505.731)**	**(73.071.490.561,97**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**233.911.743.507**	**198.288.982.078**	**232.657.933.693**	**122.133.907.939**	**26.071.448.838,03**
Penggunaan SiLPA	233.911.743.507	124.439.894.438	84.793.235.771	55.176.846.939	26.071.448.838,03
Pencairan Dana Cadangan	-			20.000.000.000	
Penerimaan Pinjaman Daerah		73.849.087.640	147.864.697.922	46.957.061.000	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			**55.163.492.407**	**144.364.413.670**	**99.142.939.400,00**
Pembentukan Dana Cadangan				20.000.000.000	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			9.999.998.915		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			45.163.493.492	124.364.413.670	

Sumber : Bappelitbangda, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

Dari Tabel 2.161 terlihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat cenderung menurun, bahkan di tahun 2024 defisit sebesar Rp.22.230.505.731,-.

2.2.1.5 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi: (1) aset; (2) kewajiban; dan (3) ekuitas dana, yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening.

A. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset yaitu potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan maupun penghematan belanja bagi pemerintah.

Berdasarkan neraca daerah Kabupaten Bandung Barat, aset Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan dalam 5 (tahun) terakhir. Rata-rata pertumbuhan aset Kabupaten Bandung Barat sebesar 1,32 persen. Aset Kabupaten Bandung Barat terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.

Komposisi aset Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh aset tetap, pada tahun 2021 aset tetap Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 3.326.693.487.752,36 atau sebesar 82,16 persen dari total aset Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan aset lancar Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 sebesar Rp. 4.314.357.017.735,40persen dari total aset Kabupaten Bandung Barat.

B. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewajiban timbul dikarenakan penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau dari lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Kabupaten Bandung Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 45,31 persen. Kewajiban jangka pendek Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 204,57 persen, sedangkan kewajiban jangka panjang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,55 persen.

C. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Berdasarkan neraca Kabupaten Bandung Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir, ekuitas Kabupaten Bandung Barat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,21 persen. Ekuitas Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.200.299.589.773,89 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp. 4.944.916.617.716,08.

Tabel 2.167. Neraca Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024 (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020
1	2	4	4	5	4	4
1	ASET	4.971.647.844.576,78	4.900.581.027.343,11	4.512.685.424.297,85	4.049.068.994.950,04	3.581.789.720.075,68
2	ASET LANCAR	453.224.254.088,75	372.878.005.245,10	603.154.195.464,56	528.077.896.817,60	389.243.323.655,96
3	Kas dan Setara Kas	78.247.598.644,00	26.071.448.838,03	55.176.846.939,00	84.838.126.905,94	124.449.326.504,00
4	Kas di Kas Daerah	62.162.729.892,00	10.331.784.992,00	29.736.736.715,00	51.490.092.044,94	104.045.411.024,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan		319.091,03	19.011.577,00	4.939.000,00	9.536.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		6.588.100,00	2.020.000,00		29.542.300,00
7	Kas di BLUD	13.256.878.492,00	12.895.166.518,00	22.089.069.066,00	22.689.945.003,00	8.666.676.762,00
	Kas JKN					9.125.094.838,00
8	Kas Dana BOS	15.334.411,00	5.350.321,00	4.373.680,00	8.992.111,00	2.572.273.353,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP				10.599.843.451,00	
10	Kas Dana BOP		340.000,00			
11	Kas Dana BOK		2.831.899.816,00			
12	Kas Lainnya	2.812.655.849,00		3.325.635.901,00	44.315.296,00	792.227,00
13	Setara Kas					
14	Piutang Pajak Daerah	415.478.479.145,65	378.505.224.705,36	349.646.731.572,79	426.403.418.173,79	397.704.447.644,79
15	Piutang Pajak Hotel	3.220.728.969,23	2.792.304.441,23	3.844.932.922,23	4.048.529.636,23	
16	Piutang Pajak Restoran	6.589.958.848,42	6.429.478.187,42	6.605.715.672,85	5.523.187.194,85	
17	Piutang Pajak Hiburan	916.212.088,00	571.164.626,00	576.879.902,00	801.453.656,00	
18	Piutang Pajak Reklame	488.113.048,00	281.700.189,00	141.651.897,00	228.558.718,00	
19	Piutang Pajak Penerangan Jalan	13.622,00	13.619,71	13.619,71	26.213,71	
20	Piutang Pajak Parkir	248.481.413,00	240.095.873,00	226.368.370,00	230.219.830,00	
21	Piutang Pajak Air Tanah	4.939.117.083,00	5.008.613.997,00	5.638.080.791,00	8.909.030.841,00	
22	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	129.727.122,00	817.291.262,00	821.424.572,00	930.838.789,00	
23	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	398.240.879.792,00	362.364.562.510,00	331.791.663.826,00	405.731.573.295,00	
24	Piutang Retribusi Daerah	183.108.459,00	366.706.546,00	1.118.085.000,00	129.863.500,00	190.256.000,00
25	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	183.108.459,00	366.706.546,00	1.118.085.000,00	129.863.500,00	
26	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	530.896.968,84	635.396.968,84	635.396.968,84	428.429.158,94	0,00
27	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	530.896.968,84				
28	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	56.401.869.448,67	51.200.719.511,67	243.871.503.882,37	74.258.805.381,00	56.272.302.216,00
29	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	37.555.452.464,00	39.054.183.790,00	42.112.157.514,00	44.581.745.377,00	
30	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.732.487.762,00	6.648.398.038,00	193.774.539.095,70	3.436.381.471,00	
31	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	135.431.088,00	123.489.300,00	123.489.300,00		
32	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	23.000.000,00	27.800.000,00	32.600.000,00	42.900.000,00	
33	Piutang Pendapatan BLUD	10.871.642.801,00	5.256.993.050,00	7.733.362.639,00	25.492.855.263,00	

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020
1	2	4	4	5	4	4
34	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah				607.462.570,00	
	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak	83.855.333,67				
36	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				97.460.700,00	
37	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		663.321.000,00	17.478.607.174,00	12.394.235.494,00	0,00
38	Piutang DBH CHT in transit		663.321.000,00	17.478.607.174,00	12.394.235.494,00	
39	Piutang Transfer Antar Daerah	13.345.080.809,00	12.360.205.414,00	17.478.607.174,00	12.394.235.494,00	8.801.537.153,00
40	Piutang Bagi Hasil Pajak	10.797.824.986,00	10.020.719.108,00	17.478.607.174,00	12.394.235.494,00	
41	Piutang Bantuan Keuangan	2.547.255.823,00	2.339.486.306,00			
42	Piutang Lainnya	90.832.825.150,00	92.875.317.697,00	94.048.034.525,00	129.568.625.047,81	64.267.160,00
43	Piutang Lain-lain	90.832.825.150,00	92.875.317.697,00	94.048.034.525,00	129.568.625.047,81	64.267.160,00
44	Penyisihan Piutang	(257.964.268.712,67)	-232.890.787.818,13	-200.329.341.853,45	-247.781.500.122,89	-241.086.999.351,41
45	Penyisihan Piutang Pendapatan	(257.964.268.712,67)	-232.890.787.818,13	-200.329.341.853,45	-247.781.500.122,89	-241.086.999.351,41
46	Beban Dibayar Dimuka	638.466.007,54	832.114.690,28	2.598.630.870,69	707.274.795,75	942.712.277,79
47	Beban Dibayar Dimuka	638.466.007,54	832.114.690,28	2.598.630.870,69	707.274.795,75	942.712.277,79
48	Persediaan		42.258.337.692,05	38.909.700.385,32	47.130.618.483,26	41.905.474.051,79
49	Barang Pakai Habis		42.258.337.692,05	38.909.700.385,32	47.130.618.483,26	6.414.504.381,00
50	Persediaan Bahan/Material					27.277.166.356,69
50	Persediaan Barang Lainnya					8.213.803.314,10
51	INVESTASI JANGKA PANJANG	54.398.566.678,00	54.213.487.817,00	54.447.377.268,40	44.643.258.291,03	44.826.076.448,00
52	Investasi Jangka Panjang Permanen	54.398.566.678,00	54.213.487.817,00	54.447.377.268,40	44.643.258.291,03	44.826.076.448,00
53	Penyertaan Modal	54.398.566.678,00	54.213.487.817,00	54.447.377.268,40	44.643.258.291,03	44.826.076.448,00
54	ASET TETAP	4.314.357.017.735,40	4.298.180.523.841,44	3.689.260.573.408,64	3.326.693.487.752,36	3.016.860.479.390,20
55	Tanah	1.498.257.780.850,00	1.335.037.236.385,00	897.183.883.539,00	772.112.294.808,00	636.732.305.644,00
56	Peralatan dan Mesin	1.568.627.766.495,27	1.421.600.574.052,68	1.258.707.470.210,31	1.154.442.613.077,32	1.002.219.256.521,32
57	Gedung dan Bangunan	2.068.353.006.458,64	1.987.904.729.160,85	1.848.177.805.960,70	1.644.975.612.471,45	1.574.765.416.727,84
58	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.731.707.179.649,67	1.634.387.668.772,67	1.299.690.551.525,21	1.102.324.488.742,59	1.074.307.982.211,59
59	Aset Tetap Lainnya		254.972.063.420,07	243.113.148.416,63	230.234.306.085,63	215.050.140.095,63
60	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.811.825.381,00	33.661.298.981,80	209.742.672.933,29	238.175.519.435,30	119.065.450.050,00
61	Akumulasi Penyusutan	(2.704.691.659.996,41)	-2.369.383.046.931,63	-2.067.354.959.176,50	-1.815.571.346.867,93	-1.605.280.071.860,18
62	ASET LAINNYA	149.668.006.074,63	175.309.010.439,57	165.823.278.156,25	149.654.352.089,05	130.859.840.581,52
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.766.282.718,05				11.855.651.475,84
63	Tagihan Jangka Panjang	17.766.282.718,05	17.578.282.718,05	19.018.783.983,94	15.046.214.047,35	
64	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	53.999.373.530,00	53.999.373.530,00	53.999.373.530,00	53.999.373.530,00	53.999.373.530,00
65	Aset Tidak Berwujud	17.978.579.548,00	17.708.269.848,00	21.690.151.683,00	17.104.983.458,00	875.420.640,00
66	Aset Lain-lain	12.377.528.608,00	67.242.498.232,32	70.925.424.934,69	77.616.280.895,10	70.844.517.728,10
67	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.036.135.932,40)	-10.848.879.888,80	-9.841.584.482,20	-1.633.777.886,00	

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020
1	2	4	4	5	4	4
68	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				-12.478.721.955,40	-6.715.122.792,42
69	Dan Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	1.747.923.000,00	29.629.466.000,00	10.031.128.506,82		
70	JUMLAH ASET		4.900.581.027.343,11	4.512.685.424.297,85	4.049.068.994.950,04	3.581.789.720.075,68
71	KEWAJIBAN		289.008.843.180,96	312.385.834.532,87	105.958.290.114,66	12.692.117.297,33
72	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	26.731.226.860,70	289.008.843.180,96	236.721.423.650,87	48.520.110.838,66	12.692.117.297,33
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	16.634.204,00			44.315.296,00	792.227,00
74	Utang Bunga		3.212.359.686,00	24.674.280.846,54	101.577.574,00	
75	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		99.142.939.400,00	100.885.881.188,00	16.410.908.364,00	
76	Pendapatan Diterima Dimuka	2.512.786.595,30	2.057.437.302,28	2.276.681.196,33	2.801.009.735,33	3.564.574.921,33
77	Utang Belanja	24.201.806.061,40	184.596.106.792,68	105.558.944.510,00	22.015.602.619,96	8.551.367.209,00
78	Utang Jangka Pendek Lainnya			3.325.635.910,00	7.146.697.249,37	575.382.940,00
79	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	75.664.410.882,00	57.438.179.276,00	0,00
80	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)			75.664.410.882,00	57.438.179.276,00	
81	JUMLAH KEWAJIBAN		289.008.843.180,96	312.385.834.532,87	105.958.290.114,66	12.692.117.297,33
82	EKUITAS	4.944.916.617.716,08	4.611.572.184.162,15	4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,38	3.569.097.602.778,35
83	Ekuitas	4.944.916.617.716,08	4.611.572.184.162,15	4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,38	3.569.097.602.778,35
84	JUMLAH EKUITAS DANA		4.611.572.184.162,15	4.200.299.589.773,89	3.943.110.704.835,38	3.569.097.602.778,35
85	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.900.581.027.343,11	4.512.685.424.297,85	4.049.068.994.950,04	3.581.789.720.075,68

Sumber : Bappelitbangda, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020-2024

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Belanja Pegawai. Proporsi Belanja Pegawai dapat menunjukkan apakah penggunaan keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi Belanja Pegawai maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin rendah proporsi Belanja Pegawai maka semakin tinggi penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Tabel 2.168. Realisasi Proporsi Belanja Pegawai Kab Bandung Barat Tahun 2020

Keterangan	Tahun 2020
Belanja Pegawai	**1.153.720.854.7**
Belanja Gaji dan Tunjangan	778.326.285.483
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	252.205.984.014
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.741.421.380
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	13.117.118.677
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	441.387.493
Uang Lembur	971.090.000
Honorarium PNS	2.288.876.150
Honorarium Non PNS	32.649.120.000
Belanja Pegawai BLUD	7.367.110.000
Honorarium Pengelola Dana Bos	56.612.461.551

Sumber : Bappelitbangda, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.169. Realisasi Proporsi Belanja Pegawai Kab Bandung Barat Tahun 2021-2024

Keterangan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	**1.140.660.223.05**	**1.126.247.524.22**	**1.149.419.648.13**	**1.243.654.808.162**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	546.005.281.414	549.543.496.880	587.073.916.610	625.465.572.999,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	273.597.809.430	293.295.497.248	272.368.871.881	322.815.189.633,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	265.494.947.324	208.505.410.475	199.345.071.607	197.929.808.382,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	42.804.324.966	51.138.272.489	51.142.152.282	50.325.113.474,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.306.265.391	896.865.730	955.962.483	
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	946.043.897	1.314.541.380	1.314.541.380	1.493.119.992,00
Belanja Pegawai BLUD	10.505.550.637	21.553.440.021	37.219.131.888	44.829.342.902,00

Sumber : Bappelitbangda, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari tahun 2020 - 2024 hal tersebut disesuaikan dengan efisiensi penggunaan anggaran. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan dimana belanja pegawai yang meningkat terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD.

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat ditinjau berdasarkan surplus ataupun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Daerah.

Tabel 2.170. Defisit/Surplus Anggaran Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024

SURPLUS/(DEFISIT)			
Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
2024	73.071.492.545,00	151.302.455.001,97	195,12%
2023	(217.614.994.693)	(112.288.898.104)	51,60%
2022	(409.940.294.438)	(113.495.746.307)	27,69%
2021	(519.412.143.507)	(109.471.849.069)	21,08%
2020	(519.412.143.507)	(109.471.849.069)	21,08%

Sumber : Bappelitbangda, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

2.2.3.1 Kebijakan dan Proyeksi Kerangka Pendanaan

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat selama periode 2025-2029 bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan.

Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah. Perkiraan Pendapatan Daerah disajikan secara indikator dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, yang dapat dilihat pada tabel III.8. Sumber-sumber pendapatan daerah yang diproyeksikan meningkat adalah dari pajak daerah dan retribusi karena kinerja pendapatan masa lalu serta pertumbuhan nilai dan objek pajak serta retribusi di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan kondisi dan proyeksi pendapatan daerah, menentukan arah kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama dengan dinas penghasil.
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
5. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
6. Melaksanakan akurasi data atas objek pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah.

Dari sisi belanja, terutama proporsi untuk belanja pegawai, kondisi dan proyeksi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melampaui ambang batas 30% dari total APBD. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan, karena ruang fiskal daerah semakin sempit untuk membiayai pembangunan prioritas seperti peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain, data proyeksi pensiun ASN tahun 2025–2030 menunjukkan tren keluarnya pegawai yang cukup signifikan dari berbagai kategori jabatan, baik jabatan fungsional guru, jabatan fungsional kesehatan, jabatan pelaksana, maupun jabatan struktural. Fakta ini menjadi peluang untuk melakukan penataan ulang formasi ASN melalui kebijakan **Zero Growth**, yaitu mengendalikan jumlah ASN agar tidak bertambah, dengan cara memanfaatkan ruang yang tercipta dari pegawai yang memasuki masa pensiun.

Tujuan Pengendalian Pengadaan ASN diantaranya:

1. Menahan pertumbuhan jumlah ASN (Zero Growth) sehingga tidak terjadi penambahan beban belanja pegawai.
2. Memanfaatkan peluang dari pensiun ASN sebagai instrumen **right-sizing** organisasi.
3. Menjaga kualitas layanan publik dengan redistribusi, reskilling, dan digitalisasi, meskipun jumlah ASN tidak bertambah.
4. Menurunkan rasio belanja pegawai terhadap APBD secara bertahap agar berada pada batas aman (<30%).

Prinsip Pengendalian Pengadaan ASN diantaranya:

1. **Zero Growth**: jumlah ASN secara keseluruhan tidak bertambah dari kondisi awal 2025.

2. **Selective Replacement**: tidak semua pegawai yang pensiun diganti. Pengisian hanya dilakukan pada jabatan kritikal yang benar-benar dibutuhkan.
3. **Redistribusi Internal**: kekosongan jabatan akibat pensiun diatasi dengan mutasi, rotasi, dan redistribusi pegawai antar perangkat daerah.
4. **Peningkatan Kompetensi**: pegawai diarahkan mengikuti program reskilling dan upskilling agar dapat mengisi fungsi yang ditinggalkan oleh pegawai pensiun.
5. **Digitalisasi Proses**: memperluas pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kebutuhan tenaga administrasi.

Stategi Pengendalian Pengadaan ASN dengan cara:

1. **Pengendalian Formasi ASN**
   a. Menerapkan moratorium penerimaan ASN reguler selama lima tahun ke depan.
   b. Pengadaan ASN hanya dibuka untuk jabatan fungsional kritikal (guru mata pelajaran inti, tenaga kesehatan klinis, tenaga teknis khusus).
   c. Setiap pegawai pensiun tidak otomatis diganti; pengisian bersifat selektif.
2. **Redistribusi & Penataan ASN**
   a. Melakukan pemetaan beban kerja dan rasio layanan (misalnya rasio guru per murid, tenaga kesehatan per jumlah penduduk).
   b. Menyalurkan ASN dari unit yang surplus ke unit yang defisit.
   c. Mendorong penerapan *job sharing* dan *cluster pelayanan* untuk unit dengan jumlah pegawai terbatas.
3. **Pengembangan Kompetensi & Alih Peran**
   a. Menyusun program *fast track reskilling* agar ASN yang ada dapat dialihkan ke jabatan prioritas.
   b. Memberikan pelatihan digitalisasi, analisis data, serta keterampilan teknis untuk menunjang transformasi layanan.
4. **Digitalisasi & Penyederhanaan Proses**
   a. Mengembangkan sistem layanan digital di bidang kepegawaian, pendidikan, dan kesehatan.
   b. Mengurangi ketergantungan pada tenaga administrasi melalui otomasi proses rutin.
5. **Pengendalian Fiskal & Evaluasi Kinerja**
   a. Menetapkan target tahunan penurunan rasio belanja pegawai terhadap APBD.
   b. Melaksanakan evaluasi tahunan terhadap realisasi jumlah ASN, jumlah pensiun, dan kebutuhan riil jabatan kritikal.
   c. Menyusun dashboard monitoring untuk memantau Zero Growth dan dampaknya terhadap kinerja layanan

Berdasarkan data proyeksi pensiun, setiap tahun akan ada ASN yang memasuki masa pensiun pada kategori jabatan tertentu. Data ini akan dijadikan acuan dalam:

- **Menentukan ceiling replacement**: batas maksimum pengisian formasi hanya sebatas jumlah pensiun kritikal.
- **Menggeser komposisi ASN**: dari jabatan administratif menuju jabatan fungsional prioritas, tanpa menambah total pegawai.
- **Menghitung ruang fiskal**: dana yang terbebas dari gaji pensiun tidak langsung digunakan untuk rekrutmen, melainkan untuk pembiayaan reskilling, digitalisasi, dan insentif kinerja.

Berikut merupakan rencana pengadaan ASN berdasarkan jumlah pensiun:

Tabel 2.171. Proyeksi Jumlah ASN Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030

No	Tahun	Jabatan								Jumlah ASN Pensiun	Rencana Pengadaan ASN			Jumlah Rencana Pengadaan ASN
		PNS Pensiun					PPPK Pensiun				Teknis	Guru	Kesehatan	
		JAFUNG	JAFUNG GURU	JAFUNG KES	JAPEL	JABATAN STRUKTURAL	TEKNIS	KESEHATAN	GURU					
1	2025	21	300	27	49	24	1	0	8	**430**	95	308	27	**430**
2	2026	22	307	26	45	26	0	0	18	**444**	93	325	26	**444**
3	2027	30	292	21	35	30	1	1	31	**441**	96	323	22	**441**
4	2028	17	249	23	37	28	0	0	56	**410**	82	305	23	**410**
5	2029	11	201	25	33	28	0	1	37	**336**	72	238	26	**336**
6	2030	12	199	27	27	28	0	1	60	**354**	67	259	28	**354**
Jumlah		**113**	**1548**	**149**	**226**	**164**	**2**	**3**	**210**	**2415**	**505**	**1758**	**152**	**2415**

Sumber: Hasil perhitungan BKPSDM, 2025.

Berdasarkan tabel proyeksi di atas jumlah pengadaan ASN sama dengan jumlah ASN yang pensiun artinya tidak ada kenaikan jumlah ASN. Adanya proyeksi Pengadaan ASN memiliki target dan indikator sebagai berikut:

- Pertumbuhan ASN bersih: **0% per tahun** (Zero Growth).
- Rasio belanja pegawai terhadap APBD: menurun secara bertahap hingga ≤30%.
- Replacement rate: maksimum **20–30%** dari jumlah pensiun per tahun, hanya untuk jabatan kritikal.
- Proporsi jabatan fungsional prioritas meningkat setiap tahun.
- Minimal **80% layanan administrasi ASN** terotomasi secara digital pada 2029.

Kebijakan Zero Growth ASN di Kabupaten Bandung Barat bukan sekadar kebijakan pengendalian fiskal, tetapi strategi penataan ulang manajemen SDM aparatur agar lebih ramping, produktif, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan memanfaatkan momentum pensiun ASN yang cukup besar, Pemerintah Daerah melalui BKPSDM dapat menekan belanja pegawai, menata ulang struktur formasi, meningkatkan kompetensi ASN, serta memperkuat layanan berbasis digital, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.172. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2030

Kode	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	**PENDAPATAN**	**3,364,314,144,635**	**2,875,794,980,504**	**2,905,358,753,558**	**2,951,453,647,488**	**2,999,630,988,535**	**3,046,179,639,879**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**952,021,711,556**	**1,045,588,370,446**	**1,075,152,143,500**	**1,121,247,037,430**	**1,169,424,378,477**	**1,215,973,029,821**
4.1.01	**PAJAK DAERAH**	**741,518,755,652**	**787,483,755,652**	**818,632,005,652**	**851,337,668,152**	**885,678,613,777**	**921,736,606,684**
	HOTEL	40,000,000,000	37,800,000,000	39,690,000,000	41,674,500,000	43,758,225,000	45,946,136,250
	RESTORAN	73,000,000,000	73,500,000,000	77,175,000,000	81,033,750,000	85,085,437,500	89,339,709,375
	HIBURAN/KESENIAN	15,000,000,000	21,000,000,000	22,050,000,000	23,152,500,000	24,310,125,000	25,525,631,250
	REKLAME	5,000,000,000	5,250,000,000	5,512,500,000	5,788,125,000	6,077,531,250	6,381,407,813
	KONSUMSI TENAGA LISTRIK YG DI	82,000,000,000	86,100,000,000	90,405,000,000	94,925,250,000	99,671,512,500	104,655,088,125
	JASA PARKIR	7,000,000,000	1,365,000,000	1,433,250,000	1,504,912,500	1,580,158,125	1,659,166,031
	AIR TANAH	42,000,000,000	42,000,000,000	44,100,000,000	46,305,000,000	48,620,250,000	51,051,262,500
	MINERAL BUKAN LOGAM	3,000,000,000	3,150,000,000	3,307,500,000	3,472,875,000	3,646,518,750	3,828,844,688
	PBB	120,000,000,000	128,100,000,000	134,505,000,000	141,230,250,000	148,291,762,500	155,706,350,625
	BPHTB	190,000,000,000	224,700,000,000	235,935,000,000	247,731,750,000	260,118,337,500	273,124,254,375
	Opsen PKB	100,721,111,227	100,721,111,227	100,721,111,227	100,721,111,227	100,721,111,227	100,721,111,227
	Opsen BNPKB	63,797,644,425	63,797,644,425	63,797,644,425	63,797,644,425	63,797,644,425	63,797,644,425
4.1.02	**RETRIBUSI DAERAH**	**194,607,048,593**	**12,608,143,510**	**12,638,143,510**	**12,851,400,561**	**12,923,719,549**	**14,789,433,900**
4.1.03	**HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN**	**1.253.070.525**	**1.306.239.012**	**1.306.239.012**	**1.306.239.012**	**1.306.239.012**	**1.306.239.012**
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.253.070.525	1.306.239.012	1.306.239.012	1.306.239.012	1.306.239.012	1.306.239.012
4.1.04	**LAIN2 PAD YANG SAH**	**14,642,836,786**	**244,243,400,759**	**242,628,923,813**	**255,804,898,192**	**269,568,974,626**	**278,193,918,712**
	Jasa Giro pada Kas Daerah	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2,839,861,312	2,839,861,312	2,839,861,312	2,839,861,312	2,839,861,312	2,839,861,312
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000

Kode	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Hasil dari Bangun Guna Serah Pasar Tagog Padalarang	801,821,000	827,086,000	839,844,000	846,080,000	852,315,000	871,308,000
	Hasil dari Bangun Guna Serah Pasar Panorama Lembang	1,361,782,800	1,366,894,800	1,398,757,680	1,424,447,280	1,429,585,200	1,433,695,536
	Hasil Dari Bangun Guna Serah Pasar	578,940,800	593,888,000	608,835,200	623,760,000	624,782,400	626,710,500
	BLUD		232,033,613,921	230,359,568,895	243,445,105,559	257,171,673,674	265,744,540,902
	Denda Pajak PBBP2	2,500,000,000					
	Objek Wisata Maribaya	360,430,874	382,056,726	382,056,726	425,644,041	450,757,040	477,802,462
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2,412,292,433,079**	**1,830,206,610,058**	**1,830,206,610,058**	**1,830,206,610,058**	**1,830,206,610,058**	**1,830,206,610,058**
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH	2,204,897,561,000	1,652,274,730,000	1,652,274,730,000	1,652,274,730,000	1,652,274,730,000	1,652,274,730,000
	DAU	1,301,427,209,000	1,301,427,209,000	*1,301,427,209,000*	*1,301,427,209,000*	*1,301,427,209,000*	*1,301,427,209,000*
	DBH	105,826,344,000	105,826,344,000	105,826,344,000	105,826,344,000	105,826,344,000	105,826,344,000
	DANA DESA	245,021,177,000	245,021,177,000	*245,021,177,000*	*245,021,177,000*	*245,021,177,000*	*245,021,177,000*
4.2.02	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR**	**207,394,872,079**	**177.931.880.058**	**177.931.880.058**	**177.931.880.058**	**177.931.880.058**	**177.931.880.058**
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor						
	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan						
	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan	59,606,519,018	59.606.519.018	59.606.519.018	59.606.519.018	59.606.519.018	59.606.519.018
	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4,573,803,363	4.573.803.363	4.573.803.363	4.573.803.363	4.573.803.363	4.573.803.363
	Bagi Hasil Pajak Rokok	107,001,557,677	107.001.557.677	107.001.557.677	107.001.557.677	107.001.557.677	107.001.557.677
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemda Kab/Kota	**36,212,992,021**	6.750.000.000	6.750.000.000	6.750.000.000	6.750.000.000	6.750.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		**3,364,314,144,635**	**2,875,794,980,504**	**2,905,358,753,558**	**2,951,453,647,488**	**2,999,630,988,535**	**3,046,179,639,879**
5	**BELANJA DAERAH**	**3,364,314,144,635**	**2,875,794,980,504**	**2,905,358,753,558**	**2,951,453,647,488**	**2,999,630,988,535**	**3,046,179,639,879**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2,565,516,283,744**	**2,155,563,573,140**	**2,074,551,961,412**	**2,134,212,684,750**	**2,149,999,775,070**	**2,151,809,879,120**
	Belanja Pegawai	**1,510,389,853,729**	1,260,979,348,761	1,117,388,756,365	1,128,562,643,928	1,139,848,270,368	1,151,246,753,071
	Belanja Barang dan Jasa	1,019,200,357,994	821,692,717,217	854,173,405,765	902,056,090,724	906,557,554,604	953,963,126,049
	Belanja Subsidi		5,499,913,161				
	Belanja Hibah	32,346,072,021	59,721,558,001	33,800,000,000	33,800,000,000	33,800,000,000	33,800,000,000
	Belanja Bantuan Sosial	3,580,000,000	7,670,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000

Kode	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2	**BELANJA MODAL**	**257,722,703,361**	**211,918,099,308**	**343,094,418,295**	**321,326,550,682**	**345,369,821,385**	**324,421,111,615**
	Belanja Modal Tanah	3,269,807,140	10,958,495,000	2,000,000,000	2,500,000,000	5,500,000,000	2,500,000,000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113,634,899,761	33,621,211,381	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66,224,959,255	71,431,625,774	133,375,000,000	119,575,000,000	113,075,000,000	83,075,000,000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60,346,514,141	95,242,981,653	187,719,418,295	179,251,550,682	206,794,821,385	218,846,111,615
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13,361,224,900	663,785,500				
	Belanja Modal Aset Lainnya	885,298,164					
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**53,772,545,881**	**11,936,717,666**	**15,000,000,000**	**20,000,000,000**	**25,000,000,000**	**30,000,000,000**
	Belanja Tidak Terduga	53,772,545,881	11,936,717,666	15,000,000,000	20,000,000,000	25,000,000,000	30,000,000,000
5.4	BELANJA TRANSFER	**487,302,611,649**	**496,376,590,390**	**472,712,373,851**	**475,914,412,056**	**479,261,392,080**	**482,954,699,046**
	Belanja Bagi Hasil	62,697,901,449	67,761,443,390	64,878,064,351	68,080,102,556	71,427,082,580	75,120,389,546
	Belanja Bantuan Keuangan	424,604,710,200	428,615,147,000	407,834,309,500	407,834,309,500	407,834,309,500	407,834,309,500
JUMLAH BELANJA		**3,364,314,144,635**	**2,875,794,980,504**	**2,905,358,753,558**	**2,951,453,647,488**	**2,999,630,988,535**	**3,046,179,639,879**
	Total Surplus/(Defisit)	-	-	-	-	-	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	-	-	-	-	-	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
	Penerimaan Pinjaman Daerah						
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	-	-	-	-	-	
	Pembentukan Dana Cadangan						
	Penyertaan Modal Daerah						
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo						
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	
	Pembiayaan Netto	-	-	-	-	-	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	
TOTAL APBD		**3,364,314,144,635**	**2,875,794,980,504**	**2,905,358,753,558**	**2,951,453,647,488**	**2,999,630,988,535**	**3,046,179,639,879**

Sumber : Bappelitbangda, diolah 2025, yang dikelola dalam SIPD

2.2.3.2 Alternatif Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD kabupaten. Walau demikian, peluang untuk sumber- sumber pendanaan lainnya berkontribusi dalam membiayai pembangunan daerah sangat terbuka lebar. Sehubungan dengan potensi tersebut, maka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung Barat periode Tahun 2025-2029 telah mengindentifikasi beberapa sumber pendanaan non APBD kabupaten, antara lain:

a) APBN dan APBD Provinsi

Pembangunan Kabupaten Bandung Barat selain bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Provinsi Jawa Barat. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta urusan bersama yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah provinsi, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

b) Corporate Social Responbility / CSR (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang kesinambungan serta berdampak positif terhadap masyarakat. Peningkatan kinerja program CSR dalam pembangunan Kabupaten Bandung Barat dapat ditempuh melalui:

1. Perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunanKabupaten Bandung Barat.
2. Penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2025-2029.

c) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk "menciptakan pangsa pasar".

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dari aspek pembiyaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bersama-sama membiayai pengakselerasian pembangunan.

d) Dana Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Bandung adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

e) Pendanaan Obligasi Daerah dan Sukuk

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum dipasar modal. Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan resiko yang ada. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bond). Selain Obligasi Daerah, potensi sumber pembiayaan daerah lainnya adalah Obligasi Syariah atau Sukuk.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan adalah adanya perbedaan atau gap antara kondisi yang diinginkan atau direncanakan, dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Dalam hal permasalahan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat yaitu perbedaan atau gap antara rencana pembangunan dengan kondisi yang dicapai sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) aspek utama yaitu : (1) Aspek Geografi, (2) Aspek Demografi, (3) Aspek Kesejahteraan Ekonomi, (4) Aspek Daya Saing Daerah, dan (5) Aspek Pelayanan Umum. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bandung barat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

2.3.1.1 Aspek Geografi

Permasalahan berdasarkan aspek geografi diidentifikasi sebagai permasalahan yang menyangkut posisi Bandung Barat berdasarkan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana serta diidentifikasi berdasarkan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan aspek geografi di Kabupaten Bandung Barat meliputi: rawan bencana, berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta masih rendahnya kualitas lingkungan hidup.

a. **Rawan Bencana,** Kondisi bentang alam Kabupaten Bandung Barat yang didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal berupa pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan. Kondisi topografi dan struktur geologi yang kompleks tersebut menjadikan wilayah Bandung Barat rawan terhadap bencana alam terutama bencana tanah longsor, pergerakan tanah dan angin puting beliung. Secara geografis Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana gempa bumi yang cukup tinggi karena terletak di jalur gempa aktif sesar Lembang.

   Selain itu penyebab lain bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat dipicu dengan semakin banyaknya alih fungsi lahan terutama alih fungsi lahan ruang terbuka hijau dan kawasan hutan di wilayah hulu yang tidak terkendali serta secara klimatologi curah hujan yang tinggi dengan kondisi wilayah berbentuk cekungan menjadi muara bagi anak-anak sungai sehingga berdampak meningkatnya intensitas banjir terutama banjir bandang. Kondisi cuaca yang ekstrem akibat perubahan iklim, juga sering memicu terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat, diantaranya terkait dengan bencana kekeringan. Rendahnya curah hujan menimbulkan kekeringan serta mempengaruhi produksi tanaman padi sawah dan hortikultura maupun perkebunan. Sedangkan curah hujan yang lebat dapat menyebabkan berlebihnya kadar air atau tergenangnya sawah atau pertanian secara berlebihan serta masa curah hujan dengan kurangnya fotosintesis yang mengakibatkan pembusukan tanaman pertanian.

b. **Berkurangnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan,** Permasalahan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan Pembangunan berkelanjutan, untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Pertumbuhan populasi yang pesat dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, termasuk banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi akibat kebutuhan hidup, telah berdampak terhadap kemampuan alam untuk mendukung kehidupan. Hal ini berisiko memperburuk kerusakan lingkungan, mengancam keseimbangan ekosistem dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat Barat, terutama terkait daya dukung ketersediaan air dan daya dukung ketersediaan pangan. Daya dukung air di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan sumber air baku potensial dan penyediaan air bersih. Sumber air baku potensial dan berkapasitas besar di Kabupaten Bandung Barat adalah aliran Sungai Citarum yang dikenal sebagai Waduk Saguling. Belum atau tidak banyak dimanfaatkan karena sudah banyak tercemar limbah industri juga terpolusi limbah domestik baik di badan air itu sendiri maupun yang bersumber dari buangan 12 sungai-sungai yang berfungsi sebagai drainase induk kota telah pula bermuara Sungai Citarum.

Sumber air tanah sangat diprioritaskan sebagai kebutuhan cadangan air untuk masa depan Kabupaten Bandung Barat yang tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan, berdasarkan pendekatan neraca air yaitu rasio antara pemanfaatan air untuk kebutuhan penduduk dibandingkan dengan potensi air permukaan yang dihasilkan dari PDAM belum secara optimal dapat melayani kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Secara umum bahwa daya dukung air Kabupaten Bandung Barat belum terlampaui sehingga berdasarkan ketersediaan air permukaan penduduk yang ada tidak bisa terlayani air bersih dengan cukup sesuai dengan kebutuhan. Daya dukung pangan akan terus menurun seiring dengan pertambahan penduduk dan perubahan lahan pertanian menjadi lahan terbangun, maka berdampak terhadap kurangnya produksi padi di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat, kondisi ketersedian pangan dibandingkan dengan proyeksi kebutuhan pangan sampai dengan tahun 2030, prevalensi ketidak cukupan pangan masih belum mencapai target hal ini disebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan, masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan beras, Alih fungsi lahan yang mengakibatkan berkurangnya produksi pangan, meningkatnya jumlah penduduk sehingga meningkatnya jumlah konsumsi pangan yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktifitas pertanian pangan.

c. **Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup,** Permasalahan pembangunan terkait lingkungan hidup yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung Barat yaitu masih rendahnya kualitas lingkungan hidup. Permasalahan dalam bidang lingkungan hidup teridentifikasi berhubungan dengan beberapa penentu, diantaranya yaitu masih tingginya pencemaran air dan udara, belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu dan hilir, pengelolaan dan konservasi sumber daya air belum optimal, degradasi daerah tangkapan air dan banyaknya lahan kritis yang belum terkelola serta aktifitas penambangan secara ilegal ikut menyumbang penurunan kualitas tutupan lahan/tanah.

   Perubahan lingkungan yang cepat akibat aktivitas manusia dan industri, seperti deforestasi, polusi industri, penggunaan bahan kimia berbahaya, pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal, telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang signifikan. Permasalahan ini tidak hanya mempengaruhi keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup manusia seperti kesehatan dan ketahanan pangan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh polusi udara, pencemaran air, serta penurunan kualitas tanah juga telah mengancam keseimbangan ekosistem. Pencemaran udara di perkotaan disebabkan oleh kegiatan transportasi dan industri, serta pengolahan sampah yang masih menggunakan system pembakaran yang belum sempurna ditunjang dengan belum efektifnya kebijakan reduce, reuse, dan recycle (3R).

Pemetaan permasalahan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan aspek geografi di Kabupaten Bandung Barat dapat dicermati di dalam tabel berikut:

Tabel 2.173. Permasalahan Pembangunan Aspek Geografi

Aspek	Permasalahan Pembangunan	Akar Permasalahan
Geografi	Rawan Bencana (Tanah Longsor, Pergerakan Tanah,Angin Putih Beliung, Gempa Bumi, Banjir Bandang Dan Kekeringan)	➢ Kondisi topografi dan struktur geologi yang kompleks menjadikan wilayah bandung Barat rawan terhadap bencana alam terutama tanah longsor, pergerakan tanah dan angin puting beliung ➢ Merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana gempa bumi yang cukup tinggi karena terletak di jalur gempa aktif sesar Lembang ➢ Alih fungsi lahan ruang terbuka hijau dan kawasan hutan di wilayah hulu yang tidak terkendali sehingga berdampak meningkatnya intensitas banjir ➢ Kondisi cuaca yang ekstrem akibat perubahan iklim sering memicu terjadinya bencana kekeringan
	Berkurangnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan	➢ Daya dukung pangan akan terus menurun seiring dengan pertambahan penduduk ➢ Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan ➢ Pengelolaan dan konservasi sumber daya air belum optimal ➢ Alih fungsi lahan pertanian dan perubahan iklim yang berdampak pada turunnya produksi pangan sehingga belum mencukupi kebutuhan masyarakat ➢ Stok cadangan pangan belum terpenuhi
	Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup	➢ Masih tingginya pencemaran air, udara, dan tutupan lahan ➢ Belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu dan hilir ➢ Degradasi daerah tangkapan air dan banyaknya lahan kritis yang belum terkelola ➢ Belum optimalnya upaya penurunan emisi GRK

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

2.3.1.2 Aspek Demografi

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan, selain jumlah penduduk, informasi mengenai parameter demografi seperti struktur umur penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan umur harapan hidup saat lahir sangat menunjang untuk perencanaan pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan juga menjadi target pembangunan. Pengambilan kebijakan di suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, serta kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Permasalahan demografi mencakup pertambahan penduduk dan tidak meratanya sebaran penduduk dengan sejumlah tantangannya termasuk dampak negative dengan adanya bonus demografi harus menjadi focus perhatian Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi permasalahan dengan kebijakan yang tepat dalam perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun mendatang (2025-2029).

a. Permasalahan Pertumbuhan, Komposisi dan Sebaran Penduduk, Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa tren rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan sampai dengan Tahun 2030 cenderung menurun. Berdasarkan kondisi tersebut, tantangan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat harus memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi seluruh penduduk khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, termasuk disabilitas dan anak-anak. Bila dilihat dari komposisi penduduk, perkembangan penduduk di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren penurunan dari persentase penduduk usia muda dan usia kerja serta tren peningkatan bagi penduduk usia lanjut. Perkembangan komposisi penduduk ini perlu diantisipasi oleh pemerintah, terkhusus perihal penurunan jumlah penduduk usia muda dan peningkatan jumlah penduduk usia lansia yang perlu direspons melalui berbagai kebijakan yang difokuskan kepada peningkatan jumlah penduduk usia muda dan usia kerja serta kebijakan perawatan penduduk lansia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi Kabupaten Bandung Barat yang berpotensi menjadi daerah dengan masyarakat renta (*aging society*) jika intervensi dalam bidang kependudukan tidak dilakukan segera.

Selain tersebut diatas permasalahan terkait kependudukan, dilihat dari rasio ketergantungan bahwa dampak yang terjadi jika suatu wilayah memiliki rasio ketergantungan yang besar antara lain dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas wilayah, karena banyaknya penduduk yang berada di luar usia angkatan kerja. Berdasarkan data demografi di bab II, tren demografi Kabupaten Bandung Barat yang semakin menua, dimana penduduk usia tua semakin banyak dengan tidak disertainya tingkat kelahiran yang optimal. Peningkatan tren rasio ketergantungan ini perlu diantasipasi oleh pemerintah, khususnya perihal tanggungan penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif yang semakin tinggi.

Berdasarkan pada aspek demografi, pada lima tahun ke depan dengan memperhitungkan proyeksi penduduk yang selalu akan bertambah, salah satu permasalahan terkait demografi yaitu tidak meratanya sebaran penduduk Kabupaten Bandung Barat wilayah Utara dan tengah dibanding dengan wilayah selatan, hal ini akan berimplikasi pula terhadap kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat. Proyeksi peningkatan kepadatan penduduk ini perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang menyasar persiapan daerah dengan kepadatan penduduk yang tergolong tinggi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan intensitas pelayanan yang lebih efisien dalam menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat.

b. Permasalahan Dampak Negative Bonus Demografi, Bonus Demografi diartikan sebagai potensi pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pergeseran struktur usia penduduk, terutama ketika jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk non-usia kerja (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas) dan lebih tua. Di sisi lain, bonus ini dapat berubah menjadi bencana besar apabila tidak dipersiapkan dalam menghadapi tantangan dan isu permasalahan jangka menengah 5 (lima) tahun bahkan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun kedepan, diantaranya Megatrend Dunia sebagai isu global, megathrust dan kemajuan teknologi serta geopolitik dan geoekonomi.

Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Bandung Barat akan mencapai puncaknya pada Tahun 2020-2035. Sedangkan jumlah penduduk Bandung Barat berdasarkan data proyeksi SP 2020 saat ini pada usia produktif antara 15-64 tahun lebih banyak dari usia tidak produktif, Kondisi dimana penduduk usia produktif akan lebih banyak pada suatu waktu mengindikasikan bahwa di waktu tertentu akan terdapat lebih besar kesempatan untuk meningkatkan perekonomian negara karena jumlah angkatan kerja lebih banyak. Kondisi bonus demografi ini didominasi oleh generasi milenial yang mana akan menjadi incaran tenaga produktif negara-negara maju yang kekurangan anak muda (usia kerja produktif) sehingga bisa menjadi peluang yang besar jika kita mampu merespon permintaan pasar tenaga kerja global. Berhasil tidaknya bonus demografi ini ditentukan oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan pertumbuhan penduduk. Penghitungan bonus demografi berkaitan erat dengan penghitungan rasio ketergantungan.

Pemetaan permasalahan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan aspek demografi di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.174. Permasalahan Pembangunan Aspek Demografi

Aspek	Permasalahan Pembangunan	Akar Permasalahan
Demografi	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Belum Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	➢ Jumlah penduduk yang terus meningkat ➢ Tidak meratanya sebaran penduduk ➢ Belum optimalnya infrastruktur pendukung pergerakan orang dan barang
	Belum Optimalnya Pembangunan Gender Dan Kesetaraan Gender	➢ Tren rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan cenderung menurun ➢ Masih kurangnya layanan penduduk khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, termasuk disabilitas dan anak-anak
	Meningkatnya Rasio Ketergantungan Penduduk	➢ Tren demografi yang semakin menua, dimana penduduk usia tua semakin banyak dengan tidak disertainya tingkat kelahiran yang optimal ➢ Tren penurunan persentase penduduk usia muda dan usia kerja serta tren peningkatan bagi penduduk usia lanjut

	Dampak Negative Bonus Demografi	➢ Jumlah penduduk usia produktif akan mencapai puncaknya pada Tahun 2020-2035 ➢ Meningkatnya penduduk usia produktif tidak seimbang dengan permintaan pasar tenaga kerja ➢ Kompetensi angkatan kerja dan penduduk usia tua yang belum optimal dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

2.3.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan aspek kesejahteraan masyarakat mencakup kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi pencapaian kualitas penghidupan secara ekonomi bagi masyarkaat Kabupaten Bandung Barat, kesejahteraan sosial budaya merupakan kondisi kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. **Masih Tingginya Angka Kemiskinan,** Suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2020 –2024, garis kemiskinan Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan sebesar Rp.93.113,- bila dibanding keadaan tahun 2020 sebesar Rp.362.212,- menjadi Rp.455.325,- di tahun 2024..

   Perkembangan tingkat kemiskinan Kab. Bandung Barat pada periode tahun 2019-2024 masih diangka 2 digit yaitu 9,38 persen di tahun 2019 dan tahun 2024 menjadi 10,49 persen, bahkan cenderung meningkat. Angka kemiskinan di Kab. Bandung Barat ini masih relatif tinggi tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat, begitupun dalam skala regional tingkat kemiskinan Kab. Bandung Barat berada pada peringkat 22 dari 27 Kab/Kota di Jawa Barat.

   Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan semakin meningkat dari kondisi tahun 2020 sebesar 1,40 point meningkat menjadi 1,59 poin di tahun 2024, hal ini mengindikasikan bahwa rata- rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 0,25 poin menjadi 0,23 poin di tahun 2024, hal ini memberikan informasi bahwa menurunnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

b. **Permasalahan Ketenagakerjaan,** Ketenagakerjaan tidak dapat telepas dari pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya ekonomi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun begitupun sebaliknya. Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi.

   Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Capaian TPT Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 sebesar 6,70 persen mengalami penurunan sebesar 1,41 persen poin dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 8,11 persen. TPT Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 sebesar 6,70 persen ini artinya dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6-7 orang penganggur. Walaupun tingkat pengangguran telah menyentuh satu digit (6,70 Persen), tetapi kondisi tingkat pengangguran di Kab. Bandung Barat masih dibawah capaian nasional dan sedikit diatas capaian Jawa Barat. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja.

c. **Daya Beli Masyarakat Berkurang,** Laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan sisi penawarannya, maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, demikian sebaliknya. Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) mematok target inflasi untuk tahun 2024 berada di kisaran angka 3 persen plus minus 1 persen. Pencapaian inflasi di kabupaten bandung Barat tahun 2024 sebesar 1,75 jauh dibawah target, penyebab utamanya bukan hanya harga yang terkendali dan nilai mata uang yang stabil tetapi akibat juga permintaan domestik yang tidak kuat akibat pemulihan ekonomi yang belum optimal.

Daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin sangat rentan terhadap inflasi barang dan jasa, sehingga perlu upaya pengendalian inflasi dimana harga-harga di tingkat konsumen rentan oleh gangguan pasokan, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan rantai pasok global maupun faktor internal. Hal ini ditunjang dengan belum optimalnya stabilitas pasokan, system rantai pasok dan perlindungan sosial yang belum tepat sasaran.

d. **Permasalahan Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata,** Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kab. Bandung Barat Tahun 2020 - 2024 berfluaktif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah (<0,4). Pada tahun 2020 gini rasio sebesar 0,376 meningkat sebesar 0,024 persen di tahun 2024 menjadi 0,400. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk kategori dengan ketimpangan rendah karena nilainya masih dibawah 0,4 tetapi Pemerintah Daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat denga kategori sedang.

   Rata-rata penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 menghabiskan 607,96 ribu rupiah untuk konsumsi makanan dan 522,52 ribu rupiah untuk konsumsi bukan makanan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan pada pengeluaran makanan (-2,72 persen) lebih kecil dibanding pengeluaran bukan makanan (3,57 persen). Hal ini berimbas pada kontribusi pengeluaran untuk konsumsi makanan (53,78 persen) yang lebih besar dibanding pengeluaran bukan makanan (46,22 persen) dari total pengeluaran secara keseluruhan. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah, begitupun sebaliknya.

e. **Perlindungan Sosial Belum Inklusif,** perlindungan social inklusif memastikan bahwa semua orang masyarakat Kabupaten Bandung Barat termasuk kelompok rentan (anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, penyandang disabilitas) serta kelompok minoritas dan marginal dipastikan mendapatkan akses layanan dan program yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta mengurangi kerentanan terhadap resiko ekonomi, social, pendidikan dan Kesehatan.

   Masih terdapat keterbatasan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan kesehatan akibat keterbatasan geografis dan kewilayahan, keterbatasan fisik masyarakat, serta keterbatasan ekonomi keluarga. Pemerataan sarana prasarana pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan termasuk peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga Kesehatan untuk menjamin seluruh masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.

f. **Masih Rendahnya Kehidupan Social Bermasyarakat yang Harmonis Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Sesuai Karifan Budaya Local,** Nilai Agamis menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek kehidupan social di masyarakat. Masyarakat agamis adalah masyarakat yang memiliki keimanan, taat ibadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam aktivitas sehari-hari termasuk didalamnya sifat gotong royong saling membantu. Kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai agamis memberikan pedoman hidup yang mendalam dalam mengatur perilaku individu maupun masyarakat termasuk aspek etika, social dengan mengedepankan rasa saling menghormati dan keterbukaan terhadap perbedaan. Nilai-nilai agamis mengajarkan kedamaian, toleransi, dan kasih saying serta menekankan pentingnya menjaga moralitas dan solidaritas sosial yang dapat menjadi dasar yang kokoh dalam melestarikan kebudayaan. Sedangkan kondisi harmonis dalam kehidupan social dimasyarkat yaitu masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras.

g. **Ketimpangan Gender Masih Tinggi,** Permasalahan ketimpangan gender masih di Kabupaten Bandung Barat di mana perempuan masih mengalami hambatan untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Hal ini dapat terjadi karena norma budaya atau kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik dinilai masih cukup rendah, karena perempuan jarang ditempatkan dalam posisi pengambil keputusan baik dalam politik maupun dalam pemerintahan atau sector swasta. Ketimpangan gender dapat erkontribusi terhadap rendahnya representasi perempuan dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka di keluarga dan masyarakat. Secara Gender, perempuan seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan, baik di dalam rumah tangga, tempat kerja, maupun dalam masyarakat. Perlindungan terhadap perempuan sangat penting terutama terhadap hak reproduksi, perlindungan dari kekerasan dan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang setara.

h. **Masih rendahnya Kualitas keluarga,** Permasalahan kualitas keluarga di Kabupaten Bandung Barat diantaranya masih belum optimalnya ketahanan legalitas struktur keluarga berdasarkan kepemilkan akta, belum optimalnya ketahan fisik keluarga berdasarkan persentase rumah tangga yang makan makanan sehat bergizi, persentase rumah tangga dengan anak berusia 5-17 tahun yang merokok, persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu). Permasalahan selanjutnya belum optimalnya kualitas ketahanan ekonomi keluarga yang dilihat dari persentase kepemilikan rumah tinggal serta persentase rumah tangga yang anggota rumah tangga memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya).

Permasalahan berikutnya yaitu masih rendahnya kualitas ketahanan sosial-psikologi yang dilihat dari persentase rumah tangga yang anggota rumah tangga menjadi korban kejahatan dan rendahnya ketahanan sosial budaya keluarga yang dilihat dari persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak/perkawinan usia dini.

i. **Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Lingkungan,** Kesehatan lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Permasalahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yaitu masih rendahnya rumah tangga yang mengakses terhadap air minum dan sanitasi layak.

Pemetaan permasalahan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat (ekonomis dan social) di Kabupaten Bandung Barat dapat dicermati di dalam tabel berikut:

Tabel 2.175. Permasalahan Pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek	Permasalahan Pembangunan	Akar Permasalahan
Kesejahteraaan Masyarakat (Ekonomi dan Sosial)	Angak Kemiskinan Tinggi	➢ Masih tingginya tingkat pengangguran, ➢ Rata- rata pengeluaran penduduk cenderung makin mendekati garis kemiskinan ➢ Masih terbatasnya akses dan infrastruktur serta sektor-sektor ekonomi ➢ Perlindungan sosial belum optimal dan kurang tepat sasaran
	Tingkat Pengangguran Tinggi	➢ Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan permintaan pasar kerja ➢ Laju pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja ➢ Tingkat pendidikan yang masih rendah ➢ Perluasan akses dan kesempatan kerja belum optimal ➢ Masih lemahnya (link and match) antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja
	Daya Beli Masyarakat Berkurang	➢ Daya beli masyarakat miskin rentan terhadap inflasi barang dan jasa ➢ Belum optimalnya stabilitas pasokan dan sistem rantai pasok barang kebutuhan pokok
	Ketimpangan pendapatan semakin melebar	➢ Infrastruktur perekonomian belum merata ➢ Ketimpangan akses dalam pemerataan pembangunan ekonomi ➢ Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah
	Perlindungan Sosial Belum Inklusif	➢ Belum optimalnya layanan bagi kelompok rentan (anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, penyandang disabilitas) serta kelompok minoritas dan marginal ➢ Masih terdapat keterbatasan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan kesehatan akibat keterbatasan geografis, keterbatasan fisik masyarakat, serta keterbatasan ekonomi

	Masih rendahnya kehidupan social bermasyarakat yang harmonis berlandaskan nilai-nilai agama sesuai karifan budaya local	➢ Mulai lunturnya budaya gotong royong di masyarakat ➢ Berkurangnya nilai toleran dimasyarakat ➢ Belum optimalnya peran Tokoh masyarakat dan SDM keagaman dalam menciptakan kehidupan sosial yang berlandaskan nilai agamis berdasarkan kearifan budaya local ➢ Masih belum optimalnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan
	Ketimpangan Gender masih tinggi	➢ Perempuan masih mengalami hambatan untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan yang setara ➢ Masih rendahnya perlindungan perempuan ➢ Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ➢ Peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik dinilai masih cukup rendah
	Masih rendahnya Kualitas keluarga	➢ Belum optimalnya kualitas kesehatan dan ketahanan ekonomi keluarga ➢ Masih adanya pernikahan dini
	Masih trendahnya kualitas Kesehatan lingkungan	➢ Kondisi lingkungan yang belum mendukung derajat kesehatan ➢ Masih rendahnya rumah tangga yang mengakses terhadap air minum dan sanitasi layak

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

2.3.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berdasarkan aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Berdasarkan beberapa faktor kunci yang mempengaruhi daya saing daerah di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan untuk mewujudkan daya saing daerah yang optimal. Beberapa permasalahan terkait aspek daya saing daerah antara lain:

a. **Masih Rendahnya Daya Saing Kemampuan Ekonomi Daerah**, hal ini ditunjukan dengan permasalahan terkait:
   - Melambatnya pertumbuhan ekonomi: pertumbuhan ekonomi yang melambat di 3 (tiga) tahun terakhir terutam pada sector-sektor unggulan pertanian dan perdagangan hal ini dipengaruhi karena belum optimalnya antisipasi perubahan iklim yang berpengaruh terhadap produksi pertanian serta semakin berkurangnya lahan pertanian yang tidak dibarengi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna pada bidang pertanian dalam meningkatkan produktifitas. Sedangkan pada sector perdagangan, melemahnya daya beli masyarakat yang hanya focus pada pemenuhan kebutuhan pokok makanan turut mempengaruhi terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi.

- Ketergantungan pada sektor tertentu: ketergantungan yang tinggi pada sektor ekonomi tertentu (sector industri pengolahan dan pertanian) dapat membuat daerah rentan terhadap fluktuasi pasar serta belum optimalnya pertumbuhan sector potensial ekonomi lainnya (sector Informasi dan komunikasi serta Penyediaan akomodasi dan makan minum termasuk didalamnya sub sector pariwisata)
- Kurangnya dukungan untuk IKM dan UMKM: Industri Kecil Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering menghadapi kendala dalam akses modal, teknologi, pasar, dan keahlian manajerial yang diperlukan untuk berkembang secara signifikan.
- Tingkat persaingan yang tinggi dalam menarik invstasi: permasalahan dalam menghadapi persaingan dari daerah-daerah tetangga atau bahkan global dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi tertentu karena masih rendahnya daya saing iklim investasi dan daya saing ketenagakerjaan di Kab. Bandung Barat.
- Kondisi lingkungan dan keberlanjutan: Kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dapat menimbulkan risiko jangka panjang terhadap daya saing sektor-sektor ekonomi, terutama di sektor pariwisata dan pertanian.

b. Masih Rendahnya Daya Saing SDM, kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan, keberhasilan pembangunan manusia dapat terwujud apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif, hal ini ditunjukan dengan permasalahan terkait:

- Capaian pembangunan manusia Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun terakhir termasuk dalam kategori "kelompok sedang" dengan capaian di tahun 2023 sebesar 69,61 poin dan baru katagori tinggi di tahun 2024 dengan capaian 70,77 poin, masih berada jauh di posisi ke 22 dari 27 Kab/Kota di Jawa Barat yang rata-rata capaian IPM nya berkisar 72 poin.
- Umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat walaupun telah mencapai 73,10 tahun. Tetapi capaian kualitas umur panjang ini masih belum dibarengi dengan kualitas hidup sehat yang ditandai dengan Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan ketercapaiannya masih 87,71 persen, ketersediaan tenga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi SDM Kesehatan capaiannya baru 70%. Dalam hal Intervensi Gizi Spesifik dalam rangka menurunkan prevelansi stunting, masih belum optimal hal ini dilihat dari masih tingginya angka stunting di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian s.d tahun 2023 prevelansi stunting sebesar 25,10 persen bahkan meningkat kembali di tahun 2024 menjadi 30,08 persen.

- Penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata baru menempuh 8,24 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII (kelas II SMP)
- Harapan lama sekolah seorang anak di Bandung Barat yang berusia 7 tahun diharapkan baru dapat menempuh pendidikan selama 12,00 tahun atau setara dengan kelas IX.
- Kurangnya Kompetensi Tenaga Kerja: Kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern dapat menjadi hambatan dalam menghadapi persaingan di tingkat regional dan global.
- Bila dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja di Kabupaten Bandung Barat masih lebih besar pada kegiatan informal yaitu sebanyak 533.183 orang (59,26 persen), bila dibanding dengan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 366.598 orang (40,74 persen).
- Penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah, yaitu sebesar 45,51%, sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 6,13%.

c. **Masih Rendahnya Daya Saing Infrastruktur dan Konektivitas antar wilayah,** hal ini disebabkan karena:

- Belum optimalnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang masih tinggi dibeberapa wilayah yang disebabkan oleh tidak merata pemenuhan kebutuhannya sehingga harus mengakses dari dan ke wilayah lain bahkan masih terdapat beberapa desa yang tidak memiliki infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Belum meratanya infrastruktur pendidikan dan kesehatan menyebabkan sulitnya akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dilihat dari rasio ketersediaan puskesmas dan rasio ketersediaan tempat tidur terhadap rasio penduduk serta rasio ketersediaan sekolah terhadap ruang kelas terhadap rasio penduduk usia sekolah masih diperlukan penambahan puskesmas dan rumah sakit serta penambahan ruang kelas sekolah dengan tetap memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga pengajar beserta pendukungnya. Dengan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Belum optimalnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman. Hal ini teridentifikasi dengan masih adanya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah, serta masih rendahnya pemenuhan akan kebutuhan akses sanitasi aman (capaian 2024 sebesar 57,20%) dan pemenuhan kebutuhan air minum layak bagi masyarakat (capaian 2024 sebesar 59,17).

Permasalahan terkait perumahan dan permukiman lainnya yaitu belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, TPS, TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir) dengan jumlah sampah yang dihasilkan berdasarkan data tahun 2024 sebesar 763,1 ton/hari dan kemampuan total sampah terkelola hanya sebesar 156,5 ton/hari sehingga menimbulkan permasalahan sebanyak 606,6 ton/hari sampah yang belum terkelola. Selain itu, pada sektor perumahan masih terdapat permasalahan angka backlog perumahan yang cukup tinggi sebesar 69.393 dengan dengan rasio backlog/KK sebesar 14,52 persen, banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung Barat sekitar 13.032 unit rumah, dan luasnya kawasan permukiman kumuh sebanyak 19 kawasan dengan luas 123.89 Ha serta minimnya ketersediaan lahan di perkotaan untuk pengembangan perumahan.

- Infrastruktur digital belum merata, perkembangan teknologi dan informasi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat menjadi potensi untuk meningkatkan ekonomi digital melalui penetrasi internet bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat tetapi permasalahan timbul akibat masih kurangnya pemanfaatan penggunaan digitalisasi dalam pada sector-sektor yang mampu meningkatkan perekonomian. Selain itu kondisi geografis juga berpengaruh terhadap timbulnya permasalahan pembangunan infrastruktur digital di kabupaten bandung Barat dengan masih adanya beberapa wilayah yang *Blank Spot* dimana area tersebut tidak bisa di akses jaringan internet.
- Belum optimalnya Konekvitas Antar Wilayah (pedesaan dan perkoataan serta wilayah utara dan selatan) hal ini disebabkan jalan dan sarana transportasi sebagai komponen pembentuk infrastruktur konektivitas, sebaran dari hub-hub penghubung yang menjadi titik simpul transportasi masih belum terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi, selain itu sarana transportasi massal masih belum merata. Transportasi perkotaan masih belum terintegrasi dengan seluruh moda yang ada, sehingga menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum masih kecil. Selain itu pendistribusian arus barang dan mobilitas penumpang masih menjadi permasalahan mengingat kondisi jaringan jalan dan sistem tranportasi di Kabupaten Bandung Barat yang belum memadai secara merata.

d. Masih Rendahnya Daya Saing Iklim Investasi, Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan pembangunan perekonomian daerah. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh dan berpotensi menjadi permasalahan yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti Regulasi terkait insentif kemudahan investasi, kondusifitas wilayah terhadap rasa aman dan pelayanan perijinan.

- Regulasi terkait insentif kemudahan investasi masih terbatas, insentif terhadap kemudahan investasi PMA maupun PMDN seperti insentif pajak dan retribusi daerah, dan subsidi bunga kredit modal kerja masih terbatas dalam penyelenggaraan investasi.
- Masih kurang optimalnya penaggulangan kondusifitas wilayah terhadap rasa aman bagi investor.
- Beberapa permasalahan dalam proses perizinan yang berbasis online antara lain infrastruktur yang belum memadai, pengoperasian dan mahalnya perawatan perangkat serta ketersediaan SDM yang kompeten khususnya dalam mengadopsi teknologi digital dan e-commerce.
- Belum optimalnya kualitas layanan perijinan: Layanan publik terkait perijinan online yang tidak efisien dan responsif dapat menghambat pertumbuhan investasi. Kepastian sistem dan prosedur perijinan yang meliputi persyaratan, waktu dan biaya serta transparansi dan akuntabilitas proses perijinan merupakan komponen penting dalam meningkatkan daya saing investasi hal ini terlihat dari masih adanya penerbitan perijinan yang belum sesuai dengan SOP sebesar 21,97 persen.

Pemetaan permasalahan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan aspek daya saing daerah di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.176. Permasalahan Pembangunan Aspek Daya Saing Daerah

Aspek	Permasalahan Pembangunan	Akar Permasalahan
Daya Saing Daerah	Masih rendahnya daya saing kemampuan ekonomi daerah (termasuk daya saing IKM dan UMKM)	➢ Melambatnya pertumbuhan ekonomi ➢ Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal ➢ Tingginya ketergantungan pada sector-sektor ekonomi tertentu membuat daerah rentan terhadap fluktuasi pasar ➢ Peningkatan sector unggulan belum optimal ➢ Produktivitas dan kualitas sektor-sektor perekonomian masih belum sebanding dengan potensinya ➢ Terbatasnya kapasitas fiskal daerah ➢ Kapasitas usaha, termasuk di dalamnya kapasitas teknologi dan akses pembiayaan IKM dan UMKM terbatas ➢ Daya saing produk masih rendah, karena kurang memahami dan memanfaatkan teknologi ➢ Masih rendahnya daya saing iklim investasi dan daya saing ketenagakerjaan
	Masih rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM	➢ Walaupun kualitas umur panjang sudah mencapai 75,06 tahun tetapi masih belum dibarengi dengan kualitas hidup sehat ➢ Intervensi gizi spesifik dalam rangka menurunkan prevelansi stunting belum optimal ➢ Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi ➢ Penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata baru menempuh 8,24 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII (kelas II SMP)

		➢ Harapan lama sekolah seorang anak di Bandung Barat yang berusia 7 tahun diharapkan baru dapat menempuh pendidikan selama 12,00 tahun atau setara dengan kelas IX atau (kelas III SMA) ➢ Belum berkembangnya pusat pendidikan dan inovasi ➢ Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih belum merata ➢ Masih perlu ditingkatkannya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar dan tenaga Kesehatan ➢ Belum optimalnya peran keluarga dalam pembentukan karakter anak ➢ Masih kurangnya kompetensi tenaga kerja ➢ Masih lemahnya (*link and match*) antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja
	Masih Rendahnya Daya Saing Infrastruktur dan Konekvitas Antar Wilayah	➢ Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pembangunan Infrastruktur pendidikan dan kesehatan ➢ Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pembangunan Infrastruktur perumahan dan permukiman ➢ Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah ➢ Masih rendahnya pemenuhan akan kebutuhan akses sanitasi aman dan pemenuhan kebutuhan air minum layak bagi masyarakat ➢ Belum optimalnya pengelolaan sampahan terpadu yang masih menyisakan permasalahan sampah belum terkelola ➢ Permasalahan angka backlog perumahan yang cukup tinggi ➢ Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung Barat ➢ Belum optimalnya pengurangan luas kawasan permukiman kumuh ➢ Minimnya ketersediaan lahan di perkotaan untuk pengembangan perumahan ➢ Masih kurangnya pemanfaatan penggunaan digitalisasi dalam pada sector-sektor yang mampu meningkatkan perekonomian ➢ Infrastruktur digital belum merata ➢ Masih terdapat wilayah yang Blank Spot (tidak bisa di akses jaringan internet) ➢ Aksebilitas transportasi ke pusat-pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan belum merata ➢ Jalan dan sarana transportasi sebagai komponen pembentuk infrastruktur konektivitas belum terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi
	Masih Rendahnya Daya Saing Iklim Investasi	➢ Regulasi terkait insentif kemudahan investasi masih terbatas ➢ Belum optimalnya infrastruktur digital dalam kemudahan perijinan ➢ Belum optimalnya kualitas layanan perijinan dengan masih adanya penerbitan perijinan yang belum sesuai dengan SOP

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

2.3.1.5 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan aspek pelayanan umum mencakup penerapan reformasi birokrasi, pelayanan public dan digitalisasi pemerintahan serta penerapan inovasi daerah.

a. **Penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Public Belum Optimal,** Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta mencegah dan menjauhi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kab. Bandung Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah, perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur ASN, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah belum optimalnya layanan informasi daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah serta tingkat kepuasan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Salah satu fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Capaian indikator SAKIP Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan walaupun masih pada katagori “B” tetapi secara nilai mutu s.d tahun 2024 menjadi sebesar 68,59 sedangkan indikator untuk mengukur capaian kualitas pelayanan public di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 84,26 persen.

b. Digitalisasi Pemerintahan serta Penerapan Inovasi Daerah yang Belum Optimal, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka penerapan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan. Walaupun capaian indeks SPBE Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2024 sebesar 3,78 poin tetapi masih terdapat nilai domain yang perlu ditingkatkan yaitu tingkat manajemen SPBE terkait penerapan manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi. Kedepan percepatan dan penerapan transformasi digital sector pemerintahan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pelayanan public dengan alat indikator baru yang disebut Indeks Pemerintahan Digital yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi pemerintahan. Indeks ini membantu pemerintah mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam transformasi digital, seperti infrastruktur, layanan digital, dan sumber daya manusia. Selain itu sistem keuangan berbasis digital perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk mengakses informasi mengenai alokasi dan penggunaan anggaran daerah hal ini untuk mendorong meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan serta digitalisasi pengelolaan pendapatan dalam rangka meningkatkan PAD. Permasalahan selanjutnya pada aspek pelayanan umum adalah terkait penguatan inovasi daerah dalam pelayanan public. Hal ini terdidentifikasi dari capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Bandung Barat yang masih rendah sebesar 39,07 point. Penguatan inovasi dalam pelayanan public sangat penting karena inovasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan kepuasan masyarakat. Inovasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menciptakan solusi baru yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan, serta mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pemetaan permasalahan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan aspek pelayanan umum di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.177. Permasalahan Pembangunan Aspek Pelayanan Umum

Aspek	Permasalahan Pembangunan	Akar Permasalahan
Pelayanan Umum	Penerapan reformasi birokrasi dan pelayanan public belum optimal	➢ Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas ➢ Birokrasi yang belum adaptif dan responsif terhadap perubahan, dinamika global, dan tuntutan masyarakat ➢ Masih kurangnya jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah, ➢ Masih perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur ASN ➢ Belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah

		➢ Belum optimalnya layanan informasi daerah yang salah satunya berupa sosialisasi produk hukum daerah dan transparansi keuangan daerah ➢ Belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset daerah ➢ Pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan
	Digitalisasi pemerintahan serta penerapan inovasi daerah yang belum optimal	➢ Penerapan manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan ➢ Belum optimalnya pengelolaan pendapatan berbasis digital untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ➢ Belum optimalnya penguatan sistem inovasi daerah

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

2.3.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, juga menggambarkan lingkungan strategis supra daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun global yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

2.3.2.1 Isu Global

A. *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Konsep SDG's dicanangkan untuk melanjutkann konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDG's) yang belum tercapai. Terdapat sejumlah tujuan MDGs yang belum tercapai antara lain:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AID, malaraia, dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan llingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Rumusan SDG's ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. 17 tujuan SDG's tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belaljar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersedian serta pengelolahan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bekerlanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tanguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutaan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

B. *Green Economy*

Green Economy atau Ekonomi Hijau adalah suatu Gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Ciri ekonomi hijau yang paling membedakan dari gagasan ekonomi lainnya yaitu penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya di mana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban, kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset. Untuk tinjauan umum tentang kebijakan pembangunan lingkungan internasional yang menuju ke laporan Ekonomi Hijau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).

Pencapaian target pembangunan berkelanjutan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan iklim global melalui penerapan ekonomi hijau hingga saat ini. Upaya tersebut ditunjukkan Pemerintah melalui komitmen dalam mendorong penyediaan sumber daya yang optimal guna mengakselerasi transisi energi berkelanjutan.

C. Revolusi Industri 4.0 atau *cyber physical system*

Revolusi Industri 4.0 merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi dengan teknologi saber. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor. Seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi.

Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional.

Dampak dari adanya Revolusi Industri 4.0 ada 2 yakni:

1) Dampak Positif, diantaranya:
   - Kemudahan dalam mengakses informasi.
   - Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tengaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin.
   - Dapat meningkatkan pendapataan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik

- Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli, hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap aja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya.

2) Dampak Negatif, diantaranya:

- Lebih rentan terhadap serangan siber, hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik.
- Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja.
- Adanya urbanisasi, dimana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar.
- Berdampak untuk lingkungan, hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar.

D. *Recovery and Rebuilding* (pasca pandemi covid-19)

Pandemi covid-19 telah menyebabkan banyak keterbatasan dalam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Peraturan pembatasan sosial yang terjadi di seluruh dunia menyebabkan banyak masyarakat mengalami pemberhentian paksa dari pekerjaan mereka sehingga keterlibatan teknologi digital semakin meningkat untuk menjaga aktivitas perekonomian tetap berjalan tanpa harus memerlukan tatap muka, dan *e-commerce* merupakan salah satunya. Penggunaan *platform e-commerce* pun kian populer di berbagai negara dalam rangka membangkitkan perekonomian global secara perlahan tapi pasti. Kesulitan ekonomi yang semakin terasa akibat adanya pandemi Covid-19 pada akhirnya mendorong negara-negara Afrika untuk membuka Area Perdagangan Bebas Benua Afrika (AfCFTA) pada awal Januari 2021 lalu. Mengutip situs web resmi PBB, perjanjian ini dibuat untuk melonggarkan batasan-batasan dari perdagangan dalam benua Afrika yang bertujuan untuk meningkatkan intensitas perdagangan intra-Afrika, meningkatkan kualitas industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing perdagangan Afrika di panggung global.

Sekretaris Jenderal AfCFTA mengungkapkan bahwa adanya program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang dialami oleh lebih dari 30 juta orang di seluruh Afrika dan meningkatkan kualitas hidup dari pelaku ekonomi benua Afrika. Negara-negara ASEAN telah berencana melakukan integrasi digital untuk mendukung aktivitas perdagangan dalam kawasan tersebut sejak akhir tahun 2020. Adanya integrasi digital di kawasan ASEAN diharapkan untuk mampu membantu memulihkan kondisi ekonomi di negara-negara ASEAN dan meningkatkan GDP di tiap negara hingga USD 1 triliun pada tahun 2025.

E. Transformasi Ekonomi Digital

Transformasi ekonomi digital adalah proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi modern untuk mengubah cara ekonomi beroperasi.

Hal ini melibatkan pemanfaatan terobosan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), internet, dan platform online untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi seperti perdagangan, layanan, produksi dan distribusi. Dalam ekonomi digital, teknologi memainkan peran sentral, dan memungkinkan interaksi antara produsen, konsumen dan pelaku bisnis lainnya. Contoh implementasi ekonomi digital, diantaranya: *e-commerce* (perdagangan elektronik), *fintech* (financial technology), digitalisasi industri, dan lain-lain. Fenomena ini membawa transformasi terhadap cara masyarakat berbelanja, berbisnis, dan berinteraksi secara ekonomi. Ekonomi digital telah memungkinkan konsep pekerjaan jarak jauh (remote work) menjadi lebih umum. Seorang individu dapat bekerja pada perusahaan di berbagai lokasi tanpa harus pindah fisik.

F. *Climate Change* (Perubahan Iklim)

Perubahan iklim adalah suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan pada suhu Bumi yang kemudian berlangsung selama satu dekade atau lebih dimana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri mengungkapkan perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia baik itu secara langsung maupun tidak langsung hingga kemudian mengubah variabilitas iklim alami dan komposisi dari atmosfer global pada suatu periode waktu yang dapat diperbandingkan. Penyebab perubahan iklim diantaranya:

1. Efek rumah kaca
2. Peningkatan emisi
3. Pemanasan global
4. Perubahan orbit bumi.

Perubahan iklim akan menyebabkan sejumlah dampak negatif yang akan mempengaruhi kehidupan manusia. Dampak negatif tersebut diantaranya:

1. Kepunahan ekosistem

   Jika bertambah CO2 di atmosfer serta kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1,5-2,5 derajat celcius yang kemudian akan turut meningkatkan tingkat keasaman laut. Hal ini kemudian akan berdampak negatif terhadap para organisme-organisme laut seperti misalnya pada terumbu karang, hingga berbagai spesies yang hidupnya bergantung terhadap organisme tersebut.

2. Pangan dan hasil hutan

   Diperkirakan produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika terjadi kenaikan suhu rata-rata global di antara 1-2 derajat Celcius, hingga kemudian meningkatkan resiko bencana kelaparan. Selain itu Fungsi hutan dalam hal pengatur sistem hidrologi dan penyaring air akan kian melemah. Kuantitas air tanah juga akan berkurang dengan kualitas air yang terus menurun

3. Pesisir dan dataran rendah

   Daerah pantai akan kian rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. Kerusakan pesisir ini sendiri kemudian akan diperparah oleh berbagai tekanan manusia di daerah pesisir. Diperkirakan pada tahun 2080 nanti sekitar jutaan orang akan terkena banjir setiap tahun diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut

4. Sumber dan manajemen air tawar

   Hingga saat ini rata-rata ketersediaan air di daerah subpolar, aliran air sungai dan daerah tropis basah diperkirakan akan mengalami peningkatkan sekitar 10-40 persen. Sementara pada daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air kemudian akan mengalami pengurangan sekitar 10-30% hingga akhirnya berbagai daerah yang kini mengalami kekeringan kemudian akan semakin menjadi parah kondisinya

5. Industri, permukiman dan masyarakat

   Industri, permukiman serta masyarakat yang kian rentan umumnya berada di daerah bantaran sungai dan pesisir serta mereka yang tingkat perekonomiannya terkait erat dengan keberadaan sumber daya yang sensitif terhadap iklim, juga ia yang tinggal di daerah-daerah yang sering dilanda berbagai bencana ekstrim, dimana urbanisasi biasanya kemudian berlangsung dengan sangat cepat.

6. Kesehatan

   Penduduk yang kapasitas beradaptasinya rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda, umumnya adalah gizi buruk, diare, dan berubahnya pola distribusi pada penyakit-penyakit yang ditularkan dari berbagai hewan khususnya serangga.

G. *Blue Economy*

Blue Ecoonomy atau Ekonomi Biru adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan. Adapun menurut Bank Dunia, ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan yang bisa digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.

Ekonomi biru juga mencakup cukup banyak sektor di dalamnya, seperti: perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Jika beberapa sektor tersebut bisa dikelola dengan konsep berkelanjutan, maka setiap sektor tersebut tentunya akan bisa membantu mewujudkan negara yang lebih sejahtera. Ekonomi biru dapat dikatakan juga sebagai kegiatan yang pro ekosistem. Limbah keluaran dari kegiatan perikanan harus menghasilkan kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan umum. Baik dari limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada habitat dan kehidupan ekosistem. Sehingga kita dituntut untuk menguasai ilmu dan teknologi dalam persoalan limbah. Jika hal ini dapat terealisasi maka ekonomi biru yang terintegrasi dengan program industrialisasi perikanan akan semakin berhasil dan memajukan sektor perikanan yang ada di Indonesia.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu nasional perlu menjadi perhatian dalam perumusan isu strategis daerah. Beberapa isu jangka menengah pada level nasional dapat dicermati dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik Tahun 2025-2029. Isu nasional pada RPJPMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Agenda Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025- 2029.

1. **Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN),** dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat saat ini.
2. **Bonus Demografi Indonesia,** Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nila PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih

dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

3. **Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru,** Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai "tulang punggung"nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk- produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu- isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

4. **Konektivitas dan Infrastruktur Dasar,** terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optik sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Ke depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

5. **Perubahan Iklim, Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan, Serta Ketahanan Bencana.** Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

6. **Desentralisasi dan Otonomi Daerah,** Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan penelaahaan faktor internal berupa permasalahan pembangunan dan kebijakan Provinsi Jawa Barat, juga penelahaan terhadap faktor eksternal meliputi isu internasional, isu nasional, maka sintesa hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Jawa Barat yang mencakup sejumlah isu utama yang menjadi isu strategis untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat:

1. **Isu Green and Blue Economy Serta Pembangunan Inklusif**

   Green economy merujuk pada model ekonomi yang berfokus pada pengembangan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan, efisiensi energi, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Tujuannya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan dari segi lingkungan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara luas. Blue economy, di sisi lain, berkaitan dengan pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan pesisir. Konsep ini mencakup pengembangan ekonomi yang memanfaatkan potensi laut dan sumber daya alam yang ada di ekosistem laut secara berkelanjutan. Blue economy menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut, pemanfaatan sumber daya dengan cara yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidup dari laut. Pembangunan inklusif merupakan pendekatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan atau rentan. Ini melibatkan penciptaan kesempatan kerja yang adil, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ketika dikombinasikan, green dan blue economy dengan pembangunan inklusif berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan pembangunan yang ada, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

2. Isu Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Pendidikan dan Pelatihan: Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pendidikan dan pelatihan yang tersedia. Penting untuk memastikan bahwa pendidikan dasar, menengah, dan tinggi memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja global yang terus berubah.
b. Relevansi Keterampilan: Sumber daya manusia yang kompeten adalah mereka yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi saat ini. Program pendidikan dan pelatihan harus dapat menghasilkan lulusan yang siap terjun langsung ke dunia kerja atau yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar
c. Inovasi dan Kreativitas: Selain keterampilan teknis, penting juga untuk mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan sumber daya manusia. Kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi adalah faktor-faktor yang mendorong daya saing individu dan organisasi.
d. Kesejahteraan dan Motivasi: Faktor-faktor non-finansial seperti lingkungan kerja yang kondusif, pengakuan atas prestasi, serta kesempatan untuk pengembangan karir juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kesejahteraan mental dan fisik juga harus diperhatikan untuk menjaga produktivitas dan kualitas kerja yang optimal.

e. Pemberdayaan dan Keterlibatan: Masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keterlibatan ini menciptakan rasa memiliki yang kuat dan motivasi untuk berkontribusi secara positif.
f. Adaptasi terhadap Perubahan: Globalisasi dan teknologi telah mengubah lanskap ekonomi secara signifikan. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini akan lebih mampu mempertahankan daya saingnya dalam pasar kerja yang kompetitif

3. Isu Kesenjangan Pembangunan Dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

a. Akses yang Tidak Merata: Salah satu masalah utama adalah ketimpangan dalam akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, dan telekomunikasi. Daerah perkotaan biasanya lebih terjamin infrastrukturnya dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil.
b. Dampak pada Kualitas Hidup: Kesenjangan infrastruktur dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan risiko penyakit dan menghambat pembangunan ekonomi lokal.
c. Pengembangan Ekonomi: Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang efisien dan listrik yang stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ketidakmampuan untuk mengakses infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi pengembangan ekonomi lokal.
d. Inklusivitas Sosial: Infrastruktur pelayanan dasar yang merata merupakan prasyarat untuk inklusi sosial yang sejati. Semua warga harus memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan yang mendasar untuk memastikan keadilan sosial.
e. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan: Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam juga penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap ancaman ini.
f. Pemerataan Pembangunan: Penting untuk menerapkan kebijakan dan program yang mengarah pada pemerataan pembangunan infrastruktur, baik dari segi geografis maupun sosial-ekonomi. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
g. Tantangan Finansial: Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar seringkali melibatkan tantangan finansial yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang atau daerah yang terpencil. Diperlukan strategi keuangan yang inovatif dan berkelanjutan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ini.

4. Isu Keberlanjutan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan

a. Definisi Daya Dukung dan Daya Tampung: Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung populasi spesies tertentu atau aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Daya tampung, di sisi lain, mengacu pada kapasitas maksimum lingkungan untuk menanggung beban dari aktivitas manusia atau faktor lainnya tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan yang signifikan.
b. Overexploitasi Sumber Daya: Salah satu masalah utama adalah overexploitasi sumber daya alam seperti air tanah, hutan, dan lahan pertanian. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada penurunan kualitas lingkungan, degradasi tanah, penurunan keanekaragaman hayati, dan hilangnya ekosistem.
c. Perubahan Iklim: Perubahan iklim juga mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemanasan global dapat mengubah pola hujan, meningkatkan suhu permukaan laut, dan menyebabkan perubahan ekstrem cuaca, yang semuanya berdampak pada ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.
d. Manajemen Sumber Daya: Penting untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan hutan secara lestari, konservasi air, penggunaan energi terbarukan, dan pengendalian polusi, untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini dan mendatang.
e. Kehidupan Berkelanjutan: Konsep keberlanjutan mencakup tidak hanya perlindungan lingkungan fisik tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
f. Kolaborasi Global: Isu keberlanjutan lingkungan adalah masalah global yang memerlukan kerjasama internasional dan komitmen bersama untuk mengatasi tantangannya. Kesepakatan internasional seperti Persetujuan Paris tentang perubahan iklim menunjukkan pentingnya kerjasama global dalam mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks.
g. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan adalah langkah krusial dalam mendukung perubahan perilaku dan keputusan yang lebih ramah lingkungan di semua tingkatan masyarakat.

5. Isu Keberlanjutan Penataan Ruang

a. Pertumbuhan Perkotaan yang Berkelanjutan: Pembangunan perkotaan yang cepat sering kali menghadapi tantangan dalam hal penggunaan lahan yang efisien, penataan kawasan yang terintegrasi, dan infrastruktur yang memadai. Keberlanjutan penataan ruang mencakup pembangunan perkotaan yang terencana dengan baik untuk mengurangi kemacetan, polusi udara, dan kerusakan lingkungan.

b. Perlindungan Lingkungan: Penataan ruang yang berkelanjutan memperhatikan perlindungan lingkungan alam, termasuk pelestarian ruang terbuka hijau, konservasi ekosistem, dan penanganan limbah secara efektif. Hal ini membantu menjaga kualitas udara, air, dan tanah, serta keanekaragaman hayati yang ada di sekitar area perkotaan dan pedesaan.
c. Keadilan Sosial: Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan harus mengutamakan keadilan sosial, memastikan akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu.
d. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Perubahan iklim mempengaruhi pola cuaca dan kondisi lingkungan secara global. Penataan ruang yang berkelanjutan mencakup infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti drainase yang baik untuk mengatasi banjir, penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan, dan desain yang mengurangi jejak karbon.
e. Penggunaan Lahan yang Efisien: Isu keberlanjutan penataan ruang juga melibatkan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan. Ini mencakup zonasi yang tepat untuk penggunaan lahan, perlindungan terhadap tanah subur dan area lindung, serta pengelolaan pertanian yang berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi pedesaan.
f. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan dan penataan ruang, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi ini juga memastikan penerimaan dan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
b. Kolaborasi Antar Pemerintah: Kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antar pemerintah, termasuk pemerintah lokal, regional, dan nasional, serta sektor swasta dan masyarakat sipil. Ini penting untuk menyinkronkan kebijakan dan strategi dalam mengelola pertumbuhan perkotaan dan pedesaan secara holistik.

6. Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

a. Transparansi dan Akuntabilitas: Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur dari seberapa transparan dan akuntabelnya pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi publik dan proses pengambilan keputusan, sementara akuntabilitas berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.
b. Keterlibatan Masyarakat: Tata kelola yang baik melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga negara. Partisipasi aktif masyarakat juga membantu dalam memonitor kinerja pemerintah dan mendorong perubahan positif dalam kebijakan publik.

c. Keadilan dan Keterbukaan: Kualitas tata kelola pemerintahan juga mencakup keadilan dalam penyediaan layanan publik dan distribusi sumber daya. Pemerintah yang efektif harus memastikan bahwa keputusan dan layanan yang disediakan tidak diskriminatif dan tersedia untuk semua warga tanpa pandang bulu
d. Efisiensi dan Efektivitas: Tata kelola yang baik menuntut efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik, baik itu anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya dengan baik agar program-program pembangunan dan layanan publik dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
e. Penegakan Hukum dan Anti-Korupsi: Penegakan hukum yang kuat dan sistem anti-korupsi yang efektif adalah komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Korupsi dapat merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan menghambat distribusi sumber daya secara adil.
f. Inovasi dan Teknologi: Pemerintah yang efektif harus mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.
g. Kolaborasi dan Kemitraan: Kualitas tata kelola pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk menciptakan solusi bersama atas tantangan yang kompleks dan lintas-batas.

2.3.2.4 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

1. **Isu Kemiskinan,** Isu belum optimalnya menghilangkan kemiskinan atas kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya angka pengangguran serta rendahnya perlindungan sosial.

   Penyebab Utama :

   a. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan
   b. Kurangnya keterampilan/Skill Setiap Individu
   c. Rendahnya lamanya usia pendidikan

2. **Isu Ketahanan Pangan,** Isu ketahanan pangan yang dipengaruhi oleh rendahnya tatakelola lahan pertanian, dan sumber daya manusia pertanian,serta konversi lahan.

   Penyebab Utama :

   a. Masalah kemiskinan: yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan
   b. Alih fungsi lahan: mengakibatkan berkurangnya pangan
   c. Meningkatnya jumlah penduduk sehingga meningkatnya jumlah konsumsi
   d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang

3. **Isu Sumber Daya Air,** Isu belum optimalnya pengelolaan sumber air baku

   Penyebab Utama :

   a. Kurangnya akses pengelolaan air minum pada beberapa wilayah tertentu

b. Kendala pada aspek geografis (topografi ; terutama pemenuhan kebutuhan air melalui sistem pengelolaan air minum perpipaan, serta keterbatasan anggara yang ada).
c. Masih adanya masyarakat miskin; yang mempengaruhi keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan air minum

4. **Isu Kebencanaan dan Perubahan Iklim,** Isu belum optimalnya penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim secara komperehensif

   Penyebab Utama :

   a. Adanya perumahan penduduk yang berada pada daerah rawal longsor
   b. Masih adanya perumahan penduduk terutama pada bangunan temporer yang berada pada lintasan angin puting beliung

5. **Isu Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia,** Isu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh belum optimalnya akses pendidikan yang berkualitas, pemberdayaan sosial, dan kurangnya kualitas kesehatan masyarakat

   Penyebab Utama :

   a. Kurangnya jangkauan layanan kesehatan pada wilayah tertentu
   b. Masalah kemiskinan
   c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan

6. **Isu Pencemaran Lingkungan,** Isu kurangnya pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan

   Penyebab Utama :

   a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kehidupan lingkungan sehat
   b. Masih terdapatnya masyarakat miskin

7. **Isu Pengelolaan Sampah,** Isu belum optimalnya pengelolaan persampahan yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, serta kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan

   Penyebab Utama :

   a. Masih adanya timbulan sampah yang belum terkelola
   b. Masalah adanya masyarakat miskin

8. **Isu Perekonomian,** Isu rendahnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan belum optimalnya permodalan dan kualitas pengelolaan pada sektor basis, termasuk UMKM.

   Penyebab Utama :

   a. Kurangnya daya saing daerah
   b. Kurang terciptanya lapangan pekerjaan
   c. Masih adanya kemiskinan sehingga terbatasnya kemampuan masyarakat dalam meneruskan jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi.

9. **Isu Tata Kelola Pemerintahan,** Isu Belum optimalnya tata kelola pemerintahan karena rendahnya akses pelayanan publik

2.3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Bandung Barat merupakan kristalisasi dari berbagai permasalahan daerah, isu internasional, isu nasional, isu regional Jawa Barat dan amanat dalam RPJPD, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggun jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah. Ketepatan dalam perumusan isu strategis sangat menentukan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan. Berikut adalah kesimpulan hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat:

Tabel 2.178. Kesimpulan Isu Strategis Daerah

No	Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Pembangunan Berkalanjutan (KLHS)	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Prov. Jawa Barat	
1	Potensi wilayah yang luas dengan keanekaragaman kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bila diolah dan dimanfaatkan akan menjadi sumber ekonomi yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Kemiskinan, Pengangguran, Ketimpangan pendapatan dan perlindungan sosial	Perekonomian Kemiskinan, Pengangguran dan Perlindungan Sosial	Pemerataan pembangunan dan keberadaan penduduk kelas menengah	Transformasi kedalam ekonomi hijau dan ekonomi biru	Green dan Blue Economy serta Pembangunan Inklusif	Daya saing ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2	Posisi strategis secara geografis, Kabupaten Bandung Barat dalam konstelasi nasional dan regional Jawa Barat merupakan pintu masuk ke wilayah Bandung Raya, menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dan konektivitas jalur transportasi Barat-Timur	Belum meratanya infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah	Infrastruktur Pelayanan Dasar		Pemindahan ibukota negara; Konektivitas dan infrastruktur dasar	Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Dasar Keberlanjutan Penataan Ruang	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregrasi antar Wilayah
3	Kondisi wilayah secara topografi didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal berupa pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan dengan lingkungan yang masih alami diwilayah utara dan selatan	Daerah Rawan Bencana Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah	Ketahanan dan Kemandirian Pangan Penggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pengelolaan sampah	Persaingan sumber daya alam dan Perubahan Iklim	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kebencanaan	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Penanggulangan Bencana dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
4	Jumlah penduduk yang besar dan puncak bonus demografi pada tahun 2025-2030	Masih rendahnya Kualiatas SDM	Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Bonus demografi 2030	Bonus demografi	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

No	Potensi Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Pembangunan Berkalanjutan (KLHS)	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Global	Nasional
5	Kehidupan sosial masyarakat terutama di pedesaan yang masih menjungjung kearifan budaya local serta nilai-nilai spiritual yang perlu dilestarikan seiring dengan pelakasanaan pembangunan	Belum optimalnya Pembangunan berbasis desa seusai kearifan budaya lokal					Kondisi Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal
6	Pemanfaatan teknologi dan informasi yang menghasilkan Inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan			Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1. Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia memegang peranan penting dalam pembangunan, dapat menjadi beban pembangunan maupun sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 sebanyak 1.859.635 jiwa, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Barat mampu bersaing secara global. Namun demikian, kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bandung Barat belum optimal, harus kontinyu ditingkatkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 berada pada angka 70,33. Meskipun IPM Kabupaten Bandung Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi IPM tersebut masih di bawah rata-rata IPM di wilayah Bandung Raya. IPM Kabupaten Bandung 74,03, Kota Bandung 83,29 dan Kota Cimahi 79,69. Faktor yang mempengaruhi kualitas SDM diantaranya capaian pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Pada aspek pendidikan, kualitas sumberdaya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan: a) Belum optimalnya Harapan Lama Sekolah (HLS), pada tahun 2023, angka HLS sebesar 11,91 tahun setara kelas 2 SMA; b) Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada tahun 2023, angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,23 tahun atau setara kelas 2 SMP. (Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Jawa Barat). Kendala dalam pembangunan pendidikan diantaranya belum optimalnya akses terhadap pendidikan dasar, menengah dan tinggi, serta belum optimanya layanan pendidikan yang berkualitas. Adapun Harapan Lama Sekolah yang belum optimal dikarenakan masyarakat belum menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan untuk lebih menjamin masa depan, artinya sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena anggapannya sudah dapat masuk ke pasar kerja.

Pada aspek kesehatan, Usia Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 sebesar 74,78 lebih rendah sedikit dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 74,91. Adapun kendala dalam pembangunan kesehatan adalah belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata.

2. Daya Saing Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Merupakan kemampuan suatu entitas perekonomian (negara/daerah) untuk mencapai pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020 – 2024, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat mengalami fluktuasi tahun 2020 (-2,41 %), tahun 2021 (3,46 %), tahun 2022 (5,34 %), tahun 2023 (5,00%) dan tahun 2024 (4,94 %).

Adapun selama 5 tahun terakhir tersebut, struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh 6 sektor ekonomi yakni: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Keenam sektor tersebut secara keseluruhan berjumlah 85,51 persen memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan tanpa mengesampingkan sektor-sektor yang lainnya.

Agar Bandung Barat mempunyai daya saing ekonomi, maka perlu mengoptimalkan kembali sumber dayanya guna memaksimalkan potensi untuk lebih berdaya saing yaitu pada bidang ekonomi dan sumberdaya alamnya, yakni perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pariwisata, perikanan, pertanian, ketahanan pangan, dan penanaman modal. Permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang-bidang tersebut harus diatasi dengan sejumlah strategi seperti: 1) meningkatkan investasi untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka menciptakan tengaga kerja yang lebih terampil; 2) meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan bagi semua lapisan masyarakat; 3) optimalisasi pemberdayaan peremepuan; 4) mengembangkan sektor UMKM/IKM/Industri kreatif; 5) mengelola SDA secara berkelanjutan; 6) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan.

3. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Upaya peningatan Tata kelola pemerintahan harus dilakukan secara kontinyu sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yakni tata kelola pemeritahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria yaitu: transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif. Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Bandung Barat s.d tahun 2021 masih sebesar 57,60 dengan predikat CC, capaian nilai IRB baru meningkat mulai tahun 2022 s.d tahun 2024 menjadi sebesar 80,77 meraih predikat A. Nilai IRB harus terus ditingkatkan dalam rangka terus meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Upaya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut, disebabkan beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Salah satunya adalah permasalahan mengenai Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum optimal karena indeks SPBE masih sebesar 3,78. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan demi menghadapi tantangan global yang semakin dinamis seperti pada era sekarang ini, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan efektivitas dan efiseiensi manajemen pemerintahan mutlak untuk diimplementasikan.

Hal tersebut membutuhkan koordinasi dan kerjasama seluruh aktor pembangunan dan inovasi yang tepat, sehingga diperlukan kualitas SDM ASN yang mampu meningkatkan pelayanan, peningkatan transparansi, penerapan merit sistem, penghapusan jabatan struktural serta reformasi birokrasi.

4. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregrasi antar Wilayah

Kabupaten Bandung Barat selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Secara fisik ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbngun (built up area), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan tersebut berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar. Konektivitas antar wilayah di Kabupaten Bandung Barat perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan indikatornya adalah Indeks Kesulitas Geografis (IKG) yaitu angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi. Konektivitas dan aksesibilitas wilayah merupakan tujuan dari pemerataan pembangunan infrastruktur sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan desa-kota dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Sampai dengan tahun 2024, jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 75,90 persen. Besarannya ini harus ditingkatkan mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat semakin banyak sehingga rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk semakin menurun. Untuk mendukung aksesibilitas barang dan orang di wilayah Kabupaten Bandung Barat telah didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berupa sarana angkutan darat, ASDP, terminal, dermaga. Jumlah penumpang yang menggunakan transportasi darat dan transportasi ASDP terjadi penurunan hal ini disebabkan terjadi penurunan kualitas dan kuantitas layanan angkutan darat dan angkutan penyebarangan dengan jumlah trayek dan jumlah armada angkutan umum yang semakin berkurang. Kondisi juga disebabkan dengan menjamurnya transportasi online di Bandung Barat. Begitupun tentang pemenuhan infrastruktur permukiman, ketersediaan air bersih belum optimal. Target pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tahun 2024 sebesar 67,50% sedangkan yang terealisasi sebesar 65,50%. Hal ini dikarenakan pertama keterbatasan air bersih (air minum) terutama sumber air baku di permukaan, dan yang kedua adalah topografi sebagian besar yang berbukit dan berlembah sehingga menyulitkan untuk membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang efektif dan berbiaya rendah.

5. Penanggulangan Bencana dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi bentang alam Kabupaten Bandung Barat yang merupakan dataran tinggi dan berbentuk cekungan menjadi muara bagi anak-anak sungai. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Bandung Barat rentah terhadap bencana alam baik berupa banjir, longsor, erosi dan bencana lainnya. Bencana alam dan kualitas lingkungan sangat berdampak bagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Tantangan penanganan bencana alam semakin besar karena kondisi bentang alam dan perubahan iklim yang ekstrim dan berdampak bagi masyarakat. Terutama untuk merespon informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terkait kesiapsiagaan beberapa wilayah Zona Megathrust Indonesia yang diperkirakan berpotensi terjadinya gempa besar dan tsunami, meskipun Kabupaten Bandung Barat berada di wilayah non-pesisir, guncangan gempa besar dapat menimbulkan dampak kerusakan fisik, korban jiwa, gangguan pelayanan publik, dan bencana ikutan (longsor, kebakaran, kerusakan infrastruktur vital) yang perlu diantisipasi dengan upaya kesiapsiagaan terhadap ancaman isu megathrust beserta dampak ikutannya melalui mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat, pengecekan kembali kesiapan alat-alat peringatan dini dan sister komunikasi kebencanaan, memastikan kesiapan tempat-tempat evakuasi dan memastikan ketersediaan papan informasi, rambu rambu serta arah evakuasi yang memadai; meningkatkan pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan literasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi kesiapan mekanisme kedaruratan.

Oleh karenanya penanganan bencana alam tersebut harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang. Upaya penanangan bencana alam terutama longsor telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan didukung oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi seperti peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Namun demikian hingga saat ini sering terjadi longsor di Kabupaten Bandung karena mitigasi bencana yang belum tersedia secara komprehensif.

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bandung Barat belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya kualitas lingkungan yang diukur berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan capaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 58,43 poin berada pada katagori sedang dengan target tahun 2024 sebesar 66,55 point (belum mencapai target). Berdasarkan data pemantauan kualitas air sungai oleh DLH Kabupaten Bandung Barat ada 17 titik pantau (31,48%) yang memiliki status mutu air dengan cemar ringan, sebanyak 26 titik pantau (48,15%) berstatus cemar sedang dan 11 titik pantau (20,37%) berstatus cemar berat.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi mengakibatkan pula terjadinya timbulan sampah yang bila tidak dapat diantisipasi pengelolaannya akan berdampak terhadap lingkungan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat yaitu kemampuan daerah dalam mengatasi timbulan sampah dengan pengangkutan sampah ke TPA baru sebesar 13,34 persen, dengan tungku pembakaran sebesar 2,63 persen dan melalui pengurangan sampah sebesar 4,53 persen sehingga masih terdapat sebesar 79,49 persen atau 606,6 ton sampah yang belum terkelola. Timbulan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan gambaran buruk terhadap wajah suatu kawasan, selain itu juga dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan, dan dapat menjadi media penularan penyakit.

6. Kondisi Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bandung Barat terutama di pedesaan yang masih menjungjung kearifan budaya local serta nilai-nilai spiritual merupakan potensi daerah yang perlu dilestarikan seiring dengan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan sosial dimasyarakat dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam senantiasa berdampak terhadap permasalahan sosial seperti: mulai lunturnya budaya gotong royong di masyarakat, berkurangnya nilai toleran dimasyarakat, belum optimalnya peran Tokoh masyarakat dan SDM keagaman dalam menciptakan kehidupan sosial yang berlandaskan nilai agamis berdasarkan kearifan budaya local dan masih belum optimalnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan.

Potensi dan permasalahan sosial bila tidak diantisipasi tentu akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan terutama kondisi harmonis dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan pemerintahan. Kondisi harmonis yang dimaksud yaitu masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras serta harmonis dalam hubungan antara lembaga pemerintahan mulai dari RT/RW, desa, kecamatan, perangkat daerah memiliki kondisi yang tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras dalam membangun Kab. Bandung Barat. Keselarasan dalam hubungan kehidupan masyarakat Kab. Bandung Barat dan Pemerintahan Kab. Bandung Barat bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi. Harmonis memiliki dua aspek penting yang perlu disentuh, yaitu tingkat harmoni sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang implementasinya dilaksanakan terutama pada tingkat desa serta pembangunan dimulai dari desa.

3 VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Bab ini memuat **Visi** dan **Misi** pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 untuk selanjutnya diturunkan (*cascading*) menjadi rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama periode 5 tahun (**Tujuan**) sampai dengan rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah (**Sasaran**). Bab ini juga memuat **Strategi** atau rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD, **Arah Kebijakan** atau rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD serta **Prioritas Pembangunan Daerah** sebagai fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2025 – 2029 adalah Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang disampaikan pada saat proses pemilihan kepala daerah. Visi RPJMD Kabupaten Barat Tahun 2025-2029 ini memuat rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 tahun (2025-2029) yang merupakan bagian dari pencapaian Visi Daerah Kabupaten Bandung Barat **tahun pertama** dengan tema **"Penguatan Pondasi Kesejahteraan Masyarakat"** untuk mewujudkan ***Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan*** sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.

Keadaan/kondisi Kabupaten Bandung Barat yang ingin diwujudkan sebagaimana tertuang dalam Visi RPJMD Kabupaten Barat 2025– 2029 merupakan arah pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang dengan kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi terkini dan tantangan pembangunan ke depan dalam mendukung dan mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Dengan memperhatikan pemikiran di atas, maka Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat 2025 – 2029 adalah:

"BANDUNG BARAT AMANAH"

(Agamis Maju Adaptif Nyaman Aspiratif Harmonis)

Visi **"AMANAH"** untuk mewujudkan Bandung Barat yang **Agamis Maju Adaptif Nyaman Aspiratif Harmonis** mengandung makna bahwa sikap dan perilaku dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan keterlibatan selutuh potensi sumber daya manusia yang dapat mengemban kepercayaan masyarakat, makna dan pokok-pokok visi **AMANAH** dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penjelasan Visi Pembangunan Kab. Bandung Barat Tahun 2025-2029

Visi		Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"A M A N A H"	**AGAMIS**	Nilai Religius	**AGAMIS** mengandung makna bahwa nilai-nilai religius menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Agamis juga berarti mengedepankan prinsip-prinsip agama dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat, tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang baik
	MAJU	Pengembangan Ekonomi	**MAJU** mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat Bandung Barat yang unggul, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan berbasis potensi lokal guna mendongkrak kesejahteraan seluruh masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengejar ketertinggalan pembangunan Bandung Barat di kawasan Bandung Raya dan Jawa Barat
	ADAPTIF	Tata Kelola Pemerintahan	**ADAPTIF** mengandung makna pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Visi Adaftif dilaksanakan guna mewujudkan birokrasi yang dinamis dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan merespons perubahan secara cepat, mengurangi prosedur yang berbelit, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
	NYAMAN	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	**NYAMAN** mengandung makna bahwa pembangunan di Bandung Barat dengan segala potensinya diarahkan dalam rangka mempercepat dan pemerataan Pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta kondisi geografis yang rawan terhadap bencana serta tidak merusak lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat

Visi		Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	ASPIRATIF	Pembangunan Sumber Daya Manusia	**ASPIRATIF** mengandung makna potensi penduduk Bandung Barat sebagai modal dasar pembangunan diarahkan dalam rangka meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pondasi yang kuat bagi generasi mendatang dengan memperhatikan nilai inklusif bagi seluruh masyarakat.
	HARMONIS	Kondisi Harmonis di Masyarakat dan Kearifan Budaya Lokal	**HARMONIS** berarti masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras berlandaskan kearifan budaya lokal serta membangun kondisi harmonis antara pemerintah daerah dengan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

Agamis, nilai beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada hakikatnya perwujudan pembangunan masyarakat Bandung Barat yang Agamis adalah pembentukan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan yang berakhlak mulia, berkeadilan, dan sejahtera melalui upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan formal dan non-formal serta adanya dukungan penyelengaraan program-program dakwah dan penyuluhan keagamaan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku positif masyarakat. Nilai agamis juga berarti mengedepankan prinsip-prinsip agama dalam perumusan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan budaya. Dengan visi agamis, pemerintahan daerah berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan moral dan spiritual masyarakat. Melalui sinergi antara nilai-nilai agama dan kebijakan publik, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang baik.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masyarakat Bandung Barat yang unggul, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan berbasis potensi lokal. Kemajuan Bandung Barat harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, sehingga maju merupakan kondisi masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhannya melalui peningkatan produktifitas pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, UMKM dan koperasi serta pariwisata dan industri kreatif melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi modern dan digitalisasi dalam implementasinya.

Adaptif, sebagai perwujudan birokrasi pemerintahan yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan teknologi dalam merespons perubahan dengan cepat, mengurangi prosedur yang berbelit, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Adaptif diaktualisasikan melalui penerapan sistem birokrasi yang lebih sederhana dan mudah diakses, serta digitalisasi layanan publik untuk mempercepat proses perizinan, administrasi kependudukan, layanan pendidikan dan kesehatan, menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan

anggaran serta pengadaan barang dan jasa serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang ketat guna terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Nyaman, merupakan kondisi yang ingin diwujudkan di Bandung Barat dengan segala potensinya diarahkan dalam rangka penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, prasaranan umum perumahan dan lingkungan permukiman. Untuk mendukung perekonomian masyarakat diperlukan pula konektivitas antar wilayah baik pedesaan dan perkotaan berupa infrastruktur pelayanan public berupa aksebilitas transportasi yang didukung oleh kondisi jalan mantap beserta kelengkapannya serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat diarahkan tidak hanya untuk kepentingan perekonomian semata tetapi yang lebih utama adalah dengan tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang rawan terhadap bencana, perubahan iklim dan ketahanan pangan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aspiratif, sebagai perwujudan dalam pembangunan manusia dengan potensi penduduk Bandung Barat yang merupakan modal dasar pembangunan diarahkan dalam rangka meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pondasi yang kuat bagi generasi mendatang. Visi ini diwujudkan melalui komitmen terhadap pendidikan yang berkualitas, peningkatan kesehatan masyarakat, kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam membentuk kondisi keluarga yang berkualitas, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan serta perlindungan social dengan memperhatikan nilai inklusif bagi seluruh masyarakat. Aspiratif juga sangat diperlukan dalam pembangunan di bidang kesehatan guna mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang didukung oleh tenaga kesehatan yang berkualitas. Aspiratif dalam bidang pendidikan juga mendorong peningkatan akses pendidikan yang merata bagi semua kalangan yang didukung oleh kompetensi tenaga kependidikan yang berkualitas.

Harmonis, kondisi yang ingin diwujudkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan baik kodisi dimasyarakat maupun kondisi pemerintahan yang harmonis. Kondisi Harmonis di masyarakat yaitu masyarakat dapat hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras. Sementara harmonis pemerintahan yaitu hubungan kerjasama saling mendukung, serasi dan selaras antara lembaga pemerintahan mulai dari RT/RW, desa, kecamatan dan perangkat daerah beserta pempinannya guna mewujudkan visi misi dalam membangun Kab. Bandung Barat. Kondisi Harmonis kehidupan masyarakat Kab. Bandung Barat dan Pemerintahan Kab. Bandung Barat bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat.

Perwujudan Harmonis diimplementasikan dengan meningkatan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan keharmonisan pembangunan dimulai dari desa memalui berdasarkan kearifan budaya local melalui peningkatan kesejahteraan dan kompetensi aparatur desa dan pemberdayaan bagi unsur lembaga kemasyarakatan desa serta penguatan kelembagaan ekonomi desa.

3.1.2 Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Visi. Visi ini diterjemahkan kedalam 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 – 2029 yang merupakan langkah untuk mencapai Visi "Bandung Barat AMANAH" yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rumusan Kerangka Penjabaran Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

Misi		Penjelasan Misi	Langkah Penjabaran
1	Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter	Misi isi disusun dalam rangka mewujudkan mewujudkan masyarakat Bandung Barat yang berakhlak, cerdas dan sehat didasari nilai-nilai religius dengan melibatkan peran keluarga serta penguatan Peran Perempuan dan Pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan
			Meningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting)
			Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
			Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan
2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah	Misi ini bertujuan dalam rangka mewujudkan peningkatan dan produktifitas ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berdaya saing dan berhasil guna dengan tidak merusak lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah
			Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta perlindungan sosial
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif,	Misi ini disusun untuk mewujudkan sistem birokrasi yang lebih sederhana dan mudah diakses, serta digitalisasi layanan publik untuk mempercepat proses perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan	Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
			Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan
			Meningkatkan Profesionalisme ASN

Misi		Penjelasan Misi	Langkah Penjabaran
	Transparan dan Akuntabel	kesehatan serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta pengadaan barang dan jasa, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang ketat guna terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.	Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan berbasis teknologi dan informasi
4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah	Misi ini disusun untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur dan konektifitas di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik berbasis spasial serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat
			Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah
5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	Misi ini disusun untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana, perubahan Iklim serta ketahanan air dan kemandirian pangan	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat
			Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
			Ketahanan Daerah terhadap bencana, perubahan iklim dan kemandirian pangan
6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Misi ini disusun untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang harmonis serta penguatan pembangunan desa berbasis kearifan budaya lokal	Meningkatkan kondusivitas wilayah
			Meningkatkan Kemajuan dan Perkembangan Pembangunan Desa
			Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa
			Meningkatkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

Misi 1: Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter

Misi 1 merupakan langkah untuk mewujudkan masyarakat Bandung Barat yang berakhlak, cerdas dan sehat didasari nilai-nilai religius dengan melibatkan peran keluarga serta penguatan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan. Masyarakat yang berakhlak dan berkarakter diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Kab. Bandung Barat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat dengan tetap memperhatikan tata kehidupan masyarakat yang religius dan mengedepankan nilai-nilai toleransi. SDM yang berkarakter diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai yang ideal dalam setiap pembangunan seperti nilai religius, inklusivitas, dan kemanusiaan. Nilai dari berkarakter dilihat dari segi pendidikan, perlu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan partisipasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi, serta peningkatan kerja sama antar pelaku pendidikan. Dari segi kesehatan, upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu (terakreditasi), peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, serta pengembangan digitalisasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan.

Misi 2: Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah

Misi ini bertujuan dalam rangka mewujudkan peningkatan dan produktifitas ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berdaya saing dan berhasil guna dengan tidak merusak lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat harus terarah sesuai dengan konsep dan karakteristik lokal. Pembangunan sektor pariwisata dan pertanian harus mengedepankan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Peran dan kolaborasi multi-aktor sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat, agar pembangunan ekonomi yang dijalankan dapat meningkatkan pertumbuhan, pemerataan, pengentasan kemiskinan dan perluasan akses bagi semua lapisan dan golongan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel

Misi 3 merupakan upaya dalam mewujudkan sistem birokrasi yang lebih sederhana dan mudah diakses yang didukung oleh digitalisasi layanan publik untuk mempercepat proses perizinan, administrasi kependudukan, layanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai layanan publik lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan pengawasan yang ketat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Tata Kelola pemerintahan yang profesional ditunjukan dengan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas jabatannya. Tata kelola pemerintahan yang Inovatif penting dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata Kelola yang inovatif merupakan tata kelola yang mampu menciptakan berbagai terobosan-terobosan penting dalam pembangunan daerah dengan kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai kondisi terutama dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta transformasi digital dalam memberikan layanan public bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi 4: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah

Misi 4 disusun untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur dan konektifitas di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi ini diarahkan dalam rangka pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata yang akan menjadi fondasi dalam pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang kualitas yang dapat meningkatkan

kenyamanan perumahan dan permukiman tempat tinggal, namun pemerataan pembangunan di kawasan perdesaan juga penting agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kondisi geografis Bandung Barat yang berbukit menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan keterhubungan antar wilayah, sehingga perlu upaya lebih lanjut agar konektivitas dan aksesibilitas wilayah menjadi lebih berkualitas.

Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan

Misi ini sebagai langkah untuk mewujudkan peningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan wilayah yang tangguh terhadap bencana, perubahan Iklim serta ketahanan air dan kemandirian pangan. Misi ini diarahkan secara berkelanjutan sebagai antisipasi dari ancaman terhadap bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor yang merupakan tantangan yang perlu dihadapi Kabupaten Bandung Barat saat ini maupun kedepannya bila dilihat dari kondisi geografisnya. Hal tersebut menjadi fokus pembangunan yang harus diwujudkan untuk mendukung kondisi wilayah yang tangguh terhadap bencana serta mencegah degradasi lingkungan agar kondisi lingkungan hidup yang berkualitas dapat diwujudkan.

Misi 6: Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Misi 6 sebagai perwujudan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi dan selaras untuk mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang harmonis dengan penguatan pembangunan diawali dari desa berbasis kearifan budaya lokal. Kondisi yang harmonis di masyarakat berperan penting bagi seluruh sektor, sebab keadaan daerah yang kondusif dan stabil menjadi salah satu prasyarat bagi optimalnya pelaksanaan pembangunan daerah ke depan. Kondisi harmonis di daerah sendiri dipengaruhi oleh kondisi ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ada di suatu wilayah. Penjagaan kondisi ketentraman dan ketertiban menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan dalam rangka penciptaan kondisi daerah yang kondusif dan stabil. Hal ini dapat dicapai melalui penegakan peraturan daerah yang optimal, pengawasan yang baik dalam rangka terhadap aktivitas-aktivitas yang berpotensi melanggar hukum, resolusi konflik sosial yang cepat dan tepat, dan penyediaan sarana prasarana penunjang layanan ketertiban serta didukung dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan kepada publik dalam rangka peningkatan kepercayaan publik.

MISI Pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 selanjutnya ditetapkan menjadi PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH dalam RPJMD 2025-2029, terdiri dari 6 (enam) Prioritas Pembangunan, mencakup:

Prioritas 1, yaitu Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter

Prioritas 2, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah

Prioritas 3, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel

Prioritas 4, yaitu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah

Prioritas 5, yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan

Prioritas 6, yaitu Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Dalam rangka mendukung keselarasan dalam pencapaian Visi, Misi dan Prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat dan di Kabupaten Bandung Barat, berikut dapat dilihat sandingan prioritas nasional, prioritas Jawa Barat dan prioritas Kabupaten Bandung Barat:

Tabel 3.3 Persandingan Prioritas Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

No	8 ASTA CITA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (PN)	No	4 MISI JABAR ISTIMEWA PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	No	6 MISI BANDUNG BARAT AMANAH PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter	1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	2	Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	4	Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan			6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba				
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kab. Bandung Barat

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Bandung Barat sampai dengan Tahun 2029. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 -2029 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok tahap pertama dalam rangka “Penguatan Pondasi Kesejahteraan Masyarakat” sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045.

Tahap ini merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan kedepan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar
2. Optimalisasi sumber daya ekonomi
3. Penguatan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik, kelembagaan yang efektif, penerapan sistem merit dan peningkatan ekosistem inovasi
4. Peningkatan kondusivitas wilayah dan stabilitas ekonomi daerah
5. Penguatan fondasi pendidikan karakter dan kebudayaan
6. Pemenuhan infrastruktur wilayah yang merata
7. Pemenuhan dan pemerataan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar
8. Penguatan manajemen sumber daya air, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, manajemen bencana dan perubahan iklim, pengelolaan lahan kritis dan degradasi lingkungan

Indikasi terwujudnya pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Bandung Barat, ditandai dengan:

1. Peningkatan pendapatan per kapita
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh regional meningkat
4. Daya saing SDM meningkat
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

Tabel 3.4 Indikator Visi Daerah pada RPJPD Kab. Bandung Barat tahun 2025-2045

RPJPD KABUPATEN BANDUNG BARAT 2025-2045			
Sasaran Visi	**Indikator**	**Baseline 2025**	**Target 2045**
Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita ADHB (Juta Rupiah)	32,47 - 32,83	64,15 - 116,23
	b. Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	41,20	42,00
Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat kemiskinan (%)	9,05 - 9,99	0,14 - 0,91
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,366 - 0373	0,340 - 0,363
	c. Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	2,14	2,11
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87 - 5,37	4,95 - 6,15
Kepemimpinan dan pengaruh regional	a. Indeks Reformasi Birokrasi	74-80 (BB)	81-100 (AA)
	b. Indeks Daya Saing Daerah	3,20 - 3,26	3,50 - 4,00
Daya saing SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	70,62	76,48
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	a. Penurunan intensitas emisi GRK (Ton CO2eq/210 IDR Milyar)	2,63	7,91
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	59,59	64,63

Sumber: RPJPD Kab. Bandung Barat Tahun 2025-2045

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang, juga memperhatikan modal dasar Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

a. Karakteristik masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang religius dan berbudaya merupakan modal sosial yang mampu mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;

b. Posisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang strategis diwilayah Bandung Raya;
c. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan serta sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat; dan
d. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029, digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2025-2029. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025- 2029 terdiri dari 8 (delapan) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Perwujudan Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter, memiliki 2 Tujuan dan 4 Sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak, dengan sasaran:
   1) Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak
   2) Kesehatan yang berkualitas untuk semua
   3) Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
2. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas, dengan sasaran:
   4) Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan

Perwujudan Misi 2: Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah, memiliki 1 Tujuan dan 3 Sasaran, yaitu:

3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran:
    5) Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi
    6) Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang
    7) Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja

Perwujudan Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel, memiliki 1 Tujuan dan 3 Sasaran, yaitu:

4. Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran:
    8) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif
    9) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital
    10) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Perwujudan Misi 4: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah, memiliki 1 Tujuan dan 2 Sasaran, yaitu:

5. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah, dengan sasaran:
    11) Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman
    12) Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah

Perwujudan Misi 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan, memiliki 1 Tujuan dan 2 Sasaran, yaitu:

6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh, dengan sasaran:
    13) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
    14) Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan

Perwujudan Misi 6: Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal, memiliki 2 Tujuan dan 3 Sasaran, yaitu:

7. Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah, dengan sasaran:
    15) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan
8. Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal, dengan sasaran:
    16) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa
    17) Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan

Tabel 3.5 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kab. Bandung Barat Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		SATUAN	KONDISI 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : BANDUNG BARAT AMANAH (AGAMIS MAJU ADAPTIF NYAMAN ASPIRATIF HARMONIS)														
Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter	1.1	Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak			**Indeks Pembangunan Manusia**		**Poin**	**70,77**	**71,33**	**72,14**	**72,72**	**73,46**	**74,23**	**75,04**
			1.1.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	a	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	60	64	68	72	76	80
			1.1.2	Kesehatan yang berkualitas untuk semua	a	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,06	75,09	75,25	75,40	75,56	75,72	75,88
					b	Prevalensi Stunting	% SSGI	30,80	27,75	25,14	22,9	20,97	19,29	17,84
			1.1.3	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	a	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,00	12,09	12,19	12,30	12,40	12,51	12,62
					b	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,25	8,27	8,28	8,29	8,31	8,32
	1.2	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas			**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**		**Poin**	**61,12**	**61,91**	**63,11**	**64,13**	**65,01**	**65,78**	**66,48**
			1.2.1	Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	a	Indeks Kualitas Keluarga	Poin	70,15	70,60	71,00	71,90	72,50	73,20	74,00
					b	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	N/A	43,85	44,20	44,64	44,89	45,00	45,20
Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah	2.1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			**PDRB per Kapita (ADHB)**		**Juta**	**32,500**	**34,09**	**38,79**	**41,19**	**44,17**	**48,03**	**53,10**
					Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi		**%**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**
			2.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	a	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	5,07	6,05	6,06	6,08	6,12	6,19
					b	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	36,64	37,72	40,7	42,29	44,25	46,33	48,52
					c	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	20,64	21,33	21,37	21,41	21,46	21,50	21,56
					d	Tingkat Inflasi	%	1,46	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
			2.1.2	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	a	Tingkat Kemiskinan	%	10,49	9,98	9,63	8,64	7,46	6,18	5,63
					b	Rasio Gini	Poin	0,400	0,369	0,367	0,366	0,364	0,363	0,360
			2.1.3	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	a	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,70	6,58	5,88	5,74	5,67	5,59	5,50

VISI / MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		SATUAN	KONDISI 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	3.1	Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan			**Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**		**Poin**	**3,72**	**3,80**	**3,92**	**4,02**	**4,11**	**4,20**	**4,28**
			3.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	a	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,77	81,58	82,41	83,27	84,17	85,12	86,13
			3.1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	a	Indeks SPBE	Poin	3,78	3,78	-	-	-	-	-
						Indeks Pemerintah Digital	Poin	N/A	-	1,2	1,4	1,6	1,80	2,00
			3.1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	a	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,26	84,35	84,47	84,55	84,67	84,72	84,91
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah	4.1	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah			**Indeks Infrastruktur**		**Poin**	**N/A**	**71,84**	**74,5**	**77,17**	**79,98**	**82,95**	**84,05**
			4.1.1	Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman	a	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	N/A	43,29	44,32	45,35	46,38	47,41	50,69
			4.1.2	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	a	Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,55	25,11	24,67	24,23	23,79	23,35	23,05
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	5.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh			**Penurunan Intensitas Emisi GRK**		**persen**	N/A	**2,63**	**2,94**	**3,28**	**3,69**	**4,24**	**4,65**
			5.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,43	59,59	59,84	60,09	60,34	60,60	60,85
					b	Penurunan Emisi GRK - Kumulatif	Ton Co2eq	N/A	256.969,37	286.294,48	319.167,57	359.667,39	415.351,77	480.259,45
			5.1.2	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan	a	Indeks Resiko Bencana	Poin	81,62	81,32	80,68	80,38	79,80	78,84	78,61

VISI / MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		SATUAN	KONDISI 2024	TARGET					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal	6.1	Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah			**Indeks Harmoni**		**Poin**	N/A	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
			6.1.1	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan	a	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Poin	56,71	58,48	60,83	62,49	64,72	66,46	69,45
	6.2	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal			**Indeks Desa**		**Poin**	**0,8436**	**0,7585**	**0,7765**	**0,7990**	**0,8185**	**0,8350**	**0,8585**
			6.2.1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	a	Presentase Desa Mandiri	Poin	41,82	49,09	62,42	74,55	85,45	94,55	100,00
			6.2.2.	Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	b	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19	57,58	58,50	59,25	59,89	60,44	60,92

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan telah ditetapkannya tujuan dan sasaran pada sub bab sebelumnya diperlukan upaya-upaya yang akan dilakukan berupa stategi yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2025 - 2029 serta arah kebijakan dari setiap strategi pembangunan terpilih. Upaya yang dilakukan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka waktu tahun 2025 - 2025 yang akan datang didukung oleh program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program prioritas daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2029. Sedangkan arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2029. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025 - 2029 di Kabupaten Bandung Barat, maka ditetapkan serangkaian strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN
1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhlak dan berkarakter				
1.1	1	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berakhlak			
	1	Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan	Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan		
			Peningkatan kesempatan dan Kebebasan Beribadah		
			Penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan zakat		
	2	Kesehatan yang berkualitas untuk semua	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Meningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
			Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan		
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan		
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.		
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan		
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan		
			Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting		
			Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan		
	3	Pendidikan yang berkualitas dan Merata	Percepatan wajib belajar 13 tahun	Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra Program Pembinaan Perpustakaan
			Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar		
			Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik		
			Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar		
			Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.		
			Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar		
			Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah		
			Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN
			Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.		
			Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.		
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan		
			Peningkatan kegemaran membaca masyarakat		
1.2	**2**	**Terwujudnya keluarga yang berkualitas**			
	4	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak serta meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Pengendalian Rata-rata Angka Kelahiran (TFR)	Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
			Peningkatan Layanan KB dan kesehatan reproduksi		
			Peningkatan ketahanan keluarga		
			Pemberdayaan perempuan melalui penguatan kapasitas dan kemandirian perempuan		
			Peningkatan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan		
			Penguatan pengarusutamaan gender		
			Pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak		
			Pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak		
			Pemenuhan hak dan perlindungan pemuda terhadap pengaruh destruktif		
			Pemberdyaan dan Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda		
			Pemberdayaan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan pemuda kader		
			Pemberdayaan dan pengembangan pemuda pada organisasi kepemudaan dan kepramukaan		
			Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan		
			Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana olahraga		
			Peningkatan SDM Keolahragaan		
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga		
			Peningkatan Prestasi Olahraga		
			Penyediaan sistem data keolahragaan terpadu		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN
2	**Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah**				
2.1	**3**	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**			
	5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan dan perikanan yang terintegrasi melalui modernisasi dan implementasi teknologi	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Perizinan Usaha Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekraf Melalui Pemanfaatan & Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Pengembangan Ekspor
			Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan		
			Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi		
			Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan & ekonomis		
			Pengendalian kesehatan ternak		
			Penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian		
			Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
			Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages)		
			Penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan partisipatif		
			Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha		
			Peningkatan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan		
			Peningkatan Sarana Prasarana jaringan distribusi perdagangan		
			Penguatan pengendalian inflasi daerah serta Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		
			Peningkatan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat		
			Pengembangan industri pengolahan ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah		
			Peningkatan standar dan daya saing produk IKM		
			Peningkatan koperasi aktif dan sehat		
			Peningkatan kompetensi SDM pengelola koperasi		
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan prosesbisnis		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN
			dan kelembagaan, serta adopsi teknologi		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Pelayanan Izin Usaha Sinpan Pinjam Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Program Pengembangan UMKM Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Perekonomian Dan Pembangunan
			Pembentukan dan pengembangan Koperasi desa Merah putih		
			Peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran) serta penerapan teknologi dan kemitraan UMKM		
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis UMKM		
			Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif		
			Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal		
			Peningkatan produktivitas BUMD		
	6	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perluasan penyediaan bantuan sosial (bantuan pembiayaan pendidikan, kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat	Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta mengurangi pengangguran	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
			Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN
			Pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dalam mencegah terjadinya kemiskinan baru		
			Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan		
			Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
	7	Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	Meningkatkan skill dan keterampilan tenaga kerja		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
			Perluasan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja		
			Peningkatan serapan tenaga kerja pada sektor potensial		
3	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel**				
3.1	**4**	**Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan**			
	8	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian Dan Pembangunan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan		
			Penguatan kerjasama strategis antar daerah		
			Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah		
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional		
			Center of excelent pengadaan barang jasa		
			Peningkatan kualitas penganggaran dan pengawasan		
			Peningkatan kualitas dan keselarasan Perencanaan pembangunan		
			Sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional		
			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah		
			Penguatan tata kelola kebijakan dan implementasi Satu Data Indonesia (SDI)		
			Peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN
			Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta,reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN sesuai cap. kinerja		Program Riset dan Inovasi Daerah
			Peningkatan kualitas dan pemantapan manajemen ASN		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Peningkatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
			Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah		Program Pengelolaan Arsip
			Pengembangan ekosistem inovasi dalam tata kelola pemerintahan		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif		Program Perizinan Penggunaan Arsip
			Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance		
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah		
			Meningkatkan perngelolaan arsip dinamis dan arsip statis		
	9	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	Pembangunan ekosistem digital melalui penguatan infrastruktur TIK, peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK, literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage		Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet		Program Pendaftaran Penduduk
			pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital		Program Pencatatan Sipil
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Peningkatan layanan keterbukaan informasi & komunikasi publik berbasis teknologi informasi		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat		Program Pelayanan Penanaman Modal
			Peningkatan layanan administasi kependudukan dan pencatatan sipil		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Peningkatan layanan penanaman modal		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
			Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN
4	**Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah**				
4.1	**5**	**Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah**			
	11	Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan dasar dan pelayanan Publik serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat berbasis spasial	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Pengembangan Permukiman Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Prog. Tanah Kelebihan Mak. dan Tanah Absentee Program pengelolaan tanah kosong Program Penatagunaan Tanah Program Penyelenggaraan Jalan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program Pengelolaan Pelayaran
			Percepatan penyediaan infrastruktur air minum		
			Pemenuhan, penyediaan dan percepatan pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi		
			Peningkatkan akses sanitasi		
			Percepatan penanganan dan penataan kawasan kumuh		
			Peningkatan pelayanan PSU perumahan formal		
			Peningkatan layanan pemakaman umum bagi masyarakat		
			Peningkatan pembangunan sistem drainase		
			Pemeliharaan dan penataan bangunan gedung milik daerah		
			Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah		
			Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah dan RDTR		
			Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C		
			Penyelenggaraan penatagunaan tanah sesuai tata ruang		
	12	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik		
			Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik		
			Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal		
			Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN
5	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan**				
5.1	**6**	**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh**			
	13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian dan pemantauan pencemaran udara	Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat dan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan serta meningkatkan ketahanan daerah serta kemandirian pangan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Peningkatan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Program Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program pengelolaan tanah kosong Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana Program Pengembangan Perumahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Pengendalian dan pemantauan pencemaran air sungai serta buangan air limbah domestik dan industri		
			Pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang terpadu, terukur, dan sesuai dengan karakteristik wilayah melalui pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dengan pendekatan SPALD-D, SPALD-T dan serta didukung dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		
			Meningkatkan pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS)		
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan		
			Pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan pendekatan berbasis kewilayahan dengan mengedepankan prinsip pengurangan, pemilahan, pengolahan, serta pemrosesan akhir yang ramah lingkungan		
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir berbasis masyarakat dan Pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) serta Pembangunan SPA (Sarana Pengolahan Antara)		
			Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri		
			Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah		
			Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah dan RDTR		
	14	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan	Peningkatan ketahanan bencana	Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berfokus pada penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor pertanian, peternakan, energi, transportasi, serta pengelolaan sampah dan limbah domestik.	
			Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan		
			Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana		
			Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana		
			Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana		
			Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya		
			Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian serta penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		

NO	MISI / TUJUAN / SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN
		Peningkatan diversifikasi pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Di sektor pertanian dan peternakan, strategi mencakup pemanfaatan biogas, penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan karbon tanah, dan pengembangan varietas rendah emisi. Di sektor energi dan transportasi, strategi dalamrangka transisi ke energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Peningkatan Ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan		

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

3.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang dan pola ruang, rencana pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044, meliputi:

a. Kebijakan Penataan Ruang

Tabel 3.7 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kab. Bandung Barat

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
Penetapan sistem pusat permukiman sesuai fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan pengembangan pusat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominannya	Meningkatkan peran daerah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional, dan regional
	Meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di kawasan perkotaan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
	Meningkatkan peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di kawasan perdesaan sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan
	Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Kawasan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, dengan memantapkan fungsi pusat pelayanan kawasan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung
	Meningkatkan peran Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai kawasan perdesaan yang berfungsi untuk melayani keg skala desa
Mendorong terlaksananya peran WP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk	Menetapkan 4 (empat) WP untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi fungsi wilayah
	Mengoptimalkan fungsi setiap WP agar terjadi sinergitas pembangunan
	Mengarahkan pengembangan wilayah sesuai potensi dan kendala di setiap WP
	Memantapkan fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di setiap WP, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung perkembangan perekonomian daerah
	Meningkatkan ketersediaan jaringan prasarana wilayah untuk mendukung mobilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di setiap WP
Penataan dan pengembangan jaringan prasarana	Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan serta kualitas jaringan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan antar WP
	Mengembangkan sistem angkutan umum massal
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan di setiap WP
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis daerah aliran sungai untuk menunjang kegiatan perkotaan, industri, dan pertanian

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	Meningkatkan sistem pengelolaan dan pemrosesan sampah di kabupaten, sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kegiatan perkotaan
	Meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Perwujudan, pemeliharaan kelestarian dan pencegahan kerusakan kawasan lindung	Mengendalikan alih fungsi kawasan hutan
	merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi lindung
	Menyediakan pemenuhan RTH di kawasan perkotaan, paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas seluruh Kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat
Perwujudan keterpaduan kawasan budi daya	Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan utk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wil. sekitarnya
	Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi
	Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan
	Mengembangkan potensi kecamatan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi
	Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang bernilai ekonomi tinggi di waduk/danau untuk meningkatkan perekonomian
Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya sesuai daya dukung dan daya tampung	Membatasi pengembangan lahan terbangun di daerah bagian utara
	Mengendalikan air larian kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk mencegah erosi
	Mengendalikan pembangunan pada lahan yang melampaui daya dukung dan daya tampung
	Mengendalikan kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan
Pengendalian perkembangan Kawasan perkotaan di wilayah utara untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan	Mengendalikan pemanfaatan ruang di daerah bagian utara
	Mendorong pengembangan permukiman vertikal di kawasan padat penduduk
	Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar di Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Lembang, dan Batujajar
Mengembangkan kawasan permukiman di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung	Mengembangkan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan penduduknya dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung ruang yang ada
	Mempertahankan kawasan non terbangun di sekitar kawasan permukiman dan menjaga fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya
	Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana
Pengembangan pusat-pusat kegiatan agroindustri	Mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Lembang
	Mengembangkan pusat kegiatan agroindustri yang berpusat di Kecamatan Cililin.
Pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan	Mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur utara
	Mengembangkan kawasan wisata yang terletak di jalur selata
	Mengembangkan Kawasan wisata yang terletak di jalur barat
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan
	Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannnya

Kebijakan Penataan Ruang	Strategi Penataan Ruang
	Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun
	Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan
Pengembangan KSK sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan kegiatan ekonomi yang ada di dalam dan sekitar KSK
	Menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan masuknya investasi
	Mengembangkan kawasan tematik
Pengembangan KSK sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi	Menata kegiatan yang ada di dalam dan sekitar KSK
	Mengendalikan alih fungsi lahan
	Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata
Pengembangan KSK sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Mengembangan kegiatan pertanian yang ada di dalam dan sekitar KSK
	Mengembangan pusat agobisnis
	Mengendalikan alih fungsi lahan lindung dan pertanian
	Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata
Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budi daya	Menetapkan ketentuan umum zonasi dan ketentuan khusus sebagai acuan pemberian KKPR untuk menjaga keadilan dan kepentingan umum
	Menetapkan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UKM
	Menerapkan penilaian perwujudan RTR daerah
	Menetapkan ketentuan pemberiaan insentif dan disinsentif serta perangkat pembangunan lainnya untuk perwujudan RTRW
	Menetapkan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran RTRW, penegakan sanksi pada pelaksanaan pembangunan yang melanggar KKPR yang diberikan
	Menjalankan penyelesaian sengketa penataan ruang dan konflik pemanfaatan ruang yang berkeadilan

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

b. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah sesuai dengan peran dan fungsi wilayahnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah lainnya. Sistem pemenuhan kebutuhan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan menciptakan perkembangan ekonomi yang pesat. Rencana struktur ruang Kabupaten Bandung Barat merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten, yang tersusun atas pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain berdasarkan peran dan fungsinya serta saling terhubung satu sama lainnya oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, meliputi sistem pusat permukiman, sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bandung Barat

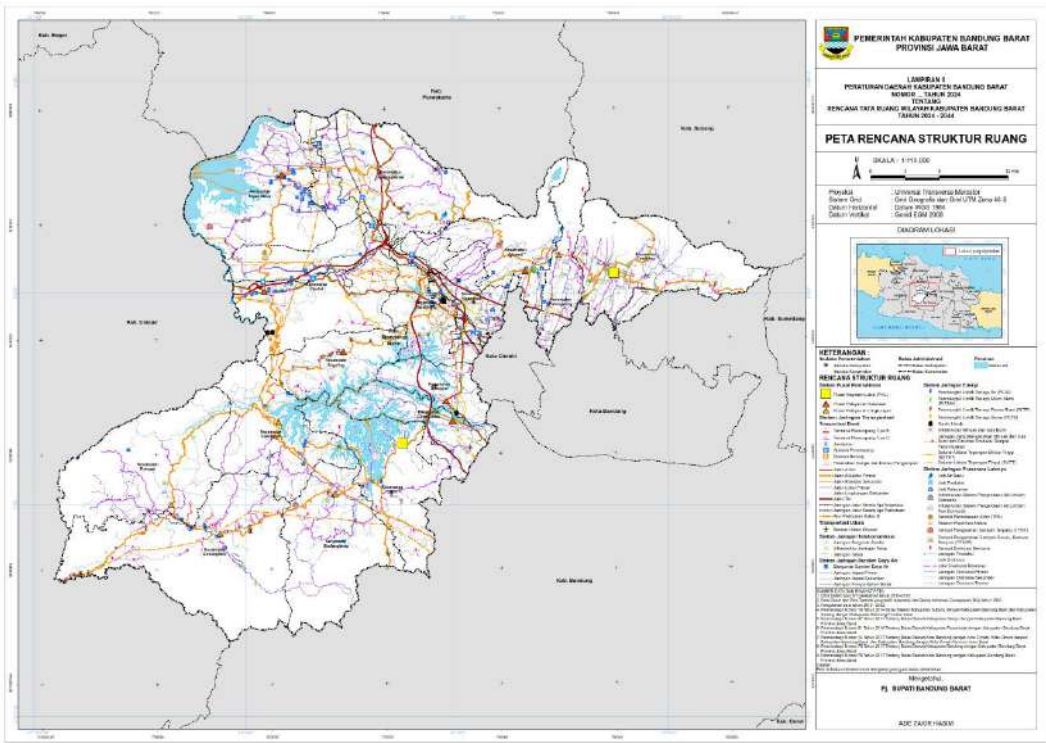

Sumber: RTRW KBB Tahun 2024-2044

Berdasarkan karakteristik serta fungsinya, rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat dibedakan menjadi dua rencana pengembangan, yaitu rencana pengembangan sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem pusat permukiman di Kabupaten Bandung Barat terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan pusat lainnya. Rencana sistem perkotaan yang akan diterapkan di Kabupaten Bandung Barat dilakukan berdasarkan rencana hierarki kota. Titik simpul (kota-kota) berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pusat-pusat pelayanan. Sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/ atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten.

1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
   - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional
   - Ditandai dengan adanya bandar udara skala pelayanan primer/ sekunder/ tersier, stasiun skala besar, dan terminal tipe A
   - Pusat Kegiatan Nasional Bandung Raya yang menjadikan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satunya meliputi Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cikalongwetan, sebagian Kawasan Perkotaan Batujajar, sebagian Kawasan

Perkotaan Cihampelas, sebagian Kawasan Perkotaan Cililin, sebagian Kawasan Perkotaan Cipatat, sebagian Kawasan Perkotaan Cipeundeuy, dan sebagian Kawasan Perkotaan Lembang.

2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
   - Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan
   - Fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan
   - PKL terletak di Kawasan Perkotaan Cililin yang berada di Kecamatan Cililin dan Kawasan Perkotaan Lembang yang berada di Kecamatan Lembang.
3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   - Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, meliputi: Batujajar, Cihampelas, Cipatat, Cipeundeuy, Cisarua, dan Saguling.
   - Fungsi pengembangan sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, perekonomian untuk skala lokal
   - Selain itu juga berfungsi sebagai DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) yang melayani kawasan perdesaan atau perkotaan yang berpotensi meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya di desa tersebut maupun desa sekitarnya,
   - Didukung kelengkapan sarana minimum seperti: pasar, dan sub terminal
4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
   - Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa, meliputi: Cipongkar, Gununghalu, Parongpong, Rongga, Sindangkerta.
   - Selain itu juga berfungsi sebagai DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) yang melayani kawasan perdesaan atau perkotaan yang berpotensi meningkatkan kegiatan produksi dan sektor ekonomi lainnya di desa tersebut maupun desa sekitarnya, dengan didukung kelengkapan sarana minimum seperti: pasar, dan sub terminal.

Sistem jaringan prasarana di Kabupaten Bandung Barat direncanakan meliputi Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air, dan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

c. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Bandung Barat dan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan. Secara umum, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan fungsi utamanya, meliputi:

1) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Kabupaten Bandung Barat meliputi

- Badan air, tersebar di 13 Kecamatan
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yakni berupa kawasan hutan lindung seluas 18.103 ha, tersebar di 10 kecamatan
- Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan sungai, sempadan sekitar waduk/danau/situ, dan kawasan perlindungan setempat lainnya seluas 2.548 ha, tersebar di 13 Kecamatan
- Kawasan konservasi yang meliputi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, terdiri dari Kawasan Suaka Alam, mencakup: Cagar Alam Junghunh di Kecamatan Lembang, Cagar Alam Gunung Tangkuban Parahu meliputi wilayah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong, Cagar Alam Burangrang meliputi Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Cisarua dan Kawasan pelestarian alam, mencakup: Taman Hutan Raya berupa Taman Hutan Raya Ir. H. Juanda terletak di Kecamatan Lembang serta Taman Wisata Alam berupa Taman Wisata Alam Kawah Gunung Tangkuban Parahu meliputi Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong.
- Kawasan cagar budaya. mencakup: Teropong Bintang Bosscha di Kecamatan Lembang; Monumen/Makam Franz Wilhelm Junghuhn di Kecamatan Lembang; Stasiun Kereta Api Padalarang di Kecamatan Padalarang; Pabrik Kertas Padalarang di Kecamatan Padalarang; Situs Cagar Budaya Gua Pawon di Kecamatan Cipatat; Kampung Budaya Gua Pawon, terletak di Kecamatan Cipatat; Gua Terusan Air Sanghyang Tikoro di Kecamatan Cipatat; Situs Batu Mukapayung di Kecamatan Cililin; Situs Mundinglaya di Kecamatan Cililin; Gedung Pemancar Radio (Telefunken/NIROM) di Kecamatan Cililin; dan Makam Tiga Waliulloh di Kecamatan Cipongkor

2) Kawasan budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah: Kawasan Hutan Produksi; Kawasan Pertanian Tanaman Pangan; Kawasan Pertanian

Tanaman Holtikultura; Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan; Kawasan Peternakan dan perikanan; Kawasan Pertambangan dan Energi; Kawasan Peruntukan Industri; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman; Kawasan Transportasi serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

d. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan dalam lingkup kabupaten. Pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Bandung Barat dimaksudkan untuk mempercepat terbentuknya struktur dan pola pemanfaatan ruang sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan pembangunan kewilayahan dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah dilakukan melalui Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 3.2 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat

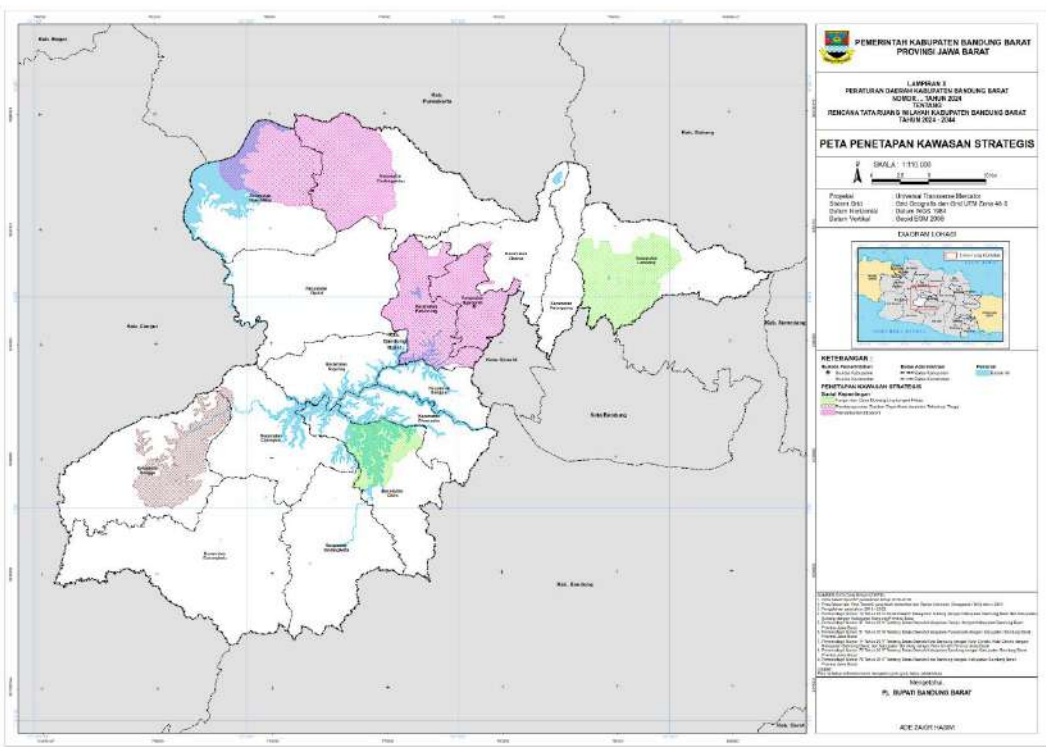

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Tabel 3.8 Kawasan Strategis Kabupaten Bandung Barat

No	Program	Lokasi
III	**Kawasan Strategis**	
III.A	**Kawasan Strategis Nasional**	
III.A.1	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional	KSN Perkotaan Cekungan Bandung; KSN Teropong Bintang Bosscha
III.A.2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional	
III.B	**Kawasan Strategis Provinsi**	
III.B.1	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang	KSP Kawasan Bandung Urata (KBU)
III.B.2	Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	
III.B.3	Monitoring dan evaluasi	
III.B.4	Fasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah	
III.B.5	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
III.B.6	Rehabilitasi Kawasan hutan, Kawasan imbuhan/resapan air dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis di Cekungan Air Tanah Bandung-Soreang	
III.B.7	Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir Wilayah Sungai Citarum	
III.C	**Kawasan Strategis Kabupaten**	
III.C.1	**Pertumbuhan Ekonomi**	
III.C.1.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cisarua Kecamatan Ngamprah Kecamatan Padalarang
III.C.1.2	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.1.3	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.1.4	Pengembangan Kegiatan Pariwisata	
III.C.1.5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	
	Penataan Kawasan pusat pemerintahan	
	Penataan Kawasan sekitar Stasiun Kereta Api Padalarang	
	Penataan RTH di sekitar waduk Saguling	
	Penataan Pusat Kota Padalarang	
III.C.1.6	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cikalongwetan
III.C.1.7	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.1.8	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.1.9	Pengembangan Kegiatan Pariwisata	
III.C.1.10	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	
III.C.1.11	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Cipeundeuy
III.C.1.12	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.1.13	Pengembangan Sapras dan utilitas Kawasan	
III.C.1.14	Pengembangan Kegiatan Industri	
III.C.1.15	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	

No	Program	Lokasi
III.C.2	**Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi**	
III.C.2.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi	Kecamatan Cipongkor Kecamatan Rongga
III.C.2.2	Peningkatan Produktivitas Kawasan	
III.C.2.3	perlindungan dan pelestarian Kawasan	
III.C.2.4	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.2.5	Pengembangan Kegiatan Pariwisata	
III.C.2.6	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	
III.C.3	**Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**	
III.C.3.1	Penyusunan Rencana Penataan Kawasan atau Masterplan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Kecamatan Cililin Kecamatan Lembang Kecamatan Sindangkerta
III.C.3.2	Perlindungan dan pelestarian Kawasan	
III.C.3.3	Pengembangan sarana, prasarana dan utilitas Kawasan	
III.C.3.4	Pengembangan Agrbisnis	
III.C.3.5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis	

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

e. Kebijakan Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Dalam rencana struktur ruang RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 tertuang bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari rencana pengembangan sistem perkotaan Pusat Kegiatan Nasional – Provinsi (PKNp), yaitu kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Fasilitas minimum yang harus dimiliki Kabupaten Bandung Barat sebagai PKNp adalah pusat bisnis kegiatan utama yang akan dikembangkan dengan skala internasional maupun nasional dan akan diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional.

Penetapan Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dimana Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu bagiannya, didasari oleh perkembangan kegiatan perkotaan yang sangat pesat, terutama pada sektor industri, perdagangan dan jasa, serta pendidikan tinggi. Salah satu indikasi pesatnya perkembangan tersebut adalah tingginya alih fungsi lahan menuju kawasan perkotaan dan tingginya tingkat urbanisasi. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan di Kawasan Perkotaan Bandung Raya menjadi salah satu amanat yang harus dipenuhi oleh wilayah-wilayah di dalamnya. Salah tujuannya untuk mengurangi kecendrungan alih fungsi lahan yang menerus di kawasan perkotaan, mengingat target jumlah kawasan lindung yang ditargetkan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 45%.

Dalam Rencana Struktur Ruang Dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 juga ditetapkan sistem perkotaan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, yang di dalamnya juga terdapat beberapa wilayah yang berada di Kabupaten Bandung Barat, yaitu Kecamatan Padalarang sebagai Kota Hierarki II serta Kecamatan Cililin, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Lembang sebagai Kota Hierarki III.

Kawasan Bandung Utara ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2042. Saat ini, pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara tidak terkendali sehingga mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan daerah sebagai daerah tangkapan air. Kawasan Bandung Utara atau yang disingkat KBU, memiliki peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Kawasan Bandung Utara merupakan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Penataan ruang pada kawasan ini diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dan dalam berbagai aspek.

Secara administratif, Kawasan Bandung Utara meliputi sebagian Kabupaten Bandung, seluruh Kota Bandung dan Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Bandung Barat. Kawasan Bandung Utara yang termasuk ke dalam daerah Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Sebagian daerah Kecamatan Cikalongwetan
2. Kecamatan Cisarua
3. Kecamatan Lembang
4. Sebagian Kecamatan Ngamprah
5. Sebagian Kecamatan Padalarang
6. Kecamatan Parongpong

Berdasarkan pola ruang, Kawasan Bandung Utara terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Daerah kawasan lindung Kawasan Bandung Utara yang masuk kedalam wilayah Kab Bandung Barat adalah:

1. Kawasan pelestarian alam: sebagian Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda serta Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu
2. Kawasan suaka alam: Cagar Alam Tangkuban Perahu
3. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Observatorium Bosscha
4. Kawasan rawan bencana alam geologi: Sesar Lembang

3.2.3 Pentahapan Pembangunan

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Bandung Barat setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 menjadi tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Bandung Barat.

Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan atau fokus yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 3.9 Tema dan Tahapan Pembangunan Tahunan Kab. Bandung Barat Tahun 2025-2029

MISI PEMBANGUNAN	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2025	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2026	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2027	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2028	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2029
	"Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Daerah"	**"Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah"**	**"Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat"**	**"Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"**	**"Mewujudkan Bandung Barat AMANAH yang Berkelanjutan"**
	FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2026**	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2027**	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2028**	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2029**
Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter	Optimalisasi dan penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan termasuk pencegahan dan penanganan stunting	Peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Peningkatan daya saing SDM	Mewujudkan SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter
	Optimalisasi dan Penyediaan Sarana Peribadatan	Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	Penguatan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan	Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan	
	Pendidikan karakter melalui penguatan keagamaan disekolah dan lingkungan keluarga	Pemberdayaan perempuan dan keluarga serta Peran Pemuda dalam Pembangunan	Peningkatan kualitas Keluarga dan kualitas Pemuda	Peningkatan kesejahteraan keluarga dan daya saing pemuda	
Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah	Optimalisasi sumber daya ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM serta optimalisasi investasi daerah	Peningkatan sumber daya ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta digitalisasi investasi daerah	Pengembangan sumber daya ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN dan sektor potensial serta peningkatan investasi	Peningkatan daya saing produk dan pemasaran serta keterkaitan antar sektor ekonomi unggulan dan potensial termasuk pengembangan investasi	Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan maysarakat
	Penguatan layanan perlindungan sosial dan kebijakan yang inklusif bagi kelompok rentan serta penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan serta peningkatan penanggulangan kemiskinan	Penguatan sistem perlindungan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat	Perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat	

MISI PEMBANGUNAN	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2025	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2026	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2027	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2028	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2029
	"Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Daerah"	**"Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah"**	**"Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat"**	**"Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"**	**"Mewujudkan Bandung Barat AMANAH yang Berkelanjutan"**
	FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2026**	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2027**	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2028**	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2029**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Penyediaan infrastruktur digitalisasi pelayanan publik	Peningkatan frastruktur digitalisasi pelayanan publik dan penguatan ekosistem inovasi	Peningkatan ekosistem research dan inovasi serta digitalisasi pelayanan publik	Pengembangan research dan inovasi berbasis IPTEK dalam meningkatkan pelayanan publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel
	Penguatan sistem meritokrasi dan identifikasi kebutuhan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengembangan sistem meritokrasi dan penguatan Kelembagaan yang efektif dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Penataan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan konsep satu data dan satu sistem yang terintegrasi	Peningkatan daya saing dan profesionalisme ASN	
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah	Optimalisasi dan penyediaan sistem jaringan sanitasi dan air bersih, infrastruktur jalan, jaringan irigasi, infrastruktur perumahan dan permukiman serta infrastruktur publik lainnya	Peningkatan penyediaan sistem jaringan sanitasi dan air bersih, infrastruktur jalan, jaringan irigasi, infrastruktur perumahan dan permukiman serta infrastruktur publik lainnya	Pemeliharaan dan pemerataan sistem jaringan sanitasi dan air bersih, infrastruktur jalan, jaringan irigasi, infrastruktur perumahan dan permukiman serta infrastruktur publik lainnya	Pemeliharaan dan pemantapan infrastruktur dasar dan infrastruktur pelayanan publik serta konektifitas antar wilayah	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah yang berkelanjutan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	Penguatan manajemen sumber daya air, penguatan manajemen bencana dan perubahan iklim serta penyusunan RAD penurunan emisi GRK	Akselerasi pengelolaan air berbasis hulu-hilir dan mitigasi adaptasi perubahan iklim dan bencana serta implementasi rencana aksi penurunan emisi GRK	Integrasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana serta implementasi rencana aksi penurunan emisi GRK	Peningkatan ketahanan daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan
	Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah dan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah	Peningkatan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu	Kerjasama swasta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu	

MISI PEMBANGUNAN	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2025	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2026	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2027	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2028	TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2029
	"Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Daerah"	**"Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah"**	**"Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat"**	**"Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"**	**"Mewujudkan Bandung Barat AMANAH yang Berkelanjutan"**
	FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2026**	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2027**	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2028**	**FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2029**
Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai fondasi harmoni serta Pemetaan wilayah dan jenis potensi gangguan trantibum serta perlindungan masyarakat dan penyelamatan	Peningkatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, Pengadaan dan Pemeliharaan Sapras Trantibum dalam rangka pencegahan dan penindakan gangguan Trantibum serta Penegakan Perda/Perkada termasuk perlindungan masyarakat dan penyelamatan	Pemantapan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan pemberdayaan Satlinmas dalam rangka Pencegahan dan penindakan gangguan Trantibum serta Penegakan Perda dan Perkada termasuk perlindungan masyarakat dan penyelamatan	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan serta pengembangan TIK dan penguatan inovasi dalam rangka Penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagai fondasi harmoni serta peningkatan Pencegahan dan penindakan gangguan Trantibum serta Penegakan Perda dan Perkada termasuk perlindungan masyarakat dan penyelamatan	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	Pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa sesuai kearifan budaya lokal	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan penguatan SDM Aparatur Desa dalam mendukung pengembangan ekonomi desa serta pelestarian budaya lokal	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa dalam rangka Peningkatan ekonomi desa dan kemandirian desa serta peningkatan pelestarian budaya lokal	Peningkatan kemandirian desa dan pemajuan kebudayaan	

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan telah ditetapkan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang merupakan cara untuk mewujudkan setiap sasaran sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, membutuhkan program yang tepat selanjutnya disebut program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *Cascadin*g (penurunan kinerja). Program pembangunan daerah selain dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah, juga ditujukan untuk melaksanakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029.

3.2.4.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Program prioritas pembangunan daerah ditetapkan dengan mengacu pada 32 (tiga puluh dua) program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk selanjutnya diterjemahkan sesuai dengan nomenklatur program Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya menjadi 87 program prioritas dengan tetap memperhatikan hasil penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pada RPJMD Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1: Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter, terdiri dari 10 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 14 Program Prioritas, yaitu:

1. Peningkatan Kesejahteraan SDM Keagamaan,
2. Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan termasuk Pesantren
   dengan Program Prioritas:
   1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah
   dengan Program Prioritas:
   2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
4. Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
5. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PUSKESDES)
6. Penanganan stunting dan peningkatan gizi
   dengan Program Prioritas:
   3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

7. Penempatan Tenaga Kesehatan Desa
   dengan Program Prioritas:
   5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan
   dengan Program Prioritas:
   6) Program Pengelolaan Pendidikan
   7) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
9. Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan
   dengan Program Prioritas:
   8) Program Pembinaan Keluarga Berencana
   9) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
   10) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
   11) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   12) Program Pemenuhan Hak Anak
10. Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan
    dengan Program Prioritas:
    13) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
    14) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Prioritas Daerah 2: Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah, terdiri dari 7 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 21 Program Prioritas, yaitu:

11. Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital
12. Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa
    dengan Program Prioritas:
    15) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
    16) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
    17) Program Penyuluhan Pertanian
    18) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
    19) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
13. Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf
    dengan Program Prioritas:
    20) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
    21) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

22) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
23) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
24) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

14. Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah
    dengan Program Prioritas:
    25) Program Pengembangan UMKM
    26) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
15. Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat
    dengan Program Prioritas:
    27) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
    28) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
    29) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
    30) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
16. Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif
    dengan Program Prioritas:
    31) Program Rehabiliasi Sosial
    32) Program Pemberdayaan Sosial
    33) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
    34) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
17. Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja
    dengan Program Prioritas:
    35) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
    36) Program Penempatan Tenaga Kerja

Prioritas Daerah 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel, terdiri dari 5 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 20 Program Prioritas, yaitu:

18. Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
    dengan Program Prioritas:
    37) Program Perekonomian Dan Pembangunan
    38) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
    39) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
    40) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
    41) Program Riset dan Inovasi Daerah
    42) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

43) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
44) Program Penyelenggaraan Pengawasan
45) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
46) Program Pengelolaan Arsip

19. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan
    dengan Program Prioritas:
    47) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
20. Meningkatkan Profesionalisme ASN, dengan Program Prioritas:
    48) Program Kepegawaian Daerah
    49) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
21. Penguatan Pembangunan Smartcity
22. Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan
    dengan Program Prioritas:
    50) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
    51) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
    52) Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik
    53) Program Pendaftaran Penduduk
    54) Program Pencatatan Sipil
    55) Program Pelayanan Penanaman Modal
    56) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Prioritas Daerah 4: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah, terdiri dari 2 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 8 Program Prioritas, yaitu:

23. Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat
24. Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan
    dengan Program Prioritas:
    57) Program Kawasan Permukiman
    58) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
    59) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
    60) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
    61) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
    62) Program Penyelenggaraan Jalan
    63) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

64) Program Pengelolaan Pelayaran

Prioritas Daerah 5: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan, terdiri dari 3 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 13 Program Prioritas, yaitu:

25. Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup
    dengan Program Prioritas:
    65) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    66) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
26. Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga
    dengan Program Prioritas:
    67) Program Pengelolaan Persampahan
    68) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
27. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah
    dengan Program Prioritas:
    69) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
    70) Program Penanggulangan Bencana
    71) Program Penanganan Bencana
    72) Program Pengembangan Perumahan
    73) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
    74) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
    75) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
    76) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Prioritas Daerah 6: Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal, terdiri dari 5 program prioritas Kepala Daerah yang diterjemahkan menjadi 11 Program Prioritas, yaitu:

28. Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan
    dengan Program Prioritas:
    77) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    78) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

79) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
80) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

29. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
30. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa
31. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa

dengan Program Prioritas:

81) Program Penataan Desa
82) Program Administrasi Pemerintahan Desa
83) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
84) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
85) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

32. Pemajuan Kebudayaan, dengan Program Prioritas:
    86) Program Pengembangan Kebudayaan
    87) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tabel 3.10 Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

NO			MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
1			**Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter**					
1.1	1		**Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak**		**Indeks Pembangunan Manusia**			
	1		**Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak**	1	**Indeks Kesalehan Sosial (IKS)**			
		1.1	Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan	1	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan yang ditindaklanjuti	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra Setda
		1.2	Peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan	2	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan			
		1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan zakat	3	Indeks Zakat Nasional			
		1.4	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan kebebasan beribadah	4	Indeks kerukunan Umat Beragama	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
	2		**Kesehatan yang berkualitas untuk semua**	2	**Umur Harapan Hidup**			
				3	**Prevalensi Stunting**			
		2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	5	Angka kematian ibu	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
				6	Angka kematian bayi			
				7	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis			
				8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis			
				9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional			
				10	Presentase ketersediaan sapras kesehatan yang memenuhi standar			
				11	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik			
		2.2	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	12	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		2.3	Meningkatnya kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan	13	Presentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3		**Pendidikan yang Berkualitas dan Merata**	4	**Harapan Lama Sekolah**			
				5	**Rata - Rata Lama Sekolah**			
		3.1	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	14	APS usia 5-6	6	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
				15	APS usia 7-15			
				16	APS usia 7 - 18 Kesetaraan			
		3.2	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	17	Rasio Guru/Murid PAUD	7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
				18	Rasio Guru/Murid SD			
				19	Rasio Guru/Murid SMP			
1.2	2		**Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas**		**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**			
	4		**Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan**	6	**Indeks Kualitas Keluarga (IKK)**			BPS/DP2KBP3A
				7	**Indeks Pembangunan Pemuda**			Dispora
		4.1	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	20	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	BPS/DP2KBP3A
				21	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi			
				22	Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)			
		4.2	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	23	Indeks Kerentanan Keluarga	9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
				24	Median Usia Perkawinan Pertama Perempuan (MUKP)			
				25	Indeks Lansia Tangguh			
		4.3	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam pembangunan	26	Presentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhuk sosek	10	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
		4.4	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	27	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar	11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		4.5	Terjaminnya pemenuhan semua hak anak secara komprehensif	28	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	12	Program Pemenuhan Hak Anak	
		4.6	Meningkatnya layanan kepemudaan dan daya saing pemuda	29	Presentase layanan kepemudaan	13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
				30	Rasio Kewirausahaan Pemuda			
		4.7	Meningkatnya pembangunan olahraga dan prestasi olahraga	31	Indeks ketersedian ruang terbuka dan sarana olahraga	14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				32	Indeks SDM Keolahragaan			
				33	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga			
				34	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi			

NO		MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS	PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
2		**Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah**					
2.1	3	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**		**PDRB per Kapita (ADHB)**			
				Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi			
	5	**Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi**	8	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**			
			9	**Indeks Ekonomi Hijau Daerah**			
			10	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**			
			11	**Tingkat Inflasi**			
	5.1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana pertanian	35	Persentase Sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
		Meningkatnya produksi peternakan	36	Persentase peningkatan produksi peternakan			Dispernakan
	5.2	Meningkatnya jumlah dan kualitas Prasarana pertanian	37	Cakupan luas lahan pertanian yang terfasilitasi prasarananya	16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
		Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan prasarana peternakan	38	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik			Dispernakan
	5.3	Meningkatnya kapasitas SDM pelaku pertanian dan peternakan	39	Presentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	17	Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
			40	Presentase SDM petani yang ditingkatkan kompetensinya			
		Meningkatnya kapasitas kelompok ternak	41	Presentase kelompok peternakan yang dibina			Dispernakan
	5.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	42	Presentase luas layanan irigasi		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas PUTR
	5.5	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	43	Jumlah produksi perikanan budidaya	18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dispernakan
	5.6	Meningkatnya produksi hasil olahan ikan	44	Jumlah produksi olahan ikan	19	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	5.7	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata	45	Peresentase pengembangan daya tarik wisata yang siap kunjung	20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Disparbud
	5.8	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	46	Presentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi	21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
	5.9	Meningkatnya produktivitas koperasi	47	Persentase Koperasi Berkualitas	22	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskop UKM
	5.10	Peningkatan kemampuan dan kemandirian UMKM, pertumbuhan ekonomi daerah	48	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	23	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	
	5.11	Peningkatan kesejahteraan, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing UMKM	49	Presentase pengembangan UMKM	24	Program Pengembangan UMKM	
	5.12	Meningkatnya Iklim Investasi daerah	50	Peningkatan Dokumen Investasi yang Siap ditawarkan kepada Investor	25	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
	5.13	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	51	Presentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	26	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperindag
	5.14	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	52	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	27	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
	5.15	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	53	Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	28	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
	5.16	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	54	Presentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	29	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	
	5.17	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	55	Presentase izin usaha industri yang diterbitkan	30	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
	5.18	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	56	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag. Perekonomian Setda
	6	**Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang**	12	**Tingkat Kemiskinan**			BPS
			13	**Rasio Gini**			BPS
	6.1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	57	Presentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS	31	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos
	6.2	Meningkatnya rehabilitasi sosial	58	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	32	Program Rehabilitasi Sosial	
	6.3	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	59	Presentase penerima manfaat (individu/keluarga miskin) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	33	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
			60	Presentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindugan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan			
			61	Presentase pengelolaan data kemiskinan daerah			
	6.4	Meningkatnya pencegahan terhadap berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	62	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	34	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperkim
	7	**Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja**	14	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**			BPS
	7.1	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Perusahaan	63	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi BNSP	35	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
			64	Persentase Pengukuran Produktifitas Perusahaan			
	7.2	Meningkatnya Penempatan Pencari Kerja di dalam dan luar negeri	65	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	36	Program Penempatan Tenaga Kerja	

NO		MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS	PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
3		**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel**					
3.1	4	**Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan**		**Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**			
	8	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif**	15	**Indeks Reformasi Birokrasi**			Bag. Organisasi
	8.1	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	66	Persentase produk hukum yang ditetapkan		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Hukum Setda
	8.2	Meningkatnya kerja sama strategis Regional yang ditindaklanjuti	67	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti			Bag. Tapem Setda
			68	Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan			
	8.3	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	69	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	37	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bag. Pemb. Setda
	8.4	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	70	Tingkat kematangan UKPBJ			Bag ULP Setda
	8.5	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Perpu	71	Presentase pembentukan Ranperda Tahun n	38	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
			72	Presentase ketepatan penetapan perda APBD Tahun n			
			73	Persentase peningkatan kapasitas DPRD			
	8.6	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	74	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			
			75	Persentase kebijakan anggaran yang dibahas			
	8.7	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	76	Presentase Capaian kinerja Daerah	39	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
			77	Nilai Komponen isi dokumen perencanaan pembangunan			
	8.8	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang PPM, Ik dan PSDA	78	Persentase Capaian program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	40	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			79	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan			
			80	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang PSDA			
	8.9	Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	81	Persentase produk inovasi daerah yang dimanfaatkan	41	Program Riset dan Inovasi Daerah	
			82	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan			
	8.10	Meningkatnya tata kelola anggaran	83	Presentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
			84	Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik			
	8.11	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	85	Presentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar			
			86	Presentase penurunan silva			
	8.12	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan keuangan	87	Presentase laporan keuangan tepat waktu			
	8.13	Meningkatnya tata kelola aset daerah	88	Presentase penambahan nilai aset tetap	43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
	8.14	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	89	Persentase Peningkatan Pendapatan daerah dari Sektor Pajak Daerah	44	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
	8.15	Meningkatnya kualitas layanan adm. Kepegawaian	90	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	45	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
	8.16	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	91	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi			
	8.17	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	92	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin			
	8.18	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	93	Nilai Aspek Pengembangan Karir	46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	8.19	Menurunnya kejadian penyelewengan/penyimpangan baik yang bersipat anggaran atau proses dan kewenangan	94	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	47	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
	8.20	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	95	Nilai Peningkatan Kapabilitas APIP	48	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
			96	Nilai Survey Penilaian Integritas			
	8.21	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	97	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	49	Program Pengelolaan Arsip	Disarpus
			98	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			
	9	**Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital**	16	**Indeks Pemerintah Digital**			Diskominfotik
	9.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menunjang transformasi digital	99	Nilai Strategi dan Rencana Pemdigi	50	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfotik
			100	Nilai Teknologi Digital			
	9.2	Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral dalam rangka mendukung penyelenggaraan SDI	101	Nilai implementasi prinsip Satu Data Indonesia	51	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			102	Niali Kualitas Data staitsik			
			103	Niali Proses Bisnis statistik			

NO			MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS	PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
	10		**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	17	**Indeks Kepuasan Masyarakat**			Bag. Tapem Setda
		10.1	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemda	104	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemda	52	Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfotik
		10.2	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	105	Presentase kepemilikan identitas kependudukan digital	53	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
				106	Presentase kepemilikan kartu identitas anak			
		10.3	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	107	Persentase Anak Berusia 0 - 4 Tahun yang memiliki akta kelahiran	54	Program Pencatatan Sipil	
				108	Persentase Anak Berusia 0 - 18 Tahun yang memiliki akta kelahiran			
				109	Persentase Kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk yang menikah			
				110	Persentase kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan			
				111	Persentase Kepemilikan akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai			
		10.4	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	112	Persentase Waktu Proses Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai SOP	55	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		10.5	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	113	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	56	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	16 Kecamatan
4			**Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Aksebilitas Wilayah**					
4.1	5		**Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah**		**Indeks Infrastruktur**			
	11		**Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman**	18	**Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**			Dinas Perumahan dan Permukiman
		11.1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	114	Presentase Pengurangan luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani	57	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
		11.2	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	115	Presentase peningkatan PSU perumahan formal yang sudah serah terima ke Pemda	58	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
		11.3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	116	Akses Rumah Tangga terhadap Air Siap Minum	59	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR
		11.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	117	Presentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	60	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		11.5	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	118	Presentase cakupan drainase dalam kondisi baik	61	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	12		**Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah**	19	**Indeks Kesulitan Geografis**			Bid. PPEPD Bappelitbangda
		12.1	Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	119	Persentase jalan dalam kondisi mantap	62	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUTR
		12.2	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	120	Konektifitas transportasi darat	63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
				121	Presentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kebutuhan			
				122	Ketersediaan simpul transportasi yang terkelola			
		12.3	Meningkatnya kualitas layanan transportasi pelayaran	123	konektifitas transportasi pelayaran	64	Program Pengelolaan Pelayaran	
5			**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan**					
5.1	6		**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh**		**Penurunan Intensitas Emisi GRK**			DLH
	13		**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**	20	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**			DLH
				21	**Penurunan Emisi GRK - Kumulatif**			DLH
		13.1	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	124	Persentase kualitas air sungai yang status mutu airnya meningkat	65	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		13.2	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3	125	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah LB3	66	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	
		13.3	Meningkatnya tata kelola persampahan	126	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	67	Program Pengelolaan Persampahan	
				127	Presentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah			
		13.4	Meningkatnya penyediaan sarpras persampahan	128	Presentase penyediaan sarpras persampahan	68	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUTR

NO		MISI/TUJUAN /SASARAN/OUTCOME		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / OUTCOME		PROGRAM PRIOIRTAS	PERANGKAT DAERAH/ PENANGGUNGJAWAB
	14	**Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan**	22	**Indeks Resiko Bencana**			BPBD
	14.1	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	129	Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	69	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	14.2	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	130	Presentase penanganan tanggap darurat bencana			
	14.3	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	131	Presentase penanganan pasca bencana			
	14.4	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	132	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	70	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
	14.5	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga korban bencana	133	Presentase rumah korban bencana yang tertangani	71	Program Pengembangan Perumahan	Disperkim
	14.6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang	134	Presentase penyelenggaraan penataan ruang	72	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTR
	14.7	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap ketahanan air dan banjir	135	Kapasitas Air Baku	73	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
			136	Presentase perlindungan permukiman rawan banjir			
	14.8	Meningkatnya penanggulangan wabah penyakit ternak	137	Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak	74	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dispernakan
	14.9	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	138	Presentase penanganan bencana pertanian			DKPP
			139	Presentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian			
	14.10	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	140	Presentase sarpras pangan yang terbangun	75	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
	14.11	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	141	Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)	76	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			142	Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)			
6		**Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal**					
6.1	7	**Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah**		**Indeks Harmoni**			Bakesbangpol
	15	**Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan**	23	**Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			Satpol PP
	15.1	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	143	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	77	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
	15.2	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	144	Persentase cakupan perlindungan masyarakat			
	15.3	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	145	Presentase penegakan perda dan perkada			
	15.4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan SDM PPNS	146	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya			
	15.5	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran	147	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	78	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Disdamkar & Penyelamatan
	15.6	Meningkatnya kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana	148	Presentase penanggulangan bencana		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	15.7	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	149	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	79	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
	15.8	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	150	Presentase kebijakan di bidang ketahanan eonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
	15.9	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	151	Presentase konflik sosial yang diselesaikan	80	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
6.2	8	**Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal**		**Indeks Desa**			DPMD
	16	**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa**	24	**Presentase Desa Mandiri**			DPMD
	16.1	Meningkatnya kualitas penataan desa	152	Presentase fasilitasi penataan desa	81	Program Penataan Desa	DPMD
	16.2	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengasawan pemerintahan desa	153	Presentase aparatur desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	82	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
	16.3	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	154	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	83	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
	16.4	Meningkatnya lembaga kemasyarakatn yang aktif dalam pembangunan	155	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan	84	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	16 Kecamatan
	16.5	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	156	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	85	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	17	**Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan**	25	**Indeks Pembangunan Kebudayaan**			Disparbud
	17.1	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	157	Presentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	86	Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud
	17.2	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	158	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	87	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	

Selanjutnya dalam rangka untuk mendukung program prioritas pembangunan tahun 2025-2029 disusun langkah strategis pembangunan dalam bentuk **"12 (dua belas) Amanah Ngawangun Bandung Barat"** dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Amanah Kahiji**

   yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan, dilaksanakan melalui: Pemberian insentif guru ngaji dan ustadz; Pemberian insentif Marbot Masjid dan pengelola tempat ibadah; Pendataan, pelatihan, dan sertifikasi bagi pengajar, guru ngaji dan marbot; Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan bagi sarana keagamaan; Peningkatan nilai hibah kelembagaan keagamaan; Pendampingan dan tata kelola manajemen sarana peribadatan; Renovasi sarana peribadatan; Digitalisasi layanan peribadatan; Peningkatan moderasi dalam beragama; Pendidikan karakter dengan pemusatan pendidikan masing-masing pemeluk agama di usia sekolah; Pendidikan karakter melalui penguatan keagamaan di sekolah dasar dan Kehadiran pejabat pemerintah daerah dalam acara keagamaan.

2. **Amanah Kadua**

   yaitu eningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting), dilaksanakan melalui: Membentuk Satuan Gugus Tugas Kesehatan sampai tingkat desa; Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan puskesmas; Penguatan kapasitas pos kesehatan desa; Pengadaan ambulance desa; Pemberian pelayanan kesehatan yang cepat dan ramah; Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan dan obat – obatan; Peningkatan pelayanan kesehatan melalui mobil kesehatan ke setiap desa; Peningkatan peran puskesmas pembantu terintegrasi di setiap desa; Akses pelayanan kesehatan gratis; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan rumah sakit daerah; Meningkatkan peran puskesmas pembantu di desa dalam pelayanan kesehatan; Meningkatkan peran posyandu dalam pemberian gizi ibu hamil dan anak balita; Meningkatkan kualitas kesehatan di sekolah-sekolah melalui peran puskesmas pembantu; Penambahan fasilitas Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan); SATU NAFAS DESA (Satu Nakes dan Satu Faskes di setiap Desa); Peningkatan kapasitas kader posyandu; Pemberian makan siang bergizi bagi siswa pendidikan dasar; Pemberian bantuan pangan, sandang dan papan dan Pemberian susu dan telur gratis bagi ibu menyusui dan balita.

3. Amanah Katilu

yaitu Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dilaksanakan melalui: Program PARENTING (Pemberian edukasi wajib belajar terhadap orang tua bahwa wajib belajar itu penting); Bekerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah desa dan sektor swasta mengembangkan pusat-pusat belajar masyarakat di desa; Pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan bansos bagi siswa tidak mampu; Memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pendidik; Penguatan wajib belajar melalui bantuan penyetaraan pendidikan, pemberantasan buta huruf dan pemberantasan putus sekolah; Pemberian bantuan jaringan internet gratis bagi seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah; Membangun sekolah-sekolah baru dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi; Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai bagi masyarakat; dan Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan sekolah - sekolah desa.

4. Amanah Kaopat

yaitu Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan, dilaksanakan melalui: Peningkatan pembangunan sarana olahraga; Pekan olahraga antar sekolah SD dan SMP; Pekan olahraga antar kecamatan; Tata kelola sarana olah raga yang baik; Pembinaan kelembagaan pemuda; Pelatihan dasar kepemimpinan; Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda; Memberikan advokasi pertanian terhadap pemuda; Penguatan advokasi kepada calon pengantin; Pelatihan dan peningkatan kapasitas perempuan; Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak; Penguatan dan pengembangan kelembagaan perempuan dan anak; Pemberdayaan peranan perempuan di bidang ekonomi.

5. Amanah Kalima

yaitu Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah, dilaksanakan melalui: Mendorong kebijakan pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif; Fasilitasi hasil produk UMKM; Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM dan akses modal UMKM; Program One Village One Product; Fasilitasi jejaring dan bantuan permodalan bagi UMKM; Pemberian bantuan pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); Mendorong investasi dan pengembangan pariwisata berbasis desa; Mendorong investasi tempat wisata baru; Fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif masyarakat; Pemberian penyuluhan, pembinaan & pelatihan bagi remaja dlm bid. digital & Ekraf; Pembangunan gedung creative centre untuk kreativitas milenial; Job Fair / Bandung Barat Job Fair; Pembangunan sumber air pertanian (sal. irigasi, pompanisasi, sumur bor

dan kantung air); Pembangunan jalan pertanian dan optimalisasi lahan pertanian; Pemberian kebutuhan benih yang berkualitas; Bantuan sarana dan prasarana pertanian; Pengembangan peternak melalui bantuan bibit dan pakan ternak; Fasilitasi pengolahan hasil pertanian; Mendorong pembangunan pertanian terintegrasi; Fasilitasi insentif modal usaha pertanian, peternakan dan perikanan; Pelayanan kesehatan ternak; Diversifikasi/klusterisasi sistem pertanian; Menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan; Menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan; Pemberian Bibit Kepada Para Petani Dengan Kualitas Yang Unggul; Subsidi bebas PBB bagi lahan sawah yang dilindungi; Pembentukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; Modernisasi pengolahan lahan pertanian; Pembangunan sentra-sentra pemasaran produk unggulan; Revitalisasi teknik tradisional, penggunaan bahan baku lokal, atau penemuan produk baru yang terinspirasi oleh budaya dan alam local; Pemetaan potensi sentra ekonomi; Pemberian akses permodalan bagi pelaku usaha di sentra produk local; dan Peningkatan kualitas produk unggulan desa; Fasilitasi hasil produk local.

6. Amanah Kagenep

yaitu Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta perlindungan social, dilaksanakan melalui: Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin; Validasi data penduduk miskin; Pemberian bantuan pangan, sandang dan papan; Pelatihan wirausaha bagi para penyandang disabilitas; Renovasi rumah untuk lansia penyandang disabilitas; Mendirikan rumah kreatif untuk penyandang disabilitas; Pelatihan keterampilan kerja bagi para penyandang disabilitas; Mewujudkan pembangunan fisik yang ramah bagi penyandang disabilitas dan Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

7. Amanah Katujuh

yaitu Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi, dilaksanakan melalui: Penguatan dan hilirisasi inovasi daerah melalui Bandung Barat Innovation Week; Menyediakan layanan pengaduan terintegrasi; Menjamin keterbukaan informasi secara digital; Penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi; Pengelolaan keuangan desa secara non tunai dan dipadukan dengan siskeudes secara online; Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah; Penguatan Satu Data Indonesia (SDI); Memperkuat pemberian insentif pajak; Integrasi sistem pemungutan pajak; Menciptakan sistem pengembangan kompetensi ASN melalui Government University; Menjamin pelaksanaan sistem merit di lingkungan ASN; Penghargaan ASN Berprestasi; Penghargaan ASN of The Month; Program FIFO (first in first out) pada pelayanan public; Membangun Mall Pelayanan Publik Digital; Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital; Penyederhanaan SOP pelayanan public; Mengembangkan

pelayanan jemput bola keliling (mobile); Membangun infrastruktur ICT pelayanan yang terintegrasi secara menyeluruh; Penguatan dimensi smart governance; penguatan dimensi smart branding; Penguatan dimensi smart economy; Penguatan dimensi smart society; Penguatan dimensi smart living; dan Penguatan dimensi smart environtment.

8. **Amanah Kadalapan**

yaitu Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik berbasis spasial serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat, dilaksanakan melalui: Penambahan dan perbaikan akses jalan desa; Perbaikan jalan akses pariwisata; Peningkatan pembangunan listrik desa, dan jaringan internet desa; Mempercepat penataan kawasan kumuh; Pembangunan sarana air bersih, melalui pipanisasi air bersih; Penertiban tata ruang wilayah; Mendukung infrastruktur Program BRT (Bus Rapid Transit) Bandung Raya; Penataan pemakaman yang sudah teridentifikasi wakaf; Pembentukan Satuan Pengelola Pemakaman Tingkat Desa; Penyediaan air bersih untuk masyarakat desa; Penyediaan air minum untuk masyarakat desa dan Penyediaan MCK umum bagi masyarakat desa tidak mampu.

9. **Amanah Kasalapan**

yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat dan Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah, dilaksanakan melalui: Memberikan pelatihan kebencanaan yang terencana, terukur dan berkelanjutan; Melengkapi infrastruktur penanganan kebencanaan; Meningkatkan anggaran penanganan kebencanaan; Mendorong program desa tangguh bencana; Program pemilahan sampai rumah tangga; Program pengelolaan sampah perdesaan; Program pengelolaan sampah terpadu; Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat melalui program kebersihan masyarakat; Perlindungan untuk wilayah sumber mata air; Pembangunan lahan - lahan hijau pedesaan; Pembangunan TPST (Tempat Pembuangan Sampah terpadu) dengan lokasi yang representative dan Program mengubah sampah bernilai ekonomis.

10. **Amanah Kasapuluh**

yaitu Meningkatkan kondusivitas wilayah, dilaksanakan melalui: Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan penegakan Perda dan Perkada serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran dan Penyelamatan.

11. Amanah Kasabelas

yaitu Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa, dilaksanakan melalui: Pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi RT/RW, BPD, Linmas dan Kader PKK; RT/RW Leadership Program; Pemberian insentif bagi perangkat RT/RW; Pembinaan dalam pengembangan manajemen dan SDM pengelola lembaga ekonomi desa; Menjalin kemitraan dan jaringan dlm memberikan bantuan permodalan pengembangan ekonomi desa; Pelatihan dan pendidikan manajemen dan SDM pengelola lembaga ekonomi desa; Pemilihan perangkat desa berprestasi se-Kabupaten Bandung Barat; Memberikan akses beasiswa bagi perangkat desa; Membangun kerja sama dalam rangka pemberian beasiswa perangkat desa.

12. Amanah Kaduabelas

yaitu Pemajuan Kebudayaan, dilaksanakan melalui: Festival dan pameran seni dan budaya Bandung Barat; Peningkatan pembangunan sanggar seni dan budaya serta Tata kelola sanggar seni yang baik.

Tabel 3.11 Langkah Strategis dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

No	MISI	No	32 PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	NOMENKLATUR 87 PROGRAM PRIORITAS	No	12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT	PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang berakhlak dan berkarakter	1	Peningkatan Kesejahteraan SDM Keagamaan dan Pengelola Tempat Ibadah	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan serta peningkatan kulitas sarana Peribadatan	Bag. Kesra Setda
		2	Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan termasuk Pesantren					
		3	Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kebebasan Beribadah	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			Bakesbangpol
		4	Peningkatan Kulitas dan Pemerataan Akses Layanan Kesehatan	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2	Meningkatkan dan pemerataan layanan kesehatan sampai tingkat desa serta Layanan Intervensi Spesifik dan Sensitif (zero new stunting)	Dinkes
		5	Pemerataan Akses Layanan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat Desa	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
		6	Penanganan stunting dan peningkatan gizi					
		7	Penempatan Tenaga Kesehatan Desa	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		8	Peningkatan Kulitas dan Akses Layanan Pendidikan	6	Program Pengelolaan Pendidikan	3	Meningkatkan dan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Disdik
				7	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			
		9	Mendorong Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	8	Program Pembinaan Keluarga Berencana	4	Meningkatkan kualitas Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan	DP2KBP3A
				9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera			
				10	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan			
				11	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			
				12	Program Pemenuhan Hak Anak			
		10	Peningkatan Prestasi Olahraga dan Peningkatan Layanan Kepemudaan	13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			Dispora
				14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			
2	Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis potensi sektor unggulan daerah	11	Pengembangan Potensi Pertanian dan Perikanan Masyarakat Berbasis Digital	15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Pertanian dan Perikanan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Industri Kecil Menengah, Koperasi dan UMKM berbasis IPTEKIN serta peningkatan investasi daerah	DKPP Dispernakan
		12	Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Lumbung Pangan Desa	16	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			
				17	Program Penyuluhan Pertanian			
				18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
				19	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			
		13	Penguatan Ekonomi Masyarakat Pada Sektor Koperasi dan UMKM, IKM, Pariwisata Dan Ekraf	20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata			Disparbud
				21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			
				22	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			Disperindag
				23	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			Diskop UKM
				24	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro			
					Program Perekonomian Dan Pembangunan			Bag. Perekonomian Setda
		14	Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Daerah	25	Program Pengembangan UMKM			Diskop UKM
				26	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			DPMPTSP
		15	Pembangunan Sentra dan Pemasaran Produk Lokal Secara Terpusat	27	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			Disperindag
				28	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			
				29	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			
				30	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri			
		16	Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial serta Pelatihan Untuk Penyandang Disabilitas Agar Produktif Dan Kreatif	31	Program Rehabiliasi Sosial	6	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta perlindungan sosial	Dinsos
				32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			
				33	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			Disperkim
		17	Meningkatkan produktifitas kerja dan kesempatan kerja	34	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			Disnaker
				35	Program Penempatan Tenaga Kerja			

No	MISI	No	32 PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	NOMENKLATUR 87 PROGRAM PRIORITAS	No	12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT	PERANGKAT DAERAH
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	18	Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	7	Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi	Bag. Tapem Setda
								Bag. Hukum Setda
				36	Program Perekonomian Dan Pembangunan			Bag. Perekonomian Setda
								Bag. Adm Pemb. Steda
								Bag. Pengadaan Barjas
				37	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			Sekretariat DPRD
				38	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Bappelitbangda
				39	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
				40	Program Riset dan Inovasi Daerah			
				41	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			BKAD
				42	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			
				46	Program Penyelenggaraan Pengawasan			Inspektorat Daerah
				47	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			
				48	Program Pengelolaan Arsip			Disarpus
		19	Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan Digitalisasi Pendapatan	43	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Bapenda
		20	Meningkatkan Profesionalisme ASN	44	Program Kepegawaian Daerah			BKPSDM
				45	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		21	Penguatan Pembangunan Smartcity	49	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika			Diskominfotik
		22	Menerapkan Pelayanan Publik Yang Terintegrasi Melalui Peningkatan Digitalisasi Pemerintahan	50	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
				51	Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik			
				52	Program Pendaftaran Penduduk			Disdukcapil
				53	Program Pencatatan Sipil			
				54	Program Pelayanan Penanaman Modal			DPMPTSP
				55	Program Penataan Bangunan Gedung			Dinas PUTR
				56	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			16 Kecamatan
4	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah	23	Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat	57	Program Kawasan Permukiman	8	Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik berbasis spasial serta Layanan Pemakaman Bagi Masyarakat	Dinas Perumahan dan Permukiman
		24	Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan	58	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum			Dinas PUTR
				60	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
				61	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			
				62	Program Penyelenggaraan Jalan			
				63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Dinas Perhubungan
				64	Program Pengelolaan Pelayaran			

No	MISI	No	32 PRIORITAS PEMBANGUNAN	No	NOMENKLATUR 87 PROGRAM PRIORITAS	No	12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT	PERANGKAT DAERAH
5	Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan	25	Pembangunan Berbasiskan Lingkungan Hidup	65	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9	Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat dan Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
				66	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)			
				59	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			Dinas PUTR
		26	Pengolahan Sampah Mandiri Rumah Tangga	67	Program Pengelolaan Persampahan			Dinas Lingkungan Hidup
				68	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			Dinas PUTR
		27	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Daerah	72	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			Dinas PUTR
				69	Program Penanggulangan Bencana			BPBD
				70	Program Penanganan Bencana			Dinsos
				71	Program Pengembangan Perumahan			Disperkim
				73	Program Pengelolaan Sumber Daya Air			Dinas PUTR
				74	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			DKPP
				75	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan			
				76	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
6	Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat sesuai kearifan Budaya Lokal	28	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta Peningkatan Respon Penanganan Bencana dan Penyelamatan	77	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Satpol PP
				78	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			Disdamkar & Penyelamatan
				80	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan			Bakesbangpol
				79	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
		29 30 31	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	81	Program Penataan Desa	11	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Aparatur Desa	DPMD
				82	Program Administrasi Pemerintahan Desa			
				83	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			
				84	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			16 Kecamatan
				85	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
		32	Pemajuan Kebudayaan	86	Program Pengembangan Kebudayaan	12	Pemajuan Kebudayaan	Disparbud
				87	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			

3.2.4.2 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Nasional

Dalam rangka menjaga keselarasan antara pembangunan Daerah dan Nasional, program prioritas daerah pada RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 juga mendukung sejumlah program prioritas nasional yang didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029, diantaranya:

3.2.3.2.1. Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung program makan bergizi gratis. Peran ini mencakup penyediaan infrastruktur, pembinaan rantai pasok, dan penyaluran program kepada masyarakat. Selain itu, daerah juga dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung program ini, serta melibatkan petani dan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan. Dukungan Kabupaten Bandung Barat terhadap program nasional ini, diantaranya:

- Penyediaan Infrastruktur: Pemerintah Daerah berperan dalam menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti fasilitas pengolahan makanan (SPPG) yang akan menjadi dapur umum, serta tempat untuk aktivitas memasak dan menyiapkan makanan.
- Pembinaan Rantai Pasok: Pemda dapat membina potensi sumber daya lokal, seperti petani, peternak, dan nelayan, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku program Makan Bergizi Gratis. Ini termasuk memastikan ketersediaan stok produksi, mengatur tata cara pemesanan, proses logistik, dan pembayaran. Keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok dapat mendorong produksi pertanian dan mengurangi ketergantungan pada impor.
- Penyaluran Program: Pemda dapat bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyalurkan program Makan Bergizi Gratis kepada kelompok sasaran, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat melibatkan kader Posyandu yang sudah ada, dengan BGN memberikan insentif bagi para kader yang terlibat.
- Sosialisasi dan Kampanye: Pemda dapat melakukan sosialisasi dan kampanye untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan lokal yang sehat dan beragam.Hal ini penting untuk mengubah pola makan masyarakat yang cenderung beralih ke produk olahan dan pangan tinggi gula dan lemak.
- Keterlibatan UMKM: Pemerintah daerah dapat melibatkan UMKM, seperti warung makan, katering, dan petani lokal, dalam menyediakan makanan yang sesuai dengan standar gizi untuk program ini. Hal ini tidak hanya mendukung program, tetapi juga meningkatkan perekonomian daerah.
- Pengawasan: Pemerintah daerah perlu memastikan pengawasan pengelolaan anggaran untuk program ini, untuk mencegah risiko korupsi.

Dengan menjalankan peran-peran tersebut dengan dukungan program pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

3.2.3.2.2. Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan pendidikan berkualitas secara gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Sosial dan difokuskan pada keluarga yang tergolong desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sekolah Rakyat didesain sebagai boarding school atau sekolah berasrama, yang menyediakan fasilitas lengkap termasuk makanan dan kebutuhan dasar lainnya tanpa dipungut biaya. Tujuan Utama pelakasanaan program Sekolah Rakyat diantaranya:

- Dalam rangka menyediakan Pendidikan Gratis dan Berkualitas bagi masyarakat. Sekolah Rakyat memberikan akses pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum, namun dengan penekanan pada pengembangan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan hidup.
- memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluar dari kemiskinan.
- Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi kesehatan dan psikologis siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara individual.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Peran ini mencakup penyediaan fasilitas, bantuan operasional, pelatihan guru relawan, dan integrasi program Sekolah Rakyat dalam rencana pembangunan daerah. Dukungan Kabupaten Bandung Barat terhadap program nasional ini, diantaranya:

- Penyediaan Lahan dan Bangunan: Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan dan bangunan untuk lokasi Sekolah Rakyat, baik melalui pengalihan aset daerah maupun pengadaan lahan baru.
- Fasilitas dan Infrastruktur: Pemerintah daerah dapat membantu penyediaan fasilitas pendukung seperti asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan sarana olahraga.
- Pelatihan Guru Relawan: Pemerintaqh Daerah dapat terlibat dalam pelatihan guru relawan yang akan mengajar di Sekolah Rakyat.
- Bantuan Operasional: Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan operasional untuk kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan lainnya di Sekolah Rakyat.

- Integrasi Program: Program Sekolah Rakyat dapat diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan keberlanjutan dan dukungan jangka panjang.
- Perizinan dan Regulasi: Pemerintah daerah dapat memfasilitasi proses perizinan dan penyusunan regulasi terkait operasional Sekolah Rakyat.
- Koordinasi dan Sosialisasi: Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait dan melakukan sosialisasi program Sekolah Rakyat kepada masyarakat.
- Penyediaan Sumber Daya Manusia: Pemerintah Daerah dapat membantu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengajar dan mengelola Sekolah Rakyat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat, yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan membantu mereka keluar dari kemiskinan

3.2.3.2.3. Koperasi Merah Putih

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah. Dalam Inpres ini disebutkan bahwa akan dilakukan Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dukungan program daerah di Kabupaten Bnadung Barat dalam mendukung program Koperasi Merah Putih sangat penting, terutama dalam hal pendirian, legalitas, dan pengelolaan koperasi di tingkat desa/kelurahan. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dan mendorong pembentukan serta pengembangan koperasi merah putih. Berikut peran dukungan Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung program Koperasi Merah Putih:

- Fasilitasi dan Pendampingan: Pemerintah daerah menyediaan anggaran dengan dapat memanfaatkan anggaran yang tersedia pada Dinas Koperasi dan UMKM atau termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi, seperti pembiayaan akta notaris dan pendampingan.
- Penyusunan roadmap pendampingan: Dinas Koperasi dan UMKM dapat menyusun roadmap pendampingan untuk koperasi merah putih, termasuk penyuluhan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota koperasi.
- Pendampingan teknis: Pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta proses legalitas koperasi.

- Koordinasi: Pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dengan camat dan dinas terkait dalam proses pembentukan dan pengembangan koperasi.
- Penguatan Kelembagaan: Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi manfaat koperasi merah putih kepada masyarakat desa/kelurahan untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang koperasi.
- Musyawarah Desa/Kelurahan: Pemerintah daerah perlu mendorong pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk mempercepat pembentukan koperasi.
- Pendataan dan Pemetaan: Pemerintah daerah dapat melakukan pendataan potensi desa/kelurahan dan kebutuhan masyarakat untuk menjadi dasar dalam pengembangan koperasi.
- Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah daerah berperan dalam pengawasan terhadap koperasi merah putih untuk memastikan koperasi beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku serta Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap program Koperasi Merah Putih untuk mengukur keberhasilan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Sinergi dan Kolaborasi: Pemerintah daerah perlu bersinergi dengan pemerintah pusat dalam implementasi program Koperasi Merah Putih.
- Kolaborasi dengan Stakeholders: Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti penyuluh pertanian, lembaga keuangan, dan pihak swasta, untuk mendukung pengembangan koperasi.

Dengan peran aktif dan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan program Koperasi Merah Putih dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

3.2.3.2.4. Program 3 Juta Rumah

Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan rumah layak huni, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini bertujuan untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun, dengan rincian 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan. Tujuan Utama Program ini adalah dalam rangka mengatasi kekurangan (backlog) perumahan dan menyediakan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan hunian yang lebih baik. Berikut peran dukungan Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung program 3 Juta Rumah, diantaranya:

- Penyediaan Lahan: Pemerintah Daerah dapat menyiapkan lahan khusus untuk pembangunan perumahan, baik melalui pengadaan lahan baru maupun pemanfaatan lahan terlantar atau aset daerah.
- Kemudahan Perizinan: Pemerintah daerah dapat mempermudah proses perizinan pembangunan rumah, termasuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), untuk mempercepat realisasi pembangunan.
- Pembebasan Biaya: Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi PBG untuk MBR.
- Koordinasi: Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengembang, perbankan, dan Kementerian terkait, untuk memastikan ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau.
- Penyusunan Regulasi: Pemerintah Daerah dapat menyusun regulasi yang mendukung program ini, seperti peraturan daerah tentang kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur, dan perlindungan konsumen.
- Peningkatan Kualitas Hunian: Pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kualitas hunian yang dibangun dengan memastikan ketersediaan sanitasi yang baik dan akses air bersih.
- Pendataan dan Perencanaan: Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan kebutuhan rumah serta menyusun perencanaan pembangunan rumah yang terintegrasi dengan tata ruang daerah.

Dengan dukungan program 3 juta rumah ini, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi signifikan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

3.2.4.3 Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka menjaga keselarasan pembangunan antar daerah Kabupaten dengan Provinsi, program prioritas daerah pada RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 juga mendukung sejumlah program prioritas provinsi Jawa Barat berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Lengkah Kahiji, Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

   Dukungan terhadap program prioritas ini di Kab. Bandung Barat, diantaranya: Penambahan dan perbaikan akses jalan desa; Perbaikan jalan akses pariwisata; Mendukung infrastruktur Program BRT (Bus Rapid Transit) Bandung Raya, Penyediaan sarana air bersih dan air siap minum; Penyediaan MCK dan Mempercepat penataan kawasan kumuh.

2. Lengkah Kadua, Pembangunan Jaringan Irigasi di Seluruh Wilayah Pertanian dan terciptanya Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik

   Program prioritas di Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung porgram prioritas Jawa Barat ini, diantaranya: Pembangunan sumber air pertanian (saluran irigasi, pompanisasi, sumur bor dan kantung air); Pemberian bantuan benih yang berkualitas; Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian; Modernisasi pengolahan hasil pertanian; Menyediakan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan; Subsidi bebas PBB bagi lahan sawah yang dilindungi;

3. Lengkah Katilu, Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru

   Program prioritas di Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung porgram prioritas Jawa Barat ini, diantaranya: Program PARENTING; Pendidikan karakter melalui penguatan keagamaan di sekolah dasar; Membangun sekolah dan Ruang Kelas Baru serta perbaikan sekolah rusak; Pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi; Fasilitasi jaringan internet gratis bagi satuan pendidikan dasar, Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

4. Lengkah Kaopat, Pengembangan Lapangan Kerja Baru

   Program prioritas di Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung porgram prioritas Jawa Barat ini, diantaranya: Job Fair/Bandung Barat Job Fair; menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin; Pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif; Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM dan akses modal UMKM; Program One Village One Product; Mendorong investasi dan pengembangan pariwisata berbasis desa; Mendorong investasi tempat wisata baru; Fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif masyarakat; Pembangunan sentra-sentra pemasaran produk unggulan; Pemberdayaan peranan perempuan di bidang ekonomi.

5. Lengkah Kalima, Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus

   Program prioritas di Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung porgram prioritas Jawa Barat ini, diantaranya: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan rumah sakit daerah; Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan dan obat - obatan; Program SATU NAFAS DESA (Satu Nakes dan Satu Faskes di setiap Desa); Beasiswa kuliah kedokteran bagi dokter specialis;

6. Lengkah Kagenep, Penanganan Stunting dan Gizi Buruk
   Program prioritas di Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung porgram prioritas Jawa Barat ini, diantaranya: Meningkatkan peran posyandu dalam pemberian gizi ibu hamil dan anak balita; Pemberian susu dan telur gratis bagi ibu menyusui dan balita; Fasilitasi dukungan pemberian makan siang bergizi bagi siswa pendidikan dasar; Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.

7. Lengkah Katujuh, Pemulihan Kondisi Lingkungan Jawa Barat
   Program prioritas di Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung porgram prioritas Jawa Barat ini, diantaranya: Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat melalui program jumsih (jumat bersih); Perlindungan sumber mata air; Pembangunan lahan - lahan hijau pedesaan dan program desa tangguh bencana.

8. Lengkah Kadalapan, Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri
   Program prioritas di Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung porgram prioritas Jawa Barat ini, diantaranya: Program pemilahan sampai rumah tangga; Program pengelolaan sampah terpadu sampai tingkat desa; Pembangunan TPST (Tempat Pembuangan Sampah terpadu) dengan lokasi yang representatif dan Program mengubah sampah bernilai ekonomis.

9. Lengkah Kasalapan, Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi
   Program prioritas di Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung porgram prioritas Jawa Barat ini, diantaranya: Pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi RT/RW, BPD, Linmas dan Kader PKK; Pemberian insentif bagi perangkat RT/RW; pengembangan manajemen dan SDM pengelola lembaga ekonomi desa; RT/RW Leadership Program; Festival dan pameran seni dan budaya, pembangunan sanggar seni dan budaya. Sedangkan dukungan dalam transformasi birokrasi, diantaranya: Menjamin pelaksanaan sistem merit di lingkungan ASN; pengembangan kompetensi ASN melalui Government University; penguatan SPBE dan Smart city; Program FIFO (first in first out) pada pelayanan publik; digitalisasi pengelolaan PAD; Pengelolaan keuangan desa secara non tunai dan dipadukan dengan siskeudes secara online; Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) disaerah; layanan pengaduan terintegrasi dan penguatan inovasi daerah melalui Bandung Barat Innovation Week.

Dalam rangka menjaga keselarasan antara pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat, berikut sandingan program prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang mendukung terhadap Program Prioritas Jawa Barat Tahun 2025-2029:

Tabel 3.12 Sandingan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Program Prioritas Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS (9 LENGKAH NGAWANGUN JABAR)		PROGRAM PRIORITAS (12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT)
1	Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	1	Penambahan dan perbaikan akses jalan desa
		2	Perbaikan jalan akses pariwisata
		3	Mendukung infrastruktur Program BRT (Bus Rapid Transit) Bandung Raya
		4	Penyediaan sarana air bersih dan air siap minum
		5	Penyediaan MCK
		6	Mempercepat penataan kawasan kumuh
2	Pembangunan Jaringan Irigasi di Seluruh Wilayah Pertanian dan terciptanya Ekosistem Ekonomi Pertanian Organik	1	Pembangunan sumber air pertanian (saluran irigasi, pompanisasi, sumur bor dan kantung air).
		2	Pemberian bantuan benih yang berkualitas
		3	Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian
		4	Modernisasi pengolahan hasil pertanian
		5	Menyediakan infrastruktur untuk mendukung kemandirian pangan
		6	Subsidi bebas PBB bagi lahan sawah yang dilindungi
3	Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru	1	Program PARENTING
		2	Pendidikan karakter melalui penguatan keagamaan di sekolah dasar
		3	Membangun sekolah dan Ruang Kelas Baru serta perbaikan sekolah rusak
		4	Pemberian beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi
		5	Fasilitasi jaringan internet gratis bagi satuan pendidikan dasar
		6	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
4	Pengembangan Lapangan Kerja Baru	1	Job Fair/Bandung Barat Job Fair
		2	Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin
		3	Pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif
		4	Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM dan akses modal UMKM
		5	Program One Village One Product
		6	Mendorong investasi dan pengembangan pariwisata berbasis desa

NO	PROGRAM PRIORITAS (9 LENGKAH NGAWANGUN JABAR)		PROGRAM PRIORITAS (12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT)
		7	Mendorong investasi tempat wisata baru
		8	Fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif masyarakat
		9	Pembangunan sentra-sentra pemasaran produk unggulan
		10	Pemberdayaan peranan perempuan di bidang ekonomi
5	Penyempurnaan RSUD Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus	1	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan rumah sakit daerah;
		2	Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan dan obat - obatan
		3	Program SATU NAFAS DESA (Satu Nakes dan Satu Faskes di setiap Desa)
		4	Beasiswa kuliah kedokteran bagi dokter specialis
6	Penanganan Stunting dan Gizi Buruk	1	Meningkatkan peran posyandu dalam pemberian gizi ibu hamil dan anak balita
		2	Pemberian susu dan telur gratis bagi ibu menyusui dan balita
		3	Fasilitasi dukungan pemberian makan siang bergizi bagi siswa pendidikan dasar
		4	Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
7	Pemulihan Kondisi Lingkungan Jawa Barat	1	Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat melalui program jumsih (jumat bersih)
		2	Perlindungan sumber mata air
		3	Program desa tangguh bencana
		4	Pembangunan lahan - lahan hijau pedesaan
8	Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri	1	Program pemilahan sampah rumah tangga
		2	Program pengelolaan sampah terpadu sampai tingkat desa
		3	Pembangunan TPST (Tempat Pembuangan Sampah terpadu) dengan lokasi yang representatif
		4	Program mengubah sampah bernilai ekonomis
9	Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi	1	Pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi RT/RW, BPD, Linmas dan Kader PKK
		2	Pemberian insentif bagi perangkat RT/RW
		3	Pengembangan manajemen dan SDM pengelola lembaga ekonomi desa
		4	RT/RW Leadership Program
		5	Festival dan pameran seni dan budaya

NO	PROGRAM PRIORITAS (9 LENGKAH NGAWANGUN JABAR)		PROGRAM PRIORITAS (12 AMANAH NGAWANGUN BANDUNG BARAT)
		6	Pembangunan sanggar seni dan budaya
		7	Menjamin pelaksanaan sistem merit di lingkungan ASN
		8	Pengembangan kompetensi ASN melalui Government University
		9	Penguatan SPBE dan Smart city
		10	Program FIFO (first in first out) pada pelayanan publik
		11	Digitalisasi pengelolaan PAD
		12	Pengelolaan keuangan desa secara non tunai dan dipadukan dengan siskeudes secara online
		13	Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) didaerah
		14	Layanan pengaduan terintegrasi
		15	Penguatan inovasi daerah melalui Bandung Barat Innovation Week

Sumber: Hasil Penyelarasan RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJMD Kab. Bandung Barat

4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perumusan program pembangunan daerah dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD yang bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan program perangkat daerah tahun 2025-2029 ini mengacu pada nomenklatur program berdasarkan Permendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program perangkat daerah yang memuat program selama 5 (lima) tahun periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025-2029, ditambah dengan periode tahun 2030 sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah pada saat masa transisi di tahun 2029-2030 sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030. Program Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja, target dan pagu indikatif setiap tahun, dan Perangkat Daerah penanggung jawab disajikan menurut bidang urusan (tabel 4.1) yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan juga disajikan dengan menurunkan (*cascading*) visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 (tabel 4.2).

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Menurut Bidang Urusan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME		INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PD PENANGGUNG JAWAB
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																	
1	Program Pengelolaan Pendidikan																
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APS usia 5-6	%	73,28	336.920.041.482	76,32	34.148.767.240	79,36	72.471.504.326	82,4	76.931.791.192	85,37	79.577.665.331	88,34	82.454.868.603	91,31	Dinas Pendidikan
		APS usia 7-15	%	98,06		98,32		98,59		98,86		99,13		99,4		99,66	Dinas Pendidikan
		APS usia 7 - 18 Kesetaraan	%	19,78		23,88		27,97		32,07		36,17		40,27		44,37	Dinas Pendidikan
2	Program Pengembangan Kurikulum																
	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Presentase satuan pendidikan yang mengambankan kurikulum muatan lokal	%	75	-	0,00	150.000.000	81,89	230.933.138	85,06	245.146.008	88,24	253.577.184	91,42	262.745.499	94,60	Dinas Pendidikan
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan																
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru/Murid PAUD	%	1:13	11.364.575.200	1:13,92	14.589.882.000	1:14,84	13.231.917.704	1:15,76	14.046.281.215	1:16,69	14.529.367.488	1:17,61	15.054.690.058	1:18,53	Dinas Pendidikan
		Rasio Guru/Murid SD	%	1:22.1		1:23,88		1:24,22		1:24,57		1:24,91		1:25,25		1:25,59	Dinas Pendidikan
		Rasio Guru/Murid SMP	%	1:19.9		1:22,23		1:24,17		1:26,11		1:28,05		1:29,99		1:31,93	Dinas Pendidikan
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan																
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola oleh masyarakat yang telah diterbitkan/diperbarui	%	19	-	0,00	100.000.000	19,59	144.333.211	19,74	153.216.255	19,88	158.485.740	20,03	164.215.937	20,18	Dinas Pendidikan
		Persentase usulan izin satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh masyarakat, yang telah diterbitkan atau diperbarui	%	15,00		0,00		15,50		15,97		16,43		16,89		17,35	Dinas Pendidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat																
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan antenatal care (ANC) 6 kali (K6)	%	88,7	219.497.984.394	89,0	211.720.759.613	90,0	193.631.224.643	93,0	205.548.333.530	95,0	212.617.647.937	97,0	220.305.033.459	20,4	Dinas Kesehatan
		Cakupan Skrining Bayi Baru Lahir	%	40,0		41,0		42,0		45,0		47,0		50,0		53,0	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	%	53,8		91		91		91		91		91		91	Dinas Kesehatan
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	91,02		91		91		91		91		91		91	Dinas Kesehatan
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	89,66		98		98,1		98,2		98,3		98,4		98,5	Dinas Kesehatan

		Presentase ketersediaan sapras kesehatan yang memenuhi standar	%	68,8		69		69,2		69,4		69,6		69,8		70	Dinas Kesehatan
		Cakupan Layanan Intervensi Balita dan Ibu Hamil bermasalah gizi	%	76,4		76,5		76,6		76,7		76,8		76,9		76,9	Dinas Kesehatan
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																	
	Meningkatnya kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan	Presentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	86	2.278.327.723	87	611.132.700	89	1.039.725.329	90	1.103.715.628	92	1.141.675.132	93	1.182.953.441	95	Dinas Kesehatan
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman																	
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Presentase cakupan sediaan Farmasi, alat kesehatan dan perijinan makanan minuman	%	98,94	1.091.545.000	99,04	321.521.400	99,14	452.555.052	99,24	480.407.729	99,34	496.930.136	99,44	514.897.099	99,54	Dinas Kesehatan
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan																	
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	4	711.168.957	15	199.076.924	25	458.402.230	35	486.614.773	45	503.350.656	55	521.549.759	65	Dinas Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air																	
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap ketahanan air dan banjir	Kapasitas Air Baku	(m3/detik)	4,55	6.582.551.108	4,55	14.399.427.381	5,12	28.600.000.000	5,69	18.600.000.000	6,28	17.600.000.000	6,87	16.600.000.000	7,49	Dinas PUTR
		Presentase perlindungan rawan banjir	%	16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7	Dinas PUTR
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Presentase luas layanan irigasi	%	62		63		63,39		64		64,54		65,34		65,70	Dinas PUTR
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	11,71	9.202.812.337	27,48	2.795.029.000	31,1	9.500.000.000	34,73	9.500.000.000	38,36	9.500.000.000	41,98	9.300.000.000	45,61	Dinas PUTR
11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																	
	Meningkatnya penyediaan sarpras persampahan	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana persampahan	%	36	36.716.400	36	654.738.400	46,48	10.300.000.000	51,58	8.300.000.000	56,68	5.300.000.000	61,78	4.300.000.000	66,88	Dinas PUTR
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2	3.640.077.156	5,94	916.199.000	11,32	10.686.984.275	16,69	9.686.984.275	22,07	7.186.984.275	27,44	7.000.000.000	32,82	Dinas PUTR
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																	
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Presentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	68,93	1.102.523.328	70,33	2.420.052.208	71,33	3.900.000.000	72,53	3.900.000.000	73,73	3.900.000.000	74,93	3.900.000.000	76,13	Dinas PUTR
14	Program Penataan Bangunan Gedung																	
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung milik daerah	Presentase bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	%	12,0	26.524.788.333	20,75	20.179.506.266	32,08	28.250.000.000	50,94	12.790.000.000	67,92	11.200.000.000	81,13	1.200.000.000	88,68	Dinas PUTR
15	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																	

	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Presentase penataan bangunan dan lingkungan	%	0	402.161.328	17,65	51.575.000	23,53	500.000.000	29,41	650.000.000	35,29	650.000.000	41,18	750.000.000	47,06	Dinas PUTR
16	Program Penyelenggaraan Jalan																
	Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	54,61	66.133.100.528	56,61	103.791.299.227	60,44	156.448.668.295	65,29	152.082.263.182	69,6	148.682.069.510	74,53	144.742.722.147	78,27	Dinas PUTR
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi																
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi	Presentase tenaga kerja konstruksi tersertifikasi	%	6,18	489.133.156	7,31	399.476.000	16,11	720.000.000	37,14	720.000.000	58,17	720.000.000	79,09	720.000.000	100	Dinas PUTR
18	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata ruang	Presentase penyelenggaraan penataan ruang	%	42,00	3.210.005.800	51,25	3.148.659.000	66,25	2.400.000.000	72,5	2.120.000.000	78,75	1.869.467.318	80,42	2.459.467.318	88,75	Dinas PUTR
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
19	Program Pengembangan Perumahan																
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga korban bencana	Presentase penanganan rumah korban bencana yang tertangani	%	72,22	1.994.700.000	100	3.001.737.301	100	3.568.534.600	100	3.618.534.600	100	3.968.534.600	100	3.518.534.600	100	Disperkim
20	Program Kawasan Permukiman																
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Presentase Pengurangan luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani	%	35,57	4.467.660.300	97	4.581.495.000	94	5.730.747.600	91	5.730.747.600	86	5.680.747.600	82	5.630.747.600	78	Disperkim
21	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh																
	Meningkatnya pencegahan terhadap berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	%	23,18	1.744.973.900	3,37	5.175.000.000	11,58	7.130.747.600	25,95	7.130.747.600	44,44	7.000.747.600	69,08	7.030.747.600	100	Disperkim
22	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum																
	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Presentase peningkatan PSU perumahan formal yang sudah serah terima ke Pemda	%	66,67	5.848.175.308	100	7.308.667.559	100	4.806.869.600	100	4.756.869.600	100	4.656.869.600	100	4.706.869.600	100	Disperkim
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	
23	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum																
	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	5.736.125.345	100	4.247.664.400	100	5.911.786.711	100	6.275.629.919	100	6.491.464.318	100	6.726.169.148	100	Satpol PP
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	N/A		16,02		32,04		48,07		64,09		83,32		100	Satpol PP
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Presentase penegakan perda dan perkada	%	100		100		100		100		100		100		100	Satpol PP
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	0		100		100		100		100		100		100	Satpol PP
24	Program Penanggulangan Bencana																
	Meningkatnya kapabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana	Presentase penanggulangan bencana	%	100	3.960.676.890	100	7.278.062.660	100	10.791.318.341	100	9.841.680.185	100	8.895.086.862	100	7.147.426.313	100	BPBD

	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	100		100		100		100		100		100		100	BPBD
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Presentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100		100		100		100		100		100		100	BPBD
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Presentase penanganan pasca bencana	%	100		100		100		100		100		100		100	BPBD
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran																	
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	%	82	2.763.422.200	84	7.478.328.600	87	3.328.361.842	90	3.533.207.164	93	3.654.722.877	95	3.786.862.725	100	Disdamkar
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																		
26	Program Pemberdayaan Sosial																	
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Presentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS	%	100	2.130.975.100	100	1.164.726.400	100	2.688.329.495	100	2.853.783.778	100	2.951.932.444	100	3.058.662.261	100	Dinas Sosial
27	Program Rehabilitasi Sosial																	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	10	1.733.549.900	20	1.506.658.300	40	2.165.016.068	60	2.298.262.822	80	2.377.305.752	90	2.463.259.415	100	Dinas Sosial
28	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial																	
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Presentase penerima manfaat (individu/keluarga miskin) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	5,3	2.774.627.900	20	1.749.028.600	40	3.704.313.601	60	3.932.297.020	80	4.067.538.418	90	4.214.603.990	100	Dinas Sosial
		Presentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindugan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	44,97		47		55		60		80		90		100	Dinas Sosial
		Presentase pengelolaan data kemiskinan daerah	%	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Sosial
29	Program Penanganan Bencana																	
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	1.151.552.800	100	1.360.005.900	100	1.412.896.973	100	1.499.854.266	100	1.551.437.955	100	1.607.531.614	100	Dinas Sosial
30	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan																	
	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Presentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	233.886.100	100	96.844.100	100	284.725.895	100	302.249.461	100	312.644.566	100	323.948.516	100	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																		
31	Program Perencanaan Tenaga Kerja																	
	Meningkatnya Perusahaan yang menyusun Laporan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	%	N/A	-	0	52.473.000	50	130.409.635	60	134.335.828	70	134.768.984	80	135.767.747	90	Disnaker
32	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja																	

	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja dan Perusahaan	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi BNSP	%	0	3.730.739.072	42,86	1.727.842.100	45,45	3.436.533.158	48,15	3.652.135.844	50	3.781.928.792	51,85	3.922.541.819	53,70	Disnaker
		Persentase Pengukuran Produktifitas Perusahaan	%	N/A		0		50		60		70		80		90	Disnaker
33	Program Penempatan Tenaga Kerja																
	Meningkatnya Penempatan Pencari Kerja di dalam dan luar negeri	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	%	7,51	790.899.328	9,11	396.940.200	23,26	941.830.552	23,56	999.795.879	26,49	1.034.181.326	27	1.071.573.098	27,15	Disnaker
34	Program Hubungan Industrial																
	Meningkatnya tenaga kerja yang terlindungi sesuai dengan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah, LKS Bipartit dan BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase Kumulatif Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB/Struktur Skala Upah)	%	42,00	1.221.563.748	46,15	6.405.913.300	50,52	1.277.833.060	55,09	1.359.211.071	59,88	1.408.749.017	64,86	1.462.266.247	70,06	Disnaker
		Persentase Kumulatif Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (LKS Bipartit)	%	22,98		28,63		34,68		41,13		47,98		55,24		62,90	Disnaker
		Presentase Kumulatif Perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah	%	27,22		32,78		38,47		44,31		50,28		56,39		62,64	Disnaker
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
35	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan																
	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam pembangunan	Presentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhuk sosek	%	87,5	2.571.638.742	61	1.315.443.600	63	2.714.773.225	66	2.879.577.842	68	2.976.803.921	68	3.082.175.421	71	DP2KBP3A
36	Program Perlindungan Perempuan																
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Presentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif	%	100	174.524.964	100	237.681.600	100	310.952.510	100	330.090.203	100	341.442.819	100	353.787.997	100	DP2KBP3A
37	Program Peningkatan Kualitas Keluarga																
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	%	100	238.944.764	100	428.246.600	100	273.713.502	100	290.559.306	100	300.552.357	100	311.419.103	100	DP2KBP3A
38	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak																
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan penyusunan kebijakan	%	100	-	0	52.254.600	100	248.046.343	100	265.589.606	100	276.533.596	100	288.789.490	100	DP2KBP3A
39	Program Pemenuhan Hak Anak																
	Terjaminnya pemenuhan semua hak anak secara kemprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin	N/A	193.904.928	59,77	313.505.400	60,79	425.494.307	61,77	451.681.519	62,43	467.215.961	62,43	484.108.582	63,2	DP2KBP3A
40	Program Perlindungan Khusus Anak																

	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Presentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komperhensif	%	100	285.922.064	100	336.005.000	100	549.623.525	100	583.450.318	100	603.516.614	100	625.337.309	100	DP2KBP3A
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																	
41	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan																
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Presentase sarpras pangan yang terbangun	%	0	341.421.128	100	4.449.333.000	100	584.919.849	100	620.918.968	100	642.273.903	100	665.495.904	100	DKPP
42	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat																
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)	Score	92,1	2.415.331.212	92,5	4.477.582.825	93	2.467.553.836	93,5	2.619.420.394	94	2.709.508.725	94,5	2.807.473.492	95	DKPP
		Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)	Score	80,29		80,8		81,3		82,4		83,5		84,6		85,7	DKPP
43	Program Penanganan Kerawanan Pangan																
	Meningkatnya Penanganan Kerawanan pangan	Persentase Desa Tahan Pangan	%	87,88	422.485.228	88,48	394.682.800	89,7	573.393.357	90,3	608.683.074	90,91	629.617.187	92,12	652.381.572	93,33	DKPP
44	Program Pengawasan Keamanan Pangan																
	Meningkatnya Pengawawasan Mutu dan keamanan pangan	Pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	31,33	242.180.564	64,67	266.009.000	98	275.266.758	131,33	292.208.158	164,67	302.257.917	198	313.186.329	220	DKPP
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																	
45	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan																
	Meningkatkan jumlah capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	100	155.406.600	100	153.389.800	100	629.827.255	100	637.774.625	100	646.364.588	100	654.371.871	100	Disperkim
46	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan																
	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Presentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	-	0	-	0	196.278.902	100	195.576.882	100	194.940.486	100	194.319.176	100	Disperkim
47	Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Prog. Tanah Kelebihan Mak. dan Tanah Absentee																
	Meningkatnya ketersediaan tanah objek *landreform*	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap didistribusikan yang berasal dari kelebihan maks. dan tanah Absentee	%	100	680.458.100	100	388.722.800	100	848.775.200	100	1.048.775.200	100	848.775.200	100	898.775.200	100	Disperkim
48	Program Pengelolaan Tanah Kosong																
	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Presentase tanah kosong yang dikelola	%	0	872.284.649	100	-	0	500.000.000	100	550.000.000	100	305.000.000	100	350.000.000	100	Disperkim

49	Program Penatagunaan Tanah																
	Meningkatnya perencanaan penggunaan tanah	Presentase perencanaan penggunaan tanah	%	100	4.077.219.635	100	5.414.143.800	100	2.627.481.400	100	3.127.481.400	100	5.477.481.400	100	3.077.481.400	100	Disperkim
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																	
50	Program Perencanaan Lingkungan Hidup																
	Pemenuhan Ketersediaan Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase ketersediaan kajian lingkungan hidup	%	42,86	640.923.250	100	1.300.000.000	100	868.220.480	100	891.518.408	100	916.224.907	100	939.364.538	100	DLH
51	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase kualitas air sungai yang status mutu airnya meningkat	%	N/A	870.206.600	1,5	1.550.481.900	1,5	1.132.616.282	1,5	1.276.569.769	1,5	1.410.000.000	1,5	1.460.000.000	1,5	DLH
52	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
	Cakupan Pengelolaan RTH Kehati	Presentase RTH Kehati yang terkelola	%	100	1.325.993.621	100	60.000.000	100	326.707.438	100	376.707.438	100	376.707.438	100	376.707.438	100	DLH
53	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)																
	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan	%	-	414.425.600	12	220.614.700	12	326.707.438	12	376.707.438	12	376.707.438	12	376.707.438	12	DLH
54	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)																
	Meningkatnya Ketaatan Usaha/Industri dalam Pelaksanaan Izin Lingkungan	Persentase Ketaatan Kegiatan dan/atau usaha yang diawasi dalam Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup	%	17.57	746.542.150	60	304.750.000	64	396.707.438	66	446.707.438	68	446.707.438	70	496.707.438	72	DLH
	Meningkatnya Ketaatan Usaha/Industri dalam Pelaksanaan Izin Lingkungan	Persentase Kegiatan dan/atau Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan dan atau Izin PPLH pada tahun ke-n	%	N/A		70		70		70		70		70		70	
55	Program Peningkatan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat																
	Meningkatnya Kompetensi Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	626.641.300	20	374.750.000	20	426.707.438	20	571.918.223	20	476.707.438	20	476.707.438	20	DLH
56	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat																
	Meningkatnya Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH	Entitas	25	143.613.200	27	70.000.000	27	259.374.668	27	266.334.757	27	273.715.647	27	280.628.446	27	DLH
57	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup																
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100	211.168.000	100	150.000.000	100	325.852.812	100	334.596.784	100	343.869.408	100	352.553.969	100	DLH

58	Program Pengelolaan Persampahan																
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	N/A	32.780.460.260	46,84	21.570.736.600	55,87	18.157.205.569	66,22	18.333.134.322	86,34	23.710.300.463	95,66	26.760.300.463	100	DLH
		Presentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	N/A		2,20		2,49		2,82		7,64		21,99		23,21	DLH
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
59	Program Pendaftaran Penduduk																
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Presentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	10,3	3.276.939.140	12	2.992.032.500	13	4.584.670.444	14	4.866.835.767	15	5.034.218.258	16	5.216.235.024	17	Disdukcapil
		Presentase kepemilikan kartu identitas anak	%	27		28		30		32		34		36		38	Disdukcapil
60	Program Pencatatan Sipil																
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Anak Berusia 0 - 4 Tahun yang memiliki akta kelahiran	%	91,37	329.471.948	92	244.348.800	93	458.767.154	94	487.002.156	95	503.751.362	96	521.964.953	97	Disdukcapil
		Persentase Anak Berusia 0 - 18 Tahun yang memiliki akta kelahiran	%	91,12		92,20		93,11		94		95		96		98	Disdukcapil
		Persentase Kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	%	61,63		62,52		63,55		64,70		65,85		66,75		67,85	Disdukcapil
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100		100		100		100		100		100	Disdukcapil
		Persentase Kepemilikan akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai	%	52,75		53		53,5		54		54,50		55		55,5	Disdukcapil
61	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	N/A	2.005.048.128	10,87	1.129.064.900	13,04	2.527.434.914	15,22	2.682.986.877	17,39	2.775.261.416	19,57	2.875.603.531	21,74	Disdukcapil
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan																
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	8.945.000	100	77.114.000	100	19.583.130	100	20.788.381	100	21.503.345	100	22.280.818	100	Disdukcapil
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
63	Program Penataan Desa																
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Presentase fasilitasi penataan desa	%	33,33	467.708.600	45	1.656.041.100	57	686.335.250	69	728.576.019	81	753.633.546	93	780.881.856	96	DPMD
64	Program Peningkatan Kerjasama Desa																
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Presentase kerjasama yang terfasilitasi	%	33,33	443.016.000	45	683.122.400	57	842.182.094	69	894.014.518	81	924.761.884	93	958.197.495	96	DPMD
65	Program Administrasi Pemerintahan Desa																
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengasawan pemerintahan desa	Presentase aparatur desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	33,33	6.263.348.904	45	5.271.084.300	57	7.516.604.268	69	7.979.216.596	81	8.253.641.544	93	8.552.059.503	100	DPMD

66	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat																
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	87,31	6.786.028.048	88	12.272.164.200	90	3.689.676.280	91	3.916.758.839	92	4.051.465.840	93	4.197.950.293	95	DPMD
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
67	Program Pengendalian Penduduk																
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	angka	2,15	1.304.978.784	2,14	736.756.800	2,13	1.241.220.124	2,12	1.317.611.498	2,11	1.362.927.409	2,10	1.412.205.296	2,09	DP2KBP3A
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	N/A		63		65		67		69		71		73	DP2KBP3A
68	Program Pembinaan Keluarga Berencana																
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	%	71,80	9.982.299.204	71,83	2.340.029.800	71,85	3.001.927.690	71,90	3.186.682.495	71,90	3.296.280.370	71,95	3.415.460.402	71,95	DP2KBP3A
		Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	11,07		11,05		11		10,9		10,9		10,8		10,8	DP2KBP3A
		Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	%	21		21		20,99		20,98		20,97		20,96		20,95	DP2KBP3A
69	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera																
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Indeks Kerentanan Keluarga	Poin	7,6	9.835.178.648	7,4	1.239.499.800	7,2	2.379.154.824	7	2.525.580.831	6,8	2.612.441.788	6,6	2.706.897.011	6,4	DP2KBP3A
		Median Usia Perkawinan Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	18,7		18,9		19,1		19,3		19,5		19,7		19,9	DP2KBP3A
		Indeks Lansia Tangguh	Poin	50		50,25		50,5		50,75		60		60,25		60,5	DP2KBP3A
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																	
70	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektifitas transportasi darat	%	8,50	14.442.972.633	12,43	29.516.078.167	18,63	24.781.000.000	24,83	24.781.000.000	31,03	23.781.000.000	37,23	28.781.000.000	43,43	Dishub
		Presentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kebutuhan	%	24,09		44,58		48,70		52,81		56,92		61,03		65,14	Dishub
		Ketersediaan Simpul transportasi yang terkelola	%	38,91		41,67		44,69		48,00		61,64		65,63		70,00	Dishub
71	Program Pengelolaan Pelayaran																
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi pelayaran	konektifitas transportasi pelayaran	%	0,35	324.143.400	0,47	854.740.400	0,65	483.443.444	0,76	496.416.220	3,05	510.173.319	3,7	523.057.952	4,06	Dishub
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																	
72	Program Pengelolaaan Informasi dan Komunikasi Publik																

	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemda	%	N/A	11.966.696.405	60	1.110.223.635	64	16.944.035.042	68	17.986.862.256	72	18.605.474.834	76	19.278.172.793	80	Diskominfotik
73	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																
	Meningkatnya kualitas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menunjang transformasi digital	Nilai Teknologi Digital	Nilai	N/A	25.501.358.639	-	6.282.506.000	1,00	29.760.848.722	1,75	31.592.491.709	2,00	32.679.035.458	2,25	33.860.575.873	2,50	Diskominfotik
		Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	3,75		3,75		-		-		-		-		-	Diskominfotik
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
74	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi																
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Presentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	25,03	575.708.700	30,16	352.186.600	31,43	728.314.737	32,62	773.139.150	33,73	799.729.314	34,77	828.644.258	35,75	Diskop UKM
75	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi																
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Presentase koperasi aktif	%	65,21	104.181.600	66,47	95.722.600	67,64	505.344.058	68,73	536.445.654	69,75	554.895.344	70,71	574.958.093	71,6	Diskop UKM
76	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian																
	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	5,01	427.590.600	18,09	3.040.988.600	19,79	614.235.961	21,37	652.039.352	22,85	674.464.594	24,24	698.850.478	25,54	Diskop UKM
77	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi																
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	%	46,45	1.154.951.300	47,22	1.690.945.626	47,98	1.547.832.245	48,75	1.643.094.182	49,52	1.699.604.245	50,29	1.761.054.991	51,06	Diskop UKM
78	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro																
	Peningkatan kemampuan dan kemandirian UMKM, pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	%	1	899.046.100	2,4	1.953.624.990	2,5	1.468.468.377	2,58	1.558.845.834	2,60	1.612.458.389	2,63	1.670.758.296	2,70	Diskop UKM
79	Program Pengembangan UMKM																
	Peningkatan kesejahteraan, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing UMKM	Presentase pengembangan UMKM	%	4	1.004.332.400	4,48	1.627.239.500	5,12	1.178.407.927	5,84	1.250.933.500	6,63	1.293.956.190	7,48	1.340.740.359	8,40	Diskop UKM
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																	
80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal																
	Meningkatnya Iklim Investasi daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Bandung Barat	%	N/A	109.318.000	2,8	149.371.300	3	234.871.703	3,3	249.326.973	3,6	257.901.943	3,8	267.226.623	4,1	DPMPTSP
81	Program Promosi Penanaman Modal																
	Meningkatnya Jumlah Investor yang Berinvestasi	Persentase Peningkatan investor yang berinvestasi	%	5	400.445.800	6	380.618.200	7	612.164.837	10	649.840.760	13	672.190.387	16	696.494.045	20	DPMPTSP
82	Program Pelayanan Penanaman Modal																
	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Persentase Waktu Proses Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai SOP	%	78,03	469.237.400	85	535.480.000	85,50	703.392.779	86,00	746.683.361	86,50	772.363.644	87,00	800.289.158	87,50	DPMPTSP
83	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal																

	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Pemenuhan Teknis dan Administrasi	Persentase Pemenuhan Kepatuhan Teknis dan Administrasi Pelaku Usaha	%	100	408.488.764	100	424.696.200	100	694.197.137	100	736.921.770	100	762.266.328	100	789.826.764	100	DPMPTSP
84	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal																	
	Tersedianya Sistem Informasi Penanaman Modal yang Handal	Presentase pamanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	57.120.000	100	59.386.250	100	103.919.912	100	110.315.704	100	114.109.733	100	118.235.475	100	DPMPTSP
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga																		
85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan																	
	Meningkatnya layanan kepemudaan dan daya saing pemuda	Presentase layanan kepemudaan	%	10,34	9.596.636.945	10,34	5.262.407.400	10,4	11.586.762.557	10,45	12.299.874.356	10,5	12.722.897.387	10,55	13.182.905.378	10,6	Dispora
		Rasio Kewirausahaan Pemuda	%	2,18		2,2		2,22		2,25		2,27		2,28		2,29	Dispora
86	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan																	
	Meningkatnya pembangunan olahraga dan prestasi olahraga	Indeks ketersedian ruang terbuka dan sarana olahraga	Poin	0,67	15.818.882.764	0,67	16.154.478.210	0,68	18.578.123.579	0,69	19.721.521.407	0,7	20.399.793.194	0,71	21.137.366.374	0,71	Dispora
		Indeks SDM Keolahragaan	Poin	0,31		0,31		0,31		0,32		0,33		0,33		0,33	Dispora
		Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Poin	0,38		0,38		0,39		0,4		0,4		0,41		0,41	Dispora
		Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Atlet	201		150		500		100		50		150		500	Dispora
87	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan																	
	Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kepramukaan	%	5,77	668.835.000	5,8	1.010.137.000	5,85	1.206.492.860	5,9	1.280.746.932	5,95	1.324.794.979	5,95	1.372.694.153	6	Dispora
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																		
88	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral																	
	Meningkatnya pengelolaan statistik sektoral dalam rangka mendukung penyelenggaraan SDI	Nilai prinsip Satu Data Indonesia	Nilai	3	707.797.728	3	356.009.200	3,04	836.637.967	3,08	888.129.176	3,12	918.674.129	3,16	951.889.633	3,2	Diskominfotik
		Nilai Kualitas Data	Nilai	3		3		3,04		3,08		3,12		3,16		3,2	Diskominfotik
		Nilai Proses Bisnis statistik	Nilai	2,64		2,64		2,67		2,69		2,71		2,73		2,75	Diskominfotik
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																		
89	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi																	
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Nilai Keamanan Siber	Nilai	0,09	951.897.366	0,09	300.000.000	0.09	1.239.847.649	0.11	1.316.154.554	0.15	1.361.420.357	0.18	1.410.643.755	0.22	Diskominfotik
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																		
90	Program Pengembangan Kebudayaan																	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Presentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	35	1.345.688.764	16,22	1.710.482.600	18,71	1.719.974.425	21,20	1.825.830.919	23,70	1.888.625.749	26,19	1.956.910.741	28,68	Disparbud
91	Program Pengembangan Kesenian Tradisional																	

	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	8,58	100.450.000	12,86	50.000.000	17,15	195.289.763	21,00	207.308.947	26,00	214.438.813	30	222.192.045	34	Disparbud
92	Program Pembinaan Sejarah																
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase SDM /lembaga sejarah yang dibina	%	0	-	0	100.000.000	18,46	288.603.932	25,71	306.366.173	32,00	316.902.862	37,50	328.360.775	42,86	Disparbud
93	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya																
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	50	559.372.428	9,60	278.188.000	14,36	740.254.327	19,12	785.813.567	23,87	812.839.634	28,63	842.228.595	33,39	Disparbud
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																	
94	Program Pembinaan Perpustakaan																
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	64,74	5.986.477.404	65,50	9.014.060.099	65,75	7.278.388.892	66,00	7.731.806.720	66,25	7.913.459.289	66,50	8.207.325.512	66,50	Disarpus
95	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno																
	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	N/A	-	0	46.618.000	10	173.879.513	20	179.114.438	30	269.537.968	40	271.535.495	50	Disarpus
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																	
96	Program Pengelolaan Arsip																
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai	74,65	1.457.347.100	75,00	1.595.712.800	75,50	1.827.139.688	76,00	1.939.591.709	76,50	2.006.299.054	77,00	2.078.838.632	77,50	Disarpus
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	65,96		68,00		69,00		70,00		71,00		72,00		73,00	Disarpus
97	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip																
	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelaman Arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	77,00	139.560.400	78,33	79.627.000	79,00	230.304.885	79,66	244.479.088	80,30	252.887.327	83,00	262.030.700	83,66	Disarpus
98	Program Perizinan Penggunaan Arsip																
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Presentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	28,00	87.022.550	42	13.351.000	56	141.241.018	70	149.933.751	84	155.090.343	98	160.697.776	100	Disarpus
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																	
99	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya																
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	51.585	2.842.738.730	53.133	2.785.163.250	54.727	3.196.766.789	56.368	3.411.288.678	58.059	3.541.072.453	59.801	3.681.499.592	61.595	Dispernakan
100	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap																
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	220	16.050.000	226	230.134.600	234	237.064.769	241	239.345.934	248	240.699.138	255	242.170.653	263	Dispernakan
101	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan																
	Meningkatnya produksi hasil olahan ikan	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	3.222	253.620.000	3.383	499.933.000	3.553	983.370.319	3.730	1.049.358.785	3.917	1.091.031.470	4.113	1.135.643.954	4.318	Dispernakan
102	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan																
	Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	Persentase Sumber Daya Perikanan yang diawasi	%	100	279.532.600	100	59.856.000	100	173.879.513	100	179.114.438	100	179.691.979	100	181.023.663	100	Dispernakan

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																	
103	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata																
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Peresentase pengembangan daya tarik wisata yang siap kunjung	%	3	2.405.234.667	3	1.420.322.508	3	3.466.561.131	3	3.679.911.982	3	3.806.473.235	3	3.944.099.757	3	Disparbud
104	Program Pemasaran Pariwisata																
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	3.435.438	1.164.387.928	3.607.210	1.425.006.800	3.787.570	2.446.294.708	3.976.949	2.596.852.866	4.175.796	2.686.165.044	4.384.586	2.783.285.798	4.603.815	Disparbud
105	Program Pengembangan Ekraf Melalui Pemanfaatan & Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual																
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan memiliki Kekayaan Intelektual	%	100	247.177.528	100	849.013.600	100	377.303.180	100	400.524.450	100	414.299.475	100	429.278.851	100	Disparbud
106	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif																
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Presentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi	%	9	677.449.728	11	486.504.000	13	884.902.762	15	939.364.446	17	971.671.507	19	1.006.803.179	21	Disparbud
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																	
107	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian																
	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana pertanian	Persentase Sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	%	88,25	3.285.271.040	100	5.589.126.600	100	4.712.138.777	100	5.002.149.188	100	5.174.185.442	100	5.361.262.849	100	DKPP
	Meningkatnya produksi peternakan	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	2	5.929.914.800	2	17.324.906.000	2	4.712.138.777	2	5.002.149.188	2	5.174.185.442	2	5.361.262.849	2	Dispernakan
108	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
	Meningkatnya jumlah dan kualitas Prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang terfasilitasi prasarananya	%	0,13	1.993.365.652	0,76	6.174.456.428	1,4	6.612.620.095	2,04	7.019.596.365	2,68	7.261.017.606	3,31	7.523.546.338	3,95	DKPP
	Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan prasarana peternakan	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik	%	100	8.992.183.327	100	4.577.044.480	100	6.612.620.095	100	7.019.596.365	100	7.261.017.606	100	7.523.546.338	100	Dispernakan
109	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																
	meningkatnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis	%	85	4.094.203.900	85	1.572.203.200	100	3.448.002.828	100	3.660.211.501	100	3.786.095.206	100	3.922.984.941	100	Dispernakan
		Presentase unit usaha pangan hewan yang memiliki sertifikat NKV/NKV	%	31,25		32,81		34,48		35,94		37,5		40,6		44,6	
110	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian																
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Presentase penanganan bencana pertanian	%	0	-	0	200.000.000	100	200.897.974	100	213.262.318	100	220.596.935	100	228.572.819	100	DKPP
		Presentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	0	260.982.000	0	89.350.000	100	100.448.987	100	106.631.159	100	110.298.468	100	114.286.410	100	
	Meningkatnya penanggulangan wabah penyakit ternak	Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak	%	100		100		100		100		100		100		100	Dispernakan

111	Program Perizinan Usaha Pertanian																
	Meningkatnya usaha pertanian yang memiliki izin	Presentase ijin usaha pertanian yang terfasilitasi	%	100	-	0	1.836.000	100	24.213.340	100	25.703.559	100	26.587.568	100	27.548.866	100	DKPP
	Meningkatnya pengawasan perizinan usaha peternakan	Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi	%	85	20.970.000	85	28.082.000	100	173.879.513	100	179.114.438	100	179.691.979	100	181.023.663	100	Dispernakan
112	Program Penyuluhan Pertanian																
	meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan Pertanian	Presentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	%	54,79	1.709.843.200	97,87	648.226.600	140,43	861.674.410	182,98	914.706.496	225,53	946.165.510	268,09	980.374.989	310,64	DKPP
		Presentase SDM petani yang ditingkatkan kompetensinya	%	20		20		20		20		20		20		20	
	Meningkatnya kapasitas kelompok ternak	Presentase kelompok peternakan yang dibina	%	100	572.815.000	100	71.663.000	100	861.674.410	100	914.706.496	100	946.165.510	100	980.374.989	100	Dispernakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																	
113	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan																
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	50	89.376.000	60	179.706.200	70	158.736.511	75	168.506.011	80	174.301.349	90	180.603.374	100	Disperindag
114	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Presentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	30	463.182.853	35	717.393.000	45	507.230.612	50	538.448.317	55	556.966.883	70	577.104.531	80	Disperindag
115	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting																
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	10	1.052.812.300	15	1.411.884.400	20	947.318.447	25	1.005.621.528	30	1.040.207.334	35	1.077.816.982	40	Disperindag
116	Program Pengembangan Ekspor																
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang	Milyar	3.036,10	221.725.500	3.077,37	349.205.200	3.347,31	511.951.633	3.617,25	543.459.895	3.887,19	562.150.821	4.157,13	582.475.899	4.427,07	Disperindag
117	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen																
	Meningkatnya pengawasan dan standarisasi produk yang sesuai dengan ketentuan	Persentase alat metrologi yang sesuai standar	%	50	100.000.000	50	92.172.000	50	115.466.569	50	122.573.004	60	126.788.592	65	131.372.749	80	Disperindag
118	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri																
	Meningktanya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	%	40	138.863.732	45	140.000.000	55	223.216.507	65	236.954.454	70	245.103.902	85	253.965.858	90	Disperindag
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																	
119	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri																
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Presentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	50	3.078.339.328	65	8.207.240.200	75	3.652.549.672	80	3.885.547.096	85	4.027.554.619	90	4.180.922.405	100	Disperindag
120	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota																
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Presentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	50	-	0	50.000.000	70	260.819.270	80	268.671.656	85	269.537.968	90	271.535.495	100	Disperindag

121	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional																
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Presentase tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	25	200.000.000	35	200.000.000	40	230.933.138	45	245.146.008	50	253.577.184	55	262.745.499	60	Disperindag
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																	
122	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi																
	Meningkatnya penempatan transmigran	Persentase Transmigran yang ditempatkan pada lokasi transmigrasi sesuai alokasi yang ditetapkan oleh Kementrans/ Pemprov	%	N/A	-	0	89.519.000	50	86.939.757	51	89.557.219	52	89.845.989	53	90.511.832	54	Disnaker
Pendukung Urusan oleh Sekretariat Daerah																	
123	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																
	Meningkatnya kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan yang ditindaklanjuti	%	**N/A**	6.588.042.441	25	22.025.015.995	50	8.004.507.526	75	8.497.148.048	85	8.789.385.938	100	9.107.174.225	100	Bag Kesra Setda
	Peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan	%	**N/A**		25		50		75		85		100		100	Bag Kesra Setda
	Meningkatnya kualitas pengelolaan zakat	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,22		0,25		0,28		0,31		0,34		0,37		0,4	Bag Kesra Setda
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan	Persentase produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan	%	70	3.294.021.221	75	11.012.507.998	80	4.002.253.763	85	4.248.574.024	90	4.394.692.969	100	4.553.587.113	100	Bag. Hukum Setda
	Meningkatnya kerja sama strategis Regional yang ditindaklanjuti	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	80	3.294.021.221	80	11.012.507.998	85	4.002.253.763	90	4.248.574.024	95	4.394.692.969	100	4.553.587.113	100	Bag. Tapem Setda
		Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan	Katagori	Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang	
124	Program Perekonomian Dan Pembangunan																
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	85	1.430.747.033	80	1.572.003.433	85	1.726.851.768	85	1.833.131.530	90	1.896.177.447	95	1.964.735.477	100	Bag. Ekonomi Setda
	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	80	1.430.747.033	80	1.572.003.433	85	1.726.851.768	85	1.833.131.530	90	1.896.177.447	100	1.964.735.477	100	Bag. Pemb. Setda
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	%	100	1.430.747.033	100	1.572.003.433	100	1.726.851.768	100	1.833.131.530	100	1.896.177.447	100	1.964.735.477	100	Bag ULP Setda
Pendukung Urusan oleh Sekretariat DPRD																	
125	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD																
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian Perpu	Presentase pembentukan Ranperda Tahun n	%	67	33.700.440.286	100	19.534.128.450	100	44.166.062.371	100	45.351.219.516	100	46.608.030.205	100	47.785.134.876	100	Sekretariat DPRD
		Presentase ketepatan penetapan perda APBD Tahun n	%	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD
		Persentase peningkatan kapasitas DPRD	%	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD

	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	98		100		100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD
		Persentase kebijakan anggaran yang dibahas	%	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD
Penunjang Urusan Perencanaan																		
126	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah																	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Presentase Capaian kinerja Daerah	%	70,59	2.825.685.200	85	2.287.930.500	90	3.851.601.256	95	4.088.649.550	100	4.229.268.298	100	4.382.181.361	100	Bappelitbangda
		Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Nilai	95,6		100		100		100		100		100		100	Bappelitbangda
127	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah																	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang PPM, Ik dan PSDA	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	2.338.389.800	100	2.829.999.900	100	3.588.148.806	100	3.808.982.817	100	3.939.983.135	100	4.082.436.829	100	Bappelitbangda
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100		100		100		100		100		100		100	Bappelitbangda
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	%	100		100		100		100		100		100		100	Bappelitbangda
Penunjang Urusan Keuangan																		
128	Program Pengelolaan Keuangan Daerah																	
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Presentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	38	545.364.757.506	38	511.663.313.455	37	339.123.336.666	36	359.994.814.065	35	372.375.924.055	34	385.839.516.165	30	BKAD
		Presentase alokasi belanja infrasturktur pelayanan publik	%	24,22		25		30		35		40		40		40	BKAD
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Presentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	100		100		100		100		100		100		100	BKAD
		Presentase penurunan silva	%	100		15		15		15		15		15		15	BKAD
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan keuangan	Presentase laporan keuangan tepat waktu	%	100		100		100		100		100		100		100	BKAD
129	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Presentase penambahan nilai aset tetap	%	0,15	4.065.925.435	2	1.465.081.050	2	6.106.352.080	2	6.482.169.889	2	6.705.107.707	2	6.947.537.009	2	BKAD
130	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																	
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase Peningkatan Pendapatan daerah dari Sektor Pajak Daerah	%	98,24	7.929.869.978	100	7.624.371.400	100	10.222.969.175	100	10.852.145.781	100	11.225.377.854	100	11.631.241.657	100	Bapenda
Penunjang Urusan Kepegawaian																		
131	Program Kepegawaian Daerah																	

	Meningkatnya kualitas layanan adm. Kepegawaian	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	106	2.893.098.506	106	2.933.841.600	107	3.851.197.238	108	4.088.220.667	109	4.228.824.664	110	4.381.721.688	112	BKPSDM
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	30		30		31,2		31,5		31,7		31,9		32	BKPSDM
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	115		115		116		117		118		119		120	BKPSDM
Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan																	
132	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia																
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Nilai	82,5	3.016.793.200	82,5	2.593.877.200	83	3.604.406.730	84	3.826.241.341	85	3.957.835.223	86	4.100.934.375	87	BKPSDM
Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan																	
133	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah																
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	%	100	654.500.000	100	512.917.950	100	519.599.561	100	551.578.518	100	570.548.664	100	591.177.373	100	Bappelitbangda
134	Program Riset dan Inovasi Daerah																
	Meningkatnya pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase produk inovasi daerah yang dimanfaatkan	%	N/A	-	0	367.832.000	33,63	519.599.561	34,29	551.578.518	34,95	570.548.664	35,61	591.177.373	36,27	Bappelitbangda
		Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	%	100		0		100		100		100		100		100	Bappelitbangda
Pengawasan Urusan																	
135	Program Penyelenggaraan Pengawasan																
	Menurunnya kejadian penyelewengan/penyimpangan baik yang bersipat anggaran atau proses dan kewenangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	76,7	4.016.146.200	76,7	4.420.671.000	77	4.637.306.226	77,5	4.922.711.038	78	5.092.015.218	78,5	5.276.121.686	79	Itda
136	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi																
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	1.411.390.200	3	767.965.000	3	1.760.155.290	3	1.868.484.731	3	1.932.746.531	3	2.002.626.750	3	Itda
		Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	69,85		70		72		74		76		78		79	Itda
Unsur Kewilayahan																	
137	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik																
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Lembang	%	100	390.102.600	100	649.924.800	100	367.563.394	100	390.185.226	100	403.604.658	100	418.197.354	100	Kec. Lembang
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Parongpong	%	100	627.126.600	100	546.137.600	100	453.482.454	100	481.392.207	100	497.948.473	100	515.952.256	100	Kec. Parongpong
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan	%	100	424.138.350	100	472.852.000	100	482.124.787	100	511.797.344	100	529.399.318	100	548.540.234	100	Kec. Cisarua

		pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cisarua															
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cikalongwetan	%	100	227.156.000	100	321.817.000	100	228.100.018	100	242.138.522	100	250.466.263	100	259.522.100	100	Kec. Cikalongwetan
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipeundeuy	%	100	208.945.200	100	481.955.300	100	241.813.787	100	256.696.310	100	265.524.730	100	275.125.019	100	Kec. Cipeundeuy
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Ngamprah	%	100	346.434.800	100	271.526.400	100	415.641.964	100	441.222.810	100	456.397.551	100	472.899.022	100	Kec. Ngamprah
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipatat	%	100	250.473.200	100	409.727.900	100	315.565.680	100	334.987.292	100	346.508.332	100	359.036.658	100	Kec. Cipatat
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Padalarang	%	100	247.274.400	100	417.395.800	100	270.121.176	100	286.745.889	100	296.607.788	100	307.331.914	100	Kec. Padalarang
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Batujajar	%	100	322.292.600	100	547.075.000	100	357.473.132	100	379.473.955	100	392.525.001	100	406.717.101	100	Kec. Batujajar
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cihampelas	%	100	349.050.800	100	564.319.800	100	353.604.176	100	375.366.882	100	388.276.676	100	402.315.174	100	Kec. Cihampelas
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cililin	%	100	243.449.800	100	378.851.200	100	243.639.165	100	258.634.032	100	267.529.095	100	277.201.854	100	Kec. Cililin
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipongkor	%	100	372.859.900	100	474.116.000	100	370.973.212	100	393.804.902	100	407.348.824	100	422.076.894	100	Kec. Cipongkor
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Rongga	%	100	142.711.400	100	349.243.000	100	176.138.964	100	186.979.505	100	193.410.192	100	200.403.114	100	Kec. Rongga
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Sindangkerta	%	100	230.763.000	100	438.670.500	100	260.843.817	100	276.897.551	100	286.420.741	100	296.776.545	100	Kec. Sindangkerta
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Gununghalu	%	100	136.153.800	100	71.638.800	100	156.238.394	100	165.854.147	100	171.558.280	100	177.761.127	100	Kec. Gununghalu
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Saguling	%	100	225.312.000	100	565.102.000	100	237.961.102	100	252.606.510	100	261.294.272	100	270.741.605	100	Kec. Saguling
138	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																
	Meningkatnya lembaga kemasyarakatn yang aktif dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di	%	100	2.296.312.400	100	630.215.450	100	2.276.583.862	100	2.416.697.099	100	2.499.813.276	100	2.590.196.311	100	Kec. Lembang

		Kec. Lembang															
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Parongpong	%	100	1.275.429.800	100	436.350.000	100	1.358.807.932	100	1.442.436.293	100	1.492.045.237	100	1.545.991.497	100	Kec. Parongpong
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cisarua	%	100	1.322.094.600	100	848.895.000	100	1.323.206.280	100	1.404.643.524	100	1.452.952.681	100	1.505.485.514	100	Kec. Cisarua
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cikalongwetan	%	100	2.045.685.800	100	718.909.200	100	2.016.716.645	100	2.140.836.254	100	2.214.464.895	100	2.294.530.899	100	Kec. Cikalongwetan
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipeundeuy	%	100	1.751.164.400	100	590.819.100	100	1.694.280.259	100	1.798.555.395	100	1.860.412.154	100	1.927.677.057	100	Kec. Cipeundeuy
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Ngamprah	%	100	2.074.529.000	100	788.423.400	100	2.025.275.007	100	2.149.921.344	100	2.223.862.444	100	2.304.268.225	100	Kec. Ngamprah
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipatat	%	100	2.224.865.300	100	719.145.600	100	2.170.056.213	100	2.303.613.166	100	2.382.840.107	100	2.468.993.870	100	Kec. Cipatat
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Padalarang	%	100	2.241.703.100	100	620.281.300	100	2.187.261.355	100	2.321.877.204	100	2.401.732.291	100	2.488.569.119	100	Kec. Padalarang
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Batujajar	%	100	1.482.824.400	100	551.175.000	100	1.465.191.486	100	1.555.367.265	100	1.608.860.184	100	1.667.029.995	100	Kec. Batujajar
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cihampelas	%	100	1.643.477.600	100	677.604.800	100	1.523.586.554	100	1.617.356.280	100	1.672.981.154	100	1.733.469.317	100	Kec. Cihampelas
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cililin	%	100	1.988.697.200	100	787.195.600	100	1.928.596.975	100	2.047.293.224	100	2.117.704.690	100	2.194.272.240	100	Kec. Cililin
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipongkor	%	100	1.412.582.000	100	650.469.600	100	1.419.291.765	100	1.506.642.628	100	1.558.459.786	100	1.614.807.325	100	Kec. Cipongkor
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Rongga	%	100	1.585.493.300	100	352.184.500	100	1.538.849.376	100	1.633.558.458	100	1.689.740.565	100	1.750.834.680	100	Kec. Rongga
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Sindangkerta	%	100	1.526.797.400	100	511.409.400	100	1.439.830.071	100	1.528.444.972	100	1.581.011.966	100	1.638.174.900	100	Kec. Sindangkerta
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Gununghalu	%	100	1.791.149.100	100	1.136.641.600	100	1.788.935.103	100	1.899.035.808	100	1.964.348.336	100	2.035.371.147	100	Kec. Gununghalu

		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Saguling	%	100	593.439.100	100	455.766.800	100	748.653.431	100	794.729.597	100	822.062.309	100	851.784.724	100	Kec. Saguling
139	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Lembang	%	100	18.465.000	100	20.601.000	100	18.099.893	100	19.213.858	100	19.874.670	100	20.593.257	100	Kec. Lembang
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Parongpong	%	100	36.750.000	100	20.000.000	100	36.023.345	100	38.240.416	100	39.555.598	100	40.985.767	100	Kec. Parongpong
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cisarua	%	100	78.895.000	100	110.880.000	100	81.525.486	100	86.543.004	100	89.519.431	100	92.756.088	100	Kec. Cisarua
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cikalongwetan	%	100	69.565.000	100	81.000.000	100	100.375.841	100	106.553.511	100	110.218.149	100	114.203.187	100	Kec. Cikalongwetan
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipeundeuy	%	100	119.031.200	100	140.489.200	100	127.625.566	100	135.480.331	100	140.139.834	100	145.206.717	100	Kec. Cipeundeuy
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Ngamprah	%	100	56.748.000	100	65.642.000	100	55.625.926	100	59.049.446	100	61.080.302	100	63.288.716	100	Kec. Ngamprah
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipatat	%	100	950.139.000	100	88.069.000	100	874.293.939	100	928.102.699	100	960.022.441	100	994.732.930	100	Kec. Cipatat
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Padalarang	%	100	74.881.200	100	94.437.200	100	79.226.854	100	84.102.901	100	86.995.407	100	90.140.806	100	Kec. Padalarang
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Batujajar	%	100	62.424.400	100	131.124.800	100	72.585.815	100	77.053.137	100	79.703.185	100	82.584.926	100	Kec. Batujajar
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cihampelas	%	100	42.190.600	100	38.938.400	100	59.107.693	100	62.745.499	100	64.903.471	100	67.250.116	100	Kec. Cihampelas
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cililin	%	100	44.149.800	100	125.751.800	100	51.121.783	100	54.268.093	100	56.134.506	100	58.164.101	100	Kec. Cililin
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipongkor	%	100	32.625.000	100	58.530.000	100	60.558.429	100	64.285.521	100	66.496.459	100	68.900.699	100	Kec. Cipongkor
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Rongga	%	100	72.470.000	100	71.568.000	100	91.053.293	100	96.657.204	100	99.981.483	100	103.596.405	100	Kec. Rongga
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Sindangkerta	%	100	94.910.000	100	43.736.000	100	106.070.372	100	112.598.515	100	116.471.055	100	120.682.173	100	Kec. Sindangkerta
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec.	%	100	96.515.000	100	41.448.000	100	123.013.597	100	130.584.517	100	135.075.641	100	139.959.424	100	Kec. Gununghalu

		Gununghalu																
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Saguling	%	100	33.800.000	100	85.010.000	100	33.131.675	100	35.170.777	100	36.380.387	100	37.695.753	100	Kec. Saguling
140	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum																	
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Lembang	%	100	1.138.150.000	100	1.031.942.400	100	1.064.830.479	100	1.130.365.884	100	1.169.241.956	100	1.211.516.968	100	Kec. Lembang
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Parongpong	%	100	568.800.000	100	528.560.000	100	557.553.163	100	591.867.989	100	612.223.789	100	634.359.300	100	Kec. Parongpong
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cisarua	%	100	668.120.000	100	670.440.000	100	633.912.852	100	672.927.265	100	696.070.894	100	721.237.974	100	Kec. Cisarua
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cikalongwetan	%	100	962.199.200	100	986.400.400	100	901.514.845	100	956.998.926	100	989.912.481	100	1.025.703.672	100	Kec. Cikalongwetan
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipeundeuy	%	100	861.724.600	100	861.171.800	100	805.932.903	100	855.534.356	100	884.958.293	100	916.954.770	100	Kec. Cipeundeuy
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Ngamprah	%	100	813.207.920	100	997.508.400	100	769.428.776	100	816.783.568	100	844.874.771	100	875.421.991	100	Kec. Ngamprah
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipatat	%	100	65.058.800	100	951.109.600	100	69.860.784	100	74.160.393	100	76.710.952	100	79.484.507	100	Kec. Cipatat
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Padalarang	%	100	721.182.400	100	740.483.000	100	675.866.571	100	717.463.042	100	742.138.366	100	768.971.058	100	Kec. Padalarang
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Batujajar	%	100	516.604.400	100	546.210.000	100	489.476.392	100	519.601.407	100	537.471.781	100	556.904.565	100	Kec. Batujajar
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cihampelas	%	100	746.740.600	100	747.604.600	100	710.125.508	100	753.830.458	100	779.756.547	100	807.949.359	100	Kec. Cihampelas
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cililin	%	100	833.045.800	100	836.291.400	100	771.685.141	100	819.178.802	100	847.352.383	100	877.989.183	100	Kec. Cililin
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipongkor	%	100	1.028.085.000	100	990.750.000	100	979.908.506	100	1.040.217.355	100	1.075.992.997	100	1.114.896.508	100	Kec. Cipongkor
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Rongga	%	100	640.873.600	100	587.765.000	100	608.284.815	100	645.721.940	100	667.929.911	100	692.079.528	100	Kec. Rongga
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Sindangkerta	%	100	976.873.200	100	873.418.800	100	931.622.520	100	988.959.589	100	1.022.972.350	100	1.059.958.851	100	Kec. Sindangkerta
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Gununghalu	%	100	746.526.400	100	674.400.600	100	698.745.071	100	741.749.608	100	767.260.207	100	795.001.202	100	Kec. Gununghalu
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Saguling	%	100	419.210.000	100	524.274.800	100	397.256.629	100	421.705.942	100	436.209.450	100	451.981.002	100	Kec. Saguling
141	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	-	0	68.427.400	100	766.796.783	100	813.989.588	100	841.984.699	100	872.427.426	100	Kec. Lembang

pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Sesuai Penugasan Kepala Daerah di kec. Lembang															
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Parongpong	%	100	-	0	14.280.000	100	503.866.801	100	534.877.479	100	553.273.235	100	573.277.335	100	Kec. Parongpong
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cisarua	%	100	-	0	4.970.000	100	544.329.582	100	577.830.557	100	597.703.576	100	619.314.095	100	Kec. Cisarua
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cikalongwetan	%	100	-	0	39.050.000	100	650.106.277	100	690.117.320	100	713.852.158	100	739.662.135	100	Kec. Cikalongwetan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipeundeuy	%	100	-	0	51.870.000	100	592.167.598	100	628.612.783	100	650.232.328	100	673.742.072	100	Kec. Cipeundeuy
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Ngamprah	%	100	-	0	20.000.000	100	631.581.207	100	670.452.118	100	693.510.620	100	718.585.131	100	Kec. Ngamprah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipatat	%	100	-	0	20.000.000	100	678.761.534	100	720.536.176	100	745.317.193	100	772.264.818	100	Kec. Cipatat
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Padalarang	%	100	-	0	20.000.000	100	670.216.199	100	711.464.915	100	735.933.949	100	762.542.314	100	Kec. Padalarang
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Batujajar	%	100	-	0	30.000.000	100	463.302.218	100	491.816.333	100	508.731.110	100	527.124.749	100	Kec. Batujajar
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cihampelas	%	100	-	0	42.600.000	100	530.600.134	100	563.256.125	100	582.627.893	100	603.693.337	100	Kec. Cihampelas
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cililin	%	100	-	0	151.276.400	100	622.199.348	100	660.492.848	100	683.208.827	100	707.910.867	100	Kec. Cililin
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipongkor	%	100	-	0	87.320.000	100	562.576.941	100	597.200.958	100	617.740.172	100	640.075.133	100	Kec. Cipongkor

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Rongga	%	100	-	0	10.000.000	100	510.193.454	100	541.593.508	100	560.220.245	100	580.475.521	100	Kec. Rongga
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Sindangkerta	%	100	-	0	62.220.000	100	553.926.557	100	588.018.182	100	608.241.578	100	630.233.109	100	Kec. Sindangkerta
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Gununghalu	%	100	-	0	20.000.000	100	544.621.475	100	578.140.415	100	598.024.090	100	619.646.198	100	Kec. Gununghalu
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Saguling	%	100	-	0	20.000.000	100	412.079.419	100	437.441.007	100	452.485.682	100	468.845.716	100	Kec. Saguling
Unsur Pemerintahan Umum																	
142	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan																
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	85,71	1.224.433.600	86	1.283.618.500	86,5	1.588.035.973	87	1.685.772.263	88	1.743.750.131	89	1.806.797.012	90	Bakesbangpol
143	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik																
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Presentase pendidikan politik pada kader parpol	%	N/A	4.460.550.800	50	6.256.615.000	55	5.343.950.891	60,00	5.672.846.423	65	5.867.949.610	70	6.080.110.695	75	Bakesbangpol
144	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Presentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	60	339.035.000	70	988.828.000	71	611.637.963	72	649.281.459	73	671.611.851	74	695.894.591	75	Bakesbangpol
145	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya																
	Meningkatnya kerukunan umat beragama dan kebebasan beribadah	Indeks kerukunan Umat Beragama	Poin	92,49	142.650.000	92,5	192.513.667	92,6	240.709.308	92,7	255.523.855	92,8	264.311.951	92,9	273.868.392	93	Bakesbangpol
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Presentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan	%	83,33	285.300.000	84	385.027.333	85	481.418.615	86	511.047.711	87	528.623.903	88	547.736.783	90	Bakesbangpol
146	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial																
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Presentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100	1.661.158.000	100	3.567.925.800	100	2.970.357.860	100	3.153.169.688	100	3.261.614.974	100	3.379.541.647	100	Bakesbangpol
Program Penunjang Urusan																	

147	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Setda	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Setda	Nilai	81,6	65.220.403.154	82,1	56.245.425.708	82,6	80.439.016.555	83,1	81.899.360.627	83,6	83.429.675.600	84,1	84.880.377.994	84,6	Setda
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Sekretariat DPRD	Nilai	72,46	83.744.976.643	73	73.145.210.137	76	108.695.775.455	79	111.448.189.093	82	114.362.698.813	85	117.096.477.387	88	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Inspektorat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Inspektorat Daerah	Nilai	83,81	21.725.628.395	84	22.988.375.437	84,5	22.791.641.784	85	23.050.109.168	85,5	23.314.937.063	86	23.571.790.200	86,5	Itda
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Pendidikan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pendidikan	Nilai	84,77	721.725.909.299	85,5	478.050.034.572	87	589.036.884.948	88,5	594.222.051.280	89,5	599.442.004.993	90,5	604.596.208.821	92	Disdik
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kesehatan	Nilai	83,1	359.762.455.674	84	409.231.718.225	85	203.006.146.148	86	204.826.006.680	87	206.660.703.632	88	208.469.656.892	89	Dinkes
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas PUTR	Nilai	64,41	22.146.557.736	70,91	22.893.885.730	76,41	24.926.100.383	79,91	25.248.114.638	83,41	25.580.495.932	86,91	25.900.461.654	89,41	DPUTR
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	58,25	9.990.908.830	72,35	10.633.646.890	76,21	11.047.320.237	79,11	11.183.380.989	82,21	11.323.459.292	85,34	11.458.660.033	87,24	Disperkim
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Satpol PP	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Satpol PP	Nilai	84,15	10.796.290.421	84,25	13.683.211.950	84,40	11.180.310.224	84,60	11.290.902.838	84,85	11.403.211.282	85,15	11.513.128.595	85,50	Satpol PP
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai	64,28	16.308.747.331	65	24.395.489.172	65,5	17.871.854.422	65,75	18.129.868.199	65,9	18.397.667.376	66	18.654.017.123	66,25	Disdamkar
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Sosial	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Sosial	Nilai	75,56	8.370.029.591	76,5	8.722.808.714	77,5	9.040.834.140	78,5	9.139.097.897	79,5	9.239.515.069	80	9.337.169.178	80,5	Dinas Sosial
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Tenaga Kerja	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Tenaga Kerja	Nilai	79,33	7.185.489.990	79,83	7.910.947.456	80,33	8.307.425.609	80,83	8.410.645.977	81,33	8.516.965.918	81,83	8.619.533.061	82,33	Disnaker
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di DP2KBP3A	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) DP2KBP3A	Nilai	86,55	13.653.270.074	86,6	14.390.060.659	86,65	14.632.985.530	86,7	14.790.564.348	86,75	14.951.501.515	86,8	15.108.104.135	86,85	DP2KBP3A
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Urusan Pemerintahan di Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	68,51	14.191.465.014	69,51	12.566.384.928	70,51	15.754.355.141	71,51	15.958.774.739	72,51	16.169.824.160	73,51	16.372.942.573	74,51	DLH
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	72,73	13.377.753.615	73,5	12.124.105.792	74,85	14.720.679.093	76	14.898.556.966	77,25	15.081.491.359	78,5	15.258.247.903	80	Disdukcapil
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai	79,4	6.533.350.890	80	7.713.205.012	80,5	7.554.150.275	81	7.644.009.389	81,2	7.736.340.073	81,5	7.825.633.990	82	DPMD
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Perhubungan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perhubungan	Nilai	77,47	11.622.036.722	78,00	13.909.279.414	79	12.986.775.635	80	13.144.573.394	81	13.306.907.646	82	13.463.709.882	83	Dishub
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Kominfo dan Statistik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kominfo dan Statistik	Nilai	87,8	10.897.014.978	88	8.021.674.073	88,2	13.666.042.246	88,4	13.899.717.111	88,6	14.144.028.683	88,8	14.376.169.318	89	Diskominfotik
	Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	70,99	15.500.309.183	71,5	16.547.711.856	72	15.835.076.086	72,5	15.963.566.862	73	16.092.047.626	73,5	16.219.784.491	74	Disperindag

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola urusan Pemerintahan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Koperasi dan UKM	Nilai	72,77	6.275.293.534	73,5	7.262.416.948	74,5	7.445.155.155	75,5	7.543.244.770	77,5	7.644.596.284	79	7.742.060.298	82	Diskop UKM
Meningkatnya kualitas tata kelola Urusan Pemerintahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) DPMPTSP	Nilai	81,12	8.192.417.096	81,7	8.679.902.293	82,25	9.154.839.645	82,75	9.263.889.769	83,3	9.375.948.206	83,8	9.484.312.289	84,15	DPMPTSP
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Pemuda dan Olahraga	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai	80,57	6.951.642.060	83	6.816.109.466	85	7.926.939.508	90	8.035.611.738	91	8.148.124.131	95	8.256.099.800	95	Dispora
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai	74,61	9.255.014.366	75,11	9.491.537.342	75,61	10.640.801.299	76,11	10.785.086.925	76,61	10.934.389.441	77,11	11.077.751.485	77,61	Disparbud
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai	71,96	25.851.065.184	74,46	22.791.565.055	77,38	30.353.567.644	80,46	30.710.103.998	82,18	31.076.178.747	84,76	31.430.476.660	87,6	DKPP
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Perikanan dan Peternakan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perikanan dan Peternakan	Nilai	73,55	12.308.195.576	75	13.608.557.893	76,5	16.529.343.662	78	16.760.516.489	80	17.000.092.934	82	17.229.780.409	84	Dispernakan
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai	84,87	7.273.044.561	85,37	6.966.354.797	85,87	8.000.395.163	86,37	8.116.628.157	86,87	8.237.305.105	87,37	8.352.787.921	87,87	Disarpus
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Bappelitbangda	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Bappelitbangda	Nilai	83,71	11.803.633.340	83,76	12.911.075.097	83,81	12.995.998.270	83,86	13.136.033.755	83,91	13.279.059.258	83,96	13.418.227.141	84,01	Bappelitbangda
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Badan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	79,45	106.111.424.741	80	135.978.002.187	80,5	152.788.229.000	81	155.098.484.403	81,5	157.501.453.697	82	159.796.731.347	82,5	BKAD
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Badan Pendapatan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Pendapatan Daerah	Nilai	81,6	26.641.107.983	82	27.431.150.769	82,5	27.489.612.592	83	27.739.271.925	83,5	27.991.220.084	84	28.239.379.211	84	Bapenda
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Nilai	79,88	27.148.886.342	80.00	12.546.041.912	80,5	34.640.637.655	81	35.042.530.537	81,5	35.454.875.509	82	35.854.249.779	82,5	BKPSDM
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	55,67	7.224.658.827	56,17	7.623.751.820	56,67	9.242.586.384	57,17	9.381.826.104	57,67	9.526.629.776	58,17	9.664.967.149	58,67	BPBD
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	80,37	4.466.319.827	80,8	5.241.301.385	81,5	4.875.389.369	82	4.928.230.556	82,5	4.982.220.096	83	5.034.733.594	83,5	Bakesbangpol
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Lembang	Nilai	62,51	4.607.676.773	66,69	4.885.494.986	68,00	4.656.297.225	69,31	4.699.604.666	70,62	4.743.388.160	71,92	4.786.434.156	73,23	Kec. Lembang
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Parongpong	Nilai	62,35	4.065.157.086	65,38	4.057.795.877	66,69	4.166.471.912	68,00	4.203.032.870	69,31	4.239.829.869	70,62	4.276.172.650	71,92	Kec. Parongpong
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cisarua	Nilai	61,06	3.753.827.939	64,08	3.562.996.589	65,38	3.791.194.444	66,69	3.827.937.006	68,00	3.865.195.601	69,31	3.901.714.632	70,62	Kec. Cisarua
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cikalongwetan	Nilai	61,3	4.132.807.892	64,08	4.400.628.523	65,38	4.155.261.072	66,69	4.191.310.548	68,00	4.227.559.613	69,31	4.263.394.472	70,62	Kec. Cikalongwetan
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cipeundeuy	Nilai	59,37	3.004.261.909	61,46	3.266.454.452	62,77	3.091.363.438	64,08	3.121.766.986	65,38	3.152.629.756	66,69	3.182.847.845	68,00	Kec. Cipeundeuy
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Ngamprah	Nilai	62,21	3.326.846.579	65,38	3.171.689.280	66,69	3.298.275.178	68,00	3.325.978.786	69,31	3.353.761.839	70,62	3.381.301.649	71,92	Kec. Ngamprah

kewilayahan																	
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cipatat	Nilai	59,34	3.550.051.972	62,77	3.663.213.425	66,69	3.621.265.445	68,00	3.653.377.746	69,31	3.685.724.293	70,62	3.717.644.552	71,92	Kec. Cipatat
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Padalarang	Nilai	62,23	3.699.696.977	65,38	3.688.370.115	66,69	3.743.758.985	68,00	3.780.558.482	69,31	3.817.912.349	70,62	3.854.487.394	71,92	Kec. Padalarang
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Batujajar	Nilai	62,34	3.596.015.110	65,38	3.727.441.372	66,69	3.610.377.943	68,00	3.638.602.609	69,31	3.666.732.130	70,62	3.694.792.613	71,92	Kec. Batujajar
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cihampelas	Nilai	57,77	3.940.157.755	61,46	4.091.635.676	62,77	3.947.063.391	64,08	3.980.133.898	65,38	4.013.292.320	66,69	4.046.167.403	68,00	Kec. Cihampelas
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cililin	Nilai	60,93	3.302.705.601	61,46	3.540.808.138	62,77	3.382.883.735	64,08	3.416.158.628	65,38	3.449.936.416	66,69	3.483.008.329	68,00	Kec. Cililin
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cipongkor	Nilai	61,00	3.045.533.971	62,77	3.248.771.704	64,08	3.071.212.031	65,38	3.098.551.580	66,69	3.126.098.894	68,00	3.153.274.816	69,31	Kec. Cipongkor
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Rongga	Nilai	60,22	3.069.494.265	61,46	3.694.799.259	62,77	3.142.848.965	64,08	3.173.460.714	65,38	3.204.513.483	66,69	3.234.938.830	68,00	Kec. Rongga
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Sindangkerta	Nilai	60,83	2.948.438.349	64,08	3.400.931.805	65,38	3.054.005.668	66,69	3.082.242.940	68,00	3.110.777.923	69,31	3.138.844.922	70,62	Kec. Sindangkerta
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Gununghalu	Nilai	61,16	3.037.456.604	64,08	3.106.127.794	65,38	3.044.843.198	66,69	3.071.158.609	68,00	3.097.611.558	69,31	3.123.770.427	70,62	Kec. Gununghalu
Meningkatnya kualitas tata kelola urusan pemerintahan di kewilayahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Saguling	Nilai	59,7	3.628.516.026	62,77	3.348.060.428	64,08	3.663.877.149	65,38	3.708.111.252	66,69	3.753.600.550	68,00	3.797.555.837	69,31	Kec. Saguling

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil Cascading Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA DAN PAGU INDIKATIF												PERANGKAT DAERAH
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	
Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter																
Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berakhlak	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**70,77**		**71,33**		**72,14**		**72,72**		**73,46**		**74,23**		**75,04**	
Meningkatnya Masyarakat yang Berakhlak	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Poin	-		60		64		68		72		76		80	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan yang ditindaklanjuti	%	**N/A**	6.588.042.441	25	22.025.015.995	50	8.004.507.526	75	8.497.148.048	85	8.789.385.938	100	9.107.174.225	100	Bag Kesra Setda
	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan	%	**N/A**		25		50		75		85		100		100	Bag Kesra Setda
	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,22		0,25		0,28		0,31		0,34		0,37		0,4	Bag Kesra Setda
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks kerukunan Umat Beragama	Poin	92,49	142.650.000	92,5	192.513.667	92,6	240.709.308	92,7	255.523.855	92,8	264.311.951	92,9	273.868.392	93	Bakesbangpol
Kesehatan yang berkualitas untuk semua	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,06		75,09		75,25		75,40		75,56		75,72		75,88	
	Prevalensi Stunting	%	30,80		27,75		25,14		22,9		20,97		19,29		17,84	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan antenatal care (ANC) 6 kali (K6)	%	88,7	219.497.984.394	89,0	211.720.759.613	90,0	193.631.224.643	93,0	205.548.333.530	95,0	212.617.647.937	97,0	220.305.033.459	20,4	Dinas Kesehatan
	Cakupan Skrining Bayi Baru Lahir	%	40,0		41,0		42,0		45,0		47,0		50,0		53,0	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	%	53,8		91		91		91		91		91		91	Dinas Kesehatan
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	91,02		91		91		91		91		91		91	Dinas Kesehatan
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	89,66		98		98,1		98,2		98,3		98,4		98,5	Dinas Kesehatan
	Presentase ketersediaan sapras kesehatan yang memenuhi standar	%	68,8		69		69,2		69,4		69,6		69,8		70	Dinas Kesehatan
	Cakupan Layanan Intervensi Balita dan Ibu Hamil bermasalah gizi	%	76,4		76,5		76,6		76,7		76,8		76,9		76,9	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan	Presentase peningkatan kompetensi SDM bidang	%	86	2.278.327.723	87	611.132.700	89	1.039.725.329	90	1.103.715.628	92	1.141.675.132	93	1.182.953.441	95	Dinas Kesehatan

Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	kesehatan															
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase cakupan sediaan Farmasi, alat kesehatan dan perijinan makanan minuman	%	98,94	1.091.545.000	99,04	321.521.400	99,14	452.555.052	99,24	480.407.729	99,34	496.930.136	99,44	514.897.099	99,54	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	4	711.168.957	15	199.076.924	25	458.402.230	35	486.614.773	45	503.350.656	55	521.549.759	65	Dinas Kesehatan
Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,00		12,09		12,19		12,30		12,40		12,51		12,62	
	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,24		8,25		8,27		8,28		8,29		8,31		8,32	
Program Pengelolaan Pendidikan	APS usia 5-6	%	73,28	336.920.041.482	76,32	34.148.767.240	79,36	72.471.504.326	82,4	76.931.791.192	85,37	79.577.665.331	88,34	82.454.868.603	91,31	Dinas Pendidikan
	APS usia 7-15	%	98,06		98,32		98,59		98,86		99,13		99,4		99,66	Dinas Pendidikan
	APS usia 7 - 18 Kesetaraan	%	19,78		23,88		27,97		32,07		36,17		40,27		44,37	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Presentase satuan pendidikan yang mengambankan kurikulum muatan lokal	%	75	-	0,00	150.000.000	81,89	230.933.138	85,06	245.146.008	88,24	253.577.184	91,42	262.745.499	94,60	Dinas Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru/Murid PAUD	%	1:13	11.364.575.200	1:13,92	14.589.882.000	1:14,84	13.231.917.704	1:15,76	14.046.281.215	1:16,69	14.529.367.488	1:17,61	15.054.690.058	1:18,53	Dinas Pendidikan
	Rasio Guru/Murid SD	%	1:22.1		1:23,88		1:24,22		1:24,57		1:24,91		1:25,25		1:25,59	Dinas Pendidikan
	Rasio Guru/Murid SMP	%	1:19.9		1:22,23		1:24,17		1:26,11		1:28,05		1:29,99		1:31,93	Dinas Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola oleh masyarakat yang telah diterbitkan/diperbarui	%	19	-	0,00	100.000.000	19,59	144.333.211	19,74	153.216.255	19,88	158.485.740	20,03	164.215.937	20,18	Dinas Pendidikan
	Persentase usulan izin satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh masyarakat, yang telah diterbitkan atau diperbarui	%	15,00		0,00		15,50		15,97		16,43		16,89		17,35	Dinas Pendidikan
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	64,74	5.986.477.404	65,50	9.014.060.099	65,75	7.278.388.892	66,00	7.731.806.720	66,25	7.913.459.289	66,50	8.207.325.512	66,50	Disarpus
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	N/A	-	0	46.618.000	10	173.879.513	20	179.114.438	30	269.537.968	40	271.535.495	50	
Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	**Indeks Pembangunan Keluarga**	**Poin**	**61,12**		**61,91**		**63,11**		**64,13**		**65,01**		**65,78**		**66,48**	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Poin	70,15		70,60		71,00		71,90		72,50		73,20		74,00	
	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	N/A		43,85		44,20		44,64		44,89		45,00		45,20	
Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	angka	2,15	1.304.978.784	2,14	736.756.800	2,13	1.241.220.124	2,12	1.317.611.498	2,11	1.362.927.409	2,10	1.412.205.296	2,09	DP2KBP3A
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	N/A		63		65		67		69		71		73	DP2KBP3A

Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	%	71,80	9.982.299.204	71,83	2.340.029.800	71,85	3.001.927.690	71,90	3.186.682.495	71,90	3.296.280.370	71,95	3.415.460.402	71,95	DP2KBP3A
	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	11,07		11,05		11		10,9		10,9		10,8		10,8	DP2KBP3A
	Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	%	21		21		20,99		20,98		20,97		20,96		20,95	DP2KBP3A
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Kerentanan Keluarga	Poin	7,6	9.835.178.648	7,4	1.239.499.800	7,2	2.379.154.824	7	2.525.580.831	6,8	2.612.441.788	6,6	2.706.897.011	6,4	DP2KBP3A
	Median Usia Perkawinan Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	18,7		18,9		19,1		19,3		19,5		19,7		19,9	DP2KBP3A
	Indeks Lansia Tangguh	Poin	50		50,25		50,5		50,75		60		60,25		60,5	DP2KBP3A
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhuk sosek	%	87,5	2.571.638.742	61	1.315.443.600	63	2.714.773.225	66	2.879.577.842	68	2.976.803.921	68	3.082.175.421	71	DP2KBP3A
Program Perlindungan Perempuan	Presentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif	%	100	174.524.964	100	237.681.600	100	310.952.510	100	330.090.203	100	341.442.819	100	353.787.997	100	DP2KBP3A
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	%	100	238.944.764	100	428.246.600	100	273.713.502	100	290.559.306	100	300.552.357	100	311.419.103	100	DP2KBP3A
Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin	N/A	193.904.928	59,77	313.505.400	60,79	425.494.307	61,77	451.681.519	62,43	467.215.961	62,43	484.108.582	63,2	DP2KBP3A
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan penyusunan kebijakan	%	100	-	0	52.254.600	100	248.046.343	100	265.589.606	100	276.533.596	100	288.789.490	100	DP2KBP3A
Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komperhensif	%	100	285.922.064	100	336.005.000	100	549.623.525	100	583.450.318	100	603.516.614	100	625.337.309	100	DP2KBP3A
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase layanan kepemudaan	%	10,34	9.596.636.945	10,34	5.262.407.400	10,4	11.586.762.557	10,45	12.299.874.356	10,5	12.722.897.387	10,55	13.182.905.378	10,6	Dispora
	Rasio Kewirausahaan Pemuda	%	2,18		2,2		2,22		2,25		2,27		2,28		2,29	Dispora
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indeks ketersedian ruang terbuka dan sarana olahraga	Poin	0,67	15.818.882.764	0,67	16.154.478.210	0,68	18.578.123.579	0,69	19.721.521.407	0,7	20.399.793.194	0,71	21.137.366.374	0,71	Dispora
	Indeks SDM Keolahragaan	Poin	0,31		0,31		0,31		0,32		0,33		0,33		0,33	Dispora
	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Poin	0,38		0,38		0,39		0,4		0,4		0,41		0,41	Dispora
	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Atlet	201		150		500		100		50		150		500	Dispora
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kepramukaan	%	5,77	668.835.000	5,8	1.010.137.000	5,85	1.206.492.860	5,9	1.280.746.932	5,95	1.324.794.979	5,95	1.372.694.153	6	Dispora
Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah																

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah	**PDRB per Kapita**	**Juta**	**32,50**		**34,09**		**38,79**		**41,19**		**44,17**		**48,03**		**53,10**	
	Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi	**%**	**2,14**		**2,14**		**2,14**		**2,14**		**2,14**		**2,14**		**2,14**	
Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94		5,07		6,05		6,06		6,08		6,12		6,19	
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	36,64		37,72		40,7		42,29		44,25		46,33		48,52	
	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	20,64		21,33		21,37		21,41		21,46		21,50		21,56	
	Tingkat Inflasi	%	1,46		2,5 ± 1		2,5 ± 1		2,5 ± 1		2,5 ± 1		2,5 ± 1		2,5 ± 1	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	%	88,25	3.285.271.040	100	5.589.126.600	100	4.712.138.777	100	5.002.149.188	100	5.174.185.442	100	5.361.262.849	100	DKPP
	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	2	5.929.914.800	2	17.324.906.000	2	4.712.138.777	2	5.002.149.188	2	5.174.185.442	2	5.361.262.849	2	Dispernakan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang terfasilitasi prasarananya	%	0,13	1.993.365.652	0,76	6.174.456.428	1,4	6.612.620.095	2,04	7.019.596.365	2,68	7.261.017.606	3,31	7.523.546.338	3,95	DKPP
	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik	%	100	8.992.183.327	100	4.577.044.480	100	6.612.620.095	100	7.019.596.365	100	7.261.017.606	100	7.523.546.338	100	Dispernakan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis	%	85	4.094.203.900	85	1.572.203.200	100	3.448.002.828	100	3.660.211.501	100	3.786.095.206	100	3.922.984.941	100	Dispernakan
	Presentase unit usaha pangan hewan yang memiliki sertifikat NKV/NKV	%	31,25		32,81		34,48		35,94		37,5		40,6		44,6	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Presentase ijin usaha pertanian yang terfasilitasi	%	100	-	0	1.836.000	100	24.213.340	100	25.703.559	100	26.587.568	100	27.548.866	100	DKPP
	Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi	%	85	20.970.000	85	28.082.000	100	173.879.513	100	179.114.438	100	179.691.979	100	181.023.663	100	Dispernakan
Program Penyuluhan Pertanian	Presentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	%	54,79	1.709.843.200	97,87	648.226.600	140,43	861.674.410	182,98	914.706.496	225,53	946.165.510	268,09	980.374.989	310,64	DKPP
	Presentase SDM petani yang ditingkatkan kompetensinya	%	20		20		20		20		20		20		20	
	Presentase kelompok peternakan yang dibina	%	100	572.815.000	100	71.663.000	100	861.674.410	100	914.706.496	100	946.165.510	100	980.374.989	100	Dispernakan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Presentase luas layanan irigasi	%	62	2.194.183.703	63	11.263.287.200	63,39	22.880.000.000	64	12.880.000.000	64,54	11.880.000.000	65,34	10.880.000.000	65,70	Dinas PUTR
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	51.585	2.842.738.730	53.133	2.785.163.250	54.727	3.196.766.789	56.368	3.411.288.678	58.059	3.541.072.453	59.801	3.681.499.592	61.595	Dispernakan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	220	16.050.000	226	230.134.600	234	237.064.769	241	239.345.934	248	240.699.138	255	242.170.653	263	Dispernakan
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	3.222	253.620.000	3.383	499.933.000	3.553	983.370.319	3.730	1.049.358.785	3.917	1.091.031.470	4.113	1.135.643.954	4.318	Dispernakan
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Sumber Daya Perikanan yang diawasi	%	100	279.532.600	100	59.856.000	100	173.879.513	100	179.114.438	100	179.691.979	100	181.023.663	100	Dispernakan
Program Peningkatan Daya	Peresentase pengembangan daya tarik wisata yang siap kunjung	%	3	2.405.234.667	3	1.420.322.508	3	3.466.561.131	3	3.679.911.982	3	3.806.473.235	3	3.944.099.757	3	Disparbud

Tarik Destinasi Pariwisata																
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	3.435.438	1.164.387.928	3.607.210	1.425.006.800	3.787.570	2.446.294.708	3.976.949	2.596.852.866	4.175.796	2.686.165.044	4.384.586	2.783.285.798	4.603.815	Disparbud
Program Pengembangan Ekraf Melalui Pemanfaatan & Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan memiliki Kekayaan Intelektual	%	100	247.177.528	100	849.013.600	100	377.303.180	100	400.524.450	100	414.299.475	100	429.278.851	100	Disparbud
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Presentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi	%	9	677.449.728	11	486.504.000	13	884.902.762	15	939.364.446	17	971.671.507	19	1.006.803.179	21	Disparbud
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	25,03	575.708.700	30,16	352.186.600	31,43	728.314.737	32,62	773.139.150	33,73	799.729.314	34,77	828.644.258	35,75	Diskop UKM
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	5,01	427.590.600	18,09	3.040.988.600	19,79	614.235.961	21,37	652.039.352	22,85	674.464.594	24,24	698.850.478	25,54	Diskop UKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	%	46,45	1.154.951.300	47,22	1.690.945.626	47,98	1.547.832.245	48,75	1.643.094.182	49,52	1.699.604.245	50,29	1.761.054.991	51,06	Diskop UKM
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Presentase koperasi aktif	%	65,21	104.181.600	66,47	95.722.600	67,64	505.344.058	68,73	536.445.654	69,75	554.895.344	70,71	574.958.093	71,6	Diskop UKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	%	1	899.046.100	2,4	1.953.624.990	2,5	1.468.468.377	2,58	1.558.845.834	2,60	1.612.458.389	2,63	1.670.758.296	2,70	Diskop UKM
Program Pengembangan UMKM	Presentase pengembangan UMKM	%	4	1.004.332.400	4,48	1.627.239.500	5,12	1.178.407.927	5,84	1.250.933.500	6,63	1.293.956.190	7,48	1.340.740.359	8,40	Diskop UKM
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Bandung Barat	%	N/A	109.318.000	2,8	149.371.300	3	234.871.703	3,3	249.326.973	3,6	257.901.943	3,8	267.226.623	4,1	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan investor yang berinvestasi	%	5	400.445.800	6	380.618.200	7	612.164.837	10	649.840.760	13	672.190.387	16	696.494.045	20	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Kepatuhan Teknis dan Administrasi Pelaku Usaha	%	100	408.488.764	100	424.696.200	100	694.197.137	100	736.921.770	100	762.266.328	100	789.826.764	100	DPMPTSP
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	50	89.376.000	60	179.706.200	70	158.736.511	75	168.506.011	80	174.301.349	90	180.603.374	100	Disperindag
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	30	463.182.853	35	717.393.000	45	507.230.612	50	538.448.317	55	556.966.883	70	577.104.531	80	Disperindag
Program Stabilisasi Harga Barang	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan	%	10	1.052.812.300	15	1.411.884.400	20	947.318.447	25	1.005.621.528	30	1.040.207.334	35	1.077.816.982	40	Disperindag

Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Barang Penting															
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang	Milyar	3.036,10	221.725.500	3.077,37	349.205.200	3.347,31	511.951.633	3.617,25	543.459.895	3.887,19	562.150.821	4.157,13	582.475.899	4.427,07	Disperindag
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat metrologi yang sesuai standar	%	50	100.000.000	50	92.172.000	50	115.466.569	50	122.573.004	60	126.788.592	65	131.372.749	80	Disperindag
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	%	40	138.863.732	45	140.000.000	55	223.216.507	65	236.954.454	70	245.103.902	85	253.965.858	90	Disperindag
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	50	3.078.339.328	65	8.207.240.200	75	3.652.549.672	80	3.885.547.096	85	4.027.554.619	90	4.180.922.405	100	Disperindag
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	50	-	0	50.000.000	70	260.819.270	80	268.671.656	85	269.537.968	90	271.535.495	100	Disperindag
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	25	200.000.000	35	200.000.000	40	230.933.138	45	245.146.008	50	253.577.184	55	262.745.499	60	Disperindag
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	85	1.430.747.033	80	1.572.003.433	85	1.726.851.768	85	1.833.131.530	90	1.896.177.447	95	1.964.735.477	100	Bag. Ekonomi Setda
Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan	%	10,49		9,98		9,63		8,64		7,46		6,18		5,63	
	Gini Rasio	Poin	0,400		0,369		0,367		0,366		0,364		0,363		0,360	
Program Pemberdayaan Sosial	Presentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS	%	100	2.130.975.100	100	1.164.726.400	100	2.688.329.495	100	2.853.783.778	100	2.951.932.444	100	3.058.662.261	100	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	10	1.733.549.900	20	1.506.658.300	40	2.165.016.068	60	2.298.262.822	80	2.377.305.752	90	2.463.259.415	100	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase penerima manfaat (individu/keluarga miskin) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	5,3	2.774.627.900	20	1.749.028.600	40	3.704.313.601	60	3.932.297.020	80	4.067.538.418	90	4.214.603.990	100	Dinas Sosial
	Presentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindugan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	44,97		47		55		60		80		90		100	Dinas Sosial
	Presentase pengelolaan data kemiskinan daerah	%	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	233.886.100	100	96.844.100	100	284.725.895	100	302.249.461	100	312.644.566	100	323.948.516	100	Dinas Sosial
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	%	23,18	1.744.973.900	3,37	5.175.000.000	11,58	7.130.747.600	25,95	7.130.747.600	44,44	7.000.747.600	69,08	7.030.747.600	100	Disperkim
Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,70		6,58		5,88		5,74		5,67		5,59		5,50	
Program Perencanaan	Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	%	N/A	-	0	52.473.000	50	130.409.635	60	134.335.828	70	134.768.984	80	135.767.747	90	Disnaker

Tenaga Kerja	(RTK) Mikro																
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi BNSP	%	0	3.730.739.072	42,86	1.727.842.100	45,45	3.436.533.158	48,15	3.652.135.844	50	3.781.928.792	51,85	3.922.541.819	53,70	Disnaker
	Persentase Pengukuran Produktifitas Perusahaan	%	N/A		0		50		60		70		80		90	Disnaker
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	%	7,51	790.899.328	9,11	396.940.200	23,26	941.830.552	23,56	999.795.879	26,49	1.034.181.326	27	1.071.573.098	27,15	Disnaker
Program Hubungan Industrial	Persentase Kumulatif Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB/Struktur Skala Upah)	%	42,00	1.221.563.748	46,15	6.405.913.300	50,52	1.277.833.060	55,09	1.359.211.071	59,88	1.408.749.017	64,86	1.462.266.247	70,06	Disnaker
	Persentase Kumulatif Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (LKS Bipartit)	%	22,98		28,63		34,68		41,13		47,98		55,24		62,90	Disnaker
	Presentase Kumulatif Perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah	%	27,22		32,78		38,47		44,31		50,28		56,39		62,64	Disnaker
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang ditempatkan pada lokasi transmigrasi sesuai alokasi yang ditetapkan oleh Kementrans/ Pemprov	%	N/A	-	0	89.519.000	50	86.939.757	51	89.557.219	52	89.845.989	53	90.511.832	54	Disnaker
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel																
Terwujudnya Birokrasi yang Berdaya Saing, Adaftif dan Berorientasi Pelayanan	**Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**	**Poin**	**3,72**		**3,80**		**3,92**		**4,02**		**4,11**		**4,20**		**4,28**	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	**Nilai**	80,77		81,58		82,41		83,27		84,17		85,12		86,13	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan	%	70	3.294.021.221	75	11.012.507.998	80	4.002.253.763	85	4.248.574.024	90	4.394.692.969	100	4.553.587.113	100	Bag. Hukum Setda
	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	80		80		85		90		95		100		100	Bag. Tapem Setda
	Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan	Katagori	Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	80	1.430.747.033	80	1.572.003.433	85	1.726.851.768	85	1.833.131.530	90	1.896.177.447	100	1.964.735.477	100	Bag. Pemb. Setda
	Tingkat kematangan UKPBJ	%	100	1.430.747.033	100	1.572.003.433	100	1.726.851.768	100	1.833.131.530	100	1.896.177.447	100	1.964.735.477	100	Bag ULP Setda
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas	Presentase pembentukan Ranperda Tahun n	%	67	33.700.440.286	100	19.534.128.450	100	44.166.062.371	100	45.351.219.516	100	46.608.030.205	100	47.785.134.876	100	Sekretariat DPRD

Dan Fungsi DPRD	Presentase ketepatan penetapan perda APBD Tahun n	%	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD
	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	%	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD
	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	98		100		100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD
	Persentase kebijakan anggaran yang dibahas	%	100		100		100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase Capaian kinerja Daerah	%	70,59	2.825.685.200	85	2.287.930.500	90	3.851.601.256	95	4.088.649.550	100	4.229.268.298	100	4.382.181.361	100	Bappelitbangda
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Nilai	95,6		100		100		100		100		100		100	Bappelitbangda
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	2.338.389.800	100	2.829.999.900	100	3.588.148.806	100	3.808.982.817	100	3.939.983.135	100	4.082.436.829	100	Bappelitbangda
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100		100		100		100		100		100		100	Bappelitbangda
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	%	100		100		100		100		100		100		100	Bappelitbangda
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	%	100	654.500.000	100	512.917.950	100	519.599.561	100	551.578.518	100	570.548.664	100	591.177.373	100	Bappelitbangda
Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase produk inovasi daerah yang dimanfaatkan	%	32,97	-	0	367.832.000	33,63	519.599.561	34,29	551.578.518	34,95	570.548.664	35,61	591.177.373	36,27	Bappelitbangda
	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	%	100		0		100		100		100		100		100	Bappelitbangda
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	38	545.364.757.506	38	511.663.313.455	37	339.123.336.666	36	359.994.814.065	35	372.375.924.055	34	385.839.516.165	30	BKAD
	Presentase alokasi belanja infrasturktur pelayanan publik	%	24,22		25		30		35		40		40		40	BKAD
	Presentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	100		100		100		100		100		100		100	BKAD
	Presentase penurunan silva	%	100		15		15		15		15		15		15	BKAD
	Presentase laporan keuangan tepat waktu	%	100		100		100		100		100		100		100	BKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase penambahan nilai aset tetap	%	0,15	4.065.925.435	2	1.465.081.050	2	6.106.352.080	2	6.482.169.889	2	6.705.107.707	2	6.947.537.009	2	BKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan daerah dari Sektor Pajak Daerah	%	98,24	7.929.869.978	100	7.624.371.400	100	10.222.969.175	100	10.852.145.781	100	11.225.377.854	100	11.631.241.657	100	Bapenda
Program Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	106	2.893.098.506	106	2.933.841.600	107	3.851.197.238	108	4.088.220.667	109	4.228.824.664	110	4.381.721.688	112	BKPSDM
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	30		30		31,2		31,5		31,7		31,9		32	BKPSDM
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	115		115		116		117		118		119		120	BKPSDM

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Nilai	82,5	3.016.793.200	82,5	2.593.877.200	83	3.604.406.730	84	3.826.241.341	85	3.957.835.223	86	4.100.934.375	87	BKPSDM
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	76,7	4.016.146.200	76,7	4.420.671.000	77	4.637.306.226	77,5	4.922.711.038	78	5.092.015.218	78,5	5.276.121.686	79	Itda
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	1.411.390.200	3	767.965.000	3	1.760.155.290	3	1.868.484.731	3	1.932.746.531	3	2.002.626.750	3	Itda
	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	69,85		70		72		74		76		78		79	Itda
Program Pengelolaan Arsip	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai	74,65	1.457.347.100	75,00	1.595.712.800	75,50	1.827.139.688	76,00	1.939.591.709	76,50	2.006.299.054	77,00	2.078.838.632	77,50	Disarpus
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	65,96		68,00		69,00		70,00		71,00		72,00		73,00	Disarpus
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	77,00	139.560.400	78,33	79.627.000	79,00	230.304.885	79,66	244.479.088	80,30	252.887.327	83,00	262.030.700	83,66	Disarpus
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Presentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	28,00	87.022.550	42	13.351.000	56	141.241.018	70	149.933.751	84	155.090.343	98	160.697.776	100	Disarpus
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Setda	Nilai	81,6	65.220.403.154	82,1	56.245.425.708	82,6	80.439.016.555	83,1	81.899.360.627	83,6	83.429.675.600	84,1	84.880.377.994	84,6	Setda
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Sekretariat DPRD	Nilai	72,46	83.744.976.643	73	73.145.210.137	76	108.695.775.455	79	111.448.189.093	82	114.362.698.813	85	117.096.477.387	88	Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Inspektorat Daerah	Nilai	83,81	21.725.628.395	84	22.988.375.437	84,5	22.791.641.784	85	23.050.109.168	85,5	23.314.937.063	86	23.571.790.200	86,5	Itda
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pendidikan	Nilai	84,77	721.725.909.299	85,5	478.050.034.572	87	589.036.884.948	88,5	594.222.051.280	89,5	599.442.004.993	90,5	604.596.208.821	92	Disdik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kesehatan	Nilai	83,1	359.762.455.674	84	409.231.718.225	85	203.006.146.148	86	204.826.006.680	87	206.660.703.632	88	208.469.656.892	89	Dinkes
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas PUTR	Nilai	64,41	22.146.557.736	70,91	22.893.885.730	76,41	24.926.100.383	79,91	25.248.114.638	83,41	25.580.495.932	86,91	25.900.461.654	89,41	DPUTR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	58,25	9.990.908.830	72,35	10.633.646.890	76,21	11.047.320.237	79,11	11.183.380.989	82,21	11.323.459.292	85,34	11.458.660.033	87,24	Disperkim
Program Penunjang Urusan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Satpol PP	Nilai	84,15	10.796.290.421	84,25	13.683.211.950	84,40	11.180.310.224	84,60	11.290.902.838	84,85	11.403.211.282	85,15	11.513.128.595	85,50	Satpol PP

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai	64,28	16.308.747.331	65	24.395.489.172	65,5	17.871.854.422	65,75	18.129.868.199	65,9	18.397.667.376	66	18.654.017.123	66,25	Disdamkar
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Sosial	Nilai	75,56	8.370.029.591	76,5	8.722.808.714	77,5	9.040.834.140	78,5	9.139.097.897	79,5	9.239.515.069	80	9.337.169.178	80,5	Dinas Sosial
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Tenaga Kerja	Nilai	79,33	7.185.489.990	79,83	7.910.947.456	80,33	8.307.425.609	80,83	8.410.645.977	81,33	8.516.965.918	81,83	8.619.533.061	82,33	Disnaker
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) DP2KBP3A	Nilai	86,55	13.653.270.074	86,6	14.390.060.659	86,65	14.632.985.530	86,7	14.790.564.348	86,75	14.951.501.515	86,8	15.108.104.135	86,85	DP2KBP3A
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	68,51	14.191.465.014	69,51	12.566.384.928	70,51	15.754.355.141	71,51	15.958.774.739	72,51	16.169.824.160	73,51	16.372.942.573	74,51	DLH
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	72,73	13.377.753.615	73,5	12.124.105.792	74,85	14.720.679.093	76	14.898.556.966	77,25	15.081.491.359	78,5	15.258.247.903	80	Disdukcapil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai	79,4	6.533.350.890	80	7.713.205.012	80,5	7.554.150.275	81	7.644.009.389	81,2	7.736.340.073	81,5	7.825.633.990	82	DPMD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perhubungan	Nilai	77,47	11.622.036.722	78,00	13.909.279.414	79	12.986.775.635	80	13.144.573.394	81	13.306.907.646	82	13.463.709.882	83	Dishub
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kominfo dan Statistik	Nilai	87,8	10.897.014.978	88	8.021.674.073	88,2	13.666.042.246	88,4	13.899.717.111	88,6	14.144.028.683	88,8	14.376.169.318	89	Diskominfotik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	70,99	15.500.309.183	71,5	16.547.711.856	72	15.835.076.086	72,5	15.963.566.862	73	16.092.047.626	73,5	16.219.784.491	74	Disperindag
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Koperasi dan UKM	Nilai	72,77	6.275.293.534	73,5	7.262.416.948	74,5	7.445.155.155	75,5	7.543.244.770	77,5	7.644.596.284	79	7.742.060.298	82	Diskop UKM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) DPMPTSP	Nilai	81,12	8.192.417.096	81,7	8.679.902.293	82,25	9.154.839.645	82,75	9.263.889.769	83,3	9.375.948.206	83,8	9.484.312.289	84,15	DPMPTSP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai	80,57	6.951.642.060	83	6.816.109.466	85	7.926.939.508	90	8.035.611.738	91	8.148.124.131	95	8.256.099.800	95	Dispora
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai	74,61	9.255.014.366	75,11	9.491.537.342	75,61	10.640.801.299	76,11	10.785.086.925	76,61	10.934.389.441	77,11	11.077.751.485	77,61	Disparbud
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai	71,96	25.851.065.184	74,46	22.791.565.055	77,38	30.353.567.644	80,46	30.710.103.998	82,18	31.076.178.747	84,76	31.430.476.660	87,6	DKPP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perikanan dan Peternakan	Nilai	73,55	12.308.195.576	75	13.608.557.893	76,5	16.529.343.662	78	16.760.516.489	80	17.000.092.934	82	17.229.780.409	84	Dispernakan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai	84,87	7.273.044.561	85,37	6.966.354.797	85,87	8.000.395.163	86,37	8.116.628.157	86,87	8.237.305.105	87,37	8.352.787.921	87,87	Disarpus
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Bappelitbangda	Nilai	83,71	11.803.633.340	83,76	12.911.075.097	83,81	12.995.998.270	83,86	13.136.033.755	83,91	13.279.059.258	83,96	13.418.227.141	84,01	Bappelitbangda
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	79,45	106.111.424.741	80	135.978.002.187	80,5	152.788.229.000	81	155.098.484.403	81,5	157.501.453.697	82	159.796.731.347	82,5	BKAD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Pendapatan Daerah	Nilai	81,6	26.641.107.983	82	27.431.150.769	82,5	27.489.612.592	83	27.739.271.925	83,5	27.991.220.084	84	28.239.379.211	84	Bapenda
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Nilai	79,88	27.148.886.342	80.00	12.546.041.912	80,5	34.640.637.655	81	35.042.530.537	81,5	35.454.875.509	82	35.854.249.779	82,5	BKPSDM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	55,67	7.224.658.827	56,17	7.623.751.820	56,67	9.242.586.384	57,17	9.381.826.104	57,67	9.526.629.776	58,17	9.664.967.149	58,67	BPBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	80,37	4.466.319.827	80,8	5.241.301.385	81,5	4.875.389.369	82	4.928.230.556	82,5	4.982.220.096	83	5.034.733.594	83,5	Bakesbangpol

Kabupaten/Kota																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Lembang	Nilai	62,51	4.607.676.773	66,69	4.885.494.986	68,00	4.656.297.225	69,31	4.699.604.666	70,62	4.743.388.160	71,92	4.786.434.156	73,23	Kec. Lembang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Parongpong	Nilai	62,35	4.065.157.086	65,38	4.057.795.877	66,69	4.166.471.912	68,00	4.203.032.870	69,31	4.239.829.869	70,62	4.276.172.650	71,92	Kec. Parongpong
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cisarua	Nilai	61,06	3.753.827.939	64,08	3.562.996.589	65,38	3.791.194.444	66,69	3.827.937.006	68,00	3.865.195.601	69,31	3.901.714.632	70,62	Kec. Cisarua
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cikalongwetan	Nilai	61,3	4.132.807.892	64,08	4.400.628.523	65,38	4.155.261.072	66,69	4.191.310.548	68,00	4.227.559.613	69,31	4.263.394.472	70,62	Kec. Cikalongwetan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cipeundeuy	Nilai	59,37	3.004.261.909	61,46	3.266.454.452	62,77	3.091.363.438	64,08	3.121.766.986	65,38	3.152.629.756	66,69	3.182.847.845	68,00	Kec. Cipeundeuy
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Ngamprah	Nilai	62,21	3.326.846.579	65,38	3.171.689.280	66,69	3.298.275.178	68,00	3.325.978.786	69,31	3.353.761.839	70,62	3.381.301.649	71,92	Kec. Ngamprah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cipatat	Nilai	59,34	3.550.051.972	62,77	3.663.213.425	66,69	3.621.265.445	68,00	3.653.377.746	69,31	3.685.724.293	70,62	3.717.644.552	71,92	Kec. Cipatat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Padalarang	Nilai	62,23	3.699.696.977	65,38	3.688.370.115	66,69	3.743.758.985	68,00	3.780.558.482	69,31	3.817.912.349	70,62	3.854.487.394	71,92	Kec. Padalarang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Batujajar	Nilai	62,34	3.596.015.110	65,38	3.727.441.372	66,69	3.610.377.943	68,00	3.638.602.609	69,31	3.666.732.130	70,62	3.694.792.613	71,92	Kec. Batujajar
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cihampelas	Nilai	57,77	3.940.157.755	61,46	4.091.635.676	62,77	3.947.063.391	64,08	3.980.133.898	65,38	4.013.292.320	66,69	4.046.167.403	68,00	Kec. Cihampelas
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cililin	Nilai	60,93	3.302.705.601	61,46	3.540.808.138	62,77	3.382.883.735	64,08	3.416.158.628	65,38	3.449.936.416	66,69	3.483.008.329	68,00	Kec. Cililin
Program Penunjang Urusan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cipongkor	Nilai	61,00	3.045.533.971	62,77	3.248.771.704	64,08	3.071.212.031	65,38	3.098.551.580	66,69	3.126.098.894	68,00	3.153.274.816	69,31	Kec. Cipongkor

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Rongga	Nilai	60,22	3.069.494.265	61,46	3.694.799.259	62,77	3.142.848.965	64,08	3.173.460.714	65,38	3.204.513.483	66,69	3.234.938.830	68,00	Kec. Rongga
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Sindangkerta	Nilai	60,83	2.948.438.349	64,08	3.400.931.805	65,38	3.054.005.668	66,69	3.082.242.940	68,00	3.110.777.923	69,31	3.138.844.922	70,62	Kec. Sindangkerta
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Gununghalu	Nilai	61,16	3.037.456.604	64,08	3.106.127.794	65,38	3.044.843.198	66,69	3.071.158.609	68,00	3.097.611.558	69,31	3.123.770.427	70,62	Kec. Gununghalu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Saguling	Nilai	59,7	3.628.516.026	62,77	3.348.060.428	64,08	3.663.877.149	65,38	3.708.111.252	66,69	3.753.600.550	68,00	3.797.555.837	69,31	Kec. Saguling
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	Indeks Pemerintah Digital	Poin	N/A		-		1.2		1.4		1.6		1.8		2.00	
	Indeks SPBE	Poin	3,78		3,78		-		-		-		-		-	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai Teknologi Digital	Nilai	N/A	25.501.358.639	-	6.282.506.000	1,00	29.760.848.722	1,75	31.592.491.709	2,00	32.679.035.458	2,25	33.860.575.873	2,50	Diskominfotik
	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	3,75		3,75		-		-		-		-		-	Diskominfotik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai prinsip Satu Data Indonesia	Nilai	3	707.797.728	3	356.009.200	3,04	836.637.967	3,08	888.129.176	3,12	918.674.129	3,16	951.889.633	3,2	Diskominfotik
	Nilai Kualitas Data	Nilai	3		3		3,04		3,08		3,12		3,16		3,2	Diskominfotik
	Nilai Proses Bisnis statistik	Nilai	2,64		2,64		2,67		2,69		2,71		2,73		2,75	Diskominfotik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Keamanan Siber	Nilai	0,09	951.897.366	0,09	300.000.000	0.09	1.239.847.649	0.11	1.316.154.554	0.15	1.361.420.357	0.18	1.410.643.755	0.22	Diskominfotik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,26		85,94		86,38		87,83		88,98		90,28		91,20	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemda	%	N/A	11.966.696.405	60	1.110.223.635	64	16.944.035.042	68	17.986.862.256	72	18.605.474.834	76	19.278.172.793	80	Diskominfotik
Program Pendaftaran Penduduk	Presentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	10,3	3.276.939.140	12	2.992.032.500	13	4.584.670.444	14	4.866.835.767	15	5.034.218.258	16	5.216.235.024	17	Disdukcapil
	Presentase kepemilikan kartu identitas anak	%	27		28		30		32		34		36		38	Disdukcapil
Program Pencatatan Sipil	Persentase Anak Berusia 0 - 4 Tahun yang memiliki akta kelahiran	%	91,37	329.471.948	92	244.348.800	93	458.767.154	94	487.002.156	95	503.751.362	96	521.964.953	97	Disdukcapil
	Persentase Anak Berusia 0 - 18 Tahun yang memiliki akta kelahiran	%	91,12		92,20		93,11		94		95		96		98	Disdukcapil

	Persentase Kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	%	61,63		62,52		63,55		64,70		65,85		66,75		67,85	Disdukcapil
	Persentase kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100		100		100		100		100		100		100	Disdukcapil
	Persentase Kepemilikan akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai	%	52,75		53		53,5		54		54,50		55		55,5	Disdukcapil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	N/A	2.005.048.128	10,87	1.129.064.900	13,04	2.527.434.914	15,22	2.682.986.877	17,39	2.775.261.416	19,57	2.875.603.531	21,74	Disdukcapil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	8.945.000	100	77.114.000	100	19.583.130	100	20.788.381	100	21.503.345	100	22.280.818	100	Disdukcapil
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Waktu Proses Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai SOP	%	78,03	469.237.400	85	535.480.000	85,50	703.392.779	86,00	746.683.361	86,50	772.363.644	87,00	800.289.158	87,50	DPMPTSP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase pamanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	57.120.000	100	59.386.250	100	103.919.912	100	110.315.704	100	114.109.733	100	118.235.475	100	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	100	155.406.600	100	153.389.800	100	629.827.255	100	637.774.625	100	646.364.588	100	654.371.871	100	Disperkim
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Presentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	-	0	-	0	196.278.902	100	195.576.882	100	194.940.486	100	194.319.176	100	Disperkim
Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Prog. Tanah Kelebihan Mak. dan Tanah Absentee	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap didistribusikan yang berasal dari kelebihan maks. dan tanah Absentee	%	100	680.458.100	100	388.722.800	100	848.775.200	100	1.048.775.200	100	848.775.200	100	898.775.200	100	Disperkim
Program Penatagunaan Tanah	Presentase perencanaan penggunaan tanah	%	100	4.077.219.635	100	5.414.143.800	100	2.627.481.400	100	3.127.481.400	100	5.477.481.400	100	3.077.481.400	100	Disperkim
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Presentase tanah kosong yang dikelola	%	0	872.284.649	100	-	0	500.000.000	100	550.000.000	100	305.000.000	100	350.000.000	100	Disperkim
Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	%	12,0	26.524.788.333	20,75	20.179.506.266	32,08	28.250.000.000	50,94	12.790.000.000	67,92	11.200.000.000	81,13	1.200.000.000	88,68	Dinas PUTR
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Lembang	%	100	390.102.600	100	649.924.800	100	367.563.394	100	390.185.226	100	403.604.658	100	418.197.354	100	Kec. Lembang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Parongpong	%	100	627.126.600	100	546.137.600	100	453.482.454	100	481.392.207	100	497.948.473	100	515.952.256	100	Kec. Parongpong

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cisarua	%	100	424.138.350	100	472.852.000	100	482.124.787	100	511.797.344	100	529.399.318	100	548.540.234	100	Kec. Cisarua
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cikalongwetan	%	100	227.156.000	100	321.817.000	100	228.100.018	100	242.138.522	100	250.466.263	100	259.522.100	100	Kec. Cikalongwetan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipeundeuy	%	100	208.945.200	100	481.955.300	100	241.813.787	100	256.696.310	100	265.524.730	100	275.125.019	100	Kec. Cipeundeuy
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Ngamprah	%	100	346.434.800	100	271.526.400	100	415.641.964	100	441.222.810	100	456.397.551	100	472.899.022	100	Kec. Ngamprah
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipatat	%	100	250.473.200	100	409.727.900	100	315.565.680	100	334.987.292	100	346.508.332	100	359.036.658	100	Kec. Cipatat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Padalarang	%	100	247.274.400	100	417.395.800	100	270.121.176	100	286.745.889	100	296.607.788	100	307.331.914	100	Kec. Padalarang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Batujajar	%	100	322.292.600	100	547.075.000	100	357.473.132	100	379.473.955	100	392.525.001	100	406.717.101	100	Kec. Batujajar
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cihampelas	%	100	349.050.800	100	564.319.800	100	353.604.176	100	375.366.882	100	388.276.676	100	402.315.174	100	Kec. Cihampelas
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cililin	%	100	243.449.800	100	378.851.200	100	243.639.165	100	258.634.032	100	267.529.095	100	277.201.854	100	Kec. Cililin
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipongkor	%	100	372.859.900	100	474.116.000	100	370.973.212	100	393.804.902	100	407.348.824	100	422.076.894	100	Kec. Cipongkor
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Rongga	%	100	142.711.400	100	349.243.000	100	176.138.964	100	186.979.505	100	193.410.192	100	200.403.114	100	Kec. Rongga
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Sindangkerta	%	100	230.763.000	100	438.670.500	100	260.843.817	100	276.897.551	100	286.420.741	100	296.776.545	100	Kec. Sindangkerta
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Gununghalu	%	100	136.153.800	100	71.638.800	100	156.238.394	100	165.854.147	100	171.558.280	100	177.761.127	100	Kec. Gununghalu
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Saguling	%	100	225.312.000	100	565.102.000	100	237.961.102	100	252.606.510	100	261.294.272	100	270.741.605	100	Kec. Saguling
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan																

Aksebilitas Wilayah																
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Intregasi antar Wilayah	**Indeks Infrastruktur**	**Poin**	**-**		**71,84**		**74,5**		**77,17**		**79,98**		**82,95**		**84,05**	
Pemerataan Sapras Perumahan dan Permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	-		43,29		44,32		45,35		46,38		47,41		50,69	
Program Kawasan Permukiman	Presentase Pengurangan luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani	%	35,57	4.467.660.300	97	4.581.495.000	94	5.730.747.600	91	5.730.747.600	86	5.680.747.600	82	5.630.747.600	78	Disperkim
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Presentase peningkatan PSU perumahan formal yang sudah serah terima ke Pemda	%	66,67	5.848.175.308	100	7.308.667.559	100	4.806.869.600	100	4.756.869.600	100	4.656.869.600	100	4.706.869.600	100	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	11,71	9.202.812.337	27,48	2.795.029.000	31,1	9.500.000.000	34,73	9.500.000.000	38,36	9.500.000.000	41,98	9.300.000.000	45,61	Dinas PUTR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2	3.640.077.156	5,94	916.199.000	11,32	10.686.984.275	16,69	9.686.984.275	22,07	7.186.984.275	27,44	7.000.000.000	32,82	Dinas PUTR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	68,93	1.102.523.328	70,33	2.420.052.208	71,33	3.900.000.000	72,53	3.900.000.000	73,73	3.900.000.000	74,93	3.900.000.000	76,13	Dinas PUTR
Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,55		25,11		24,67		24,23		23,79		23,35		23,05	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	54,61	66.133.100.528	56,61	103.791.299.227	60,44	156.448.668.295	65,29	152.082.263.182	69,6	148.682.069.510	74,53	144.742.722.147	78,27	Dinas PUTR
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Konektifitas transportasi darat	%	8,50	14.442.972.633	12,43	29.516.078.167	18,63	24.781.000.000	24,83	24.781.000.000	31,03	23.781.000.000	37,23	28.781.000.000	43,43	Dishub
	Presentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kebutuhan	%	24,09		44,58		48,70		52,81		56,92		61,03		65,14	
	Ketersediaan Simpul transportasi yang terkelola	%	38,91		41,67		44,69		48,00		61,64		65,63		70,00	
Program Pengelolaan Pelayaran	konektifitas transportasi pelayaran	%	0,35	324.143.400	0,47	854.740.400	0,65	483.443.444	0,76	496.416.220	3,05	510.173.319	3,7	523.057.952	4,06	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan																
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Tangguh	**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	Ton CO2eq/21 0 IDR Milyar	-		**2,63**		**2,94**		**3,28**		**3,69**		**4,24**		**4,65**	
Meningkatnya	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,43		59,59		59,84		60,09		60,34		60,60		60,85	

Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK - Kumulatif	Ton Co2eq	-		256.969,37		286.294,48		319.167,57		359.667,39		415.351,77		480.259,45	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase ketersediaan kajian lingkungan hidup	%	42,86	640.923.250	100	1.300.000.000	100	868.220.480	100	891.518.408	100	916.224.907	100	939.364.538	100	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air sungai yang status mutu airnya meningkat	%	N/A	870.206.600	1,5	1.550.481.900	1,5	1.132.616.282	1,5	1.276.569.769	1,5	1.410.000.000	1,5	1.460.000.000	1,5	DLH
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan	%	-	414.425.600	12	220.614.700	12	326.707.438	12	376.707.438	12	376.707.438	12	376.707.438	12	DLH
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Kegiatan dan/atau usaha yang diawasi dalam Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup	%	17.57	746.542.150	60	304.750.000	64	396.707.438	66	446.707.438	68	446.707.438	70	496.707.438	72	DLH
	Persentase Kegiatan dan/atau Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan dan atau Izin PPLH pada tahun ke-n	%	N/A		70		70		70		70		70		70	
Program Peningkatan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Persentase lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	626.641.300	20	374.750.000	20	426.707.438	20	571.918.223	20	476.707.438	20	476.707.438	20	DLH
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH	Entitas	25	143.613.200	27	70.000.000	27	259.374.668	27	266.334.757	27	273.715.647	27	280.628.446	27	DLH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100	211.168.000	100	150.000.000	100	325.852.812	100	334.596.784	100	343.869.408	100	352.553.969	100	DLH
Program Pengelolaan Persampahan	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	N/A	32.780.460.260	46,84	21.570.736.600	55,87	18.157.205.569	66,22	18.333.134.322	86,34	23.710.300.463	95,66	26.760.300.463	100	DLH
	Presentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	N/A		2,20		2,49		2,82		7,64		21,99		23,21	DLH
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase RTH Kehati yang terkelola	%	100	1.325.993.621	100	60.000.000	100	326.707.438	100	376.707.438	100	376.707.438	100	376.707.438	100	DLH
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana persampahan	%	36	36.716.400	36	654.738.400	46,48	10.300.000.000	51,58	8.300.000.000	56,68	5.300.000.000	61,78	4.300.000.000	66,88	Dinas PUTR
Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	81,62		81,32		80,68		80,38		79,80		78,84		78,61	

dan Perubahan Iklim serta Ketahanan air dan Kemandirian Pangan															
Program Penanggulangan Bencana	Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	100	2.640.451.260	100	5.449.652.991	100	8.914.534.012	100	7.914.534.012	100	6.914.534.012	100	5.116.853.800	100	BPBD
	Presentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100		100		100		100		100		100		100	BPBD
	Presentase penanganan pasca bencana	%	100		100		100		100		100		100		100	BPBD
Program Penanganan Bencana	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	1.151.552.800	100	1.360.005.900	100	1.412.896.973	100	1.499.854.266	100	1.551.437.955	100	1.607.531.614	100	Dinsos
Program Pengembangan Perumahan	Presentase penanganan rumah korban bencana yang tertangani	%	72,22	1.994.700.000	100	3.001.737.301	100	3.568.534.600	100	3.618.534.600	100	3.968.534.600	100	3.518.534.600	100	Disperkim
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase penyelenggaraan penataan ruang	%	42,00	3.210.005.800	51,25	3.148.659.000	66,25	2.400.000.000	72,5	2.120.000.000	78,75	1.869.467.318	80,42	2.459.467.318	88,75	Dinas PUTR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku	(m3/detik)	4,55	4.388.367.405	4,55	3.136.140.181	5,12	5.720.000.000	5,69	5.720.000.000	6,28	5.720.000.000	6,87	5.720.000.000	7,49	Dinas PUTR
	Presentase perlindungan rawan banjir	%	16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7	Dinas PUTR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Presentase tenaga kerja konstruksi tersertifikasi	%	6,18	489.133.156	7,31	399.476.000	16,11	720.000.000	37,14	720.000.000	58,17	720.000.000	79,09	720.000.000	100	Dinas PUTR
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Presentase penataan bangunan dan lingkungan	%	0	402.161.328	17,65	51.575.000	23,53	500.000.000	29,41	650.000.000	35,29	650.000.000	41,18	750.000.000	47,06	Dinas PUTR
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase penanganan bencana pertanian	%	0	-	0	200.000.000	100	200.897.974	100	213.262.318	100	220.596.935	100	228.572.819	100	DKPP
	Presentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	0		0		100		100		100		100		100	
	Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak	%	100	260.982.000	100	89.350.000	100	100.448.987	100	106.631.159	100	110.298.468	100	114.286.410	100	Dispernakan
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Presentase sarpras pangan yang terbangun	%	0	341.421.128	100	4.449.333.000	100	584.919.849	100	620.918.968	100	642.273.903	100	665.495.904	100	DKPP
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)	Score	92,1	2.415.331.212	92,5	4.477.582.825	93	2.467.553.836	93,5	2.619.420.394	94	2.709.508.725	94,5	2.807.473.492	95	DKPP
	Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)	Score	80,29		80,8		81,3		82,4		83,5		84,6		85,7	DKPP
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Tahan Pangan	%	87,88	422.485.228	88,48	394.682.800	89,7	573.393.357	90,3	608.683.074	90,91	629.617.187	92,12	652.381.572	93,33	DKPP
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	31,33	242.180.564	64,67	266.009.000	98	275.266.758	131,33	292.208.158	164,67	302.257.917	198	313.186.329	220	DKPP
Mewujudkan Kondisi yang																

Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal																
Terwujudnya Kondisi Harmoni dan Kondusivitas Wilayah	**Indeks Harmoni**	**Poin**	-		6,50		6,60		6,70		6,80		6,90		7,00	
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penyelamatan	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (IPKKU Linmas)	Poin	56,71		58,48		60,83		62,49		64,72		66,46		69,45	
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	5.736.125.345	100	4.247.664.400	100	5.911.786.711	100	6.275.629.919	100	6.491.464.318	100	6.726.169.148	100	Satpol PP
	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	N/A		16,02		32,04		48,07		64,09		83,32		100	Satpol PP
	Presentase penegakan perda dan perkada	%	100		100		100		100		100		100		100	Satpol PP
	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	0		100		100		100		100		100		100	Satpol PP
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Lembang	%	100	1.138.150.000	100	1.031.942.400	100	1.064.830.479	100	1.130.365.884	100	1.169.241.956	100	1.211.516.968	100	Kec. Lembang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di kec. Lembang	%	100	-	0	68.427.400	100	766.796.783	100	813.989.588	100	841.984.699	100	872.427.426	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Parongpong	%	100	568.800.000	100	528.560.000	100	557.553.163	100	591.867.989	100	612.223.789	100	634.359.300	100	Kec. Parongpong
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Parongpong	%	100	-	0	14.280.000	100	503.866.801	100	534.877.479	100	553.273.235	100	573.277.335	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cisarua	%	100	668.120.000	100	670.440.000	100	633.912.852	100	672.927.265	100	696.070.894	100	721.237.974	100	Kec. Cisarua
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cisarua	%	100	-	0	4.970.000	100	544.329.582	100	577.830.557	100	597.703.576	100	619.314.095	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cikalongwetan	%	100	962.199.200	100	986.400.400	100	901.514.845	100	956.998.926	100	989.912.481	100	1.025.703.672	100	Kec. Cikalongwetan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cikalongwetan	%	100	-	0	39.050.000	100	650.106.277	100	690.117.320	100	713.852.158	100	739.662.135	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipeundeuy	%	100	861.724.600	100	861.171.800	100	805.932.903	100	855.534.356	100	884.958.293	100	916.954.770	100	Kec. Cipeundeuy

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipeundeuy	%	100	-	0	51.870.000	100	592.167.598	100	628.612.783	100	650.232.328	100	673.742.072	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Ngamprah	%	100	813.207.920	100	997.508.400	100	769.428.776	100	816.783.568	100	844.874.771	100	875.421.991	100	Kec. Ngamprah
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Ngamprah	%	100	-	0	20.000.000	100	631.581.207	100	670.452.118	100	693.510.620	100	718.585.131	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipatat	%	100	65.058.800	100	951.109.600	100	69.860.784	100	74.160.393	100	76.710.952	100	79.484.507	100	Kec. Cipatat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipatat	%	100	-	0	20.000.000	100	678.761.534	100	720.536.176	100	745.317.193	100	772.264.818	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Padalarang	%	100	721.182.400	100	740.483.000	100	675.866.571	100	717.463.042	100	742.138.366	100	768.971.058	100	Kec. Padalarang
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Padalarang	%	100	-	0	20.000.000	100	670.216.199	100	711.464.915	100	735.933.949	100	762.542.314	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Batujajar	%	100	516.604.400	100	546.210.000	100	489.476.392	100	519.601.407	100	537.471.781	100	556.904.565	100	Kec. Batujajar
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Batujajar	%	100	-	0	30.000.000	100	463.302.218	100	491.816.333	100	508.731.110	100	527.124.749	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cihampelas	%	100	746.740.600	100	747.604.600	100	710.125.508	100	753.830.458	100	779.756.547	100	807.949.359	100	Kec. Cihampelas
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cihampelas	%	100	-	0	42.600.000	100	530.600.134	100	563.256.125	100	582.627.893	100	603.693.337	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cililin	%	100	833.045.800	100	836.291.400	100	771.685.141	100	819.178.802	100	847.352.383	100	877.989.183	100	Kec. Cililin
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cililin	%	100	-	0	151.276.400	100	622.199.348	100	660.492.848	100	683.208.827	100	707.910.867	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipongkor	%	100	1.028.085.000	100	990.750.000	100	979.908.506	100	1.040.217.355	100	1.075.992.997	100	1.114.896.508	100	Kec. Cipongkor

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipongkor	%	100	-	0	87.320.000	100	562.576.941	100	597.200.958	100	617.740.172	100	640.075.133	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Rongga	%	100	640.873.600	100	587.765.000	100	608.284.815	100	645.721.940	100	667.929.911	100	692.079.528	100	Kec. Rongga
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Rongga	%	100	-	0	10.000.000	100	510.193.454	100	541.593.508	100	560.220.245	100	580.475.521	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Sindangkerta	%	100	976.873.200	100	873.418.800	100	931.622.520	100	988.959.589	100	1.022.972.350	100	1.059.958.851	100	Kec. Sindangkerta
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Sindangkerta	%	100	-	0	62.220.000	100	553.926.557	100	588.018.182	100	608.241.578	100	630.233.109	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Gununghalu	%	100	746.526.400	100	674.400.600	100	698.745.071	100	741.749.608	100	767.260.207	100	795.001.202	100	Kec. Gununghalu
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Gununghalu	%	100	-	0	20.000.000	100	544.621.475	100	578.140.415	100	598.024.090	100	619.646.198	100	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Saguling	%	100	419.210.000	100	524.274.800	100	397.256.629	100	421.705.942	100	436.209.450	100	451.981.002	100	Kec. Saguling
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Saguling	%	100	-	0	20.000.000	100	412.079.419	100	437.441.007	100	452.485.682	100	468.845.716	100	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	%	82	2.763.422.200	84	7.478.328.600	87	3.328.361.842	90	3.533.207.164	93	3.654.722.877	95	3.786.862.725	100	Disdamkar
Program Penanggulangan Bencana	Presentase penanggulangan bencana	%	100	1.320.225.630	100	1.828.409.669	100	1.876.784.329	100	1.927.146.173	100	1.980.552.850	100	2.030.572.513	100	BPBD
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	85,71	1.224.433.600	86	1.283.618.500	86,5	1.588.035.973	87	1.685.772.263	88	1.743.750.131	89	1.806.797.012	90	Bakesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Presentase pendidikan politik pada kader parpol	%	N/A	4.460.550.800	50	6.256.615.000	55	5.343.950.891	60,00	5.672.846.423	65	5.867.949.610	70	6.080.110.695	75	Bakesbangpol

Politik																
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	60	339.035.000	70	988.828.000	71	611.637.963	72	649.281.459	73	671.611.851	74	695.894.591	75	Bakesbangpol
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Presentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan	%	83,33	285.300.000	84	385.027.333	85	481.418.615	86	511.047.711	87	528.623.903	88	547.736.783	90	Bakesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100	1.661.158.000	100	3.567.925.800	100	2.970.357.860	100	3.153.169.688	100	3.261.614.974	100	3.379.541.647	100	Bakesbangpol
Meningkatnya Pembangunan Berbasis Desa dan Budaya Lokal	**Indeks Desa**	**Poin**	**0,8436**		**0,7585**		**0,7765**		**0,799**		**0,8185**	-	**0,8350**		**0,8585**	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Presentase Desa Mandiri	Poin	41,82		49,09		62,42		74,55		85,45		94,55		100,00	
Program Penataan Desa	Presentase fasilitasi penataan desa	%	33,33	467.708.600	45	1.656.041.100	57	686.335.250	69	728.576.019	81	753.633.546	93	780.881.856	96	DPMD
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Presentase kerjasama yang terfasilitasi	%	33,33	443.016.000	45	683.122.400	57	842.182.094	69	894.014.518	81	924.761.884	93	958.197.495	96	DPMD
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase aparatur desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	33,33	6.263.348.904	45	5.271.084.300	57	7.516.604.268	69	7.979.216.596	81	8.253.641.544	93	8.552.059.503	100	DPMD
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	87,31	6.786.028.048	88	12.272.164.200	90	3.689.676.280	91	3.916.758.839	92	4.051.465.840	93	4.197.950.293	95	DPMD
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Lembang	%	100	2.296.312.400	100	630.215.450	100	2.276.583.862	100	2.416.697.099	100	2.499.813.276	100	2.590.196.311	100	Kec. Lembang
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Lembang	%	100	18.465.000	100	20.601.000	100	18.099.893	100	19.213.858	100	19.874.670	100	20.593.257	100	

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Parongpong	%	100	1.275.429.800	100	436.350.000	100	1.358.807.932	100	1.442.436.293	100	1.492.045.237	100	1.545.991.497	100	Kec. Parongpong
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Parongpong	%	100	36.750.000	100	20.000.000	100	36.023.345	100	38.240.416	100	39.555.598	100	40.985.767	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cisarua	%	100	1.322.094.600	100	848.895.000	100	1.323.206.280	100	1.404.643.524	100	1.452.952.681	100	1.505.485.514	100	Kec. Cisarua
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cisarua	%	100	78.895.000	100	110.880.000	100	81.525.486	100	86.543.004	100	89.519.431	100	92.756.088	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cikalongwetan	%	100	2.045.685.800	100	718.909.200	100	2.016.716.645	100	2.140.836.254	100	2.214.464.895	100	2.294.530.899	100	Kec. Cikalongwetan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cikalongwetan	%	100	69.565.000	100	81.000.000	100	100.375.841	100	106.553.511	100	110.218.149	100	114.203.187	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipeundeuy	%	100	1.751.164.400	100	590.819.100	100	1.694.280.259	100	1.798.555.395	100	1.860.412.154	100	1.927.677.057	100	Kec. Cipeundeuy
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipeundeuy	%	100	119.031.200	100	140.489.200	100	127.625.566	100	135.480.331	100	140.139.834	100	145.206.717	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Ngamprah	%	100	2.074.529.000	100	788.423.400	100	2.025.275.007	100	2.149.921.344	100	2.223.862.444	100	2.304.268.225	100	Kec. Ngamprah
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Ngamprah	%	100	56.748.000	100	65.642.000	100	55.625.926	100	59.049.446	100	61.080.302	100	63.288.716	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipatat	%	100	2.224.865.300	100	719.145.600	100	2.170.056.213	100	2.303.613.166	100	2.382.840.107	100	2.468.993.870	100	Kec. Cipatat
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipatat	%	100	950.139.000	100	88.069.000	100	874.293.939	100	928.102.699	100	960.022.441	100	994.732.930	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Padalarang	%	100	2.241.703.100	100	620.281.300	100	2.187.261.355	100	2.321.877.204	100	2.401.732.291	100	2.488.569.119	100	Kec. Padalarang
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Padalarang	%	100	74.881.200	100	94.437.200	100	79.226.854	100	84.102.901	100	86.995.407	100	90.140.806	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di	%	100	1.482.824.400	100	551.175.000	100	1.465.191.486	100	1.555.367.265	100	1.608.860.184	100	1.667.029.995	100	Kec. Batujajar

Dan Kelurahan	Kec. Batujajar															
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Batujajar	%	100	62.424.400	100	131.124.800	100	72.585.815	100	77.053.137	100	79.703.185	100	82.584.926	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cihampelas	%	100	1.643.477.600	100	677.604.800	100	1.523.586.554	100	1.617.356.280	100	1.672.981.154	100	1.733.469.317	100	Kec. Cihampelas
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cihampelas	%	100	42.190.600	100	38.938.400	100	59.107.693	100	62.745.499	100	64.903.471	100	67.250.116	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cililin	%	100	1.988.697.200	100	787.195.600	100	1.928.596.975	100	2.047.293.224	100	2.117.704.690	100	2.194.272.240	100	Kec. Cililin
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cililin	%	100	44.149.800	100	125.751.800	100	51.121.783	100	54.268.093	100	56.134.506	100	58.164.101	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipongkor	%	100	1.412.582.000	100	650.469.600	100	1.419.291.765	100	1.506.642.628	100	1.558.459.786	100	1.614.807.325	100	Kec. Cipongkor
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipongkor	%	100	32.625.000	100	58.530.000	100	60.558.429	100	64.285.521	100	66.496.459	100	68.900.699	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Rongga	%	100	1.585.493.300	100	352.184.500	100	1.538.849.376	100	1.633.558.458	100	1.689.740.565	100	1.750.834.680	100	Kec. Rongga
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Rongga	%	100	72.470.000	100	71.568.000	100	91.053.293	100	96.657.204	100	99.981.483	100	103.596.405	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Sindangkerta	%	100	1.526.797.400	100	511.409.400	100	1.439.830.071	100	1.528.444.972	100	1.581.011.966	100	1.638.174.900	100	Kec. Sindangkerta
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Sindangkerta	%	100	94.910.000	100	43.736.000	100	106.070.372	100	112.598.515	100	116.471.055	100	120.682.173	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Gununghalu	%	100	1.791.149.100	100	1.136.641.600	100	1.788.935.103	100	1.899.035.808	100	1.964.348.336	100	2.035.371.147	100	Kec. Gununghalu
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Gununghalu	%	100	96.515.000	100	41.448.000	100	123.013.597	100	130.584.517	100	135.075.641	100	139.959.424	100	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Saguling	%	100	593.439.100	100	455.766.800	100	748.653.431	100	794.729.597	100	822.062.309	100	851.784.724	100	Kec. Saguling

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Saguling	%	100	33.800.000	100	85.010.000	100	33.131.675	100	35.170.777	100	36.380.387	100	37.695.753	100	
Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19		57,58		58,50		59,25		59,89		60,44		60,92	
Program Pengembangan Kebudayaan	Presentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	35	1.345.688.764	16,22	1.710.482.600	18,71	1.719.974.425	21,20	1.825.830.919	23,70	1.888.625.749	26,19	1.956.910.741	28,68	Disparbud
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	8,58	100.450.000	12,86	50.000.000	17,15	195.289.763	21,00	207.308.947	26,00	214.438.813	30	222.192.045	34	Disparbud
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	50	559.372.428	9,60	278.188.000	14,36	740.254.327	19,12	785.813.567	23,87	812.839.634	28,63	842.228.595	33,39	Disparbud
Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM /lembaga sejarah yang dibina	%	0	-	0	100.000.000	18,46	288.603.932	25,71	306.366.173	32,00	316.902.862	37,50	328.360.775	42,86	Disparbud

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kab. Bandung Barat, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah (Tabel 4.4) serta indikator kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (Tabel 4.5) merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan (Indikator Makro Pembangunan Tabel 4.3) maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan daerah (IKK Penyelenggaraan Urusan Pemda Tabel 4.8).

Indikator Kinerja Daerah tingkat dampak (*impact*) untuk mengukur keberhasilan tujuan dan/atau sasaran RPJMD (Tabel 4.6). Sementara indikator kinerja hasil (*outcome*) yang digunakan untuk menggambarkan kinerja program (Tabel 4.7).

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU daerah, IKU perangkat daerah dan indikator kinerja program diharapkan dapat memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Bandung Barat selama periode 2025-2029 ditambah periode tahun 2030 yang merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah Tahun berikutnya.

Tabel 4.3 Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	5,07	6,05	6,06	6,08	6,12	6,19
2	PDRB per Kapita ADHB	Juta Rupiah	32,50	34,09	38,79	41,19	44,17	48,03	53,10
3	Tingkat Kemiskinan	%	10,49	9,98	9,63	8,64	7,46	6,18	5,63
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,70	6,58	5,88	5,74	5,67	5,59	5,50
5	Rasio Gini	Poin	0,400	0,369	0,367	0,366	0,364	0,363	0,360
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,77	71,33	72,14	72,72	73,46	74,23	75,04
7	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Provinsi	%	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2eq/ Miliar	N/A	2,63	2,94	3,28	3,69	4,24	4,65
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,43	59,59	59,84	60,09	60,34	60,60	60,85
10	Prevalensi Stunting	%	30,80	27,75	25,14	22,9	20,97	19,29	17,84

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda dan Kesepakatan Indikator Makro Pembangunan dengan Bappeda Prov. Jabar, 2025.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	60	64	68	72	76	80
2	Umur Harapan Hidup*	Tahun	75,06	75,09	75,25	75,40	75,56	75,72	75,88
3	Prevalensi Stunting*	% SSGI	30,80	27,75	25,14	22,9	20,97	19,29	17,84
4	Harapan Lama Sekolah*	Tahun	12,00	12,09	12,19	12,30	12,40	12,51	12,62
5	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,25	8,27	8,28	8,29	8,31	8,32
6	Indeks Kualitas Keluarga	Poin	70,15	70,60	71,00	71,90	72,50	73,20	74,00
7	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	N/A	43,85	44,20	44,64	44,89	45,00	45,20
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi*	%	4,94	5,07	6,05	6,06	6,08	6,12	6,19
9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah*	Poin	36,64	37,72	40,7	42,29	44,25	46,33	48,52
10	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto*	%	20,64	21,33	21,37	21,41	21,46	21,50	21,56
11	Tingkat Inflasi	%	1,46	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
12	Tingkat Kemiskinan*	%	10,49	9,98	9,63	8,64	7,46	6,18	5,63
13	Rasio Gini*	Poin	0,400	0,369	0,367	0,366	0,364	0,363	0,360
14	Tingkat Pengangguran Terbuka*	%	6,70	6,58	5,88	5,74	5,67	5,59	5,50
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,77	81,58	82,41	83,27	84,17	85,12	86,13
16	Indeks Pemerintah Digital	Poin	N/A	-	1,2	1,4	1,6	1,80	2,00
	Indeks SPBE	Poin	3,78	3,78	-	-	-	-	-
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,26	84,35	84,47	84,55	84,67	84,72	84,91
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak*	%	N/A	43,29	44,32	45,35	46,38	47,41	50,69
19	Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,55	25,11	24,67	24,23	23,79	23,35	23,05
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Poin	58,43	59,59	59,84	60,09	60,34	60,60	60,85
21	Penurunan Emisi GRK – Kumulatif*	Ton Co2eq	N/A	256.969,37	286.294,48	319.167,57	359.667,39	415.351,77	480.259,45
22	Indeks Resiko Bencana	Poin	81,62	81,32	80,68	80,38	79,80	78,84	78,61
23	IPKKU Linmas	Poin	56,71	58,48	60,83	62,49	64,72	66,46	69,45
24	Presentase Desa Mandiri*	Poin	41,82	49,09	62,42	74,55	85,45	94,55	100,00
25	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19	57,58	58,50	59,25	59,89	60,44	60,92

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025. (Target IUP Berdasarkan SE Prov. Jabar No. 2575/PR.01/PPEPD)*

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030

No	Indikator	Satuan	Kondisi 2024	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks SPM Pendidikan	Poin	74,64	75,54	79,57	82,92	86,26	89,61	92,95	Dinas Pendidikan
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	6,3	5,3	4,3	3,4	2,7	2,0	0,7	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	112,4	68,1	61,3	51,1	40,9	40,9	20,4	
4	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,070	0,069	0,068	0,067	0,066	0,065	0,064	
5	Presentase infrastruktur sumber daya air dalam kondisi baik	%	62	63,91	64,03	64,21	64,37	64,61	64,72	Dinas PUTR
6	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana permukiman	%	22,67	30,30	34,75	38,56	42,38	46,19	50,00	
7	Presentase penataan kawasan dan bangunan gedung milik Pemda	%	N/A	17,88	24,72	40,34	52,21	68,53	79,59	
8	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	72,73	74,01	76,36	80,26	83,75	87,01	88,83	
9	Indeks kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Poin	N/A	51,25	66,25	72,50	78,75	80,42	88,75	
10	Tingkat kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Poin	46,64	100	100	100	100	100	100	Disperkim
11	Indeks tertib administrasi Pertanahan	Poin	90	100	100	100	100	100	100	
12	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Sub Urusan Trantibum	Poin	51,65	52,33	54,68	57,06	59,44	61,83	64,21	Satpol PP
13	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Poin	54,33	55,61	57,96	60,18	62,40	64,62	66,84	
14	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Sub Urusan Kebakaran	Poin	71	73	75,35	75	77	77	82	Disdamkar
15	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	BPBD
16	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Sub Urusan Bencana	Poin	49,88	53	55,35	57,7	60,05	62,4	64,75	
17	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	N/A	55,65	55,7	55,75	55,8	55,85	56	Dinas Sosial
18	Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja	%	N/A	12,21	38,39	42,61	47,70	51,82	55,80	Disnaker
19	Presentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	N/A	35,85	41,22	46,84	52,71	58,83	65,2	
20	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,59	81,89	82,4	82,94	83,5	84,26	84,9	DP2KBP3A
21	Indeks Perlidungan Anak	Poin	60,83	62,03	62,63	63,23	63,83	64,43	65,03	
22	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,4	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34	
23	Indeks Kualitas Air	Poin	46,9	58,22	58,42	58,62	58,82	59,02	59,22	DLH
24	Indeks Kualitas Udara	Poin	73,6	58,18	58,58	58,98	59,38	59,78	59,82	
25	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	40,1	41	42	43	44	45	46	
26	Cakupan Layanan Adm Kependudukan	%	72,36	73,29	74,36	75,45	76,56	77,63	78,89	Disdukcapil
27	Skor Tata Kelola Pemerintahan Desa	Score	65	66	67	68	69	72	75	DPMD
28	Skor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Score	30	34	34	38	47	59	63	
29	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	60,3	61,5	61,6	61,7	61,9	62	62	Disarpus
30	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	71,17	72,2	72,9	73,6	74,3	75	75,7	
31	Rasio Konektivitas	%	70,49	70,49	76	80,96	92,77	95,70	98,26	Dishub
32	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	4,99	5,04	5,09	5,14	5,19	5,24	5,29	Diskominfotik
33	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,66	2,67	2,76	2,84	2,90	2,96	3,01	
34	Indeks Keamanan Informasi	Poin	417	452	497	552	598	643	657	
35	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	73,36	74	75,2	76,4	77,6	78,8	80	

No	Indikator	SATUAN	Kondisi 2024	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
36	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	5,18	9,07	9,47	9,82	10,14	10,43	10,70	Diskop UKM
37	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,94	2,96	3,10	3,25	3,41	3,57	3,75	
38	Nilai Investasi	Triliun	3,89	4,00	4,12	4,26	4,41	4,58	4,77	DPMPTSP
39	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Poin	81,75	81,9	82,05	82,2	82,35	82,5	82,6	
40	Rasio Kewirausahaan Pemuda	%	2,18	2,20	2,22	2,25	2,27	2,28	2,29	Dispora
41	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	
42	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin	%	5,23	5,60	5,72	5,85	5,98	6,11	6,26	Disparbud
43	Persentase Pertumbuhan Investasi Industri Kreatif	%	N/A	2,63	22,00	24,00	25,00	27,00	29,00	
44	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Industri Kreatif	%	N/A	15,50	16,00	16,50	17,20	17,30	17,50	
45	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang di lestarikan	%	42,50	12,91	16,53	20,16	23,79	27,41	31,03	
46	Presentase Pangan asal hewan yang terpenuhi	%	85,3	86	87	88	89	90	91	Dispernakan
47	Presentase Pangan asal ikan yang terpenuhi	%	86	88	90	92	94	96	98	
48	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	17,11	19,51	21,64	23,60	25,62	27,63	29,64	DKPP
49	Peningkatan Produksi pertanian tanaman hortikultura (sayuran, biofarmaka dan buah-buahan	%	1,6	3,93	6,27	8,72	11,10	13,70	16,05	
50	Peningkatan Produksi pertanian tanaman hortikultura (tanaman hias)	%	2,61	6,75	10,89	15,04	19,18	23,32	27,46	
51	Peningkatan Produksi pertanian tanaman perkebunan	%	118,59	122,66	126,35	130,23	134,11	137,99	141,88	
52	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,25	5,57	5,37	5,12	4,85	4,53	4,11	
53	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,38	12,47	12,53	12,69	12,73	12,88	12,98	Disperindag
54	Rasio PDRB Industri pengolahan	%	40,85	41,20	41,25	41,30	41,35	41,41	41,48	
55	Tingkat kepuasaan anggota DPRD thd pelayanan Sekretariat DPRD	%	82,91	83,05	83,55	84,15	84,75	85,25	85,35	Sekretariat DPRD
56	Presentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (Prevalansi Stunting, Penurunan Kemiskinan, Kesalehan)	%	65	70	75	80	85	90	95	Setda
57	Nilai LPPD	Nilai	2,61	2,63	2,65	2,67	2,69	3,01	3,03	
58	Presentase pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan (Inflasi, LPE Daerah, Persampahan)	%	65	70	75	80	85	90	95	
59	Nilai SAKIP PEMDA	Nilai	68,85	68,88	68,91	68,94	68,96	68,97	68,99	
60	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,26	84,35	84,47	84,55	84,67	84,72	84,91	
61	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Poin	N/A	5,5	5,9	6,3	6,8	7,4	8,1	Bappelitbangda
62	Indeks Inovasi Daerah	Poin	42,02	44,97	47,92	50,87	53,82	56,77	60,01	
63	Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
64	Persentase Peningkatan PAD	%	3	5	5	5	5	5	5	Bapenda
65	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	N/A	5	5	5	5	5	5	
66	Indeks Profesionlitas ASN	Poin	N/A	82,1	82,5	83	83,5	84	84,5	BKPSDM
67	Indeks Profesionlitas P3K	Poin	N/A	80,95	81,5	82	82,5	83	83,5	
68	Indeks Merit	Poin	0,81	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	

No	Indikator	SATUAN	Kondisi 2024	Target						Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
69	Maturitas SPIP	Skor	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
70	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	Poin	93,29	90	90,5	91	91,5	92	93,5	Daerah
71	Indeks Harmoni Indonesia	Poin	N/A	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	Bakesbangpol
72	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Lembang	Nilai	73,54	76	77	78	79	80	81	Lembang
73	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Parongpong	Nilai	73,35	75	76	77	78	79	80	Parongpong
74	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Batujajar	Nilai	73,54	75	76	77	78	79	80	Batujajar
75	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Padalarang	Nilai	73,22	75	76	77	78	79	80	Padalarang
76	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Ngamprah	Nilai	73,18	75	76	77	78	79	80	Ngamprah
77	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Cikalongwetan	Nilai	72,12	74	75	76	77	78	79	Cikalongwetan
78	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Gununghalu	Nilai	71,95	74	75	76	77	78	79	Gununghalu
79	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Cisarua	Nilai	71,83	74	75	76	77	78	79	Cisarua
80	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Cipongkor	Nilai	71,77	73	74	75	76	77	78	Cipongkor
81	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Cililin	Nilai	71,68	72	73	74	75	76	77	Cililin
82	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Sindangkerta	Nilai	71,57	74	75	76	77	78	79	Sindangkerta
83	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Rongga	Nilai	70,85	72	73	74	75	76	77	Rongga
84	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Saguling	Nilai	70,23	72	73	74	75	76	77	Saguling
85	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Cipeundeuy	Nilai	69,85	71	72	73	74	75	76	Cipeundeuy
86	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Cipatat	Nilai	69,82	71	73	74	75	76	77	Cipatat
87	Nilai sinergitas kinerja kecamatan Cihampelas	Nilai	67,97	71	72	73	74	75	76	Cihampelas

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Daerah Tingkat Dampak (*Impact*)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI 2024	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	2,63	2,94	3,28	3,69	4,24	4,65	Indikator Tujuan
2	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	36,64	37,72	40,7	42,29	44,25	46,33	48,52	IKU Daerah
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,43	59,59	59,84	60,09	60,34	60,60	60,85	IKU Daerah
4	Penurunan Emisi GRK - Kumulatif	Ton Co2eq	N/A	256.969,37	286.294,48	319.167,57	359.667,39	415.351,77	480.259,45	IKU Daerah
5	Indeks Resiko Bencana	Poin	81,62	81,32	80,68	80,38	79,80	78,84	78,61	IKU Daerah
6	Indeks Kualitas Air	Poin	46,9	58,22	58,42	58,62	58,82	59,02	59,22	IKU DLH
7	Indeks Kualitas Udara	Poin	73,6	58,18	58,58	58,98	59,38	59,78	59,82	IKU DLH
8	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	40,1	41	42	43	44	45	46	IKU DLH
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,4	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35	1,34	IKU DP2KBP3A
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta	32,500	34,09	38,79	41,19	44,17	48,03	53,10	Indikator Tujuan
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	70,77	71,33	72,14	72,72	73,46	74,23	75,04	Indikator Tujuan
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,94	5,07	6,05	6,06	6,08	6,12	6,19	IKU Daerah
4	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Poin	N/A	60	64	68	72	76	80	IKU Daerah
5	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,06	75,09	75,25	75,40	75,56	75,72	75,88	IKU Daerah
6	Prevalensi Stunting	%	30,80	27,75	25,14	22,9	20,97	19,29	17,84	IKU Daerah
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,00	12,09	12,19	12,30	12,40	12,51	12,62	IKU Daerah
8	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,25	8,27	8,28	8,29	8,31	8,32	IKU Daerah
9	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Poin	70,15	70,60	71,00	71,90	72,50	73,20	74,00	IKU Daerah
10	Tingkat Inflasi	%	1,46	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	IKU Daerah
11	Tingkat Kemiskinan	%	10,49	9,98	9,63	8,64	7,46	6,18	5,63	IKU Daerah
12	Rasio Gini	Poin	0,400	0,369	0,367	0,366	0,364	0,363	0,360	IKU Daerah
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,70	6,58	5,88	5,74	5,67	5,59	5,50	IKU Daerah

14	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	N/A	43,29	44,32	45,35	46,38	47,41	50,69	IKU Daerah
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,26	84,35	84,47	84,55	84,55	84,72	84,91	IKU Daerah
16	Indeks SPM Pendidikan	Poin	74,64	75,54	79,57	82,92	86,26	89,61	92,95	IKU Disdik
17	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	6,3	5,3	4,3	3,4	2,7	2,0	0,7	IKU Dinkes
18	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	112,4	68,1	61,3	51,1	40,9	40,9	20,4	IKU Dinkes
19	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,070	0,069	0,068	0,067	0,066	0,065	0,064	IKU Dinkes
20	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	11,71	27,48	31,10	34,73	38,36	41,98	45,61	IKP DPUTR
21	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	N/A	55,65	55,7	55,75	55,8	55,85	56	IKU Dinsos
22	Presentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	N/A	35,85	41,22	46,84	52,71	58,83	65,2	IKU Disnaker
23	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,59	81,89	82,40	82,94	83,50	84,26	84,90	IKU DP2KBP3A
24	Indeks Perlidungan Anak	Poin	60,83	62,03	62,63	63,23	63,83	64,43	65,03	IKU DP2KBP3A
25	Opini BPK atas laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU BKAD
26	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,25	5,57	5,37	5,12	4,85	4,53	4,11	IKU DKPP
27	Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)	Score	92,1	92,5	93	93,5	94	94,5	95	IKP DKPP
28	Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)	Score	80,29	80,29	81,3	82,4	83,5	84,6	85,7	IKP DKPP
29	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	17,11	19,51	21,64	23,60	25,62	27,63	29,64	IKU DKPP
30	Peningkatan Produksi pertanian tanaman hortikultura (sayuran, biofarmaka dan buah-buahan)	%	1,6	3,93	6,27	8,72	11,10	13,70	16,05	IKU DKPP
31	Peningakatan Produksi pertanian tanaman hortikultura (tanaman hias)	%	2,61	6,75	10,89	15,04	19,18	23,32	27,46	IKU DKPP
32	Peningkatan Produksi pertanian tanaman perkebunan	%	118,59	122,66	126,35	130,23	134,11	137,99	141,88	IKU DKPP
33	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	2	2	2	2	2	2	2	IKP Dispernakan
34	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	51.585	53.133	54.727	56.368	58.059	59.801	61.595	IKP Dispernakan
35	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	220	226	234	241	248	255	263	IKP Dispernakan
36	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Mamin	%	5,23	5,60	5,72	5,85	5,98	6,11	6,26	IKU Disbudpar
37	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,38	12,47	12,53	12,69	12,73	12,88	12,98	IKU Disperindag
38	Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	%	40,85	41,20	41,25	41,30	41,35	41,41	41,48	IKU Disperindag

39	Indeks Harmoni Indonesia	Poin	N/A	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	IKU Bakesbangpol
40	Cakupan Layanan Adm Kependudukan	%	72,36	73,29	74,36	75,45	76,56	77,63	78,89	IKU Disdukcapil
41	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Poin	81,75	81,9	82,05	82,2	82,35	82,5	82,6	IKU DPMPTSP
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,72	3,80	3,92	4,02	4,11	4,20	4,28	Indikator Tujuan
2	Indeks Infrastruktur	Poin	N/A	71,84	74,5	77,17	79,98	82,95	84,05	Indikator Tujuan
3	Kontribusi PDRB Kab/Kota thd Provinsi	%	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	Indikator Tujuan
4	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	20,64	21,33	21,37	21,41	21,46	21,50	21,56	IKU Daerah
5	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	N/A	43,85	44,20	44,64	44,89	45,00	45,20	IKU Daerah
6	Indeks Kesulitan Geografis	Poin	25,55	25,11	24,67	24,23	23,79	23,35	23,05	IKU Daerah
7	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Poin	56,71	58,48	60,83	62,49	64,72	66,46	69,45	IKU Daerah
8	Presentase Desa Mandiri	%	41,82	49,09	62,42	74,55	85,45	94,55	100,00	IKU Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	56,19	57,58	58,50	59,25	59,89	60,44	60,92	IKU Daerah
10	Persentase Meningkatnya Koperasi yg Berkualitas	%	5,18	9,07	9,47	9,82	10,14	10,43	10,70	IKU Diskop UKM
11	Rasio kewirausahaan daerah	%	1,94	2,96	3,10	3,25	3,41	3,57	3,75	IKU Diskop UKM
12	Nilai Investasi	Triliun	3,89	4,00	4,12	4,26	4,41	4,58	4,77	IKU DPMPTSP
13	Rasio kewirausahaan pemuda	%	2,18	2,20	2,22	2,25	2,27	2,28	2,29	IKU Dispora
14	Presentase infrastruktur sumber daya air dalam kondisi baik	%	62	63,91	64,03	64,21	64,37	64,61	64,72	IKU DPUTR
15	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana permukiman	%	22,67	30,30	34,75	38,56	42,38	46,19	50,00	IKU DPUTR
16	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	72,73	74,01	76,36	80,26	83,75	87,01	88,83	IKU DPUTR
17	Rasio Konektivitas	%	70,49	70,49	76	80,96	92,77	95,70	98,26	IKU Dishub
18	Skor Tata Kelola Pemerintahan Desa	Score	65	66	67	68	69	72	75	IKU DPMD
19	Skor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Score	30	34	34	38	47	59	63	IKU DPMD
20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	4,99	5,04	5,09	5,14	5,19	5,24	5,29	IKU Diskominfotik
21	Indeks Inovasi Daerah	Poin	42,02	44,97	47,92	50,87	53,82	56,77	60,01	IKU Bappelitbangda
22	Indeks Profesionlitas ASN	Poin	N/A	82,1	82,5	83	83,5	84	84,5	IKU BKPSDM

23	Indeks Profesionlitas P3K	Poin	N/A	80,95	81,5	82	82,5	83	83,5	IKU BKPSDM
24	Indeks Merit	Poin	0,81	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	IKU BKPSDM
D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	80,77	81,58	82,41	83,27	84,17	85,12	86,13	IKU Daerah
2	Indeks Pemerintah Digital Indeks SPBE	Poin Poin	N/A 3,78	- 3,78	1,2 -	1,4 -	1,6 -	1,8 -	2,00 -	IKU Daerah
3	Nilai LPPD	Nilai	2,61	2,63	2,65	2,67	2,69	3,01	3,03	IKU Setda
4	Nilai SAKIP PEMDA	Nilai	68,85	68,88	68,91	68,94	68,96	68,97	68,99	IKU Setda
5	Persentase produk hukum yang ditetapkan	%	70	75	80	85	90	95	100	IKP Setda
6	Tingkat kematangan UKPBJ	%	100	100	100	100	100	100	100	IKP Setda
7	Maturitas SPIP	Skor	3	3	3	3	3	3	3	IKU Itda
8	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	Poin	93,29	90	90,5	91	91,5	92	93,5	IKU Itda
9	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	Poin	N/A	5,5	5,9	6,3	6,8	7,4	8,1	IKU Bappelitbangda
10	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	73,36	74	75,2	76,4	77,6	78,8	80	IKU Diskominfotik

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Daerah Tingkat Hasil (*outcome*)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030

	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN	KONDISI 2024	TARGET						PERANGKAT DAERAH
				2025	2026	2027	2028	229	2030	
1	**Pelayanan Urusan Wajib Dasar**									
1	**Pendidikan**									
1	APS usia 5-6	%	73,28	76,32	79,36	82,4	85,37	88,34	91,31	Dinas Pendidikan
2	APS usia 7-15	%	98,06	98,32	98,59	98,86	99,13	99,4	99,66	Dinas Pendidikan
3	APS usia 7 - 18 Kesetaraan	%	19,78	23,88	27,97	32,07	36,17	40,27	44,37	Dinas Pendidikan
4	Presentase satuan pendidikan yang mengambankan kurikulum muatan lokal	%	75	0	81,89	85,06	88,24	91,42	94,60	Dinas Pendidikan
5	Rasio Guru/Murid PAUD	%	1:13	1:13,92	1:14,84	1:15,76	1:16,69	1:17,61	1:18,53	Dinas Pendidikan
6	Rasio Guru/Murid SD	%	1:22.1	1:23,88	1:24,22	1:24,57	1:24,91	1:25,25	1:25,59	Dinas Pendidikan
7	Rasio Guru/Murid SMP	%	1:19.9	1:22,23	1:24,17	1:26,11	1:28,05	1:29,99	1:31,93	Dinas Pendidikan
8	Persentase usulan izin satuan pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola oleh masyarakat yang telah diterbitkan/diperbarui	%	19	0	19,59	19,74	19,88	20,03	20,18	Dinas Pendidikan
9	Persentase usulan izin satuan Pendidikan Dasar yang dikelola oleh masyarakat, yang telah diterbitkan atau diperbarui	%	15,00	0	15,50	15,97	16,43	16,89	17,35	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**									
10	Cakupan antenatal care (ANC) 6 kali (K6)	%	88,7	89,0	90,0	91,0	93,0	95,0	97,0	Dinkes
11	Cakupan Skrining Bayi Baru Lahir	%	40,0	41,0	42,0	45,0	47,0	50,0	53,0	Dinkes
12	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	%	53,8	91	91	91	91	91	91	Dinkes
13	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	%	91,02	91	91	91	91	91	91	Dinkes
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	89,66	98	98,1	98,2	98,3	98,4	98,5	Dinkes
15	Presentase ketersediaan sapras kesehatan yang memenuhi standar	%	68,8	69	69,2	69,4	69,6	69,8	70	Dinkes
16	Cakupan Layanan Intervensi Balita dan Ibu Hamil bermasalah gizi	%	76,4	76,5	76,6	76,7	76,8	76,9	76,9	Dinkes
17	Presentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	86	87	89	90	92	93	95	Dinkes

18	Presentase cakupan sediaan Farmasi, alat kesehatan dan perijinan makanan minuman	%	98,94	99,04	99,14	99,24	99,34	99,44	99,54	Dinkes
19	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	4	15	25	35	45	55	65	Dinkes
3	**Pekerjaan Umum**									
20	Presentase luas layanan irigasi	%	62	63	63,39	64	64,54	65,34	65,70	Dinas PUTR
21	Presentase bangunan gedung milik daerah dengan kondisi baik	%	12,00	20,75	32,08	50,94	67,92	81,13	88,68	Dinas PUTR
22	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	11,71	27,48	31,1	34,73	38,36	41,98	45,61	Dinas PUTR
23	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	2	5,94	11,32	16,69	22,07	27,44	32,82	Dinas PUTR
24	Presentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	68,93	70,33	71,33	72,53	73,73	74,93	76,13	Dinas PUTR
25	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	54,61	56,61	60,44	65,29	69,60	74,53	78,27	Dinas PUTR
26	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana persampahan	%	36	36	46,48	51,58	56,68	61,78	66,88	Dinas PUTR
27	Presentase penyelenggaraan penataan ruang	%	42,00	51,25	66,25	72,50	78,75	80,42	88,75	Dinas PUTR
28	Kapasitas Air Baku	(m3/detik)	4,55	4,55	5,12	5,69	6,28	6,87	7,49	Dinas PUTR
29	Presentase perlindungan rawan banjir	%	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	Dinas PUTR
30	Presentase tenaga kerja konstruksi tersertifikasi	%	6,18	7,31	16,11	37,14	58,17	79,09	100	Dinas PUTR
31	Presentase penataan bangunan dan lingkungan	%	0	17,65	23,53	29,41	35,29	41,18	47,06	Dinas PUTR
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**									
32	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani di luar kawasan kumuh	%	23,18	3,37	11,58	25,95	44,44	69,08	100	Disperkim
33	Presentase Pengurangan luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang tertangani	%	35,57	97	94	91	86	82	78	Disperkim
34	Presentase peningkatan PSU perumahan formal yang sudah serah terima ke Pemda	%	66,67	100	100	100	100	100	100	
35	Presentase penanganan rumah korban bencana	%	72,22	100	100	100	100	100	100	Disperkim
5	**Trantibum**									
36	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
37	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	0	16,02	32,04	48,07	64,09	83,32	100	Satpol PP
38	Presentase penegakan perda dan perkada	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
39	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
40	Persentase Peningkatan Respon Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	%	82	84	87	90	93	95	100	Disdamkar
41	Presentase penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD

42	Presentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
43	Presentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
44	Presentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
6	**Sosial**									
45	Presentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
46	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	10	20	40	60	80	90	100	Dinas Sosial
47	Presentase penerima manfaat (individu/keluarga miskin) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	5,3	20	40	60	80	90	100	Dinas Sosial
48	Presentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindugan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	44,97	47	55	60	80	90	100	Dinas Sosial
49	Presentase pengelolaan data kemiskinan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
50	Presentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
51	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	**Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar**									
1	**Tenaga Kerja**									
52	Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	%	N/A	0	50	60	70	80	90	Disnaker
53	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi BNSP	%	N/A	42,86	45,45	48,15	50	51,85	53,70	Disnaker
54	Persentase Pengukuran Produktifitas Perusahaan	%	N/A	0	50	60	70	80	90	Disnaker
55	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan di Dalam dan Luar Negeri	%	7,51	9,11	23,26	23,56	26,49	27	27,15	Disnaker
56	Persentase Kumulatif Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB/Struktur Skala Upah)	%	42,00	46,15	50,52	55,09	59,88	64,86	70,06	Disnaker
57	Persentase Kumulatif Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (LKS Bipartit)	%	22,98	28,63	34,68	41,13	47,98	55,24	62,90	Disnaker
58	Presentase Kumulatif Perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah	%	27,22	32,78	38,47	44,31	50,28	56,39	62,64	Disnaker
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
59	Presentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhuk sosek	%	87,5	61	63	66	68	68	71	DP2KBP3A
60	Presentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komperhensif	%	100	100	100	100	100	100	100	DP2KBP3A
61	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	DP2KBP3A

62	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin	N/A	59,77	60,79	61,77	62,43	62,43	63,2	DP2KBP3A
63	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan penyusunan kebijakan	%	100	0	100	100	100	100	100	DP2KBP3A
64	Presentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komperhensif	%	100	100	100	100	100	100	100	DP2KBP3A
3	**Pangan**									
65	Presentase sarpras pangan yang terbangun	%	0	100	100	100	100	100	100	DKPP
66	Skore pola pangan harapan (PPH konsumsi)	Score	92,1	92,5	93	93,5	94	94,5	95	DKPP
67	Skore pola pangan harapan (PPH ketersedian)	Score	80,29	80,8	81,3	82,4	83,5	84,6	85,7	DKPP
68	Persentase Desa Tahan Pangan	%	87,88	88,48	89,7	90,3	90,91	92,12	93,33	DKPP
69	Pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	31,33	64,67	98	131,33	164,67	198	220	DKPP
4	**Pertanahan**									
70	Persentase capaian inventarisasi sengketa tanah garapan, penyelesaian jumlah kasus permasalahan sengketa dan mediasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100	Disperkim
71	Presentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100	0	0	100	100	100	100	Disperkim
72	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap didistribusikan yang berasal dari kelebihan maks. dan tanah Absentee	%	100	100	100	100	100	100	100	Disperkim
73	Presentase perencanaan penggunaan tanah	%	100	100	100	100	100	100	100	Disperkim
74	Presentase tanah kosong yang dikelola	%	0	100	0	100	100	100	100	Disperkim
5	**Lingkungan Hidup**									
75	Presentase ketersediaan kajian lingkungan hidup	%	42,86	100	100	100	100	100	100	DLH
76	Persentase kualitas air sungai yang status mutu airnya meningkat	%	N/A	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	DLH
77	Presentase usaha/industri yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan	%	-	12	12	12	12	12	12	DLH
78	Persentase Ketaatan Kegiatan dan/atau usaha yang diawasi dalam Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Hidup	%	17.57	60	64	66	68	70	72	DLH
79	Persentase Kegiatan dan/atau Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan dan atau Izin PPLH pada tahun ke-n	%	N/A	70	70	70	70	70	70	DLH
80	Persentase lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya	%	-	20	20	20	20	20	20	DLH
81	Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat Penghargaan bidang LH	Entitas	35	27	27	27	27	27	27	DLH
82	Presentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	DLH

83	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	N/A	46,84	55,87	66,22	86,34	95,66	100	DLH
84	Presentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	N/A	2,20	2,49	2,82	7,64	21,99	23,21	DLH
85	Presentase RTH Kehati yang terkelola	%	100	100	100	100	100	100	100	DLH
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
86	Presentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	10,3	12	13	14	15	16	17	Disdukcapil
87	Presentase kepemilikan kartu identitas anak	%	27	28	30	32	34	36	38	Disdukcapil
88	Persentase Anak Berusia 0 - 4 Tahun yang memiliki akta kelahiran	%	91,37	92	93	94	95	96	97	Disdukcapil
89	Persentase Anak Berusia 0 - 18 Tahun yang memiliki akta kelahiran	%	91,12	92,20	93,11	94	95	96	98	Disdukcapil
90	Persentase Kepemilikan akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	%	61,63	62,52	63,55	64,70	65,85	66,75	67,85	Disdukcapil
91	Persentase kepemilikan Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
92	Persentase Kepemilikan akta Perceraian bagi penduduk yang bercerai	%	52,75	53	53,5	54	54,50	55	55,5	Disdukcapil
93	Presentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	N/A	10,87	13,04	15,22	17,39	19,57	21,74	Disdukcapil
94	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
95	Presentase fasilitasi penataan desa	%	33,33	45	57	69	81	93	96	DPMD
96	Presentase kerjasama yang terfasilitasi	%	33,33	45	57	69	81	93	96	DPMD
97	Presentase aparatur desa dan BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	33,33	45	57	69	81	93	100	DPMD
98	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	87,31	88	90	91	92	93	95	DPMD
8	**Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana**									
99	Total Fertility Rate (TFR)	angka	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10	2,09	DP2KBP3A
100	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Poin	N/A	63	65	67	69	71	73	DP2KBP3A
101	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	%	71,80	71,83	71,85	71,90	71,90	71,95	71,95	DP2KBP3A
102	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	11,07	11,05	11	10,9	10,9	10,8	10,8	DP2KBP3A
103	Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19)	%	21	21	20,99	20,98	20,97	20,96	20,95	DP2KBP3A
104	Indeks Kerentanan Keluarga	Poin	7,6	7,4	7,2	7	6,8	6,6	6,4	DP2KBP3A

105	Median Usia Perkawinan Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	18,7	18,9	19,1	19,3	19,5	19,7	19,9	DP2KBP3A
106	Indeks Lansia Tangguh	Poin	50	50,25	50,5	50,75	60	60,25	60,5	DP2KBP3A
9	**Perhubungan**									
107	Konektifitas transportasi darat	%	8,50	12,43	18,63	24,83	31,03	37,23	43,43	Dishub
108	Presentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kebutuhan	%	24,09	44,58	48,70	52,81	56,92	61,03	65,14	Dishub
109	Ketersediaan Simpul transportasi yang terkelola	%	38,91	41,67	44,69	48,00	61,64	65,63	70,00	Dishub
110	konektifitas transportasi pelayaran	%	0,35	0,47	0,65	0,76	3,05	3,7	4,06	Dishub
10	**Komunikasi dan Informatika**									
111	Nilai Teknologi Digital	Nilai	N/A	-	1,00	1,75	2,00	2,25	2,50	Diskominfotik
	Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai	3,75	3,75	-	-	-	-	-	Diskominfotik
112	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemda	%	-	60	64	68	72	76	80	Diskominfotik
11	**Koperasi dan UKM**									
113	Presentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	25,03	30,16	31,43	32,62	33,73	34,77	35,75	Diskop UKM
114	Presentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	5,01	18,09	19,79	21,37	22,85	24,24	25,54	Diskop UKM
115	Persentase Koperasi Berkualitas	%	46,45	47,22	47,98	48,75	49,52	50,29	51,06	Diskop UKM
116	Presentase koperasi aktif	%	65,21	66,47	67,64	68,73	69,75	70,71	71,6	Diskop UKM
117	Pertumbuhan Wirausaha	%	1	2,4	2,5	2,58	2,60	2,63	2,70	Diskop UKM
118	Presentase pengembangan UMKM	%	4	4,48	5,12	5,84	6,63	7,48	8,40	Diskop UKM
12	**Penanaman Modal**									
119	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Bandung Barat	%	N/A	2,8	3	3,3	3,6	3,8	4,1	DPMPTSP
120	Peningkatan investor yang berinvestasi	%	5	6	7	10	13	16	20	DPMPTSP
121	Persentase Pemenuhan Kepatuhan Teknis dan Administrasi Pelaku Usaha	%	100	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
122	Persentase Waktu Proses Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sesuai SOP	%	78,03	85	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	DPMPTSP
123	Presentase pamanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
13	**Kepemudaan dan Olahraga**									
124	Presentase layanan kepemudaan	%	10,34	10,34	10,4	10,45	10,5	10,55	10,6	Dispora
125	Rasio Kewirausahaan Pemuda	%	2,18	2,20	2,22	2,25	2,27	2,28	2,29	Dispora
126	Indeks ketersedian ruang terbuka dan sarana olahraga	Poin	0,67	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71	0,71	Dispora

127	Indeks SDM Keolahragaan	Poin	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,33	0,33	Dispora
128	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Poin	0,38	0,38	0,39	0,4	0,4	0,41	0,41	Dispora
129	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi	Atlet	201	150	500	100	50	150	500	Dispora
130	Tingkat partisipasi pemuda dalam kepramukaan	%	5,77	5,8	5,85	5,9	5,95	5,95	6	Dispora
14	**Statistik**									
131	Nilai prinsip Satu Data Indonesia	Nilai	3	3	3,04	3,08	3,12	3,16	3,2	Diskominfotik
132	Nilai Kualitas Data	Nilai	3	3	3,04	3,08	3,12	3,16	3,2	Diskominfotik
133	Nilai Proses Bisnis statistik	Nilai	2,64	2,64	2,67	2,69	2,71	2,73	2,75	Diskominfotik
15	**Persandian**									
134	Nilai Keamanan Siber	Nilai	0,09	0,09	0,09	0,11	0,15	0,18	0,22	Diskominfotik
16	**Kebudayaan**									
135	Presentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	35	16,22	18,71	21,20	23,70	26,19	28,68	Disparbud
136	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	8,58	12,86	17,15	21,00	26,00	30	34	Disparbud
137	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	50	9,60	14,36	19,12	23,87	28,63	33,39	Disparbud
138	Persentase SDM /lembaga sejarah yang dibina	%	0	0	18,46	25,71	32,00	37,50	42,86	Disparbud
17	**Perpustakaan**									
139	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	64,74	65,50	65,75	66,00	66,25	66,50	66,50	Disarpus
140	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	N/A	0	10	20	30	40	50	Disarpus
18	**Kearsipan**									
141	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai	74,65	75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	Disarpus
142	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	65,96	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	Disarpus
143	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	77,00	78,33	79,00	79,66	80,30	83,00	83,66	Disarpus
144	Presentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	28,00	42	56	70	84	98	100	Disarpus
3	**Pelayanan Urusan Pilihan**									
1	**Kelautan dan Perikanan**									
145	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	51.585	53.133	54.727	56.368	58.059	59.801	61.595	Dispernakan
146	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	220	226	234	241	248	255	263	Dispernakan

147	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	3.222	3.383	3.553	3.730	3.917	4.113	4.318	Dispernakan
148	Persentase Sumber Daya Perikanan yang diawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	Dispernakan
2	**Pariwisata**									
149	Peresentase pengembangan daya tarik wisata yang siap kunjung	%	3	3	3	3	3	3	3	Disparbud
150	Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	3.435.438	3.607.210	3.787.570	3.976.949	4.175.796	4.384.586	4.603.815	Disparbud
151	Presentase Produk Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan dan memiliki Kekayaan Intelektual	%	100	100	100	100	100	100	100	Disparbud
152	Presentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya dan/atau difasilitasi Sertifikasi	%	9	11	13	15	17	19	21	Disparbud
3	**Pertanian**									
153	Persentase Sarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	%	88,25	100	100	100	100	100	100	DKPP
154	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	2	2	2	2	2	2	2	Dispernakan
155	Cakupan luas lahan pertanian yang terfasilitasi prasarananya	%	0,13	0,76	1,4	2,04	2,68	3,31	3,95	DKPP
156	Persentase Prasarana Peternakan dalam kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	Dispernakan
157	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis	%	85	85	100	100	100	100	100	Dispernakan
158	Presentase unit usaha pangan hewan yang memiliki sertifikat NKV/NKV	%	31,25	32,81	34,48	35,94	37,5	40,6	44,6	Dispernakan
159	Presentase ijin usaha pertanian yang terfasilitasi	%	100	0	100	100	100	100	100	DKPP
160	Presentase usaha peternakan yang telah dibina dan diawasi	%	85	85	100	100	100	100	100	Dispernakan
161	Presentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	%	54,79	97,87	140,43	182,98	225,53	268,09	310,64	DKPP
162	Presentase SDM petani yang ditingkatkan kompetensinya	%	20	20	20	20	20	20	20	DKPP
163	Presentase kelompok peternakan yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	Dispernakan
164	Presentase penanganan bencana pertanian	%	0	0	100	100	100	100	100	DKPP
165	Presentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	0	0	100	100	100	100	100	DKPP
166	Presentase penanggulangan wabah penyakit ternak	%	100	100	100	100	100	100	100	Dispernakan
4	**Perdagangan**									
167	Persentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	50	60	70	75	80	90	100	Disperindag
168	Presentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	30	35	45	50	55	70	80	Disperindag
169	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	10	15	20	25	30	35	40	Disperindag

170	Nilai ekspor barang	Milyar	3.036,1	3.039,24	3.053,08	3.114,62	3.191,63	3.351,52	3.427,32	Disperindag
171	Persentase alat metrologi yang sesuai standar	%	50	50	50	50	60	65	80	Disperindag
172	Presentase promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan	%	40	45	55	65	70	85	90	Disperindag
5	**Perdagangan**									
173	Presentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	50	65	75	80	85	90	100	Disperindag
174	Presentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	50	0	70	80	85	90	100	Disperindag
175	Presentase tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	25	35	40	45	50	55	60	Disperindag
6	**Transmigrasi**									
176	Persentase Transmigran yang ditempatkan pada lokasi transmigrasi sesuai alokasi yang ditetapkan oleh Kementrans/ Pemprov	%	N/A	0	50	51	52	53	54	Disnaker
4	**Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan**									
1	**Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah**									
177	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait kesejahteraan dan kompetensi SDM keagamaan yang ditindaklanjuti	%	-	25	50	75	85	100	100	Bag Kesra Setda
178	Presentase pelaksanaan Bina Mental Spiritual terkait peningkatan dan pemerataan sarana peribadatan	%	-	25	50	75	85	100	100	
179	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,22	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37	0,4	
180	Persentase produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan	%	70	75	80	85	90	100	100	Bag. Hukum Setda
181	Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	%	80	80	85	90	95	100	100	Bag. Tapem Setda
182	Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	Katagori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
183	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	85	80	85	85	90	95	100	Bag. Ekonomi Setda
184	Persentase usulan bidang administrasi pembangunan yang di jadikan policy brief	%	80	80	85	85	90	100	100	Bag. Pemb. Setda
185	Tingkat kematangan UKPBJ	%	100	100	100	100	100	100	100	Bag ULP Setda
2	**Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD**									
186	Presentase pembentukan Ranperda Tahun n	%	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
187	Presentase ketepatan penetapan perda APBD Tahun n	%	100	100	100	100	100	100	100	
188	Persentase peningkatan kapasitas DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	

189	Presentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	98	100	100	100	100	100	100	
190	Persentase kebijakan anggaran yang dibahas	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	**Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan**									
1	**Perencanaan**									
191	Presentase Capaian kinerja Daerah	%	70,59	85	90	95	100	100	100	Bappelitbangda
192	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	Nilai	95,6	100	100	100	100	100	100	
193	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
194	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	100	
195	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	**Keuangan**									
196	Presentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	38	38	37	36	35	34	30	BKAD
197	Presentase alokasi belanja infrasturktur pelayanan publik	%	24,22	25	30	35	40	40	40	BKAD
198	Presentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	BKAD
199	Presentase penurunan silva	%	100	15	15	15	15	15	15	BKAD
200	Presentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	BKAD
201	Presentase penambahan nilai aset tetap	%	0,15	2	2	2	2	2	2	BKAD
202	Persentase Peningkatan Pendapatan daerah dari Sektor Pajak Daerah	%	98,24	100	100	100	100	100	100	Bapenda
3	**Kepegawaian**									
203	Nilai Aspek Perencanaan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, dan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai	106	106	107	108	109	110	112	BKPSDM
204	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai	30	30	31,2	31,5	31,7	31,9	32	BKPSDM
205	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai	115	115	116	117	118	119	120	BKPSDM
4	**Pendidikan dan Pelatihan**									
206	Nilai Aspek Pengembangan Karir	Nilai	82,5	82,5	83	84	85	86	87	BKPSDM
5	**Penelitian dan Pengembangan**									
207	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappelitbang

208	Persentase produk inovasi daerah yang dimanfaatkan	%	N/A	0	33,63	34,29	34,95	35,61	36,27	da
209	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	%	100	0	100	100	100	100	100	
6	**Program Penunjang Urusan**									
210	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Setda	Nilai	81,6	82,1	82,6	83,1	83,6	84,1	84,6	Setda
211	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Sekretariat DPRD	Nilai	72,46	73	76	79	82	85	88	Sekretariat DPRD
212	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Inspektorat Daerah	Nilai	83,81	84	84,5	85	85,5	86	86,5	Itda
213	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pendidikan	Nilai	84,77	85,5	87	88,5	89,5	90,5	92	Disdik
214	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kesehatn	Nilai	83,1	84	85	86	87	88	89	Dinkes
215	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas PUTR	Nilai	64,41	70,91	76,41	79,91	83,41	86,91	89,41	DPUTR
216	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	58,25	72,35	76,21	79,11	82,21	85,34	87,24	Disperkim
217	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Satpol PP	Nilai	84,15	84,25	84,40	84,60	84,85	85,15	85,50	Satpol PP
218	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai	64,28	65	65,5	65,75	65,9	66	66,25	Disdamkar
219	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Sosial	Nilai	75,56	76,5	77,5	78,5	79,5	80	80,5	Dinas Sosial
220	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Tenaga Kerja	Nilai	79,33	79,83	80,33	80,83	81,33	81,83	82,33	Disnaker
221	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) DP2KBP3A	Nilai	86,55	86,6	86,65	86,7	86,75	86,8	86,85	DP2KBP3A
222	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	68,51	69,51	70,51	71,51	72,51	73,51	74,51	DLH
223	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	72,73	73,5	74,85	76	77,25	78,5	80	Disdukcapil
224	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai	79,4	80	80,5	81	81,2	81,5	82	DPMD
225	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perhubungan	Nilai	77,47	78,00	79	80	81	82	83	Dishub
226	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kominfo dan Statistik	Nilai	87,8	88	88,2	88,4	88,6	88,8	89	Diskominfotik
227	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	70,99	71,5	72	72,5	73	73,5	74	Disperindag
228	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Koperasi dan UKM	Nilai	72,77	73,5	74,5	75,5	77,5	79	82	Diskop UKM
229	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) DPMPTSP	Nilai	81,12	81,7	82,25	82,75	83,3	83,8	84,15	DPMPTSP
230	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai	80,57	83	85	90	91	95	95	Dispora
231	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai	74,61	75,11	75,61	76,11	76,61	77,11	77,61	Disparbud
232	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Nilai	71,96	74,46	77,38	80,46	82,18	84,76	87,6	DKPP
233	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Perikanan dan Peternakan	Nilai	73,55	75	76,5	78	80	82	84	Dispernakan
234	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai	84,87	85,37	85,87	86,37	86,87	87,37	87,87	Disarpus

235	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Bappelitbangda	Nilai	83,71	83,76	83,81	83,86	83,91	83,96	84,01	Bappelitbangda
236	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	79,45	80	80,5	81	81,5	82	82,5	BKAD
237	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Pendapatan Daerah	Nilai	81,6	82	82,5	83	83,5	84	84	Bapenda
238	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Nilai	79,88	80.00	80,5	81	81,5	82	82,5	BKPSDM
239	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	55,67	56,17	56,67	57,17	57,67	58,17	58,67	BPBD
240	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	80,37	80,8	81,5	82	82,5	83	83,5	Bakesbangpol
241	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Lembang	Nilai	62,51	66,69	68,00	69,31	70,62	71,92	73,23	Kec. Lembang
242	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Parongpong	Nilai	62,35	65,38	66,69	68,00	69,31	70,62	71,92	Kec. Parongpong
243	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cisarua	Nilai	61,06	64,08	65,38	66,69	68,00	69,31	70,62	Kec. Cisarua
244	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cikalongwetan	Nilai	61,3	64,08	65,38	66,69	68,00	69,31	70,62	Kec. Cikalongwtn
245	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cipeundeuy	Nilai	59,37	61,46	62,77	64,08	65,38	66,69	68,00	Kec. Cipeundeuy
246	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Ngamprah	Nilai	62,21	65,38	66,69	68,00	69,31	70,62	71,92	Kec. Ngamprah
247	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cipatat	Nilai	59,34	62,77	66,69	68,00	69,31	70,62	71,92	Kec. Cipatat
248	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Padalarang	Nilai	62,23	65,38	66,69	68,00	69,31	70,62	71,92	Kec. Padalarang
249	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Batujajar	Nilai	62,34	65,38	66,69	68,00	69,31	70,62	71,92	Kec. Batujajar
250	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cihampelas	Nilai	57,77	61,46	62,77	64,08	65,38	66,69	68,00	Kec. Cihampelas
251	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cililin	Nilai	60,93	61,46	62,77	64,08	65,38	66,69	68,00	Kec. Cililin
252	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Cipongkor	Nilai	61,00	62,77	64,08	65,38	66,69	68,00	69,31	Kec. Cipongkor
253	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Rongga	Nilai	60,22	61,46	62,77	64,08	65,38	66,69	68,00	Kec. Rongga
254	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Sindangkerta	Nilai	60,83	64,08	65,38	66,69	68,00	69,31	70,62	Kec. Sindangkerta
255	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Gununghalu	Nilai	61,16	64,08	65,38	66,69	68,00	69,31	70,62	Kec. Gununghalu
256	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Saguling	Nilai	59,7	62,77	64,08	65,38	66,69	68,00	69,31	Kec. Saguling
6	**Pelayanan Pengawasan**									
257	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	76,7	76,7	77	77,5	78	78,5	79	Itda

258	Nilai Peningkatan Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	Itda
259	Nilai Survey Penilaian Integritas	Nilai	69,85	70	72	74	76	78	79	Itda
7	**Pelayanan Pemerintahan Umum**									
260	Indeks kerukunan Umat Beragama	Poin	**92,49**	92,5	92,6	92,7	92,8	92,9	93	Bakesbangpol
261	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	85,71	86	86,5	87	88	89	90	Bakesbangpol
262	Presentase pendidikan politik pada kader parpol	%	N/A	50	55	60	65	70	75	Bakesbangpol
263	Presentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	60	70	71	72	73	74	75	Bakesbangpol
264	Presentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya yang dilaksanakan	%	83,33	84	85	86	87	88	90	Bakesbangpol
265	Presentase konflik sosial yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Bakesbangpol
8	**Pelayanan Kewilayahan**									
266	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Lembang	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Lembang
267	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Lembang	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Lembang
268	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di kec. Lembang	%	100	0	100	100	100	100	100	
269	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Lembang	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Lembang
270	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Lembang	%	100	100	100	100	100	100	100	
271	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Parongpong	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Parongpong
272	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Parongpong	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Parongpong
273	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Parongpong	%	100	0	100	100	100	100	100	
274	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Parongpong	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Parongpong
275	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Parongpong	%	100	100	100	100	100	100	100	
276	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cisarua	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cisarua
277	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cisarua	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cisarua
278	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cisarua	%	100	0	100	100	100	100	100	

279	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cisarua	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cisarua
280	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cisarua	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cisarua
281	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cikalongwetan	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cikalongwetan
282	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cikalongwetan	%	100	100	100	100	100	100	100	
283	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cikalongwetan	%	100	0	100	100	100	100	100	
284	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cikalongwetan	%	100	100	100	100	100	100	100	
285	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cikalongwetan	%	100	100	100	100	100	100	100	
286	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipeundeuy	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cipeundeuy
287	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipeundeuy	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cipeundeuy
288	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipeundeuy	%	100	0	100	100	100	100	100	
289	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipeundeuy	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cipeundeuy
290	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipeundeuy	%	100	100	100	100	100	100	100	
291	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Ngamprah	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Ngamprah
292	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Ngamprah	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Ngamprah
293	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Ngamprah	%	100	0	100	100	100	100	100	
294	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Ngamprah	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Ngamprah
295	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Ngamprah	%	100	100	100	100	100	100	100	
296	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipatat	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cipatat
297	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipatat	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cipatat
298	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipatat	%	100	0	100	100	100	100	100	
299	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipatat	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cipatat

300	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipatat	%	100	100	100	100	100	100	100	
301	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Padalarang	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Padalarang
302	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Padalarang	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Padalarang
303	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Padalarang	%	100	0	100	100	100	100	100	
304	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Padalarang	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Padalarang
305	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Padalarang	%	100	100	100	100	100	100	100	
306	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Batujajar	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Batujajar
307	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Batujajar	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Batujajar
308	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Batujajar	%	100	0	100	100	100	100	100	
309	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Batujajar	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Batujajar
310	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Batujajar	%	100	100	100	100	100	100	100	
311	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cihampelas	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cihampelas
312	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cihampelas	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cihampelas
313	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cihampelas	%	100	0	100	100	100	100	100	
314	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cihampelas	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cihampelas
315	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cihampelas	%	100	100	100	100	100	100	100	
316	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cililin	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cililin
317	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cililin	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cililin
318	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cililin	%	100	0	100	100	100	100	100	
319	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cililin	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cililin
320	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cililin	%	100	100	100	100	100	100	100	

321	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Cipongkor	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cipongkor
322	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Cipongkor	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cipongkor
323	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Cipongkor	%	100	0	100	100	100	100	100	
324	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Cipongkor	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Cipongkor
325	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Cipongkor	%	100	100	100	100	100	100	100	
326	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Rongga	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Rongga
327	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Rongga	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Rongga
328	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Rongga	%	100	0	100	100	100	100	100	
329	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Rongga	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Rongga
330	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Rongga	%	100	100	100	100	100	100	100	
331	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Sindangkerta	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Sindangkerta
332	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Sindangkerta	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Sindangkerta
333	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Sindangkerta	%	100	0	100	100	100	100	100	
334	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Sindangkerta	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Sindangkerta
335	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Sindangkerta	%	100	100	100	100	100	100	100	
336	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Gununghalu	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Gununghalu
337	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Gununghalu	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Gununghalu
338	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Gununghalu	%	100	0	100	100	100	100	100	
339	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Gununghalu	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Gununghalu
340	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Gununghalu	%	100	100	100	100	100	100	100	
341	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kec. Saguling	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Saguling

342	Presentase koordinasi penyelenggaraan trantibum di Kec. Saguling	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Saguling
343	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kec. Saguling	%	100	0	100	100	100	100	100	Kec. Saguling
344	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan di Kec. Saguling	%	100	100	100	100	100	100	100	Kec. Saguling
345	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi di Kec. Saguling	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 – 2030

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Pelayanan Urusan Wajib Dasar**									
1	**Pendidikan**									
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	73,28	76,32	79,36	82,4	85,37	88,34	91,31	IKP Dinas Pendidikan
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,06	98,32	98,59	98,86	99,13	99,4	99,66	IKP Dinas Pendidikan
3	Persentase anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	19,78	23,88	27,97	32,07	36,17	40,27	44,37	IKP Dinas Pendidikan
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00	77,50	Dinas Pendidikan
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,10	58,00	60,90	63,80	66,70	69,60	72,50	Dinas Pendidikan
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	70,13	71,23	72,33	73,43	74,53	75,63	76,73	Dinas Pendidikan
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,99	63,49	64,99	66,49	67,99	69,49	70,99	Dinas Pendidikan
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	44,56	44,76	45,04	45,40	45,83	46,31	46,76	Dinas Pendidikan
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	52,28	64,60	65,35	66,10	66,85	67,60	68,35	Dinas Pendidikan
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	76,12	77,02	77,92	78,82	79,72	80,62	81,52	Dinas Pendidikan
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	70,45	71,95	73,45	74,95	76,45	77,95	79,45	Dinas Pendidikan
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	71,14	72,14	73,14	74,14	75,14	76,14	77,14	Dinas Pendidikan
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	68,63	69,63	70,63	71,63	72,63	73,63	74,63	Dinas Pendidikan
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	59,03	61,53	64,03	66,53	69,03	71,53	74,03	Dinas Pendidikan
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	56,97	59,37	61,77	64,17	66,57	68,97	71,37	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**									
16	Jumlah Kematian Ibu	Orang	112,4	68,1	61,3	51,1	40,9	40,9	20,4	Dinas Kesehatan
17	Prevalensi Stunting	%	30,8	27,75	25,14	22,9	20,97	19,29	17,84	IKU Pemda
18	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	89	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
19	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	88	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
20	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	92	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	92	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
22	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	95	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
23	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	94	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
24	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	88	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
25	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	86	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
26	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
27	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	87	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
28	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	81	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
29	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia sesuai standar	%	66	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
30	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	N/A	0	0	0	0	0	0	Dinas PUTR
31	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob Kab/Kota	%	N/A	0	0	0	0	0	0	Dinas PUTR
32	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	N/A	0	0	0	0	0	0,00	IKP Dinas PUTR
33	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	62	63	63,39	64	64,54	65,35	65,7	Dinas PUTR
34	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kab/kota	%	83,42	83,62	84,07	84,52	84,97	85,42	85,87	Dinas PUTR
35	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	66,26	66,61	67,41	68,21	69,01	69,81	70,61	Dinas PUTR
36	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	40,48	44,82	46,4	48,4	50,4	52,4	54,4	Dinas PUTR
37	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	72,73	74,01	76,36	79,31	82,04	85,3	87,62	IKU Dinas PUTR
38	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wil. kab/kota yg dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	6,18	7,31	16,11	37,14	58,17	79,09	100	IKP Dinas PUTR
39	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan perpu	%	N/A	10	10	25	35	40	45	Dinas PUTR
40	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari	75	60	45	30	30	30	30	Dinas PUTR
41	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang diDaerah Kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUTR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**									
42	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	72,22	100	100	100	100	100	100	Disperkim
43	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	0	100	100	100	100	100	100	Disperkim
44	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	33,57	100	100	100	100	100	100	IKP Disperkim
45	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	23,18	100	100	100	100	100	100	IKP Disperkim
46	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	66,67	100	100	100	100	100	100	Disperkim
5	**Trantibum**									
47	Persentase penyelenggaraan Trantibumlinmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
48	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	IKP Satpol PP
49	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	2	3	4	5	6	7	8	Satpol PP
50	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
51	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan trantibumlinmas	%	36,78	61,40	71,03	80,62	90,37	99,18	100	Satpol PP
52	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	22,5	23,75	38,75	53,75	68,75	83,75	100	Satpol PP
53	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
54	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
55	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
56	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
57	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
58	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	IKP BPBD
59	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	BPBD
60	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	82	84	87	90	93	95	100	Disdamkar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	**Sosial**									
61	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	27,3	13,05	16,46	21,54	30,4	47,9	100	Dinas Sosial
62	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	8,3	7,5	12,8	18,6	29,4	48,6	100	Dinas Sosial
63	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	61,7	11,4	14,3	19,4	28,7	47,9	100	Dinas Sosial
64	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	4,7	7,8	13,3	19,1	28,9	45,2	100	Dinas Sosial
65	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	66	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
66	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
67	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
68	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
69	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
70	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
71	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
72	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	96	98	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
73	Pesentase Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
74	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	5,3	20	40	60	80	90	100	IKP Dinas Sosial

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	**Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar**									
1	**Tenaga Kerja**									
75	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	Disnaker
76	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	8,26	8,79	9,34	9,93	10,55	11,21	11,78	IKP Disnaker
77	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	40,3	40,3	41,50	42,72	43,99	45,30	46,49	Disnaker
78	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	81,45	81,45	82,21	82,95	83,65	84,7	85,44	IKP Disnaker
79	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	100	49,83	86,67	86,59	88,64	91,49	97,56	IKP Disnaker
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
80	Indeks Pembangunan Gender	Poin	81,59	81,89	82,4	82,94	83,5	84,26	84,9	IKU DP2KBP3A
81	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,520	0,510	0,505	0,500	0,495	0,490	0,485	DP2KBP3A
82	Persentase ARG Daerah	%	44,68	45,50	46,25	46,90	47,25	47,90	48,25	DP2KBP3A
83	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yg mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	DP2KBP3A
84	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	IKP DP2KBP3A
3	**Pangan**									
85	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	17,43	48,53	57,89	63,16	68,42	73,68	78,95	DKPP
86	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Score	92,1	92,5	93	93,5	94	94,5	95	IKP DKPP
87	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	12,12	11,52	10,3	9,7	9,09	7,88	6,67	DKPP
88	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	31,33	64,67	98	131,33	164,67	198	220	IKP DKPP
4	**Pertanahan**									
89	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%	NA	0	0	0	0	0	0	Disperkim
90	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	%	NA	45,02	55,29	55,87	57,2	57,76	63,71	Disperkim

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
91	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	%	N/A	0	0	0	0	0	0	Disperkim
92	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	%	NA	NA	100	100	100	100	100	Disperkim
93	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	40	40	50	50	70	70	70	Disperkim
94	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	N/A	0	0	0	0	0	0	Disperkim
95	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	N/A	0	0	0	0	0	0	Disperkim
96	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	N/A	0	0	0	0	0	0	Disperkim
97	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	N/A	0	0	0	0	0	0	Disperkim
5	**Lingkungan Hidup**									
98	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,43	59,59	59,84	60,09	60,34	60,60	60,86	IKU Pemda
99	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	40,1	41	42	43	44	45	46	IKU DLH
100	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	N/A	60	64	66	68	70	72	DLH
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
101	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	IKP Disdukcapil
102	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
103	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
104	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	90,96	91,25	91,75	92,30	92,85	93,25	93,60	Disdukcapil
105	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	Disdukcapil
106	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	27	28	30	32	34	36	38	IKP Disdukcapil
107	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	10,3	12	13	14	15	16	17	IKP Disdukcapil

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
108	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	3	6	8	10	12	14	DPMD
109	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	33,33	45	57	69	81	93	96	IKP DPMD
110	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	33,33	45	57	69	81	93	96	IKP DPMD
111	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	100	85	87,5	90	92,5	95	95	DPMD
112	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	N/A	6,25	25	50	75	100	100	DPMD
8	**Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana**									
113	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	angka	2,15	2,14	2,13	2,12	2,11	2,1	2,09	IKP DP2KBP3A
114	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	71,8	71,83	71,85	71,9	71,9	71,95	71,95	IKP DP2KBP3A
115	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,07	11,05	11	10,9	10,9	10,8	10,8	IKP DP2KBP3A
116	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	21	21	20,99	20,98	20,97	20,96	20,95	IKP DP2KBP3A
117	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	N/A	43,85	44,2	44,64	44,89	45	45,2	IKT Pemda / DP2KBP3A
9	**Perhubungan**									
118	Rasio Konektivitas	%	70,49	70,49	76	80,96	92,77	95,7	98,26	IKU Dishub
119	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kab/Kota	%	24,09	44,58	48,7	52,81	56,92	61,03	65,14	Dishub
120	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	0	0	6,25	12,5	18,75	31,25	31,25	Dishub
10	**Komunikasi dan Informatika**									
121	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfotik
122	Persentase PD di tingkat Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfotik
123	Persentase PD yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	10	19	38	57	76	95	100	Diskominfotik

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	**Koperasi dan UKM**									
124	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0,51	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	Diskop UKM
125	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	58,9	60	62	64	66	68	70	Diskop UKM
126	Pertumbuhan Wirausaha	%	1	2,4	2,5	2,58	2,6	2,63	2,7	IKP Diskop UKM
12	**Penanaman Modal**									
127	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	N/A	2,8	3,0	3,3	3,6	3,8	4,1	DPMPTSP
128	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	N/A	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
13	**Kepemudaan dan Olahraga**									
129	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	N/A	0,54	0,75	1	1,25	1,50	1,75	Dispora
130	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	N/A	7,7	7,9	7,9	7,10	7,11	7,12	Dispora
14	**Statistik**									
131	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,66	2,67	2,76	2,84	2,9	2,96	3,01	IKU Diskominfotik
15	**Persandian**									
132	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	45	49	54	60	65	70	71	Diskominfotik
16	**Kebudayaan**									
133	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	0,25	0,59	0,59	0,68	0,68	0,76	0,76	Disparbud
134	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	16,67	16,67	16,67	25,00	25,00	33,33	33,33	IKP Disparbud
135	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	%	N/A	7,63	7,63	8,40	9,16	9,92	10,69	Disparbud
17	**Perpustakaan**									
136	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	64,74	65,50	65,75	66,00	66,25	66,50	66,50	IKP Disarpus
137	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	60,3	61,5	61,6	61,7	61,9	62	62	IKU Disarpus
18	**Kearsipan**									
138	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	71,17	72,20	73	73,60	74,30	75	75,7	Disarpus

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	**Pelayanan Urusan Pilihan**									
1	**Kelautan dan Perikanan**									
139	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	220	226	234	241	248	255	263	IKP Dispernakan
140	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	51585	53133	54727	56368	58059	59801	61595	IKP Dispernakan
2	**Pariwisata**									
141	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	N/A	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	Disparbud
142	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	N/A	5	5	5	5	5	5	Disparbud
143	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	1,30	2,67	3,33	4,00	4,67	5,33	6,00	Disparbud
3	**Pertanian**									
144	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	17,11	19,51	21,64	23,60	25,62	27,63	29,64	IKU DKPP
145	Peningkatan Produksi pertanian tanaman hortikultura (sayuran, biofarmaka dan buah-buahan serta tanaman hias	%	1,6	3,93	6,27	8,72	11,10	13,70	16,05	IKU DKPP
146	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	2	2	2	2	2	2	2	IKP Dispernakan
147	Peningkatan Produksi pertanian tanaman perkebunan	%	118,59	122,66	126,35	130,23	134,11	137,99	141,88	IKU DKPP
148	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	75	77,5	80	82,5	85	87,5	90	DKPP
149	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	85	85	100	100	100	100	100	IKP Dispernakan
4	**Perdagangan**									
150	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Nilai	N/A	138.351.938	138.804.826	139.257.714	139.710.602	140.163.491	140.616.379	Disperindag
151	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	59,01	51,4	52,42	52,94	53,36	54,78	56,04	Disperindag

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	**Perindustrian**									
152	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	N/A	4	4	4	4	4	4	Disperindag
153	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	N/A	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	3,8	IKP Disperindag
154	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	%	N/A	30	40	45	55	60	65	Disperindag
155	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	N/A	33	40	45	50	55	60	Disperindag
156	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	25	35	40	45	50	55	60	IKP Disperindag
6	**Transmigrasi**									
4	**Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan**									
1	**Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah**									
157	Skore Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	22,18	24,08	25,98	27,88	28,88	29,38	30	Setda
158	Skore Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	23,33	24	25	26	27	28	30	Setda
159	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	100	100	100	100	100	100	100	IKP Setda
2	**Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD**									
160	Ketepatan penetapan perda APBD Tahun n	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	IKP Sekretariat DPRD
161	Presentase pembentukan Ranperda Tahun n	%	67	100	100	100	100	100	100	IKP Sekretariat DPRD
5	**Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan**									
1	**Perencanaan**									
162	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	95,6	100	100	100	100	100	100	IKP Bappelitbangda
2	**Keuangan**									
163	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	38	38	37	36	35	34	30	IKP BKAD
164	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	N/A	5	5	5	5	5	5	IKU Bapenda
165	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	IKP BKAD

NO	URUSAN PEMERINTAHAN / INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Baseline Tahun 2024	Target						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
166	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	0,15	2	2	2	2	2	2	IKP BKAD
167	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	24,22	25	30	35	40	40	40	IKP BKAD
168	Persentase Penurunan SILPA	%	100	15	15	15	15	15	15	IKP BKAD
3	**Kepegawaian**									
169	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Nilai	95,47	95,49	95,51	95,53	95,55	95,58	95,61	BKPSDM
4	**Pendidikan dan Pelatihan**									
5	**Penelitian dan Pengembangan**									
170	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
171	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Bappelitbangda
6	**Program Penunjang Urusan**									
6	**Pelayanan Pengawasan**									
172	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU BKAD
173	Maturitas SPIP	Skor	3	3	3	3	3	3	3	IKU Itda
174	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	IKP Itda
175	Indeks Manajemen Risiko	Poin	2,816	2,85	2,90	2,95	3,00	3,05	3,10	Itda
176	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	76,7	76,7	77	77,5	78	78,5	79	IKP Itda
7	**Pelayanan Pemerintahan Umum**									
8	**Pelayanan Kewilayahan**									
177	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, 2025

5 PENUTUP

Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Bandung Barat dijabarkan dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih Jeje Ritchie Ismail – Asep Ismail sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat periode 2025- 2030 yang berkomitmen untuk mewujudkan Visi Bandung Barat "**AMANAH" (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis)** yang mengandung makna bahwa sikap dan perilaku dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan keterlibatan selutuh potensi sumber daya manusia yang dapat mengemban kepercayaan masyarakat. Visi tersebut diterjemahkan kedalam 6 (enam) Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 – 2029 yaitu (1) Meningkatkan Kualitas SDM Unggul yang Berakhlak dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan Daerah; (3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Inovatif, Transparan dan Akuntabel; (4) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan aksebilitas Wilayah; (5) Meningkatkan Lingkungan hidup yang Tangguh dan Berkelanjutan dan (6) Mewujudkan Kondisi yang Harmonis di Masyarakat Sesuai Kearifan Budaya Lokal.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat mendukung terwujudnya Bandung Barat **"AMANAH" (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis)** dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahun pertama RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2045 dengan tema "Penguatan Pondasi Kesejahteraan Masyarakat" untuk mewujudkan Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan
2. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029
3. RPJMD Kabupaaaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sehingga diharapkan muatan substansi dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dapat dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
4. RPJMD Kabupaaaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan Daerah (RKPD dan Renja PD).
5. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan antara pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat diperlukan penyelarasan RPJMD Kabupaten Bandung Barat dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta RPJMN. Penyelarasan dilakukan terhadap substanti kinerja dan periodisasinya dengan maksud bahwa RPJMD tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih sekaligus juga merupakan bagian dari upaya untuk mendukung seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode tahun 2025-2029 serta sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian Jabar Istimewa (Lembur diurus Kota Ditata)
6. Dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui pembiayaan dari APBD Provinsi atau APBN, skema kerjasama dengan Badan Usaha (Public Private Partnership), Corporate Social Responbility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkngan (PKBL), maupun Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undanganan yang berlaku.

RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 pada pelaksanaannya dilakukan pengendalian dan evaluasi untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan menyesuaikan dengan perubahan atau dinamika yang terjadi dengan melibatkan dan dukungan dan keterlibatan multipihak.

Dalam implementasinya RPJMD Kabupaten Bandung Barat Barat Tahun 2025-2029 perlu mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditepakan perlu adanya manajemen risiko untuk mencegahnya yang bertujuan untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko, namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko (menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko) yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, untuk dapat mengurangi *impact* atau *probability* atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi.